



EXECUTIVE SUMMARY



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya lah, kita dapat menyelesaikan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang akan menyertai setiap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam Dokumen Perubahan RPJMD sehingga dapat dimanfaatkan dalam mengintegrasikan indikator TPB kedalam Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 – 2023.

Adanya pandemi COVID-19 saat memasuki tahun kedua masa RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan belanja daerah dan pembiayaan, sehingga harus dilakukan serangkaian upaya penyelamatan kesehatan masyarakat dan perekonomian daerah.

Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023 menetapkan berbagai asumsi dalam menyusun dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, yang lebih responsif dan menekankan pada proses pengambilan keputusan sistematis yang berfokus pada isu-isu kekinian seperti terjadinya *pandemic COVID 19*.

Secara garis besar Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kota Bekasi ini membahas mengenai pendahuluan, kondisi daerah, capaian TPB Kota Bekasi, skenario kondisi lingkungan dan pencapaian TPB, hasil perumusan isu pembangunan strategis dan perumusan rekomendasi.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sekalian untuk bersama-sama melakukan yang terbaik bagi Kota Bekasi sehingga visi “Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan” dapat tercapai.

Bekasi,

WALI KOTA BEKASI

RAHMAT EFFENDI

LATAR BELAKANG

Penyusunan KLHS perubahan RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023 di dasarkan pada:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
2. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pasal 2 ayat (2) TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
3. Peraturan menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pasal 2 ayat (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031.
7. Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 mendasarkan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*"
8. Implikasi pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan penerimaan daerah, dan peningkatan belanja daerah dan pembiayaan sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah daerah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian daerah.
9. Bencana Banjir yang melanda beberapa permukiman warga serta pusat perbelanjaan dan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga amat mengganggu kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan di sebagian besar wilayah Kota Bekasi.

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud penyusunan KLHS perubahan RPJMD Kota Bekasi adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Tujuan yang ingin dicapai pada penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis perubahan RPJMD Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

1. KLHS Perubahan RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam Perubahan RPJMD
2. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan dalam penyusunan Perubahan RPJMD
3. Mengarahkan, memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk Perubahan RPJMD.

Sasaran penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi adalah: menyediakan perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang sudah didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

RUANG LINGKUP WILAYAH KAJIAN

Ruang lingkup lokasi pekerjaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD adalah Kota Bekasi yang merupakan salah satu wilayah bagian dari Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah sekitar 213,12 km² atau 21.312 ha, terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri dari 56 kelurahan.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN KLHS

Dasar hukum dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
5. Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2018 Penyusunan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031
9. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

HAMBATAN DAN KUNCI KEBERHASILAN

A. Hambatan

Dalam proses KLHS dari tahap awal hingga akhir, terdapat beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan penyusunan KLHS Perubahan RPJMD Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Ketidaklengkapan data SLHD (Status Lingkungan Hidup Daerah) Kota Bekasi yang digunakan untuk baseline data;
2. Terbatasnya data-data capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan;
3. Dinas/OPD belum sepenuhnya tahu tentang data – data SDGs;
4. Pemahaman Dinas/pokja tentang tujuan pembangunan berkelanjutan dan target SDGs yang harus di capai masih terbatas.

B. Kunci Keberhasilan

Dalam proses KLHS dari tahap awal hingga akhir, terdapat kunci keberhasilan dalam pelaksanaan penyusunan KLHS adalah keterlibatan pokja dan SKPD terkait, kerjasama antara tim penyusun KLHS dan Penyusun RPJM serta ada partisipasi masyarakat. Proses keterlibatan tim pokja, SKPD terkait dan kerjasama antara tim penyusun KLHS dan Penyusun Perubahan RPJM sangatlah menunjang dalam keberhasilan tersusunnya KLHS Perubahan RPJMD selain itu partisipasi, negosiasi, dan kolaborasi antara masyarakat dalam penyusunan KLHS sangat penting karena dengan adanya partisipasi berbagai pihak akan mendorong terkumpulnya informasi, wawasan, dan pengetahuan mengenai keadaan dan permasalahan wilayahnya yang pada akhirnya berguna untuk merumuskan isu-isu strategis prioritas, merumuskan keo capaian TPB sesuai dengan target nasional dan merumuskan penyempurnaan rekomendasi kebijakan dan program yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Bekasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai matriks ringkasan *Executive Summary* KLHS Perubahan RPJMD Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

TUJUAN 1:		MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN					
TARGET 1.2		Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional					
1	ISU STRATEGIS	Penguatan Perekonomian					
2	INDIKATOR	Baseline	Rata-Rata			(r)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	4,11 (Tahun 2019)		√		0,27	1. Skenario : Tingkat kemiskinan Kota Bekasi sebelum terjadinya pandemic covid 19 lebih rendah di bandingkan dengan tingkat kemiskinan yang di tetapkan SDGs sebesar 7%, Namun setelah terjadinya bencana banjir dan pandemic Covid, tingkat kemiskinan melebihi target SDGs sehingga perlu upaya-upaya tambahan untuk menurunkan angka kemiskinan sesuai target nasional dan target RPJM kota Bekasi sebesar 4,01% pada tahun 2023 2. Strategi dan arahan kebijakan, meliputi : a. Meningkatkan lapangan pekerjaan b. Mengembangkan ekonomi kreatif untuk membuka peluang usaha/pekerjaan 3. Outcome Menurunnya presentase angka kemiskinan
3	PERMASALAHAN						
	Tingkat kemiskinan di Kota Bekasi hingga tahun 2018 mencapai 4.11 %, Namun dengan adanya bencana banjir dan juga bencana pandemic covid 19 angka kemiskinan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 8,56%						
4	SASARAN STRATEGIS						
	Penurunan angka kemiskinan di bawah target nasional						
5	REKOMENDASI						
	1. Program penanganan dampak Covid 19 meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendataan dan validasi Penduduk Miskin dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem layanan rujukan terpadu ▪ pemberdayaan masyarakat miskin melalui bantuan modal dan keterampilan usaha kreatif ▪ program bantuan pangan warga miskin serta penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin 2. Program pengembangan dan peningkatan UMKM melalui: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro; ▪ Peningkatan dan pengembangan kewirausahaan; ▪ Pelatihan peningkatan usaha dan pemasaran secara online 						
6	PENDANAAN :						
	1. Pihak Pemerintah <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas Sosial b. Dinas UMKM c. Dinas Tenaga Kerja 2. Pihak Non Pemerintahan <ol style="list-style-type: none"> a. Swasta/CSR 						

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

TUJUAN 1:		MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN					
TARGET 1.4		Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro					
1	ISU STRATEGIS	peningkatan layanan air bersih dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan					
2	INDIKATOR	Baseline	Rata-Rata			(r)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	1.4.1 (e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	98,94 % (Tahun 2018)		√		0,19	1. Skenario : a. Meningkatkan presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan sebesar 100%.; b. Target kawasan kumuh 0% 2. Strategi dan arahan kebijakan : Pembangunan dan pengembangan penyediaan layanan sanitasi layak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (air minum, persampahan, limbah dan jaringan drainase) 3. Outcome : Terpenuhinya akses terhadap layanan sanitasi layak bagi seluruh masyarakat
3	PERMASALAHAN						
	1. Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani sebesar 29,07% tahun 2018 2. Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestic baru mencapai 3,39% (tahun 2018) 3. Sistem pengelolaan persampahan yang belum optimal dimana cakupan Area Pelayanan baru mencapai 70,00% kondisi daya dukung jasa ekosistem pengelola dan penguraian limbah sangat rendah 57,5 % dan 26,19 %						
4	SASARAN STRATEGIS						
	Meningkatkan akses pada pelayanan sanitasi layak hingga 100%.						
5	REKOMENDASI						
	penyediaan sanitasi layak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (air minum, persampahan, limbah dan jaringan drainase) melalui: 1. Peningkatan penangan kawasan kumuh pada lokasi-lokasi yang belum tertangani 2. Penataan kawasan kumuh secara simultan Sosialisasi dan pendampingan program sanimas; 3. Peningkatan jaringan air minum sistem perpipaan 4. Pembangunan dan peningkatan sistem pengelolaan limbah padat dan cair secara terpadu; 5. Membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan jaringan prasarana dan sarana dasar perkotaan; 6. Pembangunan prasarana dan utilitas kota secara terpadu. 7. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terintegrasi dan terhubung langsung dengan sungai dan saluran						
6	PENDANAAN :						
	1. Pihak Pemerintah a. Dinas Perkimtan b. DBMSDA c. DLH 2. Pihak Non Pemerintahan a. Swasta/CSR						

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

TUJUAN 2 :		MENGHENTIKAN KELAPARAN, MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DAN NUTRISI SERTA MEMPROMOSIKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN					
TARGET 2.2		Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula					
1	ISU STRATEGIS	Daya Dukung dan Daya Tampung					
2	INDIKATOR	Baseline	Rata-Rata			(r)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	42,5 % (Tahun 2019)		√		0,40	1. Skenario : Meningkatan Skor Pola Pangan Harapan sampai dengan 92,5% sesuai dengan skor pola pangan harapan nasional; 2. Strategi dan arahan kebijakan, meliputi : Menjalin pola kerjasama dengan kabupaten yang memiliki dayadukung pangan surplus untuk pemenuhan kebutuhan pangan Kota Bekasi 3. Outcome Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat
3	PERMASALAHAN						
	1. kondisi daya dukung ketersediaan pangan defisit 2. Jasa ekosistem penyedia pangan di katagorokan sangat rendah 3. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan pokok/ beras; 4. Masih rendahnya ketersediaan pangan utama; 5. Skor Pola Pangan Harapan masih di bawah target nasional yaitu baru mencapai 87,4% (tahun 2019) 6. Persentase Penanganan kerawanan pangan baru mencapai 69,58%						
4	SASARAN STRATEGIS						
	Meningkatan Skor Pola Pangan Harapan harapan nasional;						
5	REKOMENDASI						
	1. Menjalin pola kerjasama dengan kabupaten yang memiliki daya dukung pangan surplus untuk pemenuhan kebutuhan pangan Kota Bekasi; 2. Pengembangan dan penerapan Urban Farming dengan pengembangan kampung hidroponik. 3. Mengoptimalkan fungsi RTH privat sebagai penghasil pangan; 4. Mempertahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 5. Meningkatkan produktivitas padi/ha pada lahan LP2B. 6. Membudayakan diversifikasi dan ketahanan 7. Pemberian insentif bagi pemilik lahan pertanian berupa keringanan PBB, bantuan saprotan (sarana Prorduksi pertanian), dan pelatihan pemasaran 8. Program Penanganan Kerawanan Pangan						
6	PENDANAAN :						
	1. Pihak Pemerintah a. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2. Pihak Non Pemerintahan a. Swasta/CSR						

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

TUJUAN 3 :		MEMJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA					
TARGET 3.1		Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.					
1	ISU STRATEGIS	Peningkatan Pelayanan Kesehatan					
2	INDIKATOR	Baselin e	Rata-Rata			(r)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	88 % (Tahun 2017)		√		0,28 %	1. Skenario : Meningkatkan proporsi pernah kawin umur 15- 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih sesuai target nasional 95% 2. Strategi dan arahan kebijakan, meliputi : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan SDM, dan pengembangan sistem layanan kesehatan. 3. Outcome Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi ibu melahirkan
3	PERMASALAHAN						
	proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih baru mencapai 88%						
4	SASARAN STRATEGIS						
	Meningkatkan proses melahirkan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih						
5	REKOMENDASI						
	1. Meningkatkan kinerja layanan kesehatan kepada ibu hamil dan melahirkan ; 2. meningkatkan kinerja layanan kesehatan untuk balita; 3. penyuluhan kesehatan ibu hamil dan balita secara simultan. 4. Penguatan dan peningkatan layanan posyandu untuk pemeriksaan ibu hamil dan balita 5. meningkatkan kualitas SDM/Tenaga medis						
6	PENDANAAN :						
	1. Pihak Pemerintah a. Dinas Kesehatan 2. Pihak Non Pemerintahan a. Swasta/CSR						

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

TUJUAN 3 :		MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA					
TARGET 3.2		Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.					
1	ISU STRATEGIS	Peningkatan Pelayanan Kesehatan					
2	INDIKATOR	Baseline	Rata-Rata			(r)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) dan kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran anak.	1,12 (Tahun 2017)		√		1. Skenario : Menurunkan proporsi angka kematian balita sesuai dengan target nasional sebesar 0% 2. Strategi dan arahan kebijakan, meliputi : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan SDM, dan pengembangan sistem layanan kesehatan. 3. Outcome Tercapainya target nasional 0% untuk angka kematian balita	
	3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	0,989 (Tahun 2019)		√	0,05		
	3.2.2 (a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran anak.	1,17 (Tahun 2019)		√	001		
3	PERMASALAHAN						
	Angka kematian balita dan kematian balita per1000 kelahiran anak masih di atas target nasional						
4	SASARAN STRATEGIS						
	Mengakhiri kematian bayi dan balita per1000 kelahiran anak sesuai target nasional						
5	REKOMENDASI						
	1. Meningkatkan kinerja layanan kesehatan kepada ibu hamil dan melahirkan ; 2. meningkatkan kinerja layanan kesehatan untuk balita; 3. penyuluhan kesehatan ibu hamil dan balita secara simultan. 4. Penguatan dan peningkatan layanan posyandu untuk pemeriksaan ibu hamil dan balita 5. meningkatkan kualitas SDM/Tenaga medis						
6	PENDANAAN :						
	1. Pihak Pemerintah a. Dinas Kesehatan 2. Pihak Non Pemerintahan a. Swasta/CSR						

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

TUJUAN 4 :		MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA					
TARGET 4.1		Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.					
1	ISU STRATEGIS	Peningkatan Pelayanan Pendidikan					
2	INDIKATOR	Baseline	Rata-Rata			(r)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	4.1.1 (a) Presentase SD/MI berakreditasi minimal B	80,8 % (Tahun 2019)		√		0,30	1. Skenario : Perlu upaya tambahan untuk a. Meningkatkan capaian APK tingkat pendidikan Paud, SD/SMP sederajat sesuai target nasional; b. Peningkatan kualitas pendidikan lebih merata 2. Strategi dan arahan kebijakan, meliputi : a. Meningkatkan layanan pendidikan non formal b. Meningkatkan layanan pendidikan dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital 3. Outcome Tercapainya Nilai APK sesuai target nasional
	4.1.1 (b) Presentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	74,5 % (Tahun 2019)		√		0,32	
	4.1.1 (c) Presentase SMA/MA berakreditasi minimal B	75,7 % (Tahun 2019)		√		0,20	
	4.1.1 (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ Sederajat	110,54 % (Tahun 2019)		√		0,18	
	4.1.1 (e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Sederajat	94,81 % (Tahun 2019)		√		0,19	
3	PERMASALAHAN	1. Sarana pendidikan yang berakreditasi minimal B belum mencapai target nasional; 2. Nilai APK SMP/MTs/ sederajat dari 95,32 pada tahun 2017 menurun menjadi 94,81% namun demikian Nilai APK selama kurun waktu 1 tahun meningkat, hal ini tergambar dari: a. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat dari 95,32% pada tahun 2017 meningkat menjadi 110% pada tahun 2019, b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat dari 75,89% pada tahun 2017 meningkat menjadi 107% pada tahun 2019 ; c. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meningkat menjadi 92,75% tahun 2019					
4	SASARAN STRATEGIS	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang merata					
5	REKOMENDASI	1. Program pendidikan dan tenaga pendidik meliputi kegiatan a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (formal dan non formal) b. peningkatan pelayanan pendidikan berbasis IT; c. Peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan yang menghasilkan lulusan yang bersertifikasi; 2. Program Pengelolaan pendidikan melalui kegiatan: a. pemberian bantuan biaya pendidikan kepada sekolah/mahasiswa berprestasi yang kurang mampu; pengembangan sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal. b. Peningkatan kemampuan akses terhadap internet (hardware dan software) bagi pelajar dan mahasiswa					
6	PENDANAAN :	1. Pihak Pemerintah a. Dinas Pendidikan 2. Pihak Non Pemerintahan a. Swasta/CSR					

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

TUJUAN 6:		MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK YANG BERKELANJUTAN					
TARGET 6.1		Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua					
1	ISU STRATEGIS	Peningkatan layanan air bersih dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan					
2	INDIKATOR	Base-line	Rata-Rata			(r)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	6.1.1 (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak;	98,94 % (Tahun 2019)		√		0,27	1. Skenario : Perlu adanya upaya tambahan agar: a. Meningkatkan presentase penduduk berakses air minum yang baru mencapai 31,32% sampai akhir tahun 2023 sehinggakan untuk mencapai target nasional yaitu berakses air minum 100% perlu upaya tambahan; b. Mempertahankan daya dukung air sehingga tidak terus menurun; c. menurunkan Tingkat pencemaran air permukaan sebagai salah satu sumber air baku 2. Strategi dan arahan kebijakan, meliputi : a. Mengembangkan dan meningkatkan akses terhadap layanan sumber air minum yang layak b. Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan air permukaan sebagai sumber air baku 3. Outcome a. Terpenuhinya kebutuhan sumber air minum layak dan aman bagi masyarakat b. Penurunan tingkat pencemaran air sungai
	6.1.1 (c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	39 % (Tahun 2019)		√		0,26	
3	PERMASALAHAN						
	1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum 26,7% tahun 2018 2. Daya dukung dan daya tampung ketersediaan air akan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan yang membutuhkan ketersediaan air; 3. Kondisi Jasa ekosistem penyedia air di Kota Bekasi pada umumnya di katagorikan sangat rendah sebesar 70%, katagori sedang sebesar 17,40%; 4. Daya dukung jasa ekosistem pemurnian air pada umumnya rendah sekitar 54,6 % dan sedang 34,55 %.						
4	SASARAN STRATEGIS						
	1. pemerataan dan pemenuhan kebutuhan air minum layak sesuai target nasional 2. Pemenuhan kebutuhan air dari sumber air berkelanjutan						
5	REKOMENDASI						
	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem pengelolaan Air Minum melalui kegiatan: a. Pembangunan/ Peningkatan/Perluasan /Perbaikan SPAM Pemerintah (PDAM Kota Bekasi) b. Pembangunan /Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM Swasta c. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM d. Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM e. Operasi dan Pemeliharaan SPAM f. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM g. membangun kerjasama dengan berbagai pihak unntuk pembangunan dan peningkatan jaringan SPAM						

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

	<p>h. pengembangan SPAM non PDAM/Swasta di prioritaskan untuk wilayah-wilayah yang belum terlayani sistem penyediaan air minum sistem perpipaan</p> <p>2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Air Baku melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pembangunan pola kerjasama dengan kabupaten lain untuk penyediaan airb. Pembangunan Instalasi penyediaan dan pengolahan air baku;c. pencegahan beban pencemar pada air dari kegiatan industri dan rumah tangga;d. Penerapan sistem produksi bersih pada kegiatan industri agar dapat menghemat penggunaan air bakue. peningkatan penangkapan air melalui revitalisasi dan pembangunan embung/polder;
6	<p>PENDANAAN :</p> <ul style="list-style-type: none">1. Pihak Pemerintah<ul style="list-style-type: none">a. DISPERKIMTANb. PDAMc. DBMSDAd. SDA Provinsie. BBWS CCf. PJT II2. Pihak Non Pemerintahan<ul style="list-style-type: none">a. swastab. IUWASH

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

TUJUAN 6:		MEMJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK YANG BERKELANJUTAN					
TARGET 6.2		Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan					
1	ISU STRATEGIS	Peningkatan layanan air bersih dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan					
2	INDIKATOR	Base-line	Rata-Rata			(r)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	6.2.1 (b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	90,94 % (Tahun 2019)		√		0,23	1. Skenario : Berdasarkan hasil perhitungan rate BAU, laju pertumbuhan tingkat layanan sanitasi 0,23 %/tahun maka pada tahun 2023 target yang akan di capai sebesar 91,88 %sehingga untuk mencapai target nasional 100% 2. Strategi dan arahan kebijakan, meliputi : Pembangunan dan pengembangan penyediaan layanan sanitasi layak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (air minum, persampahan, limbah dan jaringan drainase) 3. Outcome Terpenuhinya akses terhadap layanan sanitasi layak bagi seluruh masyarakat
3	PERMASALAHAN						
	1. Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestic baru mencapai 3,39% (tahnun 2018) 2. Sistem pengelolaan persampahan yang belum optimal dimana cakupan Area Pelayanan baru mencapai 70,00% 3 3. kondisi daya dukung jasa ekosistem pengelola dapenguraian limbah sangat rendah 57,5 % dan 26,19 %						
4	SASARAN STRATEGIS						
	Meningkatkan akses pada pelayanan sanitasi layak hingga 100%						
5	REKOMENDASI						
	Program peningkatan penyediaan sanitasi layak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (air minum, persampahan, limbah dan jaringan drainase) melalui: 1. Peningkatan penanganan kawasan kumuh pada lokasi-lokasi yang belum tertangani 2. Penataan kawasan kumuh secara simultan 3. Sosialisasi dan pendampingan program sanimas; 4. Peningkatan jaringan air minum sistem perpipaan 5. Pembangunan dan peningkatan sistem pengelolaan limbah padat dan cair secara terpadu; 6. Membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan jaringan prasarana dan sarana dasar perkotaan; 7. prasarana dan utilitas kota secara terpadu. 8. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terintegrasi dan terhubung langsung dengan sungai dan saluran						
6	PENDANAAN :						
	1. Pihak Pemerintah a. DISPERKIMTAN b. PDAM c. DBMSDA d. DLH 2. Pihak Non Pemerintahan a. swasta b. IUWASH						

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

TUJUAN 8 :		MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA					
TARGET 8.1		Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.					
1	ISU STRATEGIS	Penguatan Perekonomian					
2	INDIKATOR	Base-line	Rata-Rata			(r)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	8.1.1 (a) PDB perkapita/tahun	Rp 32.756. 201,00 (tahun 2019)		√		RP. 2.471 .240	1. Skenario : perlu adanya upaya tambahan untuk mencapai target nasional 2. Strategi dan arahan kebijakan, yaitu : Membuat kebijakan investasi dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan kesempatan kerja 3. Outcome Tercipta Iklim Usaha Yang Berdaya Saing
3	PERMASALAHAN						
	1. Laju pertumbuhan PDB perkapita pada tahun 2017 baru mencapai 3,05 % 2. Menurunnya kemandirian ekonomi daerah. 3. Dampak adanya pandemic covid: a. Laju pertumbuhan ekonomi menurun; b. prosentase peningkatan PDA di prediksi akan menurun;						
4	SASARAN STRATEGIS						
	Meningkatkan laju pertumbuhan PDB perkapita lebih tinggi dari target nasional						
5	REKOMENDASI						
	1. Meningkatkan PDRB per kapita sesuai target nasional; 2. Melakukan efisiensi belanja daerah; 3. Mencari sumber pertumbuhan baru dari perekonomian berbasis kreatif; 4. Pemberiaan stimulus PBB (pajak Bumi Dan Bangunan) kepada masyarakat berpenghasilan rendah; 5. peningkatan dan perluasan basis data pajak dan redistribusi daerah 6. Digitasi platpom pelayanan pajak dan redistribusi daerah 7. peningkatan dan pengutan kompetisi dan skill integritas SDM operator pajak dan redistribusi daerah 8. peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah melalui pengelolaan sumberdaya daerah secara lebih profesional 9. Penyempurnaan sistem dan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah 10. Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional. 11. Peningkatan kemampuan pemasaran dan usaha secara online						
6	PENDANAAN :						
	1. Pihak Pemerintah a. Bapenda b. Disdegperin 2. Pihak Non Pemerintahan a. swasta						

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

TUJUAN 8 :		MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA					
TARGET 8.5		Mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas dan upah yang sama untuk pekerja yang sama nilainya					
1	ISU STRATEGIS	Penguatan Perekonomian					
2	INDIKATOR	Base-line	Rata-Rata			(r)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	8.5.2 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (angka pengangguran terbuka)	8,2 (tahun 2019)		√		0,29	1. Skenario Perlu upaya tambahan untuk menurunkan angka pengangguran lebih rendah dari target nasional (5,5 %) 2. Strategi dan arahan kebijakan, yaitu : Membuat kebijakan investasi dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan kesempatan kerja 3. Outcome Tercipta Iklim Usaha Yang Berdaya Saing
3	PERMASALAHAN						
	1. Masih tingginya tingkat pengangguran yaitu sebesar 8,20 % (tahun 2020) 2. Dampak dari adanya pandemi Covid angka pengangguran akan cenderung naik/meningkat						
4	SASARAN STRATEGIS						
	Menurunkan angka pengangguran lebih rendah dari tingkat pengangguran nasional						
5	REKOMENDASI						
	1. Peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru UMKM, UMKM Online, Startup; 2. penyelenggaraan bursa tenaga kerja; 3. pengembangan industri kreatif untuk membuka peluang kerja; 4. Memasukan indikator program pembangunan untuk membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas ; 5. Memberikan upah yang sama bagi pekerjaan penyandang disabilitas sesuai dengan UMR yang telah di tetapkan; 6. membuka peluang pekerjaan dari berbagai sektor yang potensial 7. Peningkatan kompetensi dan kapasitas wirausaha dalam bentuk pelatihan 8. Membuat aplikasi berbasis mobile yang berisi data dan informasi UMKM yang ada di Kota Bekasi sekaligus tersedia menu untuk membeli produk UMKM tersebut 9. Penyelenggaraan Job fair yg sesuai dengan kebutuhan pasar dan backgroun						
6	PENDANAAN :						
	1. Pihak Pemerintah a. Dinas UMKM b. Dinas Ketenakerjaan 2. Pihak Non Pemerintahan b. swasta						

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

TUJUAN 9 :		MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN				
TARGET 9.2		Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.				
1	ISU STRATEGIS	penguatan Perekonomian				
2	INDIKATOR	Base-line	Rata-Rata			(t)
			Mean	Median	Modus	Tahun 2030
	9.2.1 (a) Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	3,71 (tahun 2019)		√		1. Skenario a. Meningkatkan laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB nasional (4,3%); b. Mempertahankan kontribusi sector industri terhadap PDRB jangan sampai di bawah standar nasional 2. Strategi dan arahan kebijakan, yaitu : Pengembangan an dan pembangunan industri manufaktur berdaya saing 3. Outcome Tercapainya laju pertumbuhan PDB industri lebih tinggi dari pertumbuhan PDB industri nasional
3	PERMASALAHAN					
	1. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (di Kota Bekasi selama kurun waktu 5 tahun (2013-2017) yang terus menurun, dari data LPP ndustri manupaktur tahun 2018 sebesar 3,71% kontribusi sektor industri terhadap PDRB dalam beberapa tahun terakhir terus menurun. 2. Pada tahun 2013 sektor ini mampu menyumbang sebesar 36,34 persen (Rp20,97 triliun), namun merosot hingga 35,19 persen tahun 2015 dan kemudian 26,58 (tahun 2017)					
4	SASARAN STRATEGIS					
	Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur dan mempertahankan kontribusi sector industri terhadap PDRB					
5	REKOMENDASI					
	1. Meningkatkan jumlah industri manufaktur; 2. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri kreatif dan inovatif ; 3. Pengembangan industri yang mampu menjaga ekosistem, memelihara sumber daya yang berkelanjutan; 4. peningkatan infrastruktur industri; 5. Program peningkatan kualitas SDM dalam sektor industri; 6. Program peningkatan daya saing industri. 7. Pengembangan saint dan kreatif centre					
6	PENDANAAN :					
	1. Pihak Pemerintah a. Disdegperin 2. Pihak Non Pemerintahan a. swasta					

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

TUJUAN 11 :		MENJADI KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN					
TARGET 11.1		Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.					
1	ISU STRATEGIS	peningkatan layanan air bersih dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan					
2	INDIKATOR	Base-line	Rata-Rata			(r)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	11.1.1 (a) Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal didaerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	10,53 %		√		<ol style="list-style-type: none"> Skenario Perlu upaya tambahan untuk menurunkan kawasan kumuh sesuai dengan target nasional (0%) Strategi dan arahan kebijakan, yaitu : Meningkatkan pencegahan dan penanganan kawasan kumuh secara simultan di seluruh Kota Bekasi Outcome Tercapainya Wilayah Kota Bekasi yang bebas kumuh 	
	11.1.1.(b) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	99,75 %		√		<ol style="list-style-type: none"> Skenario Meningkatkan Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau sesuai target nasional Strategi dan arahan kebijakan, yaitu : Meningkatkan Menyediakan rumah layak huni dan terjangkau Outcome Terpenuhinya rumah layak huni dan terjangkau untuk MBR 	
3	PERMASALAHAN						
	<ol style="list-style-type: none"> Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani sebesar 29,07% tahun 2018 Luas Kawasan Kumuh Tahun 2020 sekitar 430 Ha Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni 23,88% (Tahun 2018) kemampuan lahan di Kota Bekasi sebagian besar termasuk kelas II (70,12%) dengan demikian kemampuan lahan Kota Bekasi merupakan lahan potensial untuk pengembangan kawasan budidaya perkotaan; Daya dukung jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup sangat tinggi 57,16 % dan sedang 40,56% . 						
4	SASARAN STRATEGIS						
	<ol style="list-style-type: none"> Mengurangi kawasan kumuh hingga 0% Peningkatkan cakupan layanan rumah layak huni dan terjangkau 						
5	REKOMENDASI						
	<ol style="list-style-type: none"> Program peningkatan penanganan kawasan kumuh melalui: <ol style="list-style-type: none"> peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh melalui peremajaan, pemugaran dan revitalisasi kawasan Peningkatan penanganan kawasan kumuh pada lokasi-lokasi yang belum tertangani, Penataan kawasan kumuh secara simultan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni serta PSU Peningkatan dan pembangunan PSU secara terpadu Program pembangunan hunian/rumah yang layak dan terjangkau melalui: 						

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

	<ul style="list-style-type: none">a. pengembangan dan pembangunan hunian vertikal (rusunawa dan rusunami)b. Penyediaan rumah bagi MBRc. Pemberiaan subsidi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah <p>3. Program Pengembangan jaringan masyarakat dalam pengelolaan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan pemukiman</p>
6	<p>PENDANAAN :</p> <ul style="list-style-type: none">1. Pihak Pemerintah<ul style="list-style-type: none">a. Disperkimtan2. Pihak Non Pemerintahan<ul style="list-style-type: none">a. Swasta/CSR

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

TUJUAN 11 :		MENJADI KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN					
TARGET 11.2		Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi renta, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.					
1	ISU STRATEGIS	Peningkatan Infrastruktur					
2	INDIKATOR	Base-line	Rata-Rata			(r)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	11.2.1 persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	28%		√			1. Skenario Meningkatkan pengguna moda transportasi massal di Kota Bekasi sesuai target nasional baru mencapai 28 % maka perlu upaya tambahan 2. Strategi dan arahan kebijakan, yaitu : Mengembangkan moda angkutan massal dan sarana prasarana pendukungnya yang ramah lingkungan 3. Outcome Tersedianya angkutan massal yg aman dan nyaman bagi pengguna
3	PERMASALAHAN						
	1. pengguna moda transportasi umum Kota Bekasi baru mencapai 28 %. 2. Persentase layanan angkutan umum massal 50% 3. Rendahnya sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi kriteria pengguna dengan katagori kebutuhan khusus						
4	SASARAN STRATEGIS						
	Meningkatkan pengguna moda transportasi massal di Kota Bekasi						
5	REKOMENDASI						
	1. pengembangan angkutan massal kota berbasis jalan dan rel I yang terintegrasi dengan moda angkutan yang ada; 2. Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 3. pengembangan sistem jaringan transportasi dan angkutan massal yang ramah lingkungan dan masyarakat berkebutuhan khusus lainnya						
6	PENDANAAN :						
	1. Pihak Pemerintah a. Dishub b. DBMSDA 2. Pihak Non Pemerintahan a. Swasta/CSR						

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

TUJUAN 11 :		MENJADI KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN					
TARGET 11.6		Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan perkapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota					
1	ISU STRATEGIS	Peningkatan Layanan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Aman Dan Berkelanjutan					
2	INDIKATOR	Base-line	Rata-Rata			(r)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	11.6.1 (a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani	64,44 % (Tahun 2019)		√		0,34	1. Skenario untuk mencapai target nasional sebesar 100% perlu upaya tambahan 2. Strategi dan arahan kebijakan, yaitu : Meningkatkan kinerja sistem pelayanan dan pengelolaan persampahan 3. Outcome Terhindarnya pencemaran lingkungan akibat limbah padat
3	PERMASALAHAN						
	1. Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R baru mencapai 24,94%' 2. Persentase sampah yang terangkut ke TPA baru mencapai 67,15% 3. Persentase Cakupan Area Pelayanan baru mencapai 70,00% 4. Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA baru mencapai 71,72%; 5. kondisi daya dukung jasa ekosistem pengelola dan penguraian limbah sangat rendah 57,5 % dan 26,19 %						
4	SASARAN STRATEGIS						
	Terwujudnya pola penanganan sampah/limbah padat hingga 100%						
5	REKOMENDASI						
	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA /TPS-3R /TPS 2. Penggunaan teknologi dalam pengolahan sampah baik di TPA maupun di TPST antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemprov DKI yang dituangkan dalam PKS. 3. Peningkatan mekanisme pengelolaan sampah dari sistem sanitasi landfill menjadi pemusnahan sampah melalui penggunaan teknologi 4. Edukasi dan sosialisasi pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini bagi anak sekolah. 5. pengelolaan sampah berbasis masyarakat/swakelola persampahan di 12 Kecamatan. 6. Penerapan sanksi atau Perda terhadap perorangan atau institusi yang melakukan pembuangan sampah secara ilegal; 7. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan minimalisasi sampah kepada skala rumah tangga (Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Repair); 8. Pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dari dimulai dari sumbernya; 9. pengurangan produksi dan pengurangan penggunaan kantong plastic; 10. pembangunan sarana daurulang sampah di 12 kecamatan 11. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan 12. Penambahan armada angkut sampah sehingga sampah di pasar rakyat dapat diangkut ke TPA setiap hari 13. Peningkatan koordinasi penanganan limbah industry 14. Kerjasama untuk pengolahan sampah organik dan non organik di pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan pasar modern 15. Program pengurangan sampah "PESAN MAMA" (Peduli Sampah BersamaSama)						
6	PENDANAAN :						
	1. Pihak Pemerintah a. DLH 2. Pihak Non Pemerintahan a. Swasta/CSR						

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

TUJUAN 12 :		KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB					
TARGET 12.4		Pada tahun 2030 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan					
1	ISU STRATEGIS	peningkatan layanan air bersih dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan					
2	INDIKATOR	Base-line	Rata-Rata			(r)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	12.4.1 Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). (Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah pada dan B3).	40 %		√			1. Skenario Meningkatkan penanganan/pen gelolaan limbah sehingga mencapai target nasional 2. Strategi dan arahan kebijakan, yaitu : Meningkatkan sistem pengelolaan dan penanganan limbah B3 3. Outcome Terhindarnya pencemaran lingkungan akibat limbah B3
3	PERMASALAHAN						
	1. Pengelolaan limbah B3 belum optimal hal ini terlihat Persentase Usaha Kegiatan yang Memiliki TPS Limbah B3 baru mencapai 40% 2. kondisi daya dukung jasa ekosistem pengelola dan penguraian limbah sangat rendah 57,5 % dan 26,19 %						
4	SASARAN STRATEGIS						
	Mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah B3 sehingga dapat meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.						
5	REKOMENDASI						
	1. Meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah B3; 2. Menerapkan prinsip industri bersih (Clean production); 3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan dan penegakan hukum lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan; 4. Menerapkan konsep 5 R (Rethink, Re-use, Reduction, Recovery, dan Recycle) pada industri .						
6	PENDANAAN :						
	1. Pihak Pemerintah a. DLH b. Disperkimtan 2. Pihak Non Pemerintahan a. Swasta/CSR						

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

TUJUAN 12 :		KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB					
TARGET 12.5		Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.					
1	ISU STRATEGIS	peningkatan layanan air bersih dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan					
2	INDIKATOR	Base-line	Rata-Rata			(r)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	12.5.1 jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (Prosentase Pelayanan /Pengangkutan Sampah)	67,15 %		√		1,39	<p>1. Skenario Berdasarkan hasil perhitungan rate BAU laju pertumbuhan sampah yang tertangani setiap tahun rata-rata sekitar 1,39 % maka pada tahun 2023 target yang akan di capai sebesar 72,15 % maka untuk mencapai target nasional sebesar 100% perlu upaya tambahan</p> <p>2. Strategi dan arahan kebijakan, yaitu : Meningkatkan kinerja sistem pelayanan dan pengelolaan persampahan</p> <p>3. Outcome Terhindarnya pencemaran lingkungan akibat sampah</p>
3	PERMASALAHAN						
	<p>1. Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R baru mencapai 24,94%'</p> <p>2. Persentase sampah yang terangkut ke TPA baru mencapai 67,15%</p> <p>3. Persentase Cakupan Area Pelayanan baru mencapai 70,00%</p> <p>4. Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA baru mencapai 71,72%; 5. kondisi daya dukung jasa ekosistem pengelola dan penguraian limbah sangat rendah 57,5 % dan 26,19 %</p>						
4	SASARAN STRATEGIS						
	Terwujudnya pola penanganan sampah hingga 100%						
5	REKOMENDASI						
	<p>1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS</p> <p>2. Penggunaan teknologi dalam pengolahan sampah baik di TPA maupun di TPST antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemprov DKI yang dituangkan dalam PKS.</p> <p>3. Peningkatan mekanisme pengelolaan sampah dari sistem sanitari landfill menjadi pemusnahan sampah melalui penggunaan teknologi</p> <p>4. Edukasi dan sosialisasi pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini bagi anak sekolah.</p> <p>5. pengelolaan sampah berbasis masyarakat/swakelola persampahan di 12 Kecamatan.</p> <p>6. Penerapan sanksi atau Perda terhadap perorangan atau institusi yang melakukan pembuangan sampah secara illegal</p> <p>7. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan minimalisasi sampah kepada skala rumah tangga (Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Repair)</p> <p>8. Pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dari dimulai dari sumbernya:</p> <p>a. pengurangan produksi dan pengurangan penggunaan kantong plastik</p> <p>b. pembangunan sarana daur ulang sampah di 12 kecamatan</p> <p>9. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan</p> <p>10. Penambahan armada angkut sampah sehingga sampah di pasar rakyat dapat diangkut ke TPA setiap hari</p> <p>11. Peningkatan koordinasi penanganan limbah industri</p> <p>12. Kerjasama untuk pengolahan sampah organik dan non organik di pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan pasar modern</p> <p>13. Program pengurangan sampah " PESAN MAMA" (Peduli Sampah Bersama-Sama)</p>						
6	PENDANAAN :						
	<p>1. Pihak Pemerintah</p> <p>a. DLH</p> <p>2. Pihak Non Pemerintahan</p> <p>a. Swasta/CSR</p>						

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

TUJUAN 13 :		PENANGGULANGAN PERUBAHAN IKLIM					
TARGET 13.1		Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.					
1	ISU STRATEGIS	Kebencanaan					
2	INDIKATOR	Base-line	Rata-Rata			(r)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	13.1.2* Jumlah Korban Bencana Alam per 100.000 orang	19.656 orang (tahun 2019)		√			1.Skenario a. Meninimalkan jumlah korban yang terkena bencana alam; b. Setiap tahun perlu adanya upaya penangan bencana banjir sehingga pada tahun 2023 di harapkan Kota Bekasi bebas banjir; c. skenario peningkatan jasa ekosistem pengatur tata air dan banjir. 2. Strategi dan arahan kebijakan, yaitu : Meningkatkan program penanggulangan bencana 3. Outcome tertanganinya a kawasan banjir
3	PERMASALAHAN						
	1. Kondisi daya dukung Jasa ekosistem pengatur tata air dan banjir di Kota Bekasi umumnya memiliki katagori sangat rendah sebesar 57,5%; 2. Kota Bekasi merupakan wilayah yang rawan terjadinya bencana banjir, terdapat 85 titik banjir dengan luas kurang lebih 2873,38 ha; 3. rawan terjadinya kebakaran						
4	SASARAN STRATEGIS						
	1. Meninimalkan jumlah korban yang terkena bencana alam; 2. Berkurangnya kawasan banjir						
5	REKOMENDASI						
	1. Program peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana melalui: a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana b. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; c. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana d. Kecepatan Respon dalam menangani bencana baik alam maupun non alam. 2. Program penanganan kawasan banjir secara berkala dan berkesinambungan. 3. Penguatan falsafah gotong royong sebagai upaya tanggap darurat dalam penanggulangan banjir 4. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada penanggulangan banjir dan pasca bencana 5. Membangun kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 6. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 7. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi KorbanBencan						
6	PENDANAAN :						
	1. Pihak Pemerintah a. BNPB b. BPBD Jabar c. BPBD Kota Bekasi d. Dinas Sosial e. TNI Polri f. BWWS CC, g. PJT II h. PDAM Tirta Patriot 2. Pihak Non Pemerintahan a. Pramuka Jabang Kota Bekasi b. ACT c. Tagana						

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

TUJUAN 16 :		PERDAMAIAN Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh					
TARGET 16.6		Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.					
1	ISU STRATEGIS	Peningkatan Tata Kelola Dan Kelembagaan					
2	INDIKATOR	Base-line	Rata-Rata			(r)	Tahun 2030
			Mean	Median	Modus		
	16.6.1 (b) prosentase peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (sakup kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota)			√			1. Skenario Meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berkualitas 2. Strategi dan arahan kebijakan, yaitu : Pengembangan dan Penguatan kelembagaan 3. Outcome Terwujudnya kelembagaan yang berkualitas
3	PERMASALAHAN						
	1. Belum optimalnya pelayanan publik yang berkualitas; 2. Belum optimalnya pelaksanaan e-government; 3. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja						
4	SASARAN STRATEGIS						
	Meningkatnya pelayanan publik dan meningkatnya akuntabilitas kinerja						
5	REKOMENDASI						
	1. Peningkatan kerjasama antar lembaga yang efektif (executing agency); 2. Peningkatan kapasitas pembuatan sistem pelayanan publik berbasis IT/digital 3. Penyamaan Standar kompetensi aparatur secara nasional 4. Peningkatan jenjang pendidikan Formal, melalui beasiswa, pendidikan lanjutan. 5. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan modal sosial, dan sinergitas antar masyarakat dan aparatur pemda dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan 6. Peningkatan kompetensi aparatur sesuai dengan standar nasional 7. Peningkatan Kompetensi aparatur melalui pendidikan formal, diklat teknis dan fungsional 8. Penerapan IT dalam pengendalian dan penilaian kinerja aparatur						
6	PENDANAAN :						
	3. Pihak Pemerintah a. Inspektorat b. BKPPD c. Bappalitbangda d. Dinas/OPD 4. Pihak Non Pemerintahan a. Swasta						



KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya lah, kita dapat menuntaskan Dokumen Perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang akan menyertai setiap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

KLHS Perubahan RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan TPB ke dalam Dokumen Perubahan RPJMD. Dengan selesainya Penyusunan Dokumen KLHS Perubahan RPJMD ini, dapat dimanfaatkan dalam mengintegrasikan indikator TPB kedalam Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 – 2023.

Adanya kejadian luar biasa bencana alam dan pandemi COVID-19 saat memasuki tahun kedua masa RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 telah berdampak pada berbagai sendi kehidupan yang berpotensi menggagalkan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, hal ini memaksa untuk dilakukan perubahan RPJMD.

Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023 menetapkan berbagai asumsi dalam menyusun dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, yang lebih responsif dan menekankan pada proses pengambilan keputusan sistematis yang berfokus pada isu-isu kekinian seperti terjadinya bencana alam dan akibat jangka pendek maupun jangka panjang dari pandemic COVID 19.

Secara garis besar dokumen ini membahas mengenai pendahuluan, kondisi daerah, capaian TPB Kota Bekasi, skenario kondisi lingkungan dan pencapaian TPB, hasil perumusan isu pembangunan strategis dan perumusan rekomendasi.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk bersama-sama melakukan yang terbaik bagi Kota Bekasi sehingga visi “Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan” dapat tercapai.

Bekasi, Januari 2021
WALIKOTA BEKASI

Dr. RAHMAT EFFENDI



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

Bab 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Maksud, Tujuan Dan Sasaran	1-3
1.3 Jangka Waktu.....	1-3
1.4 Ruang Lingkup Wilayah Kajian.....	1-6
1.5 Dasar Hukum Penyusunan KLHS.....	1-6
1.6 Hambatan dan Kunci Keberhasilan	1-7
1.7 Sistematika Pelaporan	1-8

Bab 2 DASAR TEORI

2.1 Pengertian Umum	2-1
2.2 Mekanisme Pembuatan KLHS RPJMD	2-6
2.3 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan	2-9

BAB 3 KONDISI DAERAH

3.1 Kondisi Geografis.....	3-1
3.2 Karakteristik Fisik.....	3-2
3.2.1 Kelerengan dan Morfologi.....	3-2
3.2.2 Klimatologi.....	3-5
3.2.3 Geologi	3-5
3.2.4 Jenis Tanah.....	3-9
3.2.5 Hidrologi.....	3-14
3.2.6 Hidrogeologi	3-16
3.2.7 Kebencanaan	3-22
3.2.8 Penggunaan Lahan	3-22
3.3 Kependudukan	3-28
3.3.1 Perkembangan Kependudukan	3-28
3.3.2 Jumlah, Sebaran dan Kepadatan Penduduk	3-29
3.3.3 Jumlah Penduduk Menurut Usia	3-29
3.3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	3-31
3.3.5 Laju Pertumbuhan Penduduk	3-31
3.3.6 Indeks Pembangunan Manusia	3-32
3.3.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	3-33
3.3.8 Tingkat Pengangguran Terbuka	3-33
3.3.9 Indeks Gini	3-34
3.3.10 Angka Kemiskinan	3-35
3.3.11 Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja	3-35
3.3.12 Indeks Kepuasan Masyarakat	3-35
3.4 Kondisi Perekonomian Wilayah	3-36
3.4.1 PDRB Kota Bekasi	3-36
3.4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	3-37
3.4.3 Sumber –Sumber Pertumbuhan Ekonomi	3-38
3.4.4 Matriks Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor-Sektor Ekonomi	3-39
3.4.5 Laju Inflasi	3-39
3.4.6 PDRB Perkapita.....	3-40

3.4.7	Proporsi Penduduk Dengan Pendapatan Kurang dari Us\$ 1 per Kapita Per Hari.....	3-40
3.4.8	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	3-41
3.4.9	Kontribusi Sub Sektor Palawija Terhadap PDRB Sektor Pertanian	3-41
3.4.10	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Sektor Pertanian	3-41
3.4.11	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Padi Terhadap PDRB.....	3-41
3.4.12	Kontribusi Sub Sektor Keluatan dan Perikanan Terhadap PDRB	3-42
3.4.13	Produksi Sektor Pertanian	3-42
3.4.14	Produksi Sub Sektor Perkebunan.....	3-42
3.4.15	Nilai Tukar Petani.....	3-43
3.4.16	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PHH)	3-43
3.5	Kondisi Sarana Wilayah.....	3-44
3.5.1	Pendidikan	3-44
3.5.2	Kesehatan	3-51
3.5.3	Permukiman	3-64
3.6	Kondisi Lingkungan Hidup	3-84
3.6.1	Kapasitas Daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	3-84
3.6.1.1	Daya Dukung Air	3-85
3.6.1.2	Daya Dukung Pangan	3-92
3.6.2	Kinerja Jasa Ekosistem.....	3-96
3.6.2.1	Jasa Ekosistem Penyedia Pangan	3-97
3.6.2.2	Jasa Ekosistem Penyedia Air	3-98
3.6.2.3	Jasa Ekosistem Pengatur Air dan Banjir	3-101
3.6.2.4	Jasa Ekosistem Pengolahan dan Penguraian Limbah	3-104
3.6.2.5	Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana	3-107
3.6.2.6	Jasa Ekosistem Pengatur Pemurnian Air	3-111
3.6.2.7	Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara	3-112
3.6.2.8	Jasa Ekosistem Pengatur Iklim.....	3-115
3.6.2.9	Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	3-119
3.6.3	Perkiraan Dampak Dan Resiko Lingkungan	3-120
3.6.3.1	Rawan Banjir Atau Genangan	3-123
3.6.3.2	Pencemaran Udara.....	3-124
3.6.3.3	Pencemaran Sungai.....	3-126
3.6.3.4	Persampahan	3-129
3.6.4	Kerentanan Dan Adaptasi Perubahan Iklim	3-131
3.6.5	Kemampuan Penyedia Keanekaragaman Hayati	3-135
3.7	Keuangan Daerah.....	3-138
3.7.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	3-138
3.7.2	Neraca Daerah.....	3-143
3.7.3	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	3-147
3.7.4	Kerangka Pendanaan	3-148
3.7.5	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	3-150
3.7.6	Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya	3-154

BAB 4 ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

4.1	Kondisi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	4-1
4.2	Analisis Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	4-47

4.2.1	Alternatif Proyeksi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	4-47
4.2.2	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	4-60
4.2.3	Keterkaitan TPB dan DDDT-LH	4-81
4.3	Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis.....	4-104
4.3.1	Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan	4-105
4.3.1.1	Identifikasi Isu Strategis Berdasarkan Hasil Capaian Indikator TPB	4-105
4.3.1.2	Identifikasi Isu-Isu Strategis Kota Bekasi	4-109
4.3.2	Analisis Perumusan Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas	4-111
4.3.3	Analisis Keterkaitan Isu PB Prioritas Dengan Isu Capaian Indikator TPB dan Permasalahannya.....	4-117

BAB 5 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

5.1	Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah	5-1
5.1.1	Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Pembangunan Sosial	5-1
5.1.2	Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Pembangunan Ekonomi.....	5-2
5.1.3	Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Pembangunan Lingkungan	5-3
5.1.4	Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.....	5-4
5.2	Peran Para Pihak Dalam Capaian TPB di Kota Bekasi.....	5-5
5.3	Kerangka pendanaan	5-21

BAB 6 ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI

6.1	Alternatif Skenario dan Rekomendasi Daya Dukung dan Daya Tampung.....	6-1
6.2	Alternatif Skenario dan Rekomendasi Untuk Indikator Yang Sudah Dilaksanakan Dan Belum Mencapai Target Nasional.....	6-2
6.3	Alternatif Skenario dan Rekomendasi Untuk Indikator Yang Belum Ada Data/Belum Dilaksanakan	6-23
6.4	Hasil Pengintegrasian	6-23

BAB 7 KESIMPULAN

7.1	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung	7-1
7.2	Kondisi dan Analisis Tinjauan Pembangunan Berkelanjutan	7-4
7.3	Alternatif Skenario dan Rekomendasi	7-8

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL



Tabel 1.1	Jadwal Tahapan Kegiatan Dalam Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023	1-3
Tabel 2.1	Koefisien Limpasan	2-12
Tabel 2.2	Jasa Lingkungan : Fungsi, Indikator Keadaan dan Indikator Kinerja.....	2-15
Tabel 2.3	Kuesioner Penilaian Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Terhadap Tutupan Lahan.....	2-19
Tabel 2.4	Contoh Pembagian Peran.....	2-24
Tabel 3.1	Luas Wilayah dan Banyaknya Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Bekasi	3-1
Tabel 3.2	Luasan Kemiringan dan Ketinggian Kota Bekasi.....	3-4
Tabel 3.3	Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan di Kota Bekasi Tahun 2019	3-5
Tabel 3.4	Luasan Geologi Kota Bekasi	3-8
Tabel 3.5	Luasan Jenis Tanah Kota Bekasi.....	3-11
Tabel 3.6	Besarnya Limpasan Air Permukaan di Setiap Wilayah Per Kecamatan di Kota Bekasi.....	3-14
Tabel 3.7	Jumlah Sungai di Wilayah Kota Bekasi	3-15
Tabel 3.8	Besarnya Air Hujan Yang Masuk Ke Setiap Wilayah di Kota Bekasi.....	3-16
Tabel 3.9	Penggunaan Lahan Kota Bekasi	3-25
Tabel 3.10	Jumlah Pendudun Kota Bekasi Tahun 2019	3-28
Tabel 3.11	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Bekasi	3-29
Tabel 3.12	Jumlah Penduduk Menurut Usia di Kota Bekasi Tahun 2019	3-30
Tabel 3.13	Struktur Penduduk Kota Bekasi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2019	3-31
Tabel 3.14	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bekasi Tahun 2019	3-32
Tabel 3.14	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bekasi Tahun 2019	3-32
Tabel 3.16	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan di Kota Bekasi 2015-2019.....	3-36
Tabel 3.17	Perkembangan Sumber Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi 2015 -2019 (%)	3-38
Tabel 3.18	Perkembangan PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhan di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia 2013 -2017	3-40
Tabel 3.19	Jumlah Sarana Pendidikan di Kota Bekasi tahun 2019	3-44
Tabel 3.20	Jumlah Sarana Pendidikan Madrasah Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah di Kota Bekasi Tahun 2019.....	3-44
Tabel 3.21	Rasio Jumlah Sekolah Terhadap Jumlah Penduduk Usia Sekolah Dasar Kota Bekasi Tahun 2015-2017	3-45
Tabel 3.22	Rasio Jumlah Sekolah Terhadap Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menengah Kota Bekasi Tahun 2015-2019	3-46
Tabel 3.23	Rasio Jumlah Murid Terhadap Kelas Pendidikan Dasar (SD/MI;SMP/MTs)	3-46
Tabel 3.24	Rasio Jumlah Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar Kota Bekasi 2015-2019	3-46
Tabel 3.25	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Kota Bekasi 2015-2019	3-47
Tabel 3.26	Perkembangan Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar	3-47
Tabel 3.27	Capaian APM Menurut Jenjang Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.....	3-48
Tabel 3.28	APK Menurut Jenjang Kota Bekasi dan Jawa Barat Tahun 2019	3-49
Tabel 3.29	Perkembangan EYS Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2019	3-49
Tabel 3.30	Perkembangan Nilai MYS Kota Bekasi dan Jawa Barat Tahun 2014-2019	3-50
Tabel 3.31	Kondisi Akreditasi Sekolah di Kota Bekasi Tahun 2019	3-50
Tabel 3.32	Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Bekasi Tahun 2017	3-51
Tabel 3.33	Sarana Kesehatan Skala Kecamatan di Kota Bekasi.....	3-52

Tabel 3.34	Jumlah Kematian Bayi Kota Bekasi Tahun 2014-2017	3-55
Tabel 3.35	Beberapa Indikator Tentang Kematian Bayi dan Balita	3-56
Tabel 3.36	Beberapa Indikator Tentang Kesehatan Bayi dan Balita	3-56
Tabel 3.37	Banyaknya Angka Kematian Ibu di Kota Bekasi	3-58
Tabel 3.38	Beberapa Indikator Tentang Kesehatan Ibu	3-58
Tabel 3.39	Status Gizi Balita di Kota Bekasi Tahun 2013-2016	3-60
Tabel 3.40	Cakupan Layanan Balita Gizi Buruk, 2013-2017	3-60
Tabel 3.41	Jumlah Kasus TB Paru di Kota Bekasi Tahun 2013-2017	3-60
Tabel 3.42	Beberapa Indikator Layanan Penyakit Menular 2013-2017	3-61
Tabel 3.43	Beberapa Indikator Tentang Layanan Sarana dan Prasarana Kesehatan	3-63
Tabel 3.44	Perubahan Penggunaan Lahan Kota Bekasi 2009-2014	3-64
Tabel 3.45	Stok Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Tahun 2015	3-65
Tabel 3.46	Kepadatan Rumah Kota Bekasi Tahun 2015	3-67
Tabel 3.47	Kepadatan Hunian Kota Bekasi Tahun 2015	3-68
Tabel 3.48	Luas Lahan Kawasan Permukiman Swadaya Kota Bekasi Tahun 2015	3-70
Tabel 3.49	Permukiman Formal di BWP Pondok Gede	3-73
Tabel 3.50	Sebaran dan Luas Apartemen di Kota Bekasi Sampai Tahun 2015	3-75
Tabel 3.51	Sebaran Kawasan Kumuh di Kota Bekasi Tahun 2019	3-78
Tabel 3.52	Koefisien Limpasan	3-87
Tabel 3.53	Potensi Ketersediaan Air di Kota Bekasi Menurut Luasan Eksisting	3-87
Tabel 3.54	Potensi Ketersediaan Air di Kota Bekasi Menurut Luasan Rencana Pola Ruang	3-88
Tabel 3.55	Potensi Ketersediaan Air Perkecamatan di Kota Bekasi	3-89
Tabel 3.56	Kebutuhan Air di Kota Bekasi Tahun 2017	3-90
Tabel 3.57	Kebutuhan Air di Kota Bekasi Tahun 2026	3-90
Tabel 3.58	Kebutuhan Air di Kota Bekasi Tahun 2030	3-91
Tabel 3.59	Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kota Bekasi	3-92
Tabel 3.60	Hasil Perhitungan Nilai Produksi Total Kota Bekasi	3-93
Tabel 3.61	Status Daya Dukung Pangan Per Kecamatan Tahun 2017	3-95
Tabel 3.62	Proyeksi Status Daya Dukung Lahan Per Kecamatan Tahun 2030	3-95
Tabel 3.63	Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan	3-97
Tabel 3.64	Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Tiap Kecamatan	3-98
Tabel 3.65	Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Penyedia Air	3-98
Tabel 3.66	Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Penyedia Air Tiap Kecamatan	3-101
Tabel 3.67	Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Pengatur Tata Air dan Banjir	3-101
Tabel 3.68	Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Pengatur Tata Air dan Banjir Tiap Kecamatan	3-104
Tabel 3.69	Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Pengatur Pengolahan dan Penguraian Limbah	3-104
Tabel 3.70	Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Pengatur Pengolah dan Penguraian Limbah Tiap Kecamatan	3-107
Tabel 3.71	Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Pengatur Pencegahan dan Perlindungan Bencana	3-107
Tabel 3.72	Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Pengatur Pencegahan dan Perlindungan Dari Bencana Tiap Kecamatan	3-109
Tabel 3.73	Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Pengatur Pemurnian Air	3-111
Tabel 3.74	Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Pengatur Pemurnian Air Tiap Kecamatan	3-112
Tabel 3.75	Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Pengatur Pemeliharaan Kualitas Udara	3-112
Tabel 3.76	Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Pengatur Pemeliharaan Kualitas Udara Tiap Kecamatan	3-115
Tabel 3.77	Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Pengatur Iklim	3-115

Tabel 3.78	Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Pengatur Iklim Tiap Kecamatan	3-117
Tabel 3.79	Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Budaya Tempat Ringgal dan Ruang Hidup	3-119
Tabel 3.80	Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Tiap Kecamatan	3-120
Tabel 3.81	Luas Sebaran Banjir di Kota Bekasi Tahun 2016.....	3-124
Tabel 3.82	Kualitas Udara Ambien Kota Bekasi (Periode 19 Sep s/d 20 Sep 2018)	3-125
Tabel 3.83	Indeks Kualitas Udara Kota Bekasi	3-126
Tabel 3.84	Status Mutu Air Sungai/Saluran (Periode I).....	3-126
Tabel 3.85	Status Mutu Air Sungai/Saluran (Periode II).....	3-127
Tabel 3.86	Daftar Jumlah Sampah Terangkut	3-129
Tabel 3.87	Layanan Titik Angkut Sampah.....	3-129
Tabel 3.88	Rekapitulasi Jumlah Ritase Pengangkutan Sampah	3-130
Tabel 3.89	Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas	3-135
Tabel 3.90	Kondisi Keanekaragaman Flora dan Fauna Yang Dilindungi di Kota Bekasi.....	3-136
Tabel 3.91	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2015-2019	3-139
Tabel 3.92	Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Bekasi 2013-2019 (Dalam Rupiah dan %)	3-140
Tabel 3.93	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi, 2015-2019.....	3-141
Tabel 3.94	Proporsi Realisasi Kompoenan Belanja Terhadap Total Belanja Daerah Kota Bekasi 2013-2019 (Dalam Rupiah dan %)	3-142
Tabel 3.95	Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2015-2019	3-144
Tabel 3.96	Neraca Daerah Kota Bekasi, 2013-2017	3-145
Tabel 3.97	Analisis Rasio Neraca Daerah Kota Bekasi, 2013-2017	3-143
Tabel 3.98	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bekasi.....	3-147
Tabel 3.99	Defisit Rill Anggaran Kota Bekasi, 2013-2019.....	3-149
Tabel 3.100	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi, Tahun 2019-2023 (Rupiah)	3-155
Tabel 3.101	Kapasitas Rill Kemampuan Kauangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Bekasi, 2019-2023	3-157
Tabel 3.102	Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bekasi 2019-2023.....	3-158
Tabel 4.1	Capaian Indikator Yang Mengalami Perubahan	4-2
Tabel 4.2	Capaian Indikator TPB Kota Bekasi Terhadap Target Nasional	4-2
Tabel 4.3	Matriks Target Pencapaian Indikator Tujuan SDGs	4-3
Tabel 4.4	Matriks Perubahan Target Pencapaian Indikator Tujuan SDGs.....	4-21
Tabel 4.5	Jumlah Indikator Pada Setiap TPB Yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional (SS) di Kota Bekasi	4-30
Tabel 4.6	Jumlah Indikator Pada Setiap TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target Nasional di Kota Bekasi.....	4-31
Tabel 4.7	Jumlah Indikator TPB Yang Tidak Memiliki Data di Kota Bekasi	4-32
Tabel 4.8	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	4-34
Tabel 4.9	Capaian Jumlah Indikator TPB Kota Bekasi Terhadap Target Nasional	4-47
Tabel 4.10	Analisis Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Belum Mencapai Target Nasional	4-48
Tabel 4.11	Alternatif Proyeksi Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Bekasi.....	4-55
Tabel 4.12	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Bekasi	4-60
Tabel 4.13	Proyeksi Kebutuhan Air di Kota Bekasi Tahun 2017, 2026 dan 2030.....	4-60
Tabel 4.14	Potensi Ketersediaan Air di Kota Bekasi Tahun 2017, 2026 dan 2030	4-61
Tabel 4.15	Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Bekasi Tahun 2017, 2026 dan 2030	4-61

Tabel 4.16	Analisis Daya Dukung Pangan di Kota Bekasi Tahun 2018, 2023 dan 2030.....	4-63
Tabel 4.17	Luasan Koefisien Lindung Berdasarkan Tutupan Lahan Tahun 2017	4-65
Tabel 4.18	Luasan Koefisien Lindung Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW Kota Bekasi	4-65
Tabel 4.19	Daya Dukung Fungsi Lindung Kota Bekasi Tahun 2017	4-66
Tabel 4.20	Analisis Daya Dukung Fungsi Lindung Kota Bekasi Tahun 2030	4-67
Tabel 4.21	Kondisi Daya Dukung Lahan Terbangun Kota Bekasi Tahun 2017	4-68
Tabel 4.22	Analisis Daya Dukung Lahan Terbangun Kota Bekasi Tahun 2030.....	4-68
Tabel 4.23	Analisis Perubahan Daya Dukung Lingkungan Hidup Kota Bekasi Sampai Dengan Tahun 2030	4-69
Tabel 4.24	Kelas Kemampuan Lahan di Kota Bekasi	4-71
Tabel 4.25	Indeks Kualitas Udara Kota Bekasi	4-73
Tabel 4.26	Status Mutu Air Sungai/Saluran (Periode I).....	4-74
Tabel 4.27	Status Mutu Air Sungai/Saluran (Periode II).....	4-76
Tabel 4.28	Analisis Persampahan di Kota Bekasi Tahun 2017, 2023 dan 2030.....	4-78
Tabel 4.29	Analisis Perubahan Iklim Kota Bekasi Tahun 2017, 2023 dan 2030.....	4-80
Tabel 4.30	Prioritas Target dan Indikator TPB Berdasarkan DDDT-LH	4-82
Tabel 4.31	Isu Berkelanjutan Pilar Pembangunan Sosial	4-106
Tabel 4.32	Isu Berkelanjutan Pilar Pembangunan Ekonomi	4-107
Tabel 4.33	Isu Berkelanjutan Pilar Pembangunan Lingkungan.....	4-107
Tabel 4.34	Isu Berkelanjutan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan	4-108
Tabel 4.35	Daftar Isu Pembangunan Berkelanjutan Kota Bekasi	4-109
Tabel 4.36	Pemusatan dan Pengelompokan Isu-Isu Pembangunan Kota Bekasi.....	4-112
Tabel 4.37	Matrik Uji Silang Isu PB Strategi Prioritas Dengan Muatan PAsal 9 ayat (2) PP 46 Tahun 2016.....	4-116
Tabel 4.38	Keterkaitan Isu Pb Prioritas/Isu Utama dan Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional (SB), Indikator Belum Dilaksanakan (BB) dan Indikator Belum Ada Data (NA)	4-117
Tabel 5.1	Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah Pada Pilar Pembangunan Sosial.....	5-1
Tabel 5.2	Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah Pada Pilar Pembangunan Ekonomi	5-2
Tabel 5.3	Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah Pada Pilar Pembangunan Lingkungan	5-3
Tabel 5.4	Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah Pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	5-4
Tabel 5.5	Peran Para Pihak Dalam Capaian TPB di Kota Bekasi.....	5-6
Tabel 5.6	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan	5-22
Tabel 5.7	Anggaran Pencapaian TPB oleh OPD di Kota Bekasi	5-29
Tabel 6.1	Perumusan Alternatif Skenario dan Rekomendasi Untuk Indikator TPB Yang Belum Mencapai Target Nasional	6-3
Tabel 6.2	Perumusan Alternatif Skenario dan Rekomendasi Untuk Indikator TPB Yang Belum Ada Datanya/Belum Dilaksanakan	6-23
Tabel 6.3	Matriks Penelaahan Integrasi KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023 Kota Bekasi	6-37
Tabel 7.1	Matrik Sanding Sistematika Pelaporan KLHs RPJMD Yang Disusun Tahun 2018 dengan Sistematika Pelaporan KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2013.....	7-1
Tabel 7.2	Kondisi Daya Dukung Jasa Ekosistem	7-2
Tabel 7.3	Capaian Indikator Yang Mengalami Perubahan	7-5
Tabel 7.4	Capaian Indikator TPB Kota Bekasi Terhadap Target Nasional	7-5

Tabel 7.5	Capaian Jumlah Indikator TPB Kota Bekasi Terhadap Target Nasional	7-6
Tabel 7.6	Alternatif Skenario dan Rekomendasi Terhadap Indikator TPB Yang Merupakan Isu PB Prioritas (Indikator TPB Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional dan Indikator Yang Belum Ada Data)	7-2



DAFTAR GAMBAR



Gambar 2.1	Instrumen Pelaksanan KLHS	2-5
Gambar 2.2	Pembentukan Tim Pembuat KLHS Perubahan RPJMD.....	2-6
Gambar 2.3	Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan KLHS Perubahan RPJMD.....	2-7
Gambar 2.4	Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan KLHS Perubahan RPJMD	2-8
Gambar 2.5	Mekanisme Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD	2-9
Gambar 2.6	Hubungan Ekoregion, Fungsi Dan Jasa Ekosistem, Serta Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan.....	2-17
Gambar 2.7	Proses Penilaian Dan Pembobotan Jasa Ekosistem Dengan Metode Pairwise Comparison.....	2-18
Gambar 2.8	Tahapan Penyusunan Peta Ekosistem Berdasarkan Data Tutupan Lahan (dalam Burkhard et al 2009)	2-20
Gambar 2.9	Tahapan Penyusunan Peta Jasa Ekosistem Dengan Data Tutupan Lahan dan Ekoregion	2-21
Gambar 2.10	Contoh Skenario Tanpa Upaya Tambahan.....	2-22
Gambar 2.11	Contoh Skenario Dengan Upaya Tambahan	2-23
Gambar 2.12	Contoh Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	2-23
Gambar 3.1	Peta Batas Administrasi Kota Bekasi	3-3
Gambar 3.2	Peta Kelerengan Kota Bekasi.....	3-6
Gambar 3.3	Peta Morfologi Kota Bekasi	3-7
Gambar 3.4	Peta Geologi Kota Bekasi	3-10
Gambar 3.5	Peta Jenis Tanah Kota Bekasi.....	3-13
Gambar 3.6	Peta Hidrologi Kota Bekasi.....	3-17
Gambar 3.7	Peta Wilayah Sungai dan DAS Kota Bekasi.....	3-18
Gambar 3.8	Peta Air Tanah Kota Bekasi.....	3-19
Gambar 3.9	Peta Ketersediaan Air Kota Bekasi.....	3-20
Gambar 3.10	Peta Hidrogeologi Kota Bekasi	3-21
Gambar 3.11	Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kota Bekasi	3-23
Gambar 3.12	Peta Kawasan Rawan Gempa Bumi Kota Bekasi	3-24
Gambar 3.13	Peta Penggunaan Lahan Kota Bekasi	3-27
Gambar 3.14	Piramida Penduduk Kota Bekasi Tahu 2019	3-31
Gambar 3.15	Grafik Pengangguran Terbuka Kota Bekasi	3-33
Gambar 3.16	Grafik Prediksi Pengangguran Terbuka di Kota Bekasi	3-34
Gambar 3.17	Grafik Indeks Gini Kota Bekasi.....	3-34
Gambar 3.18	Grafik Angka Kemiskinan Kota Bekasi.....	3-35
Gambar 3.19	Grafik Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi, Jawa Barat dan Nasional	3-37
Gambar 3.20	Peta Kawasan Kumuh Kota Bekasi	3-83
Gambar 3.21	Grafik Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Berdasarkan Ekoregion	3-97
Gambar 3.22	Grafik Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Berdasarkan Kecamatan	3-98
Gambar 3.23	Peta Jasa Ekosistem Penyedia Pangan.....	3-99
Gambar 3.24	Grafik Jasa Ekosistem Penyedia Air Berdasarkan Ekoregion	3-100
Gambar 3.25	Grafik Jasa Ekosistem Penyedia Air Berdasarkan Kecamatan	3-100
Gambar 3.26	Peta Daya Tampung Jasa Ekosistem Penyedia Air	3-102
Gambar 3.27	Grafik Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir Berdasarkan Ekoregion	3-103
Gambar 3.28	Grafik Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir Berdasarkan Kecamatan	3-103
Gambar 3.29	Peta Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir Kota Bekasi.....	3-105
Gambar 3.30	Grafik Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Berdasarkan Ekoregion.....	3-106
Gambar 3.31	Grafik Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Berdasarkan Kecamatan.....	3-106

Gambar 3.32	Peta Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Kota Bekasi.....	3-108
Gambar 3.29	Grafik Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Berdasarkan Ekoregion	3-109
Gambar 3.34	Grafik Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Berdasarkan Kecamatan	3-109
Gambar 3.35	Peta Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam	3-110
Gambar 3.36	Grafik Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air Berdasarkan Ekoregion	3-111
Gambar 3.37	Grafik Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air Berdasarkan Kecamatan	3-112
Gambar 3.38	Peta Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air	3-113
Gambar 3.39	Grafik Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Berdasarkan Ekoregion	3-114
Gambar 3.40	Grafik Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Berdasarkan Kecamatan	3-114
Gambar 3.41	Peta Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Bekasi.....	3-116
Gambar 3.42	Grafik Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Berdasarkan Ekoregion.....	3-117
Gambar 3.43	Grafik Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Berdasarkan Kecamatan.....	3-117
Gambar 3.44	Peta Daya Tampung Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	3-118
Gambar 3.45	Grafik Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Berdasarkan Ekoregion	3-119
Gambar 3.46	Grafik Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Berdasarkan Kecamatan	3-120
Gambar 3.47	Peta Daya Tampung Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	3-121
Gambar 3.48	Kondisi Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim di Kota Bekasi	3-133
Gambar 3.49	Peta Kerentanan Kota Bekasi	3-133
Gambar 3.50	Peta Resiko Kekeringan Kota Bekasi.....	3-134
Gambar 3.51	Peta Resiko Banjir Kota Bekasi.....	3-134
Gambar 3.52	Peta Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas.....	3-137
Gambar 3.53	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bekasi 2020-2023	3-151
Gambar 4.1	Presentase Capaian Jumlah Indikator TPB Terhadap Target Nasional.....	4-30
Gambar 4.2	Jumlah Indikator Pada Setiap TPB Yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kota Bekasi.....	4-31
Gambar 4.3	Jumlah Indikator Pada Setiap TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target Nasional di Kota Bekasi	4-32
Gambar 4.4	Jumlah Indikator Yang Tidak Memiliki Data (NA) di Kota Bekasi.....	4-33
Gambar 4.5	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kota Bekasi Tahun 2017, 2026 dan 2030	4-62
Gambar 4.6	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Kota Bekasi Tahun 2018, 2023 dan 2030	4-64
Gambar 4.7	Analisis Daya Dukung Fungsi Lindung di Kota Bekasi Tahun 2017 dan 2030.....	4-67
Gambar 4.8	Analisis Daya Dukung Lahan Terbangun Kota Bekasi.....	4-69
Gambar 4.9	Kelas Kemampuan Lahan Kota Bekasi.....	4-72
Gambar 4.10	Kondisi Daya Tampung Udara Kota Bekasi.....	4-73
Gambar 4.11	Status Mutu Air Sungai Kota Bekasi	4-78
Gambar 4.12	Analisis Persampahan di Kota Bekasi Tahun 2017, 2023 dan 2030	4-79
Gambar 4.13	Analisis Perubahan Iklim di Kota Bekasi Tahun 2017, 2023 dan 2030	4-80

Gambar 5.1	Kontribusi Organisasi Perangkat Daerah Dalam Capaian Indikator Pilar Pembangunan Sosial	5-2
Gambar 5.2	Kontribusi Organisasi Perangkat Daerah Dalam Capaian Indikator Pilar Pembangunan Ekonomi.....	5-3
Gambar 5.3	Kontribusi Organisasi Perangkat Daerah Dalam Capaian Indikator Pilar Pembangunan Lingkungan.....	5-4
Gambar 5.4	Kontribusi Organisasi Perangkat Daerah Dalam Capaian Indikator Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	5-5



BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan dan, sasaran, lingkup kegiatan dan keluaran (output), dasar hukum, ruang lingkup pekerjaan, dan sistematika penulisan laporan



1.1 LATAR BELAKANG

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) didefinisikan sebagai berbagai "pendekatan analitis dan partisipatif yang bertujuan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana dan program dan mengevaluasi keterkaitan pertimbangan lingkungan dengan pertimbangan ekonomi dan sosial" (OECD, 2006).

Pemerintah Kota Bekasi telah menyusun RPJMD Tahun 2018-2023 melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Bekasi terpilih DR. Rahmat Effendi dan DR. Tri Adhianto Cahyono yang dilantik pada tanggal 20 September 2018 untuk masa kerjaselama 5 (lima) tahun.

Dalam implementasinya, saat memasuki tahun kedua masa RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Kota Bekasi dan sekitarnya (DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten Bekasi) dilanda kejadian luar biasa, yaitu : bencana alam banjir dan bencana non-alam wabah pandemi COVID-19 yang keduanya berdurasi cukup lama, sehingga mengganggu bahkan berpotensi menggagalkan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Mengawali hari pertama di tahun 2020, wilayah Kota Bekasi terendam banjir yang melanda beberapa permukiman warga serta pusat perbelanjaan dan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga amat mengganggu kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan di sebagian besar wilayah Kota Bekasi. Berikutnya terjadi bencana non-alam wabah pandemi COVID-19 yang dahsyat dan mengguncang perekonomian serta menurunkan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Selama Triwulan I Tahun 2020 saja Kota Bekasi telah mengalami inflasi yang cukup tinggi. Dampak yang luarbiasa dirasakan langsung oleh sekte rketenagakerjaan di kotaini, antara lain terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja swasta, jumlah pekerja yang dirumahkan, dan jumlah pekerja yang diliburkan.

Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023 menetapkan berbagai asumsi dalam menyusun dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang lebih responsif dan menekankan pada proses pengambilan keputusan sistematis yang berfokus pada isu-isu kekinian seperti terjadinya bencana alam dan bencana non-alam. Setidaknya perlu menyiapkan kebijakan dan upaya yang antisipatif terhadap melemahnya perekonomian masyarakat melalui review dokumen dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan data pendukung yang kekinian. Pada gilirannya, upaya ini akan mereformulasi permasalahan dan isu strategis sehingga sedapat mungkin tidak mengganggu secara signifikan target-target misi pembangunan sampai dengan tahun 2023.

Sehingga di harapkan dengan adanya KLHS Perubahan RPJMD Kota Bekasi dapat diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan apabila Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dilaksanakan perubahan RPJMD Kota Bekasi. Hasil dari kajian ini tentunya bersifat strategis, karena akan menghasilkan rekomendasi untuk penyempurnaan KRP yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Bekasi. Dengan kata lain, dengan adanya implementasi KLHS ini diharapkan permasalahan lingkungan yang ada dapat diatasi dan pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di Kota Bekasi.

KLHS ini dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program serta meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah melalui prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif yang diperkirakan akan terjadi, sehingga diperlukan KLHS Perubahan RPJMD Kota Bekasi. Penyusunan KLHS perubahan RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023 di dasarkan pada:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
2. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pasal 2 ayat (2) TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
3. Peraturan menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pasal 2 ayat (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031.
7. Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 mendasarkan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*"
8. Implikasi pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan penerimaan daerah, dan peningkatan belanja daerah dan pembiayaan sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah daerah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian daerah.
9. Bencana Banjir yang melanda beberapa permukiman warga serta pusat perbelanjaan dan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga amat mengganggu kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan di sebagian besar wilayah Kota Bekasi.

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud penyusunan KLHS perubahan RPJMD Kota Bekasi adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.



Tujuan yang ingin dicapai pada penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis perubahan RPJMD Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. KLHS Perubahan RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam Perubahan RPJMD
2. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan dalam penyusunan Perubahan RPJMD
3. Mengarahkan, memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk Perubahan RPJMD

Sasaran penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi adalah: menyediakan perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang sudah didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.3 JANGKA WAKTU

Jangka waktu penyusunan KLHS Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yaitu selama 2 bulan di mulai bulan Oktober dan sampai bulan November adapun tahap kegiatan dalam pelaksanaan KLHS perubahan RPJMD dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Jadwal Tahapan Kegiatan Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD
Kota Bekasi Tahun 2018-2023

No.	Rencana Aksi	Output	Target	Ukuran Keberhasilan (Outcome)	Keterangan
I	TAHAP PERSIAPAN PENYUSUNAN KLHS				
1	Rapat Persiapan Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD Kota Bekasi	Berita Acara Rapat dilengkapi dengan : - Notulen - Dokumentasi - Daftar Hadir - Draf KAK	Minggu Ke-I Dan II (1 Oktober 2020)	- Kerangka Acuan Kerja sudah ditanda tangan oleh Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi - SK Tim Pokja KLHS sudah ditandatangani Kepala Daerah Pada Tanggal 7 Oktober 2020	Sudah Selesai Dilaksanakan
		- Penentuan dan			

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No.	Rencana Aksi	Output	Target	Ukuran Keberhasilan (Outcome)	Keterangan
		pembuatan draf tim Pokja KLHS			
2	Pemilihan dan penetapan Tenaga Ahli (S2 Teknik Lingkungan, S1 Planologi, S1 Geodesi, S1 Ekonomi) Dan Narasumber KLHS	Surat Permohonan Ke Tenaga Ahli Dan Narasumber	Minggu Ke-I Dan II Oktober 2020	Surat Jawaban Kesediaan Tenaga Ahli Dan Narasumber KLHS serta biodata CV	Sudah Selesai Dilaksanakan
II TAHAPAN PENYUSUNAN KLHS PERUBAHAN RPJMD					
1	Rapat Pembahasan Identifikasi Pengumpulan Dan Updating Data TPB Tahun 2018-2019 dan penjelasan Perubahan RPJMD Kota Bekasi (Rapat Pokja)	Berita Acara Rapat dilengkapi dengan: - Notulen - Dokumentasi - Daftar Hadir - Update Data terbaru diambil dari beberapa sumber (LPPD dan Ranwal RPJMD) untuk pemenuhan target capaian TPB	Minggu Ke-I Dan II (8 Oktober 2020)	Data Sudah Tersampaikan Ke Tenaga Ahli	Sudah Selesai Dilaksanakan
2	Rapat Pembahasan Data Capaian TPB (rapat pokja)	Berita Acara Rapat dilengkapi dengan: - Notulen - Dokumentasi - Daftar Hadir - Hasil Analisa Data	Minggu Ke - III (16 Oktober 2020)	- Data Terbaru TPB - Kesepakatan Isu TPB - Dikarenakan Perubahan RPJMD	Sudah Selesai Dilaksanakan
3	Rapat Pelaksanaan Uji Publik I Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD Kota Bekasi melibatkan OPD terkait, Praktisi Lingkungan Dan Akademisi (Penyepakatan Data TPB Dan Isu Strategis)	- Bahan paparan uji public - Berita Acara Rapat Uji Publik I - Notulen - Dokumentasi - Daftar Hadir	Minggu Ke -IV (21 Oktober 2020)	- Kesepakatan Perubahan Capaian TPB - Kesepakatan Penetapan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan	Sudah Selesai Dilaksanakan
4	Rapat Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Uji Publik I (rapat pokja)	Berita Acara rapat dilengkapi dengan : - Notulen - Dokumentasi - Daftar Hadir - Penambahan Data LAKIP (Bag.Tapem Kota Bekasi)	Minggu Ke - V (Oktober 2020)	- Kesepakatan Uji Publik - Kesepakatan Penyelarasan KLHS Dan Dokumen Ranwal RPJMD - Terkirim Via email Data Terbaru (Kemiskinan Dan Pengangguran) dan LAKIP tahun 2018-2019	Sudah Selesai Dilaksanakan
5	Rapat Pelaksanaan Alternatif Proyeksi (Rapat Pokja KLHS)	- Analisa 6 Muatan KLHS - Bahan paparan - Berita Acara - Notulen - Dokumentasi - Daftar Hadir - Penambahan Data	Minggu Ke - I (3 November 2020)	Rumusan Alternatif Capaian TPB hasil analisa 6 muatan KLHS	4-Nov-20
6	Rapat Koordinasi Persiapan Uji Publik II	- Hasil Analisa 6 Muatan KLHS	Minggu Ke - II (9 November 2020)	Draft Skenario Kondisi Lingkungan 6 Muatan KLHS	10-Nov-20

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No.	Rencana Aksi	Output	Target	Ukuran Keberhasilan (Outcome)	Keterangan
	(FGD Pokja)	- Bahan paparan uji publik II Berita Acara rapat yang dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Notulen • Dokumentasi • Daftar Hadir - Penambahan Data	2020)		
7	Rapat Uji Publik II Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD Kota Bekasi (penyampaian rumusan alternatif dan rekomendasi) melibatkan OPD Terkait, Akademisi dan Praktisi Lingkungan	Penyiapan Bahan Paparan rumusan alternatif dan Rekomendasi KLHS Terhadap Perubahan RPJMD 2018-2032 <ul style="list-style-type: none"> - Bahan paparan - Berita Acara - Notulen - Dokumentasi - Daftar Hadir - Penambahan Data 	Minggu Ke III (16 November 2020)	Kesepakatan rumusan alternatif dan Rekomendasi KLHS Terhadap Perubahan RPJMD Kota Bekasi	16-Nov-20
8	Pembuatan Laporan	- Laporan Induk KLHS Perubahan RPJMD Eksecutive Summary KLHS	Minggu Ke III (18 November 2020)	- Tersedianya Penyusunan Dokumen KLHS Dalam Bentuk Softcopy dan Hardcopy - terselesaikannya Penyusunan Eksum Dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy- Dokumen induk dan eksum di tandatangani oleh Kepala Daerah	17-Nov-20
9	Penjaminan kualitas dan Pengintegrasian KLHS didalam dokumen perubahan RPJMD Kota Bekasi	- pengisian Form Penjaminan Kualitas dan Pengintegrasian KLHS didalam Dok. RPJMD Sesuai Permen KLHK RI No. 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan KLHS	Minggu Ke III November 2020	- Penyepakatan Penjaminan kualitas dan Pengintegrasian oleh Tim Pokja KLHS; - Dok. Penjaminan Kualitas ditandatangani oleh Kepala Daerah; - Dok. Pengintegrasian KLHS ditandatangani oleh Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi selaku penyusun Kebijakan Rencana Program (KRP) dan Kadis LH Kota Bekasi (Ketua Pokja KLHS) serta Mengetahui Sekretaris Daerah Kota Bekasi Selaku Koordinator Tim Pokja KLHS	17-Nov-20
10	Pendokumentasian Dan Pentahapan Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD	- - Berkas Pentahapan Pelaksanaan Persiapan Sampai dengan Penyusunan KLHS (rapat-rapat Pokja, FGD dan Uji Publik I dan II	Minggu Ke III November 2020	Pendokumentasian dan Pentahapan penyusunan KLHS sudah dalam bentuk PDF dan Hardcopy	17-Nov-20
11	Pra Validasi	- Permohonan Surat Pengajuan sidang	Minggu Ke I Desember 2020	Surat Permohonan sidang Validasi Surat permohonan	18-Nov-20

No.	Rencana Aksi	Output	Target	Ukuran Keberhasilan (Outcome)	Keterangan
		Validasi KLHS Perubahan RPJMD Kota Bekasi		sidang validasi Sudah di tandatangani oleh kepala daerah dan disampaikan ke Gubernur Prov. Jabar Cq. DLHD Provinsi Jawa Barat	
12	Validasi	- Jadwal Sidang Validasi Dari DLHD Provinsi Jabar	Penjadwalan oleh Tim Pokja KLHS provinsi Jabar	Berita Acara Hasil Penilaian Dari tim penilai KLHK RI, Tim Pokja Provinsi Jawa Barat, Akademisi Ahli KLHS	Tim Pokja KLHS provinsi Jabar
13	Hasil Sidang Validasi	- Berita Acara Hasil sidang dan form perbaikan dok.KLHS	oleh tim pokja KLHS Provinsi Jawa Barat	Surat Persetujuan Validasi dari Gubernur Jawa Barat Dan Lampiran Hasil Validasi. Dengan Catatan Dokumen KLHS Sudah Memenuhi Kelayakan uji materi teknis dan sudah dilakukan Perbaikan sesuai arahan dari tim Validator	Tim Pokja KLHS provinsi Jabar

1.4 RUANG LINGKUP WILAYAH KAJIAN

Ruang lingkup lokasi pekerjaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD adalah Kota Bekasi yang merupakan salah satu wilayah bagian dari Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah sekitar 213,12 km² atau 21.312 ha, terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri dari 56 kelurahan.

1.5 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KLHS

Dasar hukum dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkung Hidup Strategis;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
5. Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2018 Penyusunan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031
9. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

1.6 HAMBATAN DAN KUNCI KEBERHASILAN

A. Hambatan

Dalam proses KLHS dari tahap awal hingga akhir, terdapat beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan penyusunan KLHS Perubahan RPJMD Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Ketidaklengkapan data SLHD (Status Lingkungan Hidup Daerah) Kota Bekasi yang digunakan untuk baseline data;
2. Terbatasnya data-data capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan;
3. Dinas/OPD belum sepenuhnya tahu tentang data – data SDGs
4. Pemahaman dinas/pokja tentang tujuan pembangunan berkelanjutan dan target SDGs yang harus di capai masih terbatas.

B. Kunci Keberhasilan

Dalam proses KLHS dari tahap awal hingga akhir, terdapat kunci keberhasilan dalam pelaksanaan penyusunan KLHS adalah keterlibatan pokja dan SKPD terkait, kerjasama antara tim penyusun KLHS dan Penyusun RPJM serta ada partisipasi masyarakat.

Proses keterlibatan tim pokja, SKPD terkait dan kerjasama antara tim penyusun KLHS dan Penyusun Perubahan RPJM sangatlah menunjang dalam keberhasilan tersusunnya KLHS Perubahan RPJMD selain itu partisipasi, negosiasi, dan kolaborasi antara masyarakat dalam penyusunan KLHS sangat penting karena dengan adanya partisipasi berbagai pihak akan mendorong terkumpulnya informasi, wawasan, dan pengetahuan mengenai keadaan dan permasalahan wilayahnya yang pada akhirnya berguna untuk merumuskan isu-isu strategis prioritas, merumuskan skema capaian TPB sesuai dengan target nasional dan merumuskan penyempurnaan rekomendasi kebijakan dan program yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Bekasi.

1.7 SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Akhir pekerjaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi ini, terdiri dari 7 (tujuh) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian tentang latar belakang, tujuan dan, sasaran, lingkup kegiatan dan keluaran (*output*), dasar hukum, ruang lingkup pekerjaan, dan sistematika penulisan laporan.

BAB 2 : DASAR TEORI

Bab ini berisikan bahasan tentang pengertian dan metodologi yang di gunakan dalam penyusunan KLHS perubahan RPJMD Kota Bekasi

BAB 3 : KONDISI DAERAH

Bab ini berisikan bahasan tentang kondisi daya dukung dan daya tampung, kondisi geografis, kondisi demografis dan kondisi keuangan daerah.

BAB 4 : ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Bab ini berisikan uraian tentang kondisi tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), analisis capaian tujuan pembangunan (alternative proyeksi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan, analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup) dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis.

BAB 5 : ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Bab ini berisikan uraian tentang capaian indicator TPB pada organisasi perangkat daerah, peran para pihak dalam capaian TPB di Kota Bekasi dan Kerangka Pendanaan.

BAB 6 : ALTERNATIF SKENARIO DAN PERUMUSAN REKOMENDASI

Bab ini berisikan uraian tentang alternatif scenario dan rekomendasi daya dukung dan daya tampung, alternatif scenario dan rekomendasi untuk indicator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, alternatif skenario dan rekoemendasi untuk indicator yang belum ada data/belum di laksanakan serta hasil pengintegrasian antara KLHS Perubahan RPJMD dan Perubahan RPJMD Kota Bekasi

BAB 7 : KESIMPULAN

Bab ini berisikan uraian tentang kesimpulan mengenai analisis daya dukung dan daya tampung, kondisi dan analisis tinjauan pembangunan berkelanjutan dan alternatif scenario dan rekomendasi KLHS Perubahan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023.



BAB 2 DASAR TEORI

Bab 2 menjelaskan mengenai pengertian dan metodologi yang di gunakan dalam penyusunan KLHS perubahan RPJMD Kota Bekasi



2.1 PENGERTIAN UMUM

1. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yang lebih dikenal dengan "Sustainable Development" didefinisikan sebagai pembangunan atau perkembangan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Tantangan pembangunan berkelanjutan adalah menemukan cara untuk meningkatkan kesejahteraan sambil menggunakan sumberdaya alam secara bijaksana, sehingga sumber daya alam terbarukan dapat dilindungi dan penggunaan sumber alam yang dapat habis (tidak terbarukan) pada tingkat dimana kebutuhan generasi mendatang tetap akan terpenuhi. Kriteria pembangunan berkelanjutan harus mengacu pada empat aspek umum pembangunan yaitu aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan teknologi. Sebuah inisiatif negara-negara selatan dan negara utara dalam sebuah kerja sama aplikasi CDM (Southsouthnorth-SSN*) menghasilkan sebuah kriteria dan indikator untuk menilai kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

2. Daya Dukung Lingkungan

Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mendefinisikan daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Pendapat lain menyebutkan bahwa, daya dukung lingkungan adalah kebutuhan hidup manusia dari lingkungan dapat dinyatakan dalam luas area yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan manusia (Ienzen, 2003 dalam (Nur, 2016). Daya dukung lingkungan atau carrying capacity mengandung pengertian kemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan makhluk hidup secara optimum dalam periode waktu yang panjang. Daya dukung lingkungan dapat pula diartikan kemampuan lingkungan memberikan kehidupan organisme secara sejahtera dan lestari bagi penduduk yang mendiami suatu kawasan. (Muta'Ali, 2012). Daya dukung lingkungan hidup merupakan batasan kemampuan lingkungan hidup yang harus diperhitungkan di dalam setiap pembangunan. Penentuan daya dukung lingkungan hidup untuk pengendalian perkembangan kawasan.

Salah satu sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya kelestarian lingkungan, dimana untuk menjamin kelestarian lingkungan setiap pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. (Widiatmono et al., 2018). Konsep yang digunakan untuk memahami ambang batas kritis daya dukung ini adalah adanya asumsi bahwa ada suatu jumlah populasi yang terbatas yang dapat didukung tanpa menurunkan derajat lingkungan yang alami sehingga ekosistem dapat terpelihara. (Nur, 2016).

Penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam pengendalian perkembangan kawasan, salah satunya didasarkan pada komponen kesesuaian dan ketersediaan lahan. Ketersediaan lahan mengacu pada

kebutuhan luasan lahan dan jenis kegiatan untuk kawasan tertentu dan membandingkannya dengan pemanfaatan ruang. Apabila sesuai maka dapat diindikasikan bahwa daya dukung lingkungan hidup berada dalam keadaan belum terlampaui dan sebaliknya. Ketersediaan lahan mengacu pada kebutuhan lahan dan jenis kegiatan untuk suatu kawasan. (Widiatmono et al., 2018). Terdapat dua pengukuran penting dalam analisis sumberdaya lahan, yaitu kemampuan lahan dan kesesuaian lahan. Tejoyuwono, 1991 dalam (Muta'Ali, 2012) mengilustrasikan kemampuan dan kesesuaian lahan dalam pengertian daya dukung, dimana dari perbandingan antara daya dukung lahan (supply) dan nilai kemanfaatannya (demand) dapat dinilai kelayakannya. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara daya dukung lahan dan kemafaatannya maka dapat mengakibatkan ketidakefisienan yang berarti daya dukung telah terlampaui atau tidak efektif, karena tingkat pemanfaatannya masih jauh di bawah kemampuan daya dukung lahannya.

3. Pengertian KLHS

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program. Makna "strategis" berarti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Pendekatan strategis dalam kebijakan, rencana, dan/atau program adalah untuk memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan, serta merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

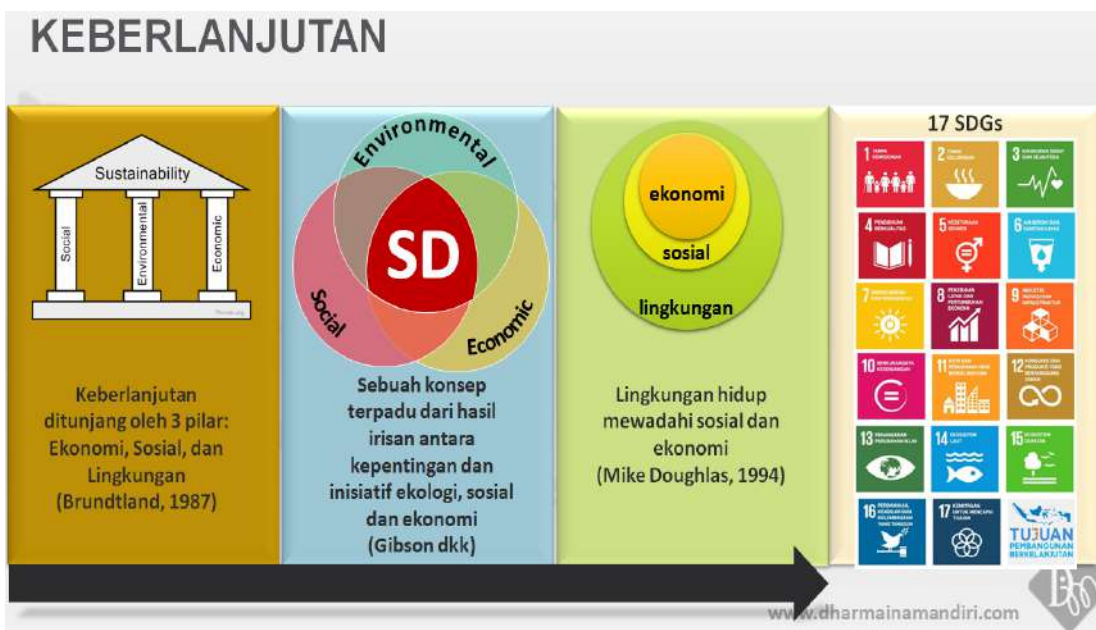
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/ atau program. Menurut pendapat DEAT dan CSIR (2000), KLHS adalah proses mengintegrasikan konsep keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Sedangkan menurut Brown dan Therievel (1999), KLHS adalah suatu proses yang diperuntukan bagi kalangan otoritas yang bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan/pemrakarsa (pada saat formulasi kebijakan) dan pengambil keputusan (pada saat persetujuan kebijakan) dengan maksud untuk memberi pemahaman holistik perihal implikasi sosial dan lingkungan hidup.

Berdasarkan Permendagri NO 7 tahun 2018 pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah

yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Strategis adalah hal yang menunjukkan komitmen terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Konsep keberlanjutan yang digunakan disini berasosiasi dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang diperkenalkan oleh *World Commission on Environment and Development* sebagaimana tertuang dalam laporan Brundtland : “pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka”.

Wikipedia mendefinisikan keberlanjutan sebagai karakteristik suatu proses atau kondisi tertentu yang dapat terus bertahan untuk jangka waktu yang tak terbatas. Sementara Partidario (2007) mendefinisikan keberlanjutan sebagai suatu proses atau kondisi tertentu yang dicapai sebagai hasil pembangunan berkelanjutan yang berlangsung dalam jangka panjang waktu yang panjang. Keberlanjutan di tunjang oleh 3 pilar yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar di bawah ini.



4. Kaidah KLHS

Untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan, kaidah-kaidah pelaksanaan KLHS adalah sebagai berikut (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah).

5. Fokus pada tujuan

Proses pelaksanaan kajian, konsisten dengan kebutuhan dan tujuan yang telah disepakati pada awal pelaksanaan;

a. Decision relevant atau relevan dengan keputusan

Proses pelaksanaan kajian berujung pada pengambilan keputusan yang sejalan dengan isu pembangunan berkelanjutan;

b. Terpadu

Proses pelaksanaan kajian memastikan keserasian antar komponen lingkungan hidup, yaitu sosial budaya, ekonomi, dan ekologi;

c. Transparan

Proses pelaksanaan kajian dilakukan dengan terbuka, dan dokumentasi hasil kajiannya menyajikan informasi yang jelas, mudah dimengerti, dan dapat diakses oleh publik;

d. Partisipatif

Proses pelaksanaan kajian dilakukan bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan yang relevan;

e. Akuntabel

Proses pelaksanaan kajian dilakukan secara profesional, sesuai prosedur, terbuka, obyektif, seimbang dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan serta diverifikasi oleh pihak lain;

f. Iteratif

Proses pelaksanaan kajian bersifat adaptif dan terbuka untuk dikaji ulang, diperdalam analisisnya, dan dilakukan revisi

g. Evaluasi diri

Proses pelaksanaan kajian dilakukan dengan tidak diserahkan kepada pihak ketiga.

6. Manfaat KLHS

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 menyatakan bahwa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

- a. Merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung pengambilan keputusan,
- b. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian sistematis dan cermat atas opsi pembangunan yang tersedia,
- c. Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi,
- d. Mencegah kesalahan investasi dengan berkat teridentifikasinya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak dini
- e. Tata pengaturan (governance) yang lebih baik berkat keterlibatan para pihak (stakeholders) dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi

- f. Melindungi asset-asset sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan,
- g. Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbagi pemanfaatan sumberdaya alam, dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan

7. KLHS Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Implementasi berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup, terutama AMDAL mampu mengurangi dampak negatif proyek terhadap lingkungan. Meskipun demikian, instrumen tersebut bersifat lokal atau hanya pada lingkup lokasi proyek proyek rancang-bangun. Secara konsep pembangunan menyeluruh, AMDAL belum mampu memberikan jalan keluar terhadap dampak yang sifatnya lebih kumulatif, tidak langsung, dan sinergis. Oleh karena itu, keberadaan KLHS yang mengantisipasi dampak lingkungan pada tahap hulu atau pada tahap KRP dianggap mampu menutupi kekurangan tersebut. Karena sifat penanggulangannya di tahap awal yaitu tahap KRP, KLHS dapat bersifat lintas batas dan lintas sektor, serta lebih bersifat keberlanjutan karena mengatasi dampak di masa mendatang. Dengan demikian, KLHS seharusnya dapat diartikan sebagai sebuah instrumen yang mampu menjadikan implikasi pelaksanaan KRP sebagai sebuah pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan sehingga keberlanjutan pembangunan dapat lebih terjamin (Annandale dan Bailey 1999). Secara substansial, KLHS merupakan upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan.

8. KLHS Dalam Proses Pengambilan Keputusan

Seperti yang telah disebutkan sejak awal, bahwa KLHS merupakan instrumen yang sejak tahap awal penyusunan KRP, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dilibatkan. Hal ini yang membedakannya dengan AMDAL yang dikaji pada saat tahap proyek saja



Gambar 2.1
Instrumen Pelaksanaan KLHS

2.2 MEKANISME PEMBUATAN KLHS RPJMD

Sesuai Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD dalam pasal 3 menyatakan bahwa Pembuatan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme:

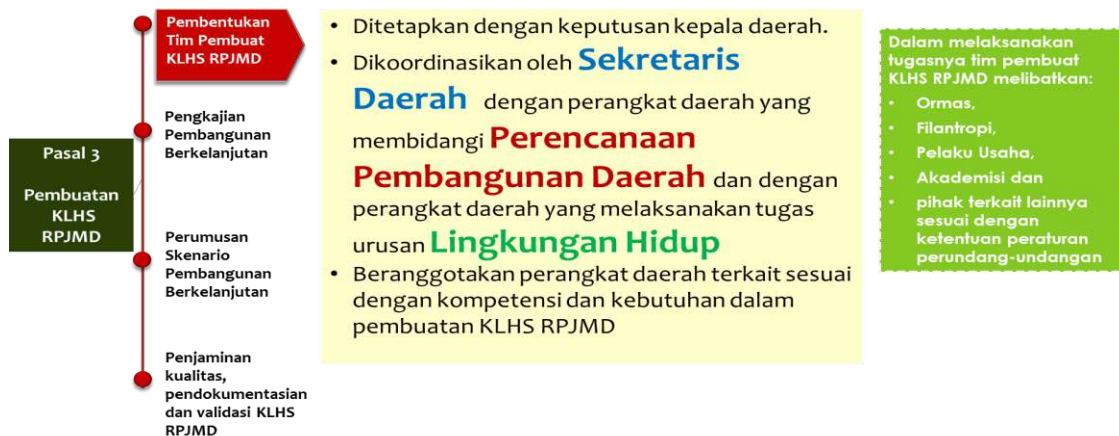
1. Pembentukan tim pembuat KLHS perubahan RPJMD

Pembentukan Tim Pembuat KLHS perubahan RPJMD meliputi:

- Pemerintah Daerah membentuk tim pembuat KLHS Perubahan JMD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- Tim pembuat KLHS perubahan RPJMD dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah bersama dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup.
- Tim pembuat KLHS perubahan RPJMD beranggotakan perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS perubahan RPJMD.
- Dalam melaksanakan tugasnya tim pembuat KLHS perubahan RPJMD melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya mengenai pembentukan tim KLHS dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.2
Pembentukan Tim Pembuat KLHS Perubahan RPJMD



Sumber: Permen No. 7 Tahun 2018

2. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

Tahap Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup:

a. Kondisi Umum Daerah

Identifikasi dan analisis kondisi umum daerah terdiri dari:

- Identifikasi dan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan (6 muatan KLHS);
- Identifikasi dan Analisis Karakteristik Geografis;
- Identifikasi dan Analisis Karakteristik Demografis;
- Identifikasi dan Analisis Kapasitas Keuangan Daerah.

b. Capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan

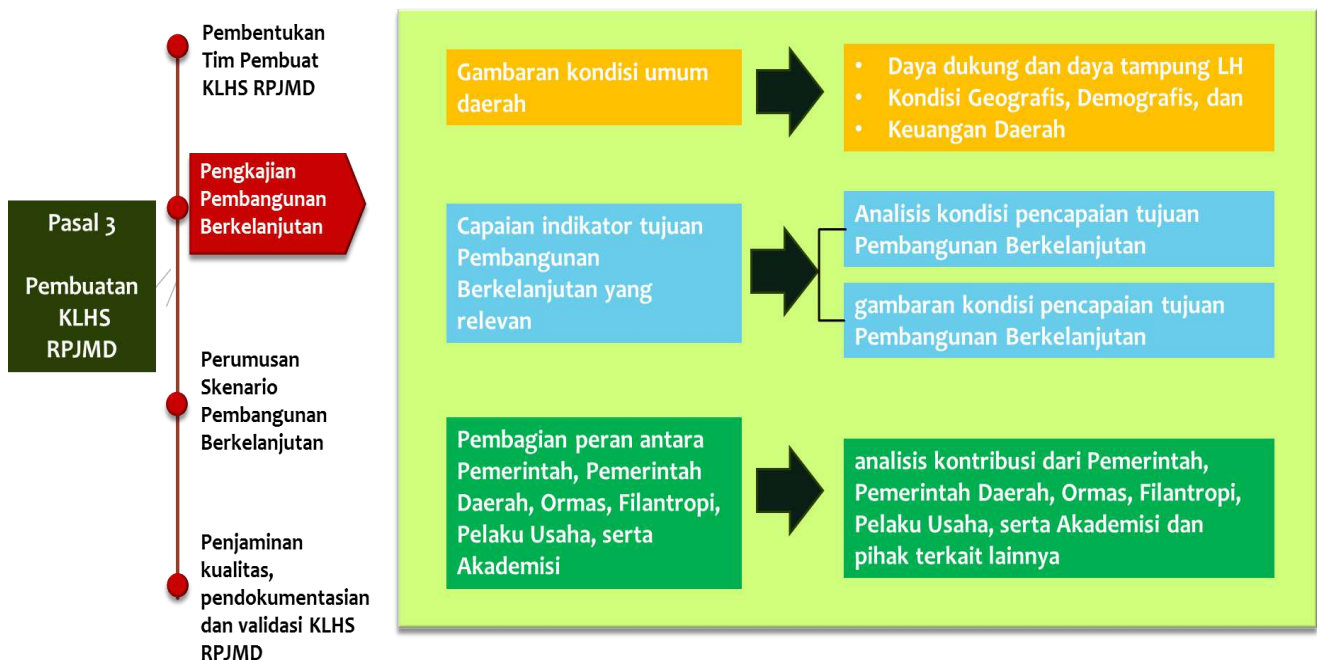
Pada tahap ini merupakan tahap analisa kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Baseline Analysis*) yaitu menghitung indikator capaian TPB yang relevan dengan karakteristik isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) di Kota Bekasi → Lampiran Permendagri 7/2018.

c. Pembagian peran antar pemangku kepentingan

Pembagian peran antar pemangku kepentingan berupa analisis kontribusi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pembangunan Daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai pengkajian pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.3
Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan KLHS Perubahan RPJMD



Sumber: Permen No. 7 Tahun 2018

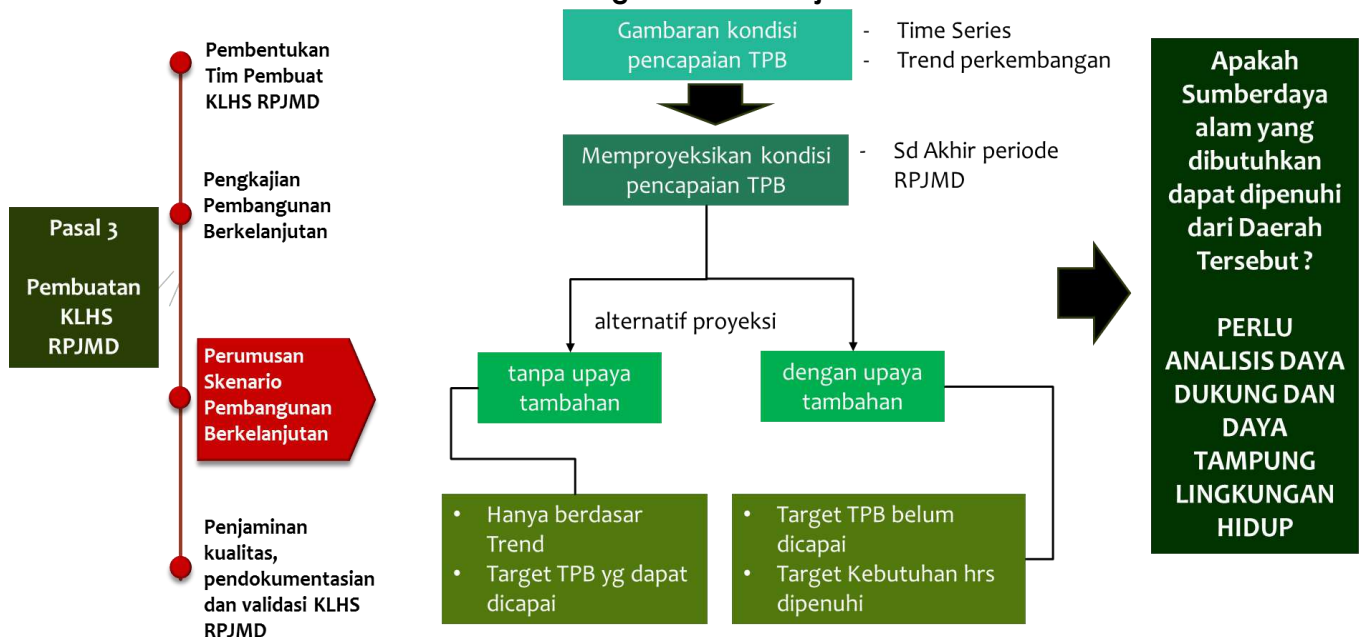
3. Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan

Tahap perumusan skenario pembangunan berkelanjutan, terdiri dari:

- a. Tim pembuat KLHS perubahan RPJMD melakukan perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- b. Alternatif proyeksi disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode perubahan RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

- c. Alternatif proyeksi kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berupa target pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan.
 - d. Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional.
 - e. Alternatif proyeksi dengan upaya tambahan disusun untuk percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Untuk lebih jelasnya mengenai perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.4
Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan KLHS Perubahan RPJMD



Sumber: Permen No. 7 Tahun 2018

4. Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian dan Validasi
 - a. Kepala daerah melakukan penjaminan kualitas KLHS perubahan RPJMD secara mandiri untuk memastikan proses pembuatan KLHS perubahan RPJMD dan kualitas substansi KLHS perubahan RPJMD.
 - b. Penjaminan kualitas terhadap proses pembuatan KLHS perubahan RPJMD dibuktikan dengan:
 - Ketersediaan surat keputusan pembentukan tim pembuat KLHS perubahan RPJMD;
 - Jadwal kegiatan pembuatan KLHS perubahan RPJMD; dan
 - Berita acara kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme penyusunan KLHS perubahan RPJMD dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.5
Mekanisme Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD



2.3 METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Berdasarkan substansi Permendagri nomor 7 Tahun 2018 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD yang dipelajari maka terdapat beberapa metode yang digunakan dalam kajian ini yang meliputi (1) pengumpulan data/baseline data (2) metode penentuan daya dukung lingkungan, (3) metode identifikasi dan analisis isu strategis TPB, (4) metode pengkajian pembangunan berkelanjutan, (5) metode penyusunan skenario pembangunan berkelanjutan (5) metodologi penyusunan rekomendasi untuk pengintegrasian hasil KLHS kedalam KRP. Berikut penjelasan lebih rinci.

1. Metoda Pengumpulan Data/Base Line Data

Metoda yang dilakukan untuk baseline data yaitu:

- a. Pengumpulan data sekunder yaitu dengan menggunakan data-data yang diambil dari dokumen kajian yang sudah ada seperti dokumen KLHS RPJMD yang sudah disusun tahun 2018, dokumen KLHS RTRW tahun 2017, dokumen IKPLHD Kota Bekasi tahun 2019, dokumen LPPD, dokumen SAKIP, dokumen LAKIP dinas, dokumen RPJMD perubahan, Kota Bekasi Dalam Angka/data BPS tahun 2019 dan 2020, kependudukan dari disdukcapil.
- b. menggunakan data primer yaitu dari hasil FGD, hasil uji public 1, uji public 2 dan mendatangi beberapa dinas terkait.

- c. semua data yang didapat selanjutnya ditabulasi dan di kompilasi data sesuai dengan materi muatan yang ada di dalam dokumen KLHS perubahan RPJMD.
- d. Adapun data-data yang di kumpulkan meliputi:
- Data Kondisi Umum Daerah meliputi :
 - Data geografis meliputi data administrasi, data topografi, data klimatologi, data geologi dan data guna lahan, data-data yang di gunakan berasal dari data dan peta tematik RTRW Kota Bekasi serta data yang berasal dari peta tematik Badan Informasi Geospasial (BIG). Data kondisi geografis di gunakan untuk mengidentifikasi kondisi fisik wilayah dan dapat di kaitkan dengan kondisi DDDT daerah dan capaian TPB.
Contoh Isu dari Kondisi Geografis berupa :
 - Kualitas air permukaan
 - Kualitas air tanah
 - Akses terhadap sumber air
 - Perlindungan dan pemanfaatan sumber daya airIsu yang dihasilkan dari kondisi geografis, menjelaskan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kondisi fisik daerahnya.
 - Data kondisi demografi meliputi data jumlah penduduk dan data pertumbuhan penduduk dengan sumber data Disdukcapil dan BPS.
 - Data kondisi lingkungan merupakan data-data yang terkait dengan 6 muatan KLHS yaitu kondisi dayadukung dan daya tampung lingkungan, kondisi potensi dampak dan resiko lingkungan hidup, kondisi jasa ekosistem, Sumberdaya alam, kondisi Adaptasi perubahan Iklim dan Keanekaragaman hayati.
 - Data kondisi keuangan daerah
Data kondisi keuangan daerah berupa :
 - PDRB.
 - Data keuangan pemerintah (Data anggaran, Data pendapatan, Data belanja dan Data pembiayaan).
 - Data keuangan Non Pemerintah berupa data dan program kegiatan non pemerintah (RAD TPB).Kondisi keuangan daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan, data kondisi keuangan pemerintah dan non pemerintah dapat dimanfaatkan untuk pengisian data peran para pihak.
Kondisi keuangan daerah Kota Bekasi menggunakan data sekunder Perubahan RPJMD Kota Bekasi.
 - Data-data capaian indikator TPB yang terkait dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dimana data-data ini di peroleh dari dokumen LPPD, dokumen SAKIP, dokumen LAKIP dinas dan dokumen perubahan RPJMD;
 - Data terkait isu strategis dan data isu pembangunan berkelanjutan di rumuskan berdasarkan kajian literatur, hasil kesepakatan pemangku kepentingan pada saat FGD, Uji Publik I dan Uji Publik II dan hasil analisis tim penyusun.

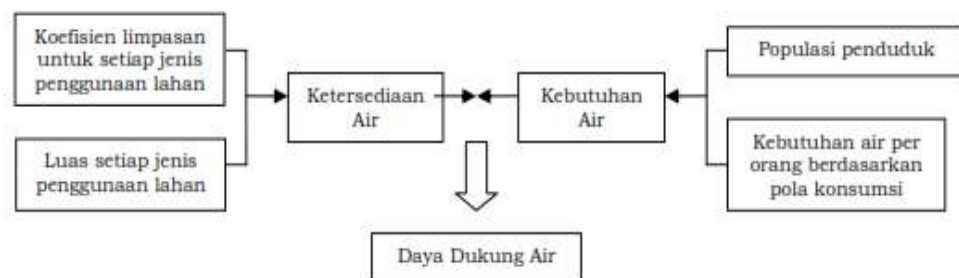
2. Metode Penyusunan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Salah satu aspek yang diamanatkan dalam proses penyusunan KLHS RPJM (Permendagri 7/2018) adalah ketersediaan data Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Berdasarkan pasal 13 PP 46 tahun 2016 daya dukung dan daya tampung yaitu 6 muatan KLHS meliputi :

- Kapasitas DDDT-LH untuk pembangunan
- Kinerja layanan atau jasa ekosistem
- Perkiraan mengenai dampak dan resiko LH
- Efisiensi pemanfaatan SDA
- Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
- Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

a. Metoda dalam menghitung dayadukung dan daya tampung air

Penentuan daya dukung air dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air dengan mengacu pada Permen LH RI Nomor 17 Tahun 2009, seperti pada gambar dibawah ini.



ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak.

Rumus:

$$C = \sum (c_i \times A_i) / \sum A_i$$

$$R = \sum R_i / m$$

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

Keterangan:

SA = ketersediaan air (m³/tahun)

C = koefisien limpasan tertimbang

C_i = Koefisien limpasan penggunaan lahan i

A_i = luas penggunaan lahan i (ha) dari data BPS atau Daerah Dalam Angka

R = rata-rata curah hujan tahunan wilayah (mm/tahunan) dari data BPS atau BMG atau dinas terkait

R_i = curah hujan tahunan pada stasiun i

m = jumlah stasiun pengamatan curah hujan

A = luas wilayah (ha)

10= faktor konversi dari mm.ha menjadi m³

Tabel 2.1
Koefisien Limpasan

No	Deskripsi Permukaan	Ci
1	Kota, jalan aspal, atap genting	0,7-0,9
2	Kawasan industri	0,5-0,9
3	Permukaan multi unit, pertokoan	0,6-0,7
4	Komplek Perumahan	0,4-0,6
5	Villa	0,3-0,5
6	Taman, Pamakaman	0,1-0,3
7	Pekarangan tanah berat: a. >7 % b. 2-7 % c. < 2%	0,25-0,35 0,18-0,22 0,13-0,17
8	Pekarangan tanah ringan a. >7 % b. 2-7 % c. < 2%	0,15-0,2 0,10-0,15 0,05-0,10
9	Lahan berat	0,40
10	Padang rumput	0,35
11	Lahan budidaya pertanian	0,30
12	Hutan produksi	0,18

Sumber: Permen LH 17/2009

Berdasarkan dari data curah hujan tahunan di Kota Bekasi yaitu sebesar 2.723 mm/tahun (Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2018). Dari nilai curah hujan maka dengan menggunakan pendekatan *water balance* dapat dihitung potensi ketersediaan air di Kota Bekasi untuk kondisi eksisting (tahun 2017). Perhitungan dari potensi ketersediaan air di Kota Bekasi berdasarkan tata guna lahan eksisting tahun 2017 dan data rencana pola ruang Kota Bekasi tahun 2031. Dari data luasan tutupan lahan di Kota Bekasi tersebut maka tutupan lahan paling luas adalah permukiman dan pusat kegiatan. Hal ini memperlihatkan bahwa Kota Bekasi menjadi pusat kegiatan perkotaan dan permukiman penduduk.

Untuk hasil perhitungan potensi sumber daya air di Kota Bekasi dengan menggunakan rumus neraca air konvensional dimana terdapat pengaruh dari jenis tutupan lahan terhadap infiltrasi maupun *run off*, maka secara lengkap disajikan neraca air per jenis penggunaan lahan dan untuk hasil perhitungan potensi dayadukung air dapat di lihat pada dokumen laporan.

b. Metoda Dalam Menghitung Daya Dukung Pangan

Analisa daya dukung lahan merupakan salah satu metode analisis dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah. Analisa ini sangat dibutuhkan dalam rangka melihat dan memprediksi keseimbangan antara tingkat kebutuhan manusia terhadap lahan dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Melalui analisis daya dukung lahan **dapat diketahui luas panen produksi dan produktifitas perkebunan yang merupakan dua faktor yang dapat meningkatkan daya dukung lahan untuk komoditas pangan**. Hal ini sebagai mana diatur dalam Permen LH RI Nomor 17 Tahun 2009.

Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk merupakan kebutuhan hidup layak per penduduk dibagi produktivitas beras lokal, dimana:

- Kebutuhan hidup layak per penduduk diasumsikan sebesar 1 ton setara beras/kapita/tahun
- Daerah yang tidak memiliki data produktivitas beras lokal, dapat menggunakan data rata-rata produktivitas beras nasional sebesar 2400 kg/ha/tahun.

Penentuan daya dukung lahan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan sehingga dapat dilihat status daya dukung lahan yang mencukupi kebutuhan akan produksi hayati terhadap penduduk yang tinggal di suatu kawasan.

Status daya dukung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (SL) dan kebutuhan lahan (DL) (Permen LH No. 17 Tahun 2009) bahwa:

- Bila $SL > DL$, daya dukung lahan dinyatakan surplus.
- Bila $SL < DL$, daya dukung lahan dinyatakan defisit

Secara lengkap, hasil analisa daya dukung lahan/pangan terasi dalam dokumen laporan induk KLHS perubahan RPJMD

c. Metoda Menghitung Kinerja Layanan Atau Jasa Ekosistem

Ekosistem adalah entitas yang kompleks terdiri atas komunitas tumbuhan, binatang dan mikroorganisme yang dinamis beserta lingkungan abiotiknya yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan unit fungsional (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). Ekosistem memiliki struktur dan proses untuk dapat menjalankan fungsinya. Struktur ekosistem adalah berbagai elemen biotik dan abiotik yang terdapat pada ekosistem tersebut. Proses pada ekosistem adalah interaksi antar elemen tersebut yang biasanya berupa aliran materi, energi dan informasi. Fungsi ekosistem adalah kemampuan komponen ekosistem untuk melakukan proses alam dalam menyediakan materi dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung (de Groot, 2010). Sementara itu, jasa ekosistem merupakan manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem (Millenium Ecosystem Assessment, 2005).

Klasifikasi fungsi dan jasa ekosistem telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang kemudian diadopsi oleh Millenium Ecosystem Assessment (2005) menjadi empat kategori dan 23 kelas jasa ekosistem sebagai berikut:

• Jasa Penyedia (provisioning services)

Ekosistem berfungsi untuk menyediakan produk-produknya yang secara langsung dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Jenis layanan atau jasa penyediaan dikategorikan berdasarkan jenis produk alam yang dihasilkan oleh ekosistem seperti:

- Jasa Penyedia air bersih yaitu dengan fungsi penyediaan air untuk dimanfaatkan
 - Jasa Penyedia pangan, yaitu dengan fungsi penyediaan pangan yang dikelompokkan menjadi pangan yang diperoleh langsung dari alam (contoh: produk ikan tangkapan, tanaman pangan liar, hasil hutan yang dapat dijadikan pangan); serta pangan yang diperoleh dari hasil budidaya manusia yang mengandalkan dukungan lingkungan (contoh: produk pertanian).
 - Jasa Penyedia serat, bahan bakar dan material lainnya yaitu dengan fungsi spesies atau komponen abiotik dengan potensi penggunaan kayu, bahan bakar, atau bahan dasar
 - Jasa Penyedia sumber daya genetik yaitu dengan fungsi penyediaan spesies dengan materi genetik yang (berpotensi) bermanfaat, misalnya untuk pengobatan dan spesies ornamental.
- **Jasa Pengatur atau Pengendali**
- Ekosistem berfungsi membentuk dan memelihara keseimbangannya sendiri melalui sistem pengaturan dan pengendalian atas proses-proses alamnya. Manusia dan makhluk hidup mendapatkan manfaatnya dalam bentuk antara lain:
- Jasa pengatur kualitas udara yaitu ekosistem berfungsi untuk menyerap aerosol dan bahan kimia dari atmosfer
 - Jasa pengatur iklim yaitu ekosistem berfungsi mempengaruhi iklim lokal dan global melalui tutupan lahan dan proses yang dimediasi secara biologis.
 - Jasa pengatur Mitigasi bencana Alam yaitu ekosistem terutama unsur struktur alamnya berfungsi mencegah dan melindungi dari kebakaran lahan, abrasi, longsor, badai, gempa bumi, banjir dan tsunami.
 - Jasa pengatur air yaitu ekosistem terutama aspek bentang alam dan penutup lahan dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala
 - Jasa pengatur pemurnian air dan pengolahan limbah yaitu unsur biota dan abiotic ekosistem berfungsi dalam proses pembersihan atau penguraian materi organik, senyawa dan nutrisi steril di sungai, danau, dan wilayah pesisir.
 - Jasa penyerbukan alami yaitu ekosistem berfungsi mempengaruhi proses penyerbukan alami pada tanaman budidaya
 - Jasa pengendali hama yaitu ekosistem berfungsi mengontrol populasi hama melalui hubungan trofik Penampungan dan penguraian limbah dan/atau sampah.
- **Jasa Sosial Budaya**
- Ekosistem berfungsi menyediakan manfaat yang bersifat non material bagi manusia yaitu berupa manfaat sosial budaya. Bentuk jasa sosial budaya antara lain:
- Jasa estetika yaitu apresiasi terhadap pemandangan alami
 - Jasa rekreasi yaitu peluang untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi
 - Jasa warisan budaya dan identitas lokal (adat istiadat) yang dilihat dari fitur bentang alam atau spesies budaya dan adat

• **Fungsi Layanan Pendukung Primer**

Layanan pendukung primer adalah hasil dan proses ekosistem yang menentukan keberadaan fungsi-fungsi layanan ekosistem lainnya, seperti:

- Jasa Habitat dan keanekaragaman hayati yaitu manfaat ekosistem menyediakan habitat untuk pembiakan, makan, istirahat dan untuk spesies transien.
- Jasa pembentukan dan regenerasi tanah yaitu manfaat proses alami ekosistem dalam pembentukan dan regenerasi tanah
- Jasa produksi primer yaitu kemampuan lingkungan dalam mengkonversi energi dari matahari menjadi bentuk organik melalui proses fotosintesis
- Jasa penyedia siklus hara yaitu kemampuan ekosistem mendukung proses pelapukan bahan organik.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kapasitas dan kualitas ke empat jasa lingkungan hidup tersebut perlu dijaga keseimbangan, kestabilan, maupun produktivitasnya. Oleh karenanya, pasal 13 PP 46 PP 46 tahun 2016 mengamanatkan dilakukannya kajian kinerja layanan atau jasa lingkungan hidup dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Hal ini dapat diartikan bahwa pemanfaatan sumberdaya alam sebagai konsekuensi pelaksanaan KRP wajib KLHS atau kegiatan lain yang berpotensi berdampak lingkungan tidak berdampak negatif terhadap kinerja layanan atau jasa lingkungan hidup. Indikator kinerja masing-masing jasa lingkungan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Jasa Lingkungan: Fungsi, Indikator Keadaan Dan Indikator Kinerja

No	Jasa Lingkungan	Fungsi	Indikator Keadaan	Indikator Kinerja
Fungsi Penyediaan				
1	Pangan	a. Ketersediaan tanaman (serealida dan non serealida) yang dapat dimakan	Stok total dan rata-rata dalam kg/ha	Produktivitas bersih (dalam kcal/ha/tahun atau unit lainnya)
		b. Ketersediaan hewan yang bisa di makan		
2	Air	Ketersediaan air untuk di manfaatkan	Jumlah total air (m3/ha)	Jumlah maksimum ekstraksi air (m3/ha/tahun)
3	Serat bahan bakar dan material lain	Ketersediaan spesies atau komponen abiotic dengan potensi penggunaan kayu bahan bakar atau bahan dasar	Total biomassa (kg/ha)	Jumlah optimum yang layak di ekstraksi (kg/ha/tahun)
4	Sumberdaya genetik	Ketersediaan spesies dengan materi genetic yang (berpotensi) bermanfaat misalnya untuk pengobatan dan spesien ornamental	Total nilai "bank gen" jumlah substansi. Biomassa (contohnya jumlah spesies atau sub spesies)	Indeks keaneragaman hayati
Fungsi Pengeturan				
5	Pengaturan kualitas udara	Kapasitas ekosistem untuk menyerap aerosol dan bahan kimia dari atmosfer	Tutupan lahan yang bervegetasi (ha)	Luasan tutupan lahan yang bervegetasi (ha)
6	Pengaturan iklim	Pengaruh ekosistem terhadap iklim lokal dan global melalui tutupan	Tutupan lahan yang bervegetasi (ha)	Luasan tutupan lahan yang bervegetasi (ha)

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

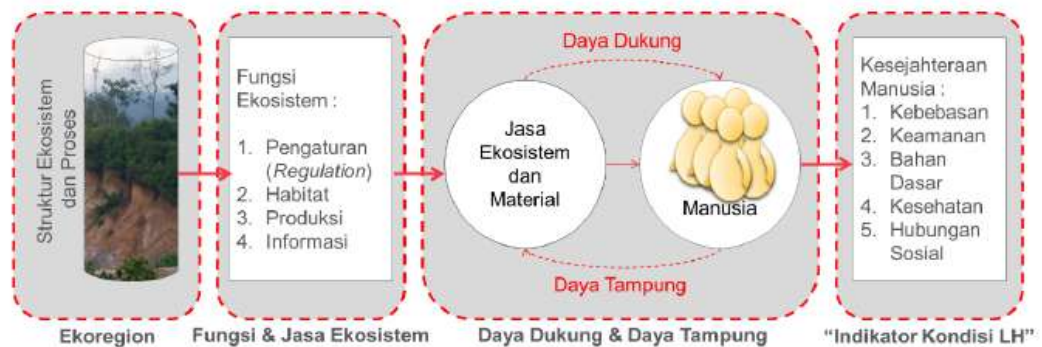
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Jasa Lingkungan	Fungsi	Indikator Keadaan	Indikator Kinerja
		lahan dan proses yang dimediasi secara biologis		
7	Pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam	Struktur alam yang berfungsi untuk pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, abrasi, longsor, badai, gempa bumi, banjir dan tsunami	Karakteristik bentang lahan, vegetasi dan penutupan lahan	Luas karakteristik bentang lahan, vegetasi dan penutupan yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam (hektar)
8	Pengaturan air	Peran bentang alam dan penutup lahan dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala	Kapasitas infiltrasi (litologi, topografi, curah hujan, vegetasi, tutupan) dan retensi air (vegetasi, topografi, litologi) dalam m ³	Kuantitas infiltrasi dan retensi air serta pengaruhnya terhadap wilayah hidrologis (contohnya irigasi)
9	Pemurnian air dan pengolahan limbah	Peran biota dan abiotik dalam proses pembersihan atau penguraian materi organik, senyawa dan nutrisi steril di sungai, danau dan wilayah pesisir	Kapasitas flushing (penggelontoran), debit, topografi dan meretensi beban limbah dilihat dengan vegetasi	Kemampuan limbah yang dapat di flushing (gelontor) secara alami, m ³ /detik, lama waktu pengendapan
10	Pengaturan penyerbukan alami	Ketergantungan tanaman budidaya pada penyerbukan alami	Kenekaragaman dan kelimpahan spesies penyerbuk	Jumlah dan dampak dari spesies penyerbuk
11	Pengendalian hama	Control produksi hama melalui hubungan trofik	Jumlah dan dampak dari spesies pengontrol hama	Pengurangan penyakit manusia hama penyakit hewan
Fungsi Lindung				
12	Habitat dan keekaragaman hayati	Pentingnya ekosistem untuk menyediakan habitat untuk pembiakan, makan, istirahat dan untuk spesies transien	Jumlah spesies dan individu transien (khususnya dengan nilai komersil)	Ketergantungan ekosistem lain (atau ekonomi) pada jasa berkembangbiak
13	Pembentukan dan regenerasi tanah	Peran proses alami dalam pembentukan dan regenerasi tanah	Penutupan akar tanaman contohnya bioturbasi	Jumlah pusuk tanah yang dihasilkan per ha/tahun
14	Produksi primer	Kemampuan lingkungan dalam mengkonversi energi dari matahari menjadi bentuk organik melalui proses fotosintesis	Biomassa tumbuhan (m ³ /hektar)	Jumlah biomassa (m ³ /hektar)
15	Siklus hara	Kemampuan ekosistem untuk mendukung proses pelapukan bahan organik	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian	Laju dekomposisi bahan organik (satuan berat/satuan waktu)
Fungsi Budaya				
16	Estetika : apresiasi pemanfaatan alam (selain melalui kegiatan rekreasi yang disengaja)	Kualitas estetika dari bentang alam contohnya berdasarkan struktur keragaman, kehijauan, ketenangan	Jumlah/luas fitur bentang alam dengan penetapan apresiasi/penghargaan	Menyatakan nilai estetika, contohnya jumlah rumah dengan batas area alami, jumlah penggunaan dari "rute yang indah"
17	Rekreasi : peluang untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi	Bentang alam dengan daya tarik kehidupan liar	Jumlah/luas fitur bentang alam dan kehidupan liar dengan penetapan nilai rekreasi	Jumlah maksimum orang dan fasilitas secara berkelanjutan
18	Warisan budaya dan identitas : rasa tempat dan milik	Pentingnya fitur bentang alam atau spesies secara budaya (perlu ditambahkan informasi keberadaan masyarakat adat)	Jumlah/luas fitur bentang alam atau spesies yang penting secara budaya	Jumlah masyarakat adat yang menggunakan bentang alam untuk identitas dan warisan budaya

Informasi mengenai fungsi ekosistem dapat mewakili kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dengan kata lain, daya dukung dan daya tampung merupakan kapasitas dari fungsi dan jasa ekosistem dalam mendukung kehidupan manusia atau makhluk lainnya yang berada pada suatu lokasi atau ekoregion tertentu. Daya dukung dan daya tampung juga dapat mengindikasikan kualitas dari sebuah jasa ekosistem tertentu. Semakin baik atau tinggi daya dukung dan daya tampung suatu lokasi atau ekoregion, maka dapat dikatakan ekosistem di ekoregion tersebut memiliki kualitas yang baik dan dapat berfungsi dengan baik untuk menyediakan jasa ekosistemnya. Biasanya, fungsi regulasi dari ekosistem terkait erat dengan daya tampung, sedangkan penyediaan, pengaturan dan budaya terkait erat dengan daya dukung lingkungan hidup.

Sementara itu, konsep ekoregion dapat dikatakan sebagai bentuk implementasi konsep ekosistem, atau dapat dikatakan sebagai ekosistem region. Sebuah peta ekoregion biasanya memuat informasi mengenai karakteristik bentang alam berupa geomorfologi dan morfogenesis, yang mampu mendelineasi batas-batas karakteristik tersebut sehingga dapat terlihat perbedaan karakteristiknya. Peta ekoregion mampu memberikan indikasi fungsi ekosistem yang mungkin dominan pada suatu ekoregion tertentu, karena setiap jenis ekoregion membentuk dan/atau memiliki ekosistem dan fungsi ekosistem sesuai karakteristiknya masing-masing. Untuk itu, penggabungan peta ekoregion dengan peta tutupan lahan dapat menyediakan informasi mengenai proxy jasa ekosistem yang lebih

akurat dibandingkan dengan informasi yang hanya didasarkan pada data tutupan lahan semata. Hal ini sejalan dengan pendapat Eigenbrod et al., (2010). Dalam hal ini, data ekoregion digunakan sebagai variabel atau data tambahan selain data tutupan lahan dalam menentukan hubungan antara proses dan jasa ekosistem untuk menghasilkan peta (proxy) jasa ekosistem. Hubungan ekoregion, fungsi dan jasa ekosistem, dan daya dukung dan daya tampung ditunjukkan pada Gambar di bawah ini.



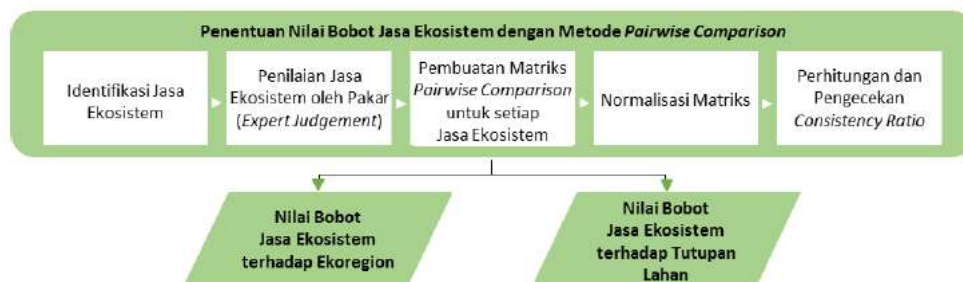
Gambar 2.6
Hubungan Ekoregion, Fungsi Dan Jasa Ekosistem, Serta Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan

Tahapan dan metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini secara umum meliputi identifikasi jasa ekosistem dari tutupan lahan, penilaian dan pembobotan jasa ekosistem berdasarkan penilaian ahli (expert judgement) terhadap data ekoregion dan tutupan lahan, analisis spasial dan perhitungan indeks jasa ekosistem (IJE), serta visualisasi spasial IJE. Penilaian dan pembobotan jasa ekosistem oleh para ahli terhadap tutupan dan ekoregion dilakukan melalui Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan metode perhitungan pairwise comparison.

Sementara itu, data yang digunakan dalam penyusunan KLHS Perubahan RPJMD ini adalah:

- Peta Ekoregion Provinsi Jawa Barat, memuat beberapa informasi tentang kemiringan lereng, ketinggian tempat, geomorfologi, dan geologi. Peta ekoregion skala kedetilan 1: 250.000 yang digunakan bersumber dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3EJ). 2015.
- Peta tutupan lahan Kota Bekasi dengan skala kedetilan skala 1:25.000

Proses penilaian dan pembobotan jasa ekosistem dengan metode pairwise comparison dilakukan seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.5 di bawah ini.



Gambar 2.7
Proses Penilaian Dan Pembobotan Jasa Ekosistem Dengan Metode Pairwise Comparison

Penilaian jasa ekosistem oleh para ahli dilakukan dengan mengisi kuesioner yang disusun untuk menilai bobot setiap jasa ekosistem dari masing-masing jenis ekoregion dan tutupan lahan. Kuesioner yang disebarakan ini berisi tabel-tabel yang menggambarkan perbandingan skala penilaian jasa ekosistem terhadap setiap kelas tutupan lahan dan jenis ekoregion. Pengisian daftar pertanyaan dilakukan berdasarkan teori dan pengetahuan, pengamatan dan pengalaman yang dimiliki oleh para ahli terhadap kondisi faktual. Pemetaan jasa ekosistem dengan pendekatan land use based proxy yang menggunakan penilaian pakar (expert judgement) dari multidisiplin ilmu dapat menghasilkan penilaian yang komprehensif (Maynard et al., 2010). Adapun ahli yang terlibat dalam proses penilaian terdiri dari pakar geomorfologi, kehutanan, biologi, perencanaan wilayah, dan pakar lingkungan.

Penilaian ahli secara kualitatif maupun kuantitatif dapat dianggap sebagai data sehingga bisa digunakan sebagai bobot pada berbagai kelas lahan berbeda (Meyer dan Booker, 1991). Contoh tabel kuesioner yang disebarakan untuk diisi oleh pakar ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Gambar 2.3

Kuesioner Penilaian Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Terhadap Tutupan Lahan.

No	Jenis Penutupan Lahan	Skala Penilaian Terhadap Jasa Pangan											
		TP	Sangat Kecil		Kecil		Sedang		Besar		Sangat Besar		
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Sawah												
2	Ladang, Tegal, Huma												
3	Perkebunan												
4	Hutan lahan kering												
5	Hutan lahan basah												
6	Semak belukar												
7	Padang rumput, alang-alang dan sabana												
8	Rumput rawa												
9	Lahan terbuka												
10	Lahan terbangun												
11	Lahan tidak terbangun												
13	perairan												

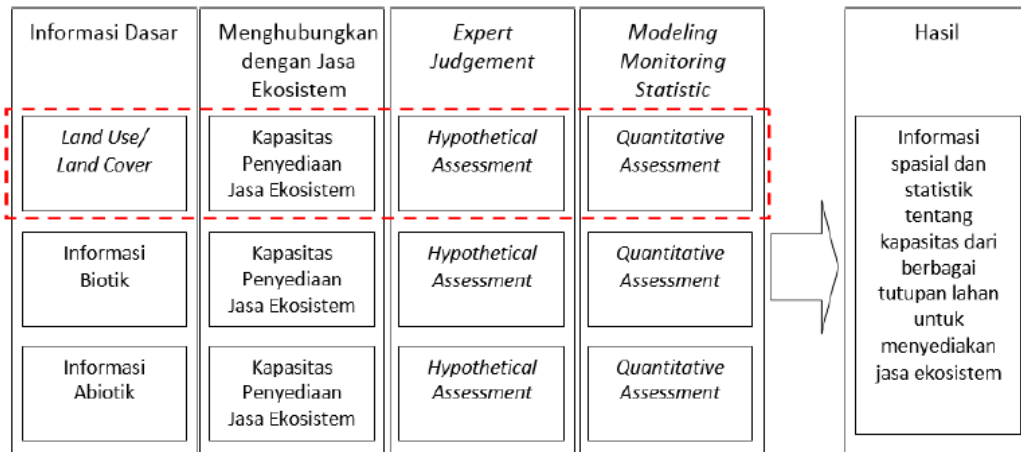
Keterangan : TP =Tidak memiliki peran atau pengaruh

Mengingat keragaman fenomena bentang lahan dan tutupan lahan di wilayah pengamatan, maka dilakukan prinsip generalisasi sesuai dengan kedalaman skala pengamatan. Proses transformasi data dari bentang lahan dan tutupan lahan menjadi nilai jasa ekosistem dilakukan dengan menjawab sejumlah pertanyaan tentang kepentingan dan peran bentang lahan dan tutupan lahan terhadap besar kecilnya nilai jasa ekosistem. Prinsipnya adalah perbandingan tingkat kepentingan atau peran jenis-jenis bentang lahan dan tutupan lahan terhadap jenis-jenis jasa ekosistem (prinsip relativitas).

Setelah diperoleh nilai bobot jasa ekosistem dari tutupan lahan dan ekoregion, pengolahan data selanjutnya adalah analisis spasial menggunakan perangkat lunak ArcGIS Desktop dan Microsoft Excel. Pada penelitian ini, dilakukan dua jenis analisis spasial untuk menghasilkan dua peta jasa ekosistem berdasarkan data tutupan lahan dan kombinasi antara data tutupan lahan dan ekoregion. Adapun tahapan dan prosedur analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Analisis Spasial menggunakan hasil pembobotan jasa ekosistem dari tutupan lahan.
 Analisis spasial jasa ekosistem intinya merupakan proses overlay antara data spasial dengan nilai jasa ekosistem hasil pembobotan yang dilakukan melalui metode pairwise comparison. Pada tahap ini, analisis spasial dilakukan dengan meng-overlay data hasil pembobotan jasa ekosistem terhadap tutupan lahan dengan data spasial tutupan lahan,

melalui pengisian nilai bobot kedalam tabel data atribut dari data spasial tutupan lahan. Hasilnya menunjukkan sebaran spasial dari IJE berdasarkan data tutupan lahan. Secara singkat, proses keseluruhan untuk menghasilkan peta jasa ekosistem berdasarkan data tutupan lahan ditampilkan pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2.8
Tahapan Penyusunan Peta Jasa Ekosistem Berdasarkan Data Tutupan Lahan (dalam Burkhard et al., 2009).

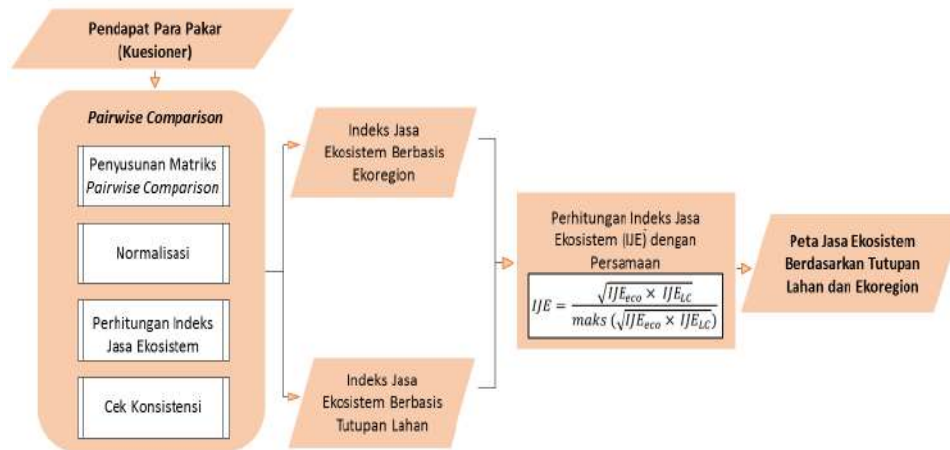
2. Analisis spasial menggunakan hasil pembobotan jasa ekosistem dari tutupan lahan dan ekoregion.

Proses pada tahap ini dilakukan melalui beberapa prosedur. Pertama dilakukan pengolahan data spasial melalui prosedur overlay (intersect) antara data ekoregion dan tutupan lahan untuk menghasilkan unsur spasial baru dari irisan kedua data spasial tersebut. Kedua, dilakukan proses overlay antara unsur spasial baru tersebut dengan nilai IJE hasil pembobotan pada tahap sebelumnya, dengan memasukkan nilai IJE dari tutupan lahan dan ekoregion ke dalam tabel atribut data spasial hasil interseksi antara tutupan lahan dan ekoregion. Perhitungan nilai tutupan lahan dan ekoregion untuk menghasilkan IJE dilakukan dengan menggunakan **Persamaan 1** berikut:

$$IJE = \sqrt{(IJE_{eco} \times IJE_{luc}) / (\max(\sqrt{(IJE_{eco} \times IJE_{luc})}))} \dots \dots \dots (1)$$

dimana:
 IJE = Indeks Jasa Ekosistem
 maks = nilai maksimum dari perhitungan hasil perkalian dan akar terhadap nilai indeks JE penutup lahan dan ekoregion.

Hasil yang diperoleh menunjukkan sebaran spasial dari indeks jasa ekosistem berdasarkan data tutupan lahan dan ekoregion. Secara singkat proses keseluruhan untuk menghasilkan peta jasa ekosistem berdasarkan data tutupan lahan dan ekoregion ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.9
Tahapan Penyusunan Peta Jasa Ekosistem Dengan Data Tutupan Lahan Dan Ekoregion.

d. Metoda penentuan untuk perkiraan dan resiko dampak

pendekatan yang dilakukan dalam penentuan perkiraan dan resiko dampak yaitu dengan menggunakan data-data sekunder yang sudah ada dalam dokumen kajian lingkungan, beberapa resiko dampak dari adanya program dan kegiatan pengembangan kota diantaranya:

- Adanya alih fungsi lahan yang akan berpotensi berkurangnya daerah resapan dan dampak pada meningkatnya kawasan trawan bajir;
 - Pertambahan jumlah penduduk dan kegiatannya berdampak pada meningkatnya kebutuhan lahan untuk tempat tinggal, kebutuhan air, meningkatnya timbulan sampah padat dan cair, meningkatnya beban pencemaran baik pencemaran udara maupun pencemaran air sungai
- data-data yang terkait hal tersebut di atas peroleh dari dokumen-dokumen kajian lingkungan hidup seperti dokumen IKPLHD, dokumen pemantauan air sungai dan udara, kajian indek kerentanan perubahan iklim, mastplan persampahan dan KLHS RTRW dan KLHS RPJMD yang sudah di susun tahun 2018.

e. Metoda penentuan untuk Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

pendekatan yang dilakukan dalam Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim yaitu dengan menggunakan data sekunder berupa dokumen Hasil Kajian Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kota Bekasi dan data SIDIK tahun 2018.

f. Metoda penentuan untuk penentuan Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

pendekatan yang dilakukan dalam penentuan Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati yaitu dengan menggunakan data jasa ekosistem Biodiversitas dan dokumen laporan akhir Laporan Akhir Inventarisasi Keanekaragaman Hayati.

3. Metode Analisis /Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan

Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa **alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Pendekatan yang dilakukan dalam menyusun alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu:

a. menganalisis ketercapaian Tujuan, Target, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana yang tertuang dalam Perpres 59/2017 dengan data dan fakta yang terjadi di Kota Bekasi. Metode yang digunakan adalah menyandingkan antara target/indikator dengan data TPB Kota Bekasi, sehingga diperoleh klasifikasi berikut

- TPB tercapai jika sasaran dan target TPB Global Nasional nilainya lebih rendah jika dibandingkan dengan angka capaian indikator TPB kota.
- TPB tidak tercapai jika sasaran dan target TPB Global Nasional nilainya lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka capaian indikator TPB kota
- Tidak ada data, jika sasaran dan target TPB Global Nasional tidak dapat dikonfirmasi atau dibandingkan dikarenakan tidak ada data capaian indikator TPB di Kota

b. Dengan didasarkan pada kondisi capaian indikator TPB dan juga kecenderungan perkembangan capaian TPB selama kurun waktu 5 tahun selanjutnya di lakukan perumusan alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan

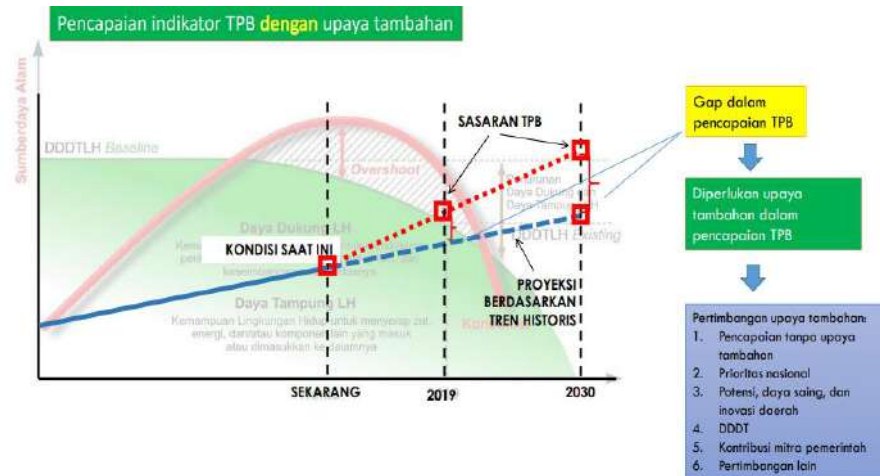
Dari hasil analisis Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan di rumuskan 2 alternatif yaitu:

- **Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional.



Gambar 2.10
Contoh Skenario Tanpa Upaya Tambahan

- **Alternatif proyeksi dengan upaya tambahan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disusun untuk percepatan pencapaian target tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



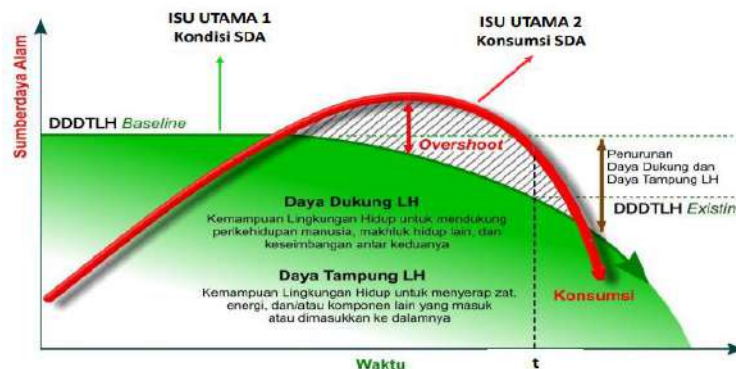
Gambar 2.11
Contoh Skenario Dengan Upaya Tambahan

- **Analisis alternative proyeksi dayadukung dan daya tampung;**

Dalam merumuskan skenario/alternative proyeksi dayadukung dan daya tampung pendekatan yang dilakukan yaitu dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan dengan mengacu pada Permen LH RI Nomor 17 Tahun 2009. alternative proyeksi dayadukung dan daya tampung tidak hanya mengidentifikasi kondisi dayadukung dan daya tampung saat ini, namun memproyeksi kondisi dayadukung dan daya tampung sampai tahun 2026 dan 2030, Pada KLHS perubahan RPJMD scenario alterenatif proyeksi daya dukung meliputi:

- Skenario Dayadukung dan Daya Tampung air
- Skenario Dayadukung dan Daya Tampung pangan
- Skenario Dayadukung fungsi lindung
- Skenario Dayadukung lahan
- sekanrio dayadukung lahan terbangun

Gambar 2.12
Contoh Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup



• **Analisis Kontribusi para pihak**

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada tahap pengkajian TPB ini juga dilakukan analisis peran antar Pemangku Kepentingan (Stakeholder) dalam pelaksanaan TPB termasuk keberadaan data, yaitu pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran para pihak dalam PDRB pada umumnya kontribusi pemerintah dalam PDRB relative kecil, peran swasta dan para pihak sangat penting dalam pembangunan, belanja pemerintah di arahkan untuk mendorong investasi seperti pembangunan infrastruktur dan lain-lain.

Tabel 2.4
Contoh Pembagian Peran

No	TPB	Pihak	Kontribusi
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Pemerintah	Menyediakan lahan pertanian pengendalian harta pangan Bantuan beras sejahtera
		LSM	Pengembangan kapasitas petani
		Perbankan	Kredit usaha rakyat untuk petani
		akademisi	Penelitian pertanian
6	Air bersih dan sanitasi	pemerintah	Pembangunan sarpras pengairan
		filantropi	Penggunaan dana social untuk pembangunan fasilitas pengairan

Alternatif proyeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 menjadi dasar dalam merumuskan **isu strategis, permasalahan, dan sasaran Strategis daerah.**

4. Metode Identifikasi Dan Analisis Isu Strategis TPB

Perumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan KLHS perubahan RPJMD kota Bekasi mengacu pada pasal 11, 16 dan 18 Permendagri No 7 tahun 2018 dan pasal 7 s/d pasal 9 PP 46 tahun 2016. Secara garis besar Identifikasi dan Analisis Isu Strategis TPB dilakukan dalam dua tahap, yaitu (1) Identifikasi isu strategis TPB, dan (2) analisis prioritas isu TPB.

a. Melaksanakan Identifikasi Dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan

- Mengumpulkan isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan analisis capaian indikator TPB, data sekunder atas isu yang terdapat dalam KLHS RTRW Kota Bekasi, KLHS RPJM yang disusun tahun 2018, isu strategis perubahan RPJMD, dan curah pendapat tim POKJA KLHS.
- Melakukan pemusatan isu dengan melihat kesamaan substansi dan/atau menelaah sebab-akibat dengan memperhatikan: (1) isu lintas sektor; (2) isu lintas wilayah; (3) isu lintas pemangku kepentingan. Selain itu juga dilakukan konsultasi dengan tim pokja KLHS dan pemangku kepentingan untuk pengayaan dan penajaman isu pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan pada saat Uji Publik I. Selanjutnya melakukan konfirmasi dari data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan metode pengisian Checklist.

b. Analisis Perumusan Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

Hasil identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan sebagai mana dilakukan pada tahap sebelumnya, selanjutnya dianalisis untuk menentukan isu prioritas berdasarkan pertimbangan (sebagian dari) PP No. 46 Tahun 2016 pasal 9 ayat 2, yaitu :

- kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
- perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
- kinerja layanan atau jasa ekosistem;
- intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;
- status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
- ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
- kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
- risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau

Untuk menentukan isu-isu yang paling strategis (prioritas) maka di buatlah matrik sanding antara isu strategis PB Kota Bekasi dengan kondisi D3TLH Yang termuat pada pasal 9 untuk dilakukan penilaian/pembobotan, dari hasil penilaian/pembobotan diperoleh daftar urutan nilai Isu PB Prioritas dari yang tertinggal sampai yang terendah, dan terumuskannya Isu PB Prioritas, setelah Isu PB Prioritas di setujui oleh tim pokja maka di lakukan Uji Publik untuk mensosialisasikan Isu PB Prioritas agar mendapat masukan dan kesepakatan dari berbagai pemangku kepentingan. Perumusan isu prioritas TPB dan permasalahan ini akan menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan alternative skenario/rekomendasi.

5. Metode Penyusunan Rekomendasi

Perumusan rekomendasi didasarkan pada hasil analisis skenario TPB, skenario daya dukung dan daya tampung, isu pembangunan berkelanjutan prioritas di Kota Bekasi, rencana dan program dinas/renta dan masukan dari setiap OPD/SKPD terkait.

Perumusan rekomendasi harus di sepakati dulu oleh tim pokja, dan setelah tim pokja sepakat baru dilaksanakan uji public ke 2 untuk mensosialisasikan dan mendapatkan masukan terkait rumusan rekomendasi yang sudah di susun dan dari hasil uji public ke 2 di harapkan perumusan rekomendasi yang sudah di susun mendapat kesepakatan dari semua pemangku kepentingan.

Rekomendasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan/sebagai masukan ke dalam program dan kegiatan tertuang dalam perubahan RPJMD. Selanjutnya hasil tersebut diintegrasikan (dijadikan acuan dan dimuat) kedalam perubahan RPJMD dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

6. Pembuatan Laporan Dan Pendokumentasian

Pasal 12

- (1) Hasil perumusan scenario pembangunan berkelanjutan di muat dalam KLHS RPJMD
- (2) Laporan KLHS RPJMD sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tangatangani oleh ketua tim pembuat KLHS RPJMD
- (3) Laporan KLHS RPJMD sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan induk KLHS RPJMD
 - b. Ringkasan eksekutif KLHS RPJMD
 - c. Tahapan proses pembuatan KLHS RPJMD



BAB 3

KONDISI DAERAH

Bab 3 menjelaskan mengenai kondisi geografis, daya dukung dan daya tampung, gambaran keuangan daerah



3.1 KONDISI GEOGRAFIS

Pekerjaan kontraktual dilaksanakan di Kota Bekasi dengan lingkup wilayah kajian dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah wilayah administrasi Kota Bekasi. Secara geografis Kota Bekasi berada pada posisi 106°48'28"- 107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6" – 6°30'6" Lintang Selatan. Letak Kota Bekasi ini sangat strategis, dimana wilayahnya merupakan perbatasan antara dua provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Batas-batas wilayah administrasi yang mengelilingi wilayah Kota Bekasi adalah :



- Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor;
- Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta; dan
- Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi.

Kota Bekasi terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri dari 56 kelurahan. Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 21.312 ha, dengan Kecamatan Jatiasih sebagai kecamatan dengan wilayah yang terluas, yaitu 2.575,03 ha (12,08%), dan Kecamatan Medan Satria merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu 1.011,63 ha (4,75%). Luas dan kelurahan yang ada di setiap kecamatan di Kota Bekasi dapat di lihat pada Tabel dan Gambar di bawah ini.

Tabel 3.1
Luas Wilayah dan Banyaknya Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Bekasi

No	Kecamatan	Luas		Kelurahan
		Ha	(%)	
1	Pondokgede	1654,58	7,76	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jati Makmur ▪ Jati Waringin ▪ Jati Bening ▪ Jati Cempaka ▪ Jati Bening Baru
2	Jatisampurna	1921,15	9,01	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jati Karya ▪ Jatisampurna ▪ Jati Rangga ▪ Jati Ranggon ▪ Jati Raden
3	Pondok Melati	1175,29	5,51	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jati Murni ▪ Jati Melati ▪ Jati Warna ▪ Jati Rahayu
4	Jatiasih	2575,02	12,08	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jati Sari ▪ Jati Luhur ▪ Jatiasih ▪ Jati Mekar ▪ Jati Kramat
5	Bantargebang	1884,30	8,84	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ciketing Udik ▪ Sumur Batu ▪ Cikiwul ▪ Bantargebang

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Kecamatan	Luas		Kelurahan
		Ha	(%)	
6	Mustika Jaya	2497,13	11,72	<ul style="list-style-type: none">▪ Pedurenan▪ Cimuning▪ Mustika Jaya▪ Mustika Sari
7	Bekasi Timur	1463,82	6,78	<ul style="list-style-type: none">▪ Margahayu▪ Bekasi Jaya▪ Duren Jaya▪ Aren Jaya
8	Rawalumbu	1711,76	8,03	<ul style="list-style-type: none">▪ Bojong Menteng▪ Bojong Rawalumbu▪ Sepanjang Jaya▪ Pengasinan
9	Bekasi Selatan	1538,09	7,22	<ul style="list-style-type: none">▪ Jaka Mulya▪ Jaka Seia▪ Pekayon Jaya▪ Marga Jaya▪ Kayuringin Jaya
10	Bekasi Barat	1442,27	6,77	<ul style="list-style-type: none">▪ Bintara Jaya▪ Bintara▪ Kranji▪ Kota Baru▪ Jaka Sampurna
11	Medansatria	1011,62	4,75	<ul style="list-style-type: none">▪ Harapan Jaya▪ Kali Baru▪ Medan Satria▪ Pejuang
12	Bekasi Utara	2436,91	11,43	<ul style="list-style-type: none">▪ Harapan Jaya▪ Kaliabang Tengah▪ Perwira▪ Harapan Bar▪ Teluk Pucung▪ Marga Mulya
Kota Bekasi		21.312	100	Jumlah kelurahan: 56

Sumber : Peta Dasar Rupabumi (RBI), Permendagri No. 36 Tahun 2015, Permendagri No 49 Tahun 2015, Permendagri No 77 Tahun 2017, Dan Hasil Perhitungan GIS Tahun 2020

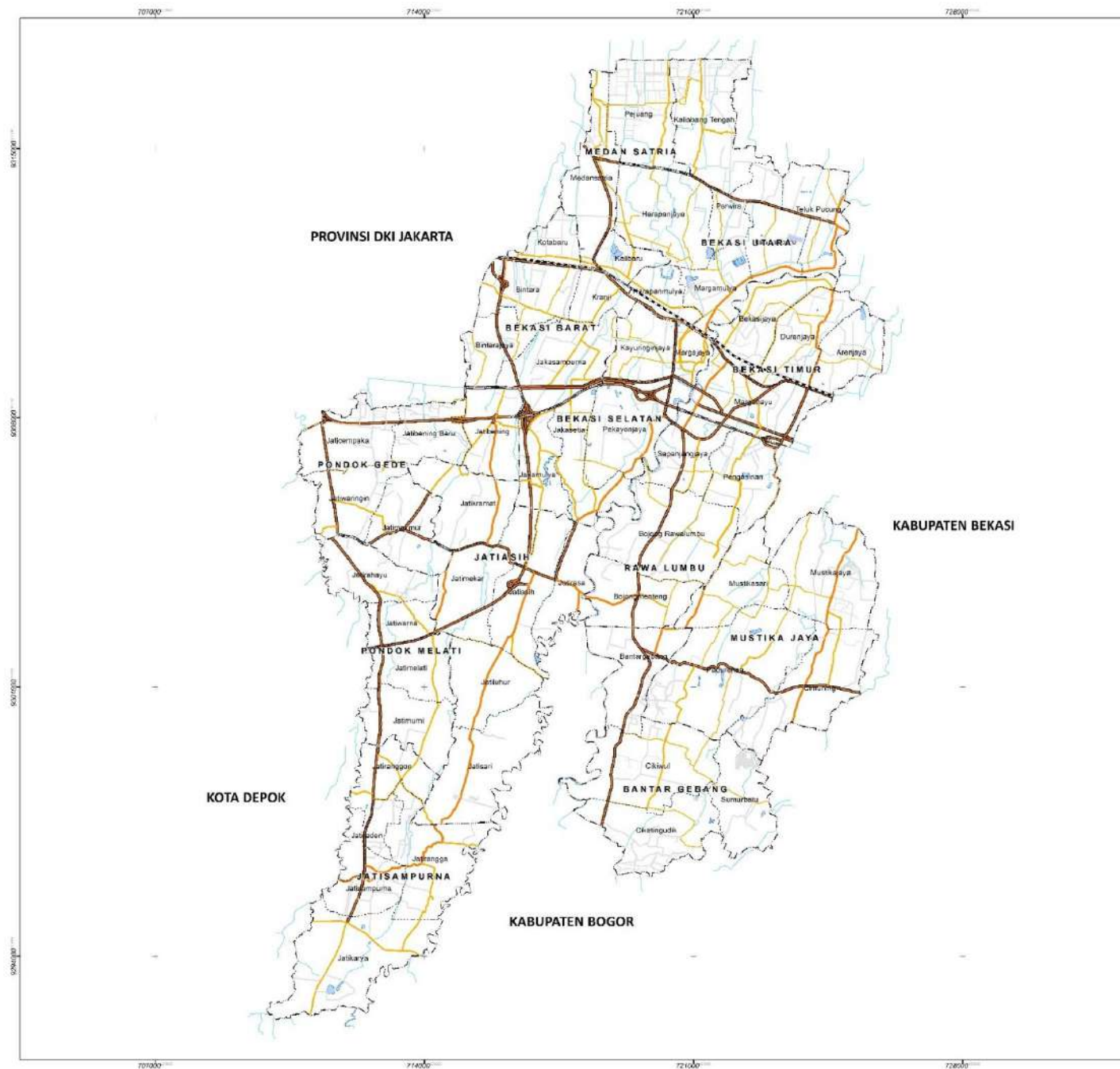
3.2 KARAKTERISTIK FISIK

3.2.1 Kelerengan dan Morfologi

Kota Bekasi memiliki Topografi dengan kemiringan antara 0 – 8 %, dan terletak pada ketinggian antara 0 m – 100 m di atas permukaan air laut.

Kecamatan yang berada pada ketinggian 25-50 adalah Kecamatan Bantar Gebang, sebagian Kecamatan Bekasi Barat, sebagian Kecamatan Bekasi Selatan, sebagian Kecamatan Bekasi Timur, sebagian Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Jatisampurna, sebagian Kecamatan Mustikajaya, sebagian Kecamatan Pondok Gede, sebagian Kecamatan Pondok Melati dan sebagian Kecamatan Rawalumbu.

Kecamatan yang berada pada ketinggian 50-10 meter berada di sebagian Kecamatan Bantar Gebang, sebagian Kecamatan Jatiasih, sebagian Kecamatan Jatisampurna dan sebagaian Kecamatan Pondok Melati. Untuk lebih jelasnya mengenai kemiringan dan ketinggian Kota Bekasi dapat di lihat pada table dan gambar di bawah ini.





PEMERINTAH KOTA BEKASI

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Bekasi

Gambar 3.1

PETA BATAS ADMINISTRASI KOTA BEKASI



LEGENDA

ADMINISTRASI

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

- Sungai
- Danau/Situ

SISTEM JARINGAN JALAN

Jaringan Jalan Nasional

- Jalan Arteri Primer
- Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer

Jaringan Jalan Kota

- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal

SUMBER DATA

Peta Dasar

1. Peta Dasar Republik Indonesia (RBI) Skala 1:20.000 BAKOSURTANAL
2. Peraturan No. 37 Tahun 2015, Peraturan No. 48 Tahun 2015, Peraturan No. 77 Tahun 2017
3. Peraturan No. 5 Tahun 2013 Kabupaten Kota Bekasi (Perkab/Kotabekasi)
4. Peraturan ATR, Sengketa Bekasi No. 1 Tahun 2018 (Peraturan RTM/Provinsi Kota Bekasi)
5. Peraturan Kota Bekasi Tahun 2011-2017
6. Peta Rupa Bumi No. 9 The 2016 (RTRM) Kota Bekasi 2015-2020

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

**Tabel 3.2
Luasan Kemiringan dan Ketinggian Kota Bekasi**

Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan 0-8%	Ketinggian		
			0 - 25 m	25 - 50 m	50 - 100 m
Bantar Gebang	Bantargebang	404,81	36,72	368,08	
	Ciketingudik	476,30		229,62	246,68
	Cikiwul	638,99	3,41	512,77	122,82
	Sumurbatu	364,20		354,09	10,11
Bantar Gebang Total		1.884,30	40,13	1.464,56	379,61
Bekasi Barat	Bintara	354,67	354,67		
	Bintarajaya	254,13	254,13		
	Jakasampurna	501,00	498,29	2,71	
	Kotabaru	160,98	160,98		
	Kranji	171,29	171,29		
Bekasi Barat Total		1.442,06	1.439,35	2,71	
Bekasi Selatan	Jakamulya	270,72	214,06	56,66	
	Jakasetia	343,13	317,54	25,59	
	Kayuringinjaya	280,99	280,99		
	Margajaya	163,37	163,37		
	Pekayonjaya	479,88	465,92	13,96	
Bekasi Selatan Total		1.538,09	1.441,88	96,21	
Bekasi Timur	Arenjaya	286,78	286,78		
	Bekasijaya	354,14	354,14		
	Durenjaya	358,60	358,60		
	Margahayu	464,30	401,69	62,61	
Bekasi Timur Total		1.463,82	1.401,21	62,61	
Bekasi Utara	Harapanbaru	270,02	270,02		
	Harapanjaya	544,89	544,89		
	Harapanmulya	176,80	176,80		
	Kaliabang Tengah	575,56	575,56		
	Margamulya	279,14	279,14		
	Perwira	230,45	230,45		
	Teluk Pucung	360,03	360,03		
	Bekasi Utara Total		2.436,89	2.436,89	
Jatiasih	Jatiasih	426,66	38,18	388,48	
	Jatikramat	430,79	220,32	210,47	
	Jatiluhur	383,18		371,86	11,31
	Jatimekar	465,19	57,75	407,44	
	Jatirasa	290,82	115,33	175,49	
	Jatisari	578,39		64,03	14,36
	Jatiasih Total		2.575,03	431,58	1.817,78
Jatisampurna	Jatikarya	714,83		15,09	703,59
	Jatiraden	191,38		5,14	186,24
	Jatirangga	511,89		55,09	456,80
	Jatiranggon	269,35		43,55	225,81
	Jatisampurna	229,84			229,84
	Jatisampurna Total		1.917,29		118,87
Medan Satria	Kalibaru	137,75	137,75		
	Medansatria	425,62	425,62		
	Pejuang	448,24	448,24		
Medan Satria Total		1.011,61	1.011,61		
Mustika Jaya	Cimuning	556,27		556,27	
	Mustikajaya	608,43	118,53	489,90	
	Mustikasari	405,91	147,83	258,08	
	Padurenan	926,52		926,52	
Mustika Jaya Total		2.497,14	266,36	2.230,78	
Pondok Gede	Jatibening	329,87	325,32	4,55	
	Jatibening Baru	274,85	240,44	34,41	
	Jaticempaka	361,18	327,14	34,04	
	Jatimakmur	370,12	102,44	267,68	
	Jatiwaringin	318,52	214,71	103,81	
Pondok Gede Total		1.654,54	1.210,05	444,50	
Pondok Melati	Jatimelati	296,34		296,34	

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan 0-8%	Ketinggian		
			0 - 25 m	25 - 50 m	50 - 100 m
	Jatimurni	351,04		262,43	88,61
	Jatirahayu	347,85	27,43	320,42	
	Jatiwarna	180,06		180,06	
Pondok Melati Total		1.175,29	27,43	1.059,25	88,61
Rawa Lumbu	Bojong Rawalumbu	671,85	333,09	338,76	
	Bojongmenteng	385,89	100,46	285,43	
	Pengasinan	347,10	125,43	221,67	
	Sepanjangjaya	306,93	172,04	134,89	
Rawa Lumbu Total		1.711,76	731,02	980,74	
Grand Total		21.307,83	10.437,50	8.278,02	2.596,16

Sumber : Peta Dasar Rupabumi (RBI), Hasil Perhitungan GIS Tahun 2020

Morfologi Kota Bekasi berupa datar, landai, curam, agak curam dan sangat curam dan di dominasi oleh morfologi datar. Untuk lebih jelasnya mengenai morfologi Kota Bekasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

3.2.2 Klimatologi

Sepanjang tahun 2019 di Kota Bekasi 3 (tiga) bulan yang tidak terjadi hujan yaitu di Bulan Juli, Agustus dan September. Curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan April yaitu tercatat 1.349,50 mm sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Oktober dengan jumlah hujan 2 mm. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan
di Kota Bekasi Tahun 2019

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)
1	Januari	1349	27
2	Februari	745	26
3	Maret	1083	23
4	April	1349,50	25
5	Mei	494,50	14
6	Juni	10	1
7	Juli	-	-
8	Agustus	-	-
9	September	-	-
10	Oktober	2	2
11	November	330	14
12	Desember	1142	20

Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2020

3.2.3 Geologi

Kondisi geologi wilayah Kota Bekasi didominasi oleh batuan yang berfasies gunungapi berumur Pleistosen, membentuk endapan kipas alluvium. Satuan batuan yang berfasies gunungapi berumur Pleistosen ini tersusun atas konglomerat, batupasir tufaan, tuf, breksi yang berumur Pleistosen. Konglomerat berwarna kemerah-merahan, agak padu tetapi mudah hancur. Komponennya terdiri dari andesit, basal dan batu apung, membundar tanggung hingga membundar, pemilahan buruk, umumnya menunjukkan kemas tertutup hingga terbuka, besar butir umumnya berkisar dari kerikil sampai kerakal. Matriksnya berupa batu pasir tufaan, umumnya sudah lapuk berwarna kelabu kotor kemerah-merahan. Batupasir tufaan dan tuf agak padu, tetapi mudah hancur, berbutir halus sampai kasar, pemilahan buruk, membundar tanggung sampai membundar sempurna, terdapat struktur silang siur.

707000 714000 721000 728000

915000

920800

926100

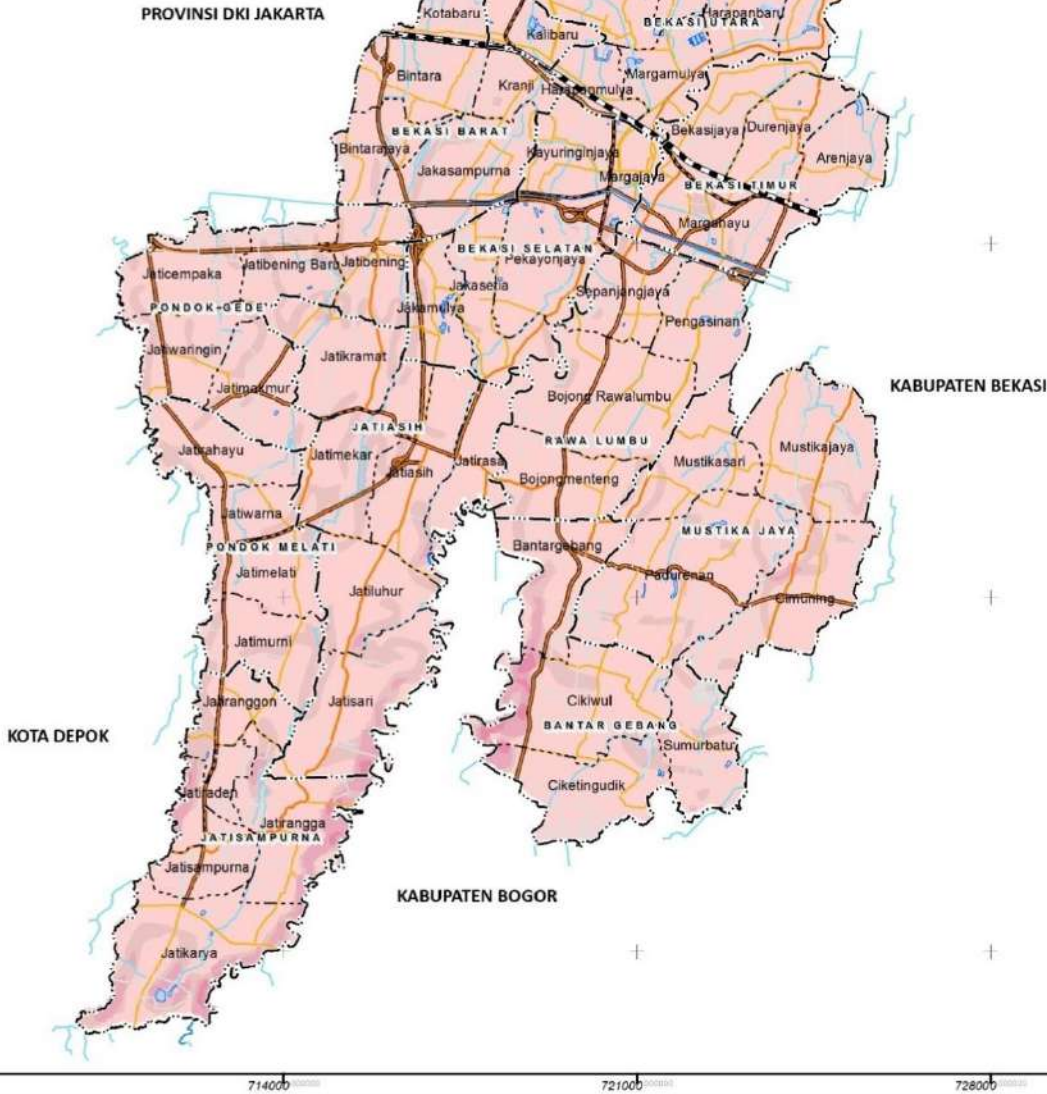
931400

915000

920800

926100

931400



PEMERINTAH KOTA BEKASI

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Bekasi

Gambar 3.2

PETA KEKERINGAN
KOTA BEKASI



Raster: (Merkuri Transversal Mercator: UTM)
 Sistem: UTM
 Datum: Lokal
 Datum: WGS 84
 Sistem: WGS 84
 Raster:

LEGENDA

ADMINISTRASI

--- Batas Kabupaten

--- Batas Kecamatan

--- Batas Kelurahan

PERAIRAN

Sungai

Danau/Situ

SISTEM JARINGAN JALAN

Jaringan Jalan Nasional

Jalan Arteri Primer

Jaringan Jalan Provinsi

Jalan Kolektor Primer

Jaringan Jalan Kota

Jalan Arteri Sekunder

Jalan Kolektor Sekunder

Jalan Lokal

KEKERINGAN

0-8%

9-15%

15-25%

25-40%

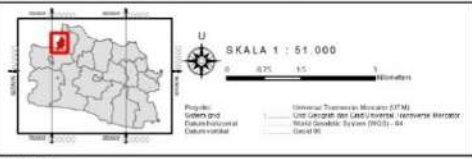
>40%

SUMBER DATA

- Peta Dasar :
1. Peta Dasar Republik Indonesia (RI) Skala 1:25.000 BAKOSURTANAL
 2. Permenagri No.36 Thn 2015, Permenagri No.49 Thn 2015, Permenagri No. 77 Thn 2017
 3. RPJMD No.8 Thn 2015 (Jawaban: Peta Rencana Tata Ruang)
 4. Permen ATR/Kepala Badan No.1 Thn 2018 (Pusat: RTRW Provinsi Jawa Barat)
 5. RTRW Kota Bekasi Thn 2015-2031
 6. Peta Kota Bekasi No.5 Thn 2016 (RTRW Kota Bekasi 2016-2030)



Gambar 3.3
**PETA MORFOLOGI
 KOTA BEKASI**



- LEGENDA**
- ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
- PERAIRAN**
- Sungai
 - Danau/Situ
- SISTEM JARINGAN JALAN**
- Jaringan Jalan Nasional
 - Jalan Arteri Primer
 - Jaringan Jalan Provinsi
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jaringan Jalan Kota
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal
- MORFOLOGI**
- Datar
 - Landai
 - Curam
 - Agak Curam
 - Sangat Curam

- SUMBER DATA**
- Peta Dasar:
1. Peta Dasar Republik Indonesia (RI) Skala 1:25.000 BAKOSURTANAL
 2. Peta Dasar No. 18 Thn 2015, Permenagri No. 48 Thn 2015, Permenagri No. 77 Thn 2017
 3. PP No. 9 Thn 2012 (Kebijakan Peta Nasional) Data Ruang
 4. Peta RATA Kota Bekasi No. 1 Thn 2015 (Peta RATA RTW) Provinsi DKI Jakarta
 5. RTRW Kota Bekasi Thn 2011-2031
 6. Peta Kota Bekasi No. 5 Thn 2016 (RTR Kota Bekasi 2015-2026)

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Breksi berwarna kelabu kemerahan, komponen batu apung dan andesit, berukuran antara 1-10 cm, menyudut tanggung, agak kompak dan pemilahan buruk. Matriksnya berupa batu pasir tufaan berwarna kemerah-merahan, umumnya lapuk mengulit bawang. Setempat breksi ini mengandung bongkah andesit dengan ukuran 2-50 m.

Breksi ini diduga merupakan endapan lahar, pada wilayah Jakarta sebarannya mendominasi, sedangkan pada wilayah Bekasi – Karawang tersebar pada bagian baratdaya dan tenggara cekungan. Makin ke utara ukuran komponennya makin halus dan makin lapuk, sehingga sering dijumpai hanya sebagai tanah berwarna merah. Satuan ini berumur Pleistosen dan merupakan endapan sungai jenis kipas aluvium. Tebalnya diperkirakan mencapai 40 m. Satuan Konglomerat dan Batu Pasir Tufaan ini kemungkinan dapat menjadi akuifer yang sangat baik, air tanah bergerak melalui ruang antar butir, karena ketebalannya hanya sekitar 40 meteran dan penyebaran tidak begitu luas, maka air tanah yang dijumpai berupa air tanah tidak tertekan atau air tanah setengah tertekan. Di sepanjang alur sungai utama seperti Kali Bekasi dan menyebar ke bagian utara tersusun oleh satuan endapan limbah banjir ini berumur Holosen dan tersusun atas pasir lempungan, lempung pasiran, dan lempung humusan atau gambutan. Pasir lempungan berwarna coklat-coklat kehitaman-hitaman, makin ke selatan Lembar Peta warnanya makin kemerah-merahan dan makin tufaan. Lempung pasiran berwarna coklat - coklat kekuningan-kuningan, lunak dan terkoalinkan. Lempung humusan atau gambutan berwarna kelabu kecoklatan-coklatan, banyak mengandung sisa tumbuhan. Endapan Dataran Banjir tebalnya berkisar antara 5-15 m, merupakan akuifer yang cukup baik, penyebaran luas, air tanah berupa air tanah tidak tertekan yang mengalir diantara ruang antar butir. Untuk lebih jelasnya mengenai geologi di Kota Bekasi dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Luasan Geologi Kota Bekasi

Kecamatan	Kelurahan	Alluvium	Alluvium Fans	Beach Ridge Deposit	Flood Plain Deposits	Grand Total
Bantar Gebang	Bantargebang	30,87	373,94			404,81
	Ciketingudik	0,36	475,94			476,30
	Cikiwul	19,95	619,04			638,99
	Sumurbatu		364,20			364,20
Bantar Gebang Total		51,18	1.833,12			1.884,30
Bekasi Barat	Bintara	120,58	234,08			354,67
	Bintarajaya	141,58	112,55			254,13
	Jakasampurna	203,82	297,18			501,00
	Kotabaru	65,28	95,70			160,98
	Kranji	37,68	133,61			171,29
Bekasi Barat Total		568,94	873,12			1.442,06
Bekasi Selatan	Jakamulya	150,31	120,42			270,72
	Jakasetia	110,16	232,97			343,13
	Kayuringinjaya	189,65	91,34			280,99
	Margajaya	124,24	39,14			163,37
	Pekayonjaya	123,10	356,78			479,88
Bekasi Selatan Total		697,45	840,64			1.538,09
Bekasi Timur	Arenjaya	90,08			196,70	286,79
	Bekasijaya	235,65	23,83		94,66	354,14
	Durenjaya	68,30	4,69		285,61	358,60
	Margahayu	56,81	369,55		37,93	464,30
Bekasi Timur Total		450,84	398,07		614,91	1.463,82
Bekasi Utara	Harapanbaru	270,02				270,02

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

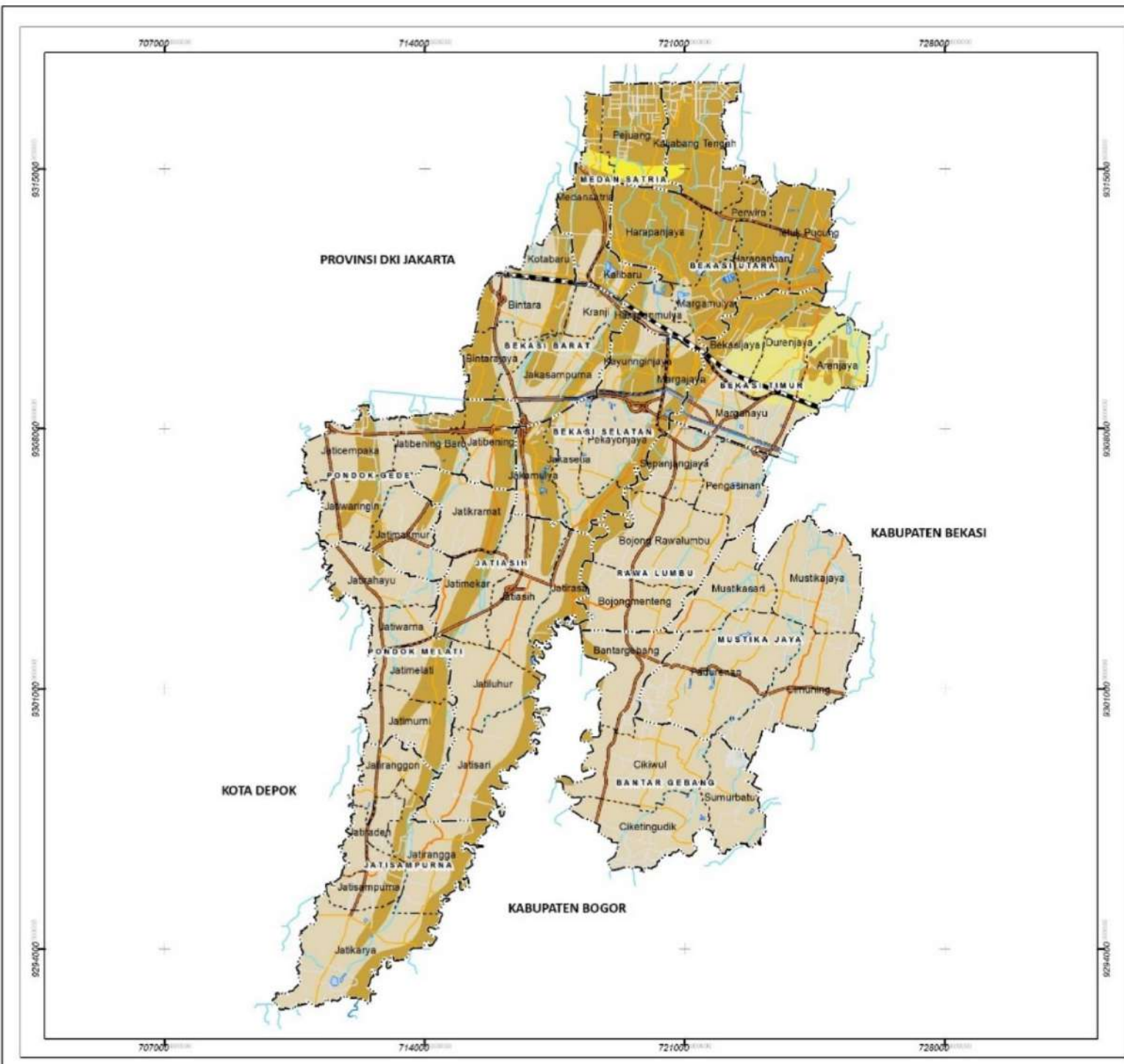
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Kecamatan	Kelurahan	Alluvium	Alluvium Fans	Beach Ridge Deposit	Flood Plain Deposits	Grand Total
	Harapanjaya	536,82	8,07			544,89
	Harapanmulya	59,48	117,32			176,80
	Kaliabang Tengah	557,94		17,64		575,58
	Margamulya	228,07	51,07			279,14
	Perwira	230,45				230,45
	Teluk Pucung	360,03				360,03
Bekasi Utara Total		2.242,81	176,46	17,64		2.436,91
Jatiasih	Jatiasih	82,53	344,13			426,66
	Jatikramat	103,91	326,88			430,79
	Jatiluhur	25,33	357,84			383,18
	Jatimekar	123,30	341,89			465,19
	Jatirasa	185,98	104,84			290,82
	Jatिसari	154,80	423,60			578,39
Jatiasih Total		675,85	1.899,18			2.575,03
Jatisampurna	Jatikarya	168,99	549,71			718,70
	Jatiraden	1,92	189,46			191,38
	Jatirangga	178,70	333,20			511,89
	Jatiranggon	30,12	239,23			269,35
	Jatisampurna	55,79	174,05			229,84
Jatisampurna Total		435,52	1.485,64			1.921,16
Medan Satria	Kalibaru	106,72	31,03			137,75
	Medansatria	329,48	58,67	37,48		425,62
	Pejuang	377,50		70,75		448,25
Medan Satria Total		813,70	89,70	108,23		1.011,63
Mustika Jaya	Cimuning		556,27			556,27
	Mustikajaya		608,43			608,43
	Mustikasari		405,91			405,91
	Padurenan		926,52			926,52
Mustika Jaya Total			2.497,14			2.497,14
Pondok Gede	Jatibening	212,13	117,74			329,87
	Jatibening Baru	133,08	141,77			274,85
	Jaticempaka	99,51	261,67			361,18
	Jatimakmur	47,23	322,89			370,12
	Jatiwaringin	89,48	229,04			318,52
Pondok Gede Total		581,43	1.073,11			1.654,54
Pondok Melati	Jatimelati	115,97	180,37			296,34
	Jatimurni	104,66	246,38			351,04
	Jatirahayu	25,01	322,83			347,85
	Jatiwarna	0,00	180,06			180,06
Pondok Melati Total		245,65	929,65			1.175,29
Rawa Lumbu	Bojong Rawalumbu	67,90	603,95			671,85
	Bojongmenteng	28,41	357,48			385,89
	Pengasinan		347,10			347,10
	Sepanjangjaya	52,88	254,05			306,93
Rawa Lumbu Total		149,18	1.562,58			1.711,76
Grand Total		6.912,55	13.658,41	125,87	614,91	21.311,74

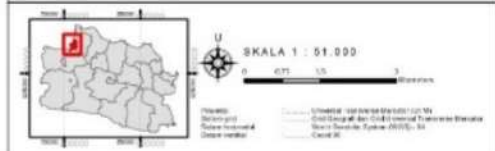
Sumber : Peta Geologi (Badan Geologi) dan Hasil Perhitungan GIS Tahun 2020

3.2.4 Jenis Tanah

Kondisi tanah di Kota Bekasi, jenis tanah di wilayah Kota Bekasi terdiri dari alluvial Distrik, Aluvial Gleik, Gleisol Distrik, Kambisol Distrik, Kambisol Gleik, Latosol Haplik, Nitosol Rodik, Oksisol Eutrik, Oksisol Eutrik dan Oksisol Kromik. Dan di dominasi jenis tanah Nitosol Distrik. Lebih jelasnya mengenai jenis tanah di Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Gambar 3.4 **PETA GEOLOGI KOTA BEKASI**



- LEGENDA ADMINISTRASI**
- ▬▬▬ Batas Kabupaten
 - ▬▬▬ Batas Kecamatan
 - ▬▬▬ Batas Kelurahan
- PERAIRAN**
- ☐ Sungai
 - ☐ Danau/Situ
- SISTEM JARINGAN JALAN**
- ▬ Jaringan Jalan Nasional
 - ▬ Jalan Arteri Primer
 - ▬ Jaringan Jalan Provinsi
 - ▬ Jalan Kolektor Primer
 - ▬ Jaringan Jalan Kota
 - ▬ Jalan Arteri Sekunder
 - ▬ Jalan Kolektor Sekunder
 - ▬ Jalan Lokal
- GEOLOGI**
- ▭ Alluvium
 - ▭ Alluvium Fans
 - ▭ Beach Ridge Deposit
 - ▭ Flood Plain Deposit

SUMBER DATA

1. Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:25.000 BAKOSURTABAL
 2. Peraturan No. 28 The 2015, Peraturan No. 48 The 2015, Peraturan No. 77 The 2017
 3. PPK No. 8 The 2013 (tentang Peta Nasional 1:500.000)
 4. Peraturan ATM (Angka Teknik) No. 1 The 2018 (tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENJAH DAERAH)
 5. Peta Kota Bekasi The 2015, 2017
 6. PETA RENCANA DAERAH No. 5 THE 2016 (RUPTR) KOTA BEKASI (2013-2022)

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Tabel 3.5
Luasan Jenis Tanah Kota Bekasi

Kecamatan	Kelurahan	Aluvial Distrik	Aluvial Gleik	Gleisol Distrik	Kambisol Distrik	Kambisol Gleik	Latosol Haplik	Nitosol Rodik	Oksisol Eutrik	Oksisol Kromik
Bantar Gebang	Bantargebang							7,28		
	Ciketingudik				38,09		1,53			
	Cikiwul									
	Sumurbatu				13,64					
Bantar Gebang Total					51,73		1,53	7,28		
Bekasi Barat	Bintara									
	Bintarajaya									
	Jakasampurna									
	Kotabaru									
	Kranji									
Bekasi Barat Total										
Bekasi Selatan	Jakamulya									
	Jakasetia									
	Kayuringinjaya									
	Margajaya									
	Pekayonjaya									
Bekasi Selatan Total										
Bekasi Timur	Arenjaya			0,31	1,53					
	Bekasijaya				0,39					
	Durenjaya				0,62					
	Margahayu				5,60					
Bekasi Timur Total				0,31	8,13					
Bekasi Utara	Harapanbaru	2,96		22,77						
	Harapanjaya									
	Harapanmulya									
	Kaliabang Tengah			0,01	37,07					
	Margamulya		0,24	5,17						
	Perwira			0,67	0,18					
	Teluk Pucung			0,94	40,18					
Bekasi Utara Total			3,20	29,57	77,43					
Jatiasih	Jatiasih			2,99			0,05			
	Jatikramat									
	Jatiluhur			0,20				6,54		
	Jatimekar							111,82		

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

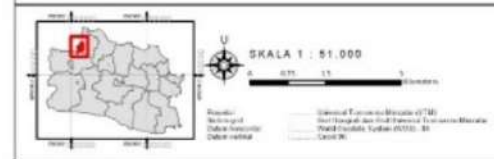
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Kecamatan	Kelurahan	Aluvial Distrik	Aluvial Gleik	Gleisol Distrik	Kambisol Distrik	Kambisol Gleik	Latosol Haplik	Nitosol Rodik	Oksisol Eutrik	Oksisol Kromik
	Jatirasa			1,33			0,05			
	Jatisari			1,23			1,34			
Jatiasih Total				5,76			1,45	118,36		
Jatisampurna	Jatikarya	34,19	6,05			0,00	0,79	16,47	0,02	21,36
	Jatiraden								0,00	
	Jatirangga			0,48		0,69	0,51			
	Jatiranggon									
	Jatisampurna								0,02	
Jatisampurna Total		34,19	6,05	0,48		0,69	1,30	16,47	0,04	21,36
Medan Satria	Kalibaru									
	Medansatria									
	Pejuang									
Medan Satria Total										
Mustika Jaya	Cimuning				4,67					
	Mustikajaya				8,01					
	Mustikasari							100,87		
	Padurenan							23,35		
Mustika Jaya Total					12,68			124,22		
Pondok Gede	Jatibening									
	Jatibening Baru									
	Jaticempaka									
	Jatimakmur									
	Jatiwaringin									
Pondok Gede Total										
Pondok Melati	Jatimelati									
	Jatimurni									
	Jatirahayu	0,20		4,62						
	Jatiwarna									
Pondok Melati Total		0,20		4,62						
Rawa Lumbu	Bojong Rawalumbu									
	Bojongmenteng									
	Pengasinan				1,27					
	Sepanjangjaya									
	Rawa Lumbu Total					1,27				
Grand Total		34,39	9,25	40,73	151,24	0,69	4,28	266,32	0,04	21,36

Sumber : Peta Dasar Rupabumi (RBI) dan Hasil Perhitungan GIS Tahun 2020



Gambar 3.5 **PETA JENIS TANAH KOTA BEKASI**



- LEGENDA**
- ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
- PERAIRAN**
- Sungai
 - Danau/Situ
- SISTEM JALINAN JALAN**
- Jalan Jalan Nasional
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Jalan Provinsi
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Jalan Kota
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal
- JENIS TANAH**
- Rawa
 - Kasur
 - Sawang

SUMBER DATA

1. Peta Dasar Republik Indonesia (RBI) Skala 1:25.000 BAKOSURTANAL
2. Peraturan No.25 Tahun 2015, Peraturan No.40 Tahun 2015, Peraturan No.77 Tahun 2017
3. PP No.8 Tahun 2013 (Mudatir) Peta Rencana Tata Ruang
4. Peraturan ATK (Kantor Staf) No.1 Tahun 2015 (Pusat) No.1180 Provinsi Kabupaten
5. WTM No.425 (2011-2011)
6. Peta Kota Bekasi No.1 Tahun 2014 (RTR) Kota Bekasi: 2014-00023

3.2.5 Hidrologi

- **Air Permukaan**

Kondisi hidrologi Kota Bekasi tersusun oleh aliran sungai yang mengalir di dalamnya, yang menampung limpasan air permukaan yang berasal dari air hujan dan air limbah domestik. Wilayah Kota Bekasi dialiri 3 (tiga) sungai utama yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter, beserta anak-anak sungainya. Sungai Bekasi mempunyai hulu di Sungai Cikeas yang berasal dari gunung pada ketinggian kurang lebih 1.500 meter dari permukaan air. Berdasarkan atas perhitungan neraca air untuk limpasan air permukaan di Kota Bekasi, maka terlihat bahwa limpasan air permukaan tertinggi berada di Kecamatan Jatiasih, yaitu sekitar 47,55 juta m³/tahun. Limpasan air permukaan terendah berada di Kecamatan Pondok Melati, yaitu sekitar 18,05 juta m³/tahun. Apabila dilihat rata-ratanya maka limpasan air permukaan di setiap kecamatan di Kota Bekasi adalah sekitar 33,92 juta m³/tahun. Untuk lebih jelasnya mengenai hidrologi di Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6
Besarnya Limpasan Air Permukaan di Setiap Wilayah
Per Kecamatan di Kota Bekasi

No.	Kecamatan	Limpasan Air Permukaan (juta m ³ /tahun)
1.	Bantargebang	40,72
2.	Bekasi Barat	27,91
3.	Bekasi Selatan	29,66
4.	Bekasi Timur	26,37
5.	Bekasi Utara	38,88
6.	Jatiasih	47,55
7.	Jatisampurna	42,41
8.	Medan Satria	27,05
9.	Mustika Jaya	47,08
10.	Pondok Melati	18,05
11.	Pondok Gede	28,15
12.	Rawalumbu	33,21
Rata-rata		33,92

Sumber: KLHS Revisi RTRW Metropolitan Bodebekkarpur (DLH Prov Jabar, 2016)

Secara umum ancaman atas keberadaan dan kelestarian kali dan situ di Kota Bekasi disebabkan oleh:

- Konversi lahan

Semakin pesatnya kegiatan pembangunan dan penambahan jumlah penduduk, maka keberadaan situ terancam oleh meningkatnya kebutuhan lahan. Banyak areal situ ditimbun menjadi permukiman, baik yang berskala besar maupun kecil.

Beberapa kawasan real-estate, pusat perbelanjaan, maupun perumahan pada awalnya adalah rawa atau daerah genangan air musiman. Pada skala kecil banyak areal persawahan milik rakyat telah berubah menjadi rumah, kegiatan tersebut menjadi penyebab utama terjadinya pengurangan jumlah maupun luas situ.

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

- Pendangkalan

Penyebab utama terjadinya pendangkalan situ adalah terjadinya endapan lumpur yang terbawa oleh air akibat erosi tanah. Pendangkalan di Kota Bekasi dipercepat dengan adanya sampah yang terbawa hujan. Dampak yang timbul oleh adanya pendangkalan ini adalah semakin meluasnya tumbuhnya gulma air dan tertutupnya saluran air yang berakibat meningkatnya bahaya banjir.

- Pencemaran oleh limbah

Limbah yang masuk ke situ berasal dari berbagai sumber, terbawa oleh aliran air dan masuk ke situ. Sebagai contoh, limbah rumah tangga, limbah pupuk dapat menyebabkan terjadinya *eutrofikasi* menyebabkan melimpahnya tumbuhan eceng gondok (*Eichornia crassipes*). Kelimpahan eceng gondok salah satu penyebab pendangkalan, sedangkan limbah industri yang dikhawatirkan mengandung logam berat, dapat mempengaruhi organisme perairan lewat proses bioakumulasi dalam tubuh organisme.

Air permukaan yang terdapat di wilayah Kota Bekasi meliputi Sungai/Kali Bekasi dan beberapa sungai/kali kecil serta Saluran Irigasi Tarum Barat yang selain digunakan untuk mengairi sawah juga merupakan sumber air baku bagi kebutuhan air minum wilayah Bekasi (kota dan kabupaten) dan wilayah DKI Jakarta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Jumlah Sungai di Wilayah Kota Bekasi

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar (m)	
			Permukaan	Dasar
1	Kali Cikeas	17,479	10,00	24,00
2	Kali Cileungsi	19,800	10,00	40,00
3	Kali Bekasi Hulu	11,425	10,00	50,00
4	Kali Bekasi Hilir	17,675	10,00	55,00
5	Kali Sunter	22,682	2,00	12,00
6	Kali Cakung	29,129	2,00	7,00
7	Kali Jambek-Kali Siluman	14,076	2,40	8,00
8	Kali Blencong	4,200	2,50	8,00
9	Kali Sasak Jarang/Narogong	1,003	1,70	6,00
10	Kali Bojong Rangkong	2,900	2,00	7,00
	Kali Irigasi			
11	Primer Kali Malang	8,900	2,50	24,00
12	Saluran Rawa Baru	4,500	1,60	12,00
13	Saluran Bekasi Pangkal	2,700	1,70	12,00
14	Saluran Bekasi Utara	5,900	1,50	10,00
15	Saluran Pulo Timah	1,400	1,20	6,00
16	Saluran Tanah Tinggi	6,100	1,40	8,00
17	Saluran Bekasi Tengah	3,100	1,60	14,00
18	Saluran Pondok Ungu	4,900	1,60	11,00
19	Bogor Penggarutan	3,200	1,30	7,00
20	Kali Krupuk-Kali Batu	24,000	2,00	10,00
	Kali empet/saluran rawa tembaga			

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 2013-2018, Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi

• **Air Tanah**

Merujuk pada Kondisi Kota Bekasi, dimana hidrologi air tanah Kota Bekasi terletak pada Cekungan Air Tanah (CAT) Bekasi-Karawang (Peta Cekungan Air tanah Indonesia, DESDM, 2007). Potensi air tanah bebas sebesar 1.483.000 m³/tahun dan jumlah aliran air tanah tertekan sebesar 6.000.000 m³/tahun. Kalkulasi pengambilan air tanah harian (29.987 m³/hari) dalam setahun di Kota Bekasi dapat mencapai 10.945.255 m³/tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kota Bekasi dalam waktu dekat akan mengalami krisis air tanah. Zonasi konservasi air tanah Kota Bekasi, pengambilan air tanah pada kedalaman akuifer 40 – 140 m di bawah muka tanah setempat. Dapat dikelompokkan terdapat 4 zona konservasi air tanah untuk kedalaman akuifer 40 – 140 m, yaitu zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak. Zona kritis dan zona rusak menempati sebagian wilayah Kecamatan Medan Satria, umumnya berupa wilayah komersial, permukiman padat dan industri. Zona rawan menempati wilayah Kecamatan Medan Satria, Bekasi Timur, Rawa Lumbu dan sebagian Kecamatan Mustika Jaya. Zona aman menempati sebagian besar wilayah kecamatan selain yang telah disebutkan di atas pada zona rawan hingga zona rusak. Untuk lebih jelasnya mengenai hidrologi di Kota Bekasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

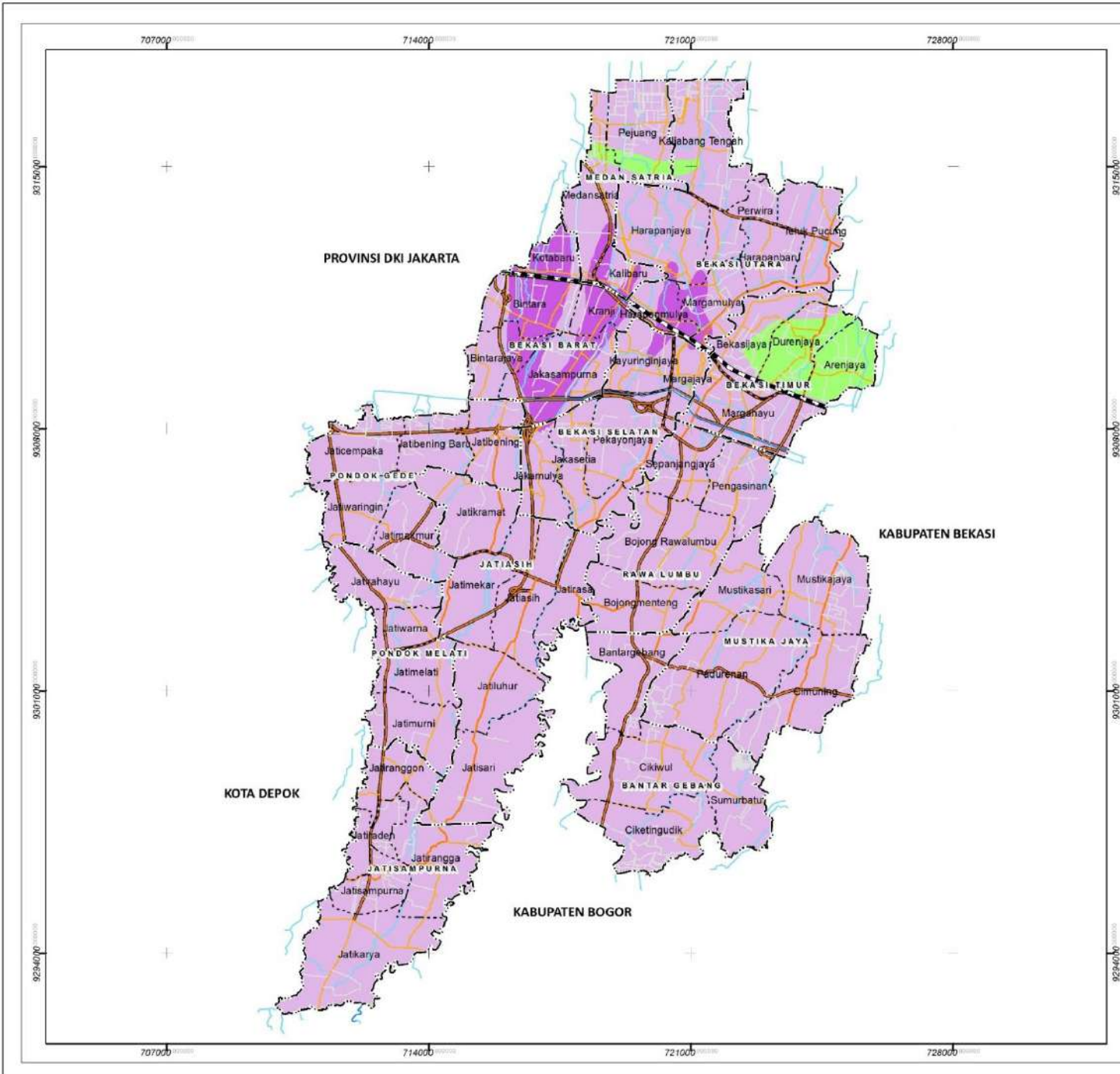
3.2.6 Hidrogeologi

Kondisi hidrogeologi Kota Bekasi berdasarkan atas perhitungan neraca air berupa air hujan yang meresap ke dalam tanah dan tersimpan di bawah permukaan sebagai air tanah di Kota Bekasi. Air hujan yang tersimpan di dalam tanah sebagai potensi sumber daya air tertinggi berada di Kecamatan Jatiasih yaitu sekitar 32,50 juta m³/tahun. Potensi terendah berada di Kecamatan Pondok Melati yaitu sekitar 12,33 juta m³/tahun. Apabila dilihat rata-ratanya maka potensi sumber daya air di setiap kecamatan di Kota Bekasi adalah 23,18 juta m³/tahun. Untuk lebih jelasnya mengenai besaran air hujan yang masuk ke setiap wilayah di Kota Bekasi dapat pada tabel dan gambar di bawah ini.

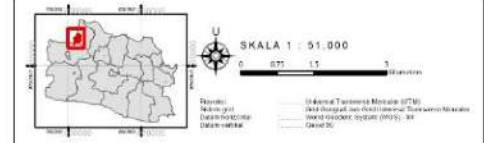
Tabel 3.8
Besarnya Air Hujan Yang Masuk Ke Setiap Wilayah
Di Kota Bekasi

No.	Kecamatan	Air Hujan yang Masuk Ke Dalam Tanah (juta m ³ /tahun)
1.	Bantargebang	27,82
2.	Bekasi Barat	19,08
3.	Bekasi Selatan	20,27
4.	Bekasi Timur	18,03
5.	Bekasi Utara	26,57
6.	Jatiasih	32,50
7.	Jatisampurna	28,97
8.	Medan Satria	18,48
9.	Mustika Jaya	32,20
10.	Pondok Melati	12,33
11.	Pondok Gede	19,24
12.	Rawalumbu	22,70
Rata-rata		23,18

Sumber: KLHS Revisi RTRW Metropolitan Bodebekkarpur (DLH Prov Jabar, 2016)



Gambar 3.6
PETA HIDROLOGI
KOTA BEKASI



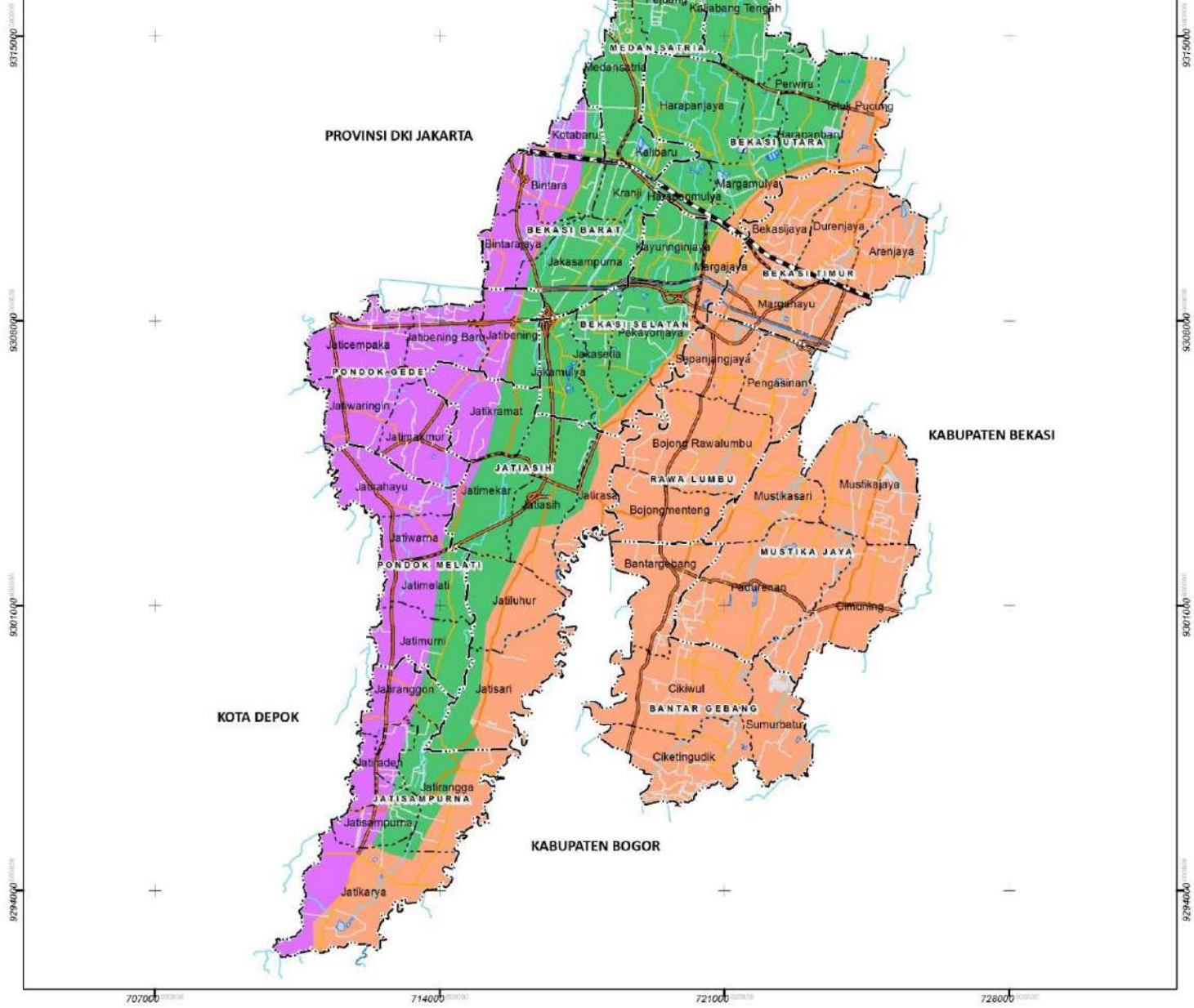
- LEGENDA**
- ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
- PERAIRAN**
- Sungai
 - Danau/SB
- SISTEM JARINGAN JALAN**
- Jaringan Jalan Nasional**
- Jalan Arteri Primer
 - Jaringan Jalan Provisi
 - Jalan Kolektor Primer
- Jaringan Jalan Kota**
- Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal
- HIDROLOGI**
- Basins Padi
 - Basins Volcanic
 - Endapan Lepas

SUMBER DATA

Peta Dasar

1. Peta Dasar Republik Indonesia (RI) Skala 1:25.000 BAKOSURTANAL
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2017
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2013 (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No. 30 Tahun 2013
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2018 (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No. 1 Tahun 2018
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2018
6. Peraturan Kota Bekasi No. 5 Tahun 2015 (Peraturan Walikota Bekasi) No. 5 Tahun 2015

707000 714000 721000 728000



PEMERINTAH KOTA BEKASI

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Bekasi

Gambar 3.7 **PETA WILAYAH SUNGAI DAN DAS KOTA BEKASI**



Projeksi: UTM
Datum: WGS 84
Sistem Koordinat: UTM
Zona: 48S
Ellipsoid: Spheroid
Datum: WGS 84
Unit: Meter

LEGENDA

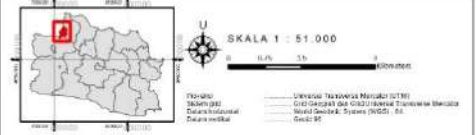
- ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- PERAIRAN**
- Bungai
- Danau/Situ
- SISTEM JARINGAN JALAN**
- Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- PETA WILAYAH SUNGAI DAN DAS**
- DAS BEKASI
- DAS CILWUNG
- DAS CIPAMUNGKIS

SUMBER DATA

1. Peta Dasar Regional Indonesia (RBI) Skala 1:25.000 BAKOSURTANAL
2. Permenlog No.38 Tahun 2015, Permenlog No.40 Tahun 2015, Permenlog No.77 Tahun 2017
3. RPP No.6 Tahun 2013 (Instansi: Peta Rencana Tata Ruang)
4. Peraturan Menteri Kabupaten No.1 Tahun 2018 (Peta Rencana RTW Provinsi Kabupaten)
5. RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031
6. Peta Kota Bekasi No.5 Tahun 2015 (RTR Kota Bekasi 2015-2025)

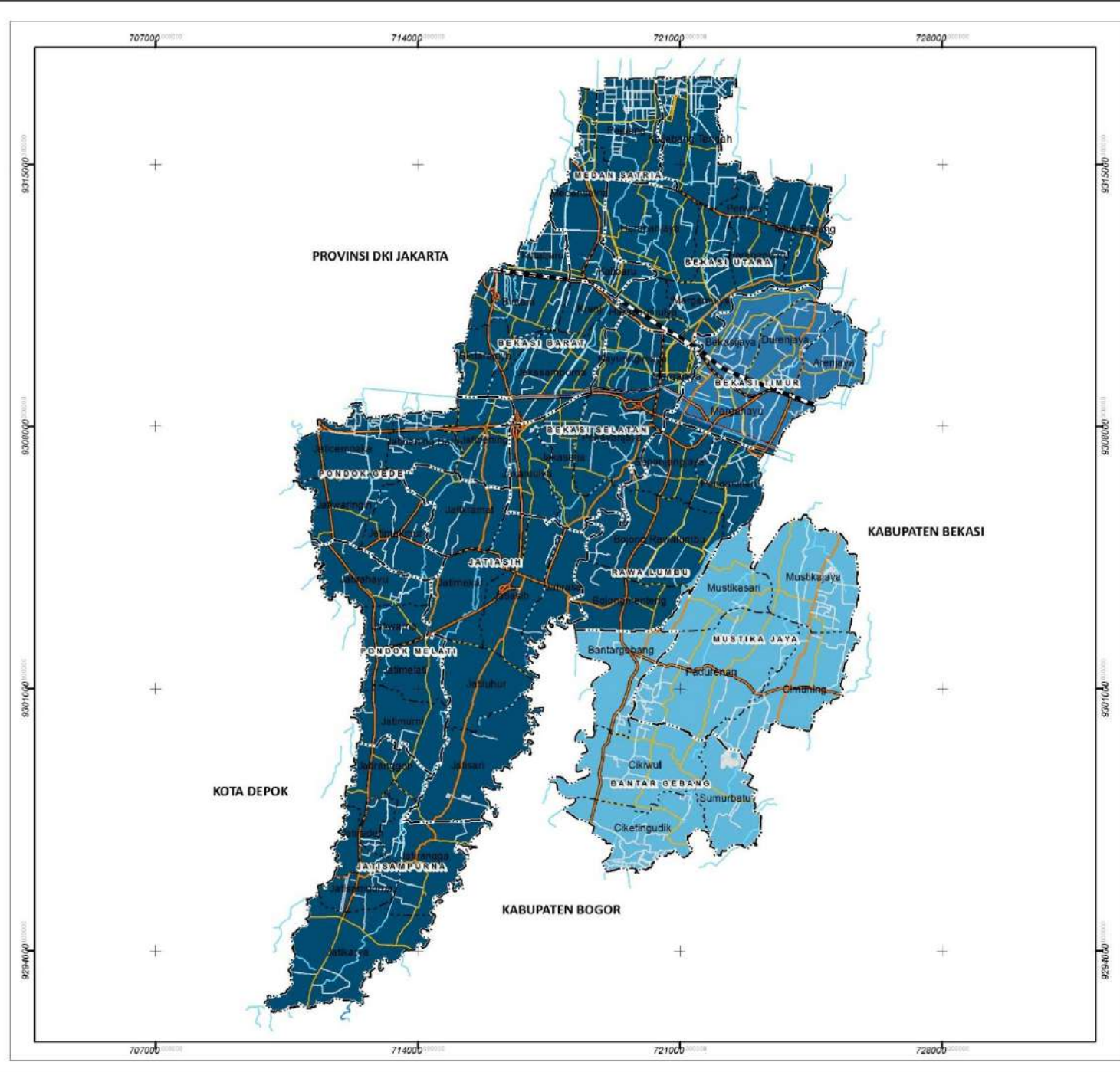
Gambar 3.8

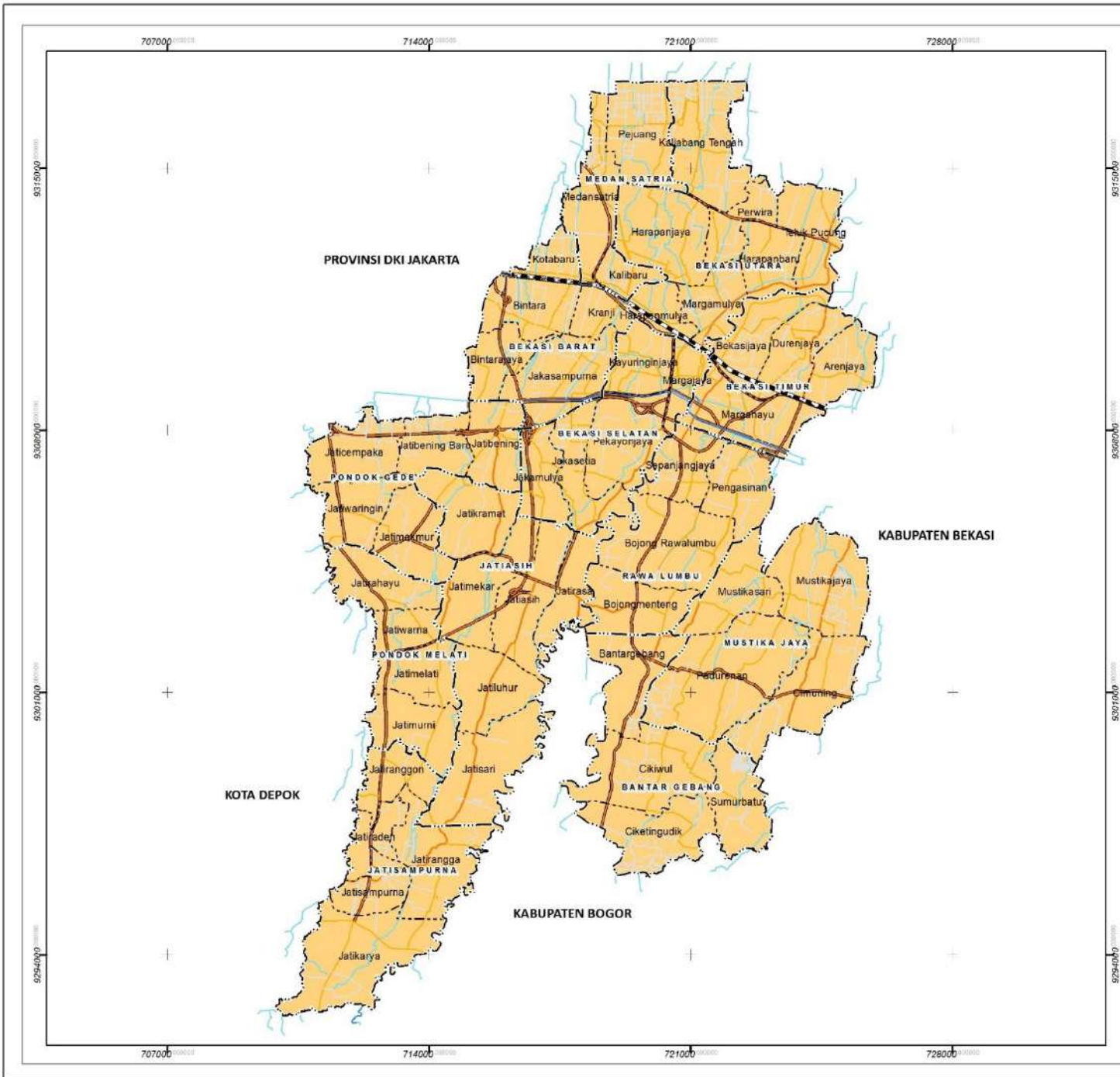
**PETA AIR TANAH
KOTA BEKASI**



- LEGENDA**
- ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
- PERAIRAN**
- Sungai
 - Danau/Situ
- SISTEM JARINGAN JALAN**
- Jaringan Jalan Nasional
 - Jalan Arteri Primer
 - Jaringan Jalan Provincial
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jaringan Jalan Kota
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal
- AIR TANAH**
- Daerah Air Tanah dangkal
 - Daerah Air Tanah yang mengandung Zat Besi
 - Kanai Air

- SUMBER DATA**
- Peta Dasar
1. Peta Dasar Kabupaten Bogor (MDS) Skala 1:25.000 BAKOSURTANAL
 2. Permenlog No.39 Tahun 2018 - Rambu-rambu No.40 Tahun 2018 - Palanometri No. 77 Tahun 2017
 3. Permenlog No.39 Tahun 2018 (Dianalisis: Peta Rencana Tata Ruang)
 4. Peraturan ATR/Kepala Batsas No.1 Tahun 2018 (Pelaksanaan RT/RW Proses/Kabupaten)
 5. RT/RW Kota Bekasi Tahun 2011-2001
 6. Peta Kota Bekasi No.5 Tahun 2016 (R/CTR Kota Bekasi: 2016-2023)







PEMERINTAH KOTA BEKASI
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
 Kota Bekasi

Gambar 3.9 **PETA KETERSEDIAAN AIR**
KOTA BEKASI



SKALA 1 : 51.000

0 15 30 Kilometers

PROVINSI DKI JAKARTA
 KABUPATEN BOGOR
 KABUPATEN BEKASI

— BAWAH TANGKAPAN AIR (BT) —
 — CUKUP AIR (CAKUPAN AIR PARTIAL) —
 — TIDAK ADA AIR (KURANG AIR) —
 — CUKUP AIR

LEGENDA

ADMINISTRASI

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

- Sungai
- Danau/Situ

SISTEM JARINGAN JALAN

- Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jaringan Jalan Kota
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal

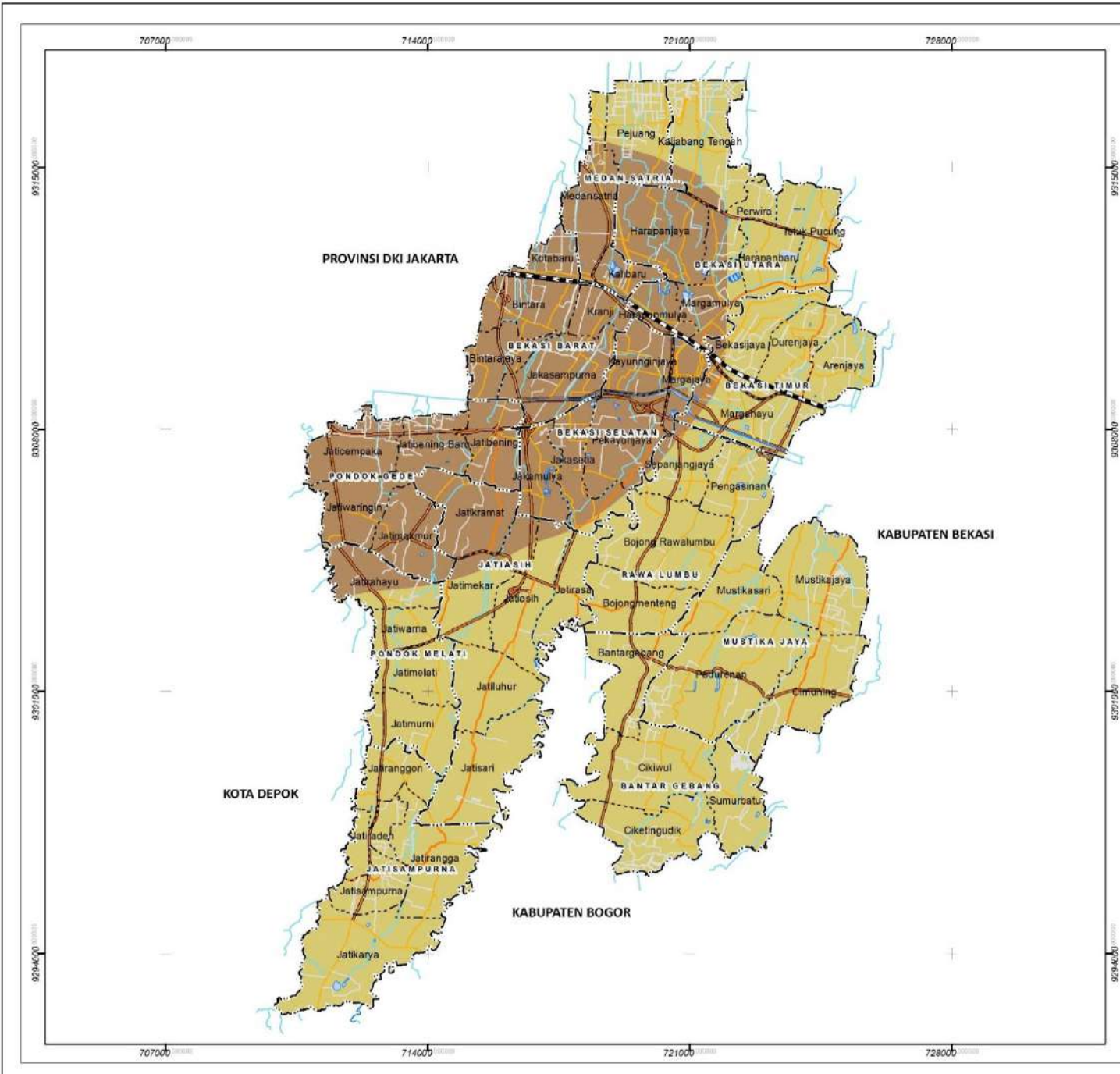
KETERSEDIAAN AIR

- WS CUKUP-BAKUPADANE

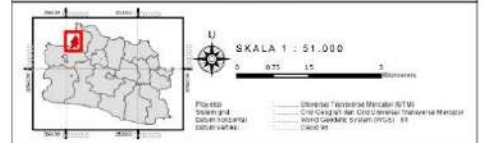
SUMBER DATA

Peta Dasar :

1. Peta Dasar Republik Indonesia (RI) Skala 1:25.000 BAKOSURTANAL
2. Permenagri No.25 Tn 2015, Permenagri No.49 Tn 2016, Permenagri No. 77 Tn 2017
3. UU No.8 Tm 2013 (tentang Tata Kelola dan Perencanaan Ruang)
4. Peraturan ATR, Rencana Badan No.1 Tn 2018 (Pola dan RTRW Provinsi Kab/Kota)
5. RTRW Kota Bekasi Tm 2011-2023
6. Peta Kota Bekasi No.8 Tn 2016 (RDTN Kota Bekasi 2016-2020)



Gambar 3.10
PETA HIDROGEOLOGI
KOTA BEKASI



- LEGENDA**
- ADMINISTRASI**
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
- PERAIRAN**
- Sungai
 - Danau/Situ
- SISTEM JARINGAN JALAN**
- Jaringan Jalan Nasional
 - Jalan Arteri Primer
 - Jaringan Jalan Perantara
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jaringan Jalan Kota
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal
- HIDROGEOLOGI**
- Produktif dgn Penyebaran Luas (5 - 10 L/Dik)
 - Produktif Sedang dgn Penyebaran Luas (< 5 L/Dik)

SUMBER DATA

Penyusun:

1. File Data: Regulasi (Indonesia) Skala 1:25.000 SANDUSURTAHAL
2. Rasterologi No.38 Thn 2015: Rasterologi No.48 Thn 2015: Rasterologi No.77 Thn 2017
3. RPJMD Thn 2013 (Kebijakan: Papan Rencana Tata Ruang)
4. Peraturan Kepala Daerah No.1 Thn 2016 (Keputusan RTM/Kep.rih/16/0001)
5. RTRM Kota Bekasi Thn 2011-2021
6. Peta Kota Bekasi No.5 Thn 2016 (RTRM Kota Bekasi/2016/2025)

3.2.7 Kebencanaan

Kota Bekasi yang terletak di bagian hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi merupakan salah satu wilayah yang selalu mengalami banjir. Banjir yang terjadi di Kota Bekasi saat ini belum seberat apa yang terjadi di berbagai wilayah lain seperti Jakarta dan lain-lain, akan tetapi sudah memberikan indikasi dini akan bahaya banjir yang lebih besar di kemudian hari bila DAS Bekasi Hulu tidak dikelola secara baik. Banjir yang terjadi di Kota Bekasi terjadi secara rutin dari tahun ke tahun dan cenderung membesar. Perubahan fungsi lahan akibat pertumbuhan penduduk yang signifikan di Kota Bekasi menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir.

Keberadaan pemukiman di bantaran sungai dan kebiasaan buruk penduduk membuang sampah ke sungai mempersempit DAS sehingga daya tampung air berkurang. Akumulasi dari keseluruhan kondisi ini memberikan tekanan yang besar terhadap terjadinya banjir ketika hujan lebat, bahkan tanpa hujan sekalipun dikarenakan peningkatan debit air di hulu sungai yang tidak mampu ditampung oleh badan sungai di hilir. Daerah rawan banjir di Kota Bekasi tersebar di berbagai kecamatan. Kecamatan Bekasi Timur merupakan daerah yang memiliki luas genangan terbesar di Kota Bekasi (137,5 ha)

Ketinggian genangan banjir berkisar antara 30 cm hingga 1 m dengan durasi genangan antara 3-24 jam. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam mengantisipasi masalah banjir seperti pembangunan tanggul untuk antisipasi banjir di daerah Jatiasih sudah dilakukan termasuk memasang pompa di sejumlah titik, memperbaiki hirarki dan bentuk drainase di Kota Bekasi serta membangun dan merevitalisasi situ-situ pengendali banjir yang mana keberadaan situ-situ di Kota Bekasi yang penanganannya jauh tertinggal dibandingkan dengan perubahan fungsi lahan yang semakin berkembang dari tahun ke tahunnya,

Selain banjir terdapat juga rawan bencana lainnya seperti rawan gempa bumi, baik Kawasan rawan bencana gempa bumi rendah yang tersebar di seluruh Kota Bekasi sampai dengan Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi yang berada di Kelurahan Teluk Pucung, Kelurahan Perwira, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Pejuang, Kelurahan Medan Satria dan Kelurahan Harapan Jaya. Untuk lebih jelasnya mengenai Kawasan rawan bencana di Kota Bekasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

3.2.8 Penggunaan Lahan

penggunaan lahan terbangun yang dimanfaatkan untuk peruntukan permukiman teratur (perumahan) dan permukiman tidak teratur yang dibangun secara individu. Luas penggunaan lahan untuk perumahan mencapai luas $\pm 9.540,428$ ha atau sekitar 47,18%. Penggunaan lahan terbangun lainnya diperuntukan untuk kawasan komersial, industri, fasilitas pelayanan umum, kawasan campuran, pemerintahan, perkantoran dan infrastruktur pendukung kegiatan perkotaan. Sedangkan penggunaan lahan non terbangun dimanfaatkan untuk kawasan lindung, RTH, pertanian, tegalan, ladang, kebun dan kolam/empang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dan gambar di bawah ini.

707000

714000

721000

728000

925000

926000

927000

928000

925000

926000

927000

928000

PROVINSI DKI JAKARTA

KABUPATEN BEKASI

KOTA DEPOK

KABUPATEN BOGOR

707000

714000

721000

728000



PEMERINTAH KOTA BEKASI

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Bekasi

Gambar 3.11
**PETA KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR
KOTA BEKASI**



LEGENDA

ADMINISTRASI

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

PERAIRAN

- Sungai
- Danau/Situ

SISTEM JARINGAN JALAN

Jaringan Jalan Nasional

- Jalan Arteri Primer

Jaringan Jalan Provinsi

- Jalan Kolektor Primer

Jaringan Jalan Kota

- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal

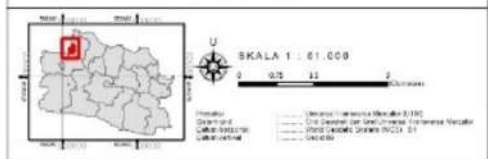
RAWAN BENCANA BANJIR

- Lokal Banjir

SUMBER DATA

- Peta Dasar:
1. Peta Dasar Rapporth Indonesia (RS) Skala 1:25.000 BAKOSURTANAL
 2. Raster Digital (RD) The 2014, Raster Digital No. 48 The 2014, Perencanaan No. 77 The 2017
 3. P.P. No. 3 The 2012 (Peraturan Pemerintah) Kota Bekasi
 4. Dokumen KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RPJMD Kota Bekasi Tahun 2016-2021
 5. RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031
 6. Perda Kota Bekasi No. 1 Tahun 2016 tentang RTRW Kota Bekasi 2016-2031

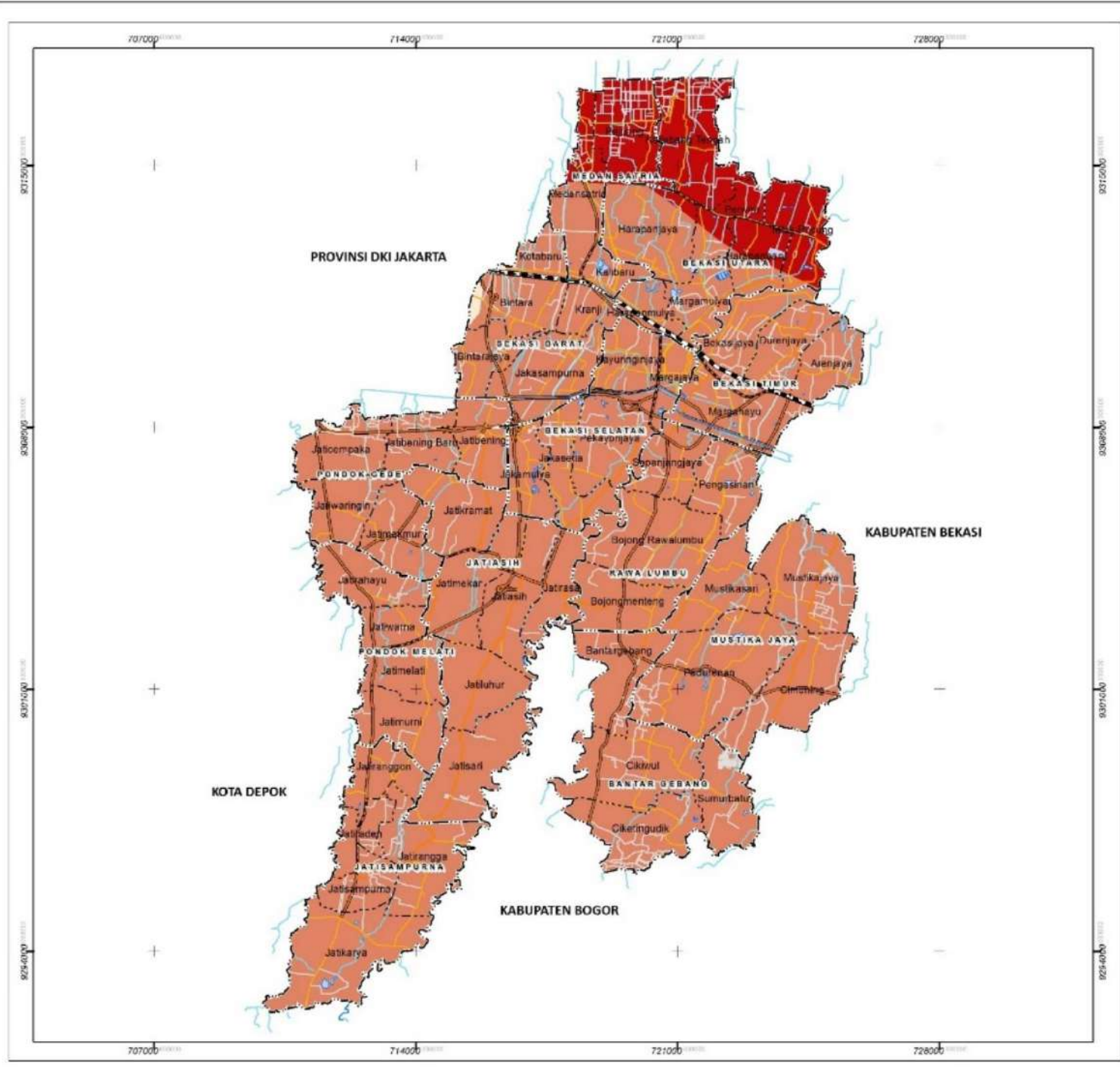
Gambar 3.12
PETA KAWASAN RAWAN GEMPA BUMI KOTA BEKASI



- LEGENDA**
- LOKASI TIKUS**
 - Stasiun TIKUS
 - Stasiun Komuter
 - Stasiun Keluaran
 - PERAIRAN**
 - Sungai
 - Danau/Terus
 - SISTEM JARINGAN JALAN**
 - Jaringan Jalan Arteri Nasional
 - Jalan Arteri Primer
 - Jaringan Jalan Kolektor
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jaringan Jalan Kolektor
 - Jalan Arteri Sekunder
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal
 - RAWAN GEMPA BUMI**
 - Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Rendah
 - Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Menengah
 - Kawasan Rawan Bencana Gempabumi Tinggi

SUMBER DATA

Peta Dasar
 1. Baku Dasar (Kondisi) Indonesia (IGU) Skala 1:25 000 (DINAS SURvei)
 2. Peraturan No. 57 Tahun 2018, Perencanaan No. 45 Tahun 2018, Perencanaan No. 77 Tahun 2017
 3. RTRR No. 10/2018 tentang Rencana Wilayah Ruang
 4. Peraturan Gubernur Bekasi No. 17/2018 tentang Rencana Wilayah Ruang Kota Bekasi
 5. RTRR Kota Bekasi No. 10/2018
 6. Rencana Kota Bekasi No. 57/2018 dan RTRR Kota Bekasi 2018-2030



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Tabel 3.9
Penggunaan Lahan Kota Bekasi

Kecamatan	Kelurahan	Area Parkir	Bangunan Industri	Bangunan Permukiman Kota	Danau/Situ	Jalan	Kebun Campuran	Kolam Air Tawar	Ladang/Tegalan	Lahan Kosong	Pemukaman	Perkebunan Tanaman Semusim	Sawah	Semak Belukar	Stadion Olahraga	Sungai	Grand Total
Bantar Gebang	Bantargebang		83,62	246,84		1,42	18,74	0,24		26,30			10,66	12,62		4,37	404,81
	Ciketingudik		52,57	200,54	0,17		17,75	0,75	10,72	142,65			46,13	4,21		0,83	476,30
	Cikiwul		128,41	308,20			23,07		17,10	91,92		0,00	35,25	28,00		7,03	638,99
	Sumurbatu			220,57	0,80		26,31		44,69	16,98		17,81	37,04				364,20
Bantar Gebang Total			264,60	976,15	0,97	1,42	85,88	0,98	72,51	277,84		17,81	129,09	44,83		12,23	1.884,30
Bekasi Barat	Bintara			337,08		4,85	4,65		1,89	6,19			0,00				354,67
	Bintarajaya			210,18		5,32				22,23			16,41				254,13
	Jakasampurna			412,65		19,98	4,25		5,49	6,70			48,07	0,10		3,97	501,21
	Kotabaru		1,71	157,71	0,96	0,06				0,53							160,98
	Kranji			164,34		2,70			2,23					2,02			171,29
Bekasi Barat Total			1,71	1.281,97	0,96	32,91	8,90		9,61	35,64			64,47	2,12		3,97	1.442,27
Bekasi Selatan	Jakamulya		0,60	211,44	2,19	11,21	26,90	1,63	1,92	8,91			3,68	2,23			270,72
	Jakasetia		0,19	304,47	1,20	6,23	1,70	0,08	13,31	11,61						4,34	343,13
	Kayuringinjaya			258,54	0,06	5,09				10,76				1,92	4,62		280,99
	Margajaya	1,63		120,29		8,53		1,53		24,38				0,65		6,37	163,37
	Pekayonjaya		0,27	403,03	1,12	18,50	5,96	1,11	1,85	11,41	0,96		13,36	14,22		8,09	479,88
Bekasi Selatan Total		1,63	1,06	1.297,76	4,57	49,57	34,56	4,35	17,08	67,07			17,04	19,02	4,62	18,79	1.538,09
Bekasi Timur	Arenjaya			257,78	2,57	0,53	0,69	0,14	4,51	4,01			16,53				286,79
	Bekasijaya		1,75	294,51			2,48	0,20	24,47	13,70			0,89	7,11		9,03	354,14
	Durenjaya			320,06		0,59	0,88	0,21	7,53	5,64			9,70	13,98			358,60
	Margahayu		4,71	375,36	1,01	15,50	9,08		5,02	29,62			8,05	2,16		13,79	464,30
Bekasi Timur Total			6,46	1.247,71	3,59	16,63	13,14	0,55	41,53	52,97			35,18	23,24		22,82	1.463,82
Bekasi Utara	Harapanbaru		0,49	170,34	5,35		0,25	0,11	1,46	34,73			47,24	9,13		0,92	270,02
	Harapanjaya		84,58	372,47	4,46	0,77	0,58	0,31	12,29	53,65			15,77				544,89
	Harapanmulya			140,67	2,66	5,74	10,45	0,00		5,12		11,72	0,45				176,80
	Kaliabang Tengah		31,26	477,02			0,13	0,03	1,81	21,20			43,74	0,39			575,58
	Margamulya		6,32	159,82	7,63	12,39	9,69	0,76	0,00	42,50		7,88	24,06	6,45		1,63	279,14
	Perwira		0,41	195,86	0,21		0,56	0,32	0,28	4,48			28,32	0,00			230,45
	Teluk Pucung		1,10	290,91			2,26	1,89	15,35	10,33			28,00	6,24		3,95	360,03
	Bekasi Utara Total			124,17	1.807,08	20,31	18,89	23,92	3,43	31,20	172,01		19,60	187,58	22,22		6,50
Jatiasih	Jatiasih		1,09	340,46		8,08	9,60	1,18	22,99	12,49			28,99	0,64		1,14	426,66
	Jatikramat			406,11			6,63		13,38	4,68							430,79
	Jatiluhur			347,23			12,67			7,44			15,50		0,33		383,18
	Jatimekar			333,13		9,89	9,70		0,66	8,14			103,68				465,19
	Jatirasa		5,06	255,73		1,10	2,42		15,71	2,30						8,49	290,82
	Jatisari		1,46	415,76			48,99		67,35	21,71			6,12	12,49		4,51	578,39
	Jatiasih Total			7,61	2.098,43		19,06	90,01	1,18	120,09	56,76			154,30	13,13		14,47
Jatisampurna	Jatikarya		0,88	487,98	5,77		24,59		54,21	41,00			100,31			3,97	718,70
	Jatiraden		0,58	155,91			17,66		14,39	2,84							191,38
	Jatirangga		0,00	315,51			90,13		19,67	51,51			30,10	0,62		4,35	511,89
	Jatiranggon			239,22			1,86	0,37	3,01	5,98				18,92			269,35
	Jatisampurna			175,83			19,61		16,92	0,79			16,68				229,84
Jatisampurna Total			1,46	1.374,44	5,77		153,86	0,37	108,20	102,11			147,10	19,54		8,31	1.921,16
Medan Satria	Kalibaru		6,70	114,97	5,40	0,78	1,78			5,74			2,39				137,75

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Kecamatan	Kelurahan	Area Parkir	Bangunan Industri	Bangunan Permukiman Kota	Danau/Situ	Jalan	Kebun Campuran	Kolam Air Tawar	Ladang/Tegalan	Lahan Kosong	Pemukiman	Perkebunan Tanaman Semusim	Sawah	Semak Belukar	Stadion Olahraga	Sungai	Grand Total
	Medansatria		214,24	152,28		18,20		0,32		29,73			8,32	2,53			425,62
	Pejuang		87,61	340,13			0,33			17,73			2,05	0,40			448,25
Medan Satria Total			308,55	607,37	5,40	18,98	2,11	0,32		53,19			12,76	2,94			1.011,63
Mustika Jaya	Cimuning		8,14	431,90	0,64		11,72		24,91	11,61			67,36				556,27
	Mustikajaya			513,75	0,51		0,03	0,77	66,54	12,39			9,04	5,40			608,43
	Mustikasari			280,12			0,39		10,82	1,88			112,70				405,91
	Padurenan		7,72	624,76	5,22		20,16	0,61	130,68	45,60		4,36	87,41				926,52
Mustika Jaya Total			15,86	1.850,52	6,37		32,30	1,38	232,95	71,48		4,36	276,52	5,40			2.497,14
Pondok Gede	Jatibening			303,02		13,45	3,43		1,72	3,87				1,69		2,73	329,91
	Jatibening Baru			241,72		6,55	13,11	0,40		7,70		1,48	2,73	1,17			274,85
	Jaticempaka			334,58		8,09	11,28		0,53	0,71			4,75			1,23	361,18
	Jatimakmur			332,91	0,43		4,26		29,07	2,90				0,55			370,12
	Jatiwaringin			308,40			2,01	0,23	2,07	1,15			3,04			1,62	318,52
Pondok Gede Total				1.520,63	0,43	28,09	34,10	0,62	33,40	16,32		1,48	10,52	3,41		5,58	1.654,59
Pondok Melati	Jatimelati			273,34		3,13				9,26			9,48			1,12	296,34
	Jatimurni			311,58					9,89	5,05			21,95	2,29		0,28	351,04
	Jatirahayu		13,63	322,74			0,12			4,96			1,23	2,15		3,01	347,85
	Jatiwarna			161,06		2,39	6,70			8,97						0,94	180,06
Pondok Melati Total			13,63	1.068,72		5,52	6,82		9,89	28,25			32,66	4,44		5,35	1.175,29
Rawa Lumbu	Bojong Rawalumbu		14,53	598,44		5,67	8,03		9,94	17,38			6,38	2,81		8,66	671,85
	Bojongmenteng		56,83	278,76		4,68	0,48		18,84	15,82			4,74			5,73	385,89
	Pengasinan		0,70	317,55		6,63	7,18	2,80		10,45				1,79			347,10
	Sepanjangjaya		3,69	244,88	0,13	12,73	10,70		7,45	15,11				4,73		7,50	306,93
Rawa Lumbu Total			75,76	1.439,64	0,13	29,71	26,39	2,80	36,23	58,77			11,12	9,33		21,89	1.711,76
Grand Total		1,63	820,88	16.570,43	48,50	220,78	511,98	16,00	712,68	992,42	0,96	43,24	1.078,36	169,62	4,62	119,90	21.312,00

Sumber : Peta Dasar Rupabumi (RBI) dan Hasil Perhitungan GIS Tahun 2020

707000

714000

721000

728000

9315000

9308000

9301000

9294000

9315000

9308000

9301000

9294000

PROVINSI DKI JAKARTA

KABUPATEN BEKASI

KOTA DEPOK

KABUPATEN BOGOR

707000

714000

721000

728000



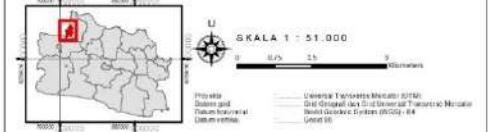
PEMERINTAH KOTA BEKASI

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Gambar 3.13

PETA PENGGUNAAN LAHAN KOTA BEKASI



LEGENDA

ADMINISTRASI

- Satelit Kabupaten
- Satelit Kecamatan
- Satelit Kelurahan

PERAIRAN

- Sungai
- Danau/Situ

SISTEM JARINGAN JALAN

Jaringan Jalan Nasional

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer

Jaringan Jalan Kota

- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal

TUTUPAN LAHAN

- Kawasan Air Tawar
- Danau/Situ
- Kebun Campuran
- Ladang Tegalan
- Lahan Kosong
- Pemukiman
- Pemukiman Tanaman Semusuni
- Sawah
- Semak Belukar
- Bangunan Pemukiman Kota
- Area Parkir
- Bangunan Industri
- Stasiun Olahraga

SUMBER DATA

- Peta Dasar
- Peta Dasar Kabupaten (Indonesia) (RBI) Skala 1:25.000 BAKOSURTANAL
- Peraturan No. 36 Tahun 2016, Peraturan No. 48 Tahun 2016, Peraturan No. 17 Tahun 2017
- PP No. 8 Tahun 2013 (Revisi) Peraturan Menteri Desa, Kemukiman dan Koperasi
- Peraturan Menteri Desa, Kemukiman dan Koperasi No. 1 Tahun 2016 (Peraturan Menteri Desa, Kemukiman dan Koperasi)
- Peraturan Kota Bekasi No. 1 Tahun 2011
- Peraturan Kota Bekasi No. 3 Tahun 2016 (RTRW Kota Bekasi 2011-2026)

3.3 KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan subyek pembangunan pada suatu wilayah, adanya pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya wilayah, salah satunya dipengaruhi oleh berbagai aktivitas penduduk dalam wilayah bersangkutan yang berinteraksi dengan penduduk lainnya di dalam maupun dengan wilayah di luarnya. Penduduk sebagai aktor dalam pembangunan merupakan potensi dalam keterlibatannya atau peran sertanya dalam pembangunan, namun disisi lain dapat menjadi faktor penghambat atau kendala dalam pembangunan.

Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan adat istiadat, nilai dan norma dalam kehidupan disamping karena faktor lingkungan dan geografi. Kajian kependudukan dilakukan untuk memahami aspek-aspek kependudukan terutama yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan pertumbuhan perkembangan sosial dan ekonomi diantaranya sebaran, jumlah, struktur, pertumbuhan, pergerakan penduduk dan kualitas sumberdaya manusia. Pembangunan yang dilakukan di Kota Bekasi dapat pula diukur tingkat keberhasilannya melalui pengukuran tingkat kesejahteraan penduduknya. Karena hakekat pembangunan itu sendiri adalah untuk mensejahterakan penduduk dengan memanfaatkan berbagai keunggulan yang dimiliki baik keunggulan komparatif maupun kompetitif.

3.3.1 Perkembangan Kependudukan

Perkembangan penduduk di Kota Bekasi terus meningkat berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bekasi kependudukan dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2019 jumlah penduduk Kota Bekasi sebesar 2.448.830 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi sebesar 329.950 jiwa atau 13,47% berada di Kecamatan Bekasi Utara. Sedangkan untuk penduduk terendah berada di Kecamatan Bantargebang sebesar 105.370 jiwa atau 4,30%. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan penduduk Kota Bekasi dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10
Jumlah Penduduk Kota Bekasi Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Distribusi (%)
1	Pondokgede	228330	9,32
2	Jatisampurna	106200	4,34
3	Pondok Melati	127200	5,19
4	Jatiasih	225680	9,22
5	Bantargebang	105370	4,30
6	Mustika Jaya	195130	7,97
7	Bekasi Timur	271420	11,08
8	Rawalumbu	220590	9,01
9	Bekasi Selatan	211440	8,63
10	Bekasi Barat	269850	11,02
11	Medansatria	157680	6,44
12	Bekasi Utara	329950	13,47
	Kota Bekasi	2.448.830	100,00

Sumber: BPS, Kota Bekasi Dalam Angka 2020

3.3.2 Jumlah, Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Bekasi tahun 2019 mencapai 2.448.830 jiwa. Pada tahun 2018 terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.235.491 jiwa dan perempuan sebanyak 1.213.340 jiwa. Distribusi penduduk merupakan sebaran penduduk pada sebuah wilayah, ini ditandai oleh jumlah penduduk yang tersebar, di Kota Bekasi konsentrasi penduduk yang cukup tinggi pada umumnya tersebar di seluruh kecamatan. Hal ini dapat dimengerti karena beberapa kecamatan tersebut mempunyai tingkat mobilitas yang tinggi seperti perdagangan dan jasa, industri, pemerintahan atau karena kelengkapan fasilitas baik pendidikan, kesehatan, peribadatan dan lain-lain.

Tapi pada beberapa kecamatan lain menunjukkan kecenderungan jumlah penduduk yang kurang, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya fasilitas atau kondisi alam yang kurang mendukung (jenis tanah dengan porositas yang tinggi) sehingga sebagian penduduk lebih memilih tempat tinggal yang mempunyai kelengkapan fasilitas guna mendukung aktifitasnya.

Kepadatan penduduk tertinggi di Kota Bekasi berada di Kecamatan Bekasi Timur yaitu sebanyak 19.292 jiwa/km², sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Bantargebang yaitu sebanyak 7.201 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya dapat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Bekasi

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Pondokgede	228330	14.342
2	Jatisampurna	106200	5.435
3	Pondok Melati	127200	10.780
4	Jatiasih	225680	9.299
5	Bantargebang	105370	5714
6	Mustika Jaya	195130	7386
7	Bekasi Timur	271420	18552
8	Rawalumbu	220590	13.091
9	Bekasi Selatan	211440	13.165
10	Bekasi Barat	269850	18.074
11	Medansatria	157680	13.272
12	Bekasi Utara	329950	16.706
	Kota Bekasi	2.448.830	11.634

Sumber: BPS, Kota Bekasi Dalam Angka 2020

3.3.3 Jumlah Penduduk Menurut Usia

Struktur penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin tahun 2018 menunjukkan bahwa penduduk Kota Bekasi didominasi oleh usia produktif/angkatan kerja yaitu penduduk berusia antara 15 – 64 tahun sebesar 79,13 persen sedangkan sisanya sebesar 20,87 persen merupakan penduduk bukan angkatan kerja yaitu penduduk usia 0 – 14 tahun dan usia > 64 tahun. Hal ini berarti bahwa angka ketergantungan Kota Bekasi sebesar 41,15 persen. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk menurut usia di Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

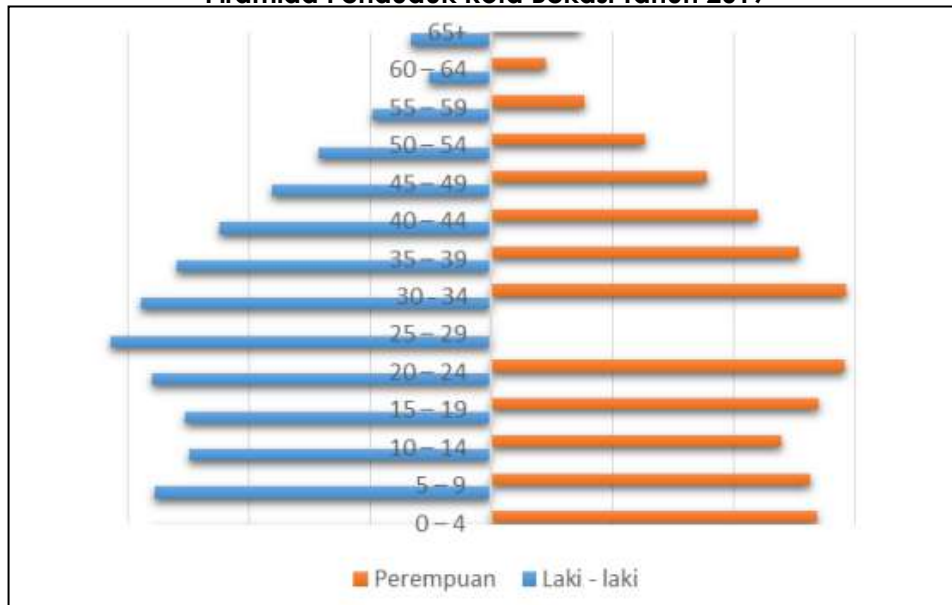
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Tabel 3.12
Jumlah Penduduk Menurut Usia di Kota Bekasi Tahun 2019

No	Kecamatan	Tahun														Jumlah
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65+	
1	Pondokgede	16125	18981	18395	17875	18166	18481	19109	20453	18313	15844	13524	10954	9308	12798	228326
2	Jatisampurna	7724	9342	9459	9601	9146	8979	8207	8992	8521	7596	6486	5067	3287	3792	106199
3	Pondok Melati	8466	10399	10740	10444	9927	9783	9734	11023	10269	9365	8012	6365	5180	7495	127202
4	Jatiasih	16795	19963	20139	20250	18941	17979	17727	18820	18017	16317	13956	10278	7015	9439	225680
5	Bantargebang	8727	10150	9735	9098	8415	8789	9183	10500	10045	7920	5096	3089	2062	2564	105373
6	Mustika Jaya	14486	18557	19454	18583	15653	14435	14208	17016	17653	15889	12048	7298	4507	5347	195133
7	Bekasi Timur	21201	23234	21277	20519	20945	23551	24635	25000	20086	15994	14841	14752	12304	13083	271422
8	Rawalumbu	15738	18153	17851	18956	20358	20546	18807	18464	16946	14936	13769	11798	7447	6819	220588
9	Bekasi Selatan	15132	17715	17220	17139	16866	17648	17694	19797	16346	13900	12514	10834	8896	10705	211436
10	Bekasi Barat	19714	22623	21474	20803	21366	22491	22967	24005	20919	17624	16096	14037	11627	14100	269846
11	Medansatria	11413	13183	13179	13706	13381	13465	13055	13317	11804	11162	10171	8296	5672	5872	157676
12	Bekasi Utara	24105	27334	27478	28343	28341	29029	27303	26817	23761	22554	22219	18175	12833	11657	329949
	Kota Bekasi	179626	209624	206399	205317	201505	205176	2020629	213204	192680	169185	148732	120943	90139	103671	2448830

Sumber: Rancangan Akhir Revisi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023

Gambar 3.14
Piramida Penduduk Kota Bekasi Tahun 2019



3.3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Data jumlah penduduk Kota Bekasi pada tahun 2019 mencapai 2.448.830 jiwa dengan Struktur penduduk laki-laki sebesar 1.235.490 jiwa dan jumlah penduduk perempuan mencapai 1.213.340 jiwa.

Artinya, perbandingan antara jumlah penduduk pria dan wanita di wilayah ini hampir sama banyak, dengan sedikit dominasi oleh jumlah penduduk pria, dari rasio jenis kelamin ini maka terlihat bahwa penduduk Kota Bekasi didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dengan sex ratio mencapai 101.83. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur penduduk menurut jenis kelamin dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.13
Struktur Penduduk Kota Bekasi
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk			Resio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
2015	1.216.260	1.168.153	2.384.413	104,12
2016	1.219.312	1.183.153	2.402.465	103.06
2017	1.221.623	1.193.468	2.415.091	102.36
2018	1.230.001	1.206.576	2.436.577	101.94
2019	1.235.490	1.213.340	2.448.830	101.83

Sumber : Disdukcapil Kota Bekasi Tahun 2020

3.3.5 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran.

Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada

pertumbuhan penduduk dunia. Pengertian lainnya adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya.

Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Berdasarkan data yang di peroleh dan hasil analisis LPP Kota Bekasi sebesar 1,30 %, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.14
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bekasi Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	LPP (%)
1	Pondokgede	228330	1,00
2	Jatisampurna	106200	2,07
3	Pondokmelati	127200	0,82
4	Jatiasih	225680	1,76
5	Bantargebang	105370	2,54
6	Mustikajaya	195130	2,52
7	Bekasi Timur	271420	1,40
8	Rawalumbu	220590	1,14
9	Bekasi Selatan	211440	0,92
10	Bekasi Barat	269850	0,68
11	Medansatria	157680	0,60
12	Bekasi Utara	329950	1,16
	Kota Bekasi	2.448.830	1,30

Sumber: BPS, Kota Bekasi Dalam Angka 2020

3.3.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hasil pengukuran IPM dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal berikut:

- Mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- Menentukan peringkat atau level pembangunan suatu daerah/negara.
- Menjadi ukuran kinerja pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
- Khusus di Indonesia, digunakan sebagai salah satu indikator untuk penentuan besaran Dana Alokasi Umum (DAU).

Pada tahun 2019 IPM Kota Bekasi telah berhasil mencapai angka 81,59. meningkat 0,55 dari tahun 2018. Capaian ini menempatkan Kota Bekasi pada status pembangunan manusia "sangat tinggi". Status ini merupakan babak baru dalam pembangunan kualitas manusia di Kota Bekasi. Dibandingkan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, indeks pembangunan manusia yang diraih oleh Kota Bekasi jauh lebih tinggi. Pada tahun 2018, IPM Provinsi Jawa Barat dan Indonesia masing-masing adalah 72,03 (kategori tinggi) dan 71,92 (kategori tinggi). Akan tetapi, dari sisi pertambahan kenaikan angka IPM, Kota Bekasi (rata-rata bertambah sebesar 0,485 per tahun) masih di bawah Provinsi Jawa Barat (rata-rata meningkat sebanyak 0,61 setahun) dan Indonesia (rata-rata naik sekitar 0,62 setiap tahunnya). Pada tahun 2019, Kota Bekasi memperoleh IPM sebesar 81,59 yang mana lebih tinggi apabila dibandingkan dengan IPM Jawa Barat pada tahun 2019 yang mendapatkan perolehan sebesar 72,03.

3.3.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan/kemudahan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia, sehingga untuk mendapatkannya relatif mudah. Seperti halnya perkembangan angka partisipasi angkatan kerja, selama jangka waktu 2015-2019 tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Bekasi juga mengalami fluktuasi. Pada awalnya tidak terjadi peningkatan maupun penurunan dari tahun 2015 hingga 2016 dengan capaian sebesar 58,26 persen dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga 66,7 persen (lihat kembali Gambar 2-29). Angka TPAK tahun 2018 naik menjadi 65,3 persen dan pada tahun 2019 kembali naik menjadi 65,7 persen.

3.3.8 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bekasi menurut dari tahun 2015 dan 2016 ke 2017, yaitu dari 9,36 persen menjadi 9,32 persen dan menurun kembali pada tahun 2018 menjadi 9,1 persen dan pada tahun 2019 sebesar 8,2 persen. Menurunnya persentase tingkat pengangguran terbuka ini bukan disebabkan oleh meningkatnya lapangan pekerjaan yang mampu menyerap pengangguran terbuka, tetapi lebih dikarenakan meningkatnya persentase penduduk bukan angkatan kerja selama kurun waktu bersamaan. Untuk lebih jelasnya mengenai grafik pengangguran terbuka Kota Bekasi dapat di lihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Gambar 3.15
Grafik Pengangguran Terbuka Kota Bekasi



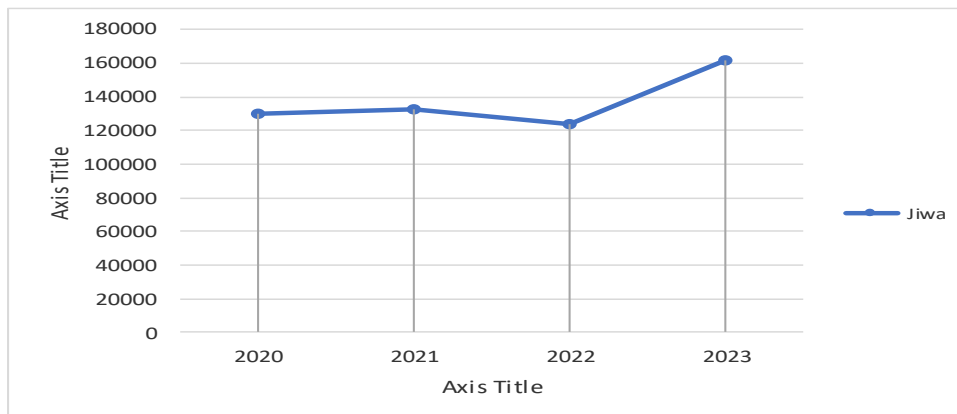
Berdasarkan prediksi Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 130,254 jiwa dan pada tahun 2023 sebesar 161,311 jiwa, untuk lebih jelasnya mengenai pengangguran terbuka di Kota Bekasi dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.15
Prediksi Jumlah Pengangguran Terbuka Di Kota Bekasi

No	Tahun	Jiwa
1	2020	130,254
2	2021	132,278
3	2022	124,114
4	2023	161,311

Sumber data :Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

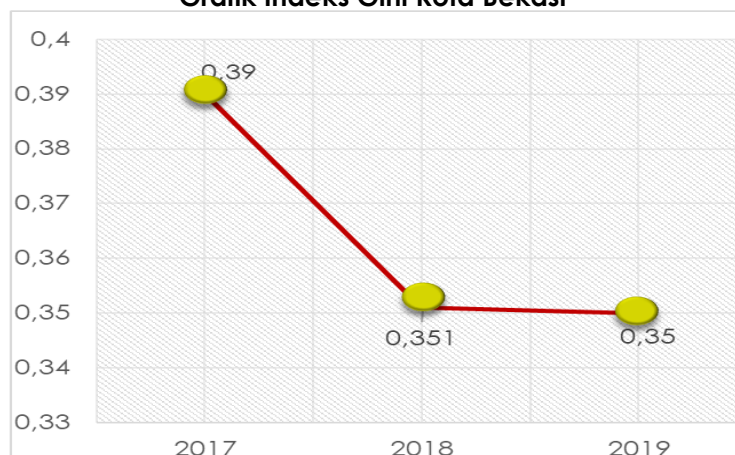
Gambar 3.16
Grafik Prediksi Jumlah Pengangguran Terbuka Di Kota Bekasi



3.3.9 Indeks Gini

Indeks Gini di Kota Bekasi mengalami fluktuasi selama periode 2015-2019. Pada tahun 2015, indeks Gini di kota ini mencapai angka 0,410. Pada tahun 2018 indeks gini di Kota Bekasi mencapai angka 0,351 dan pada tahun 2019 indeks gini kota bekasi mencapai angka 0,35 yang berarti termasuk kategori ketimpangan sedang. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

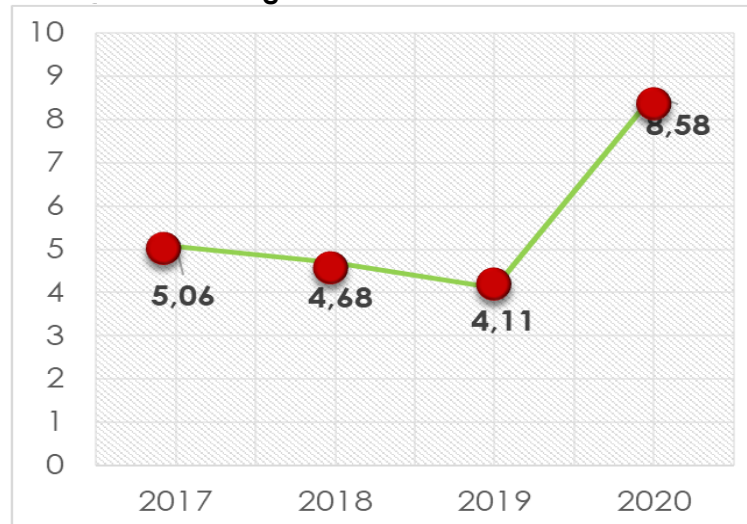
Gambar 3.17
Grafik Indeks Gini Kota Bekasi



3.3.10 Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kota Bekasi pada tahun 2017 sebesar 5,06 %, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 4,11 % dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 8,58 dalam hal ini di karenakan dampak covid 19. Untuk lebih jelasnya mengenai angka kemiskinan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.18
Grafik Angka Kemiskinan Kota Bekasi



3.3.11 Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja

Tenaga kerja yang berusaha sendiri adalah tenaga kerja yang bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus. Sedangkan pekerja bebas keluarga adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain – yang masih mempunyai hubungan keluarga, seperti istri/suami, anak, ibu/ayah, maupun keluarga lainnya – yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Karena data tidak tersedia, maka proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja di Kota Bekasi tidak dapat diuraikan.

3.3.12 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit

pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kota Bekasi mengalami fluktuasi dengan nilai terendah adalah 71.48 pada tahun 2015, sedangkan IKM tertinggi dicapai pada tahun 2016 dengan nilai 82.07 yang kemudian disusul penurunan pada tahun 2017 menjadi 76 dan kembali meningkat pada tahun 2018 hingga tahun 2019 menjadi 78.42 dan 80.98.

3.4 KONDISI PEREKONOMIAN WILAYAH

3.4.1 PDRB Kota Bekasi

Sepanjang kurun masa 2015-2019, laju pertumbuhan ekonomi yang diraih Kota Bekasi pada awal periode cenderung menurun, kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan dan akhir periode kembali menunjukkan tren menurun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bekasi telah bertambah dari Rp55,5 triliun tahun 2015 menjadi Rp69,4 triliun tahun 2019. Pertambahan ini telah menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi sebesar 5,56 persen pada tahun 2015, namun pada tahun 2019 terjadi kemerosotan angka hingga 5,41 persen. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.16
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan Di Kota Bekasi Tahun 2015 - 2019

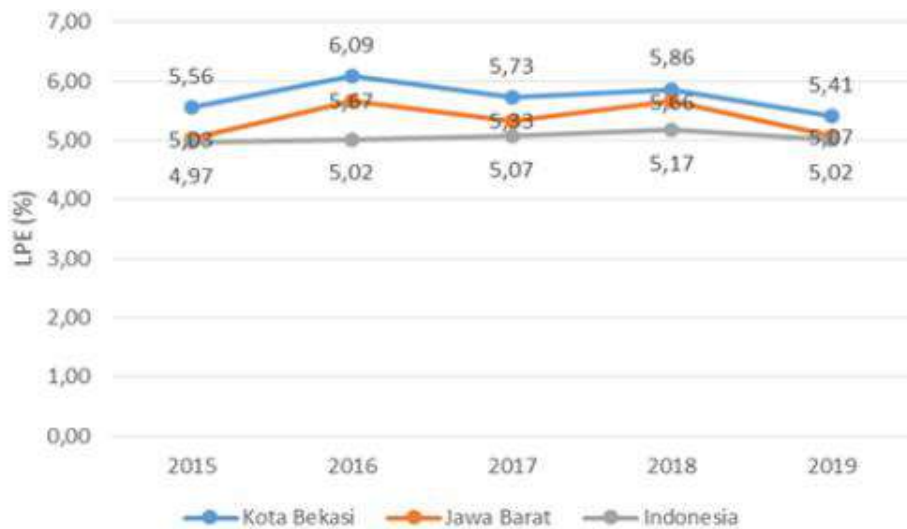
No	LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	324,31	329,28	330,55	337,24	346,09
2	Pertambangan Dan Penggalian	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	19.633,17	20.450,19	21.423,43	22411,22	23242,49
4	Pengadaan listrik dan gas	1.022,52	1.081,09	841,20	809,58	808,02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	45,21	48,09	51,64	54,38	57,16
6	Bangunan/Konstruksi	5.877,04	6.407,34	7.037,07	7748,12	8500,32
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	12.858,30	13.583,48	14.326,49	15129,51	15905,23
8	Transportasi dan Pergudangan	5.199,58	5.463,65	5.799,08	6117,54	6596,75
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	2.027,23	2.248,29	2.450,12	2681,40	2751,72
10	Informasi dan komunikasi	1.333,00	1.526,91	1.694,67	1848,18	2000,60
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.523,15	1.689,55	1.788,20	1884,30	1924,41
12	Real Estat	958,04	1.021,45	1.091,85	1167,45	1255,84
13	Jasa Perusahaan	241,88	262,86	285,16	309,45	888,14
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.065,46	1.086,60	1.098,70	1117,11	1127,35
15	Jasa Pendidikan	1.165,19	1.254,04	1.365,23	1461,79	1541,22
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	618,02	679,65	747,48	807,45	888,14
17	Jasa Lainnya	1.563,58	1.835,13	1.835,13	1960,34	2128,95
	Produk Domestik Regional Bruto	55.456,07	58.831,08	62.202,01	65845,09	69404,62

Sumber : Rancangan Akhir Revisi RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

3.4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Selepas tahun 2015 dan memasuki tahun 2016, perekonomian Kota Bekasi mampu bangkit kembali untuk meraih laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,09. Namun di tahun 2017 pertumbuhan ekonomi kembali merosot menjadi 5,73 persen dan kemudian terdapat peningkatan pada tahun 2018 menjadi 5,86 persen. Pun pada tahun 2019, terjadi penurunan menjadi 5,41 persen. Dengan demikian, selama periode 2015-2019 rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi adalah 5,73 persen per tahun.

Angka laju pertumbuhan ekonomi yang diraih Kota Bekasi di atas ternyata lebih besar dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Provinsi Jawa Barat (rata-rata 5,35 persen per tahun) dan laju pertumbuhan ekonomi nasional (5,05 persen per tahun) untuk jangka waktu yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Bekasi memiliki daya saing kuat di level Provinsi Jawa Barat maupun Indonesia. Untuk lebih jelasnya mengenai laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.19
Grafik Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi, Jawa Barat, dan Nasional

Pada tahun 2020 keadaan ekonomi Kota Bekasi turut diguncang dengan adanya bencana banjir pada bulan Januari hingga Februari serta adanya pandemi global COVID-19 yang menyebabkan pemberlakuan pembatasan kegiatan dan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). Pembatasan kegiatan di Kota Bekasi dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama pada 16 Maret hingga 31 Maret 2020 dan tahap kedua yang dimulai pada 1 April hingga 14 April 2020, sedangkan PSBB diberlakukan pada 15 April hingga 29 April 2020. Pembatasan tersebut berdampak kepada pelaku usaha, daya beli, alokasi anggaran, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan asli daerah karena dilakukan pada kegiatan seperti kegiatan bersekolah dan bekerja, kegiatan keagamaan, kegiatan pada tempat

dan/atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, kegiatan pada moda transportasi, serta kegiatan yang terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Adanya COVID-19 berdampak pada perubahan target realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi. Terdapat beberapa proyeksi yang dibuat dengan menyesuaikan situasi yang mungkin akan terjadi sepanjang tahun 2020. Situasi tersebut terbagi atas rencana tahun 2020, tanpa COVID-19, COVID-19 terkendali, COVID-19 lonjakan, dan COVID-19 ekstrim. Komponen PAD pertama yaitu pajak daerah diprediksi akan mendapatkan realisasi sebesar Rp 1.983.354.342.058 tanpa COVID-19, Rp 1.90.012.6-5.235 saat COVID-19 terkendali, Rp 991.677.171.029 saat terjadi lonjakan COVID-19, dan menjadi Rp 793.341.736.823 saat ekstrim.

3.4.3 Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2019 lalu, sumber utama pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi berasal dari sektor industri pengolahan. Dari laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,41 persen, sekitar 1,81 persen di antaranya bersumber dari sektor ini. Selanjutnya, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menduduki posisi kedua dengan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,24 persen. Sedangkan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sumber pertumbuhan ekonomi yang paling kecil, yakni mendekati 0,00 persen, selain sektor pertambangan dan penggalian yang memang tidak ada kegiatannya di Kota Bekasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.17
Perkembangan Sumber Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi, 2015-2019 (%)

No.	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	1,97	2,12	1,97	1,81	1,81	1,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,11	0,08	0,06	0,06	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,005	0,05	0,004	0,004	0,02
F	Konstruksi	0,59	0,66	0,65	0,69	0,66	0,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,29	1,41	1,32	1,35	1,24	1,32
H	Transportasi dan Pergudangan	0,52	0,57	0,53	0,54	0,51	0,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,20	0,23	0,23	0,24	0,21	0,22
J	Informasi dan Komunikasi	0,13	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,15	0,18	0,16	0,17	0,15	0,16
L	Real Estat	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
M,N	Jasa Perusahaan	0,02	0,03	0,03	0,03	0,07	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,10
P	Jasa Pendidikan	0,12	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Produk Domestik Regional Bruto	5,56	6,09	5,73	5,86	5,41	5,75

Sumber: Rancangan Akhir Revisi RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

3.4.4 Matriks Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor-Sektor Ekonomi

Sepanjang periode 2015-2019, ada enam sektor ekonomi yang meraih tren laju pertumbuhan menguat dan tren kontribusinya terhadap PDRB meningkat. Keenam sektor tersebut adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta sektor jasa lainnya. Artinya, keenam sektor ini memiliki daya saing yang kuat dan mampu meraih economies of scale dalam lingkup PDRB Kota Bekasi. Sebaliknya, sektor pengadaan listrik dan gas menjadi satu-satunya sektor ekonomi yang berdaya saing lemah karena mengalami tren laju pertumbuhan maupun kecenderungan kontribusi yang menurun. Sementara itu, sektor-sektor ekonomi yang mengalami tren laju pertumbuhan melemah namun tren kontribusinya terhadap PDRB meningkat, terdiri dari sektor konstruksi, sektor jasa perusahaan, sektor jasa keuangan dan asuransi dan sektor jasa pendidikan. Sedangkan lima sektor lainnya yang menggoreskan laju pertumbuhan menguat tetapi kontribusinya terhadap PDRB menurun adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor real estate, serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.

3.4.5 Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Sementara itu, Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah suatu indeks yang menghitung atau mengukur rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga (household) atau masyarakat dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur laju inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau penurunan (deflasi) dari barang dan jasa

Inflasi di Kota Bekasi sampai dengan Maret 2020 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Dari sebelas kelompok pengeluaran, tujuh kelompok pengeluaran mengalami inflasi, satu kelompok mengalami deflasi, dan tiga kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan indeks. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya inflasi sebesar 1,65 persen; kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 1,28 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 0,73 persen; kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar 0,45 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga inflasi sebesar 0,32 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman inflasi sebesar 0,26 persen; dan kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar inflasi sebesar 0,25 persen. Sementara yang mengalami deflasi kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,01 persen. Kelompok pengeluaran transportasi; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; dan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks.

3.4.6 PDRB Perkapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah/negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan daerah/nasional suatu daerah/negara dengan jumlah penduduk daerah/negara tersebut. Pendapatan daerah/negara di sini direpresentasikan oleh PDRB/PDB. Berikut di bawah ini akan diuraikan PDRB per kapita Kota Bekasi selama kurun waktu 2015-2019. Seiring dengan pertambahan penduduk di Kota Bekasi dari 2.714.830 jiwa tahun 2015 menjadi 3.003.920 jiwa tahun 2019 (BPS, 2020), produktivitas masyarakat di kota ini juga meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini diindikasikan oleh perkembangan PDRB per kapita sepanjang kurun waktu 2017-2019. Secara nominal, PDRB per kapita Kota Bekasi pada tahun 2017 telah mencapai sekitar Rp 29,1 juta dan semakin bertambah besar hingga mencapai Rp 32,7 juta tahun 2019. Sedangkan secara riil meningkat dari Rp 19,4 juta menjadi Rp 21,63 juta. Apabila dibandingkan dengan penduduk Provinsi Jawa Barat dan Indonesia secara keseluruhan, pendapatan masyarakat (PDRB per kapita) di Kota Bekasi lebih rendah, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2.16 dan Gambar , baik secara nominal maupun riil. Dilihat dari sisi tingkat pertumbuhannya, laju PDRB per kapita Kota Bekasi (rata-rata 2,97% per tahun selama 2013-2017) juga lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat (rata-rata 4,25%) dan nasional (rata-rata 4,02%). Di sisi lain, laju pertumbuhan PDRB per kapita riil masyarakat di Kota Bekasi cenderung meningkat selama periode kajian. Sebaliknya, laju pertumbuhan PDRB per kapita riil masyarakat di Provinsi Jawa Barat maupun Indonesia justru mengalami tren menurun. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhannya di Kota Bekasi dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.17
Perkembangan PDRB per Kapita dan Laju Pertumbuhannya
di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB per Kapita Nominal (Rp Juta)					
Kota Bekasi	22,5	24,3	26,1	27,6	29,1
Provinsi Jawa Barat	27,8	30,1	32,6	34,9	37,2
Indonesia	38,4	41,9	45,1	48,0	51,9
PDRB per Kapita Riil (Rp Juta)					
Kota Bekasi	19,4	19,9	20,4	21,1	21,8
Provinsi Jawa Barat	24,1	25,0	25,8	26,9	28,0
Indonesia	32,8	34,0	35,2	36,5	37,9
Laju Pertumbuhan (%)					
Kota Bekasi	3,08	2,73	2,75	3,33	3,05
Provinsi Jawa Barat	4,70	3,52	3,52	4,16	3,84
Indonesia	4,12	3,61	3,52	3,72	3,79

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

3.4.7 Proporsi Penduduk dengan Pendapatan Kurang dari US\$1 per Kapita per Hari

Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US\$1 per kapita per hari lebih dikenal dengan istilah persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin dapat didefinisikan sebagai proporsi penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per hari dibawah garis kemiskinan. Di Kota Bekasi, persentase penduduk miskin berhasil ditekan dari 5,5 persen pada tahun 2014 menjadi 4,11 persen pada tahun 2018.

3.4.8 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Sektor pertanian di Kota Bekasi memang tidak berkembang karena wilayah ini termasuk kategori urban, dimana pada umumnya pertanian bukanlah menjadi sektor yang diandalkan. Usaha tanaman pangan terdiri dari budidaya padi (sawah dan ladang), palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah), sayur-sayuran (petsai/sawi, kacang panjang, bayam, ketimun, cabe, terong, kangkung), buah-buahan (jeruk siam, duren, duku, jambu biji, mangga, sawo, pepaya, pisang, rambutan), tanaman obat-obatan (jahe, kencur). Usaha peternakan meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam ras, ayam buras, itik. Sedangkan perikanan darat mencakup beberapa jenis ikan untuk konsumsi yang dibudidayakan di kolam/tambak serta usaha budidaya ikan hias. Dengan kondisi seperti di atas, maka tidaklah mengherankan apabila kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sangatlah kecil. Sepanjang kurun waktu 2015-2019, nilai tambah yang dihasilkan sektor ini memang naik dari 0,72 persen hingga mencapai angka 2,62 persen. Akan tetapi, nilai tambah sebanyak ini baru mampu memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 0,62 persen pada tahun 2015. Bahkan, sebagaimana tampak pada Gambar 2-34, pada tahun-tahun berikutnya kontribusi sektor pertanian terus menurun hingga hanya 0,57 persen pada tahun 2019.

3.4.9 Kontribusi Sub Sektor Palawija terhadap PDRB Sektor Pertanian

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, usaha palawija yang berkembang di Kota Bekasi hanya meliputi komoditas jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah. Pada tahun 2019, produksi keempat komoditas secara keseluruhan adalah sebesar 334,2 ton, mengalami penurunan dibandingkan total produksi tahun 2015 yang mencapai 719,01 ton. Sebagian besar produksi palawija di Kota Bekasi adalah berupa ubi kayu, dimana pada tahun 2019 meraih angka 239,5 ton, mengalami peningkatan sebesar 59,9 ton setelah mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018.

3.4.10 Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Sektor Pertanian

Karena data nilai tambah subsektor perkebunan di Kota Bekasi tidak tersedia, maka kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB sektor pertanian tidak dapat diuraikan. Kontribusi subsektor perkebunan (tepatnya perkebunan rakyat) terhadap total produksi sektor pertanian pada awalnya adalah sekitar 0,21% (2015) dan kemudian meningkat menjadi 0,29% (2019).

3.4.11 Kontribusi Produksi Kelompok Petani Padi Terhadap PDRB

Karena data produksi kelompok petani (padi) di Kota Bekasi tidak tersedia, maka kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB tidak dapat diuraikan. Akan tetapi, sebagai uraian tambahan, produksi padi di Kota Bekasi secara keseluruhan telah meningkat dari 3.646,4 ton tahun 2015 menjadi 4.663,7 ton tahun 2019. Hampir seluruhnya produksi padi ini berasal dari padi sawah. Produksi padi ladang hanya terjadi pada tahun 2013 dan 2014, yakni masing-masing sebanyak 4,36 ton dan 4,15 ton (BPS Kota Bekasi 2017b: 257). Pada tahun 2015 dan 2016 produksi padi ladang sudah tidak terdata lagi.

3.4.12 Kontribusi Sub Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Sepanjang periode 2015-2019, produksi perikanan darat sebanyak 2.033 ton tahun 2015 menjadi 1.738,47 ton tahun 2019. Penurunan produksi ini menyebabkan penerimaan juga merosot dari Rp42,6 miliar (2015) menjadi Rp28,1 miliar (2016) (BPS Kota Bekasi 2017b: 271). Untuk ikan hias air tawar, sejak tahun 1998 Kota Bekasi menjadi eksportir terbesar di Indonesia. Setiap bulannya jutaan ekor aneka ikan hias air tawar telah didistribusikan ke mancanegara di Asia, Eropa, dan Amerika.

Di Kota Bekasi ada 18 eksportir ikan hias, paling banyak di Indonesia. Akan tetapi, jumlah pembudidaya ikan hias air tawar di kota ini mengalami penurunan dari sebelumnya sekitar 700-an orang menjadi 400-an orang pada akhir 2017. Untuk mempertahankan predikat eksportir ikan hias air tawar terbesar di Indonesia, pemerintah Kota Bekasi telah menetapkan beberapa lokasi sentra ikan hias, satu di antaranya adalah di Jalan Pariwisata, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu. Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi juga membantu mensuplai indukan unggul, menyelenggarakan pameran ikan hias secara berkala, dan pendanaan. Adapun produksi ikan hias di Kota Bekasi dalam beberapa tahun terakhir meningkat dari 3.704.090 ekor tahun 2015 menjadi 20.623.000 ekor tahun 2019. Karena penciptaan nilai tambah di sektor kelautan dan perikanan tidak didata secara khusus, maka kontribusi sektor ini terhadap PDRB tidak dapat diuraikan.

3.4.13 Produksi Sektor Pertanian

Produksi pertanian di kota ini terdiri dari kelompok tanaman pangan (padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan), perkebunan rakyat (tanaman obat-obatan), peternakan, dan perikanan. Sebagian besar produksi sektor pertanian dihasilkan oleh kelompok sayur mayuran, dimana pada tahun 2019 produksinya meskipun hanya mencapai 4.006 ton, akan tetapi rata-rata produksi dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mencapai angka 10.000 ton.

Produksi tanaman pangan pada tahun 2019 mencapai 15.689,5 ton, jauh menurun dibandingkan produksi tahun 2015 yang sekitar 27.369,7 ton. Sementara itu, produksi peternakan melejit dari 8.656,9 ton (2015) menjadi 9.474,75 ton (2018) dan kemudian mengalami penurunan menjadi 7.463,62 ton (2019).

Produksi perkebunan rakyat berupa tanaman obat-obatan naik dari 85,9 ton menjadi 133,51 ton. Sedangkan produksi perikanan darat berkurang dari 2033 ton menjadi 1.738,47 ton. Di Kota Bekasi juga berkembang budidaya ikan hias, dimana pada tahun 2019 produksinya sudah mencapai angka 20,6 juta ekor.

3.4.14 Produksi Sub Sektor Perkebunan

Kota Bekasi hanya memiliki sedikit perkebunan, tepatnya perkebunan rakyat yang ditanami dengan tanaman obat-obatan berupa jahe dan kencur. Kota Bekasi dalam Angka 2019; 2020 yang dikelola dalam SIPD Gambar 2-36, produksi perkebunan rakyat ini bergerak naik dari 85,9 ton tahun 2015 menjadi 253,89 ton tahun 2018, namun menurun di tahun 2019 menjadi 133,51 ton. Produksi tanaman jahe bertambah dari 60,44 ton pada tahun 2015 menjadi 92,15 ton di tahun 2019, sedangkan produksi tanaman kencur juga mengalami peningkatan dari 25,42 ton (2015) menjadi 47,29 ton (2019).

3.4.15 Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani pada tahun 2013 sebesar 107.23, kemudian semakin menurun dari pada tahun 2014 dan 2015 menjadi 103.78 dan 103.19. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun tersebut petani mengalami surplus sebesar 7.23 %, kemudian menurun menjadi 3.78 % dan 3.19 %. Jika dibandingkan Provinsi Jawa Barat, NTP Kota Bekasi cenderung lebih kecil. NTP Kota Bekasi yang lebih rendah ini dapat disebabkan daya dukung pertanian di Kota Bekasi tidak begitu kondusif.

3.4.16 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pola Pangan Harapan (desirable dietary pattern) adalah susunan jumlah pangan yang terdiri dari sembilan kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energi yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas, maupun keragaman dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti: aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, dan cita rasa. Dewasa ini, Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi salah satu indikator dari pembangunan nasional di bidang gizi dan pangan yang digunakan sebagai acuan dalam penganekaragaman pangan. Penganekaragaman pangan dilihat dari sisi produksi, pengolahan, ataupun konsumsi mengingat pentingnya kecukupan energi dan zat gizi bagi setiap individu. Melalui pendekatan PPH di atas, kualitas atau mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari skor pangan (dietaryscore) dan dikenal sebagai skor PPH. Skor PPH dapat dihitung dengan menggunakan formulasi persentase angka kecukupan gizi dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan (mencakup kelompok padi-padian, umbi-umbian, hewani, minyak dan lemak, biji-bijian, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain). Apabila skor PPH makin tinggi (idealnya 100), maka artinya konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang.

Sepanjang periode 2013-2016, skor PPH Kota Bekasi cenderung meningkat dari tahun ke tahun, tepatnya bergerak naik dari 75,8 pada tahun 2013 naik menjadi 85,0 tahun 2015 dan meningkat lagi hingga 89,2 tahun 2016. Peningkatan skor PPH ini mengindikasikan bahwa konsumsi pangan di Kota Bekasi semakin beragam dan seimbang selama kurun waktu di atas. Untuk kategori kota, skor PPH yang diraih Kota Bekasi pada tahun 2016 merupakan skor tertinggi dibandingkan delapan kota lainnya di Provinsi Jawa Barat. Secara keseluruhan, Kota Bekasi menduduki posisi ketiga skor PPH tertinggi di Provinsi Jawa Barat di bawah Kabupaten Indramayu (92,1) dan Kabupaten Majalengka (89,6).

Dinas Ketahanan Pangan mencatat bahwa Ketersediaan Pangan Utama tahun 2017 sebesar 82,17 Kg/jiwa, angka ini diperoleh dari rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama sebesar 236.101.634 Kg dengan jumlah penduduk 2.873.484 jiwa. Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Tahun 2017 tercatat 26 sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di Kota Bekasi dari 48 total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di Kota Bekasi (54,17%). Pada tahun 2018 sesuai dengan LKPJ Kota Bekasi Tahun 2019, Kota Bekasi mencapai skor Pola Pangan Harapan sebesar 86,7 persen.

3.5 KONDISI SARANA WILAYAH

3.5.1 Pendidikan

Jumlah sarana pendidikan di Kota Bekasi terbagi menjadi beberapa sarana pendidikan yaitu sarana pendidikan anak usia dini, sarana pendidikan, sarana pendidikan masyarakat. Pembangunan di bidang pendidikan dilakukan melalui pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Diharapkan jumlah sekolah yang berada di Kota Bekasi mampu mengakomodasi penduduk usia sekolah yang jumlahnya terus bertambah. Jumlah sekolah tahun 2019 di Kota Bekasi yaitu TK sebanyak 769 buah sekolah, SD Negeri dan Swasta sebanyak 713 buah sekolah, SMP Negeri dan Swasta sebanyak 287 buah sekolah, SMA Negeri/Swasta sebanyak 111 buah sekolah dan SMK Negeri/Swasta sebanyak 147 buah sekolah.

Terdapat pula pendidikan keagamaan yaitu madrasah raudhatul athfal sebanyak 308 buah, madrasah ibtidaiyah sebanyak 134 buah, madrasah tsanawiyah sebanyak 81 buah dan madrasah Aliyah sebanyak 31 buah. Dengan bertambahnya sarana dan prasarana sekolah diharapkan mampu mengimbangi pertambahan jumlah murid setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah Sarana Pendidikan Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.19
Jumlah Sarana Pendidikan di Kota Bekasi Tahun 2019

No	Kecamatan	TK	SDN/ Swasta	SMP Negeri/Swasta	SMA Negeri/Swasta	SMK Negeri/Swasta
1	Pondokgede	87	65	22	6	12
2	Jatisampurna	60	36	16	7	6
3	Pondok Melati	50	33	15	7	6
4	Jatiasih	76	66	33	12	20
5	Bantargebang	24	26	10	2	4
6	Mustika Jaya	77	45	25	7	13
7	Bekasi Timur	67	93	30	13	21
8	Rawalumbu	59	68	28	10	16
9	Bekasi Selatan	63	64	20	13	9
10	Bekasi Barat	67	79	22	9	10
11	Medansatria	62	55	27	11	12
12	Bekasi Utara	77	83	39	14	18
	Kota Bekasi	769	713	287	111	147

Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2020

Tabel 3.20
Jumlah Sarana Pendidikan Madrasah Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah di Kota Bekasi Tahun 2019

No	Kecamatan	Madrasah Raudhatul Athfal	Madrasah Ibtidaiyah	Madrasah Tsanawiyah	Madrasah Aliyah
1	Pondokgede	28	14	13	10
2	Jatisampurna	8	8	3	2
3	Pondok Melati	10	8	6	-
4	Jatiasih	35	21	12	2
5	Bantargebang	15	7	4	1
6	Mustika Jaya	23	6	5	1
7	Bekasi Timur	17	2	4	2
8	Rawalumbu	26	5	5	1
9	Bekasi Selatan	23	13	6	1

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Kecamatan	Madrasah Raudhatul Athfal	Madrasah Ibtidaiyah	Madrasah Tsanawiyah	Madrasah Aliyah
10	Bekasi Barat	43	16	7	5
11	Medansatria	26	13	6	-
12	Bekasi Utara	54	21	10	6
	Kota Bekasi	308	134	81	31

Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2020

a. Rasio ketersediaan Sekolah pendidikan Dasar (SD/MI/ SMP/MTS)

Pendidikan merupakan salah satu sarana prasarana yang harus dimiliki setiap daerah untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas. Dalam memenuhi program belajar 9 tahun maka perlu disediakan sarana pendidikan pada tingkat dasar. Pendidikan dasar mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pada tahun 2017 maka jumlah SD sebesar 690 sekolah, Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 135 sekolah, SMP sebanyak 271 sekolah, serta MTs sebanyak 76 sekolah. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah untuk 10.000 jumlah penduduk usia sekolah tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut:

- Pendidikan dasar tingkat SD/MI mengalami penurunan dari 35,18 pada tahun 2015 menjadi 28,98 pada tahun 2017
- Pendidikan dasar tingkat SMP/MTS mengalami penurunan dari 28,89 pada tahun 2015 menjadi 22,15 pada tahun 2017.

Hal ini karena terjadi penambahan penduduk usia sekolah tidak diikuti dengan penambahan sekolah, namun demikian angka tersebut masih di atas standar yaitu 52 sekolah per 10.000 penduduk. Secara lebih rinci data jumlah sekolah dan jumlah penduduk umur sekolah diperlihatkan pada Tabel di bawah ini

Tabel 3.21
Rasio Jumlah Sekolah Terhadap Jumlah Penduduk Usia Sekolah Dasar
Kota Bekasi Tahun 2015-2017

Tahun	SD/MI			SMP/MTS		
	Sekolah	Penduduk (7-12 Th)	Rasio sekolah*)	Sekolah	Penduduk (13-15 Th)	Rasio sekolah*)
2017	810	279.505	29	347	156.669	22
2016	823	279.520	29	339	156.680	22
2015	812	230.786	35	325	112.478	29

Catatan: Rasio (Jumlah sekolah/Jumlah Penduduk) x 10.000

Sumber: KLHS RPJMD 2018-2023

b. Rasio ketersediaan Sekolah Menengah (SMA/SMK/MA)

Rasio ketersediaan sekolah tingkat menengah terhadap penduduk usia 16-19 tahun selama 3 tahun terakhir menunjukkan tren yang makin kecil, dari 10 sekolah per 10.000 penduduk pada tahun 2015 menjadi 6 sekolah per 10.000 penduduk pada tahun 2017. Untuk lebih jelasnya mengenai rasio jumlah sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah menengah Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.21
Rasio Jumlah Sekolah Terhadap Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menengah Kota Bekasi Tahun 2015-2017

Tahun	SMU/SMK/MA		
	Sekolah	Penduduk (16-19 Th)	Rasio sekolah*
2017	142	110.033	6
2016	103	110.033	9
2015	92	96.173	10

Catatan: Rasio (jumlah sekolah/Jumlah Penduduk) x 10.000

Sumber: KLHS RPJMD 2018-2023

c. Rasio murid perkelas Sekolah Dasar (SD/MI/SMP/MTS)

Rasio murid perkelas pendidikan dasar Kota Bekasi tahun 2016-2017 menunjukkan perkembangan baik dimana untuk tingkat SD/MI dari 42 murid/kelas menjadi 39 murid/kelas, sedangkan untuk tingkat SMP/MTS dari 40 murid/kelas menjadi 26 murid/kelas. Secara rinci terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.23
Rasio Jumlah Murid terhadap Kelas Pendidikan Dasar (SD/MI; SMP/MTs) Kota Bekasi Tahun 2016-2017

Tahun	SD/MI			SMP/MTs		
	Kelas	Murid	Murid/Kelas	Kelas	Murid	Murid/Kelas
2017	6.512	255.720	39	3.840	99.416	26
2016	6.070	256.405	42	2.336	94.574	40

Sumber: KLHS RPJMD 2018-2023

d. Rasio guru murid Sekolah Dasar (SD/MI/SMP/MTS)

Rasio guru terhadap murid di Kota Bekasi cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan rasio jumlah guru terhadap murid untuk tingkat pendidikan dasar seperti SD/MI dan SMP/MTs. Untuk tingkat SD/MI di Kota Bekasi maka rasio jumlah guru terhadap murid pada tahun 2015 berkisar 1:28 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi sekitar 1:20.

Sedangkan rasio guru terhadap murid untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2015 berkisar 1:19 dan meningkat pada 1:17 pada tahun 2019. Untuk lebih jelasnya mengenai rasio jumlah guru terhadap murid pendidik Dasar Kota Bekasi dapat di lihat pada table di bawah ini.

Tabel 3.24
Rasio Jumlah Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar Kota Bekasi, 2015-2019

Tahun	SD/MI			SMP/MTS		
	Guru	Murid	Murid/Guru	Guru	Murid	Murid/Guru
2019	13.492	280.510	20	6549	113.740	17
2018	12.545	281.056	23	5.890	114.273	19
2017	12.191	283.209	23	6.040	119.227	20
2016	12.371	269.863	22	5.967	175.057	29
2015	10.218	281.909	28	5.919	114.458	19

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

e. Rasio guru murid Sekolah Menengah (SMA/SMK/MA)

Perkembangan rasio guru terhadap murid pendidikan menengah dari tahun 2015- 2019 menunjukkan penurunan rasio dari 1 guru untuk 14 murid pada tahun 2015 menjadi 1 guru untuk 19 murid pada tahun 2019. Secara lengkap perkembangan rasio guru terhadap murid tingkat pendidikan menengah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.25
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah
Kota Bekasi, 2015-2019

Tahun	SMU/SMK/MA		
	Guru	Murid	Murid/Guru
2019	5.866	116.273	19
2018	5.424	113.083	20
2017	7.158	111.119	16
2016	7.235	110.441	15
2015	7.090	96.429	14

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

f. Indikator Capaian Pelayanan pendidikan

• Angka Partisipasi Murni dan Kasar

Angka Partisipasi Murni (Net Enrollment Ratio) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Sedangkan angka partisipasi kasar (APK) adalah persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mendapatkan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Tabel berikut ini menunjukkan tren capaian APM dan APK Kota Bekasi dari tahun 2013-2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.26
Perkembangan Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

Tahun	Sekolah Dasar		SLTP		SLTA	
	APM	APK	APM	APK	APM	APK
2019	98,72	109,06	84,16	97,17	70,37	107,42
2018	98,93	108,85	84,98	95,72	71,04	115,68
2017	105,46	120,77	84,09	103,68	67,89	92,57
2016	99,60	113,27	91,14	92,70	96,00	105,00
2015	99,99	121,88	91,61	92,54	90,30	92,14

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

APM maupun APK untuk semua tingkat pendidikan terdapat kenaikan pada tahun 2015 – 2019. Dari data terlihat bahwa partisipasi anak usia SD hampir semua bersekolah (APM 99,99 persen) pada tahun 2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 98,72 persen, namun demikian terlihat selama 5 tahun terakhir yang masuk/bersekolah di SD usianya bukan usia SD

dengan persentase hampir 10 persen hingga 20 persen setiap tahunnya. Sedangkan pada tingkatan pendidikan yang lebih tinggi terlihat untuk jenjang SLTA banyak usia SLTA yang tidak bersekolah dan kecenderungan mengalami peningkatan hal ini ditandai dengan menurunnya tingkat APM SLTA khususnya pada tahun 2017 meskipun pada tahun 2018 kembali mengalami lonjakan.

Kenaikan angka partisipasi disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya terutama usia sekolah dan adanya penduduk usia sekolah dari luar Kota Bekasi bersekolah di Kota Bekasi, serta didirikannya Unit Sekolah Baru (USB) untuk tingkat SMP/Mts dan 4 unit untuk tingkat SMA/SMK/MA di Kota Bekasi.

• **Angka Partisipasi Murni**

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, APM Kota Bekasi pada tahun 2019 untuk semua jenjang pendidikan lebih tinggi.

Tabel 3.27
Capaian APM Menurut Jenjang Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

No	Keterangan	Jenjang			
		SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/ SMK	PT
1	Kota Bekasi	98,72	84,16	70,37	33,43
2	Jawa Barat	81,99	59,42	61,45	15,78

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

Pada jenjang SD Sederajat, APM Kota Bekasi berada pada angka 98,72 persen artinya masih ada 1,28 persen anak usia 7-12 tahun di Kota Bekasi yang masih belum bersekolah, angka ini sudah lebih tinggi dibandingkan dengan APM Jawa Barat yang mencapai angka 81,99 persen. Pada indikator APM SD, nilai indikator Kota Bekasi telah berada di atas nilai APM SD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2019. Pada tahun 2019, 1,28 persen anak usia 7-12 tahun di Kota Bekasi masih belum bersekolah. Hal sedikit berbeda terlihat pada jenjang SMP sederajat dimana nilai capaian Kota Bekasi sudah berada di atas nilai capaian Jawa Barat.

Pada tahun 2019, APM SMP sederajat Kota Bekasi adalah 84,16 persen sedangkan Provinsi Jawa Barat masih berada pada angka 59,42 persen. Disparitas APM SMP sederajat antara Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat besar, posisi Kota Bekasi selalu berada di atas nilai capaian Provinsi Jawa Barat pada kurun waktu 2015-2019. Pada jenjang pendidikan menengah, disparitas antara nilai capaian APM Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat menunjukkan posisi yang cukup besar.

Pada tahun 2019, APM SMA Kota Bekasi mencapai 90,30 persen sedangkan Provinsi Jawa Barat baru mencapai 61,45 persen. Posisi relatif capaian Kota Bekasi pada tahun 2015-2019 selalu berada di atas nilai capaian APM SM Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa angka partisipasi murni pendidikan menengah di Kota Bekasi sudah jauh mengungguli nilai rata-rata provinsi.

• **Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Kasar (*Gross Enrollment Ratio*) adalah Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK tidak memperhatikan ketepatan usia sekolah dengan jenjang yang diikuti misalnya pada jenjang SD tidak harus berusia 7-12 tahun, sehingga angka APK bisa melebihi 100%. Untuk lebih jelasnya mengenai APK menurut jenjang Kota Bekasi dan Jawa Barat dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.28
APK Menurut Jenjang Kota Bekasi dan Jawa Barat Tahun 2019

No	Wilayah	Jenjang			
		SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SMA/MA/ SMK/Paket C	PT
1	Kota Bekasi	121,88	97,17	107,42	35,84
2	Jawa Barat	90,83	75,26	79,26	17,76

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

APK Kota Bekasi pada setiap jenjang tahun 2019 sudah jauh melampaui nilai APK Provinsi Jawa Barat kecuali pada jenjang SD sederajat. Pada jenjang SD sederajat, APK Kota Bekasi sebesar 121,88 persen angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan APK SD Provinsi Jawa Barat yaitu 90,83 persen. Pada kurun waktu 2015-2019, nilai APK jenjang SD sederajat Kota Bekasi menunjukkan tren yang menanjak, selain itu peningkatan nilai APK jenjang SD Kota Bekasi telah berada di atas perkembangan APK SD sederajat pada tingkat Provinsi Jawa Barat.

Nilai APK SD sederajat Kota Bekasi pada tahun 2017 dan 2019 berada di atas nilai capaian provinsi dengan disparitas capaian yang besar. Pada jenjang SMP sederajat, posisi Kota Bekasi pada tahun 2015-2019 sudah berada di atas nilai capaian Provinsi Jawa Barat. Meskipun demikian secara grafis terlihat bahwa ada penurunan nilai APK pada tahun 2015-2019.

Pada jenjang pendidikan menengah, APK SMA sederajat Kota Bekasi tahun 2019 sudah mencapai angka 107,42 persen sangat jauh bila dibandingkan dengan APK SMA sederajat Provinsi Jawa Barat yang masih berada pada angka 79,26 perse

• **Angka Harapan Lama Sekolah**

Angka harapan lama sekolah (*expected years school*) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Indikator ini merupakan indikator pemberntuk indeks pembangunan manusia (IPM) menggantikan indikator angka melek huruf pada perhitungan metode baru.

Tabel 3.29
Perkembangan EYS Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kota Bekasi	13,28	13,36	13,47	13,51	13,76	13,99
2	Jawa Barat	12,08	12,15	12,30	12,42	12,45	12,48

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

Nilai EYS Kota Bekasi pada kurun waktu 2014-2019 sudah berada di atas nilai capaian EYS Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2019, EYS Kota Bekasi berada pada angka 13,99 tahun artinya angka harapan sekolah penduduk Kota Bekasi sudah berada pada jenjang pendidikan tinggi sedangkan Jawa Barat dengan 12,48 tahun masih berada pada jenjang pendidikan menengah.

- **Angka Rata-Rata Lama Sekolah / Mean Years School (MYS)**

Angka rata-rata lama sekolah yaitu jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). MYS masuk dalam indikator sub komposit IPM dalam dimensi pengetahuan bersama dengan indikator angka harapan lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah Kota Bekasi pada kurun waktu 2014-2019 terus menunjukkan peningkatan dan secara posisi sudah melampaui nilai capaian Provinsi Jawa Barat. Berikut ini nilai capaian MYS Kota Bekasi dan Jawa Barat pada tahun 2014-2019. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan nilai MYS Kota Bekasi dan Jawa Barat dapat di lihat pada table di bawah ini.

Tabel 3.30
Perkembangan Nilai MYS Kota Bekasi dan Jawa Barat Tahun 2014-2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kota Bekasi	10,55	10,71	10,78	10,93	11,09	11,10
2	Jawa Barat	7,71	7,86	7,95	8,14	8,15	8,37

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

- **Mutu Pendidikan**

Dalam pembangunan pendidikan selain perluasan akses, juga harus mulai di dorong untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan dapat dilihat dari mutu pendidik melalui hasil uji kompetensi dan kualifikasi pendidikan selain mutu sekolah yang tergambar dari hasil akreditasi yang diperoleh. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi akreditasi sekolah di Kota Bekasi dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 3.31
Kondisi Akreditasi Sekolah di Kota Bekasi Tahun 2019

No	Jenjang	Akreditasi			
		A	B	C	Belum
1	SD	80,8	18,9	0,3	0,4
2	SMP	74,5	18,3	2,2	5,0
3	SMA	75,7	19,8	2,7	1,8
4	SMK	58,5	32,7	6,8	2,0

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

Mutu pendidikan dapat ditingkatkan melalui peningkatan mutu sekolah sehingga proses pembelajaran diharapkan dapat lebih berkualitas. Oleh karena itu, idealnya sekolah-sekolah yang ada sudah terakreditasi minimal B bahkan A. Indikator dalam renstra kemendikbud mendorong agar akreditasi sekolah minimal terakreditasi B. Pada tabel di atas terlihat bahwa masih ada sekolah di Kota Bekasi yang masih terakreditasi C bahkan masih ada sekolah yang belum terakreditasi. Pada jenjang SD, terdapat 0,3 persen sekolah yang terakreditasi C dan 0,4 persen yang belum terakreditasi. Pada jenjang SMP,

terdapat 2,2% sekolah yang masih terakreditasi C dan 5,0% sekolah belum terakreditasi. Selain mutu sekolah, agar mutu pendidikan dapat ditingkatkan maka mutu tenaga pendidik (guru) harus terus dikembangkan. Guru sebagai ujung tombak yang langsung bersentuhan dengan siswa harus memiliki kompetensi yang baik. Kompetensi akan dapat diperoleh melalui pendidikan, keterampilan dan pengalaman yang mumpuni. Indikator lain yang meunjukkan mutu tenaga pendidik adalah sertifikasi telah dilakukan. Berdasarkan grafik di atas, sebagian besar pendidik di Kota Bekasi belum mengikuti sertifikasi. Untuk jenjang pendidikan SD dan SMP, tercatat lebih dari 50 persen pendidik belum mengikuti sertifikasi. Rata-rata hasil UKG Kota Bekasi menurut jenjang pada tahun 2015. Dari setiap jenjang tidak ada hasil UKG yang sudah mencapai angka 70, nilai UKG paling tinggi hanya 67,52 pada jenjang SMA sedangkan yang paling rendah di jenjang SD dengan 59,39. Berdasarkan hasil evaluasi, kompetensi guru yang harus mendapatkan perhatian adalah kompetensi pedagogik bukan profesional. Seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik yang mumpuni sehingga kompetensi profesional yang dimiliki dapat ditransfer kepada peserta didik pada saat proses pembelajaran.

3.5.2 Kesehatan

Kota Bekasi dengan jumlah penduduk yang cukup besar tentu memerlukan pelayanan di bidang kesehatan yang memadai. Dalam upaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, pemerintah Kota Bekasi telah menyediakan sarana dan prasarana kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas yang tersebar di masing-masing kecamatan. Di Kota Bekasi terdapat 26 rumah sakit, 39 puskesmas, dan 12 puskesmas pembantu. Selain itu terdapat 6 kelurahan yang memiliki rumah sakit bersalin dan 55 kelurahan yang memiliki poliklinik pada tahun 2019. Dari 39 puskesmas/puskesmas pembantu, hanya 5 puskesmas yang sudah dilengkapi dengan fasilitas rawat inap meskipun jumlahnya sangat terbatas, seperti: di Puskesmas Pondok Gede, Pejuang, Karang Kitri, Bojong Rawalumbu dan Bantar Gebang. Jumlah rumah sakit tersebut belum termasuk rumah sakit yang masih dalam proses perijinan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.32
Jumlah Sarana Kesehatan Di Kota Bekasi Tahun 2017

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
1	Pondokgede	2	4	1
2	Jatisampurna	3	2	0
3	Pondok Melati	1	2	2
4	Jatiasih	1	2	1
5	Bantargebang	1	1	3
6	Mustika Jaya	2	3	1
7	Bekasi Timur	3	4	0
8	Rawalumbu	2	3	1
9	Bekasi Selatan	5	5	0
10	Bekasi Barat	1	5	0
11	Medansatria	3	2	1
12	Bekasi Utara	2	6	1
	Kota Bekasi	26	39	12

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2020

Tabel 3.33
Sarana Kesehatan Skala Kecamatan di Kota Bekasi

No	Uraian	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Puskesmas	31	31	31	39	39
2	Puskesmas Pembantu	24	24	24	16	8
3	Gudang Obat	1	1	1	1	1
4	Posyandu	1.538	1.541	1.542	1.542	1.542
5	RumahSakit	35	37	38	38	42
6	Balai Pengobatan/ Klinik dan Rumah Bersalin	449	451	386	408	408
7	Apotek	457	558	553	503	503

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2020

Pada tabel tersebut terlihat bahwa jumlah sarana kesehatan skala kecamatan di Kota Bekasi, ada beberapa sarana kesehatan yang meningkat dan juga ada sarana kesehatan yang mengalami penurunan. Beberapa sarana kesehatan yang mengalami penurunan adalah : Balai Pengobatan/ Klinik dan Rumah Bersalin yang turun jumlahnya pada tahun 2015 dan kembali meningkat pada tahun 2016 dan 2017.

Sedangkan sarana kesehatan lainnya yang mengalami penurunan adalah : Apotek yang jumlahnya semakin menurun di tahun 2016 dan 2017. Hal tersebut juga dialami oleh Puskesmas Pembantu yang mengalami penurunan di tahun 2017.

- **Jaminan Kesehatan**

Pemerintah Kota Bekasi sejak RPJMD 2013-2018 telah menyediakan layanan kartu sehat berbasis NIK yang mampu menjangkau pelayanan untuk seluruh warga Kota Bekasi yang memiliki KTP. Dengan adanya kartu Sehat Bekasi yang diperkuat dengan adanya BPJS maka dari sisi jaminan pelayanan kesehatan warga di Kota Bekasi termasuk tinggi. Setelah melewati tahun ke empat dan setahun lagi mencapai target Universal Health Coverage pada tahun 2019. Penyelenggaraan BPJS di Kota Bekasi per Mei 2017 telah menjangkau kepesertaan sebanyak 1.370.173 jiwa atau sekitar 50% dari jumlah total penduduk Kota Bekasi. Meliputi kepesertaan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah, perusahaan atau pekerja penerima upah dan peserta mandiri yaitu pekerja bukan penerima upah.

Data yang diperoleh dari BPJS terdapat Rumah Sakit swasta yang bekerjasama sejumlah 32 Rumah Sakit sebagai fasilitas kesehatan rujukan, 110 fasilitas kesehatan dasar (primer) atau klinik pratama serta 3 optik dan 32 apotik di wilayah Kota Bekasi sudah bekerjasama dengan BPJS. Termasuk di dalamnya fasilitas kesehatan milik pemerintah, yang dapat melayani warga dengan kepesertaan BPJS secara berjenjang dan komprehensif. Selain itu portabilitas dapat ke Rumah Sakit lain di seluruh Indonesia sebagai jejaring dengan menyesuaikan kewilayahan, dan berlaku universal saat terjadi kegawat darurat atau keadaan khusus.

Artinya Program JKN tersisa setahun lagi untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat kota dengan jaminan kesehatannya dicover oleh BPJS. Untuk itu peran masing masing Pemerintah Daerah untuk dapat mensosialisasikan dan mengajak warganya turut mensukseskan program Nasional berupa

mendaftarkan semua warganya untuk menjadi peserta BPJS dalam bentuk bantuan atau subsidi premi dari Pemerintah bagi warga yang miskin melalui program JKN Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta semua warga lainnya untuk secara mandiri membayarkan iuran atau premi kesehatan sebagai bentuk gotong royong sesuai Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Dari data yang terangkum di Kota Bekasi terdapat sekitar 400.000 penduduk terdaftar JKN KIS sebagai kelompok masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan dibiayai melalui APBN, dan 12.833 dibiayai melalui APBD. Dalam pelaksanaannya dari pelaporan masyarakat yang masuk ke Pemerintah Daerah Kota Bekasi, masih banyaknya warga yang kesulitan akses terhadap layanan intensif, untuk itu harus segera mendapat penanganan.

Adapula dengan antrian yang panjang saat memerlukan tindakan untuk penanganan kasus khusus ke Rumah Sakit rujukan sekunder dan tertier. Hal itu dirasakan belum maksimal dalam aksesibilitas dan kualitas layanan masih kurang. Portabilitas untuk dapat mengakses layanan dari masyarakat ke Rumah Sakit dan antar Rumah Sakit seringkali melibatkan langsung warga untuk mencari akses sendiri melalui portal informasi. Automatisasi rujukan belum berjalan dengan baik, walaupun sistem informasi telah disiapkan.

Terjadinya mis-komunikasi disebabkan karena edukasi kepada peserta masih rendah tentang hak dan kewajiban peserta dan provider, dan masih seringnya keluhan warga tentang pembatasan layanan berdasarkan kuota di beberapa rumah Sakit, sehingga masyarakat masih dimintakan iuran biaya. Keluhan banyak juga dari Rumah Sakit (sebagai provider) tentang masih rendahnya tarif jasa layanan berdasarkan INA CBGs di Rumah Sakit dan bagi fasilitas kesehatan primer yang pembayarannya kapitasinya selama 4 tahun belum ada kenaikan dan dirasakan masih kurang, termasuk ketersediaan obat-obat esensial yg terbatas khususnya obat generik, dan obat yang masuk dalam formularium obat BPJS. Sebagai tanggung jawab menyiapkan sarana dan prasarana Sumber Daya Manusia (SDM) terutama regulasi untuk mengatasi aksesibilitas , beberapa telah dilakukan dan sedang dilakukan untuk solusi diantaranya:

- a. Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas layanan RSUD;
- b. Peningkatan status Puskesmas rawat inap menjadi type D, serta Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas. Akan tetapi ini semua masih perlu waktu dan effort yang lebih, upaya percepatan untuk dapat beroperasi. Sedangkan kesiapan layanan kesehatan bagi warga sebagai hal yang tak bisa ditunda.
- c. Memudahkan akses masyarakat ke layanan kesehatan khususnya layanan Rumah Sakit yang selama ini BPJS masih ada kendala aksesibilitas pada kasus kasus kegawatan yang memerlukan respon penanganan lebih dan sangat cepat, termasuk rujukan transportasi dari rumah warga yang mengalami kegawatan medik ke fasilitas kesehatan.

Belum Adanya jaminan secara penuh dari BPJS terhadap semua akses kegawatdaruratan tersebut menjadikan suatu keprihatinan yang mendalam sehingga perlu dipikirkan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Kartu

Sehat Berbasis NIK (KS NIK) sebagai program yang baru diluncurkan oleh Walikota Bekasi DR. Rahmat Effendi pada tahun 2017 ini adalah pengembangan dari Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yg selama beberapa tahun sebelumnya dicover pembiayaan APBD melalui program Surat Keterangan Tak Mampu (SKTM) bagi warga yang tak mampu dan rentan miskin karena penyakitnya.

Kartu Sehat berbasis NIK sesuai Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 27.A tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah bagi Keluarga tidak mampu berbasis kartu keluarga dan nomor induk kependudukan (NIK), Keputusan Wali Kota Bekasi nomor 440/Kep.582.a-Dinkes/XII/2016 tentang Satuan Pelaksana dan Tim Pengendali Pelaksanaan Pelayanan Jamkesda bagi keluarga Tidak Mampu berbasis KK dan NIK di Kota Bekasi, Keputusan Wali Kota Bekasi nomor 460/Kep.346.A-Dinsos/VII/2017 tentang Kepesertaan Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kota Bekasi, dengan tujuan untuk memudahkan, memperpendek alur pelayanan, dan lebih khusus adanya kepastian akan layanan yang dibutuhkan, sebagai jaminan bagi warga oleh pemerintah Daerah.

Strateginya dengan mengembangkan kerjasama lebih luas, dari 33 Rumah Sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS menjadi 42 Rumah Sakit khususnya dari 2 Rumah Sakit Type B yang bekerja sama dengan BPJS menjadi 5 Rumah Sakit, sebagai fasilitas yang dapat melayani kegawatan dan layanan intensif. Jika selama ini masih ditemukan beberapa kendala untuk dapat dilayani di RS swasta, saat ini pemegang Kartu Sehat sudah tidak dibedakan dalam hal aksesibilitas, di lapangan berdasarkan pantauan lebih mudah dibanding pemegang kartu BPJS.

Adapun jenis pelayanan kesehatan yang didapat oleh peserta jaminan kesehatan daerah, antara lain : Pelayanan rawat jalan dokter spesialis, Pelayanan ambulance, Pelayanan rawat inap kelas 3, Pelayanan intensif seperti pelayanan IGD, ICU, PICU, NICU, dan Hemodialisa.

Dengan berbasis NIK, menjamin bagi semua warga Kota tanpa kecuali untuk dapat dilayani oleh Rumah Sakit yang bekerja sama baik di dalam wilayah Kota Bekasi maupun di 20 Rumah Sakit sekitar di luar Kota Bekasi serta mengeliminir penyalahgunaan warga dari luar Kota Bekasi sehingga pemanfaatannya bisa maksimal, dengan jaminan tanpa Batasan jenis penyakit termasuk penyakit katastrofik yaitu penyakit yang mengancam jiwa, perlu penanganan komprehensif dan berbiaya tinggi.

Dengan sistem yang dimiliki berbasis NIK juga data yang dibutuhkan juga dapat diperoleh secara efektif untuk menilai atau mengevaluasi akuntabilitas program KS NIK oleh Satuan Perangkat Daerah Terkait selama setahun berjalan dan selanjutnya diperbaiki.

• **Indikator Kinerja Layanan Kesehatan**

- **Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate (IMR)***

Angka kematian bayi merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orangtua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi.

Jumlah kematian bayi pada tahun 2016 adalah sebesar 48 kasus, lebih sedikit dibandingkan dengan kasus di tahun 2015 sebesar 76 meningkat lagi ditahun 2017 menjadi 52 kasus. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.34
Jumlah Kematian Bayi Kota Bekasi Tahun 2014 - 2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
Kematian Bayi	47	76	48	52
Kematian Balita	47	81	50	53
Total	94	157	98	105

Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2015,2016,2017

Selanjutnya dapat disajikan indicator yang lebih rinci berkaitan dengan kesehatan bayi maupun Balita. Tabel berikut ini menunjukkan bahwa AKB dari tahun 2013-2017 berada di sekitar 1, hanya di tahun 2015 sedikit melonjak di sekitar 1,5 yang berarti bahwa angka kematian bayi (AKB) Kota Bekasi adalah 1 di antara 1000 kelahiran hidup, yaitu terjadi kasus kematian bayi rata-rata per tahun 48 orang dari jumlah bayi lahir rata-rata per tahun sekitar 46 ribu orang.

Pola dan besaran AKB ini juga diikuti oleh angka kematian balita, jumlah kematian balita per 1000 kelahiran hidup, yaitu di sekitar angka 1, sedikit meningkat di sekitar 1,6 pada tahun 2015. Dengan rendahnya AKB tersebut menyebabkan angka keberlangsungan hidup bayi (AKHB) menjadi besar di sekitar 99,9% artinya setiap bayi lahir di Kota Bekasi akan mempunyai probabilitas hidup sampai usia 1 tahun sebesar 99,9%.

Secara lebih rinci dapat dilihat bahwa kematian bayi tersebut sebagian besar terjadi pada saat bayi berumur sampai satu bulan (28 hari), yang sering disebut sebagai angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal, yaitu banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup) setelah dilahirkan. Pada umumnya hal ini disebabkan oleh factor-factor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Tabel 3.35
Beberapa Indikator Tentang Kematian Bayi dan Balita

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	1.039	1.001	1.546	1.023	1.105
Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu (Orang)	48	47	76	48	52
Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu (Orang)	46,180	46,961	49,168	46,919	47,065
Angka kelangsungan hidup bayi	0.9990	0.9990	0.9985	0.9990	0.9989
Angka Kematian Bayi (AKB)/ Infant Mortality Rate (IMR)	1.039	1.001	1.546	1.023	1.105
Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu (Orang)	48	47	76	48	52
Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu (Orang)	46,180	46,961	49,168	46,919	47,065
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	1.061	1.001	1.647	1.066	1.126
Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu.	49	47	81	50	53
Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	46,180	46,961	49,168	46,919	47,065
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	-	0.8731	1.3830	0.7673	1.0836
Jumlah Kematian Neonatal satu tahun tertentu (Orang)		41	68	36	51
Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu (Orang)	46,180	46,961	49,168	46,919	47,065

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2018

Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat bahwa data tahun 2013 untuk menghitung Angka Kematian Neonatal (AKN) masih bercampur dengan AKB, sehingga AKN baru bisa disajikan sejak tahun 2014. Berdasarkan table di atas, terlihat bahwa nilai AKN mendekati AKB, artinya sebagian besar kematian bayi terjadi pada 1 bulan pertama sejak dilahirkan. Tahun 2014 tercatat dari 47 bayi berumur kurang dari 1 tahun/ meninggal sebelum ulang tahun pertama, 41 bayi di antaranya meninggal sebelum berumur 1 bulan. Tahun 2015 68 bayi dari 76 bayi meninggal sebelum berumur 1 bulan, demikian juga untuk tahun 2016 (36 dari 48 bayi) dan tahun 2017 (51 dari 52 bayi).

Tabel 3.36
Beberapa Indikator Tentang Kesehatan Bayi dan Balita

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	100.0	100.0	100.0	100	87.5
Jumlah Kelurahan UCI	56	56	56	56	49
Jumlah Seluruh Kelurahan	56	56	56	56	56
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	92	90	93.5	94	91
Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun (Orang)	47,581	48,138	48,561	48,749	47,462
Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama (Orang)	51,859	53,261	51,931	51,794	52,291

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan balita pneumonia yg ditangani (%)	30.5	21.2	25.0	19.3	18.1
Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun (Orang)	6,408	5,650	6,352	5,033	4,561
Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama (Orang)	21,008	26,630	25,400	26,099	25,189
Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yg tepat (%)	100	100	100	100	100
Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 tahun (Orang)	2	9	5	13	14
Jumlah penderita positif dalam 1 th (Orang)	2	9	5	13	14
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	100	100	100	100	100
Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani (Kasus)	1,388	1,510	1,886	1,504	2,450
Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada (Kasus)	1,388	1,510	1,886	1,504	2,450
Cakupan kunjungan bayi (%)	82.4	86.0	88.8	94.1	97.2
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Kunjungan)	38,061	40,375	43,650	44,147	45,747
Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama (Orang)	46,180	46,961	49,168	46,919	47,065
Cakupan pelayanan anak balita (%)	24.7	31.2	31.2	46.7	46.9
Jml anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja ada waktu tertentu (Orang)	65,758	66,567	80,988	92,248	93,592
Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama (Orang)	266,525	213,041	259,658	197,678	199,604

Sumber: RPJMD Perubahan Kota Bekasi 2018-2023

Rendahnya angka kematian bayi (AKB), angka kematian balita, dan angka kematian neonatal tidak terlepas dari upaya peningkatan kesehatan bayi, anak, ibu hamil, dan wanita usia subur. Tabel di atas menggambarkan seluruh kelurahan (kecuali tahun 2017) telah tercakup dalam *Universal Child Immunization* (UCI). UCI adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur, dan anak usia sekolah tingkat dasar.

Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi: 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi: 1 dosis DT, 1 dosis campak, dan 2 dosis TT. Indikator lainnya, menunjukkan tentang persentase bayi yang diimunisasi (campak), penanganan balita penderita pneumonia, cakupan layanan bayi dan balita, semuanya menunjukkan angka yang sangat baik, hanya ada beberapa yang harus ditingkatkan, seperti cakupan pelayanan anak balita.

- **Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)**

Angka Kematian Ibu merupakan banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, seperti: kecelakaan, terjatuh, dan lain lain, per 100.000 kelahiran hidup. Informasi mengenai tingginya angka kematian ibu akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu.

Selama kurun waktu 2014 – 2017, angka kematian ibu di Kota Bekasi cenderung mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 18 kasus dari tahun 2017 yang merupakan tahun dengan kasus terendah (2014-2018) dengan banyak 11 kasus. Secara rinci Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat indikator-indikator terkait tentang ibu sebagai capaian dari program yang dijalankan dalam kurun 2014-2018. Angka Kematian Ibu (AKI) terlihat cenderung menurun dari 62,8 orang per 100 ribu kelahiran hidup di tahun 2013, menjadi 23,4 orang per 100 ribu kelahiran hidup tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.37
Banyaknya Angka Kematian Ibu di Kota Bekasi

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Kematian Ibu Hamil	5	4	5	2	3
Kematian Ibu Bersalin	8	5	8	4	6
Kematian Ibu Nifas	8	5	3	5	9
Jumlah	21	14	16	11	18

Sumber: RPJMD Perubahan Kota Bekasi 2018-2023

Secara rinci Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat indikator-indikator terkait tentang ibu sebagai capaian dari program yang dijalankan dalam kurun 2012-2017. Angka Kematian Ibu (AKI) terlihat cenderung menurun dari 62,8 orang per 100 ribu kelahiran hidup di tahun 2013, menjadi 23,4 orang per 100 ribu kelahiran hidup tahun 2017. Untuk lebih jelasnya mengenai indikator tentang kesehatan ibu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.38
Beberapa Indikator Tentang Kesehatan Ibu

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	62.8	46.8	28.5	34.1	23.4
Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun (Orang)	29	22	14	16	11
Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu	46,180	46,961	49,168	46,919	47,065

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
yang sama (Orang)					
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Kasus)	9,803	10,703	3,599	4,399	5,781
Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama (Orang)	9,803	10,703	3,599	4,399	5,781
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	83.8	84.9	90.1	88.3	88.0
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Orang)	45,603	47,505	49,157	46,924	47,152
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (Orang)	54,450	55,924	54,530	53,151	53,591
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	82.5	85.5	91.5	89.0	92.1
Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu (Orang)	47,054	50,086	52,291	49,565	51,732
Jml sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dlm kurun waktu sama (Orang)	57,041	58,586	57,125	55,682	56,143
Cakupan pelayanan nifas (%)	70.5	73.6	83.3	88.3	83.2
Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Orang)	38,398	41,176	45,397	46,924	44,571
Jumlah seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (Orang)	54,450	55,924	54,530	53,151	53,591

Sumber: RPJMD Perubahan Kota Bekasi 2018-2023

Rendahnya angka kematian ibu tidak terlepas dari kinerja layanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan yang cenderung sangat baik. Terlihat dari indikator-indikator yang lain, seperti: cakupan komplikasi kebidanan, cakupan pelayanan tenaga kesehatan, cakupan kunjungan ibu hamil, dan cakupan layanan nifas.

- **Prevelensi Balita Gizi Buruk**

Tabel di bawah ini memuat tentang Status Gizi Balita di Kota Bekasi, yang menunjukkan bahwa rata-rata balita di Kota Bekasi berada pada kondisi normal. Balita yang status gizinya gemuk mengalami penurunan pada dua tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya pengetahuan tentang obesitas pada balita.

Tabel 3.39
Status Gizi Balita di Kota Bekasi Tahun 2013 -2016

No	Status Gizi	TAHUN			
		2013	2014	2015	2016
1	SangatKurus(%)	0,19	0,16	0,13	0,21
2	Kurus(%)	5,23	4,24	3,61	3,49
3	Normal(%)	85,36	85,67	87,09	87,20
4	Gemuk(%)	9,23	9,92	9,17	9,11

Sumber: RPJMD Perubahan Kota Bekasi 2018-2023

Perbaikan status gizi balita tidak terlepas dari penanganan balita gizi buruk yang semuanya tertangani, seperti tersaji pada table berikut ini. Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan yang tertangani cenderung menurun, dari semula di tahun 2013 sebanyak 174 balita menjadi 141 balita di tahun 2017, walaupun sedikit meningkat di tahun 2015 sebanyak 194 balita.

Semua kasus balita gizi buruk tertangani 100 persen. Untuk lebih jelasnya mengenai cakupan layanan balita gizi buruk dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.40
Cakupan Layanan Balita Gizi Buruk, 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerjapada kurun waktu tertentu (Orang)	174	137	194	142	141
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satuwilayah kerja dalam waktu yang sama (Orang)	174	137	194	142	141

Sumber: RPJMD Perubahan Kota Bekasi 2018-2023

- Prevalensi Penyakit Menular

Tabel di bawah ini menunjukkan Jumlah Kasus TB Paru di Kota Bekasi. TB Paru BTA (+) mengalami peningkatan setiap tahunnya , hal ini disebabkan udara yang kurang bersih di Kota Bekasi yang mengakibatkan tingginya polusi di Kota Bekasi . Sedangkan TB Paru BTA (-) mengalami penurunan pada tahun 2015 dan meningkat pada tahun 2016 dan meningkat lagi pada tahun 2017.

Tabel 3.41
Jumlah Kasus TB Paru di Kota Bekasi Tahun 2013-2017

Kasus	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
TB Paru BTA (+)	1.390	1.359	1.435	1.401	1.526
TB Paru BTA (-)	1.037	1.063	1.004	1.032	

Sumber: RPJMD Perubahan Kota Bekasi 2018-2023

Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat bahwa tingkat prevalensi TBC per 100 ribu penduduk di tahun 2013 sebesar 55, artinya setiap 100 ribu penduduk terdapat 55 orang yang menderita TBC. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC baru sekitar 50% dari perkiraan penderita baru.

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Presentasi penderita TBC yang diobati dan berhasil sembuh sekitar 74%, sehingga dengan penanganan yang baik ini, maka tingkat kematian cenderung menurun, dari 0,79 orang per 100 ribu penduduk di tahun 2014 menjadi 0,70 di tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.42
Beberapa Indikator Layanan Penyakit Menular, 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	50	48	-	-	-
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun (Orang)	1,390	1,359	1,435	1,401	1,526
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) Kurun waktu yang sama (Orang)	2,774	2,849			
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	55	-	-	-	-
Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) (Kasus)	1,432				
Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama (Orang)	2,592,819	2,663,011	2,733,240	2,803,283	2,873,484
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	0.54	-	-	-	-
Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS (Orang)	1,390	1,359	1,435	1,401	1,526
Jumlah pasien baru TB paru BTA diperkirakan ada dalam wilayah tersebut (Orang)	2,594				
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	74	76	77	73.9	74.4
Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun (Orang)	1,122	1,054	1,045	958	1,059
Jumlah Pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama (Orang)	1,514	1,390	1,349	1,296	1,423
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	-	0.79	0.77	0.57	0.70
Jumlah Pasien TB yang meninggal selama pengobatan (Orang)		21	21	16	20
Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama (Orang)	2,592,819	2,663,011	2,733,240	2,803,283	2,873,484
Angka kejadian Malaria (%)	0.001	0.003	0.002	0.005	0.005
Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu (Orang)	2	9	5	13	14
Jumlah penduduk pada pertengahan tahun (Orang)	2,592,819	2,663,011	2,733,240	2,803,283	2,873,484
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%)	0.0002	0.0002	0.0002	0.0003	0.0002
Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Orang)	524	490	465	783	560
Jumlah penduduk disatu wiayah kerja pada kurun waktu yang sama (Orang)	2,592,819	2,663,011	2,733,240	2,803,283	2,873,484
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun (Orang)	1,415	821	987	3,813	699

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama (Orang)	1,415	821	987	3,813	699
Penderita diare yang ditangani (%)	57.6	50.5	63.9	29.9	22.5
Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun (Orang)	49,736	28,794	37,370	22,626	17,462
Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk) (Orang)	86,320	56,988	58,491	75,689	77,584
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	1.45	1.13	1.64	2.00	2.21
Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan (Kasus)	10	8	12	15	17
Jumlah penduduk < 15 tahun (Orang)	691,106	710,822	730,827	750,259	769,430
Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	91.3	91.3	90.8	94.3	95.4
Jumlah murid SD Kelas 1 dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Orang)	42,314	48,025	42,008	46,317	53,841
Jumlah murid SD Kelas 1 dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama (Orang)	46,337	52,604	46,251	49,127	56,437
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100	100
Pelayanan gawat darurat level 1 (Layanan)	35	37	38	38	42
Jumlah RS (Buah)	35	37	38	38	42
Cakupan kelurahan/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100	100	100	100	100
Jumlah KLB di kelurahan/kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu (Kasus)	11	5	11	15	34
Jumlah KLB di kelurahan/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama (Kasus)	11	5	11	15	34

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2018

Disamping penyakit TB Paru di atas, beberapa indikator penyakit menular lainnya menunjukkan kasus yang kecil dibandingkan jumlah penduduk, dengan penanganan yang baik, seperti: penyakit malaria, diare, HIV/AIDS, demam berdarah, dan polio.

Upaya preventif juga dilakukan, dengan memperluas cakupan penjangkaran kesehatan anak SD kelas 1, dimana pada tahun 2017, dari sekitar 56 ribu murid SD kelas 1, sekitar 54 ribu orang yang telah diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan terlatih (sekitar 95%), angka ini meningkat dari tahun 2013 yang cakupan layanannya hanya sekitar 91%. Layanan gawat darurat level 1 juga menjadi perhatian untuk selalu dipertahankan tersedia dan ditingkatkan kualitasnya di semua rumah sakit yang ada di Kota Bekasi. Tahun 2013 seluruh rumah sakit (35 buah) tersedia layanan gawat darurat level 1, dan seiring waktu meningkat menjadi 42 layanan gawat darurat di 42 rumah sakit tahun 2017. Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di 11 kelurahan telah ditangani

seluruhnya kurang dari 24 jam, dengan penyelidikan epidemiologis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.43
Beberapa Indikator Tentang Layanan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio posyandu per satuan balita	5.77	5.79	6.09	5.95	6.42
Jumlah posyandu (Buah)	1,538	1,543	1,546	1,552	1,616
Jumlah balita (Orang)	266,525	266,299	254,004	260,989	251,895
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0.19	0.19	0.16	0.12	0.13
Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu (Buah)	504	506	435	349	369
Jumlah penduduk (Orang)	2,592,819	2,663,011	2,733,240	2,803,283	2,873,484
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (1000)	0.013	0.014	0.014	0.014	0.015
Jumlah rumah sakit (Buah)	35	37	38	38	42
Jumlah penduduk (Orang)	2,592,819	2,663,011	2,733,240	2,803,283	2,873,484
Rasio dokter per penduduk (1000)	0.0563	0.0552	0.0074	0.0261	0.0451
Jumlah dokter umum + spesialis (Orang)	1,459	1,471	202	732	1,297
Jumlah penduduk (Orang)	2,592,819	2,663,011	2,733,240	2,803,283	2,873,484
Rasio tenaga medis per satuan penduduk (1000)	0.0657	0.0645	0.0126	0.0303	0.0528
Jumlah tenaga medis (dr umum, drg, dr spesialis + drg spesialis) (Orang)	1,704	1,717	344	849	1,517
Jumlah penduduk (Orang)	2,592,819	2,663,011	2,733,240	2,803,283	2,873,484
Cakupan puskesmas	2,58	2,58	2,58	2,58	3,25
Jumlah puskesmas	31	31	31	31	39
Jumlah seluruh kecamatan	12	12	12	12	12
Cakupan pembantu puskesmas	0,43	0,43	0,43	0,25	0,25
Jumlah pembantu puskesmas	24	24	24	14	14
Jumlah seluruh kelurahan	56	56	56	56	56

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2018

Sarana dan prasarana kesehatan di Kota Bekasi menunjukkan kondisi yang cukup baik. Walaupun Pembantu Puskesmas belum tersedia di seluruh kelurahan, baru sekitar 25% tahun 2017, namun Puskesmas di tingkat kecamatan tersedia cukup, tahun 2017 tersedia 39 puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan atau rata-rata terdapat 3,25 puskesmas per kecamatan. Demikian juga untuk rumah sakit, tahun 2017 tersedia 42 rumah sakit untuk melayani 2,8 juta penduduk atau 1,5 rumah sakit melayani sekitar 100 ribu penduduk.

Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2013 yang hanya 1,3 rumah sakit. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, juga ditunjang dengan tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, walaupun ada kecenderungan menurun jumlahnya. Tahun 2013 sebanyak 5,6 dokter dan 6,5 tenaga medis melayani 100 ribu penduduk menurun menjadi 4,5 dokter dan 5,2 tenaga medis. Demikian juga pelayanan Posyandu yang cukup tersedia untuk melayani balita di Kota Bekasi.

3.5.3 Permukiman

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diidentifikasi selama kurun waktu 2009-2014 peningkatan pemanfaatan lahan terbesar di wilayah Kota Bekasi terjadi pada lahan permukiman dengan luas perubahan rata-rata pertahun sebesar 100 ha. Sementara pengurangan lahan terbesar terjadi pada lahan pertanian lahan basah dengan rata-rata perubahan sebesar 101 ha per tahun. Untuk lebih jelasnya mengenai perubahan penggunaan lahan di Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.44
Perubahan penggunaan lahan Kota Bekasi 2009-2014

No	Kelas Lahan	Penggunaan Lahan 2014 (ha)	Penggunaan Lahan 2009 (ha)	Perubahan 2009-2014 (ha)	Perubahan/th
1	Badan Air	166.12	125.09	41.03	8.21
2	Hutan Produksi			0.00	0.00
3	Industri	948.72	568.66	380.06	76.01
4	Kawasan Lindung	122.59	6.77	115.82	23.16
5	Lahan Infrastruktur	142.27	10.60	131.67	26.33
6	Perdagangan dan Jasa	273.69	166.17	107.52	21.50
7	Perkebunan	1234.87	1500.07	-265.20	-53.04
8	Permukiman	15218.40	14715.09	503.31	100.66
9	Pertanian Lahan Basah	1413.93	1923.59	-509.66	-101.93
10	Pertanian Lahan Kering	2091.23	2595.80	-504.57	-100.91

Sumber: Novianti, 2017

Perumahan dan permukiman yang terdapat di Kota Bekasi memiliki karakteristik yang berbeda, stok perumahan dan permukiman yang terdapat di Kota Bekasi terdiri dari Rumah Swadaya ; Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Rumah swadaya diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok. Rumah swadaya dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan Rumah Komersial ; Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan sesuai kebutuhan masyarakat.

Upaya pengembangan permukiman juga ditujukan secara seimbang bagi permukiman yang telah terbangun, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas permukimannya, melindungi nilai-nilai spesifik, unik, tradisional, dan bersejarah yang telah tercipta sepanjang umur kawasan, dan untuk meningkatkan kinerja kawasan sehingga dapat melampaui ukuran indeks minimal keberlanjutan kawasan.

Pembangunan dan pengembangan suatu perumahan dan permukiman tentunya sangat berkaitan erat dengan penggunaannya, dalam hal ini adalah penduduk. Dengan kata lain, pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman akan mengacu kepada kepentingan penduduk yang akan menghuni dan memanfaatkannya.

Jumlah total bangunan rumah di Kota Bekasi untuk kondisi tahun 2015 adalah 614,949 unit, dengan jumlah total terbanyak berada di Kecamatan Bekasi Barat dengan jumlah 76.015 unit dan jumlah terkecil berada di Kecamatan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Jatisampurna dengan jumlah rumah mencapai 27.789 unit. Sedangkan untuk skala kelurahan, jumlah rumah terbanyak berada di Kelurahan Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu dengan jumlah rumah mencapai 34,710 unit rumah dan jumlah rumah terkecil berada di Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna dengan jumlah rumah hanya mencapai 2,597 unit rumah. Data mengenai jumlah rumah di setiap kelurahan di Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.45
Stok Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Tahun 2015

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Rumah (Rumah)
1	Pondokgede	Jati Makmur	12,566
		Jati Waringin	14,162
		Jati Bening	13,776
		Jati Cempaka	16,115
		Jati Bening Baru	9,748
		Jumlah	66,367
2	Jatisampurna	Jati Karya	2,597
		Jatisampurna	10,520
		Jati Rangga	2,920
		Jati Ranggon	5,604
		Jati Raden	6,148
		Jumlah	27,789
3	Pondokmelati	Jati Murni	6,882
		Jati Melati	5,828
		Jati Warna	6,285
		Jati Rahayu	14,879
		Jumlah	33,874
4	Jatiasih	Jati Sari	6,500
		Jati Luhur	4,829
		Jatirasa	9,990
		Jatiasih	6,167
		Jati Mekar	5,778
		Jati Kramat	10,802
		Jumlah	44,066
5	Bantargebang	Ciketing Udik	5,709
		Sumur Batu	3,769
		Cikiwul	10,165
		Bantargebang	8,346
		Jumlah	27,989
6	Mustikajaya	Pedurenan	9,660
		Cimuning	8,690
		Mustika Jaya	8,781
		Mustika Sari	8,042
		Jumlah	35,173
7	Bekasi Timur	Margahayu	11,864
		Bekasi Jaya	10,075
		Duren Jaya	20,881
		Aren Jaya	16,650
		Jumlah	59,470
8	Rawalumbu	Bojong Menteng	12,043
		Bojong Rawalumbu	34,710
		Sepanjang Jaya	10,063
		Pengasinan	18,860

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Rumah (Rumah)
		Jumlah	75,676
9	Bekasi Selatan	Jaka Mulya	7,158
		Jaka Setia	9,375
		Pekayon Jaya	17,201
		Marga Jaya	5,595
		Kayuringin Jaya	20,364
		Jumlah	59,693
10	Bekasi Barat	Bintara Jaya	12,786
		Bintara	13,131
		Kranji	12,130
		Kota Baru	12,735
		Jaka Sampurna	25,233
		Jumlah	76,015
11	Medansatria	Harapan Mulya	5,735
		Kali Baru	8,366
		Medan Satria	9,143
		Pejuang	22,114
		Jumlah	45,358
12	Bekasi Utara	Harapan Jaya	16,442
		Kaliabang Tengah	10,330
		Perwira	10,588
		Harapan Baru	6,405
		Teluk Pucung	12,983
		Marga Mulya	6,731
		Jumlah	63,479
KOTA BEKASI			614.949

Sumber : RP3KP Kota Bekasi Tahun 2016

a. Kepadatan Rumah

Kepadatan rumah merupakan salah satu aspek dalam upaya pengendalian perkembangan tata ruang dan tata bangunan serta tata lingkungan yang memperhatikan keserasian, fungsional, estetis serta ekologis dalam pemanfaatan ruang lahan. Kepadatan rumah berpengaruh terhadap intensitas daerah terbangun yang merupakan optimisasi kemampuan lahan berbanding luas lahan. Kepadatan Rumah adalah hasil bagi jumlah rumah terhadap luas wilayah baik itu kelurahan maupun kecamatan bahkan kota. Dengan demikian satuan yang digunakan adalah satuan/luas daerah, misalnya: buah/Ha.

Rumah dan lingkungan pemukiman yang memiliki situasi dan kondisi yang baik dan nyaman seperti memiliki ruang yang cukup untuk kegiatan pribadi akan memberikan kepuasan psikis pada individu yang menempatinnya. Kualitas pemukiman dapat memberikan pengaruh penting terhadap persepsi diri penghuninya, stress dan kesehatan fisik, sehingga kondisi pemukiman ini tampaknya berpengaruh pada perilaku dan sikap-sikap orang yang tinggal.

Kepadatan perumahan di Kota Bekasi termasuk kedalam kategori kepadatan Tinggi yaitu 100-1000 rumah/Ha, jika dilihat dari Kepadatan untuk tiap kecamatan, untuk kepadatan sangat tinggi yaitu (1000 rumah/Ha) terdapat di Kecamatan Rawalumbu dengan kepadatan 1031 rumah/Ha, sedangkan untuk kelurahan yang memiliki kepadatan sangat tinggi adalah Kelurahan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Jatisampurna dengan kepadatan rumah mencapai 1915 rumah/ha. Untuk lebih jelas mengenai kepadatan rumah Tahun 2015 Kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.46
Kepadatan Rumah Kota Bekasi Tahun 2015

No	Kecamatan	No	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha) a	Jumlah Rumah (Rumah) b	Kepadatan Rumah (Rumah/Ha) c- b/a	Klasifikasi Kepadatan
1	Pondokgede	1	Jati Makmur	19.32	12,566	651	Tinggi
		2	Jati Waringin	17.70	14,162	800	Tinggi
		3	Jati Bening	17.72	13,776	777	Tinggi
		4	Jati Cempaka	19.76	16,115	815	Tinggi
		5	Jati Bening Baru	15.33	9,748	636	Tinggi
		Jumlah			89.84	66,367	739
2	Jatisampurna	1	Jati Karya	9.364	2,597	277	Tinggi
		2	Jatisampurna	5.493	10,520	1915	Sangat Tinggi
		3	Jati Rangga	5.428	2,920	538	Tinggi
		4	Jati Ranggon	3.636	5,604	1541	Sangat Tinggi
		5	Jati Raden	3.518	6,148	1747	Sangat Tinggi
		Jumlah			27.440	27,789	1013
3	Pondokmelati	1	Jati Murni	14.81	6,882	465	Tinggi
		2	Jati Melati	12.61	5,828	462	Tinggi
		3	Jati Warna	19.00	6,285	331	Tinggi
		4	Jati Rahayu	32.68	14,879	455	Tinggi
		Jumlah			79.10	33,874	428
4	Jatiasih	1	Jati Sari	8.37	6,500	777	Tinggi
		2	Jati Luhur	7.04	4,829	686	Tinggi
		3	Jatirasa	13.42	9,990	745	Tinggi
		4	Jatiasih	14.83	6,167	416	Tinggi
		5	Jati Mekar	13.01	5,778	444	Tinggi
		6	Jati Kramat	16.15	10,802	669	Tinggi
		Jumlah			72.82	44,066	605
5	Bantargebang	1	Ciketing Udik	7.06	5,709	809	Tinggi
		2	Sumur Batu	9.69	3,769	389	Tinggi
		3	Cikiwul	10.05	10,165	1011	Sangat Tinggi
		4	Bantargebang	11.22	8,346	744	Tinggi
		Jumlah			38.02	27,989	736
6	Mustikajaya	1	Pedurenan	20.69	9,660	467	Tinggi
		2	Cimuning	12.44	8,690	699	Tinggi
		3	Mustika Jaya	23.49	8,781	374	Tinggi
		4	Mustika Sari	11.31	8,042	711	Tinggi
		Jumlah			67.93	35,173	518
7	Bekasi Timur	1	Margahayu	20.18	11,864	588	Tinggi
		2	Bekasi Jaya	16.86	10,075	597	Tinggi
		3	Duren Jaya	19.35	20,881	1079	Sangat Tinggi
		4	Aren Jaya	18.20	16,650	915	Tinggi
		Jumlah			74.59	59,470	797
8	Rawalumbu	1	Bojong Menteng	11.72	12,043	1028	Sangat Tinggi
		2	Bojong Rawalumbu	27.69	34,710	1253	Sangat Tinggi
		3	Sepanjang Jaya	12.43	10,063	809	Tinggi
		4	Pengasinan	21.53	18,860	876	Tinggi
		Jumlah			73.36899649	75,676	1031
9	Bekasi Selatan	1	Jaka Mulya	14.04	7,158	510	Tinggi
		2	Jaka Setia	17.77	9,375	528	Tinggi
		3	Pekayon Jaya	21.69	17,201	793	Tinggi
		4	Marga Jaya	6.96	5,595	804	Tinggi

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Kecamatan	No	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha) a	Jumlah Rumah (Rumah) b	Kepadatan Rumah (Rumah/Ha) c- b/a	Klasifikasi Kepadatan
10	Bekasi Barat	5	Kayuringin Jaya	19.69	20,364	1034	Sangat Tinggi
		Jumlah		80.14475842	59,693	745	Tinggi
		1	Bintara Jaya	15.41	12,786	830	Tinggi
		2	Bintara	25.21	13,131	521	Tinggi
		3	Kranji	12.43	12,130	976	Tinggi
		4	Kota Baru	18.36	12,735	694	Tinggi
11	Medansatria	5	Jaka Sampurna	34.06	25,233	741	Tinggi
		Jumlah		105.47	76,015	721	Tinggi
		1	Harapan Mulya	3.17	5,735	1811	Sangat Tinggi
		2	Kali Baru	9.35	8,366	894	Tinggi
		3	Medan Satria	8.34	9,143	1097	Sangat Tinggi
12	Bekasi Utara	4	Pejuang	26.34	22,114	839	Tinggi
		Jumlah		47.20	45,358	961	Tinggi
		1	Harapan Jaya	25.21	16,442	652	Tinggi
		2	Kaliabang Tengah	25.58	10,330	404	Tinggi
		3	Perwira	7.56	10,588	1401	Sangat Tinggi
		4	Harapan Baru	6.67	6,405	960	Tinggi
		5	Teluk Pucung	18.51	12,983	701	Tinggi
KOTA BEKASI		6	Margamulya	8.16	6,731	825	Tinggi
		Jumlah		91.69	63,479	692	Tinggi
				755.92	614,949	814	Tinggi

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Tahun 2015, Survei Lapangan dan Hasil Analisis tahun 2016

b. Kepadatan Hunian

Berdasarkan data jumlah penduduk Kota Bekasi yang dirinci berdasarkan kelurahan Tahun 2015 dan jumlah rumah tiap kelurahan tahun 2015, maka dapat diketahui kepadatan hunian/rata-rata tingkat hunian Kota Bekasi tiap 1 unit rumah dihuni oleh 4 orang, sedangkan untuk kelurahan yang memiliki tingkat hunian sampai 10 orang/rumah terdapat di Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara dan Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.47
Kepadatan Hunian Kota Bekasi Tahun 2015

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Rumah (Rumah)	Kepadatan Hunian Rumah/Penghuni
1	Pondokgede	Jati Makmur	12,566	6
		Jati Waringin	14,162	4
		Jati Bening	13,776	3
		Jati Cempaka	16,115	4
		Jati Bening Baru	9,748	5
		Jumlah		66,367
2	Jatisampurna	Jati Karya	2,597	8
		Jatisampurna	10,520	4
		Jati Rangga	2,920	5
		Jati Ranggon	5,604	6
		Jati Raden	6,148	3
		Jumlah		27,789
3	Pondokmelati	Jati Murni	6,882	4
		Jati Melati	5,828	4

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Rumah (Rumah)	Kepadatan Hunian Rumah/Penghuni
		Jati Warna	6,285	4
		Jati Rahayu	14,879	5
		Jumlah	33,874	4
4	Jatiasih	Jati Sari	6,500	5
		Jati Luhur	4,829	5
		Jatirasa	9,990	3
		Jatiasih	6,167	4
		Jati Mekar	5,778	5
		Jati Kramat	10,802	3
		Jumlah	44,066	4
5	Bantargebang	Ciketing Udik	5,709	5
		Sumur Batu	3,769	4
		Cikiwul	10,165	3
		Bantargebang	8,346	5
		Jumlah	27,989	4
6	Mustikajaya	Pedurenan	9,660	6
		Cimuning	8,690	5
		Mustika Jaya	8,781	10
		Mustika Sari	8,042	5
		Jumlah	35,173	6
7	Bekasi Timur	Margahayu	11,864	5
		Bekasi Jaya	10,075	6
		Duren Jaya	20,881	4
		Aren Jaya	16,650	3
		Jumlah	59,470	4
8	Rawalumbu	Bojong Menteng	12,043	4
		Bojong Rawalumbu	34,710	2
		Sepanjang Jaya	10,063	5
		Pengasinan	18,860	3
		Jumlah	75,676	3
9	Bekasi Selatan	Jaka Mulya	7,158	5
		Jaka Setia	9,375	4
		Pekayon Jaya	17,201	4
		Marga Jaya	5,595	3
		Kayuringin Jaya	20,364	3
		Jumlah	59,693	4
10	Bekasi Barat	Bintara Jaya	12,786	4
		Bintara	13,131	6
		Kranji	12,130	4
		Kota Baru	12,735	4
		Jaka Sampurna	25,233	3
		Jumlah	76,015	4
11	Medansatria	Harapan Mulya	5,735	4
		Kali Baru	8,366	4
		Medan Satria	9,143	3
		Pejuang	22,114	4
		Jumlah	45,358	4
12	Bekasi Utara	Harapan Jaya	16,442	5
		Kaliabang Tengah	10,330	10
		Perwira	10,588	4
		Harapan Baru	6,405	6
		Teluk Pucung	12,983	5
		Marga Mulya	6,731	4
		Jumlah	63,479	6
KOTA BEKASI			614,949	4

Sumber: RP3KP Kota Bekasi Tahun 2016

c. Tipologi Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Perumahan Swadaya

Pengertian perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara berkelompok maupun secara sendiri-sendiri. Perumahan swadaya mempunyai kontribusi yang sangat signifikan dalam pembangunan rumah secara nasional, diperkirakan mencapai 80 %. Bahkan Prof. Johan Silas menyebutkan bahwa kontribusi perumahan swadaya bisa mencapai 90% Selebihnya sekitar 10-20 % dibangun oleh lembaga formal seperti developer baik swasta maupun pemerintah, maupun yayasan).

Luas lahan perumahan swadaya di Kota Bekasi mencapai luas 4415,38 Ha, dimana Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati merupakan kelurahan yang memiliki luas wilayah yang paling luas untuk Kawasan Perumahan Swadaya dengan luas 191,09 Ha atau sekitar 4,33% , sedangkan untuk luas terkecil terdapat di Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara dengan luas 23,98 Ha (0,54%).

Untuk lebih jelas mengenai luas lahan kawasan permukiman swadaya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.48
Luas Lahan Kawasan Permukiman Swadaya Kota Bekasi Tahun 2015

Kecamatan	Kelurahan	Perumahan Swadaya (Ha)	%
Pondokgede	Jati Makmur	81.90	1.85
	Jati Waringin	55.89	1.27
	Jati Bening	68.22	1.55
	Jati Cempaka	55.11	1.25
	Jati Bening Baru	73.13	1.66
	Jumlah	334.27	7.57
Jatisampurna	Jati Karya	44.44	1.01
	Jatisampurna	17.18	0.39
	Jati Rangga	49.61	1.12
	Jati Ranggon	32.94	0.75
	Jati Raden	34.18	0.77
	Jumlah	178.35	4.04
Pondokmelati	Jati Murni	126.05	2.85
	Jati Melati	89.34	2.02
	Jati Warna	152.25	3.45
	Jati Rahayu	191.09	4.33
	Jumlah	558.73	12.65
Jatiasih	Jati Sari	32.11	0.73
	Jati Luhur	55.62	1.26
	Jatirasa	60.47	1.37
	Jatiasih	116.17	2.63
	Jati Mekar	86.70	1.96
	Jati Kramat	106.60	2.41
	Jumlah	457.66	10.37
Bantargebang	Ciketing Udik	70.61	1.60
	Sumur Batu	82.80	1.88
	Cikiwul	96.22	2.18
	Bantargebang	112.20	2.54
	Jumlah	361.84	8.19
Mustikajaya	Pedurenan	155.98	3.53
	Cimuning	96.92	2.19

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Kecamatan	Kelurahan	Perumahan Swadaya (Ha)	%
	Mustika Jaya	159.31	3.61
	Mustika Sari	93.99	2.13
	Jumlah	506.20	11.46
Bekasi Timur	Margahayu	132.99	3.01
	Bekasi Jaya	96.54	2.19
	Duren Jaya	102.22	2.32
	Aren Jaya	56.45	1.28
	Jumlah	388.19	8.79
Rawalumbu	Bojong Menteng	100.23	2.27
	Bojong Rawalumbu	111.77	2.53
	Sepanjang Jaya	79.32	1.80
	Pengasinan	90.64	2.05
	Jumlah	381.95	8.65
Bekasi Selatan	Jaka Mulya	66.41	1.50
	Jaka Setia	68.06	1.54
	Pekayon Jaya	76.43	1.73
	Marga Jaya	60.60	1.37
	Kayuringin Jaya	75.16	1.70
	Jumlah	346.66	7.85
Bekasi Barat	Bintara Jaya	98.08	2.22
	Bintara	165.24	3.74
	Kranji	118.43	2.68
	Kota Baru	89.83	2.03
	Jaka Sampurna	185.63	4.20
	Jumlah	657.21	14.88
Medansatria	Harapan Mulya	31.64	0.72
	Kali Baru	65.03	1.47
	Medan Satria	78.49	1.78
	Pejuang	69.15	1.57
	Jumlah	244.32	5.53
Bekasi Utara	Harapan Jaya	107.91	2.44
	Kaliabang Tengah	118.13	2.68
	Perwira	41.21	0.93
	Harapan Baru	38.61	0.87
	Teluk Pucung	140.11	3.17
	Marga Mulya	23.98	0.54
Jumlah	469.94	10.64	
KOTA BEKASI		4415.38	100.00

Sumber: RP3KP Kota Bekasi Tahun 2016

2. Perumahan Komersial

Perumahan Komersial merupakan perumahan yang disediakan secara resmi oleh pemerintah atau swasta dengan skala kecil sampai dengan besar. Karakter perumahan formal adalah adanya keteraturan bentuk fisik rumah, baik kavling, perencanaan tapak dan lain-lain. Dalam pembangunan perumahan, memiliki tiga unsur persyaratan yang harus di penuhi, yaitu unsur kualitas, Kesehatan dan harmonis. Ketiga unsur tersebut diuraikan berdasarkan pendapat para ahli, sebagai berikut;

1) Perumahan Formal

Perumahan Formal kumpulan rumah yang dilengkapi dengan sarana prasarana dan utilitas umum yang dibangun oleh badan usaha yang bergerak di bidang perumahan. Perkembangan kota menyebabkan kebutuhan akan hunian meningkat yang kemudian diakomodasi oleh ketersediaan perumahan formal. Praktek-praktek perumahan komersial

tidak dikelola secara terpadu dengan sistem penyediaan perumahan secara umum. Eksklusi penanganan perumahan komersial pada gilirannya berakibat pada beragam konflik di lapangan, yaitu antara pengusaha, pejabat daerah dan masyarakat. Sebagai contoh adalah konflik-konflik dalam pembebasan tanah, konflik pengelolaan antar kawasan, konflik antara penghuni dan pengembang dan pengelolaan, konflik dalam penjualan kepada konsumen, dan sebagainya.

- **BWP Pusat Kota (Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Barat)**

Kehadiran Jalan Tol Jakarta-Cikampek, membuka wajah Kota Bekasi, yang memicu percepatan pembangunan permukiman di sepanjang koridor Jalan KH. Noer Ali (Kalimalang) dan selanjutnya membentuk dua pusat pertumbuhan di Kawasan Pusat Kota yaitu Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Bekasi Timur. Citra Bekasi Timur selama ini identik dengan perumahan kelas menengah bawah, seperti Taman Raya Bekasi, Villa Asri dan Bekasi Griya Asri, Permata Metropolitan (Tambun), dan beragam perumahan sederhana lainnya.

Kawasan Tambun, Bekasi Timur dikenal sebagai "lambung" perumahan sederhana di Jabotabek, karena jika dibandingkan dengan seluruh kawasan di Bekasi dan Jabotabek, hampir tidak ada perumahan sederhana sebanyak yang ada di Tambun, Bekasi Timur. Kawasan ini pun tak luput dari pengembang (developer), seperti PT. Adhi Realty yang membangun Graha Kalimas dan Kalimas Residence; Perumahan Kota Legenda atau Legenda Park yang dibangun oleh kelompok Duta Pertiwi; PT. Metropolitan Permata Development, anak perusahaan dari PT Metropolitan Land yang membangun Metropolitan Mal di Bekasi Barat, juga termasuk pengembang perumahan di Bekasi Timur. Perumahan Permata Metropolitan, didesain sebagai perumahan untuk kelas menengah dengan konsep perumahan modern, selain dibangun dengan sistem cluster, di areal perumahan seluas 60 Ha ini dibangun Plaza Metropolitan dan ruko-ruko (rumah toko). Pembagian bentuk kavling permukiman-permukiman di Kawasan Pusat Kota mengikuti pola jalan yang ada (mengikuti topografi), antara lain:

- Pola jalan grid, bentuk kavling berupa segi empat dan teratur;
- Pola jalan culdesac, bentuk kavling berupa tusuk sate;
- Pola jalan curved, bentuk kavling tidak beraturan, kebanyakan diterapkan pada perumahan yang mempunyai bentuk lahan berkontur.

- **BWP Pondokgede (Kecamatan Pondokgede, Sebagian Kecamatan Jatiasih dan Sebagian Kecamatan Pondokmelati)**

Pada kawasan pinggiran perkotaan, perkembangan perumahan bersifat kepadatan sedang yang terdapat di Kelurahan Jatimekar, Kelurahan Jatiwarna, dan Kelurahan Jatiasih, dimana pada kawasan ini masih tersedia lahan *diversifikasi* atau tersedia pengembangan lahan perumahan bersifat *horizontal*. Perkembangannya dalam bentuk munculnya kawasan-kawasan perumahan baru yang kebanyakan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

terjadi di, Kelurahan Jatikramat, Kelurahan Jatimakmur dan Kelurahan Jatibening yang berdekatan jaraknya dengan Pusat Kota BWP Pondokgede. Kondisi permukiman di kawasan Pusat Kota BWP Pondokgede fungsinya menjadi ganda, selain untuk rumah tempat tinggal dijadikan pula tempat untuk berusaha dalam bidang perdagangan dan jasa. Hal ini terdapat pada koridor-koridor Jalan Raya Jatiwaringin, Pondokgede Raya dan Jalan Raya Hankam. Pada bagian tengah BWP Pondokgede sebagian terdapat di Kelurahan Jatiwaringin, Kelurahan Jatibening dan Kelurahan Jatimakmur merupakan kawasan yang berkembang dengan pesat, hal ini disebabkan adanya rembesan perkembangan dari arah Utara. Pada bagian timur dan selatan yakni Kelurahan Jati Rahayu, Jati Warna, Jati Rasa dan Jati Asih masih terdapat banyak lahan kosong, dan berdasarkan RTRW Kota Bekasi untuk Kelurahan Jati Asih dikembangkan untuk kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun dengan skala besar. Berikut ini adalah tabel perumahan yang terdapat di masing-masing kelurahan pada BWP Pondok Gede.

Tabel 3.49
Permukiman Formal di BWP Pondok Gede

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama Permukiman
		Kelurahan Jatibening	Graha mutiara
			Villa pondok Gede
			Komplek jati bening
			Komplek jatibening 2
			Komplek Depkes
			Perum Prima Lingkar Asri
		Kelurahan Jatibening baru	Komplek Jati Bening Estate
			Perum Gening Asri
		Kelurahan Jaticempaka	Graha Mitra
			Komp. Bank Of Tokyo
		Kelurahan Jatimakmur	Perum Bumi Alam Indah
			Total Kecamatan Pondok Gede
2	Kecamatan Jatiasih	Kelurahan Jatimekar	Candra Batru
			Kodau V
			Graha Indah
			Bumi Nasio Indah
			Buana Jaya
			Angkasa Puri
		Kelurahan Jatikramat	Perum Dosen IKIP
			Cahaya Kemang Permai
			Komp. Jati Agung
			Sari Gaperi
			Duta Indah
			Graha Indah
			Pam Jaya
			Angkatan Laut
			Jati Kramat Indah I
			Jati Kramat Indah II
			Wahana Intan Lestari
		Jati Indah	
		Kelurahan Jatiasih	Vila Jati sari
			Bumi Jati Asih
			Pesona Jati Asih Permai
			Mandosi Permai
			Kebantenan Indah
			Bumi Asih Indah
			Komplek Pemda

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama Permukiman
		Kelurahan Jatirasa	Jati Asih Indah
			Pondok Mitra Lestari
			Kemang IFI Graha
			Sinar Pondok Benda
			Pondok Gede Permai
Total Kecamatan Jati Asih			30
3	Kecamatan Pondok Melati	Kelurahan Jatirahayu	Perum Pondok Arta
			Perum Giya Jati Murni
			Perum PMI
			Perum Akasia
		Kelurahan Jatiwarna	Perum Candra Baru
			Perum Candra Lama
			Perum Housing Pondok Gede
			Perum Peranti
Total Kecamatan Pondok Melati			8
Total BWP Pondok Gede			50

Sumber: RP3KP Kota Bekasi Tahun 2016

- **BWP Mustikajaya (Kecamatan Bantargebang dan Kecamatan Mustikajaya)**

Permukiman formal yang terdapat di BWP Mustikajaya yang terintegrasi dengan infrastruktur jalan yang memadai dan dilengkapi oleh sarana dan prasarana pendukung perumahan.

Rumah dengan kondisi ini dapat ditemui pada lokasi seperti PERUM Zamrud, Graha Harapan Bumiyagara, Perum PLN, Perum TNI, Graha Harapan Buninagara, Perum BKKBN Pusat, Perum Dukuh Zamrud, Perum Regency, Bekasi Timur Regenci, Bumi Alam Hijau (Grand Bekasi) dan Perum Batalyon Armed.

Wilayah perencanaan merupakan wilayah yang memiliki kawasan-kawasan militer, baik berupa kantor maupun kompleks perumahannya. Contoh kompleks rumah dinas militer di Wilayah Kelurahan Cikiwul dan Kelurahan Mustika jaya adalah Komplek Batalyon ARMED dan Komplek TNI PUSKOPAD. Selain itu masih terdapat pula rumah-rumah dinas yang berlokasi di sepanjang Jalan Mustika Jaya (Legenda Raya). Setelah mengetahui jenis-jenis hunian mayoritas yang terdapat di Kawasan Mustika Jaya selanjutnya akan dibahas jumlah bangunan hunian yang ada di wilayah perencanaan. Jumlah bangunan hunian di wilayah Kecamatan Mustika Jaya lebih banyak daripada jumlah bangunan hunian di wilayah Kecamatan Bantaergebang. Sedang untuk hunian atau permukiman kumuh cenderung tersebar di wilayah Kecamatan Bantargebang dengan jumlah terbanyak di wilayah Kelurahan Ciketing Udik.

- **BWP Jatisampurna (Kecamatan Jatisampurna, Kecamatan Jatiasih dan Kecamatan Pondokmelati)**

Perkembangan permukiman dan perumahan di Kota Bekasi mengarah pada terbentuknya kawasan-kawasan permukiman baru skala besar yang dikembangkan oleh swasta, terutama di Bantargebang dan Jatisampurna, dan di kawasan sebelah utara Kota Bekasi. Permukiman di Kota Bekasi bagian selatan merupakan permukiman dengan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

kepadatan yang masih rendah. Permukiman kepadatan tinggi banyak ditemui Kecamatan Pondokgede, Pondok Melati, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Bekasi Timur dan Rawa Lumbu. Sedangkan permukiman kepadatan sedang berkembang di Jati Sampurna, dan Jati Asih. Kemudian untuk permukiman dengan kepadatan rendah berkembang di Kecamatan Bantargebang, Mustikajaya serta sebagian Jati Asih. Berdasarkan kondisi eksisting penggunaan lahan permukiman dan perumahan yang terdapat di BWP Jati Sampurna tersebar hampir di seluruh kelurahan, dimana penggunaan lahan yang paling mendominasi yaitu perumahan dan permukiman. Permukiman dan perumahan yang terdapat di BWP Jati Sampurna yaitu perumahan terstruktur dan perumahan tidak terstruktur dengan permukiman dengan tingkat kepadatan rendah. Untuk permukiman terstruktur terdapat di Kelurahan Jati karya, Kelurahan Jati Rangga dan Kelurahan Jati Melati.

2) Apartemen

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah apartemen di Kota Bekasi sampai tahun 2015 mencapai 19 apartemen dengan luas lahan 577,198 Ha, dilihat dari keberadaan apartemen yang paling banyak terdapat apartemen adalah di Kecamatan Rawalumbu 5 apartemen dengan luas 51,678 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.50
Sebaran Dan Luas Apartemen Di Kota Bekasi Sampai Tahun 2015

No	Kecamatan	No	Kelurahan	Nama Apartemen/Hotel	Luas (m2)
1	Pondok Gede	1	Jati Makmur		
		2	Jati Waringin		
		3	Jati Bening	Apartemen, Ruko dan Foodcourt "Gran Icon" Ruko dan Apartemen	7,627 6,300
		4	Jati Cempaka		
		5	Jati Bening Baru		
Jumlah					13,927
2	Jati Sampurna	1	Jati Karya		
		2	Jatisampurna		
		3	Jati Rangga		
		4	Jati Ranggon		
		5	Jati Raden		
Jumlah					
3	Pondok Melati	1	Jati Murni		
		2	Jati Melati	Mall, Hotel, Apartemen dan sarana pendukungnya	42,448
		3	Jati Warna		
		4	Jati Rahayu		
Jumlah					42,448
4	Jatiasih	1	Jati Sari		
		2	Jati Luhur		
		3	Jatirasa		
		4	Jatiasih		
		5	Jati Mekar		
		6	Jati Kramat		
Jumlah					0

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Kecamatan	No	Kelurahan	Nama Apartemen/Hotel	Luas (m2)
5	Bantargebang	1	Ciketing Udik		
		2	Sumur Batu		
		3	Cikiwul		
		4	Bantargebang		
Jumlah					0
6	Mustika Jaya	1	Pedurenan		
		2	Cimuning		
		3	Mustika Jaya		
		4	Mustika Sari		
Jumlah					0
7	Bekasi Timur	1	Margahayu	Mall, Apartemen dan Rumah Sakit	168,620
				Apartemen, Hotel dan Komersial	23,257
		2	Bekasi Jaya		
		3	Duren Jaya		
4	Aren Jaya				
Jumlah					191,877
8	Rawalumbu	1	Bojong Menteng		
		2	Bojong Rawalumbu		
		3	Sepanjang Jaya	Apartemen "Grand Pakubuwono"	1,106
				Apartemen Tamansari Iswara	9,354
				Apartemen Indigo dan fasilitasnya	13,475
				Apartemen Sutan Raya	6,419
4	Pengasinan	Apartemen "Grand Cut Meutia"	21,414		
Jumlah					51,768
9	Bekasi Selatan	1	Jaka Mulya		
		2	Jaka Setia		
		3	Pekayon Jaya	Apartemen Grand Kamala Lagoon	35,376
				Hotel Dafa Mutiara Bekasi	900
				Apartemen Metro Galaxy Park	8,368
4	Marga Jaya	Apartemen dan Pusat Perbelanjaan Thamrin District	15,375		
5	Kayuringin Jaya				
Jumlah					60,019
10	Bekasi Barat	1	Bintara Jaya		
		2	Bintara	Ruko dan Apartemen "Bintara Residence"	15,220
		3	Kranji		
		4	Kota Baru		
		5	Jaka Sampurna		
Jumlah					15,220
11	Medansatria	1	Harapan Mulya		
		2	Kali Baru		
		3	Medan Satria		
		4	Pejuang		
Jumlah					
12	Bekasi Utara	1	Harapan Jaya		
		2	Kaliabang Tengah		
		3	Perwira		
		4	Harapan Baru	Apartemen dan fasilitasnya	18,345
				Apartemen, Pertokoan dan Sentra Grosir	13,769
		5	Teluk Pucung		
6	Marga Mulya	Apartemen "The Springlake"	87,727		
		Apartemen "The Springlake 2"	82,098		
Jumlah					201,939
KOTA BEKASI					577,198

Sumber: RP3KP Kota Bekasi Tahun 2016

3. Kawasan Kumuh

Munculnya kawasan permukiman kumuh merupakan satu indikasi kegagalan program perumahan yang terlalu berpihak pada produksi rumah langsung terutama bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas, dan prioritas program perumahan pada rumah milik dan mengabaikan potensi rumah sewa. Program pemberdayaan masyarakat didalam menyediakan rumah yang layak bagi dirinya sendiri belumlah dilaksanakan dengan optimal. Konsentrasi program pemerintah pada rumah milik telah mengabaikan realitas potensi rumah sewa sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah perumahan terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah ke bawah. Disamping itu, dalam rumah kumuh mungkin juga melekat streatipe kriminalitas tinggi dan penyumbang kekacauan kota dan komunitasnya.

Kekumuhan kawasan permukiman ditinjau dari aspek fisik, yang terlihat dari:

- Ketimpangan tampilan fisik bangunan yang terjadi di kawasan studi yaitu adanya bangunan mewah atau modern di kawasan perdagangan berdampingan dengan bangunan tradisional sederhana di permukiman. Bangunan sektor formal yang berburu dengan sektor informal yang liar dan tidak tertata;
- Munculnya bangunan-bangunan tidak permanen baru di badan jalan maupun di trotoar yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan kenyamanan pengguna jalan,
- Pemanfaatan daerah sungai oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi, yang menjadikan terganggunya fungsi sungai secara maksimal.
- Tidak adanya jarak antar bangunan yang mengakibatkan rumah menjadi tidak sehat.
- Kumuhnya permukiman akibat aktivitas kawasan yang terlalu berlebihan, sehingga menyebabkan lingkungan hunian menjadi tidak sehat dan tidak nyaman untuk ditinggali.
- Tidak berfungsinya saluran drainase kota di kawasan tersebut secara optimal.
- Sampah dan limbah akibat aktivitas warga yang tidak dikelola dengan baik, sehingga menyebabkan pemandangan yang kotor.
- Kurangnya sarana prasarana juga kurang terpeliharanya sarana prasarana (jalan lingkungan, tempat sampah, MCK umum).
- Terlalu padatnya jumlah penduduk, yang kurang seimbang dengan daya tampung ruang hunian dan penataan ruang yang kurang tepat.

Berdasarkan RP2KPKP Kota Bekasi maka :

- Pada tahun 2019, sisa lokasi dan luas kumuh di Kota Bekasi sebesar 287,2 ha dengan 108 titik kumuh yang tersebar di 42 kelurahan
- Berdasarkan hasil perhitungan GIS dan verifikasi lapangan Kelurahan Kaliabang Tengah memiliki Kawasan kumuh sebesar 20,85 ha.
- 14 kelurahan (96 titik) yang sudah tidak memiliki lokasi kumuh (Kelurahan Pejuang, Medan Satria, Harapan Mulya, Kalibaru, Margamulya, Bintara Jaya, Kranji, Kayuringin, Jakamulya, Jatiwarna, Jatirasa, Jatimekar, Jatisari, Jatiluhur).

Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran Kawasan kumuh di Kota Bekasi dapat dilihat pada table di bawah ini.

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Tabel 3.51
Sebaran Kawasan Kumuh di Kota Bekasi Tahun 2019

Kecamatan	Kelurahan	lokasi SK KUMUH	Luas (Ha)	Total Luasan Kumuh per kelurahan (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh Per tahun (Ha)		Hasil Pengurangan Kawasan Kumuh	Hasil Pengurangan Kumuh Per Kecamatan	Pengurangan kawasan kumuh Hasil Kolaborasi APBD /Target 2019	Sisa Kawasan Kumuh 2019	
					2017	2018					
Medan Satria	Pejuang	RT 004-RW001	2,3	2,3	2,3		0	15,27	0,00	0,00	
						TOTAL	0		0,00	0,00	
	Medan Satria	RT 003-RW007	3	3	3		0		0,00	0,00	
							TOTAL		0	0,00	0,00
		Harapan mulya	RT001-RW003	1,99	14,54		1,99		0	0,00	0,00
			RT001-RW007	1,19			1,19		0	1,19	0,00
			RT002-RW003	1,2			1,2		0	0	0,00
			RT002-RW007	2,89			2,89		0	2,89	0,00
			RT003-RW003	2,49			2,49		0	0	0,00
			RT004-RW007	1,3			1,3		0	1,30	0,00
			RT005-RW002	1,29			1,29		0	1,29	0,00
			2,19		2,19	0	0		0,00		
							TOTAL		6,67	6,67	0,00
		Kalibaru	RT001-RW003	1,6	43	1,6			0	0,00	0,00
			RT001-RW005	1,6			1,6		0	0	0,00
			RT001-RW007	4,2			4,2		0	0	0,00
			RT001-RW008	4,3			4,3		0	0	0,00
			RT002-RW004	1,2			1,2		0	0	0,00
			RT002-RW005	1,8			1,8		0	0	0,00
			RT002-RW007	2,5			2,5		0	2,50	0,00
			RT002-RW008	3,6			3,6		0	0	0,00
			RT003-RW004	3,2			3,2		0	0	0,00
			RT003-RW005	3,2			3,2		0	3,20	0,00
			RT003-RW007	3,6			3,6		0	0	0,00
			RT003-RW008	2,7			2,7		0	0	0,00
			RT004-RW005	1,7			1,7		0	1,70	0,00
			RT004-RW007	1,7			1,7		0	0	0,00
		RT004-RW008	3,1		3,1	0	0		0,00		
		RT005-RW005	1,2		1,2	0	1,20		0,00		
		RT009-RW003	1,8		1,8	0	0		0,00		
							TOTAL		8,6	8,60	0,00
	Bekasi Utara	Kaliabang Tengah	RT001-RW006	3,11	20,85		3,11		0	0	3,11
			RT002-RW006	2,60			2,60		0	0	2,60
RT004-RW006			2,19			2,19	0	0	2,19		
RT005-RW006			6,58			6,58	0	0	6,58		
RT010-RW006			2,72			2,72	0	0	2,72		
RT011-RW006			3,63			3,63	0	0	3,63		
							TOTAL	20,85	0	20,85	
Harapan Jaya		RT001-RW016	1,5	14,2		1,5	0	0	0		
		RT002-RW016	1,4			1,4	0	0	1,4		
		RT003-RW016	1,4			1,4	0	0	0		
		RT004-RW016	1,1			1,1	0	0	0		
		RT005-RW016	1,2			1,2	0	0	0		
		RT006-RW016	1,3			1,3	0	0	1,3		
		RT007-RW016	1,1			1,1	0	0	1,1		
		RT002-RW018	1,2			1,2	0	0	1,2		
		RT003-RW018	1,5			1,5	0	0	1,5		
		RT004-RW018	1,1			1,1	0	0	1,1		
RT005-RW018		1,4		1,4	0	0	1,4				
							TOTAL	9	0	9	
Perwira		RT001-RW001	0,53	7,09		0,53	0	0,53	0		
		RT002-RW001	0,4			0,4	0	0,4	0		

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Kecamatan	Kelurahan	Iokasi SK KUMUH	Luas (Ha)	Total Luasan Kumuh per kelurahan (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh Per tahun (Ha)		Hasil Pengurangan Kawasan Kumuh	Hasil Pengurangan Kumuh Per Kecamatan	Pengurangan kawasan kumuh Hasil Kolaborasi APBD /Target 2019	Sisa Kawasan Kumuh 2019	
					2017	2018					
Bekasi Barat		RT003-RW001	0,55				0,55		0,55	0	
		RT004-RW001	0,67				0,67		0,67	0	
		RT002-RW004	2,37		2,37		0		0	0	
		RT003-RW007	1,45				1,45		0	1,45	
		RT004-RW007	1,12				1,12		0	1,12	
						TOTAL	4,72		2,15	2,57	
	Margamulya	RT001-RW001	2,32	9,28			2,32		2,32	0	
		RT002-RW001	2,32				2,32		0		
		RT004-RW001	2,32			2,32	0		0		
		RT005-RW001	2,32			2,32	0		0		
						TOTAL	4,64		4,64	0	
	Teluk Pucung	RT001-RW001	1,7	20,88			1,7		0	1,7	
		RT002-RW001	1,6				1,6		0	1,6	
		RT003-RW001	2,07				2,07		0	2,07	
		RT001-RW004	1,95				1,95		0	1,95	
		RT002-RW004	1,5				1,5		0	1,5	
		RT001-RW004	1,6				1,6		0	1,6	
		RT008-RW004	2,3				2,3		0	2,3	
		RT003-RW002	2,49				2,49		0	2,49	
		RT002-RW003	2				2		0	2	
		RT004-RW023	1,02				1,02		0	1,02	
		RT005-RW023	1,25				1,25		0	1,25	
		RT007-RW023	1,4				1,4		0	1,4	
							TOTAL		20,88	0	20,88
	Harapan Baru	RT001-RW008	0,7	4,36			0,7		0,7	0	
		RT002-RW008	1,83				1,83		0	1,83	
		RT003-RW008	1,46				1,46		0	1,46	
RT004-RW008		0,37				0,37	0		0,37		
					TOTAL	4,36	1,07		3,29		
Bekasi Barat	Kota Baru	RT004-RW001	1,83	2,3			1,83	5,43	0	1,83	
		RT002-RW010	0,47		0,47		0		0		
						TOTAL	1,83		0	1,83	
	Bintara Jaya	RT001-RW010	1,1	2,12		1,1			0	0	
		RT009-RW010	1,02		1,02		0		0		
						TOTAL	0		0	0	
	Kranji	RT003-RW001	1,14	5,68		1,14			0	0	
		RT001-RW004	2,2			2,2			0	0	
		RT002-RW004	1,1			1,1			0	0	
		RT003-RW004	1,24			1,24			0	0	
						TOTAL	0		0	0	
	Bintara	RT007-RW004	2,5	2,5	1	1,5			0	1,5	
						TOTAL	1,5		0	1,5	
	Jakasampurna	RT011-RW002	1,1	3,2		1,1			0	0	
RT002-RW003		0,9			0,9		0,9	0			
RT008-RW011		1,2			1,2		0	1,2			
					TOTAL	2,1	0,9	1,2			
Bekasi Timur	Duren Jaya	RT002-RW006	0,78	3,85			0,78	24,78	0,78	0	
		RT004-RW006	0,33				0,33		0,33	0	
		RT003-RW016	1,72				1,72		0	1,72	
		RT002-RW016	1,02				1,02		0	1,02	
						TOTAL	3,85		1,11	2,74	
	Aren Jaya	RT004-RW012	2,18	8,06			2,18			0	2,18
		RT005-RW012	3,88				3,88			0	3,88
		RT007-RW012	2				2			0	2
					TOTAL	8,06	0	8,06			

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Kecamatan	Kelurahan	lokasi SK KUMUH	Luas (Ha)	Total Luasan Kumuh per kelurahan (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh Per tahun (Ha)		Hasil Pengurangan Kawasan Kumuh	Hasil Pengurangan Kumuh Per Kecamatan	Pengurangan kawasan kumuh Hasil Kolaborasi APBD /Target 2019	Sisa Kawasan Kumuh 2019
					2017	2018				
Bekasi Jaya		RT001-RW001	2,5	21,4		2,5	0		0	0
		RT004-RW007	2,4			2,4	0		2,4	
		RT005-RW007	2,37			2,37	0		2,37	
		RT006-RW007	2,1			2,1	0		2,1	
		RT010-RW007	1,75			1,75	0		0	
		RT001-RW008	2,3			2,3	0		0	
		RT002-RW008	1,71			1,71	0		0	
		RT003-RW008	1,8			1,8	0		0	
		RT004-RW008	1,96			1,96	0		0	
		RT006-RW008	2,51			2,51	0		0	
					TOTAL	6,87	0	6,87		
	Margahayu	RT001-RW005	2,5	28,79		2,5	0	0	0	
		RT001-RW009	3,4			3,4	0	0		
		RT002-RW005	2,37			2,37	0	0		
		RT002-RW009	3,1			3,1	0	3,1		
		RT003-RW005	2,75		2,75	0	0			
		RT003-RW009	3,3			3,3	0	0		
		RT004-RW005	2,71			2,71	0	0		
		RT004-RW009	2,8			2,8	0	0		
RT005-RW005		2,96			2,96	0	0			
RT005-RW009	2,9		2,9	0	2,9					
				TOTAL	6	0	6			
Bekasi Selatan	Kayuringin	RT001-RW024	2,62	2,62		2,62	0	0	0	
					TOTAL	0	0	0		
	Margajaya	RT003-RW001	0,24	7,09		0,24	0,24	0	0,24	0
		RT004-RW001	5,73			5,73	0	5,73		
		RT005-RW001	1,12			1,12	0	1,12		
					TOTAL	7,09	0,24	6,85		
	Pekayon	RT004-RW002	2,06	4,33		2,06	0	0	0	2,06
		RT005-RW026	2,27		2,27	0	0			
					TOTAL	2,06	0	2,06		
	Jakasetia	RT001-RW003	1	4,45	1	0	0	0	0	0
RT003-RW002		3,45			3,45	0	3,45			
				TOTAL	3,45	0	3,45			
Jakamulya	RT004-RW003	1,49	1,49	1,49	0	0	0	0		
				TOTAL	0	0	0			
Rawalumbu	Sepanjangjaya	RT001-RW004	3,19	11,19		3,19	0	0	3,19	
		RT004-RW004	4			4	0	4		
		RT005-RW004	4			4	0	4		
					TOTAL	11,19	0	11,19		
	Pengasinan	RT002-RW027	3,12	3,12		3,12	0	0	3,12	
				TOTAL	3,12	0	3,12			
Bojong Rawalumbu	RT002-RW001	2,95	2,95		2,95	0	0	2,95		
				TOTAL	2,95	0	2,95			
Bojong Menteng	RT004-RW005	4,6	4,6		4,6	0	0	4,6		
				TOTAL	4,6	0	4,6			
Pondok Gede	Jatiwaringin	RT001-RW015	1,99	1,99		1,99	0	0	1,99	
					TOTAL	1,99	0	1,99		
	Jatibening	RT004-RW002	1,35	7,97		1,35	0	0	1,35	
		RT003-RW002	1,27			1,27	0	1,27		
		RT002-RW002	1,19			1,19	0	1,19		
		RT001-RW002	1,1			1,1	0	1,1		
		RT003-RW014	1,5			1,5	0	1,5		
RT005-RW014	1,56		1,56	0	1,56					
				TOTAL	7,97	0	7,97			

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Kecamatan	Kelurahan	Iokasi SK KUMUH	Luas (Ha)	Total Luasan Kumuh per kelurahan (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh Per tahun (Ha)		Hasil Pengurangan Kawasan Kumuh	Hasil Pengurangan Kumuh Per Kecamatan	Pengurangan kawasan kumuh Hasil Kolaborasi APBD /Target 2019	Sisa Kawasan Kumuh 2019
					2017	2018				
Jatimakmur	Jatimakmur	RT004-RW011	1,59	3,4			1,59	9,92	0	1,59
		RT007-RW011	1,81				1,81		0	1,81
						TOTAL	3,4		0	3,4
	Jatibening Baru	RT006-RW003	1,84	4,73			1,84		0	1,84
		RT006-RW004	1,25				1,25		0	1,25
		RT006-RW008	1,64				1,64		0	1,64
						TOTAL	4,73		0	4,73
	Jaticempaka	RT009-RW003	1,45	1,45			1,45		0	1,45
						TOTAL	1,45		0	1,45
Pondok Melati	Jatirahayu	RT002-RW023	1	3,22			1	0	1	
		RT002-RW011	1,11				1,11	0	1,11	
		RT001-RW002	1,11				1,11	0	1,11	
						TOTAL	3,22	0	3,22	
	Jatiwarna	RT001-RW001	0,58	0,58			0,58	0,58	0	
						TOTAL	0,58	0,58	0	
	Jatimurni	RT004-RW005	1,2	2,4			1,2	0	1,2	
		RT004-RW006	1,2				1,2	0	1,2	
						TOTAL	2,4	0	2,4	
	Jatimelati	RT006-RW005	2,41	3,72			2,41	0	2,41	
		RT001-RW006	1,31				1,31	0	1,31	
						TOTAL	3,72	0	3,72	
Jatiasih	Jatiasih	RT002-RW004	3	3			3	0,00	3,00	
						TOTAL	3	0,00	3,00	
	Jatikramat	RT005-RW009	2,84	5,62			2,84	0,00	2,84	
		RT002-RW004	2,78		2,78		0	0,00	0,00	
						TOTAL	2,84	0,00	2,84	
	Jatirasa	RT004-RW005	1,58	1,58	1,58		0	0,00	0,00	
						TOTAL	0	0,00	0,00	
	Jatimekar	RT005-RW011	1,52	1,52	1,52		0	0,00	0,00	
						TOTAL	0	0,00	0,00	
	Jatisari	Jatisari	RT001-RW007	1,2	14,96			1,2	0,00	0,00
			RT002-RW007	1,3				1,3	0	0,00
			RT004-RW007	1,2				1,2	0	0,00
			RT007-RW007	1,23				1,23	0	0,00
			RT001-RW006	3,5				3,5	0	0,00
			RT006-RW006	1,87				1,87	0	0,00
RT001-RW003			1,2				1,2	0	0,00	
RT004-RW003			1,11				1,11	0	0,00	
RT005-RW003			0,25				0,25	0	0,00	
RT003-RW003	2,1			2,1	0	0,00				
					TOTAL	10,03	10,03	0,00		
Jatiluhur	RT008-RW003	3,1	3,1	3,1		0	0,00	0,00		
					TOTAL	0	0,00	0,00		
Jatisampurna	Jatiranggon	RT002-RW002	0,5	4,2			0,5	0,5	0	
		RT005-RW002	0,5				0,5	0	0	
		RT007-RW004	1,8				1,8	0	1,8	
		RT001-RW006	0,7				0,7	0	0	
		RT004-RW006	0,7				0,7	0	0	
						TOTAL	4,2	2,4	1,8	
	Jatiraden	RT004-RW005	1,62	5,9			1,62	0	1,62	
		RT005-RW009	1,47				1,47	0	1,47	
		RT001-RW010	1,81				1,81	0	1,81	
		RT001-RW004	0,5				0,5	0,5	0	
		RT002-RW004	0,5				0,5	0,5	0	
						TOTAL	5,9	1	4,9	

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

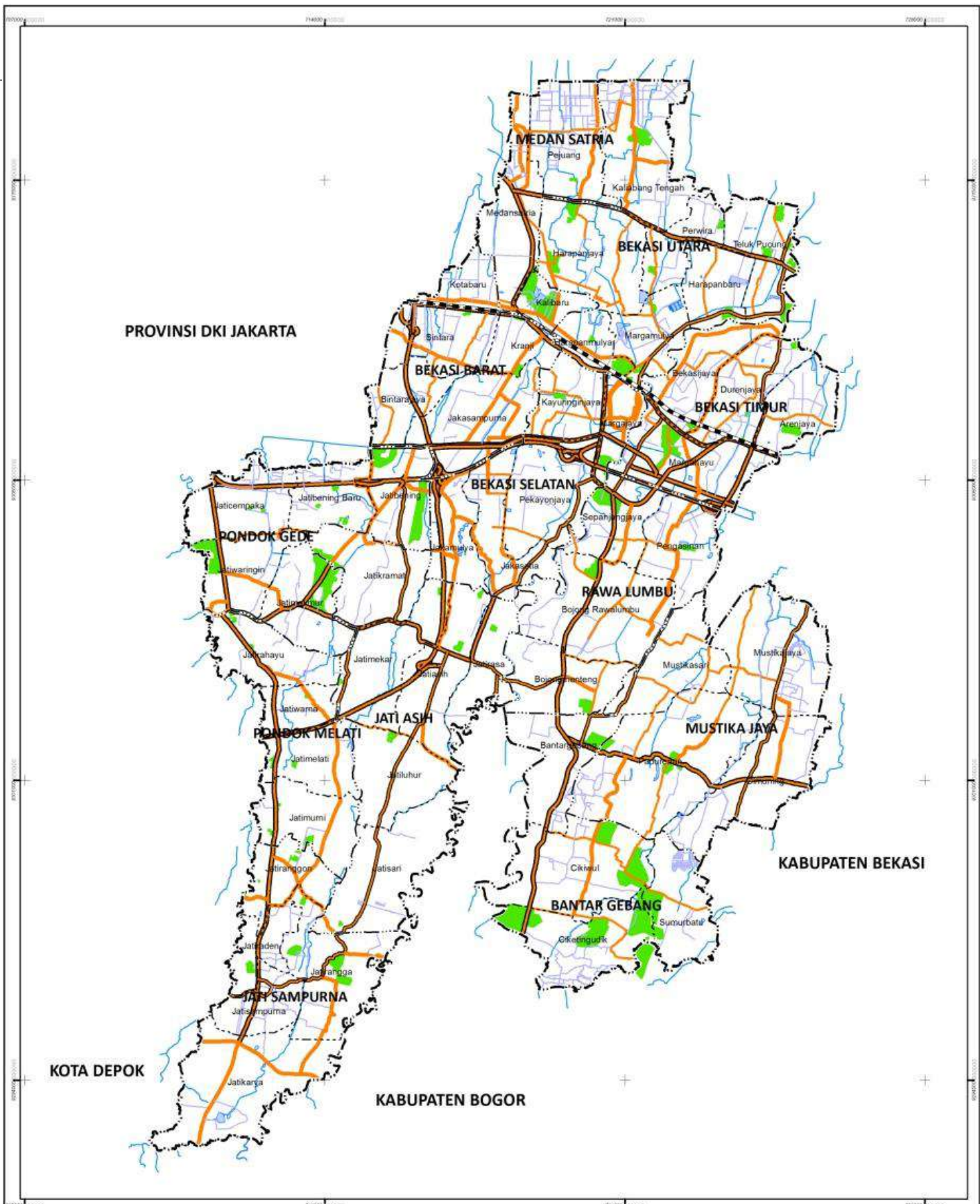
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Kecamatan	Kelurahan	Iokasi SK KUMUH	Luas (Ha)	Total Luasan Kumuh per kelurahan (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh Per tahun (Ha)		Hasil Pengurangan Kawasan Kumuh	Hasil Pengurangan Kumuh Per Kecamatan	Pengurangan kawasan kumuh Hasil Kolaborasi APBD /Target 2019	Sisa Kawasan Kumuh 2019
					2017	2018				
Jatisampurna	Jatisampurna	RT001-RW006	2,2	5,84			2,2	29,4	0	2,2
		RT001-RW007	2,21				2,21		0	2,21
		RT002-RW009	1,43				1,43		0	1,43
						TOTAL	5,84		0	5,84
	Jatirangga	RT001-RW009	5,6	16			5,6		0	5,6
		RT002-RW009	5,44				5,44		0	5,44
		RT003-RW009	4,96				4,96		0	4,96
						TOTAL	16		0	16
	Jatikarya	RT002-RW001	0,6	3,98			0,6		0,6	0
		RT001-RW006	0,6				0,6		0	0
		RT002-RW008	1,53				1,53		0	1,53
		RT002-RW005	1,25				1,25		0	1,25
					TOTAL	3,98	1,2	2,78		
Mustikajaya	Padurenan	RT003-RW007	3,54	11,25			3,54	29,4	0	3,54
		RT001-RW005	3,61				3,61		0	3,61
		RT002-RW007	4,1				4,1		0	4,1
						TOTAL	11,25		0	11,25
	Mustikajaya	RT004-RW012	3,12	3,12			3,12		0	3,12
						TOTAL	3,12		0	3,12
	Cimuning	RT001-RW006	2,65	12,35			2,65		0	2,65
		RT003-RW006	4,1				4,1		0	4,1
		RT002-RW004	3,88				3,88		0	3,88
							1,72		0	1,72
					TOTAL	12,35	0	12,35		
Mustikasari	RT002-RW003	2,68	2,68			2,68	0	2,68		
					TOTAL	2,68	0	2,68		
Bantar Gebang	Sumur Batu	RT001-RW001	6	40,24			6	72,75	0	6
		RT002-RW001	10,78				10,78		0	10,78
		RT003-RW001	9,86				9,86		0	9,86
		RT003-RW003	6,76				6,76		0	6,76
		RT004-RW003	6,84				6,84		0	6,84
						TOTAL	40,24		0	40,24
	Ciketing Udik	RT001-RW001	2,97	25,39			2,97		0	2,97
		RT002-RW001	3,1				3,1		0	3,1
		RT003-RW001	5,49				5,49		0	5,49
		RT001-RW004	3,64				3,64		0	3,64
		RT002-RW004	6,41				6,41		0	6,41
							3,78		0	3,78
						TOTAL	25,39		0	25,39
	Cikiwul	RT001-RW003	4,62	4,62			4,62		0	4,62
					TOTAL	4,62	0	4,62		
Bantargebang	RT003-RW003	2,5	2,5			2,5	0	2,5		
					TOTAL	2,5	0	2,5		
Jumlah (Berdasarkan Hasil koreksi perhitungan, hasil analisis)			456,55	456,55	46,46	82,3	327,79	327,79	40,59	287,2
JUMLAH LUASAN KUMUH BERDASARKAN SK KUMUH			443	443	46,46	82,3	314,24	40,59	273,65	

Sumber: RP2KPKP Kota Bekasi, Tahun 2019

Kef :

- Penangan berdasarkan APBD tahun 2017 dan 2018
- Pengangan Kumuh Disperkimtan Tahun 2019
- Program Kotaku
- Rencana Kerja Disperkimtan sampai dengan Tahun 2020
- Ada Penanganan P2BK Tahun 2017



P E M E R I N T A H K O T A B E K A S I

PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) DAYADUKUNG LINGKUNGAN TERHADAP REVISI KEBIJAKAN RENCANA PROGRAM RTRW 2011-2031

Gambar 3.20
Peta Kawasan Kumuh Kota Bekasi

U
0 0.75 1.5 3 Kilometers

Proyeksi: UTM
 Sistem grid: UTM
 Datum: WGS 1984
 Datum vertikal: MSL
 Satuan tinggi: Meter
 Zone UTM: 48 S
 Datum: WGS 1984
 Sistem koordinat: UTM
 Datum: WGS 1984
 Satuan: Meter
 Zone: 48 S

- LEGENDA**
- ADMINISTRASI**
- ⊙ Ibukota Kabupaten
 - Ibukota Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Perairan 4 mil
- PERAIRAN**
- Sungai
 - Danau
- SISTEM LABINGAN PRASARANA**
- Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Jal Kereta Api
- TOPOGRAFI**
- Garis Kontur Index
 - Garis Kontur Selang
 - Kawasan Kumuh



Sumber Data:
 - Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia 2010 Skala 1 : 25.000, Bekerjasama
 - Badan Administrasi/Updating Tahun 2021
 - RTRW Kota Bekasi

P E M E R I N T A H K O T A B E K A S I

3.6 KONDISI LINGKUNGAN HIDUP

3.6.1 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Sesuai dengan enam muatan kondisi lingkungan hidup dalam KLHS seperti tertuang dalam PP RI No. 46 tahun 2016, menunjukkan status lingkungan hidup Kota Bekasi saat ini. Potensi dan permasalahan lingkungan hidup tersebut menjadi rujukan dalam merumuskan isu strategis di Kota Bekasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup disebutkan bahwa dalam penataan ruang wilayah Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Besarnya kapasitas tersebut di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumberdaya yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan. Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai.

Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu kapasitas penyediaan (*supportive capacity*) dan kapasitas tampung limbah (*assimilative capacity*). Dalam pedoman ini, telaahan daya dukung lingkungan hidup terbatas pada kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air dalam suatu ruang/wilayah.

Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air di suatu wilayah menentukan keadaan surplus atau defisit dari lahan dan air untuk mendukung kegiatan pemanfaatan ruang.

Hasil penentuan daya dukung lingkungan hidup dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah. Mengingat daya dukung lingkungan hidup tidak dapat dibatasi berdasarkan batas wilayah administratif, penerapan rencana tata ruang harus memperhatikan aspek keterkaitan ekologis, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang, serta dalam pengelolaannya memperhatikan kerja sama antar daerah.

Kapasitas daya tampung lingkungan hidup meliputi daya tampung lahan yang dituangkan dalam bentuk kemampuan lahan dan daya tampung air yang dituangkan dalam bentuk sebaran kualitas air. Sedangkan daya dukung lingkungan hidup meliputi daya dukung pangan, air dan lahan.

3.6.1.1 Daya Dukung Air

Air adalah sebuah sumber yang secara alami mengikuti siklus hidrologi, yang pada dasarnya merupakan proses yang berkesinambungan dengan tanpa awal dan akhir yang dapat digambarkan sebagai sebuah sistem. *International Glossary of Hidrology*, 1974 dalam Asdak (2004), hidrologi adalah ilmu yang berkaitan dengan air bumi, terjadinya peredaran dan agihannya, sifat-sifat kimia dan fisiknya, dan reaksi dengan lingkungannya, termasuk hubungannya dengan makhluk hidup. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dan di dalamnya terjadi berbagai proses secara kontinyu (Chow et.al., 1988).

Air secara alami mengalir dari hulu ke hilir, dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah. Air mengalir di atas permukaan tanah namun air juga mengalir di dalam tanah. Air juga dapat berubah wujud, dapat berupa zat cair sesuai dengan nama atau sebutannya "air", dapat berupa benda padat yang disebut "es", dan dapat pula berupa gas yang dikenal dengan nama "uap air". Perubahan fisik bentuk air ini tergantung dari lokasi dan kondisi alam.

Ketika dipanaskan sampai 100°C maka air berubah menjadi uap dan pada suhu tertentu uap air berubah kembali menjadi air. Pada suhu yang dingin di bawah 0°C air berubah menjadi benda padat yang disebut es atau salju. Air dapat juga berupa air tawar (*fresh water*) dan dapat pula berupa air asin (air laut) yang merupakan bagian terbesar di bumi ini. Di dalam lingkungan alam proses, perubahan wujud, gerakan aliran air (di permukaan tanah, di dalam tanah dan di udara) dan jenis air mengikuti suatu siklus keseimbangan dan dikenal dengan istilah siklus hidrologi.

Siklus hidrologi dimulai dengan penguapan air dari laut. Uap yang dihasilkan dibawa oleh udara yang bergerak. Dalam kondisi yang memungkinkan, uap tersebut terkondensasi membentuk awan, pada akhirnya dapat menghasilkan presipitasi. Presipitasi jatuh ke bumi menyebar dengan arah yang berbeda-beda dalam beberapa cara. Sebagian besar dari presipitasi tersebut sementara tertahan pada tanah di dekat tempat ia jatuh, dan akhirnya dikembalikan lagi ke atmosfer oleh penguapan (*evaporasi*) dan pemeluhan (*transpirasi*) oleh tanaman.

Sebagian air mencari jalannya sendiri melalui permukaan dan bagian atas tanah menuju sungai, sementara lainnya menembus masuk lebih jauh ke dalam tanah menjadi bagian dari air tanah (*groundwater*). Di bawah pengaruh gaya gravitasi, baik aliran air permukaan (*surface streamflow*) maupun air dalam tanah bergerak ke tempat yang lebih rendah yang dapat mengalir ke laut. Namun, sejumlah besar air permukaan dan air bawah tanah dikembalikan ke atmosfer oleh penguapan dan pemeluhan (*transpirasi*) sebelum sampai ke laut (Linsley, 1996).

Ketersediaan Air

Ketersediaan air yang merupakan bagian dari fenomena alam, sering sulit untuk diatur dan diprediksi dengan akurat. Hal ini karena ketersediaan air mengandung unsur variabilitas ruang (*spatial variability*) dan variabilitas waktu (*temporal variability*) yang sangat tinggi. Mengingat daya dukung lingkungan hidup tidak

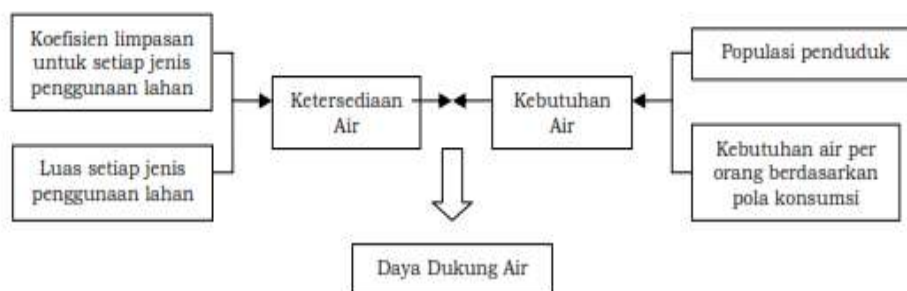
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

dapat dibatasi berdasarkan batas wilayah administratif, penerapan rencana tata ruang harus memperhatikan aspek keterkaitan ekologis, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang, serta dalam pengelolaannya memperhatikan kerja sama antar daerah.

Metode penghitungan daya dukung air disuatu wilayah, dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan akan sumber daya air bagi penduduk yang hidup di wilayah itu. Dengan metode ini, dapat diketahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air di suatu wilayah tercukupi, sedangkan keadaan defisit menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan airnya.

Guna memenuhi kebutuhan air, fungsi lingkungan yang terkait dengan sistem tata air harus dilestarikan. Hasil perhitungan dengan metode ini dapat dijadikan bahan masukan/pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyediaan sumber daya air yang berkelanjutan. Penentuan daya dukung air dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air dengan mengacu pada Permen LH RI Nomor 17 Tahun 2009, seperti pada gambar dibawah ini.



Ketersediaan air ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konversi terhadap kebutuhan hidup layak.

Rumus:

$$C = \sum (c_i \times A_i) / \sum A_i$$

$$R = \sum R_i / m$$

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

Keterangan:

SA = ketersediaan air (m^3 /tahun)

C = koefisien limpasan tertimbang

C_i = Koefisien limpasan penggunaan lahan i

A_i = luas penggunaan lahan i (ha) dari data BPS atau Daerah Dalam Angka

R = rata-rata curah hujan tahunan wilayah (mm/tahunan) dari data BPS atau BMG atau dinas terkait

R_i = curah hujan tahunan pada stasiun i

m = jumlah stasiun pengamatan curah hujan

A = luas wilayah (ha)

10 = faktor konversi dari mm.ha menjadi m^3

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Tabel 3.52
Koefisien Limpasan

No	Deskripsi Permukaan	Ci
1	Kota, jalan aspal, atap genteng	0,7-0,9
2	Kawasan industri	0,5-0,9
3	Permukaan multi unit, pertokoan	0,6-0,7
4	Komplek Perumahan	0,4-0,6
5	Villa	0,3-0,5
6	Taman, Pamakaman	0,1-0,3
7	Pekarangan tanah berat:	
	a. >7 %	0,25-0,35
	b. 2-7 %	0,18-0,22
	c. < 2%	0,13-0,17
8	Pekarangan tanah ringan	
	a. >7 %	0,15-0,2
	b. 2-7 %	0,10-0,15
	c. < 2%	0,05-0,10
9	Lahan berat	0,40
10	Padang rumput	0,35
11	Lahan budidaya pertanian	0,30
12	Hutan produksi	0,18

Sumber: Permen LH 17/2009

Berdasarkan dari data curah hujan tahunan di Kota Bekasi yaitu sebesar 2.723 mm/tahun (Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2018). Dari nilai curah hujan maka dengan menggunakan pendekatan *water balance* dapat dihitung potensi ketersediaan air di Kota Bekasi untuk kondisi eksisting (tahun 2017). Perhitungan dari potensi ketersediaan air di Kota Bekasi berdasarkan tata guna lahan eksisting tahun 2017. Dari data luasan tutupan lahan di Kota Bekasi tersebut maka tutupan lahan paling luas adalah permukiman dan pusat kegiatan.

Hal ini memperlihatkan bahwa Kota Bekasi menjadi pusat kegiatan perkotaan dan permukiman penduduk. Untuk hasil perhitungan potensi sumber daya air di Kota Bekasi dengan menggunakan rumus neraca air konvensional dimana terdapat pengaruh dari jenis tutupan lahan terhadap infiltrasi maupun *run off*, maka secara lengkap disajikan neraca air per jenis penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.53
Potensi Ketersediaan Air di Kota Bekasi Menurut Luasan Eksisting

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luasan (km ²)	Luasan (m ²)	Nilai C*	IK	R (L/detik)	I (L/detik)
1	Danau/Situ	0,15	145.516	0	1	-	23,87
2	Gedung/Bangunan	1,00	995.896	0,65	0,35	106,19	57,18
3	Perkebunan/Kebun	20,88	20.880.408	0,3	0,7	1.027,53	2.397,58
4	Permukiman dan Tempat Kegiatan	121,05	121.052.858	0,65	0,35	12.906,97	6.949,91
5	Sawah	26,47	26.471.763	0,1	0,9	434,23	3.908,06
6	Sawah Tadah hujan	0,10	95.846	0,1	0,9	1,57	14,15
7	Semak Belukar	1,72	1.723.366	0,25	0,75	70,67	212,02
8	Tanah Kosong	26,40	26.397.831	0,35	0,65	1.515,56	2.814,61
9	Tegalan/Ladang	14,31	14.307.343	0,2	0,8	469,38	1.877,52
10	Vegetasi Non Budidaya Lainnya	0,07	70.704	0,2	0,8	2,32	9,28
TOTAL		212,14	212.141.530	2,80	7,20	16.534,4	18.264,2

Sumber: Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2018

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Tabel 3.54
Potensi Ketersediaan Air di Kota Bekasi Menurut Luasan Rencana Pola Ruang

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luasan (km ²)	Luasan (m ²)	Nilai C*	IK	R (L/detik)	I (L/detik)
1	Campuran	15,90	15.896.874	0,2	0,8	521,53	2.086,11
2	Danau	0,21	209.047	0	1	-	34,29
3	Gardu Induk	0,15	152.054	0,65	0,35	16,21	8,73
4	Industri Besar	9,27	9.274.009	0,9	0,1	1.369,13	152,13
5	Industri Kecil	0,09	89.297	0,5	0,5	7,32	7,32
6	Industri Menengah	4,20	4.200.244	0,7	0,3	482,29	206,70
7	IPAL	0,12	122.676	0	1	-	20,12
8	IPLB3	0,03	29.247	0	1	-	4,80
9	Jalan Arteri Primer	1,02	1.022.925	0,85	0,15	142,63	25,17
10	Jalan Arteri Sekunder	0,25	254.855	0,85	0,15	35,53	6,27
11	Jalan Baru	0,37	370.936	0,85	0,15	51,72	9,13
12	Jalan Kereta	0,08	78.994	0,85	0,15	11,01	1,94
13	Jalan Kolektor Primer	0,45	451.555	0,85	0,15	62,96	11,11
14	Jalan Kolektor Sekunder	0,21	211.823	0,85	0,15	29,53	5,21
15	Jalan Lokal	14,64	14.640.362	0,85	0,15	2.041,30	360,23
16	Jalan Tol	1,70	1.701.082	0,85	0,15	237,18	41,86
17	Kawasan Lindung Cagar Budaya	0,01	14.256	0,65	0,35	1,52	0,82
18	Komersial Skala Kawasan	9,63	9.628.952	0,65	0,35	1.026,66	552,82
19	Komersial Skala Kecamatan	0,72	723.444	0,65	0,35	77,14	41,53
20	Komersial Skala Regional/Kota	8,10	8.102.184	0,65	0,35	863,88	465,16
21	Pelebaran Jalan	1,46	1.457.169	0,85	0,15	203,17	35,85
22	Perkantoran Pemerintah	0,73	727.401	0,65	0,35	77,56	41,76
23	Pertahanan dan Keamanan	0,77	771.905	0,65	0,35	82,30	44,32
24	Pertambangan	0,04	39.394	0,65	0,35	4,20	2,26
25	Perumahan Kepadatan Rendah	13,65	13.645.800	0,4	0,6	895,35	1.343,03
26	Perumahan Kepadatan Sedang	34,75	34.748.301	0,5	0,5	2.849,96	2.849,96
27	Perumahan Kepadatan Tinggi	68,63	68.632.807	0,6	0,4	6.754,90	4.503,27
28	PerumahanRTH Jalur Hijau Kepadatan Tinggi	0,00	238	0,6	0,4	0,02	0,02
29	PerumahanRTH Jalur Hijau Kepadatan Tinggi	0,00	778	0,6	0,4	0,08	0,05
30	RTH Jalur Hijau	1,13	1.134.496	0,15	0,85	27,91	158,18
31	RTH Pulau Jalan	0,00	164	0,15	0,85	0,00	0,02
32	RTH Kota	2,80	2.801.704	0,15	0,85	68,94	390,64
33	RTH Rekreasi	0,00	1.023	0,15	0,85	0,03	0,14
34	RTH Sabuk Hijau (Buffer)	0,33	332.946	0,15	0,85	8,19	46,42
35	RTH Taman Kecamatan	1,18	1.175.797	0,15	0,85	28,93	163,94
36	RTH Taman Kelurahan	0,69	689.062	0,15	0,85	16,95	96,08
37	Sarana Kesehatan	0,06	57.679	0,65	0,35	6,15	3,31
38	Sarana Pendidikan	2,08	2.077.803	0,65	0,35	221,54	119,29
39	Sarana Peribadatan	0,48	484.601	0,65	0,35	51,67	27,82
40	Sarana Rekreasi dan Olahraga	0,41	409.818	0,65	0,35	43,70	23,53
41	Sarana Sosial dan Budaya	0,02	23.414	0,65	0,35	2,50	1,34

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luasan (km2)	Luasan (m2)	Nilai C*	IK	R (L/detik)	I (L/detik)
42	Sarana Transportasi	0,14	144.607	0,65	0,35	15,42	8,30
43	Sempadan Jalan Kereta	0,32	317.856	0,35	0,65	18,25	33,89
44	Sempadan Situ/Danau	0,11	109.314	0,35	0,65	6,28	11,66
45	Sempadan Sungai	4,96	4.957.100	0,35	0,65	284,60	528,54
46	Sempadan SUTET	1,87	1.870.803	0,35	0,65	107,41	199,47
47	Situ	0,24	238.955	0	1	-	39,20
48	Sungai dan Saluran	2,33	2.331.922	0	1	-	382,52
49	Tampungan Air	0,43	431.787	0	1	-	70,83
50	TPA	2,09	2.087.661	0,35	0,65	119,86	222,59
51	TPU	1,61	1.612.877	0,3	0,7	79,37	185,20
52	(blank)	0,00	0	1	0	0,00	-
TOTAL		210,49	210.490.000,00	25,85	26,15	18.952,79	15.574,89

Sumber: Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2018

Dengan melihat hasil analisa potensi ketersediaan air di Kota Bekasi dapat dilihat bahwa berdasarkan luasan tata guna lahan eksisting dan luasan guna lahan pola ruang RTRW Kota Bekasi terdapat perubahan persentase infiltrasi dan run off. Dimana menurut luasan guna lahan eksisting, nilai run off sebesar 47,5% (16.534,4 L/detik) sedangkan infiltrasi sebesar 52,5% (18.264,2 L/detik). Jika menurut luasan guna lahan dari rencana pola ruang RTRW Kota Bekasi tersebut maka nilai run off sebesar 54,9% (18.592,8 L/detik) sedangkan infiltrasi sebesar 45,1% (15.574,9 L/detik).

Terjadi peningkatan nilai run off sebesar 7,4%, hal ini memperlihatkan bahwa terjadi air larian akibat peningkatan lahan terbangun dari rencana pola ruang Kota Bekasi. Hal ini mengakibatkan potensi ketersediaan air permukaan lebih besar dibandingkan potensi ketersediaan air tanah. Perlu adanya peningkatan pengelolaan terhadap air permukaan di masa mendatang di Kota Bekasi karena banyaknya perubahan lahan menjadi lahan terbangun. Lebih jelasnya mengenai ketersediaan air di kota Bekasi dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.55
Potensi Ketersediaan Air Perkecamatan Di Kota Bekasi

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Air					
			Tahun 2017		Tahun 2026		Tahun 2030	
			Air Permukaan (L/Detik)	Air Tanah (L/Detik)	Air Permukaan (L/Detik)	Air Tanah (L/Detik)	Air Permukaan (L/Detik)	Air Tanah (L/Detik)
1	Pondokgede	363.815	1.523,89	1.041,32	1.631,37	1.052,45	1.631,37	1.052,45
2	Jatisampurna	104.919	1.456,52	1.689,20	1.537,26	1.572,62	1.537,26	1.572,62
3	Pondok Melati	191.356	1.045,66	891,54	1.023,38	888,39	1.023,38	888,39
4	Jatiasih	309.333	2.024,53	2.175,23	2.116,99	2.040,99	2.116,99	2.040,99
5	Bantargebang	128.544	1.251,43	1.820,38	1.853,77	1.200,52	1.853,77	1.200,52
6	Mustika Jaya	260.975	1.528,67	2.560,57	2.128,66	1.909,05	2.128,66	1.909,05
7	Bekasi Timur	304.861	1.305,11	1.068,72	1.207,39	1.164,25	1.207,39	1.164,25
8	Rawalumbu	294.838	1.405,01	1.369,34	1.623,09	1.155,47	1.623,09	1.155,47
9	Bekasi Selatan	277.617	1.316,05	1.179,67	1.243,18	1.248,07	1.243,18	1.248,07
10	Bekasi Barat	355.602	1.368,16	1.058,42	1.390,58	1.006,74	1.390,58	1.006,74
11	Medansatria	230.291	896,58	1.311,71	1.351,49	832,46	1.351,49	832,46
12	Bekasi Utara	431.029	1.382,55	1.977,02	1.845,64	1.503,87	1.845,64	1.503,87
TOTAL		3.253.179,24	16.504,16	18.143,13	18.952,79	15.574,89	18.952,79	15.574,89

Sumber: Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2018

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Kebutuhan Air

Untuk memenuhi kebutuhan air secara minimal yang harus dipenuhi untuk setiap masyarakat Kota Bekasi. Asumsi kebutuhan air dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal pada Permen PU 01/2014 bahwa kebutuhan air bersih domestik minimal yaitu 60 Liter/orang/hari, sedangkan asumsi 20% untuk kebutuhan air bersih non domestik (sekolah, kantor, tempat ibadah, dll). Kebutuhan perkapita untuk air bersih domestik dan non domestik tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk pada setiap kecamatan di Kota Bekasi. Jumlah penduduk yang di gunakan untuk memprediksi kebutuhan air yaitu dengan menggunakan jumlah penduduk hasil proyeksi dalam RTRW Kota Bekasi selain itu asumsi untuk kebutuhan air dengan melihat kondisi kebocoran air dari pelayanan PDAM sebesar 25% dari kebutuhan air domestik. Adapun untuk jumlah kebutuhan air di Kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.56
Kebutuhan Air di Kota Bekasi Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air			Total Kebutuhan Air (L/Defik)
			Kebutuhan Air Domestik (L/defik)	Kebutuhan Air Non Domestik (L/defik)	Kebocoran 25% (L/Defik)	
1	Pondokgede	363.815	366.78	110.03	119.2	596.01
2	Jatisampurna	104.919	177.54	53.26	57.7	288.5
3	Pondok Melati	191.356	191.05	57.31	62.09	310.45
4	Jatiasih	309.333	301.62	90.49	98.03	490.14
5	Bantargebang	128.544	147.28	44.18	47.87	239.33
6	Mustika Jaya	260.975	312.14	93.64	101.44	507.22
7	Bekasi Timur	304.861	312.36	93.71	101.52	507.59
8	Rawalumbu	294.838	316.9	95.07	102.99	514.96
9	Bekasi Selatan	277.617	275.82	82.75	89.64	448.21
10	Bekasi Barat	355.602	362.25	108.68	117.73	588.66
11	Medansatria	230.291	225.62	67.69	73.33	366.64
12	Bekasi Utara	431.029	459.5	137.85	149.34	746.69
TOTAL		3.253.179,24	3448.85	1034.65	1120.87	5604.37

Sumber: Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2018

Tabel 3.57
Kebutuhan Air di Kota Bekasi Tahun 2026

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air			Total Kebutuhan Air (L/Defik)
			Kebutuhan Air Domestik (L/defik)	Kebutuhan Air Non Domestik (L/defik)	Kebocoran 25% (L/Defik)	
1	Pondokgede	424.406	574.72	172.41	186.78	933.91
2	Jatisampurna	120.864	163.67	49.1	53.19	265.96
3	Pondok Melati	227.224	307.7	92.31	100	500.01
4	Jatiasih	376.153	509.37	152.81	165.55	827.73
5	Bantargebang	143.854	194.8	58.44	63.31	316.55
6	Mustika Jaya	300.637	407.11	122.13	132.31	661.55
7	Bekasi Timur	335.511	454.34	136.3	147.66	738.3
8	Rawalumbu	339.646	459.94	137.98	149.48	747.4
9	Bekasi Selatan	324.343	439.21	131.76	142.74	713.71
10	Bekasi Barat	399.569	541.08	162.33	175.85	879.26
11	Medansatria	262.062	354.88	106.46	115.33	576.67
12	Bekasi Utara	496.535	672.39	201.72	218.53	1092.64
TOTAL		3.750.804,03	5079.21	1523.76	1650.74	8253.71

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2018

Tabel 3.58
Kebutuhan Air di Kota Bekasi Tahun 2030

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air			Total Kebutuhan Air (L/Detik)
			Kebutuhan Air Domestik (L/detik)	Kebutuhan Air Non Domestik (L/detik)	Kebocoran 25% (L/Detik)	
1	Pondokgede	494.676	778.66	233.6	253.06	1265.32
2	Jatisampurna	139.232	219.16	65.75	71.23	356.14
3	Pondok Melati	270.526	425.83	127.75	138.39	691.97
4	Jatiasih	462.035	727.28	218.18	236.37	1181.83
5	Bantargebang	161.094	253.57	76.07	82.41	412.05
6	Mustika Jaya	346.327	545.14	163.54	177.17	885.85
7	Bekasi Timur	370.199	582.72	174.82	189.38	946.92
8	Rawalumbu	391.265	615.88	184.76	200.16	1000.8
9	Bekasi Selatan	369.975	582.37	174.71	189.27	946.35
10	Bekasi Barat	449.893	708.17	212.45	230.15	1150.77
11	Medansatria	298.314	469.57	140.87	152.61	763.05
12	Bekasi Utara	571.997	900.37	270,11	292,62	1192,99
TOTAL		4.325.535,17	6808.71	2042.61	2212.83	11064.15

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2018

Dari hasil perhitungan kebutuhan air terlihat bahwa kebutuhan air terus meningkat hal ini terlihat dari kebutuhan air 6.344,92 liter/detih pada tahun 2017 meningkat menjadi 8.253,72 liter/detik pada tahun 2026 dan terus meningkat hingga mencapai 11.064,16 liter/detik pada tahun 2030.

Status Daya Dukung Air

Evaluasi ketersediaan dan kebutuhan air bertujuan untuk mengetahui apakah air yang tersedia dari debit curah hujan mencukupi untuk kebutuhan pemakaian air oleh masyarakat di Kota Bekasi baik untuk domestik maupun non domestik. Adapun untuk menghitung daya dukung air di Kota Bekasi yaitu membandingkan ketersediaan air dengan kebutuhan air di Kota Bekasi. beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam menghitung daya dukung air di Kota Bekasi diantaranya:

1. ketersediaan air permukaan dan air tanah, dimana asumsi ketersediaan air permukaan yang dapat dimanfaatkan hanya 2,8% (Chay asdak, 2001) dan potensi air tanah yang dapat di manfaatkan diasumsikan sebesar 40 % (hanya ilustrasi keamanan lingkungan). Kenapa 40 % karena saat ini untuk memenuhi kebutuhan air diluar yang disediakan kekurangan PDAM masyarakat secara umum telah memanfaatkan air tanah sebesar 22,86 % air tanah. artinya dengan menambahkan 40 % maka jika pemanfaatan air secara BAU, maka pemakaian air tanah akan menjadi 62,86 % saja (40 % + 22,86 %).
2. Kebutuhan air, perhitungan kebutuhan air meliputi kebutuhan air untuk keperluan domestik, non domestic dan tingkat kebocoran dengan asumsi kebocoran sebesar 25% dari total kebutuhan air domestik dan non domestic

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perhitungan daya dukung air/ketersediaan air pada tahun 2017 secara keseluruhan masih memadai, walaupun sangat rawan terhadap perubahan musim. Pada tahun 2026 daya dukung air diprediksi sudah mulai defisit di beberapa Kecamatan dan pada tahun 2030 diprediksi daya dukung air di seluruh Kota Bekasi defisit. Lebih jelasnya mengenai perhitungan daya dukung

dan daya tampung air pada tahun 2017, 2026 dan 2030 dapat di lihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.59
Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Bekasi

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2026		Tahun 2030	
	Jumlah	Sat / Ket	Jumlah	Sat / Ket	Jumlah	Sat / Ket
Ketersediaan Air Permukaan dan Mata Air	462,12	lt/det	530,68	lt/det	530,68	lt/det
Potensi air Tanah	5.598,36	lt/det	3.786,86	lt/det	2.954,97	lt/det
Potensi Air tanah dan air Permukaan	6060,47	lt/det	4317,54	lt/det	3485,65	lt/det
Kebutuhann air domestik dan non domestik	5604,37	lt/det	8253,71	lt/det	11064,15	lt/det
Kondisi Daya dukung dan Daya tampung	1,08	surplus	0,52	defisit	0,32	defisit

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2018

3.6.1.2 Daya Dukung Pangan

Analisa daya dukung lahan merupakan salah satu metode analisis dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah. Analisa ini sangat dibutuhkan dalam rangka melihat dan memprediksi keseimbangan antara tingkat kebutuhan manusia terhadap lahan dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Melalui analisis daya dukung lahan dapat diketahui luas panen produksi dan produktifitas perkebunan yang merupakan dua faktor yang dapat meningkatkan daya dukung lahan untuk komoditas pangan. Hal ini sebagai mana diatur dalam Permen LH RI Nomor 17 Tahun 2009.

Hasil perhitungan dengan pendekatan ini dapat dijadikan bahan masukan/ pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang, terkait dengan penyediaan produk hayati secara berkelanjutan melalui upaya pemanfaatan ruang yang menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk merupakan kebutuhan hidup layak per penduduk dibagi produktivitas beras lokal, dimana:

- Kebutuhan hidup layak per penduduk diasumsikan sebesar 1 ton setara beras/kapita/tahun
- Daerah yang tidak memiliki data produktivitas beras lokal, dapat menggunakan data rata-rata produktivitas beras nasional sebesar 2400 kg/ha/tahun.

Penentuan daya dukung lahan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan sehingga dapat dilihat status daya dukung lahan yang mencukupi kebutuhan akan produksi hayati terhadap penduduk yang tinggal di suatu kawasan.

Status daya dukung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (SL) dan kebutuhan lahan (DL) (Permen LH No. 17 Tahun 2009) bahwa:

- Bila $SL > DL$, daya dukung lahan dinyatakan surplus.
- Bila $SL < DL$, daya dukung lahan dinyatakan defisit

Secara lengkap, hasil analisa daya dukung lahan yang dilakukan di Kota Bekasi ini dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

• **Analisis Ketersediaan Lahan**

Perhitungan daya dukung lahan di Kota Bekasi dengan data yang diperlukan dalam perhitungan ketersediaan lahanya itu produksi aktual tiap jenis komoditi (Pi) dan harga beras di tingkat produsen (Hb), harga satuan tiap komoditi ditingkat produsen (Hi), dan produktivitas beras di Kota Bekasi (Pt).

Data yang digunakan berasal dari jenis-jenis komoditas pangan yang berada di Kota Bekasi, yang terdiri dari pertanian, perkebunan dan buah-buahan. Secara lengkap, perhitungan nilai produksi total dari komoditas pangan tersebut di Kota Bekasi sebagaimana pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.60
Hasil Perhitungan Nilai Produksi Total Kota Bekasi

No	Jenis Komoditas	Produksi Aktual		Harga Satuan Komoditas (Rp/kg)	Nilai Produksi (Rp)
		Ton	Kg		
1	Padisawah	30.438,7	30.438.700	5.500	167.412.850.000
2	Padigogo	-	-		-
3	Jagung	828,0	828.000	9.000	7.452.000.000
4	Ubikayu	249,8	249.750	6.000	1.498.500.000
5	Ubijalar	49,1	49.080	5.000	245.400.000
6	Bayam	4.807,5	4.807.500	5.000	24.037.500.000
7	Cabe besar	435,0	435.000	30.000	13.050.000.000
8	kacangpanjang	101,7	101.700	6.000	610.200.000
9	Ketimun	90,0	90.000	8.000	720.000.000
10	Kangkung	4.532,4	4.532.420	5.000	22.662.100.000
11	Sawi	2.664,0	2.664.000	3.000	7.992.000.000
12	Terong	83,2	83.200	8.000	665.600.000
13	Durian	659,1	659.090	75.000	49.431.750.000
14	Duku	68,8	68.800	8.000	550.400.000
15	Jambubiji	345,6	345.590	5.600	1.935.304.000
16	JerukSiem	28,6	28.600	11.900	340.340.000
17	Mangga	1.491,8	1.491.750	15.000	22.376.250.000
18	Pepaya	1.602,6	1.602.610	7.000	11.218.270.000
19	Pisang	419,6	419.630	7.000	2.937.410.000
20	Rambutan	1.395,2	1.395.150	12.000	16.741.800.000
21	Sawo	775,3	775.310	13.000	10.079.030.000
TOTAL					361.956.704.000

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi, 2018

Perhitungan ketersediaan lahan (SL) berdasarkan persamaan sebagai berikut:

$$SL = \frac{Rp\ 361.965.704.000}{Rp\ 12.000} \times \frac{1}{63.020 \frac{kg}{ha}} = 479\ Ha$$

Jadi ketersediaan lahan (SL) di Kota Bekasi yaitu 479 Ha.

• **Analisis Kebutuhan Lahan.**

Kebutuhan lahan diperoleh dengan cara mengalikan jumlah penduduk (N) dengan kebutuhan lahan untuk hidup layak (KHL_L). Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk merupakan

kebutuhan hidup layak per penduduk dibagi produktivitas beras lokal. Menurut Permen LH No. 17 Tahun 2009, untuk kebutuhan hidup layak per penduduk diasumsikan sebesar 1 ton setara beras/kapita/tahun. Seperti yang telah diketahui diatas, produktivitas beras di Kota Bekasi adalah 30.438.700 kg/ha/tahun. Perhitungan kebutuhan lahan untuk hidup layak adalah sebagai berikut:

$$KHL = \frac{1 \text{ ton} \frac{\text{beras}}{\text{orang/tahun}}}{23.002.330 \frac{\text{kg}}{\text{ha}} / \text{tahun}}$$
$$= 0,0159 \text{ Ha/orang}$$

Jadi kebutuhan lahan untuk hidup layak di Kota Bekasi adalah 0,0159 Ha/orang.

Kebutuhan lahan diperoleh dengan cara mengalikan jumlah penduduk (N) dengan kebutuhan lahan untuk hidup layak (KHL). Perhitungan kebutuhan lahan (DL) pada tahun saat ini dengan jumlah penduduk tahun 2021 sebesar 3.253.179 jiwa, dengan menggunakan persamaan:

$$DL = 3.253.179 \text{ jiwa} \times 0,0159 \text{ jiwa/Ha}$$
$$= 51.623,31 \text{ Ha}$$

Jadi kebutuhan lahan (DL) untuk Kota Bekasi pada tahun 2021 adalah 51.623,31 Ha.

- **Status Daya Dukung Lahan**

Dengan melihat hasil perhitungan untuk ketersediaan dan kebutuhan lahan di Kota Bekasi didapatkan hasil yaitu:

- Ketersediaan lahan (S_L) : 479Ha
- Kebutuhan lahan (D_L) : 51.623,31Ha

Dengan demikian, status daya dukung lahan secara keseluruhan wilayah Kota Bekasi diperoleh pada tahun 2017, maka nilai S_L < D_L (479 Ha < 51.623,31 Ha) atau dinyatakan defisit atau tidak memenuhi daya dukung. Artinya bahwa dalam lingkup wilayah, maka Kota Bekasi ini tidak memiliki daya dukung lahan yang baik, sehingga dalam keadaan produktifitas pangan yang ada tidak dapat memenuhi ketersediaan pangan untuk kebutuhan daerahnya sendiri.

Begitu juga dengan proyeksi penduduk di tahun 2021 hingga 2031 masih berada dalam kondisi defisit, dimana kebutuhan lahan lebih tinggi dibandingkan ketersediaan lahan yang ada di Kota Bekasi untuk lahan pertanian dan komoditas pangan lainnya. Terjadi peningkatan kebutuhan lahan dari tahun 2017 meningkat 13,2% di tahun 2021 dan meningkat kemudian sebanyak 15,3% dari tahun 2026 dan 2031. Secara lengkap status daya dukung lahan per kecamatan di Kota Bekasi Tahun 2017 dan proyeksi status daya dukung lahan tahun 2021 hingga 2031 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Tabel 5.61
Status Daya Dukung Pangan Per Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Pangan (Ha)	Ketersediaan pangan (Ha)	Status Daya Dukung Pangan
1	Pondokgede	305.587	4.849,04	478,63	tidak memenuhi daya dukung
2	Jatisampurna	147.921	2.347,20		tidak memenuhi daya dukung
3	Pondok Melati	159.175	2.525,78		tidak memenuhi daya dukung
4	Jatiasih	251.302	3.987,65		tidak memenuhi daya dukung
5	Bantargebang	122.710	1.947,16		tidak memenuhi daya dukung
6	Mustika Jaya	260.063	4.126,67		tidak memenuhi daya dukung
7	Bekasi Timur	260.247	4.129,59		tidak memenuhi daya dukung
8	Rawalumbu	264.032	4.189,65		tidak memenuhi daya dukung
9	Bekasi Selatan	229.809	3.646,60		tidak memenuhi daya dukung
10	Bekasi Barat	301.818	4.789,24		tidak memenuhi daya dukung
11	Medansatria	187.980	2.982,86		tidak memenuhi daya dukung
12	Bekasi Utara	382.840	6.074,89		tidak memenuhi daya dukung
Total		2.873.484	45.596,32	478,63	tidak memenuhi daya dukung

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi, 2018

Tabel 3.62
Proyeksi Status Daya Dukung Lahan Per Kecamatan Tahun 2030

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Pangan (Ha)	Ketersediaan pangan (Ha)	Status Daya Dukung Pangan
1	Pondokgede	494.676	7.849,50	27,00	tidak memenuhi daya dukung
2	Jatisampurna	139.232	2.209,33		tidak memenuhi daya dukung
3	Pondok Melati	270.526	4.292,70		tidak memenuhi daya dukung
4	Jatiasih	462.035	7.331,56		tidak memenuhi daya dukung
5	Bantargebang	161.094	2.556,24		tidak memenuhi daya dukung
6	Mustika Jaya	346.327	5.495,51		tidak memenuhi daya dukung
7	Bekasi Timur	370.199	5.874,31		tidak memenuhi daya dukung
8	Rawalumbu	391.265	6.208,57		tidak memenuhi daya dukung
9	Bekasi Selatan	369.975	5.870,75		tidak memenuhi daya dukung
10	Bekasi Barat	449.893	7.138,89		tidak memenuhi daya dukung
11	Medansatria	298.314	4.733,64		tidak memenuhi daya dukung
12	Bekasi Utara	571.997	9.076,43		tidak memenuhi daya dukung
Total		4.325.535	68.637,41	27,00	tidak memenuhi daya dukung

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi, 2018

Pada dasarnya, daya dukung lahan ini telah memberikan gambaran tentang rencana program atau kegiatan yang dapat dilakukan dalam pembangunan lahan untuk komoditas pangan. Kondisi degradasi lahan berupa penurunan daya dukung lahan dan pencemaran lahan perkebunan, menjadi ancaman serius yang harus dihindari. Kota Bekasi sebagai wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan untuk komoditas pangan dalam kondisi defisit haruslah melakukan strategi dalam peningkatan daya dukung lahan yang ada, dengan melakukan:

- Konsep pertanian berkelanjutan
- Penggunaan lahan yang tepat, salah satu bagian dari konservasi tanah dan air pada setiap bidang tanah sehingga penggunaan lahan yang ada tidak rusak dan dapat menjamin produktifitas lahan yang tinggi
- Meminimalisir input dari luar daerah (pupuk, bibit, dan pestisida)
- Mengurangi pengolahan tanah yang terlalu intensif

3.6.2 Kinerja Jasa Ekosistem

Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhitungkan kondisi daya dukung, daya tampung, ekoregion dan penutup lahan, dimana:

- a. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
- b. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
- c. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Penetapan batas ekoregion dengan mempertimbangkan kesamaan bentang alam, Daerah Aliran Sungai, Keanekaragaman Hayati dan sosial budaya (UU RI nomor 32 Tahun 2009). Dalam operasionalnya penetapan ekoregion menggunakan pendekatan bentang lahan (*landscape*) dengan mengikuti sistem klasifikasi yang digunakan *Verstappen*. Selanjutnya jenis-jenis bentang lahan (*landscape*) akan dijadikan salah satu komponen penaksir atau *proxy* jasa ekosistem (*landscape based proxy*).
- d. Penutup Lahan adalah tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati, merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutup lahan tersebut. Dalam operasionalnya, digunakan sistem klasifikasi penutup lahan dari SNI 76452010, dimana jenis-jenis penutup lahan tersebut dijadikan salah satu komponen penaksir atau *proxy* jasa ekosistem (*landcover/landused based proxy*).

Berdasarkan batasan konsep tersebut, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diukur dengan pendekatan jasa ekosistem. Semakin tinggi nilai jasa ekosistem, maka semakin tinggi pula kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk memperoleh nilai jasa ekosistem digunakan dua penaksiran yaitu *landscape based proxy* dan *landcover/landused based proxy*, yang selanjutnya digunakan dasar untuk melakukan pemetaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Jasa ekosistem adalah keuntungan yang diperoleh manusia dari ekosistem (MA, 2005). Jasa ekosistem dikategorikan menjadi empat, yaitu meliputi jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*) (MA, 2005).

- a. Jasa penyediaan : bahan makanan, air bersih, serat, bahan bakar dan bahan dasar lainnya, materi genetik, bahan obat dan biokimia, spesies hias.
- b. Jasa Pengaturan : Pengaturan kualitas udara, Pengaturan iklim, Pencegahan gangguan, Pengaturan air, Pengolahan limbah, Perlindungan tanah, Penyerbukan, Pengaturan biologis, Pembentukan tanah.
- c. Jasa Budaya : Estetika, Rekreasi, Warisan dan identitas budaya, Spiritual dan keagamaan, Pendidikan.
- d. Jasa Pendukung : Habitat berkembang biak, Perlindungan *plasma nuffah*.

3.6.2.1 Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Ekoregion menggambarkan karakteristik geografis suatu wilayah. Setiap karakteristik mencerminkan potensi dan masalah masing-masing ekoregion. Kegiatan pertanian dan lahan basah membutuhkan lahan yang subur serta ketersediaan air yang cukup. Untuk Kota Bekasi termasuk pada penyediaan pangan yang sangat rendah 57,5% atau 121,09 km² dari total wilayah 210,49 km². Disusul dengan lahan yang penyediaan pangan sangat tinggi sebanyak 13,4% atau 28,20 km².

Terdapat lahan penyediaan pangan rendah hanya 12,4% atau 26,19 km², lahan penyediaan pangan sedang sebesar 10,6% atau 22,36 km², sedangkan hanya 6,0% atau 12,64 km² untuk lahan penyediaan pangan tinggi. Secara lengkap dapat luasan dari lahan dengan penyediaan pangan dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.63
Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

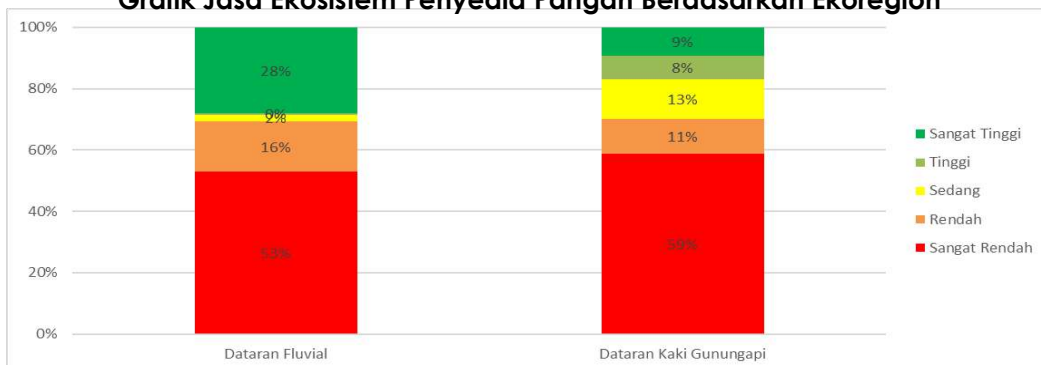
Jenis DDDLH	Kategori	Luas (km ²)	%
Penyediaan pangan	Sangat Rendah	121,09	57,5
	Rendah	26,19	12,4
	Sedang	22,36	10,6
	Tinggi	12,64	6,0
	Sangat Tinggi	28,20	13,4
	TOTAL		210,49

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi, 2018

Luasan lahan dengan penyediaan pangan di Kota Bekasi berdasarkan ekoregion, pada dataran fluvial didominasi oleh lahan sangat rendah (53%) dan tinggi (28%). Sedangkan pada ekoregion dataran kaki gunungapi juga sebagian besar di lahan penyediaan pangan yang sangat rendah (59%) dan sangat tinggi (9%). Perbedaan karakteristik jenis tanah dan ketersediaan air mempengaruhi kesesuaian lahan untuk pengembangan pertanian lahan basah.

Dataran aluvial dan kaki gunung api memiliki kesuburan tanah yang tinggi karena kaya unsur hara. Berdasarkan luasannya dalam penyediaan pangan di Kota Bekasi ini, maka Kecamatan Bekasi Utara memiliki penyediaan pangan sangat tinggi paling besar (53%) bila dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Bekasi. Sedangkan lahan penyediaan pangan sangat rendah paling besar berada di Kecamatan Pondokgede (79%) dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

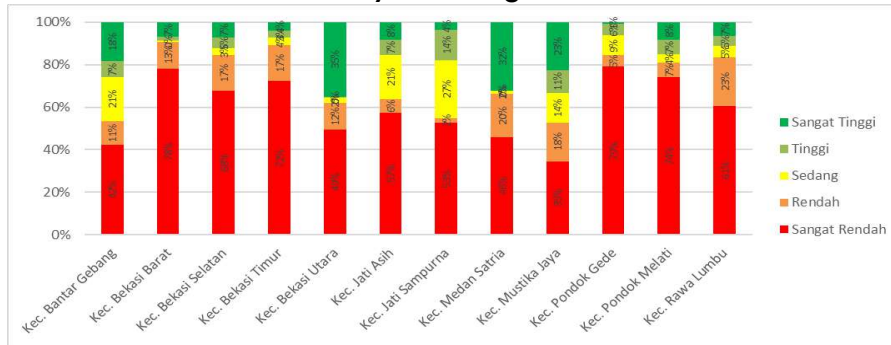
Gambar 3.21
Grafik Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Berdasarkan Ekoregion



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Gambar 3.22
Grafik Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Berdasarkan Kecamatan



Tabel 3.64
Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Tiap Kecamatan

Nama Kecamatan	Luasan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan									
	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	km2	%	km2	%	km2	%	km2	%	km2	%
Kec. Bantargebang	7,86	3,7	2,04	1,0	3,86	1,8	1,39	0,7	3,43	1,6
Kec. Bekasi Barat	11,46	5,4	1,86	0,9	0,07	0,0	0,27	0,1	1,01	0,5
Kec. Bekasi Selatan	10,21	4,9	2,56	1,2	0,49	0,2	0,74	0,4	1,10	0,5
Kec. Bekasi Timur	10,37	4,9	2,44	1,2	0,50	0,2	0,45	0,2	0,59	0,3
Kec. Bekasi Utara	10,06	4,8	2,52	1,2	0,50	0,2	0,08	0,0	7,17	3,4
Kec. Jatiasih	14,59	6,9	1,61	0,8	5,31	2,5	1,81	0,9	2,09	1,0
Kec. Jati Sampurna	9,99	4,7	0,46	0,2	5,17	2,5	2,70	1,3	0,71	0,3
Kec. Medan Satria	6,15	2,9	2,69	1,3	0,20	0,1	0,00	0,0	4,31	2,0
Kec. Mustikajaya	8,54	4,1	4,53	2,2	3,40	1,6	2,66	1,3	5,60	2,7
Kec. Pondokgede	12,99	6,2	0,87	0,4	1,53	0,7	0,92	0,4	0,13	0,1
Kec. Pondok Melati	8,70	4,1	0,79	0,4	0,46	0,2	0,82	0,4	0,96	0,5
Kec. Rawalumbu	10,18	4,8	3,83	1,8	0,88	0,4	0,81	0,4	1,09	0,5
TOTAL LUASAN	121,09	57,5	26,19	12,4	22,36	10,6	12,64	6,0	28,20	13,4

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi, 2018

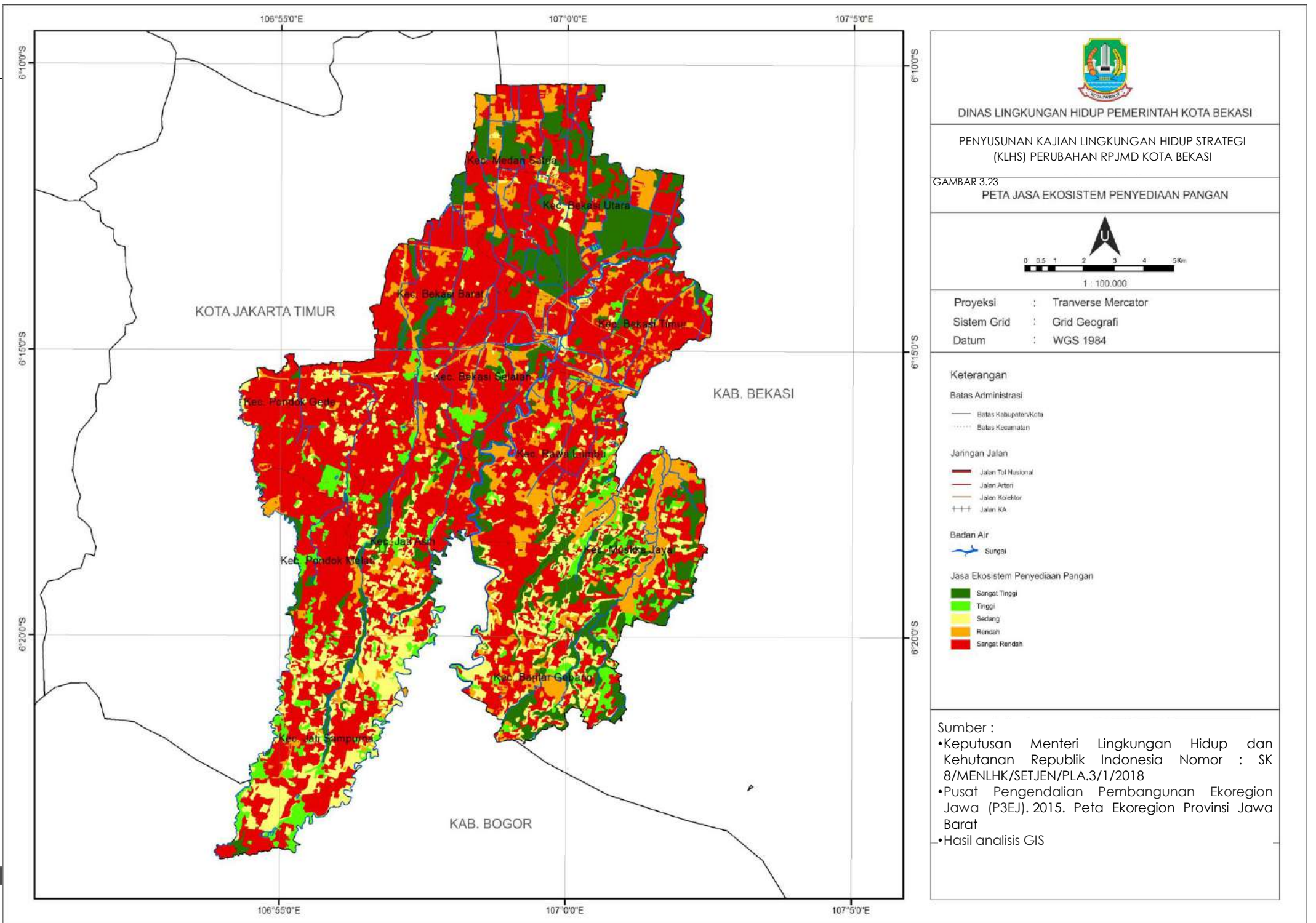
3.6.2.2 Jasa Ekosistem Penyedia Air

Ketersediaan air di suatu wilayah bergantung kepada pasokan dan cadangan air tanah dan permukaan. Karakteristik tanah mempengaruhi kemampuan untuk menyerap dan mengalirkan air. Jenis batuan setiap ekoregion akan menggambarkan potensi *akuifer*. Hal ini berpengaruh untuk penyerapan air hujan di dalam tanah. Kota Bekasi termasuk pada lahan penyediaan air yang sangat rendah 70,0% atau 147,29 km² dari total wilayah 210,49 km². Kemudian disusul dengan kondisi lahan yang penyediaan air sedang sebanyak 17,4% atau 36,69 km². Terdapat lahan penyediaan air tinggi hanya 12,5% atau 26,37 km², sedangkan hanya 0,1% atau 0,14 km² untuk lahan penyediaan air sangat tinggi. Secara lengkap dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.65
Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Penyedia Air

Jenis DDDLH	Kategori	Luas (km2)	%
Penyediaan air	Sangat Rendah	147,29	70,0
	Sedang	36,69	17,4
	Tinggi	26,37	12,5
	Sangat Tinggi	0,14	0,1
	TOTAL	210,49	100,0

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi, 2018



DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KOTA BEKASI

PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGI (KLHS) PERUBAHAN RPJMD KOTA BEKASI

GAMBAR 3.23
PETA JASA EKOSISTEM PENYEDIAAN PANGAN



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum : WGS 1984

Keterangan

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Jaringan Jalan

- Jalan Tol Nasional
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- ++ Jalan KA

Badan Air

- Sungai

Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

Sumber :

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018
- Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3EJ), 2015. Peta Ekoregion Provinsi Jawa Barat
- Hasil analisis GIS

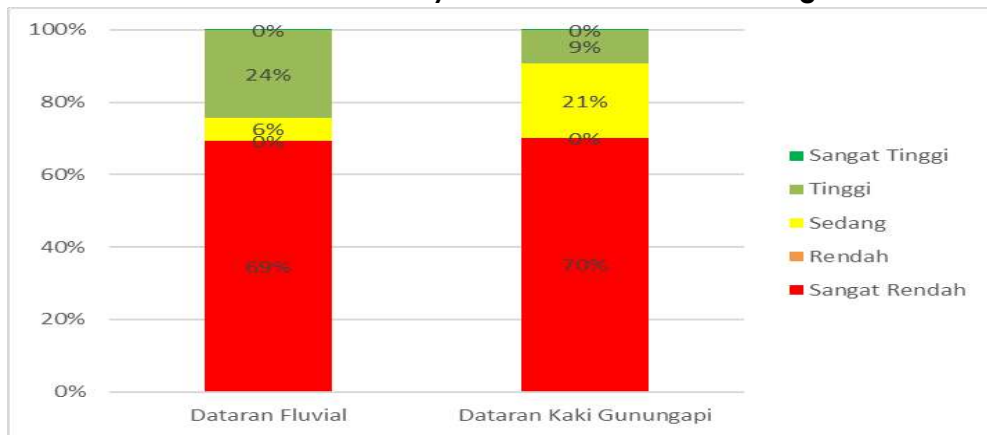
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

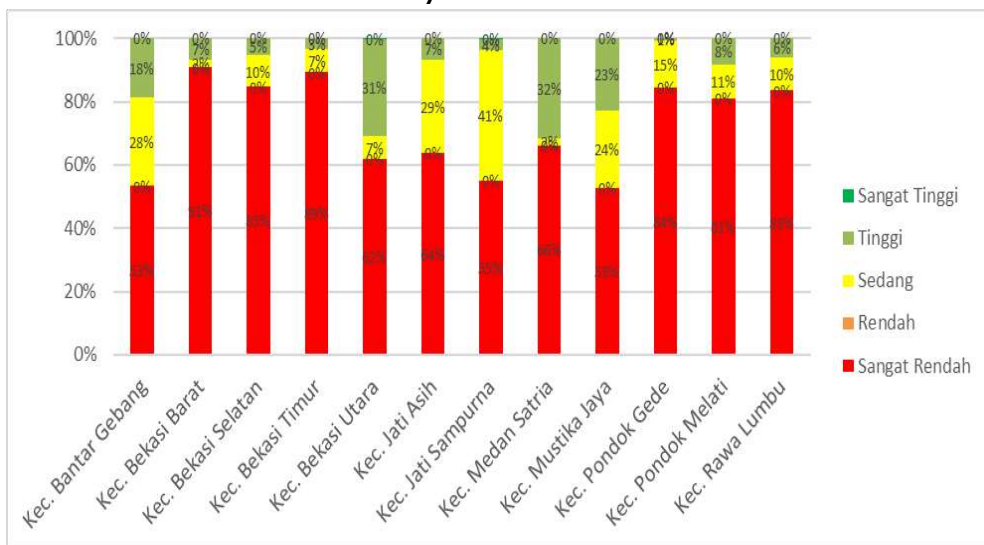
Karakteristik tanah di dataran aluvial dan kaki gunung api didominasi oleh pasir rongga antar pori-pori tanah, di tanah bertekstur pasir relatif besar sehingga dapat menampung air tanah. Jarak pori antar tanah yang besar juga memudahkan air hujan masuk dan mengalir. Luasan lahan dengan penyediaan air di Kota Bekasi berdasarkan ekoregion, pada dataran fluvial didominasi oleh lahan sangat rendah (69%) dan tinggi (0%). Sedangkan pada ekoregion dataran kaki gunungapi juga sebagian besar di lahan penyediaan air yang sangat rendah (70%).

Perbedaan karakteristik tanah dan batuan antar ekoregion menyebabkan variasi kemampuan dalam menyerap dan mengalirkan air. Berdasarkan luasannya dalam penyediaan air di Kota Bekasi ini, maka Kecamatan Medan Satria memiliki potensi penyediaan air sangat tinggi paling besar 32% bila dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Bekasi. Sedangkan penyediaan air sangat rendah paling besar berada di Kecamatan Bekasi Barat 91% dari total wilayah dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Gambar 3.24
Grafik Jasa Ekosistem Penyedia Air Berdasarkan Ekoregion



Gambar 3.25
Grafik Jasa Ekosistem Penyedia Air Berdasarkan Kecamatan



Tabel 3.66
Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Penyedia Air Tiap Kecamatan

Nama Kecamatan	Luasan Jasa Ekosistem Penyediaan Air									
	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	km2	%	km2	%	km2	%	km2	%	km2	%
Kec. Bantar Gebang	9,90	4,7	0,00	0,0	5,24	2,5	3,43	1,6	0,01	0,0
Kec. Bekasi Barat	13,32	6,3	0,00	0,0	0,35	0,2	1,01	0,5	0,00	0,0
Kec. Bekasi Selatan	12,77	6,1	0,00	0,0	1,50	0,7	0,82	0,4	0,00	0,0
Kec. Bekasi Timur	12,81	6,1	0,00	0,0	1,07	0,5	0,47	0,2	0,01	0,0
Kec. Bekasi Utara	12,57	6,0	0,00	0,0	1,48	0,7	6,23	3,0	0,04	0,0
Kec. Jatiasih	16,20	7,7	0,00	0,0	7,44	3,5	1,76	0,8	0,00	0,0
Kec. Jati Sampurna	10,45	5,0	0,00	0,0	7,83	3,7	0,71	0,3	0,04	0,0
Kec. Medan Satria	8,84	4,2	0,00	0,0	0,27	0,1	4,25	2,0	0,00	0,0
Kec. Mustikajaya	13,07	6,2	0,00	0,0	6,05	2,9	5,60	2,7	0,01	0,0
Kec. Pondokgede	13,85	6,6	0,00	0,0	2,44	1,2	0,13	0,1	0,01	0,0
Kec. Pondok Melati	9,48	4,5	0,00	0,0	1,27	0,6	0,96	0,5	0,00	0,0
Kec. Rawalumbu	14,01	6,7	0,00	0,0	1,76	0,8	1,00	0,5	0,02	0,0
TOTAL LUASAN	147,29	70,0	0,00	0,0	36,69	17,4	26,37	12,5	0,14	0,1

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi, 2018

3.6.2.3 Jasa Ekosistem Pengatur Air dan Banjir

Setiap ekoregion mempunyai karakteristik tanah dan batuan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencerminkan kemampuan ekoregion dalam meloloskan dan mengalirkan air. Semakin baik kemampuan tersebut maka potensi pengaturan untuk tata air dan banjir juga akan semakin tinggi. Pengaturan tata air dan banjir di Kota Bekasi mempunyai luasan lahan yang sangat rendah seluas 57,5% atau 121,09 km² dari luas wilayah total 210,49 km². Kemudian disusul dengan kondisi lahan pengaturan untuk tata air dan banjir tinggi sebanyak 28,5% atau 60,08 km².

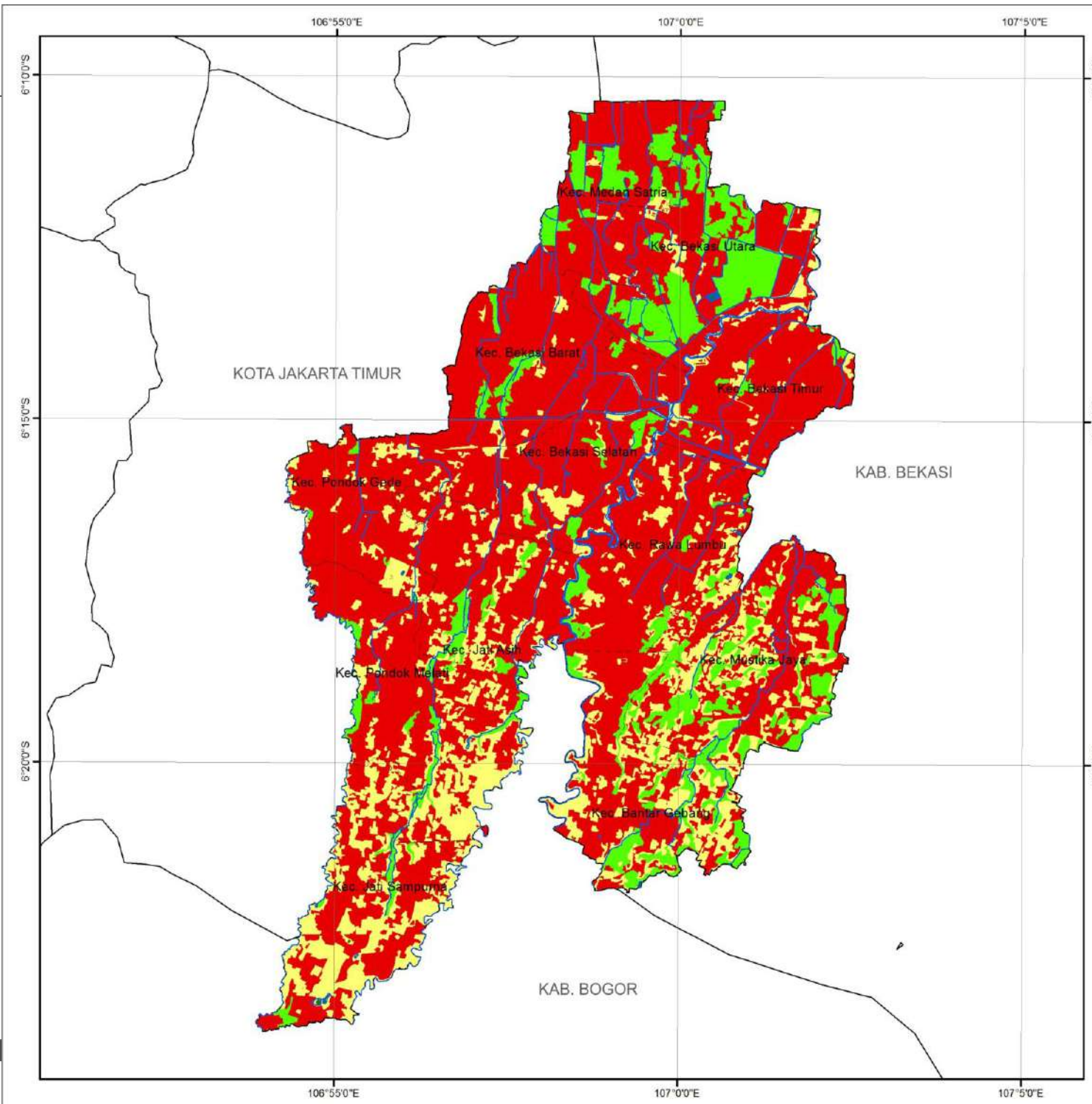
Terdapat lahan pengaturan untuk tata air dan banjir yang rendah hanya 12,4% atau 26,19 km², lalu potensi lahan pengaturan untuk tata air dan banjir sedang sebesar 1,4% atau 2,98 km². Sedangkan hanya 0,1% atau 0,14 km². Untuk lahan dengan pengaturan untuk tata air dan banjir sangat tinggi. Secara lengkap dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.67
Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Pengatur Tata Air dan Banjir

Jenis DDDLH	Kategori	Luas (km2)	%
Pengaturan Tata Air dan Banjir	Sangat Rendah	121,09	57,5
	Rendah	26,19	12,4
	Sedang	2,98	1,4
	Tinggi	60,08	28,5
	Sangat Tinggi	0,14	0,1
	TOTAL		210,49

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi, 2018

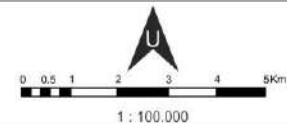
Dataran aluvial yang sudah menjadi permukiman mempunyai potensi sangat rendah. Sebagian besar permukaan tanah sudah diperkeras sehingga air hujan langsung menuju ke sungai atau menggenang. Kondisi ini memicu peningkatan potensi banjir karena kenaikan aliran sungai terjadi dalam waktu yang singkat. Jumlah vegetasi sebagai penahan air hujan relatif minim karena telah berganti menjadi bangunan dan permukiman.



DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KOTA BEKASI

PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGI (KLHS) PERUBAHAN RPJMD KOTA BEKASI

Gambar 3.26
PETA JASA EKOSISTEM PENYEDIAAN AIR



Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum : WGS 1984

Keterangan

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Jaringan Jalan

- Jalan Tol Nasional
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- ++ Jalan KA

Badan Air

- Sungai

Jasa Ekosistem Penyediaan Air

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Sangat Rendah

Sumber :

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018
- Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3EJ), 2015. Peta Ekoregion Provinsi Jawa Barat
- Hasil analisis GIS

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

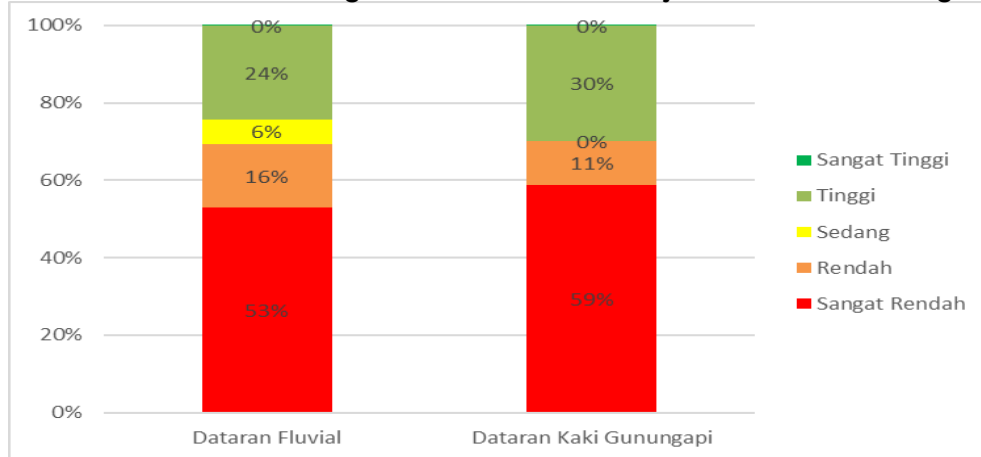
Luasan lahan dengan pengaturan tata air dan banjir di Kota Bekasi, pada dataran *fluvial* didominasi oleh lahan sangat rendah (53%) dan tinggi (0%).

Sedangkan pada dataran kaki gunung api juga sebagian besar di lahan pengaturan tata air dan banjir yang sangat rendah (59%) dan sangat tinggi (0%). Karakteristik jenis tanah dan batuan akan mempengaruhi potensi untuk mengatur tata air dan banjir. Berdasarkan luasannya dalam pengaturan tata air dan banjir di Kota Bekasi ini, maka Kecamatan Bantargebang dan Kecamatan Mustikajaya memiliki potensi pengaturan tata air dan banjir sangat tinggi paling besar 47% bila dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Bekasi.

Sedangkan potensi pengaturan tata air dan banjir sangat rendah paling besar berada di Kecamatan Pondokgede 79% dari total wilayah dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

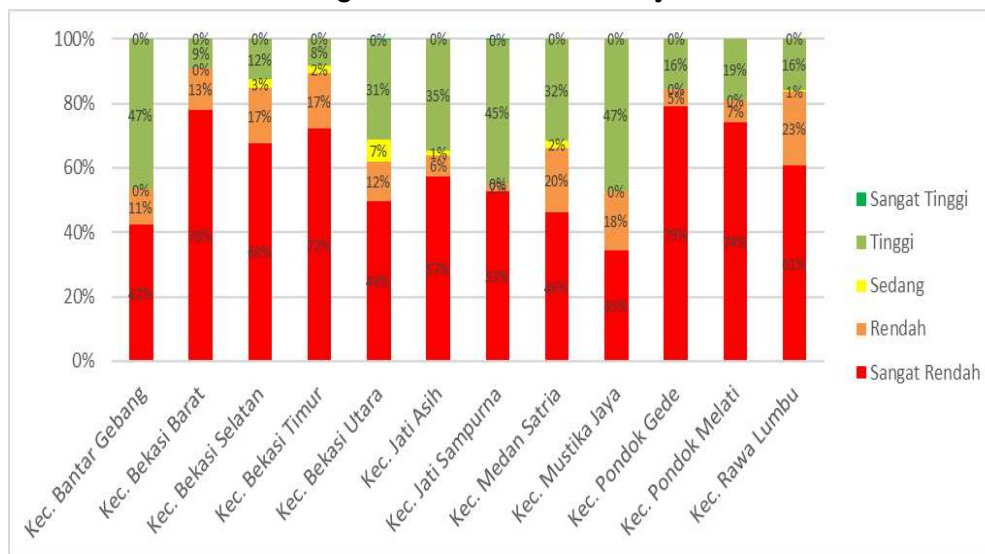
Gambar 3.27

Grafik Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir Berdasarkan Ekoregion



Gambar 3.28

Grafik Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir Berdasarkan Kecamatan



Tabel 3.68
Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Pengatur Tata Air dan Banjir Tiap Kecamatan

Nama Kecamatan	Luasan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir									
	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	km2	%	km2	%	km2	%	km2	%	km2	%
Kec. Bantargebang	7,86	3,7	2,04	1,0	0,00	0,0	8,66	4,1	0,01	0,0
Kec. Bekasi Barat	11,46	5,4	1,86	0,9	0,00	0,0	1,35	0,6	0,00	0,0
Kec. Bekasi Selatan	10,21	4,9	2,56	1,2	0,44	0,2	1,87	0,9	0,00	0,0
Kec. Bekasi Timur	10,37	4,9	2,44	1,2	0,36	0,2	1,18	0,6	0,01	0,0
Kec. Bekasi Utara	10,06	4,8	2,52	1,2	1,41	0,7	6,30	3,0	0,04	0,0
Kec. Jatiasih	14,59	6,9	1,61	0,8	0,37	0,2	8,83	4,2	0,00	0,0
Kec. Jati Sampurna	9,99	4,7	0,46	0,2	0,00	0,0	8,53	4,1	0,04	0,0
Kec. Medan Satria	6,15	2,9	2,69	1,3	0,27	0,1	4,25	2,0	0,00	0,0
Kec. Mustikajaya	8,54	4,1	4,53	2,2	0,00	0,0	11,65	5,5	0,01	0,0
Kec. Pondok Gede	12,99	6,2	0,87	0,4	0,00	0,0	2,57	1,2	0,01	0,0
Kec. Pondok Melati	8,70	4,1	0,79	0,4	0,00	0,0	2,23	1,1	0,00	0,0
Kec. Rawalumbu	10,18	4,8	3,83	1,8	0,12	0,1	2,63	1,3	0,02	0,0
TOTAL LUASAN	121,09	57,5	26,19	12,4	2,98	1,4	60,08	28,5	0,14	0,1

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi, 2018

3.6.2.4 Jasa Ekosistem Pengolahan dan Penguraian Limbah

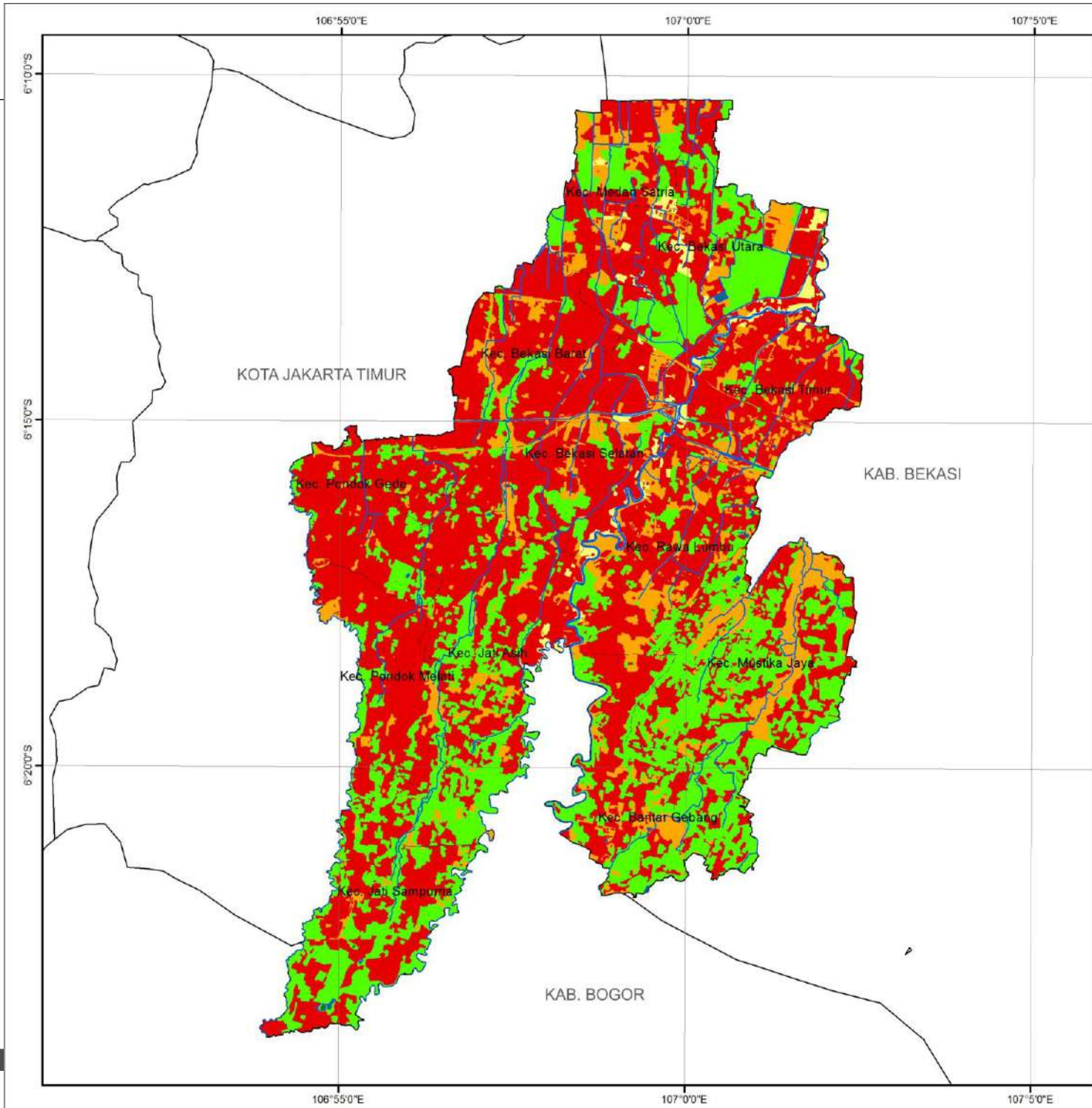
Alam menyediakan berbagai macam mikroba (*aerob*) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Mikroba aerob yang disediakan ekosistem dan berperan dalam proses mnetralisasi, mengurai dan menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur, *protozoa*, dan ganggang. Pengaturan pengolahan dan penguraian limbah di Kota Bekasi mempunyai potensi Lahan yang sangat rendah seluas 57,5% atau 121,09 km² dari luas wilayah total 210,49 km². Kemudian disusul dengan kondisi lahan yang pengaturan pengolahan dan penguraian limbah sedang sebanyak 17,4% atau 36,69 km². Terdapat lahan pengaturan pengolahan dan penguraian limbah tinggi hanya 12,5% atau 26,37 km². Adapun lahan dengan pengaturan pengolahan dan penguraian limbah rendah 12,4% atau 26,19 km². Sedangkan hanya 0,1% atau 0,14 km² untuk lahan pengaturan pengolahan dan penguraian limbah sangat tinggi. Secara lengkap dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.69
Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Pengatur Pengolahan dan Penguraian Limbah

Jenis DDDLH	Kategori	Luas (km2)	%
Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah	Sangat Rendah	121,09	57,5
	Rendah	26,19	12,4
	Sedang	36,69	17,4
	Tinggi	26,37	12,5
	Sangat Tinggi	0,14	0,1
TOTAL		210,49	100,0

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi, 2018

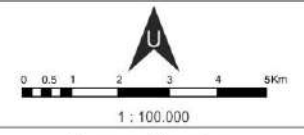
Dataran aluvial, *fluvio marin*, dataran kaki gunung api, pesisir dan pegunungan struktural patahan mempunyai potensi relatif tinggi. ekoregion kerucut lereng gunung api, perbukitan struktural patahan, lipatan dan lembah antar pegunungan/perbukitan mempunyai potensi yang rendah. Disamping itu kondisi lingkungan yang alami dan jenis sampah/limbah akan mempengaruhi penguraian limbah.



DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KOTA BEKASI

PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGI (KLHS) PERUBAHAN RPJMD KOTA BEKASI

Gambar 3.29 PETA JASA EKOSISTEM PENGATURAN TATA ALIRAN AIR DAN BANJIR



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi
 Datum : WGS 1984

Keterangan

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Jaringan Jalan

- Jalan Tol Nasional
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- +++ Jalan KA

Badan Air

- Sungai

Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

Sumber :

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018
- Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3EJ). 2015. Peta Ekoregion Provinsi Jawa Barat
- Hasil analisis GIS

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

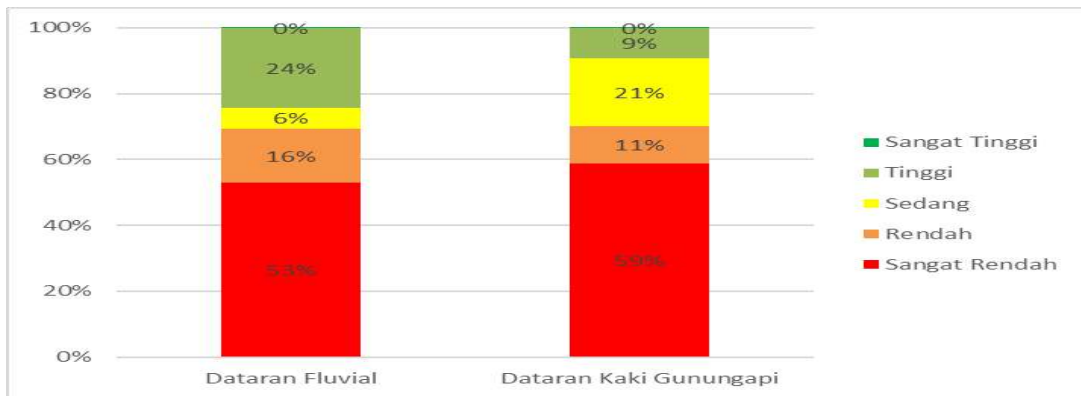
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Kondisi yang alami akan menjamin ketersediaan bakteri atau mikroba pengurai sampah. Luasan lahan dengan pengaturan pengolahan dan penguraian limbah di Kota Bekasi, pada dataran *fluvial* didominasi oleh lahan sangat rendah (53%) dan tinggi (0%).

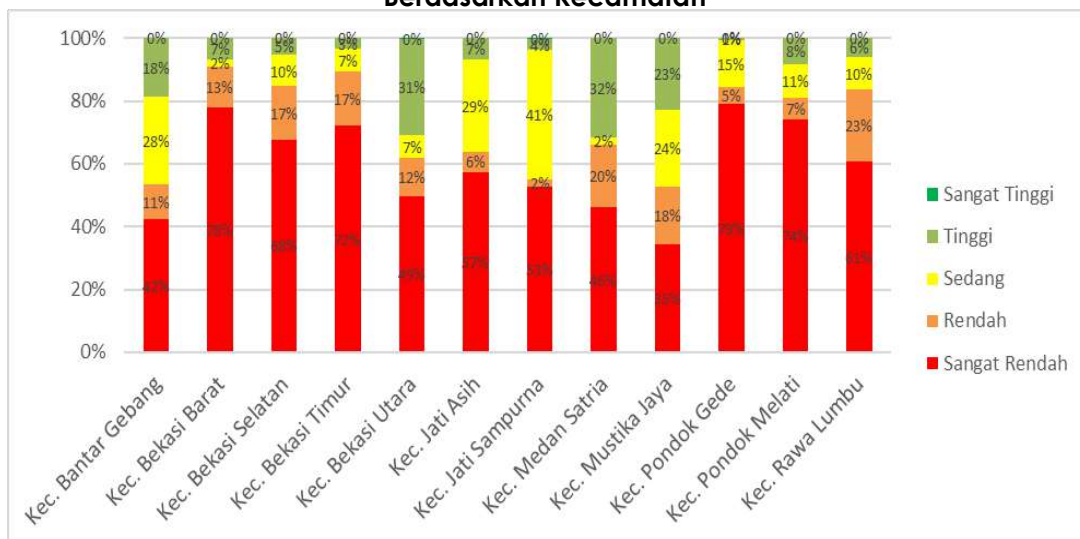
Sedangkan pada dataran kaki gunungapi juga sebagian besar di lahan pengaturan pengolahan dan penguraian limbah yang sangat rendah (59%) dan sangat tinggi (0%). Berdasarkan luasannya dalam pengaturan pengolahan dan penguraian limbah di Kota Bekasi ini, maka Kecamatan Medan Satria memiliki luasan pengaturan pengolahan dan penguraian limbah sangat tinggi paling besar 32% bila dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Bekasi.

Sedangkan potensi pengaturan pengolahan dan penguraian limbah sangat rendah paling besar berada di Kecamatan Pondokgede sebesar 79% dari total wilayah dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.30
Grafik Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Berdasarkan Ekoregion



Gambar 3.31
Grafik Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Berdasarkan Kecamatan



Tabel 3.70
Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Pengatur Pengolahan dan Penguraian Limbah Tiap Kecamatan

Nama Kecamatan	Luasan Jasa Ekosistem Pengatur Pengolahan dan Penguraian Limbah									
	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	km2	%	km2	%	km2	%	km2	%	km2	%
Kec. Bantargebang	7,86	3,7	2,04	1,0	5,24	2,5	3,43	1,6	0,01	0,0
Kec. Bekasi Barat	11,46	5,4	1,86	0,9	0,35	0,2	1,01	0,5	0,00	0,0
Kec. Bekasi Selatan	10,21	4,9	2,56	1,2	1,50	0,7	0,82	0,4	0,00	0,0
Kec. Bekasi Timur	10,37	4,9	2,44	1,2	1,07	0,5	0,47	0,2	0,01	0,0
Kec. Bekasi Utara	10,06	4,8	2,52	1,2	1,48	0,7	6,23	3,0	0,04	0,0
Kec. Jatiasih	14,59	6,9	1,61	0,8	7,44	3,5	1,76	0,8	0,00	0,0
Kec. Jati Sampurna	9,99	4,7	0,46	0,2	7,83	3,7	0,71	0,3	0,04	0,0
Kec. Medan Satria	6,15	2,9	2,69	1,3	0,27	0,1	4,25	2,0	0,00	0,0
Kec. Mustika Jaya	8,54	4,1	4,53	2,2	6,05	2,9	5,60	2,7	0,01	0,0
Kec. Pondokgede	12,99	6,2	0,87	0,4	2,44	1,2	0,13	0,1	0,01	0,0
Kec. Pondok Melati	8,70	4,1	0,79	0,4	1,27	0,6	0,96	0,5	0,00	0,0
Kec. Rawalumbu	10,18	4,8	3,83	1,8	1,76	0,8	1,00	0,5	0,02	0,0
TOTAL LUASAN	121,09	57,5	26,19	12,4	36,69	17,4	26,37	12,5	0,14	0,1

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi, 2018

3.6.2.5 Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana

Bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan. Luas dan presentase jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana di Kota Bekasi sangat rendah dengan luas 115,28 km² atau 54,8% dari luas wilayah 210,49 km². Diikuti dengan lahan kategori pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana rendah sebesar 64,95 km² atau 30,9%. Kategori lahan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana sedang 17,84 km² atau 8,5%. Kategori lahan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana tinggi 11,35 km². Untuk kategori lahan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana sangat tinggi memiliki jumlah yang kecil sebesar 1,06 km² atau 0,5% dari luas wilayah. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.71
Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Pengatur Pencegahan dan Perlindungan Bencana

Jenis DDDLH	Kategori	Luas (km2)	%
Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana	Sangat Rendah	115,28	54,8
	Rendah	64,95	30,9
	Sedang	17,84	8,5
	Tinggi	11,35	5,4
	Sangat Tinggi	1,06	0,5
TOTAL		210,49	100,0

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi, 2018

Penggunaan lahan di masing-masing ekoregion akan mencerminkan perlindungan dan pencegahan terjadinya bencana di wilayah tersebut. Untuk dataran fluvial lahan rendah mendominasi sebesar 69% sedangkan untuk dataran kaki gunung api yang mendominasi disini lahan sangat rendah sebesar 70%. Pengaturan dan perlindungan bencana di Kota Bekasi didominasi luasan kategori sangat rendah 84% dari luas wilayah terletak di Kecamatan Pondokgede. Semakin banyak vegetasi makan perlindungan terhadap bencana akan semakin besar. Wilayah yang sudah berupa permukiman akan meningkatkan resiko jatuh korban dan kerugian akibat bencana.

106°55'0"E

107°0'0"E

107°5'0"E

6°1'00"S

6°1'00"S

6°15'0"S

6°15'0"S

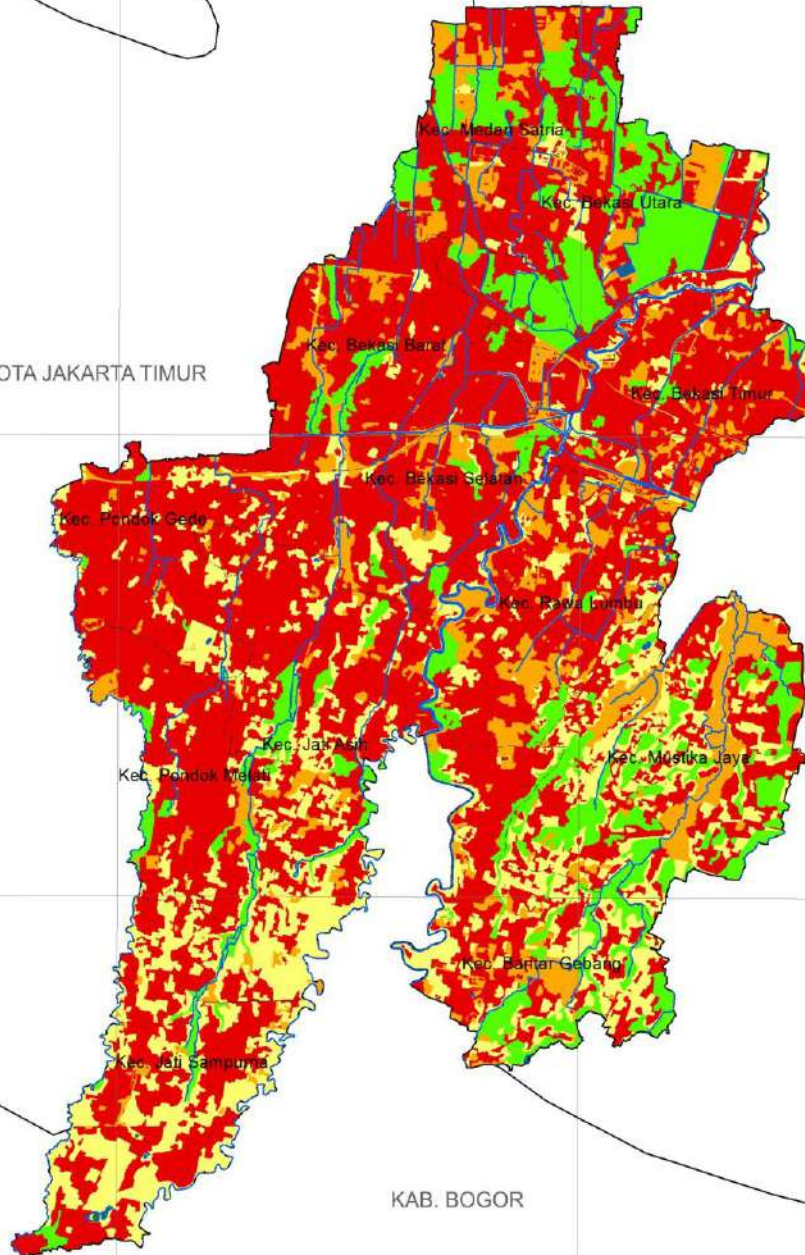
6°20'0"S

6°20'0"S

KOTA JAKARTA TIMUR

KAB. BEKASI

KAB. BOGOR



DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KOTA BEKASI

PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGI (KLHS) PERUBAHAN RPJMD KOTA BEKASI

Gambar 3.32 PETA JASA EKOSISTEM PENGATURAN PENGOLAHAN DAN PENGURAIAN LIMBAH



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi
 Datum : WGS 1984

Keterangan

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Jaringan Jalan

- Jalan Tol Nasional
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- ++ Jalan KA

Badan Air

- Sungai

Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

Sumber :

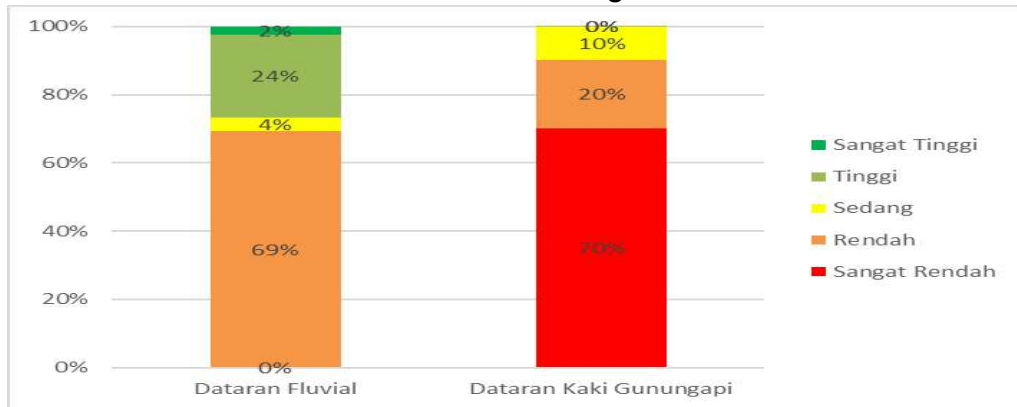
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018
- Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3EJ). 2015. Peta Ekoregion Provinsi Jawa Barat
- Hasil analisis GIS

106°55'0"E

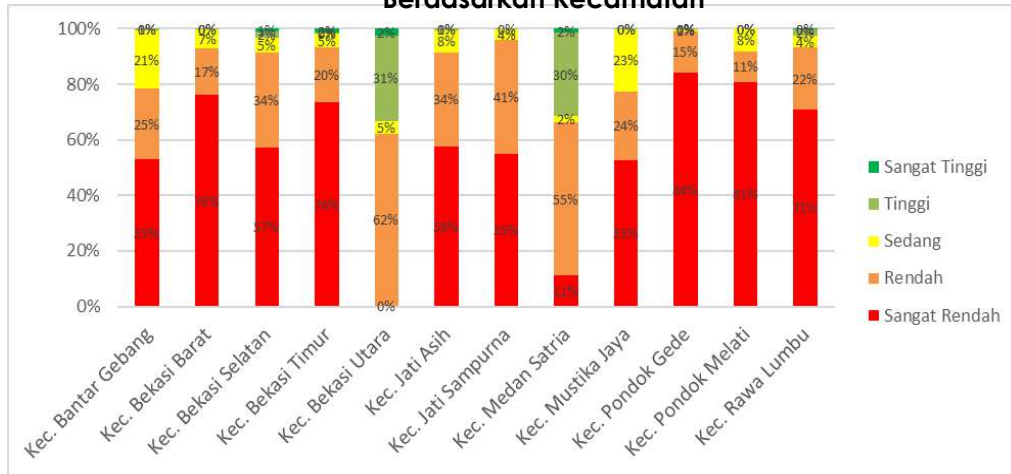
107°0'0"E

107°5'0"E

Gambar 3.33
Grafik Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Berdasarkan Ekoregion



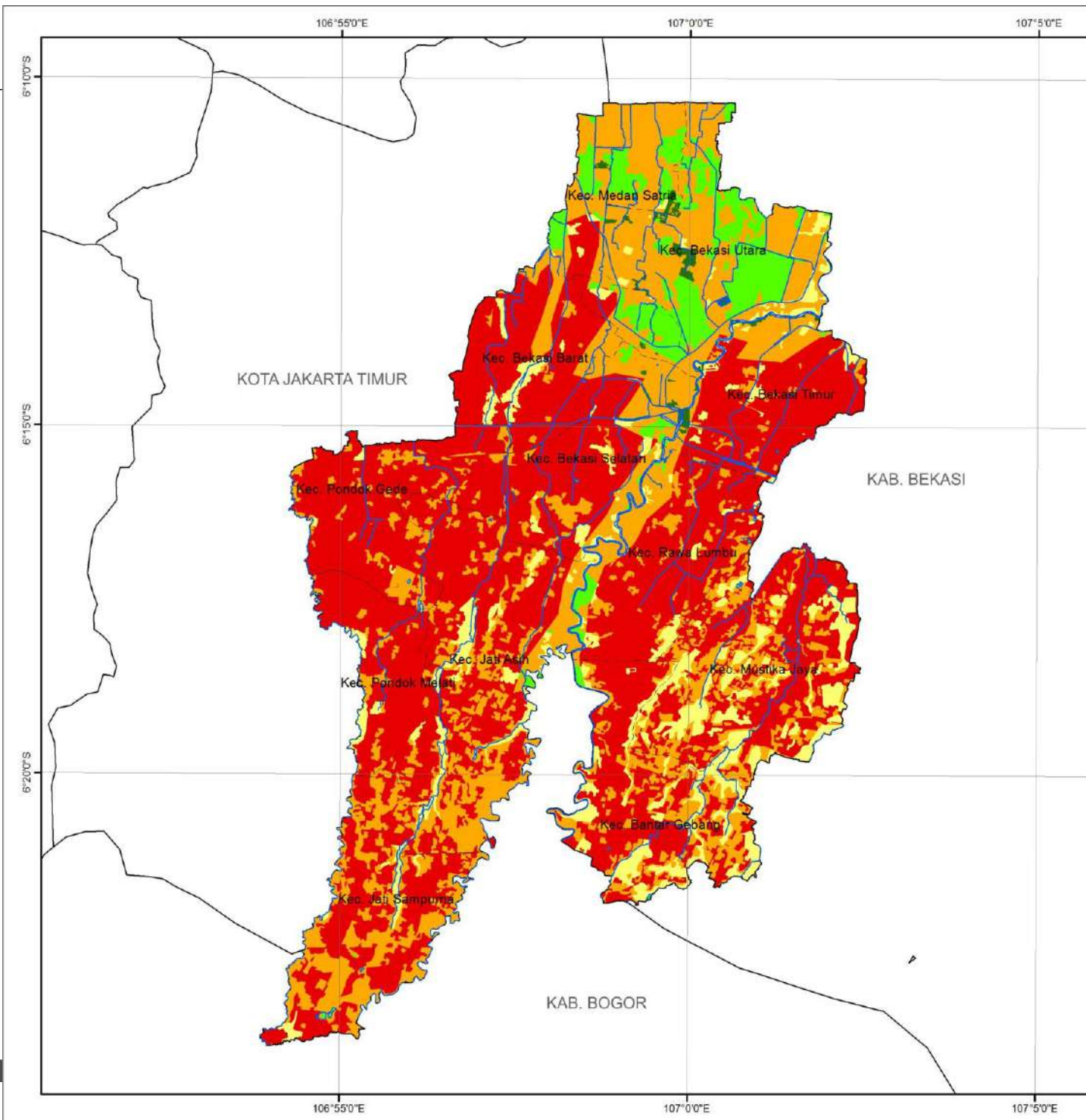
Gambar 3.34
Grafik Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Berdasarkan Kecamatan



Tabel 3.72
Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Pengatur Pencegahan dan Perlindungan Dari Bencana Tiap Kecamatan

Nama Kecamatan	Luasan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana									
	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	km2	%	km2	%	km2	%	km2	%	km2	%
Kec. Bantargebang	9,88	4,7	4,69	2,2	3,90	1,9	0,11	0,1	0,00	0,0
Kec. Bekasi Barat	11,16	5,3	2,47	1,2	1,04	0,5	0,01	0,0	0,00	0,0
Kec. Bekasi Selatan	8,66	4,1	5,12	2,4	0,82	0,4	0,35	0,2	0,14	0,1
Kec. Bekasi Timur	10,57	5,0	2,84	1,4	0,69	0,3	0,04	0,0	0,22	0,1
Kec. Bekasi Utara	0,08	0,0	12,56	6,0	0,94	0,4	6,25	3,0	0,50	0,2
Kec. Jati Asih	14,66	7,0	8,61	4,1	2,00	1,0	0,13	0,1	0,00	0,0
Kec. Jati Sampurna	10,45	5,0	7,83	3,7	0,71	0,3	0,04	0,0	0,00	0,0
Kec. Medan Satria	1,51	0,7	7,33	3,5	0,32	0,2	3,99	1,9	0,20	0,1
Kec. Mustika Jaya	13,07	6,2	6,05	2,9	5,60	2,7	0,01	0,0	0,00	0,0
Kec. Pondokgede	13,85	6,6	2,44	1,2	0,13	0,1	0,01	0,0	0,00	0,0
Kec. Pondok Melati	9,48	4,5	1,27	0,6	0,96	0,5	0,00	0,0	0,00	0,0
Kec. Rawalumbu	11,91	5,7	3,73	1,8	0,73	0,3	0,41	0,2	0,01	0,0
TOTAL LUASAN	115,28	54,8	64,95	30,9	17,84	8,5	11,35	5,4	1,06	0,5

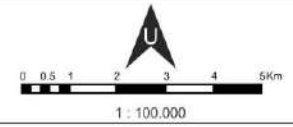
Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi, 2018



DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KOTA BEKASI

PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGI (KLHS) PERUBAHAN RPJMD KOTA BEKASI

Gambar 3.35 PETA JASA EKOSISTEM PENGATURAN PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN DARI BENCANA ALAM



Proyeksi : Tranverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi
 Datum : WGS 1984

Keterangan

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Jaringan Jalan

- Jalan Tol Nasional
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- ++ Jalan KA

Badan Air

- Sungai

Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

Sumber :

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018
- Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3EJ). 2015. Peta Ekoregion Provinsi Jawa Barat
- Hasil analisis GIS

3.6.2.6 Jasa Ekosistem Pengatur Pemurnian Air

Air mempunyai kemampuan untuk memurnikan dirinya sendiri (*self purification*). Kondisi ini tergantung dari jenis zat pencemarnya, dan penyaring alami di alam. Tanah dan batuan dapat menjadi penyaring alami untuk membantu air memurnikan dirinya sendiri. Pengaturan pemurnian air di Kota Bekasi cukup bervariasi, namun luasan pengaturan pemurnian rendah mendominasi sebesar 114,92 km² atau 54,6% dari luas wilayah 210,49 km². Dan luasan pengaturan pemurnian sangat tinggi hanya 0,14 km² atau 0,1% saja dari luas wilayah, keterangan lebih lengkap mengenai luas lahan pengaturan pemurnian air Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.73
Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Pengatur Pemurnian Air

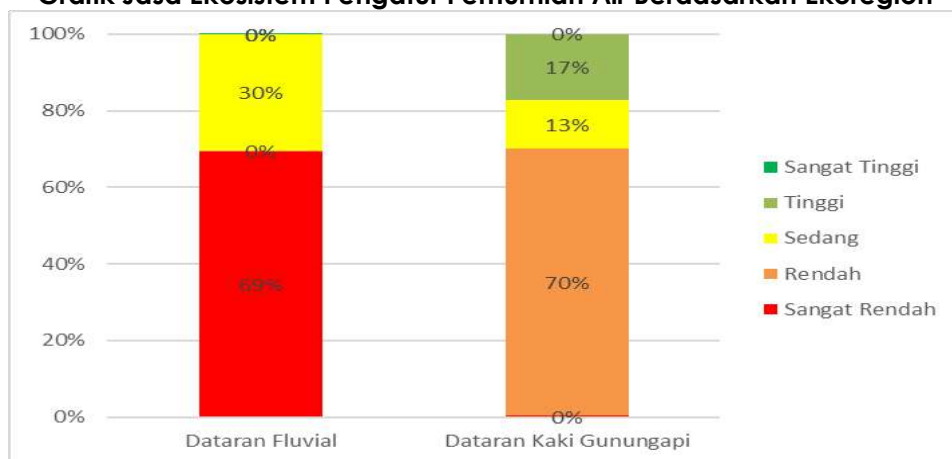
Jenis DDDTLH	Kategori	Luas (km ²)	%
Pengaturan Pemurnian Air	Sangat Rendah	32,50	15,4
	Rendah	114,92	54,6
	Sedang	34,55	16,4
	Tinggi	28,37	13,5
	Sangat Tinggi	0,14	0,1
	TOTAL	210,49	100,0

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi, 2018

Setiap ekoregion mempunyai karakteristik tanah dan batuan yang berbeda sehingga potensi pengaturannya bervariasi. Dataran fluvial lahan yang berpotensi sangat rendah mendominasi mencapai 69%, sedangkan dataran kaki gunung api lahan yang berpotensi rendah yang mendominasi sebesar 70%. Tanah dan batuan akan membantu proses alami membersihkan air secara fisik.

Sebagian ekoregion yang memiliki lahan pengaturan pemurnian air rendah adalah berpenggunaan lahan permukiman, lahan pengaturan pemurnian air rendah mendominasi mencapai 84% berada di Kecamatan Pondokgede. Jenis limbah dan sampah di bagian ini sudah kompleks dengan berbagai sumber. Penyaringan alami yang disediakan oleh alam sudah tertutup atau berubah menjadi bangunan. Hal ini dapat menghambat proses alami pemurnian air secara fisik.

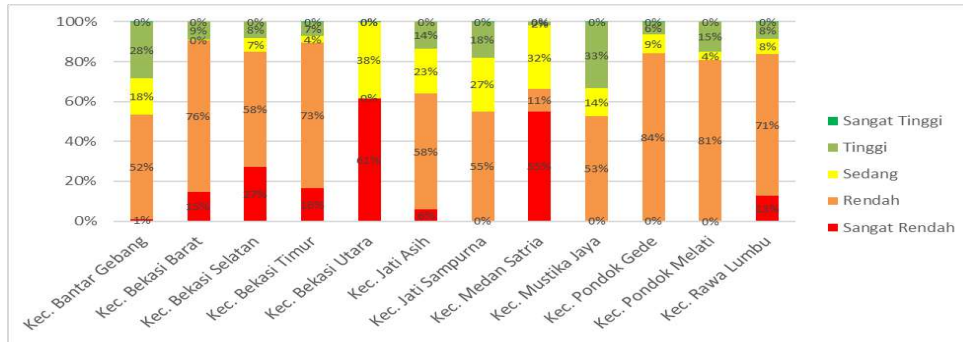
Gambar 3.36
Grafik Jasa Ekosistem Pengatur Pemurnian Air Berdasarkan Ekoregion



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Gambar 3.37
Grafik Jasa Ekosistem Pengatur Pemurnian Air Berdasarkan Kecamatan



Tabel 3.74
Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Pengatur Pemurnian Air Tiap Kecamatan

Nama Kecamatan	Luasan Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air									
	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	km2	%	km2	%	km2	%	km2	%	km2	%
Kec. Bantar Gebang	0,18	0,1	9,72	4,6	3,39	1,6	5,27	2,5	0,01	0,0
Kec. Bekasi Barat	2,17	1,0	11,14	5,3	0,05	0,0	1,31	0,6	0,00	0,0
Kec. Bekasi Selatan	4,11	2,0	8,69	4,1	1,05	0,5	1,24	0,6	0,00	0,0
Kec. Bekasi Timur	2,37	1,1	10,46	5,0	0,53	0,3	1,00	0,5	0,01	0,0
Kec. Bekasi Utara	12,50	5,9	0,09	0,0	7,66	3,6	0,03	0,0	0,04	0,0
Kec. Jati Asih	1,55	0,7	14,69	7,0	5,72	2,7	3,44	1,6	0,00	0,0
Kec. Jati Sampurna	0,06	0,0	10,39	4,9	5,17	2,5	3,37	1,6	0,04	0,0
Kec. Medan Satria	7,36	3,5	1,48	0,7	4,26	2,0	0,26	0,1	0,00	0,0
Kec. Mustika Jaya	0,06	0,0	13,01	6,2	3,40	1,6	8,25	3,9	0,01	0,0
Kec. Pondok Gede	0,03	0,0	13,82	6,6	1,53	0,7	1,04	0,5	0,01	0,0
Kec. Pondok Melati	0,01	0,0	9,48	4,5	0,46	0,2	1,78	0,8	0,00	0,0
Kec. Rawa Lumbu	2,11	1,0	11,93	5,7	1,34	0,6	1,39	0,7	0,02	0,0
TOTAL LUASAN	32,50	15,4	114,92	54,6	34,55	16,4	28,37	13,5	0,14	0,1

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi, 2018

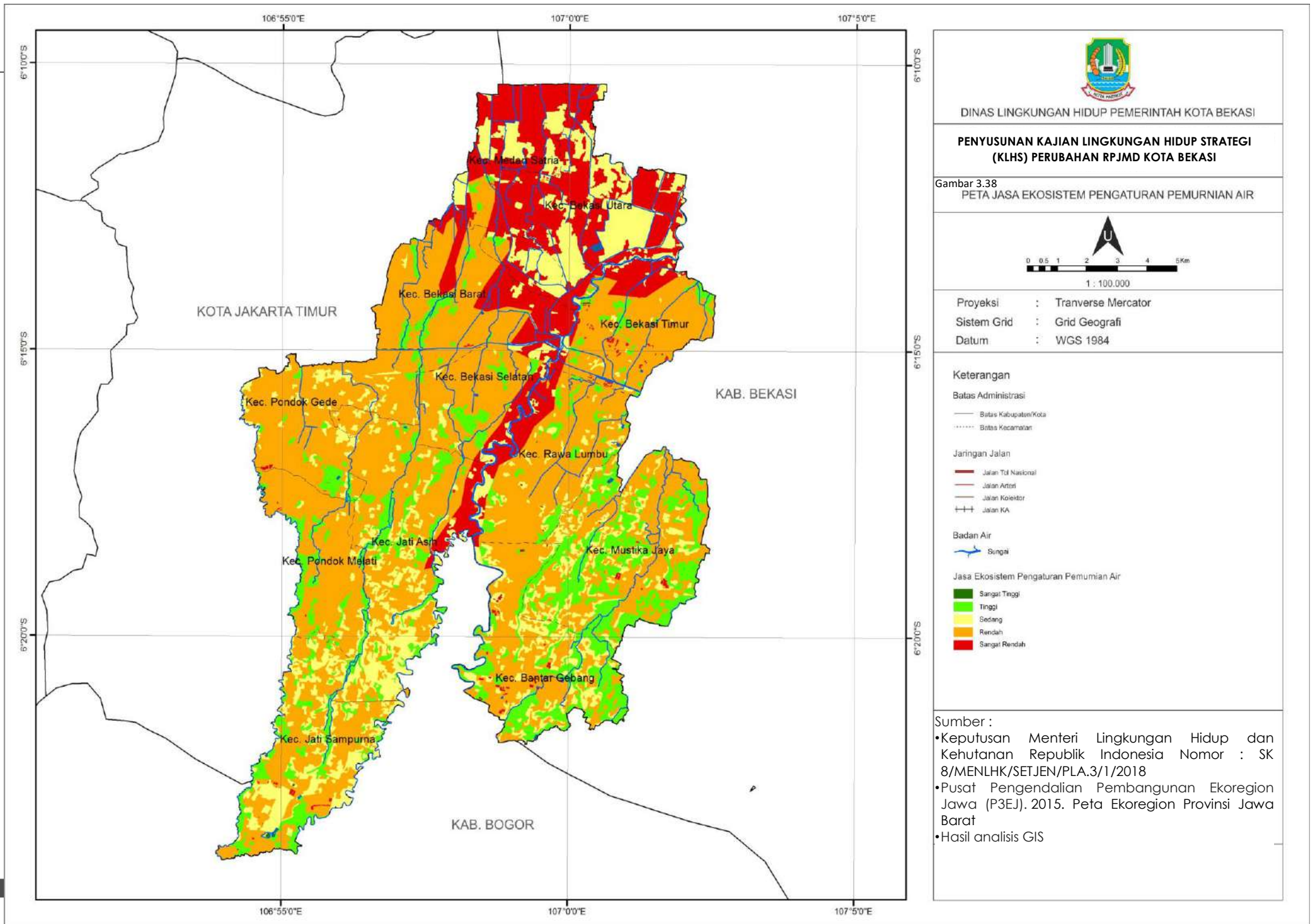
3.6.2.7 Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara

Kebutuhan oksigen merupakan paling utama bagi kehidupan manusia. Kebutuhan tidak hanya secara kuantitas akan tetapi kualitas. Kualitas udara yang buruk justru akan berdampak terhadap kesehatan manusia. Pengaturan pemeliharaan kualitas udara di Kota Bekasi termasuk kategori yang rendah 104,2 km² atau 49,5% dari luas wilayah 210,49 km², diikuti luas lahan kategori sangat tinggi 49,1 km² atau 23,3%, luas lahan kategori sangat rendah 24,4 km² atau 11,6%, luas lahan kategori sedang 18,6 km² atau 8,8%, sedangkan untuk luas lahan kategori tinggi hanya 14,2 km² atau 6,7% dari luas wilayah. Aspek fisiografis ekoregion dan tutupan lahan menjadi faktor penting untuk menggambarkan potensi pengaturan kualitas udara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.75
Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Pengatur Pemeliharaan Kualitas Udara

Jenis DDDLH	Kategori	Luas (km ²)	%
Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara	Sangat Rendah	24,4	11,6
	Rendah	104,2	49,5
	Sedang	18,6	8,8
	Tinggi	14,2	6,7
	Sangat Tinggi	49,1	23,3
TOTAL		210,49	100,0

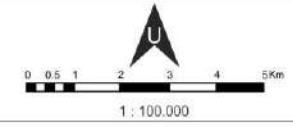
Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi, 2018



DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KOTA BEKASI

PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGI (KLHS) PERUBAHAN RPJMD KOTA BEKASI

Gambar 3.38
PETA JASA EKOSISTEM PENGATURAN PEMURNIAN AIR



Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum : WGS 1984

Keterangan

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Jaringan Jalan

- Jalan Tol Nasional
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan KA

Badan Air

- Sungai

Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

Sumber :

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018
- Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa Barat (P3EJ). 2015. Peta Ekoregion Provinsi Jawa Barat
- Hasil analisis GIS

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

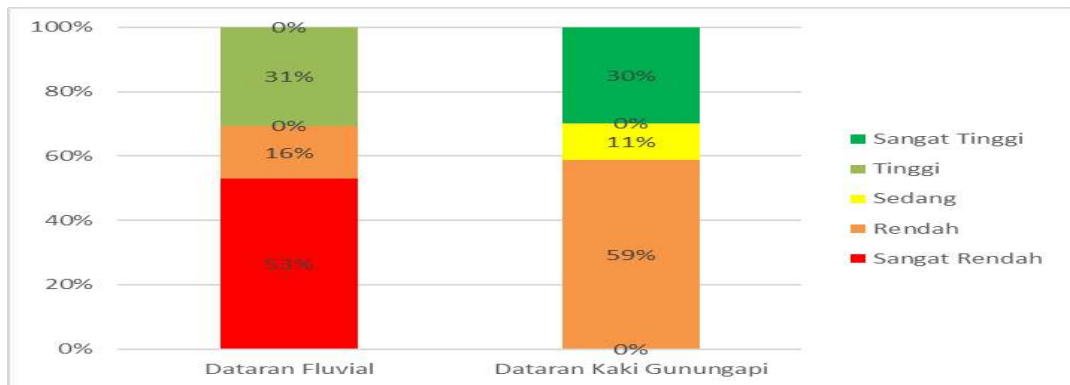
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Pengaturan pemeliharaan kualitas udara maka ekoregion dataran fluvial didominasi oleh potensi lahan sangat rendah (53%) dan pada ekoregion dataran kaki gunung api didominasi oleh potensi lahan rendah (59%). Sebaran potensi lahan dengan pengaturan pemeliharaan kualitas udara per kecamatan terlihat potensi lahan setiap kecamatan sangat bervariasi akan tetapi untuk lahan rendah masih mendominasi pada setiap kecamatan.

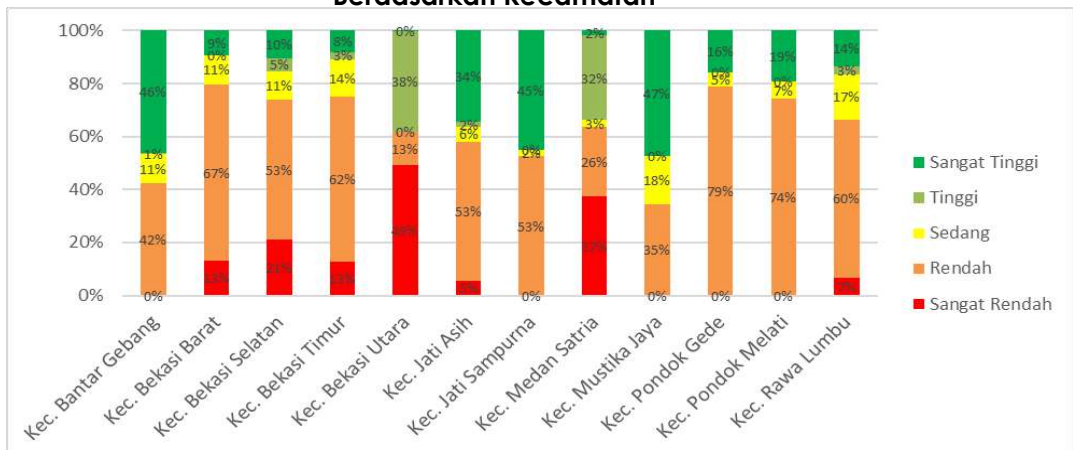
Perbedaan penggunaan lahan di ekoregion membuat potensi untuk pengaturan kualitas udara berbeda. Penggunaan lahan berupa perkebunan, semak belukar dan padang rumput mempunyai kerapatan vegetasi lebih rendah dibandingkan kawasan hutan. Kondisi lingkungan sudah berubah karena kegiatan manusia sudah masif sehingga terdapat kontaminasi udara. Ekoregion yang sudah menjadi wilayah terbangun mempunyai potensi sangat rendah untuk pengaturan kualitas udara.

Polusi di permukiman sudah masif dari kendaraan bermotor atau industri sehingga udara terkontaminasi. Kondisi ini diperparah jumlah vegetasi yang minim sehingga produksi oksigen rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 3.39
Grafik Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Berdasarkan Ekoregion



Gambar 3.40
Grafik Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Berdasarkan Kecamatan



Tabel 3.76
Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Pengatur Pemeliharaan
Kualitas Udara Tiap Kecamatan

Nama Kecamatan	Luasan Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara									
	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	km2	%	km2	%	km2	%	km2	%	km2	%
Kec. Bantar Gebang	0,00	0,0	7,88	3,7	2,02	1,0	0,10	0,0	8,58	4,1
Kec. Bekasi Barat	1,92	0,9	9,77	4,6	1,62	0,8	0,01	0,0	1,35	0,6
Kec. Bekasi Selatan	3,16	1,5	8,00	3,8	1,61	0,8	0,76	0,4	1,56	0,7
Kec. Bekasi Timur	1,86	0,9	8,90	4,2	2,05	1,0	0,38	0,2	1,17	0,6
Kec. Bekasi Utara	10,00	4,7	2,56	1,2	0,01	0,0	7,69	3,7	0,07	0,0
Kec. Jati Asih	1,39	0,7	13,35	6,3	1,46	0,7	0,46	0,2	8,74	4,2
Kec. Jati Sampurna	0,00	0,0	9,99	4,7	0,46	0,2	0,00	0,0	8,57	4,1
Kec. Medan Satria	4,98	2,4	3,52	1,7	0,34	0,2	4,26	2,0	0,26	0,1
Kec. Mustika Jaya	0,00	0,0	8,54	4,1	4,53	2,2	0,00	0,0	11,67	5,5
Kec. Pondok Gede	0,00	0,0	12,99	6,2	0,87	0,4	0,00	0,0	2,57	1,2
Kec. Pondok Melati	0,00	0,0	8,70	4,1	0,79	0,4	0,00	0,0	2,23	1,1
Kec. Rawa Lumbu	1,13	0,5	10,02	4,8	2,86	1,4	0,50	0,2	2,28	1,1
TOTAL LUASAN	24,44	11,6	104,22	49,5	18,63	8,8	14,15	6,7	49,05	23,3

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi, 2018

3.6.2.8 Jasa Ekosistem Pengatur Iklim

Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa pengatur iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi. Untuk Kota Bekasi termasuk pada pengaturan iklim yang sangat rendah 57,5% atau 121,09 km² dari total wilayah 210,49 km². Disusul dengan lahan dengan kategori sangat tinggi sebanyak 23,3% atau 49,01 km². Terdapat lahan kategori rendah hanya 12,4% atau 26,19 km², sedangkan lahan kategori tinggi sebesar 6,7% atau 14,19 km². Secara lengkap dapat luasan dari lahan dengan pengaturan iklim dilihat dalam tabel dibawah ini.

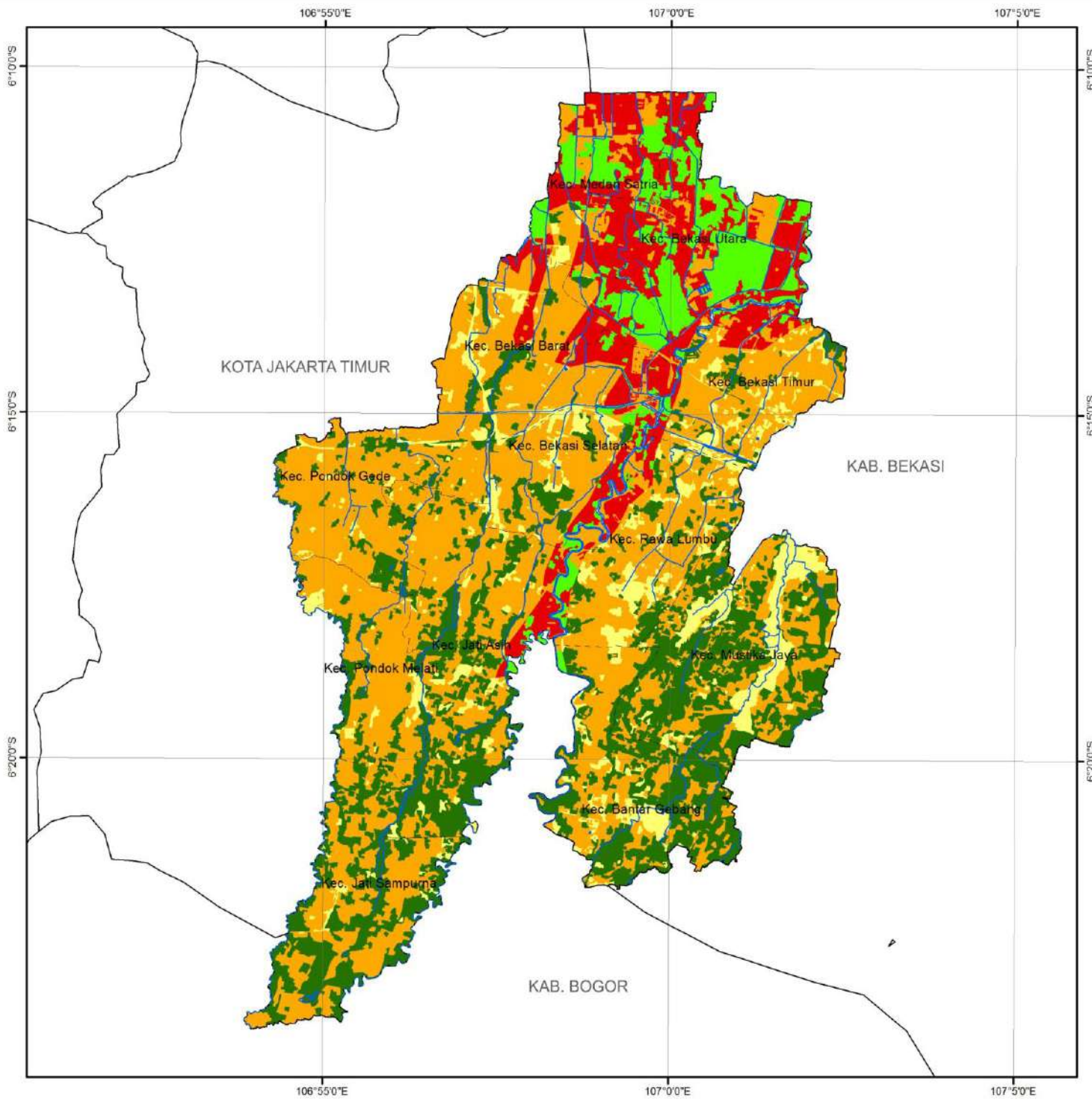
Tabel 3.77
Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Pengatur Iklim

Jenis DDDTLH	Kategori	Luas (km2)	%
Pengaturan Iklim	Sangat Rendah	121,09	57,5
	Rendah	26,19	12,4
	Tinggi	14,19	6,7
	Sangat Tinggi	49,01	23,3
	TOTAL	210,49	100,0

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi, 2018

Jenis penggunaan lahan terutama hutan, di suatu Kecamatan atau Kota mempengaruhi tingkat pengaturan iklim. Dapat terlihat bahwa untuk pengaturan iklim maka ekoregion dataran fluvial didominasi oleh lahan pengaturan iklim sangat rendah (53%) dan pada ekoregion dataran kaki gunungapi didominasi oleh lahan pengaturan iklim rendah (59%). Kota Bekasi mempunyai potensi sangat rendah untuk pengaturan iklim.

Luas lahan pengaturan iklim sangat rendah mencapai 79% dari luas total terletak di Kecamatan Pondokgede, sedangkan pengaturan iklim sangat tinggi seluas 39% terletak di Kecamatan Bantargebang. Kecamatan yang berpotensi sangat tinggi untuk pengaturan iklim mempunyai penggunaan lahan hutan primer yang luas.



DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KOTA BEKASI

PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGI (KLHS) PERUBAHAN RPJMD KOTA BEKASI

Gambar 3.41
PETA JASA EKOSISTEM PENGATURAN KUALITAS UDARA



Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum : WGS 1984

Keterangan

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Jaringan Jalan

- Jalan Tol Nasional
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- ++ Jalan KA

Badan Air

- Sungai

Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Sangat Rendah

Sumber :

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018
- Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa Barat (P3EJ). 2015. Peta Ekoregion Provinsi Jawa Barat
- Hasil analisis GIS

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

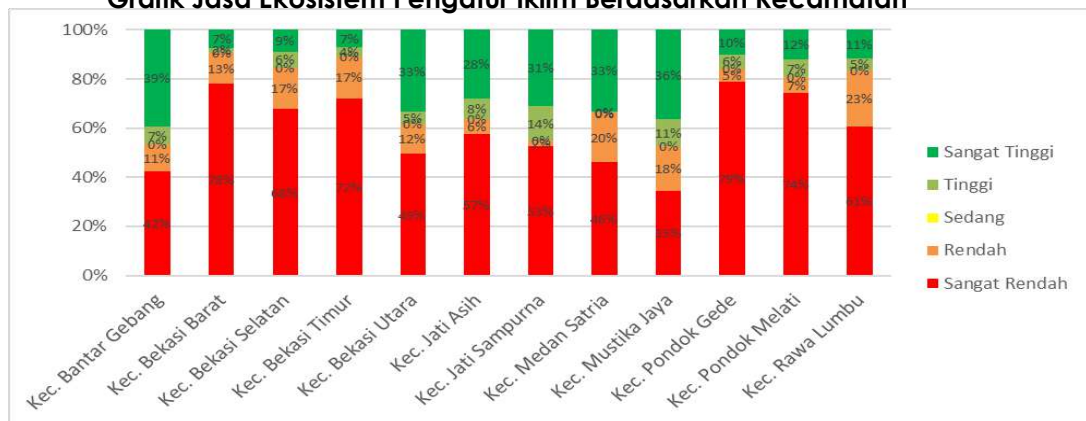
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Wilayah yang berpenggunaan lahan permukiman mempunyai potensi rendah dan sangat rendah untuk pengaturan iklim. Kota administratif memiliki lahan berpotensi sangat rendah relatif luas. Minimnya vegetasi di lahan terbangun membuat pasokan oksigen yang bersih sangat minim. Hal ini membuat iklim di perkotaan relatif panas dan kurang sejuk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.42
Grafik Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Berdasarkan Ekoregion



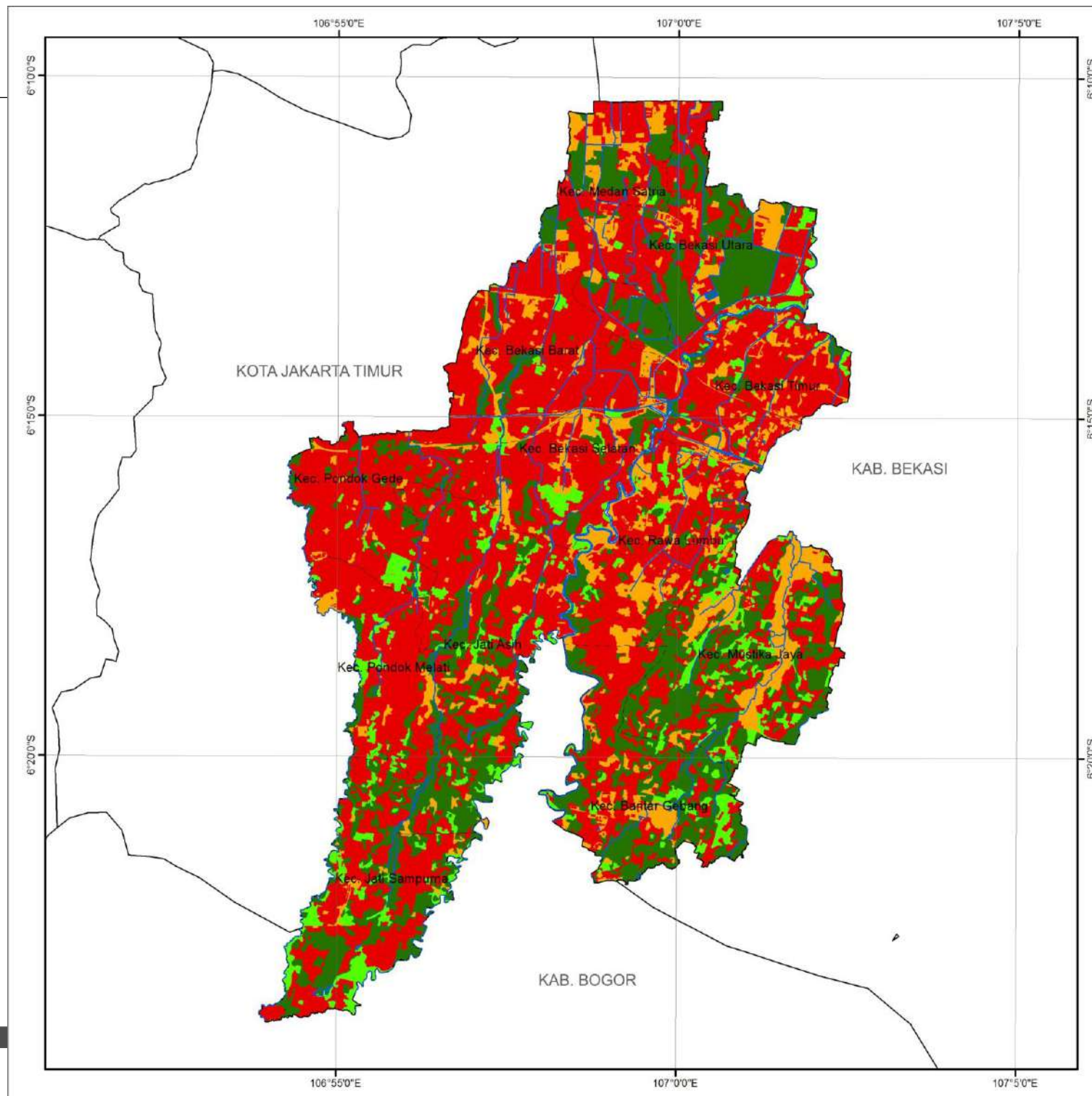
Gambar 3.43
Grafik Jasa Ekosistem Pengatur Iklim Berdasarkan Kecamatan



Tabel 3.78
Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Pengatur Iklim Tiap Kecamatan

Nama Kecamatan	Luasan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim									
	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	km2	%	km2	%	km2	%	km2	%	km2	%
Kec. Bantar Gebang	7,86	3,7	2,04	1,0	0,00	0,0	1,37	0,7	7,30	3,5
Kec. Bekasi Barat	11,46	5,4	1,86	0,9	0,00	0,0	0,28	0,1	1,08	0,5
Kec. Bekasi Selatan	10,21	4,9	2,56	1,2	0,00	0,0	0,98	0,5	1,34	0,6
Kec. Bekasi Timur	10,37	4,9	2,44	1,2	0,00	0,0	0,55	0,3	1,00	0,5
Kec. Bekasi Utara	10,06	4,8	2,52	1,2	0,00	0,0	0,96	0,5	6,79	3,2
Kec. Jati Asih	14,59	6,9	1,61	0,8	0,00	0,0	2,09	1,0	7,11	3,4
Kec. Jati Sampurna	9,99	4,7	0,46	0,2	0,00	0,0	2,66	1,3	5,92	2,8
Kec. Medan Satria	6,15	2,9	2,69	1,3	0,00	0,0	0,07	0,0	4,45	2,1
Kec. Mustika Jaya	8,54	4,1	4,53	2,2	0,00	0,0	2,65	1,3	9,01	4,3
Kec. Pondok Gede	12,99	6,2	0,87	0,4	0,00	0,0	0,91	0,4	1,66	0,8
Kec. Pondok Melati	8,70	4,1	0,79	0,4	0,00	0,0	0,82	0,4	1,41	0,7
Kec. Rawa Lumbu	10,18	4,8	3,83	1,8	0,00	0,0	0,85	0,4	1,92	0,9
TOTAL LUASAN	121,09	57,5	26,19	12,4	0,00	0,0	14,19	6,7	49,01	23,3

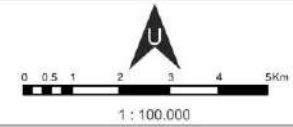
Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi, 2018



DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KOTA BEKASI

PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGI (KLHS) PERUBAHAN RPJMD KOTA BEKASI

Gambar 3.44
PETA JASA EKOSISTEM PENGATURAN IKLIM



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum : WGS 1984

Keterangan

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Jaringan Jalan

- Jalan Tol Nasional
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- +++ Jalan KA

Badan Air

- Sungai

Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Rendah
- Sangat Rendah

Sumber :

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018
- Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3EJ). 2015. Peta Ekoregion Provinsi Jawa Barat
- Hasil analisis GIS

3.6.2.9 Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Budaya tempat tinggal dan ruang hidup di Kota Bekasi berpotensi sangat tinggi 57,1% atau 120,11 km², disusul lahan dengan budaya tempat tinggal dan ruang hidup kategori sedang 19,3% atau 40,56 km², sangat rendah 13,3% atau 27,97 km², dan 10,4% atau 21,85 km² untuk lahan budaya tempat tinggal dan ruang hidup kategori rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.79

Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

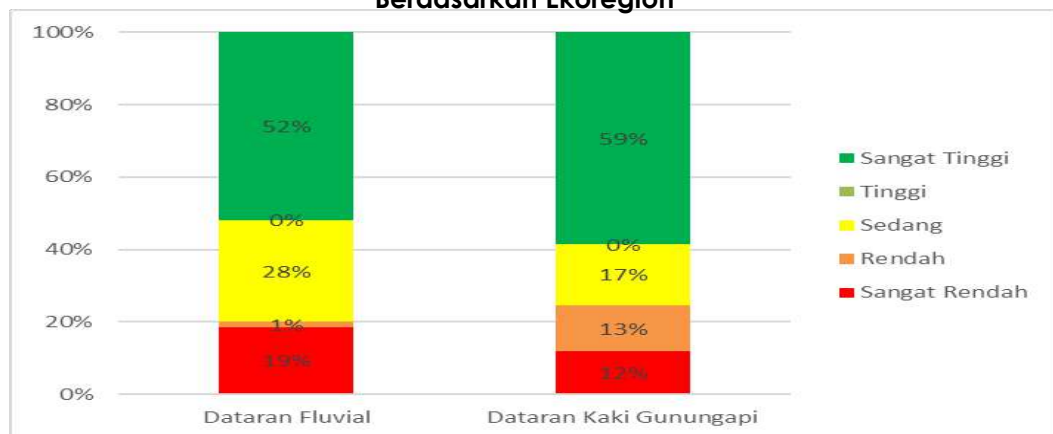
Jenis DDDLH	Kategori	Luas (km ²)	%
Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	Sangat Rendah	27,97	13,3
	Rendah	21,85	10,4
	Sedang	40,56	19,3
	Sangat Tinggi	120,11	57,1
	TOTAL	210,49	100,0

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi, 2018

Ekoregion wilayah Kota Bekasi berpotensi sangat tinggi untuk pemukiman, pada dataran *fluvial* lahan budaya tempat tinggal dan ruang hidup kategori sangat tinggi sebesar 52%, dan untuk dataran kaki gunung api 59% untuk lahan budaya tempat tinggal dan ruang hidup kategori sangat tinggi. Keanekaragaman potensi lahan di beberapa wilayah Kota Bekasi di dominasi lahan budaya tempat tinggal dan ruang hidup sangat tinggi terlihat hampir di setiap kecamatan seperti di Kecamatan Pondokgede dengan 79% dari luas wilayahnya. Kecamatan yang didominasi lahan potensi sangat tinggi membuktikan bahwa kehidupan di kota besar dan pemukiman berkembang sangat pesat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.45

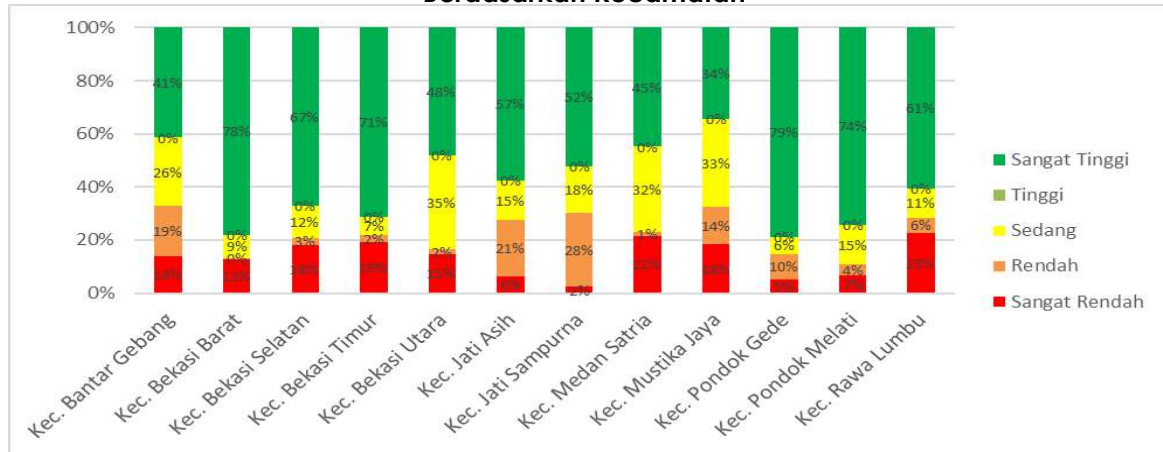
Grafik Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Berdasarkan Ekoregion



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Gambar 3.46
Grafik Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Berdasarkan Kecamatan



Tabel 3.80
Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Tiap Kecamatan

Nama Kecamatan	Luasan Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup									
	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	km2	%	km2	%	km2	%	km2	%	km2	%
Kec. Bantar Gebang	2,62	1,2	3,46	1,6	4,80	2,3	0,00	0,0	7,70	3,7
Kec. Bekasi Barat	1,89	0,9	0,06	0,0	1,29	0,6	0,00	0,0	11,45	5,4
Kec. Bekasi Selatan	2,73	1,3	0,42	0,2	1,80	0,9	0,00	0,0	10,14	4,8
Kec. Bekasi Timur	2,78	1,3	0,35	0,2	1,02	0,5	0,00	0,0	10,22	4,9
Kec. Bekasi Utara	2,98	1,4	0,35	0,2	7,19	3,4	0,00	0,0	9,80	4,7
Kec. Jati Asih	1,61	0,8	5,35	2,5	3,85	1,8	0,00	0,0	14,58	6,9
Kec. Jati Sampurna	0,46	0,2	5,27	2,5	3,37	1,6	0,00	0,0	9,93	4,7
Kec. Medan Satria	2,89	1,4	0,16	0,1	4,31	2,0	0,00	0,0	5,99	2,8
Kec. Mustika Jaya	4,53	2,2	3,47	1,6	8,25	3,9	0,00	0,0	8,48	4,0
Kec. Pondok Gede	0,87	0,4	1,56	0,7	1,04	0,5	0,00	0,0	12,96	6,2
Kec. Pondok Melati	0,79	0,4	0,46	0,2	1,78	0,8	0,00	0,0	8,69	4,1
Kec. Rawa Lumbu	3,83	1,8	0,94	0,4	1,85	0,9	0,00	0,0	10,16	4,8
TOTAL LUASAN	27,97	13,3	21,85	10,4	40,56	19,3	0,00	0,0	120,11	57,1

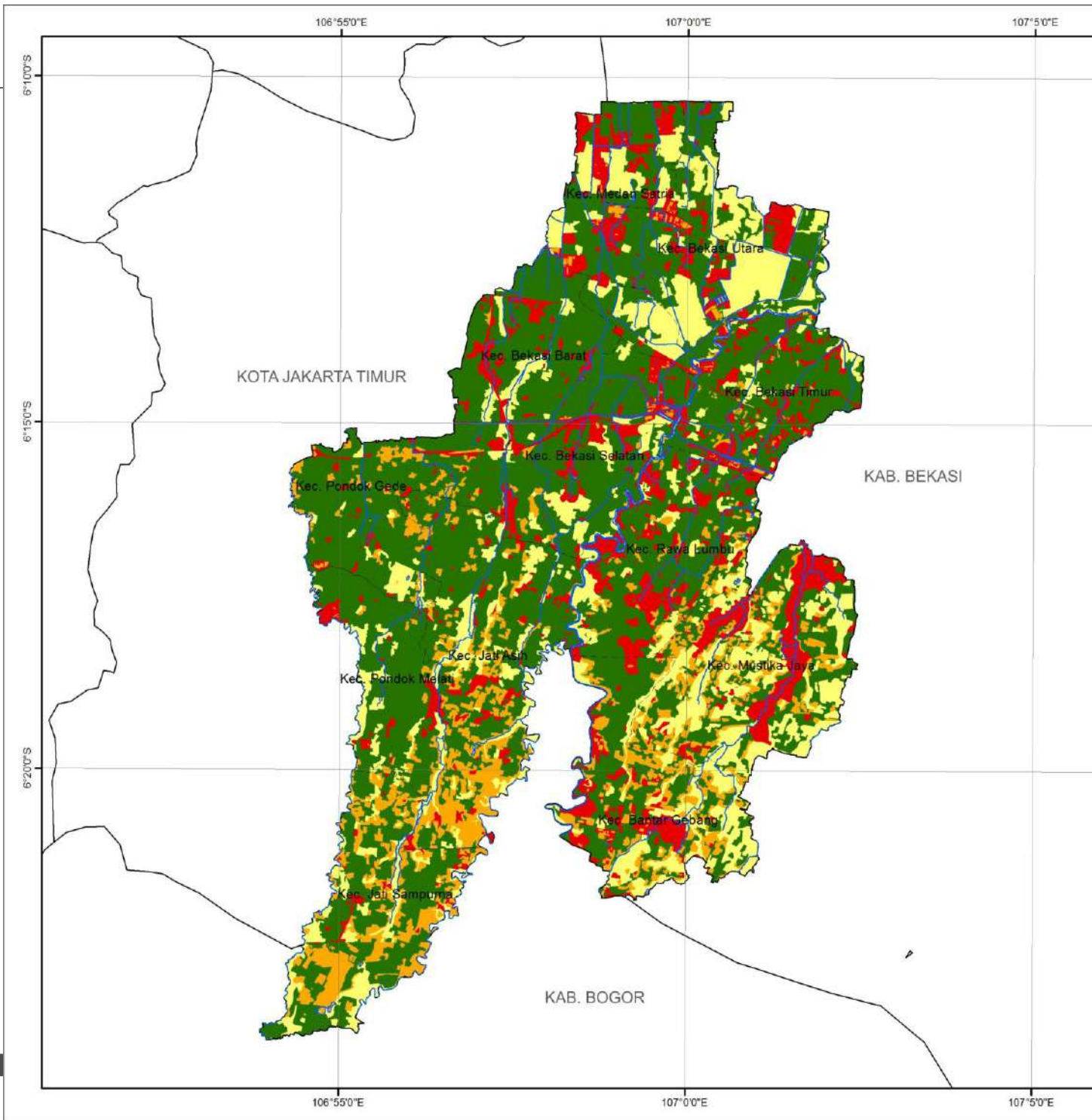
Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi, 2018

3.6.3 Perkiraan Dampak Dan Resiko Lingkungan

Analisis perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup merupakan analisis perkiraan dampak kebijakan, rencana dan/atau program terhadap lingkungan hidup dan risiko lingkungan hidup merupakan kemungkinan atau tingkat kejadian, bahaya, konsekuensi yang ditimbulkan kondisi lingkungan yang jadi ancaman ekosistem, kesehatan dan keselamatan manusia.

Beberapa kebijakan, program dan kegiatan yang di perkirakan menimbulkan dampak resiko lingkungan diantaranya:

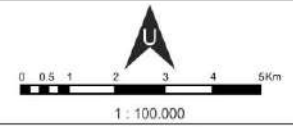
1. Pengembangan pusat-pusat kegiatan akan berdampak/beresiko terhadap lingkungan diantaranya meliputi:
 - a. adanya alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai daerah resapan, berkurangnya daerah resapan akan meningkatkan air larian (Run Off) dan di perkirakan akan meningkatnya wilayah banjir/wilayah genangan;



DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KOTA BEKASI

PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGI (KLHS) PERUBAHAN RPJMD KOTA BEKASI

Gambar 3.47 PETA JASA EKOSISTEM BUDAYA TEMPAT TINGGAL DAN RUANG HIDUP



Proyeksi : Tranverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi
 Datum : WGS 1984

Keterangan

- Batas Administrasi**
- Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
- Jaringan Jalan**
- Jalan Tol Nasional
 - Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - ++ Jalan KA
- Badan Air**
- Sungai
- Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup**
- Sangat Tinggi
 - Sedang
 - Rendah
 - Sangat Rendah

Sumber :

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018
- Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa Barat (P3EJ). 2015. Peta Ekoregion Provinsi Jawa Barat
- Hasil analisis GIS

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

- b. Banyaknya fungsi kegiatan yang berkembang di pusat-pusat kegiatan di perkiraan akan berdampak pada meningkatkan timbulan sampah, limbah cair dan meningkatnya kebutuhan air;
 - c. Meningkatkan bangkitan lalu lintas, secara tidak langsung di perkiraan akan meningkatnya polusi udara/ peningkatan emisi gas polutan
 2. Pengembangan Jaringan Transportasi dan Sarana Perhubungan akan berdampak/beresiko terhadap lingkungan diantaranya meliputi:
 - a. adanya alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai daerah resapan, berkurangnya daerah resapan akan meningkatkan air larian (*Run Off*) dan di perkiraan akan meningkatnya wilayah banjir/wilayah genangan;
 - b. Banyaknya fungsi kegiatan yang berkembang di sepanjang jalan yang dan pada lokasi sarana perhubungan diperkirakan akan berdampak pada meningkatkan timbulan sampah, limbah cair dan meningkatnya kebutuhan air;
 - c. Meningkatkan bangkitan lalu lintas, secara tidak langsung di perkiraan akan meningkatnya polusi udara/ peningkatan emisi gas polutan dan kebisingan bagi masyarakat terutama yang tinggal di sekitar proyek;
 3. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman akan berdampak/beresiko terhadap lingkungan diantaranya meliputi:
 - a. adanya alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai daerah resapan, berkurangnya daerah resapan akan meningkatkan air larian (*Run Off*) dan di perkiraan akan meningkatnya wilayah banjir/wilayah genangan;
 - b. Banyaknya aktivitas manusia diperkirakan akan berdampak pada meningkatkan timbulan sampah, limbah cair dan meningkatnya kebutuhan air;
 4. Pengembangan kawasan peruntukan industri akan berdampak/beresiko terhadap lingkungan diantaranya meliputi:
 - a. adanya alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai daerah resapan, berkurangnya daerah resapan akan meningkatkan air larian (*Run Off*) dan di perkiraan akan meningkatnya wilayah banjir/wilayah genangan;
 - b. Banyaknya fungsi kegiatan yang berkembang untuk mendukung kawasan industri diperkirakan akan berdampak pada meningkatkan timbulan sampah, limbah cair dan meningkatnya kebutuhan air;
 - c. sebagai akibat dari adanya kegiatan industri di perkiraan akan berdampak pada pencemaran lingkungan dari limbah pabrik dan limbah B3
 - d. Meningkatkan bangkitan lalu lintas, secara tidak langsung di perkiraan akan menimbulkan kemacetan dan secara langsung akan meningkatnya polusi udara/ peningkatan emisi gas polutan dan kebisingan bagi masyarakat terutama yang tinggal di sekitar proyek;
 - e. pengembangan kawasan industri akan berdampak pada kebutuhan bagi perumahan karyawan dan sarana prasarana pendukung perumahan;
 5. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa akan berdampak/beresiko terhadap lingkungan diantaranya meliputi:
 - a. adanya alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai daerah resapan, berkurangnya daerah resapan

- akan meningkatkan air larian (*Run Off*) dan di perkirakan akan meningkatnya wilayah banjir/wilayah genangan;
- b. Banyaknya fungsi kegiatan yang berkembang untuk mendukung kawasan perdagangan dan jasa diperkirakan akan berdampak pada meningkatkan timbulan sampah, limbah cair dan meningkatnya kebutuhan air;
 - c. Meningkatkan bangkitan lalu lintas, secara tidak langsung di perkirakan akan menimbulkan kemacetan dan secara langsung akan meningkatnya polusi udara/ peningkatan emisi gas polutan dan kebisingan bagi masyarakat terutama yang tinggal di sekitar proyek;
6. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata akan berdampak/beresiko terhadap lingkungan diantaranya meliputi:
- a. adanya alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai daerah resapan, berkurangnya daerah resapan akan meningkatkan air larian (*Run Off*) dan di perkirakan akan meningkatnya wilayah banjir/wilayah genangan;
 - b. Banyaknya fungsi kegiatan yang berkembang untuk mendukung kawasan pariwisata diperkirakan akan berdampak pada meningkatkan timbulan sampah, limbah cair dan meningkatnya kebutuhan air;
 - c. Meningkatkan bangkitan lalu lintas, secara tidak langsung di perkirakan akan menimbulkan kemacetan dan secara langsung akan meningkatnya polusi udara/ peningkatan emisi gas polutan dan kebisingan bagi masyarakat terutama yang tinggal di sekitar proyek

Perkiraan resiko dampak dari adanya program dan kegiatan pembangunan yaitu diantaranya:

1. Tekanan terhadap kebutuhan lahan sebagai akibat dari adanya pertumbuhan penduduk dan kegiatannya akan memicu terjadinya alih fungsi lahan dan berkurangnya daerah resapan sehingga resiko banjir yang akan semakin meningkat
2. Timbulan Sampah
3. Beban pencemaran yang akan terus meningkat

3.6.3.1 Rawan Banjir atau Genangan

Banjir merupakan salah satu isu lingkungan hidup terkait dengan bencana alam yang sering terjadi secara berkelanjutan di Kota Bekasi. Banjir di Kota Bekasi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Luapan dari sungai akibat debit yang mengalir di sungai melebihi kapasitas alur sungai (air yang meluap tersebut berasal dari lokasi lain yaitu dari daerah hulunya).
2. Alih fungsi lahan yang mengakibatkan wilayah resapan berkurang.
3. Curah hujan yang tinggi dengan kapasitas saluran drainase untuk mengalirkan air larian (*Run Off*) tidak memadai.

Dari data Dinas Bina Marga pada tahun 2016, titik lokasi banjir sebanyak 85 titik dengan luas wilayah yang terkena banjir yaitu sebesar 2.873.38 Ha atau sekitar 13,65 % dari luas Kota Bekasi dan kecamatan yang paling luas terkena bencana banjir yaitu Kecamatan Rawalumbu sekitar 34,03% dari luas wilayahnya terkena banjir, lebih jelasnya mengenai sebaran dan lokasi luas banjir di Kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.81
Luas Sebaran Banjir di Kota Bekasi Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Lokasi Banjir (Ha)	(%) Lokasi Banjir
1	Pondokgede	1.629	230,02	14,12
2	Jatisampurna	1.449	159,19	10,99
3	Pondok Melati	1.857	77,77	4,18
4	Jatiasih	2.2	352,00	16,00
5	Bantargebang	1.704	-	-
6	Mustika Jaya	2.473	54,74	2,21
7	Bekasi Timur	1.349	393,91	29,20
8	Rawalumbu	1.567	533,35	34,03
9	Bekasi Selatan	1.496	406,96	27,20
10	Bekasi Barat	1.889	354,73	18,78
11	Medansatria	1.471	164,81	11,20
12	Bekasi Utara	1.965	145,91	7,43
	Kota Bekasi	21.049	2.873,38	13,63

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi, 2018

3.6.3.2 Pencemaran Udara

Berdasarkan hasil pemantauan udara ambien periode tanggal 19 September s/d 20 September 2018, diketahui bahwa konsentrasi parameter SO₂, CO, NO₂, O₃ dan TSP masih memenuhi baku mutu udara ambien. Hasil pemantauan dibandingkan dengan baku mutu udara ambien nasional yang merujuk pada Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Selengkapanya kondisi masing-masing pencemar adalah sebagai berikut:

a. Sulfur Dioksida (SO₂)

Konsentrasi SO₂ tertinggi sebesar 47,9 µg/Nm³ yang terdapat di Bundaran Harapan Indah dan Depan Gor Bekasi, sedangkan konsentrasi terendah dengan < 47,9- 47,9 µg/Nm³ di lokasi pantau taman makam pahlawan.

b. Karbon Monoksida (CO)

Konsentrasi CO tertinggi sebesar 3.638 ug/m³ yang terdapat Bundaran Harapan Indah, sedangkan konsentrasu terendah dengan 668 ug/m³ berada di lokasi Depan Gor Bekasi.

c. Nitrogen Dioksida (NO₂)

Konsentrasi NO₂ tertinggi sebesar 158,15 ug/m³ yang terdapat di Depan Gor Bekasi. Sedangkan konsentrasi terendah dengan 69,21ug/m³ berada di lokasi Taman Makam Pahlawan.

d. Ozon

Konsentrasi parameter ozon (O₃) tertinggi sebesar 176,56 ug/m³ yang terdapat di Taman Makam Pahlawan, sedangkan konsentrasi terendah dengan 112,36 ug/m³ berada di lokasi Depan Gor Bekasi.

e. Debu (TSP)

Konsentrasi parameter Debu (TSP) tertinggi sebesar 190, 65 µg/Nm³ yang terdapat di Taman Makam Pahlawan, sedangkan konsentrasi terendah dengan 176,52 µg/Nm³ berada di lokasi Depan Gor Bekasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai kualitas udara ambien di Kota Bekasi dapat dilihat pada table di bawah ini.

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Tabel 3.82
Kualitas Udara Ambien Kota Bekasi (Periode 19 Sep s/d 20 Sep 2018)

Lokasi	Lama Pengukuran	SO ₂ (µg/Nm ³)	CO (µg/Nm ³)	NO ₂ (µg/Nm ³)	O ₃ (µg/Nm ³)	HC (µg/Nm ³)	PM ₁₀ (µg/Nm ³)	PM _{2,5} (µg/Nm ³)	TSP (µg/Nm ³)	Pb (µg/Nm ³)	Dustfall (µg/Nm ³)	Total Fluorides sebagai F (µg/Nm ³)	Fluor Index (µg/Nm ³)	Klorine dan Klorine Dioksida (µg/Nm ³)	Sulphat Index (µg/Nm ³)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Taman Makam Pahlawan	1 jam	< 47,9	1.434	69,21	176,56	6,89	74,99	-	-	0,19	190,65	-	-	-	-
	3 jam	-	-	-	-	6,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24 jam	47,9	1.434	69,21	-	-	74,99	-	190,65	0,19	190,65	-	-	-	-
Bundaran Harapan Indah	1 jam	-	-	-	114,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 jam	-	-	-	-	8,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24 jam	47,9	3.638	105,74	-	-	99,64	-	186,97	0,22	186,97	-	-	-	-
Depan Gor Bekasi	1 jam	-	-	-	112,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 jam	-	-	-	-	7,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24 jam	47,9	668	158,15	-	-	58,81	-	176,52	0,18	176,52	-	-	-	-

Sumber : Buku IKPLHD Kota Bekasi

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Berdasarkan buku data IKPLHD Kota Bekasi indeks kualitas udara Kota Bekasi pada tahun 2018 sebesar 90,07 µg/Nm³. Untuk lebih jelasnya mengenai indeksi kualitas udara dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 3.83
Indeks Kualitas Udara Kota Bekasi

No	Lokasi	2018	
		SO ₂	NO ₂
		µg/Nm ³	µg/Nm ³
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Taman Makam Pahlawan	47,9	69,21
2	Bundaran Harapan Indah	47,9	105,74
3	Depan Gor Bekasi	47,9	158,15
Konsentrasi Rata-rata		47,90	111,03
Indeks Masing-Masing Pencemar		94,01	86,12
Indeks Pencemaran Udara		90,07	
		90,07	

Sumber : Buku IKPLHD Kota Bekasi

3.6.3.3 Pencemaran Sungai

Berdasarkan buku IKPLHD Kota Bekasi di dapat bahwa status mutu air sungai/saluran kota Bekasi mempunyai status cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat.

Pada periode pertama terdapat 1 lokasi yang mempunyai status cemar berat yaitu saluran induk tarum barat. Sedangkan periode kedua terdapat beberapa titik yang mengalami cemar berat yang berada di anak kali saluran. Untuk lebih jelasnya mengenai status mutu air sungai/saluran di Kota Bekasi dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 3.84
Status Mutu Air Sungai/ Saluran (Periode I)

Nama	Nama Lokasi	IP	STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
Kali Cikeas-Cileungsi	Jembatan Perum. Kota Wisata, Kab. Bogor (Sungai Cileungsi)	4,92	Cemar Ringan
	Samping PT. Pratama Prima Bajatama (Sungai Cileungsi)	7,94	Cemar Sedang
	Jembatan Belakang PT. Rahayu Indah Kulit (Sungai Cileungsi)	3,18	Cemar Ringan
	Pangkalan 1, Belakang PT. Asmar Nakama Partogi (Sungai Cileungsi)	5,99	Cemar Sedang
	Curug Ciparigi (Sungai Cileungsi)	4,97	Cemar Ringan
	Jembatan Jl. Transyogi (Kali Cikeas)	5,99	Cemar Sedang
	Jati Asih dekat Jembatan Perum. Sanipala (Kali Cikeas)	6,02	Cemar Sedang
Kali Bekasi	Pertemuan Sungai Cikeas - Cileungsi Perum Villa Nusa Indah	6,10	Cemar Sedang
	Jalan Baru Cipendawa	7,01	Cemar Sedang
	Depan PT. Howsanindo	3,86	Cemar Ringan
	Belakang PD. Sari Sedap (Jalan Kp. Bojong Menteng)	7,01	Cemar Sedang
	Jembatan Perum. Kemang Pratama	7,02	Cemar Sedang
	Jembatan Lotte Mall Rawa Panjang	3,47	Cemar Ringan
	Jembatan M. Hasibuan PDAM Poncol	6,01	Cemar Sedang
	Jembatan Pasar Proyek (Jl. Ir. H. Juanda)	6,57	Cemar Sedang
Jembatan Teluk Pucung (dekat GIANT Wisma Asri)	7,05	Cemar Sedang	
Kalibaru	Jl. Wahab Affan (Jembatan Perum Harapan Baru)	1,73	Cemar Ringan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Nama	Nama Lokasi	IP	STATUS
	Jl. Wahab Affan Pondok Ungu (Jembatan Belakang PT Arnott's)	6,51	Cemar Sedang
Kali Kayuringin	Jl. Tawes Raya (Jembatan dekat Terminal Kayuringin)	3,20	Cemar Ringan
	Jembatan dekat Kelurahan Kayuringin Jaya	2,94	Cemar Ringan
Saluran Induk Tarum Barat	Jembatan RS. Mitra Bekasi Timur	14,68	Cemar Berat
	Pos Polisi Jl. Chairul Anwar	7,07	Cemar Sedang
	Depan Bebek Slamet (Jalan Chairil Anwar)	7,66	Cemar Sedang
	Shippon	7,42	Cemar Sedang
	Pos Polisi Belakang Giant	7,04	Cemar Sedang
	Depan RS Awal Bross	6,60	Cemar Sedang
	Jembatan Santung	7,04	Cemar Sedang
	Depan Universitas Gunadarma	6,60	Cemar Sedang
	Tol Bekasi Barat Depan Metropolitan Mall	7,05	Cemar Sedang
	Jembatan Pasar Sumber Arta, Jl. K. H. Nur Ali	6,60	Cemar Sedang
Anak Kali dan Saluran	Jalan Raya Kemakmuran (Jembatan depan RS. Hermina) - Saluran Kemakmuran/Saluran Sekunder Bekasi Pangkal	8,43	Cemar Sedang
	Jembatan Jalan RA. Kartini - Saluran Kali Margahayu	3,06	Cemar Ringan
	Jl. M. Hasibuan (200m sebelum intake PDAM Kota Bekasi) - Saluran SITB	7,03	Cemar Sedang
	Jl. M. Hasibuan - Saluran Sekunder	7,66	Cemar Sedang
	Jl. Raya Seroja Bekasi (Jembatan Depan PT General Motor) - Kali Sasak Gane	7,38	Cemar Sedang
	Jl. Raya Perjuangan (Belakang PT Prakasa Alam Segar) - Kali Bancong	7,54	Cemar Sedang
	Jl. Ir. H. Djuanda (Samping RS Graha Juanda, Bekasi Timur) - Kali Sasak Jarang	4,10	Cemar Ringan
	Pangkalan V, Narogong Raya - Saluran Sebelum TPA Bantar Gebang	4,88	Cemar Ringan
	Setelah TPST Bantar Gebang dan Sumur Batu - Kali Ciasem	6,38	Cemar Sedang
	Jl. Lumbu Utara Jembatan VI (Jembatan depan RS Rawa Lumbu) - Kali Rawa Lumbu	5,56	Cemar Sedang
	Jl. Raya Bekasi KM 28 depan PT Sunrise Bumi Textile - Saluran Sekunder Bekasi Tengah	7,66	Cemar Sedang
	Jl. Asam Raya - Kali Mustika Jaya	5,99	Cemar Sedang
	Jl. Pondok Gede Raya (Perbatasan Bekasi dan Jakarta) - Kali Sunter	1,56	Cemar Ringan
	Jl. KH. Noer Ali (Pura Wihara Hindu) - Saluran Kayuringin Kali Empat	1,79	Cemar Ringan
	Perum Bukit Satria Kencana - Saluran Kayuringin Kali Empat	3,11	Cemar Ringan
	Jl. Pejuang – samping PT Bakrie Pipe - Kali Pejuang	4,82	Cemar Ringan
	Jl. Haji Djoleo (Belakang pasar Bantar Gebang) - Saluran Rawalumbu	8,50	Cemar Sedang
	Jl. Raya Narogong No. 16 Rawalumbu (Belakang PT Mikie Oleo Nabati) - Saluran Rawalumbu	6,01	Cemar Sedang
	Jl. M. Hasibuan (Samping Islamic Canter) - Saluran Rawa Tembaga	7,04	Cemar Sedang
	Jl. Bintara Raya (Sebelah Kecamatan Bekasi Barat) - Kali Bintara	8,10	Cemar Sedang

Sumber : Buku IKPLHD Tahun 2018 (DLH)

Tabel 3.85
Status Mutu Air Sungai/ Saluran (Periode II)

Nama	Nama Lokasi	IP	STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)
Kali Cikeas-Cileungsi	Jembatan Perum. Kota Wisata, Kab. Bogor (Sungai Cileungsi)	4,29	Cemar Ringan
	Samping PT. Pratama Prima Bajatama (Sungai Cileungsi)	3,80	Cemar Ringan
	Jembatan Belakang PT. Rahayu Indah Kulit (Sungai Cileungsi)	3,65	Cemar Ringan
	Pangkalan 1, Belakang PT. Asmar Nakama Partogi (Sungai	4,17	Cemar Ringan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Nama	Nama Lokasi	IP	STATUS
	Cileungsi)		
	Curug Ciparigi (Sungai Cileungsi)	2,72	Cemar Ringan
	Jembatan Jl. Transyogi (Kali Cikeas)	2,51	Cemar Ringan
	Jati Asih dekat Jembatan Perum. Sanipala (Kali Cikeas)	3,57	Cemar Ringan
Kali Bekasi	Pertemuan Sungai Cikeas - Cileungsi Perum Villa Nusa Indah	2,29	Cemar Ringan
	Jalan Cipendawa	2,04	Cemar Ringan
	Depan PT. Howsanindo	6,22	Cemar Sedang
	Belakang PD. Sari Sedap (Jalan Kp. Bojong Menteng)	2,25	Cemar Ringan
	Jembatan Perum. Kemang Pratama	3,93	Cemar Ringan
	Jembatan Lotte Mall Rawa Panjang	2,77	Cemar Ringan
	Jembatan M. Hasibuan (Jembatan Irigasi)	2,02	Cemar Ringan
	Jembatan Proyek (Jl. Ir. H. Juanda)	3,31	Cemar Ringan
Kalibaru	Jl. Karang Satria Raya, Teluk Pucung, Jembatan Sasak	3,92	Cemar Ringan
	Jembatan Perum Harapan Baru	5,38	Cemar Sedang
Kali Kayuringin	Jembatan Belakang PT Arnott	3,20	Cemar Ringan
	Jl. Burangrang (Jembatan Dekat Terminal Damri, Kayuringin)	4,93	Cemar Ringan
Kali Kayuringin	Jembatan Dekat Kantor Kelurahan Kayuringin Jaya (Jl. Letnan Arsyad)	6,24	Cemar Sedang
	Jembatan Belakang UNISMA (Komplek Pengairan Rawa Semut)	2,85	Cemar Ringan
Saluran Induk Tarum Barat	Pos Polisi Jl. Chairul Anwar	2,72	Cemar Ringan
	Depan Bebek Slamet (Jalan Chairil Anwar)	2,04	Cemar Ringan
	Chiffon Aliran Laju Kalimalang (Jl. R.A Kartini)	1,80	Cemar Ringan
	Pos Polisi Belakang Giant (Jl. Mayor Madmuin Hasibuan)	1,81	Cemar Ringan
	Depan RS Awal Bross (Jl. K.H. Noer Ali)	1,88	Cemar Ringan
	Jembatan Santung	2,11	Cemar Ringan
	Depan Universitas Gunadarma	2,94	Cemar Ringan
	Tol Bekasi Barat (Jl. K. H. Noer Ali)	1,81	Cemar Ringan
	Sumber Arta	1,99	Cemar Ringan
Anak Kali dan Saluran	Jembatan RS. Hermina Jalan Kemakmuran - Saluran Kemakmuran	2,20	Cemar Ringan
	Jembatan Jalan RA. Kartini - Saluran Kali Margahayu	11,37	Cemar Berat
	Jl. M. Hasibuan (200m sebelum intake PDAM Kota Bekasi) - Saluran SITB	2,53	Cemar Ringan
	Underpass Pasar Baru, Bekasi - Saluran Sekunder	1,82	Cemar Ringan
	Jl. Saluran Irigasi Gempol - Kali Sasak Gane	2,25	Cemar Ringan
	Jl. Pisang Batu, Bungur, Bekasi Utara - Kali Bancong	13,15	Cemar Berat
	Jl. Ir. H. Djuanda - Kali Sasak Jarang	10,31	Cemar Berat
	Jl. Pangkalan V, Bantar Gebang - Saluran Sebelum TPA Bantar Gebang	4,49	Cemar Ringan
	Setelah TPST Bantar Gebang dan Sumur Batu - Kali Asem	11,47	Cemar Berat
	Jl. Lumbu Barat Raya, Perum Rawa Lumbu - Kali Rawa Lumbu	3,90	Cemar Ringan
	Jl. Alexindo - Saluran Sekunder Bekasi Tengah	2,05	Cemar Ringan
	Jl. Raya Mutiara Gading Timur, Asem - Kali Mustika Jaya	11,45	Cemar Berat
	Jl. Pondok Gede - Kali Sunter	6,76	Cemar Sedang
	Jl. KH. Noer Ali (Pura Wihara Hindu) - Saluran Kayuringin Kali Empat	3,68	Cemar Ringan
	Perum Bumi Satria Kencana - Saluran Kayuringin Kali Empat	7,85	Cemar Sedang
	Jl. Raya Kaliabang (Samping PT Bakrie Pipe Industries) - Kali Pejuang	4,94	Cemar Ringan
	Jl. Haji Djoleo (Belakang pasar Bantar Gebang) - Saluran Rawalumbu	10,33	Cemar Berat
Jl. Kemuning Raya, Mustika Sari - Saluran Rawalumbu	11,37	Cemar Berat	
Jl. Jendral A.Yani - Saluran Rawa Tembaga	6,77	Cemar Sedang	
Jl. Bintara Raya - Kali Bintara	3,88	Cemar Ringan	

Sumber : Buku IKPLHD Tahun 2018 (DLH)

3.6.3.4 Persampahan

Fenomena yang umum terlihat di Kota Bekasi masih menunjukkan bahwa persoalan sampah masih sangat berat. Hal ini terlihat jelas dari banyaknya sampah yang bertebaran baik di fasilitas umum, permukiman, drainase dan sungai; kondisi TPS yang sering tidak mampu menampung sampah yang dihasilkan serta tidak terawat; serta TPA eksisting yang sangat polutif dan penuh dengan cepat. Permasalahan persampahan disebabkan oleh tingginya timbulan sampah yang dihasilkan oleh aktivitas di Kota Bekasi dan belum ada kecenderungan penurunan.

Perkiraan data potensi timbulan sampah Kota Bekasi berdasarkan perhitungan Jakstrada yaitu 0,70 kg/jiwa/per-hari akan mencapai 625.650.515 kg/tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.86
Daftar Jumlah Sampah Terangkut

No	Wilayah	Timbulan berdasarkan Jakstrada (kg)	Jumlah sampah terangkut ke TPA
1	Bekasi Selatan	54.021.898	41.289.500
2	Bekasi Utara	84.301.969	31.647.840
3	Bekasi Barat	68.945.653	43.083.580
4	Bekasi Timur	69.348.321	31.946.330
5	Mustikajaya	49.856.481	28.880.910
6	Pondok Gede	58.337.293	36.321.500
7	Pondok Melati	32.500.111	18.800.440
8	Rawalumbu	56.337.684	25.785.290
9	Bantargebang	26.922.801	10.331.120
10	Jatisampurna	27.133.844	19.245.870
11	Jatiasih	57.661.240	23.673.280
12	Medan Satria	40.286.218	34.832.750
	JUMLAH	625.650.515	396.862.320

Sumber : LKIP DLH Kota Bekasi, 2019

Tabel 3.87
Layanan Titik Angkut Sampah

No	Wilayah	Jumlah titik Angkut
1	Bekasi Selatan	133
2	Bekasi Utara	78
3	Bekasi Barat	130
4	Bekasi Timur	63
5	Mustikajaya	87
6	Pondok Gede	102
7	Pondok Melati	57
8	Rawalumbu	74
9	Bantargebang	77
10	Jatisampurna	
11	Jatiasih	
12	Medan Satria	
13	Jalur Protokol	165
14	Jalur Kontainer	41

Sumber : LKIP DLH Kota Bekasi, 2019

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Tabel 3.88
Rekapitulasi Jumlah Ritase Pengangkutan Sampah

No	Wilayah Tugas	Kendaraan (Unit)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Total
			JUMLAH RITASE (kali)												
1	Mustika Jaya	17	459	439	494	444	432	378	482	442	442	384	387	348	5,131
2	Bantar Gebang	7	191	186	193	191	182	158	199	164	180	160	124	113	2,041
3	Rawa Lumbu	15	347	330	397	357	345	298	365	348	324	297	248	209	3,865
4	Jati Asih	13	373	344	401	353	379	331	392	363	357	336	273	207	4,109
5	K. Pratama	3	42	48	53	48	44	39	44	45	40	31	22	20	476
6	Bekasi Selatan	22	499	499	555	490	516	443	510	480	452	421	342	300	5,507
7	Bekasi Barat	17	433	401	435	416	415	373	429	408	376	365	322	284	4,657
8	Bekasi Timur	18	423	352	442	389	374	330	570	376	338	350	332	202	4,478
9	Bekasi Utara	22	480	464	523	467	468	420	473	439	408	378	331	274	5,125
10	Container	14	394	338	399	381	366	338	362	347	322	309	254	222	4,032
11	Protokol	13	341	334	353	312	280	246	302	275	264	246	206	160	3,319
12	Jati Sampurna	14	326	313	350	327	316	283	346	311	312	300	240	215	3,639
13	Pondok Melati	14	331	328	348	322	311	288	319	285	265	226	171	159	3,353
14	Pondok Gede	20	527	510	570	514	491	413	496	476	436	454	369	325	5,581
15	Medan Satria	14	378	356	394	340	356	283	306	270	311	321	262	229	3,806
JUMLAH		223	5,544	5,242	5,907	5,351	5,275	4,621	5,595	5,029	4,827	4,578	3,883	3,267	59,119

Sumber : Buku IKPLHD Tahun 2018 (DLH)

Ket :

Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R baru mencapai 58%;

Persentase sampah yang terangkut ke TPA mencapai 82%;

Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA mencapai 98%.

3.6.4 Kerentanan Dan Adaptasi Perubahan Iklim

Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Untuk mendukung upaya pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim melalui Direktorat Adaptasi perubahan iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Perubahan Iklim yang menyajikan data dan informasi kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit di seluruh Indonesia.

Pemanasan global akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di *atmosfer* diyakini telah menyebabkan terjadinya masalah perubahan iklim. Dalam Kerangka Kerja Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim telah disepakati bahwa upaya untuk mengatasi masalah perubahan iklim melalui upaya penurunan emisi GRK (mitigasi) dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi perlu dilakukan oleh semua pihak. Landasan ilmiah tentang masalah perubahan iklim telah dilaporkan oleh Panel antar Pemerintah mengenai Perubahan Iklim (*IPCC*). Landasan ilmiah sangat diperlukan dalam menyusun strategi dan langkah aksi penanggulangan masalah perubahan iklim.

Namun demikian laporan IPCC tersebut walaupun bersifat *komprehensif*, akan tetapi masih sangat sedikit membahas perubahan iklim pada skala regional maupun lokal sehingga pemanfaatannya dalam penyusunan upaya adaptasi pada tingkat wilayah menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, kajian perubahan iklim regional maupun lokal sangat diperlukan. Bab ini membahas secara singkat tentang kecenderungan perubahan iklim yang terjadi baik di masa lalu maupun proyeksi ke masa depan. Metodologi yang digunakan dalam analisis dijelaskan dalam laporan terpisah yang disusun oleh *Faqih et al. (2013)*.

Kota Bekasi merupakan salah satu kota di Propinsi Jawa Barat yang diperkirakan memiliki risiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Meningkatnya jumlah penduduk, berkurangnya luasan hutan, belum memadainya saluran pengendali banjir dan pengelolaan sampah serta penataan tata ruang wilayah yang belum memperhatikan risiko iklim akan menyebabkan tingkat kerentanan Kota Bekasi semakin tinggi. Tingginya tingkat kerentanan kota akan berisiko pada semakin tinggi potensi dampak yang akan ditimbulkan oleh perubahan iklim. Tanpa adanya upaya adaptasi dan mitigasi, dampak perubahan iklim akan sulit untuk dikendalikan.

Secara umum, berdasarkan data 2005 dan 2011, tingkat kerentanan sebagian dari Kelurahan di Kota Bekasi ada yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2005, sebagian besar kelurahan di Kota Bekasi memiliki indek kerentanan rendah (Tipe 1), tetapi pada tahun 2011, berubah menjadi lebih tinggi (Tipe 3). Disamping itu pada tahun 2011, sudah ada kelurahan yang masuk kategori sangat rentan yang sebelumnya tidak ada, yaitu Kelurahan Bonjong Menteng

Kecamatan Rawalumbu. Faktor-faktor utama yang menyebabkan Kelurahan Bojong Menteng masuk kategori sangat rentan ialah tingginya kepadatan penduduk (KPdk), sumber air minum/memasak (SAM) masih tergantung sumur dan mata air yang sangat sensitif terhadap perubahan musim dan sumber mata pencaharian utama (SMP) masyarakat kelurahan juga masih cukup banyak yang tergantung pada bidang pertanian yang sangat dipengaruhi oleh keragaman iklim.

Selain itu fasilitas pendidikan (FKs), fasilitas kesehatan (FPK) dan listrik (FLt) masih jauh dari memadai dibanding kelurahan lainnya, kecuali sarana jalan. Untuk menurunkan tingkat kerentanan Kelurahan Bojong Menteng ialah dengan melakukan kegiatan Adaptasi sehingga dapat menurunkan nilai indikator keterpaparan-sensitifitas, dan/atau meningkatkan nilai indikator kemampuan adaptif.

Perlu dicatat bahwa banyak indikator yang digunakan untuk mewakili tingkat keterpaparan, sensitivitas dan kemampuan adaptif serta kualitas data akan menentukan keakuratan tingkat kerentanan yang dihasilkan dan ketepatan dalam memberikan arahan dan prioritas kegiatan adaptasi yang akan dilakukan..

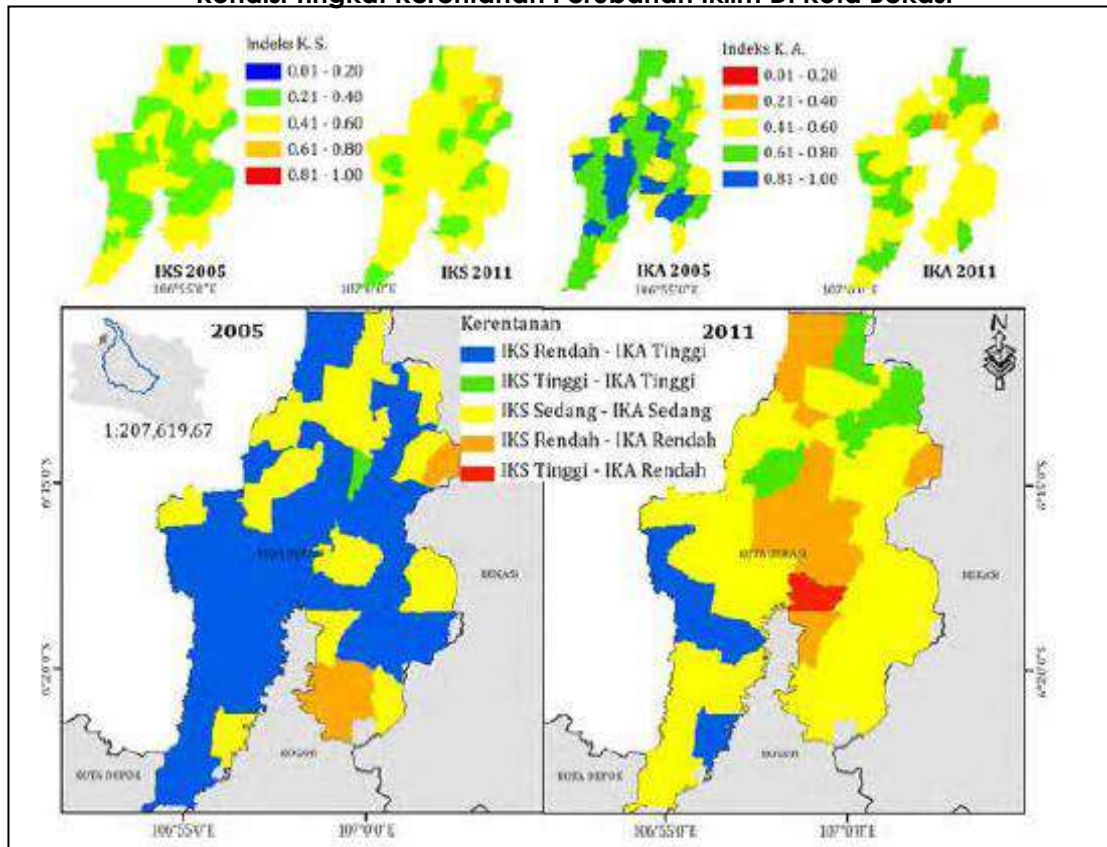
Iklim menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya bencana terutama bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor. Berdasarkan indeks kerawanan bencana yang dibuat oleh BNPB (2011), Kota Bekasi memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, dimana bencana utama yang terjadi di Kota Bekasi adalah banjir. Dari data-data kejadian banjir di Kota Bekasi, hampir setiap tahun terjadi bencana banjir yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Selain Banjir terdapat bencana lain yang terjadi seiring dengan munculnya beberapa kejadian iklim ekstrim yang terjadi.

Bencana akibat kejadian iklim tersebut. Bencana tersebut antara lain penyakit mencakup malaria, demam berdarah, dan diare, banjir, kekeringan, kerusakan akibat angin, rob, dan persoalan salinitas. Pengaturan iklim memiliki peran penting dalam menjaga suhu, kelembaban dan hujan. Dalam konteks global pengaturan iklim juga menyangkut isu pengendalian gas rumah kaca dan karbon.

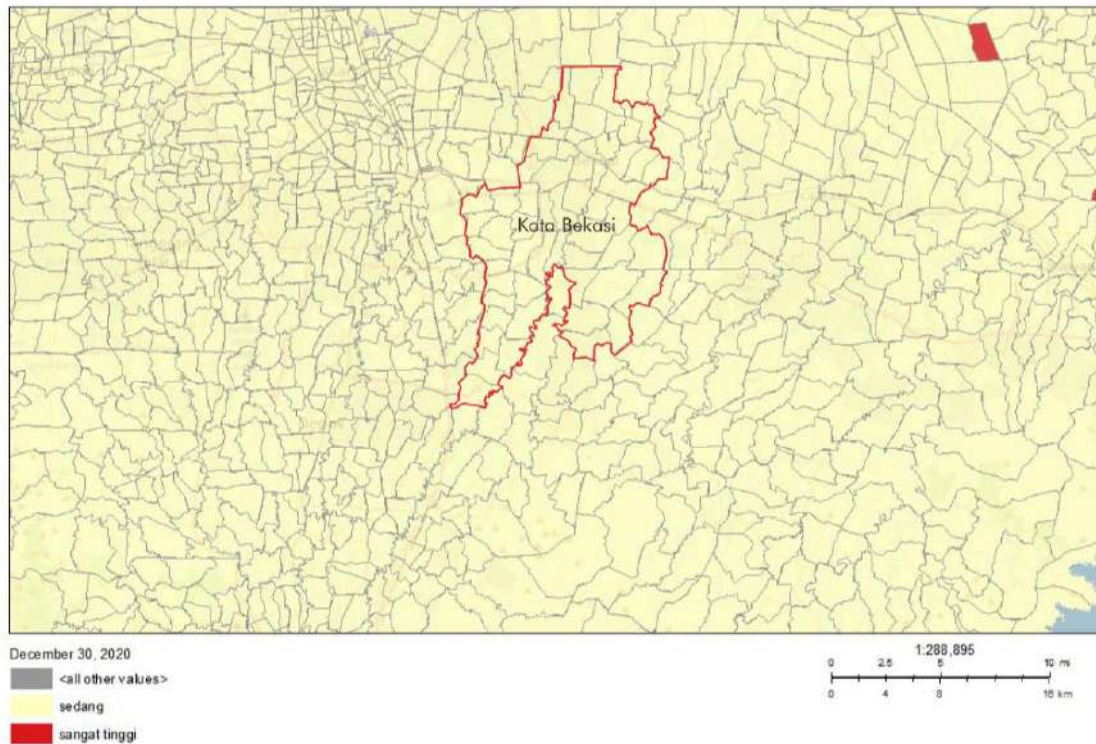
Fungsi pengaturan iklim secara keruangan berarti menjaga wilayah-wilayah yang memiliki fungsi besar dalam penyimpanan karbon yaitu sistem penggunaan lahan hutan. Terjaganya kelestarian hutan dengan kerapatan tinggi berarti mengurangi GRK dan menjaga kualitas iklim lokal.

Berdasarkan data Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan Tahun 2018 (KLHK) terhadap perubahan iklim Kota Bekasi dikategorikan ke dalam resiko kekeringan dan banjir rendah dengan indeks kerentanan sedang, Kondisi indeks kerentanan sedang artinya peningkatan peningkatan kapasitas adaptif dan atau pengurangan sensitivitas (melalui peningkatan infrastruktur, kesejahteraan) dapat mengurangi kerentanan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.48
Kondisi Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim Di Kota Bekasi

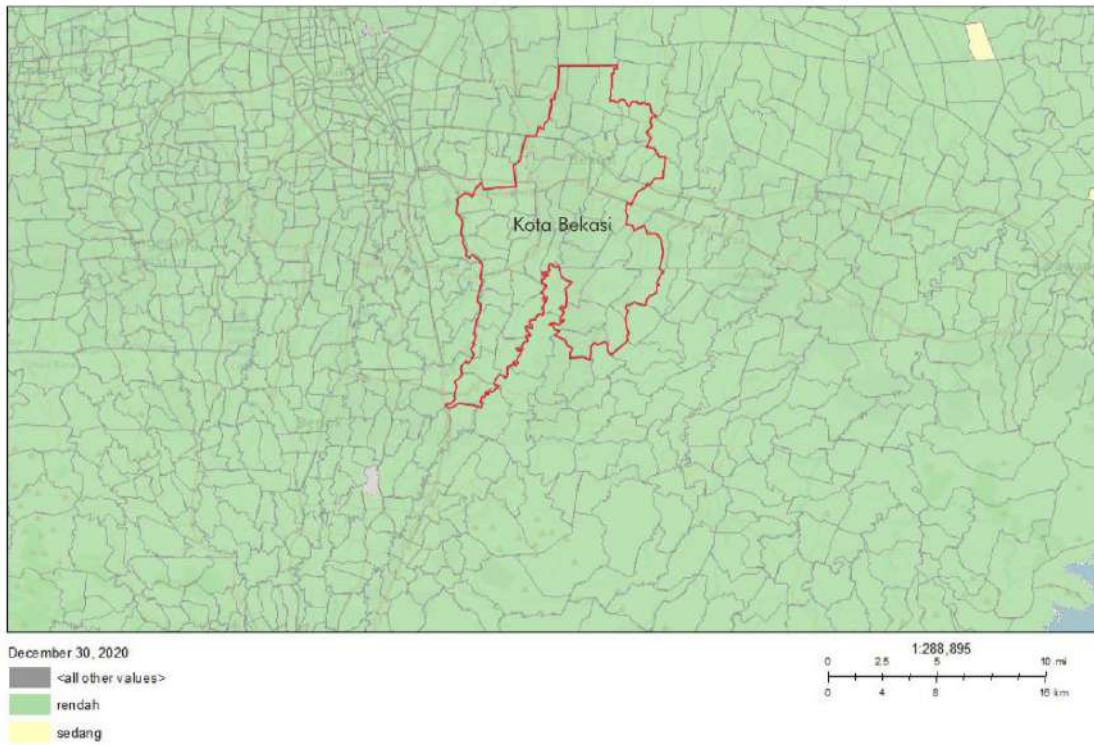


Gambar 3.49
Peta Kerentanan Kota Bekasi



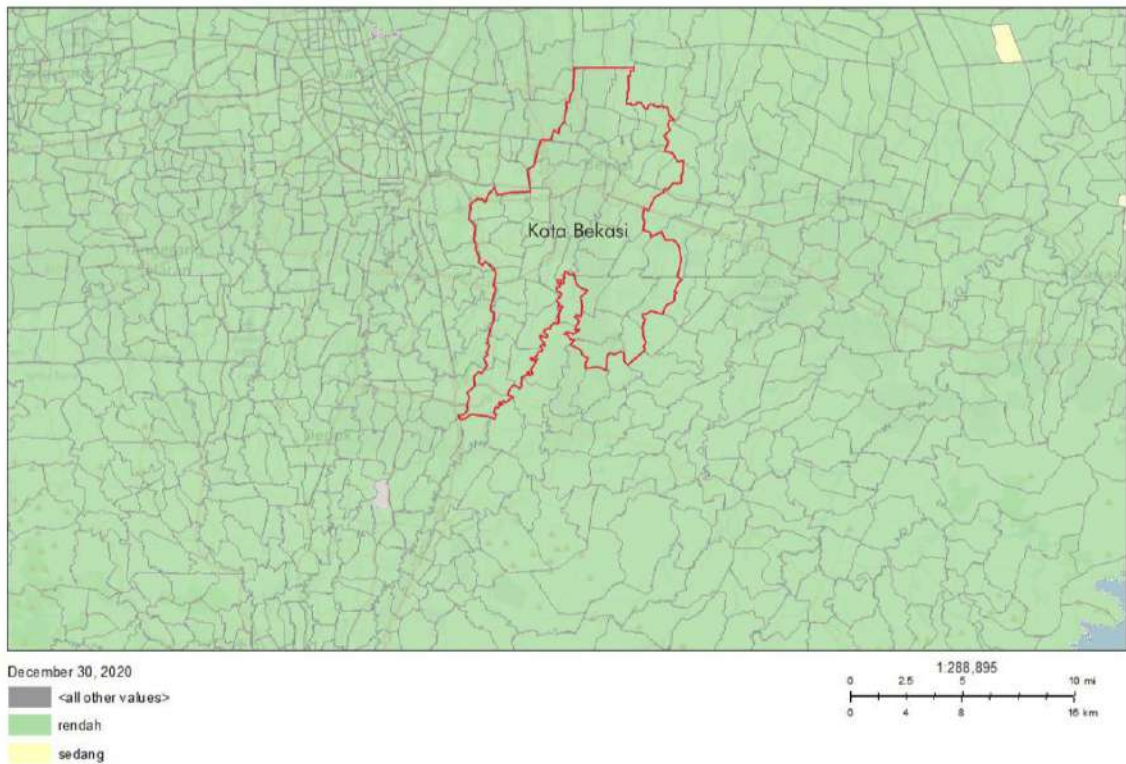
Sumber : Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan Tahun 2018, KLHK

Gambar 3.50
Peta Resiko Kekeringan Kota Bekasi



Sumber : Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan Tahun 2018, KLHK

Gambar 4.51
Peta Resiko Banjir Kota Bekasi



Sumber : Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan Tahun 2018, KLHK

3.6.5 Kemampuan Penyedia Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati penting bagi keberlanjutan kehidupan alam, sehingga baik langsung maupun tidak langsung memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Secara luas keanekaragaman hayati merupakan lanskap penting yang berperan terhadap berbagai jasa ekosistem seperti air bersih, pembentukan dan perlindungan tanah, meremediasi polutan, dan juga menjaga stabilitas iklim baik makro maupun mikro. Selain itu sumber daya hayati juga memberikan manfaat besar bagi ketersediaan makanan dan obat-obatan, sedangkan sosial budaya sumber daya hayati memberikan manfaat bagi pendidikan dan wisata.

Jasa ekosistem keanekaragaman hayati sebagai penyedia sumber daya genetic ditujukan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman flora dan fauna. Prioritas utama kawasan yang berfungsi sangat tinggi sebagai konservasi keanekaragaman hayati adalah kawasan hutan. Upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan keanekaragaman hayati adalah pengelolaan kawasan hutan lindung maupun cagar alam, agar bisa terjaga dari campur tangan manusia yang cenderung merusak.

Ekosistem menyediakan habitat untuk lokasi kehidupan flora dan fauna. Kondisi lingkungan dapat mencerminkan kesesuaian untuk menjadi habitat. Hal ini untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan.

Kota Bekasi termasuk pada pendukung *biodiversitas* yang sangat rendah 70,0% atau 147,29 km² dari total wilayah 210,49 km². Kemudian disusul dengan kondisi lahan pendukung *biodiversitas* yang berpotensi sedang sebanyak 16,6% atau 34,91 km². Terdapat lahan pendukung *biodiversitas* tinggi hanya 13,4% atau 28,15 km², sedangkan hanya 0,1% atau 0,14 km² untuk lahan pendukung biodiversitas sangat tinggi. Secara lengkap dapat dilihat dalam tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 3.89
Luas dan Persentase Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas

Jenis DDDLH	Kategori	Luas (km ²)	%
Pendukung Biodiversitas	Sangat Rendah	147,29	70,0
	Sedang	34,91	16,6
	Tinggi	28,15	13,4
	Sangat Tinggi	0,14	0,1
	TOTAL	210,49	100,0

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi, 2018

Hasil inventarisasi keanekaragaman hayati di tahun 2011 memperlihatkan kondisi keanekaragaman flora dan fauna yang dilindungi di Kota Bekasi di mana terdapat 34 jenis flora yang berlimpah dan 7 jenis flora yang dilindungi. Sedangkan flora yang berlimpah berjumlah 32 jenis dan 3 jenis dilindungi. Penentuan jenis flora dan fauna tersebut mengacu pada Rencana Induk Konservasi Keanekaragaman Hayati Provinsi Jawa Barat 2004-2020 dan PP RI No. 7 tahun 1999 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi. Lebih jelasnya kondisi flora dan fauna di Kota Bekasi dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

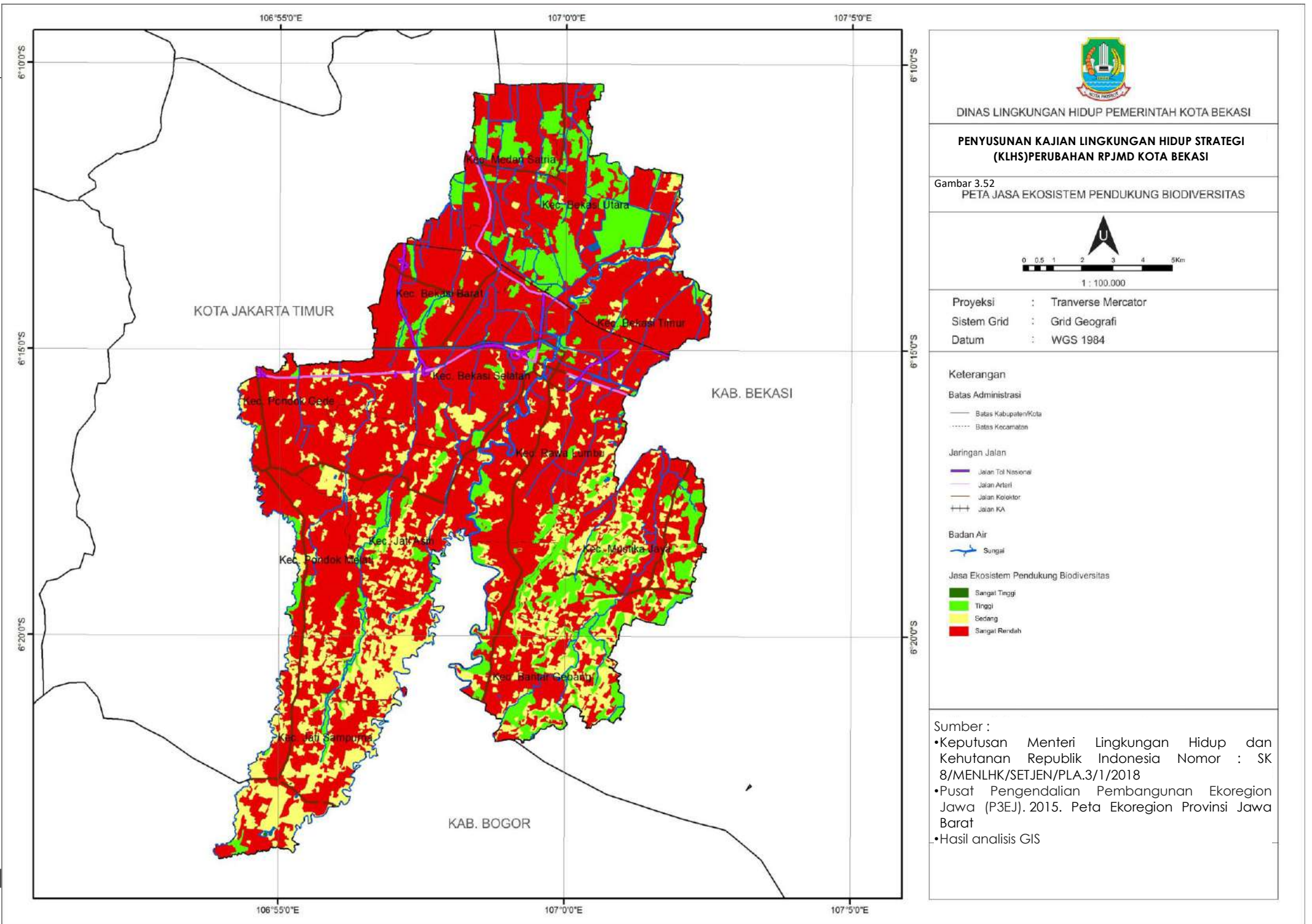
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Tabel 3.90
Kondisi Keanekaragaman Flora Dan Fauna Yang Dilindungi Di Kota Bekasi

No	Golongan	Nama Species	Nama Ilmiah	Status
1	Hewan Menyusui	Surili	<i>Presbytis comata</i>	Endemik
		Monyet	<i>Macaca fascicularis</i>	Terancam
		Bajing	<i>Callorciurus notatus</i>	Terancam
		Musang Air	<i>Cynogale bennetti</i>	Dilindungi (*)
2	Burung	Gagak	<i>Corvus SP</i>	Terancam
		Gelatik	<i>Parus Mayor</i>	Berlimpah
		Jalak	<i>Sturnus Contera</i>	Dilindungi
		Burung Alap-alap, Elang	<i>Accipitridae</i>	Dilindungi
		Kuntul	<i>Bubulcus Ibis</i>	Dilindungi (*)
		Cengkakeh Gunung	<i>Holcyon Cyanoventris</i>	Endemik
		Kutilang	<i>Pycnotonus</i>	Terancam
		Merpati	<i>Archive</i>	Berlimpah
		Merpati	<i>Phycnotus Goiavier</i>	Terancam
		Pipit	<i>Leucogastroides</i>	Berlimpah
3	Reptil	Bunglon Sisir	<i>Gonychepalus Dilophus</i>	Dilindungi (*)
		Biawak	<i>Varanus gouldi</i>	Dilindungi (*)
		Kadal	<i>Mabuoya multifaschiata</i>	Berlimpah
		Ular Hijau	<i>Oligodom bitornatus</i>	Terancam
		Ular Tanah	<i>Angkistroden rhodostorna</i>	Berlimpah
		Ular sawah	<i>Pithon mourus</i>	Berlimpah
4	Amphibi	Katak Sawah	<i>Rana canrivora</i>	Berlimpah
		Katak Catang	<i>Bufo asfes</i>	Terancam
5	Ikan	Oskar Merah	<i>Astronothus ocellatus rubra</i>	Berlimpah
		Ikan Ekor Pedang Merah	<i>Xiporus hellen</i>	Berlimpah
		Tetra Kongo	<i>Phenocogramu interruotus</i>	Terancam
		Gabus	<i>Channa striata</i>	Endemik, Terancam
		Cupang	<i>Betta imbelis</i>	Berlimpah
		Manfish	<i>Pheterophilum eimekel</i>	Berlimpah
		Impun	<i>Poecilia reticulate</i>	Terancam
		Belut sawah	<i>Monopterus albus</i>	Berlimpah
6	Keong	Bekicot	<i>Achatina</i>	Berlimpah
		Siput air tawar	<i>Lymnea</i>	Berlimpah
7	Serangga	Kupu Raja	<i>Troides helena</i>	Dilindungi (*)
		Jangkrik	<i>Griydae</i>	Berlimpah
8	Tumbuhan	Kecapi	<i>Sahndoricum Koetjape</i>	Endemik Terancam
		Durian Bekasi (Durian Kane dan Sitokong)	<i>Durio Zibenthuis</i>	Endemik
		Angsana	<i>teriocarpus indicus</i>	Berlimpah
		Tanjung	<i>Mimusope elengi</i>	Berlimpah
		Mahoni	<i>Swiemtenia macrophylla</i>	Berlimpah
		Beringin	<i>Ficus benjamina</i>	Dilindungi, terancam
		Sawo	<i>Crysophyllum Cainito</i>	Terancam
		Asam Kranji	<i>Pithelobium duice</i>	Terancam
		Kere Payung	<i>Filicium decifiens</i>	Terancam
		Bungur	<i>Lagerstroemia loudionii</i>	Terancam
		Dadap Merah	<i>Eritjhrina cristalgalli</i>	Terancam
		Jati	<i>Tectona grandios</i>	Dilindungi
		Palem Raja	<i>Roysdtenea regia</i>	Berlimpah
		Cempaka	<i>Michelia Champaka</i>	Berlimpah
		Cemara	<i>Cupresus Papuana</i>	Berlimpah
		Pinus	<i>Pinus marcusi</i>	Berlimpah
		Kelapa	<i>Cocos nucifera</i>	Berlimpah
Bambu	<i>Bambusa vulgaris</i>	Berlimpah		
Akasia	<i>Acacia auriliformis</i>	Berlimpah		
Kuping Gajah	<i>Anthurium andraeanium</i>	Berlimpah		

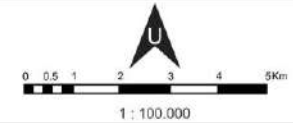
Sumber : Laporan Akhir Inventarisasi Keanekaragaman Hayati



DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KOTA BEKASI

PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGI (KLHS) PERUBAHAN RPJMD KOTA BEKASI

Gambar 3.52
PETA JASA EKOSISTEM PENDUKUNG BIODIVERSITAS



Proyeksi : Tranverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum : WGS 1984

Keterangan

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan

Jaringan Jalan

- Jalan Tol Nasional
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan KA

Badan Air

- Sungai

Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas

- Sangat Tinggi
- Tinggi
- Sedang
- Sangat Rendah

Sumber :

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018
- Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3EJ). 2015. Peta Ekoregion Provinsi Jawa Barat
- Hasil analisis GIS

3.7 KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah Kota Bekasi dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam mengelola keuangan daerah, Kota Bekasi telah melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

3.7.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Peninjauan terhadap kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk dapat mengetahui potensi sumber daya keuangan Pemerintah Kota Bekasi. Peninjauan ini dilakukan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Bekasi selama lima tahun terakhir. Kinerja keuangan masa lalu ini mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah.

a. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD ini menguraikan perkembangan kinerja tiga komponen keuangan daerah, yaitu kinerja pengelolaan pendapatan daerah, kinerja pengelolaan belanja daerah, dan kinerja pengelolaan pembiayaan daerah.

1. Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2013-2017

Terdapat 3 komponen pendapatan daerah, yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas beberapa jenis pendapatan yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- Dana Perimbangan
Pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan terdiri atas dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiridari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau daerah lainnya.

Selama periode 2015-2019 pendapatan daerah cenderung meningkat. Pada periode tahun 2015-2019, kinerja realisasi pendapatan daerah Kota Bekasi belum mencapai 100 persen atau kurang dari target.

Kinerja realisasi Pendapatan daerah tertinggi dicapai pada tahun 2015 yakni sebesar 99,50 persen. Sedangkan kinerja terendahnya terjadi pada tahun 2017, yakni sebesar 87,51 persen.

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Kinerja realisasi pendapatan daerah yang kurang dari 100 persen menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi belum berhasil menghimpun sumber-sumber pendapatannya untuk memenuhi target yang ditetapkannya pada awal tahun rencana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.91
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2015-2019

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2015	3,976,356,352,496	3.956.308.126.353
2016	4,290,326,129,657	4.213.639.966.189
2017	4.532.976.286.431	4.213.639.966.189
2018	5.482.357.446.882	4.835.980.257.174,21
2019	6.993.513.097.075	5.963.929.785.383,89

Rancangan RPJMD Perubahan Kota Bekasi, 2018-2023

Berdasarkan pertumbuhan rata-rata per tahun masing-masing komponen pendapatan daerah, terlihat bahwa PAD tumbuh paling tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan komponen lainnya. Selama periode 2015-2019, pendapatan daerah Kota Bekasi rata-rata tumbuh sebesar 11,15 persen yang disebabkan oleh pertumbuhan rata-rata komponen PAD sebesar 13,38 persen, Dana Perimbangan sebesar 6,52 persen, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 16,00 persen. Pertumbuhan rata-rata komponen PAD yang lebih tinggi dibandingkan komponen lainnya menunjukkan makin berkembangnya kemandirian Kota Bekasi dalam memenuhi kebutuhan pembangunannya.

Proporsi realisasi komponen pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kota Bekasi periode 2013-2017 memperlihatkan kecenderungan terjadinya peningkatan proporsi PAD serta penurunan proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan rata-rata komponen PAD yang lebih tinggi dibandingkan dengan komponen-komponen lainnya.

Proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah pada tahun 2013 sebesar 32,75 persen meningkat menjadi 40,95 persen pada tahun 2019. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan per komponen PAD tahun 2015 sampai tahun 2019 terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yaitu 15,48 persen. Sisanya terdiri dari Hasil Retribusi Daerah sebesar 13,75 persen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 11,51 persen dan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 1,77 persen.

Proporsi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah menurun dari 40,10 persen pada tahun 2013 menjadi 36,07 persen pada tahun 2017. Berdasarkan rata-rata proporsi komponen Dana Perimbangan tahun 2013 sampai tahun 2017 terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum yaitu sebesar 81,88 persen. Sisanya terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 9,28 persen dan Dana Alokasi Khusus sebesar 8,84 persen.

Proporsi komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Pendapatan Daerah menurun dari 26,96 persen pada tahun 2013 menjadi 24,28 persen pada tahun 2017. Berdasarkan rata-rata proporsi komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2013 sampai tahun 2017 terbesar

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

berasal dari Bagi Hasil Pajak/Non Pajak dari Provinsidan Pemerintah Daerah Lainnya yaitu sebesar 64,89 persen.

Sisanya terdiri dari Bantuan Keuangan dari Povinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 18,97 persen, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 15,86 persen, Pendapatan Hibah sebesar 0,28 persen, dan Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 0,01 persen. Apabila tahun 2013 PAD Kota Bekasi baru sebesar Rp. 969.664.481.363,- secara bertahap meningkat dari tahun ke tahun menjadi Rp 2.442.148.866.621,89,- pada tahun 2019. Meningkatnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah Kota Bekasi berarti meningkatnya kemandirian daerah.

Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 3.92
Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap
Total Pendapatan Daerah Kota Bekasi 2013-2019 (Dalam Rupiah dan %)

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Jumlah Pendapatan Daerah
2013	969.664.481.363	1.193.018.165.096	797.897.723.130	2.960.580.369.589
2014	1.042.728.151.600	1.349.293.645.316	1.025.032.528.063	3.417.054.324.979
2015	1.504.510.666.968	1.332.517.465.266	1.119.279.994.119	3.956.308.126.353
2016	1.595.714.960.273	1.652.830.067.172	965.094.938.745	4.213.639.966.190
2017	1.595.714.960.273	1.652.830.067.172	965.094.938.745	4.213.639.966.190
2018	2.001.150.459.494	1.653.956.944.914	1.180.872.852.766	4.835.980.247.174
2019	2.442.148.866.622	1.686.699.237.834	1.835.081.680.928	5.663.929.785.384

Sumber : Rancangan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

b. Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah Kota Bekasi 2015- 2019

Belanja daerah Kota Bekasi terdiri dari komponen:

- Belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Selama periode 2015-2019, target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi terlihat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kinerja realisasi belanja daerah Kota Bekasi selama kurun waktu 2015-2019 menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah selalu berada di di bawah pagu atau anggarannya. Kinerja realisasi belanja tertinggi terjadi pada tahun 2016, yakni sebesar 87,67 persen dari pagu/target, sedangkan terendah pada tahun 2019 yakni sebesar 79,60 persen dari pagu/target.

Realisasi belanja yang lebih kecil dari anggaran/pagu anggarannya seperti ini disebut sebagai favourable variance. Hal ini disatu sisi bisa jadi menunjukkan adanya efisiensi anggaran.

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Tabel 3.93
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi, 2015-2019

Kode Rek	Uraian	2015		2016		2017		2018		2019	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5	Belanja	4.691.313.300.821,37	3.882.237.460.467,00	5.035.435.715.577,40	4.404.495.132.194,82	5.709.432.093.083,00	4.982.347.106.794,00	5.747.421.232.707,0	5.001.748.526.414,14	7.069.408.614.460,0	5.567.923.376.279,03
5.1	Belanja Tidak Langsung	1.567.216.713.204,37	1.432.646.830.392,00	1.765.918.053.737,40	1.614.077.501.175,00	1.947.797.154.542,0	1.785.274.492.418,00	2.210.065.320.409,0	2.062.103.244.656,00	2.733.837.213.302,00	1.909.565.700.219,0
5.1.1	Belanja Pegawai	1.487.410.127.404,37	1.363.650.359.301,00	1.633.764.922.436,40	1.504.471.822.877,00	1.789.805.058.168,0	1.649.362.115.601,00	2.045.662.206.537,0	1.918.768.585.973,00	2.106.439.446.064,0	1.708.561.985.966,00
5.1.2	Belanja Bunga	300.000.000	120.138.622,00	300.000.000,00	63.246.793,00	300.000.000,00	35.569.285,00	8.374.400,00	8.374.400,00		
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	1.700.000.000,00		1.500.000.000,00	394.631.518,00	6.500.000.000,00	5.543.886.923,00
5.1.4	Belanja Hibah	49.007.192,000	45.761.627,000,00	82.631.660,000,00	74.297.227,000,00	71.809.638,000,00	56.483.844,800,00	84.795.002,486,00	68.503.996,486,0	1.61.995.136,800,00	94.504.751.250,0
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	25.000.000,000	21.126,000,000,00	39.801.797,000,00	29.254,800,000,00	80.030,621,474,00	78.005,600,000,00	73.640,000,000,00	72.251,400,000,00	100,327,460,000,00	98,669,460,000,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.058.183,800	1.058,182,433,0	1.058,182,800,00	964,438,170,0	1.151,836,900,00	1.151,746,170,00	1.459,736,986,00	1.305,838,500,00	65,313,729,000,00	1,546,647,000,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.441.211,000	930,523,036,00	8,361,491,501,00	5,025,966,335,00	3,000,000,000,00	235,616,562,00	3,000,000,000,00	870,417,779,00	293,261,441,438,00	738,969,080,00
5.2	Belanja Langsung	3.124.096.587,617	2.449,590,630,075,00	3,269,517,661,840,00	2,790,417,631,019,82	3,761,634,938,541,00	3,197,072,614,376,00	3,537,355,912,298,00	2,939,645,281,758,14	4,335,571,401,158,00	3,658,357,676,060,03
5.2.1	Belanja Pegawai	422,571,542,500	372,427,851,919,00	513,747,612,530,00	478,765,877,324,00	763,606,340,993,6	710,589,220,901,00	383,141,417,314,00	327,218,562,794,0	216,450,296,975,00	191,289,754,047,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.032.093.832,004	827,208,108,778,00	1,011,300,868,281,00	883,617,229,289,82	1,416,635,165,368,40	1,250,396,770,847,00	2,140,857,532,840,00	1,832,330,307,166,17	2,756,702,188,572,0	2,362,558,547,595,29
5.2.3	Belanja Modal	1.669,431,213,113	1,249,954,669,378,00	1,744,469,181,029,00	1,428,034,524,406,00	1,581,393,432,179,00	1,236,086,622,628,00	1,013,356,962,144,00	780,096,411,797,97	1,362,418,915,611,00	1,104,509,374,417,74
	Surplus/Defisit	(714,956,948,325,37)	67,156,435,662,03	(745,109,585,920,40)	(179,180,715,786,42)	(523,316,018,983,98)	(225,643,898,235,05)	(265,063,785,825,00)	(165,768,269,239,93)	(75,895,517,385,00)	396,009,416,229,86
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	746,952,936,446,37	4,224,440,554,00	786,239,955,720,40	786,239,955,720,40	588,896,388,783,98	587,746,870,029,98	306,532,367,875,00	306,532,367,874,93	99,395,517,385,00	99,360,183,313,14
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	746,952,936,446,37	(53,332,00)	786,239,955,720,40	786,239,955,720,40	588,896,388,783,98	587,746,870,029,98	306,532,367,875,00	306,532,367,874,93	99,395,517,385,00	99,360,183,313,14
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	4,224,493,886,00								
6.2	Pengeluaran pembiayaan daerah	31,885,988,121	27,869,369,888,00	41,130,369,800,00	19,312,369,904,00	65,580,369,800,00	55,562,369,920,00	41,468,582,050,00	41,368,581,250,00	23,500,000,000,00	1,032,000,000,00
6.2.2	Penyerahan modal (investasi) Pemerintah Daerah	31,665,618,321,2	27,557,000,000,00	40,800,000,000,00	19,000,000,000,00	65,250,000,000,00	55,250,000,000,00	41,312,397,000,00	41,212,396,200,00	23,500,000,000,00	1,032,000,000,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	330,369,800	312,369,888,00	330,369,800,00	312,369,904,00	330,369,800,00	312,369,920,00	156,185,050,00	156,185,050,00		
	Pembiayaan Netto	714,956,948,325,37	(23,644,929,334,00)	745,109,585,920,40	766,927,585,816,40	523,316,018,983,98	532,184,500,109,98	265,063,785,825,00	265,163,786,624,93	75,895,517,385,00	98,328,183,313,14
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0	43,511,506,328,03	0,00	587,746,870,029,98	0,00	306,540,601,874,93	0,00	99,395,517,385,00		494,337,599,543,00

Sumber : Rancangan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Tetapi disisi lain sebaliknya, bisa jadi karena kelemahan dalam perencanaan anggaran, sehingga kurang tepat dalam mengestimasi belanja, atau adanya program dan kegiatan yang tidak terlaksana.

Pada periode tahun 2015-2019, pertumbuhan tertinggi realisasi belanja daerah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 13,45 persen dan terendah pada tahun 2018 sebesar 0,39 persen. Sedangkan pertumbuhan rata-rata belanja daerah pada periode tahun 2015-2019 sebesar 9,57 persen per tahun. Pertumbuhan rata-rata belanja tidak langsung sebesar 7,84 persen per tahun dan belanja langsung sebesar 14,93 persen per tahun.

Pertumbuhan realisasi belanja daerah Kota Bekasi dari tahun 2015-2019 yang cukup tinggi menunjukkan perkembangan yang baik. Hal ini berarti bahwa besaran alokasi belanja daerah Kota Bekasi, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan program dan kegiatan makin meningkat.

Proporsi realisasi komponen belanja terhadap Belanja Daerah Kota Bekasi selama kurun waktu 2013-2017 menunjukkan proporsi Belanja Tidak Langsung cenderung turun dan proporsi Belanja Langsunnya cenderung meningkat. Hal ini berarti bahwa proporsi belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan meningkat dari tahun ke tahun

Untuk lebih jelasnya mengenai proporsi relaisasi komponen belanja terhadap total belanja daerah Kota Bekasi 2013-2019 dapat di lihat pada table di bawah ini.

Tabel 3.94
Proporsi Realisasi Komponen Belanja Terhadap
Total Belanja Daerah Kota Bekasi 2013-2019 (Dalam Rupiah dan %)

Tahun	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Total
2013	1.532.759.643.777	1.427.130.311.102	2.959.889.954.879
2014	1.511.751.545.621	2.237.477.936.466	3.749.229.482.087
2015	1.432.646.830.392	2.449.590.630.075	3.882.237.460.467
2016	1.614.077.501.175	2.790.417.631.020	4.404.495.132.195
2017	1.785.274.492.418	3.197.072.614.376	4.982.347.106.794
2018	2.062.103.244.656	2.939.645.281.758	5.001.748.526.414
2019	1.909.565.700.219	3.658.357.676.060	5.567.923.376.279

Sumber : Rancangan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

Proporsi komponen belanja tidak langsung pada tahun 2013 sebesar Rp1.532.759.643.777,- atau 51,78 persen turun menjadi Rp 2.102.415.564.766,- atau 37,77 persen pada 2019. Sementara proporsi belanja langsung meningkat dari Rp 1.427.130.311.102,- atau 48,22 persen pada tahun 2013 menjadi Rp 3.463.961.164.513,03,- atau 62,23 persen pada tahun 2019.

c. Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah Kota Bekasi tahun 2013-2019 disumbang oleh pertumbuhan rata-rata pertahun PAD sebesar 13,38 persen, dana perimbangan sebesar 6,52 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 16,00 persen. Pertumbuhan PAD Kota Bekasi disumbang oleh pertumbuhan rata-rata per tahun dari Pajak Daerah sebesar 15,48 persen, Retribusi Daerah sebesar 13,75 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 11,51 persen, serta turunnya hasil pengelolaan keuangan daerah yang

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

dipisahkan sebesar 1,77 persen. Pertumbuhan rata-rata per tahun Dana Perimbangan disumbang oleh tumbuhnya rata-rata per tahun hasil pajak/bukan pajak sebesar 5,64 persen, DAU sebesar 1,70 persen dan DAK sebesar 253,73 persen. Sedangkan pertumbuhan rata-rata per tahun lain-lain pendapatan daerah yang sah disebabkan oleh tumbuhnya dana bagi hasil pajak sebesar 11,72 persen, dan bantuan dari provinsi sebesar 35,63 persen.

Sementara, pertumbuhan rata-rata per tahun belanja daerah disumbang oleh tumbuhnya rata-rata per tahun belanja tidak langsung sebesar 11,24 persen dan belanja langsung sebesar 13,37 persen. Tumbuhnya komponen belanja tidak langsung disumbang oleh belanja pegawai tumbuh dengan rata-rata per tahun 13,05 persen, belanja bunga 13,69 persen, bantuan sosial sebesar 44,93 persen, bantuan keuangan sebesar 8,20 persen dan belanja tak terduga 89,73 persen, serta turunnya belanja bunga rata-rata per tahun sebesar 33,52 persen. Pertumbuhan rata-rata per tahun komponen belanja langsung disebabkan oleh pertumbuhan rata-rata belanja langsung penunjang urusan sebesar 23,26 persen dan belanja langsung urusan sebesar 13,64 persen. Untuk lebih jelasnya mengenai rata-rata pertumbuhan dan relisasi pendapatan dan belanja daerah Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

3.7.2 Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio *likuiditas*, *solvabilitas* dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Aset yang dimiliki oleh Kota Bekasi secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 10,62 %, sehingga mencapai nilai Rp10.572.349.633.584,- di tahun 2017. Sedangkan untuk kewajiban yang harus dipenuhi, secara rata-rata meningkat sebesar 21,07 %, yaitu sebesar Rp62.653.015.253,- pada tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 3.97
Analisis Rasio Neraca Daerah Kota Bekasi, 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Likuiditas					
	• Rasio Lancar	12,020	8,129	4,161	6,141	5,581
	• Rasio Kas	0,339	0,979	0,713	0,464	-0,096
	• Rasio Cepat	11,490	7,399	3,961	5,521	4,961
	• Rasio Modal Kerja Terhadap Total Aset	0,066	0,030	0,028	0,032	0,027
2	Rasio Solvabilitas	163,298	228,726	112,321	164,172	168,744
3	Rasio Utang					
	- Rasio Utang terhadap Ekuitas	0,006	0,004	0,009	0,006	0,004
	- Rasio Utang terhadap Aset Modal	0,007	0,005	0,011	0,007	0,006

Sumber : Rancangan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Tabel 3.95
Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2015-2019

Kode Rek	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
4	PENDAPATAN	3,949,393,896,129.03	4,225,314,416,408.4	4,756,703,208,558.95	4,835,980,257,174.21	5,963,932,792,508.89	11.14
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,497,596,436,744.03	1,607,389,410,491.40	1,988,356,922,192.95	2,001,150,459,494.21	2,442,151,873,746.89	13.43
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1,030,224,055,885.00	1,140,925,902,871.00	1,393,372,320,395.00	1,580,754,200,591.00	1,778,314,661,578.00	14.70
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	78,291,147,427.00	83,611,739,483.00	84,381,837,869.00	77,320,468,209.00	120,560,321,129.49	13.82
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,368,258,534.00	12,289,820,024.00	9,424,723,876.00	12,086,694,279.00	12,173,862,434.00	3.44
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	377,712,974,898.03	370,561,948,113.40	501,178,040,052.95	330,989,096,415.21	531,103,028,605.40	14.96
4.2	DANA PERIMBANGAN	1,332,517,465,266.00	1,647,365,217,172.00	1,636,851,744,218.00	1,653,956,944,914.00	1,686,699,237,834.00	6.50
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	103,078,105,266.00	147,700,142,065.00	144,271,830,855.00	146,670,966,840.00	114,680,225,376.00	5.21
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1,198,049,800,000.0	1,233,705,774,000.00	1,212,033,531,000.00	1,212,033,531,000.00	1,277,169,857,000.00	1.65
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	31,389,560,000.00	265,959,301,107.00	280,546,382,363.00	295,252,447,074.00	294,849,155,458.00	189.47
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1,119,279,994,119.00	970,559,788,745.00	1,131,494,542,148.00	1,180,872,852,766.00	1,835,081,680,928.00	15.76
4.3.1	Pendapatan Hibah	3,857,000,000.00	2,073,000,000.00	2,958,582,352.00	189,471,225,533.00	192,671,706,540.00	1,575.57
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	673,988,192,639.00	715,262,630,045.00	743,133,859,796.00	791,358,847,775.00	811,483,111,469.00	4.76
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	275,366,338,000.00	253,224,158,700.00	52,941,282,000.00		60,780,190,000.00	0.00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	166,068,463,480.00		332,460,818,000.00	200,042,779,458.00	770,146,672,919.00	0.00
5	BELANJA	3,882,237,460,467.00	4,404,495,132,194.82	4,982,347,106,794.00	5,001,748,526,414.1	5,567,923,376,279.03	9.57
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,432,646,830,392.00	1,614,077,501,175.00	1,785,274,492,418.0	2,062,103,244,656.00	1,909,565,700,219.00	7.84
5.1.1	Belanja Pegawai	1,363,650,359,301.00	1,504,471,822,877.00	1,649,362,115,601.00	1,918,768,585,973.00	1,708,561,985,966.00	6.33
5.1.2	Belanja Bunga	120,138,622.00	63,246,793.00	35,569,285.00	8,374,400.00		(66.89)
5.1.3	Belanja Subsidi				394,631,518.00	5,543,886,923.00	
5.1.4	Belanja Hibah	45,761,627,000.00	74,297,227,000.00	56,483,844,800.0	68,503,996,486.00	94,504,751,250.00	19.08
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	21,126,000,000.00	29,254,800,000.00	78,005,600,000.00	72,251,400,000.00	98,669,460,000.00	58.58
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1,058,182,433.00	964,438,170.00	1,151,746,170.00	1,305,838,500.00	1,546,647,000.00	10.60
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	930,523,036.00	5,025,966,335.00	235,616,562.0	870,417,779.00	738,969,080.00	149.78
5.2	BELANJA LANGSUNG	2,449,590,630,075.00	2,790,417,631,019.82	3,197,072,614,376.0	5,099,194,151,718.31	3,658,357,676,060.03	14.93
5.2.1	Belanja Pegawai	372,427,851,919.0	478,765,877,324.00	710,589,220,901.00	2,939,645,281,758.14	191,289,754,047.00	74.29
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	827,208,108,778.00	883,617,229,289.82	1,250,396,770,847.00	327,218,562,794.00	2,362,558,547,595.29	149.13
5.2.3	Belanja Modal	1,249,954,669,378.00	1,428,034,524,406.00	1,236,086,622,628.0	1,832,330,307,166.17	1,104,509,374,417.74	2.33

Sumber : Rancangan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Tabel 3.96
Neraca Daerah Kota Bekasi, 2013-2017

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Rata-Rata Pertumbuhan
1	ASET	7.082.243.848.883	7.776.755.170.073	8.497.526.233.636	10.002.095.297.61 8	10.572.349.633.58 4	10,62%
1.1.	ASET LANCAR	508.177.436.365	270.035.243.876	311.853.299.196	380.451.043.185	345.759.139.295	-4,62%
1.1.1.	Kas	14.310.875.989	32.513.986.251	53.409.124.943	28.744.739.552	-5.947.164.338	6,15%
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	0	0	0	0	0	0,00%
1.1.3.	Piutang	452.504.732.787	192.492.946.256	192.822.305.750	553.142.480.226	553.142.480.226	32,39%
1.1.4	Piutang Lain-lain	18.935.006.330	20.783.481.232	50.678.686.212	16.360.897.171	16.360.897.171	21,47%
1.1.5.	Persediaan	22.426.821.260	24.244.830.138	14.943.182.291	38.417.688.191	38.417.688.191	31,71%
1.1.6	Penyisihan Piutang				-257.433.189.866	-257.433.189.866	0,00%
1.1.7.	Beban Dibayar Dimuka				1.218.427.911	1.218.427.911	0,00%
1.2.	ASET TETAP	5.950.039.628.486	6.535.465.553.489	7.077.524.971.341	8.729.571.316.659	9.965.657.939.287	13,91%
1.2.1	Tanah	1.263.598.705.680	1.232.636.330.490	3.142.949.917.238	3.306.513.509.463	3.409.664.043.093	40,21%
1.2.2	Peralatan dan Mesin	701.172.378.521	793.160.004.928	938.359.845.738	1.176.974.563.366	1.426.087.062.545	19,51%
1.2.3.	Gedung dan Bangunan	1.524.212.186.413	1.883.098.730.347	2.104.408.928.269	2.631.613.029.632	2.817.021.147.021	16,85%
1.2.4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	2.136.492.503.875	2.534.962.712.707	3.165.660.825.253	3.801.233.517.398	4.496.691.893.397	20,48%
1.2.5.	Aset tetap Lainnya	61.015.365.539	66.020.115.886	70.306.569.303	86.275.496.843	89.232.593.274	10,21%
1.2.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	263.548.488.459	25.587.659.131	178.844.280.831	178.844.280.831	178.844.280.831	127,16%
1.2.7	Akumulasi Penyusutan			-2.523.005.395.292	-2.451.883.080.874	-2.451.883.080.874	-0,70%
1.3.	ASET LAINNYA	74.459.872.670	52.388.583.110	40.196.034.567	46.131.640.788	46.131.640.788	-9,54%
1.4.	Investasi Jangka Panjang	148.371.478.316	203.913.297.055	214.800.914.214	214.800.914.214	214.800.914.214	10,69%
2.	KEWAJIBAN	43.369.935.784	34.000.250.347	75.653.813.105	60.924.518.848	62.653.015.253	21,07%
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek	42.276.641.208	33.219.325.650	74.949.860.547	61.949.062.695	61.949.062.695	21,71%
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	1.093.294.576	780.924.697	703.952.558	500.155.685	703.952.558	-6,66%
3.	EKUITAS	7.038.873.913.099	7.742.754.919.727	8.421.872.420.531	11.050.906.057.00 9	14.033.662.905.96 2	19,24%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7.082.243.848.883	7.776.755.170.073	8.497.526.233.636	11.113.559.072.26 2	14.096.315.921.21 5	19,17%

Sumber : Rancangan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Analisis rasio keuangan untuk pemerintah daerah memiliki keterbatasan dibandingkan dengan sektor bisnis, akibat tidak adanya sejumlah informasi yang biasa digunakan di sektor bisnis seperti laba. Namun ada beberapa rasio yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah seperti ditampilkan pada tabel di bawah ini, yaitu :

1. Rasio *Likuiditas*, yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya :
 - Rasio lancar untuk pemerintah kota Bekasi menunjukkan angka yang cukup baik, dengan perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar sebesar 5,581:1 pada tahun anggaran 2017. Angka perbandingan yang selalu di atas 2:1 sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 menunjukkan bahwa kota Bekasi memiliki aset lancar yang cukup untuk melunasi utang jangka pendeknya.
 - Rasio Kas menunjukkan angka yang kurang baik, yaitu sebesar -0,096:1 pada tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa kas yang ada tidak cukup untuk melunasi utang jangka pendeknya.
 - Rasio Cepat menunjukkan angka yang cukup baik yaitu 4,961:1 pada tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa aktiva lancar yang ada setelah dikurangi dengan persediaan sudah cukup untuk melunasi utang jangka pendeknya.
 - Rasio Modal kerja terhadap Total Aset menunjukkan proporsi dari modal kerja (aset lancar dikurang utang lancar) terhadap total aset sebesar 0,027 pada tahun 2017, yang sedikit menurun dari angka tahun sebelumnya sebesar 0,032. Rasio ini menunjukkan bahwa masih terdapat 2,7 % aset yang bersifat likuid dari total aset pemerintah kota Bekasi setelah melunasi utang jangka pendeknya.
2. Rasio *Solvabilitas* menunjukkan perbandingan antara total aset dengan total utang yang cukup besar, yaitu sebesar 168,774:1 pada tahun 2017. Angka ini mengindikasikan bahwa pemerintah kota Bekasi dapat memenuhi seluruh kewajibannya, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Angka ini menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2016, setelah sebelumnya terdapat penurunan yang cukup besar dari tahun 2014 ke 2015.
3. Rasio utang :
 - Rasio Utang terhadap Ekuitas menunjukkan angka yang cukup baik yaitu sebesar 0,004 pada tahun 2016. Angka ini menunjukkan bahwa nilai total utang pemerintah kota Bekasi hanya sebesar 0,4% dari total ekuitas yang dimiliki, sehingga kewajiban yang harus dilunasi tidak terlalu membebani pemerintah. Angka tersebut menunjukkan penurunan rasio utang dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 0,006.
Rasio Utang terhadap Aset Modal juga menunjukkan angka yang cukup baik yaitu sebesar 0,006 pada tahun 2017. Angka ini menunjukkan bahwa nilai total utang pemerintah kota Bekasi hanya sebesar 0,6% dari total aset modal yang dimiliki, sehingga kewajiban yang harus dilunasi tidak terlalu membebani pemerintah. Angka tersebut menunjukkan penurunan rasio utang dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 0,007.

3.7.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pertumbuhan rata-rata PAD yang lebih tinggi daripada pertumbuhan komponen pendapatan daerah lainnya menunjukkan dijalankannya kebijakan pengelolaan keuangan di masa lalu yang berupaya meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah pada bantuan pemerintah pusat. Pertumbuhan rata-rata PAD yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan komponen lainnya menyebabkan adanya peningkatan proporsi PAD dan penurunan proporsi komponen dana perimbangan dan lain- lain pendapatan yang sah terhadap total pendapatan daerah Kota Bekasi.

a. Proporsi Penggunaan Anggaran

Selama kurun waktu 2013-2017, terjadi peningkatan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur (belanja pegawai) terhadap total pengeluaran, dari 47,44 persen pada tahun 2013 menjadi 44,83 persen pada tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi 47,16 persen pada tahun 2017. Secara nominal belanja pemenuhan kebutuhan aparatur juga meningkat dari Rp1.414.572.740.918,- pada tahun 2013 menjadi Rp1.983.237.700.201,- pada tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi Rp2.359.002.998.502,- pada tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.98
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bekasi

No	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100 %
1	2013	1.414.572.740.918	2.981.554.255.117	47,44%
2	2014	1.588.325.325.041	3.143.650.785.535	50,52%
3	2015	1.736.078.211.220	3.882.549.830.355	44,71%
4	2016	1.983.237.700.201	4.423.807.502.099	44,83%
5	2017	2.359.002.998.502	5.001.795.465.771	47,16%

Sumber : Rancangan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

b. Analisis Pembiayaan

Realisasi pendapatan daerah Kota Bekasi menunjukkan peningkatan dari Rp2.960.580.369.589,- pada tahun 2013 menjadi Rp 4.835.980.257.174,- pada tahun 2018 (awal tahun RPJMD) dan meningkat lagi menjadi Rp 5.963.929.785.384,- pada tahun 2019. Sementara pengeluaran daerah Kota Bekasi juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013 pengeluaran daerah sebesar Rp 2.981.554.255.117,- terdiri atas belanja daerah sebesar Rp2.959.889.954.879,- dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp21.664.300.238,-, pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 5.043.117.107.664,- yang terdiri atas belanja daerah sebesar Rp 5.001.748.526.414,- dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 41.368.581.250,-.

Pada tahun 2019 pengeluaran daerah Kota Bekasi kembali meningkat menjadi Rp 5.268.697.085.740,- yang terdiri atas belanja daerah sebesar Rp 5.267.665.085.740,- dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.032.000.000,-. Dengan komposisi pendapatan daerah dan pengeluaran daerah seperti tersebut, maka pada tahun 2015 masih terdapat surplus sebesar Rp46.513.665.886,-. Sementara pada tahun 2016-2018 terdapat defisit riil yang cukup besar yaitu senilai Rp 210.167.535.909,- pada tahun 2016, Rp 463.517.081.978,- pada tahun 2017, dan Rp 207.136.850.490 pada tahun 2018. Tahun 2019 kembali surplus sebesar Rp 695.232.699.644,-. Defisit riil anggaran Kota Bekasi periode 2015-2017 terlihat pada Tabel di bawah ini.

3.7.4 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun ke depan (2019- 2023) dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi. Pada tahun 2020, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan antisipasi dan penanganan penularan COVID-19.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19. Langkah antisipasi dan penanganan COVID19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang dibebankan pada "Belanja Tidak Terduga" yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi, maka dapat menggunakan:

- a. Dana dari penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dan
- b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat kerja. Mekanisme pergeseran perubahan DPA dilaksanakan melalui perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk:

1. Melakukan percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas:
 - a. Penanganan kesehatan;
 - b. Penangan dampak ekonomi; danPenyediaan jarring pengaman sosial/social safety net

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Tabel 3.99
Defisit Riil Anggaran Kota Bekasi, 2013-2019

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.960.580.369.589	3.480.340.735.519	3.956.308.126.353	4.213.639.966.190	4.538.278.383.793	4.835.980.257.174	5.963.929.785.384
	Dikurangi realisasi:							
2	Belanja Daerah	2.959.889.954.879	3.107.838.415.647	3.882.237.460.467	4.404.495.132.195	4.936.233.095.851	5.001.748.526.414	5.267.665.085.740
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	21.664.300.238	35.812.369.888	27.557.000.000	19.312.369.904	65.562.369.920	41.368.581.250	1.032.000.000
	Defisit Riil	-20.973.885.528	336.689.949.984	46.513.665.886	(210.167.535.909)	(463.517.081.978)	(207.136.850.490)	695.232.699.64

Sumber : Rancangan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

2. Melakukan koordinasi dengan Forkopimda organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat/agama untuk:
 - a. Mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat agar tidak mudik guna menghindari penyebaran COVID-19;
Memberikan arahan secara berjenjang sampai dengan tingkat desa untuk menghindari stigma negative berlebihan terhadap pemudik
3. Memastikan dan mengawasi:
 - a. Kecukupan dan kelancaran distribusi sembako di daerah.
 - b. Aktivitas industri dan pabrik serta dunia usaha yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan penangan COVID-19 tetap berjalan.
4. Refocusing dan perubahan alokasi anggaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan Instruksi Menteri.
5. Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan percepatan refocusing dan perubahan alokasi anggaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari akan dilakukan rasionalisasi dana transfer.
6. APIP secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Menteri ini.

Adapun fokus belanja dalam rangka penanganan COVID-19 diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020. Dalam Surat Edaran Bersama ini disebutkan hal-hal yang harus segera dilakukan Pemerintah Daerah, yaitu:

1. Melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD melalui penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan Dana Desa dan penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Melakukan penyesuaian belanja daerah melalui Rasionalisasi Belanja Pegawai, Barang/Jasa, dan Belanja Modal.
3. Penyesuaian pendapatan dan belanja digunakan untuk mendanai Bidang Kesehatan, Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/Social Safety Net, dan Pengamanan Dampak Ekonomi.
4. Melakukan pengutamakan penggunaan anggaran dan metode pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Untuk melaksanakan ketentuan keputusan bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, maka Walikota Bekasi mengeluarkan instruksi Nomor 903/473/SETDA.TU tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Kota Bekasi.

3.7.5 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

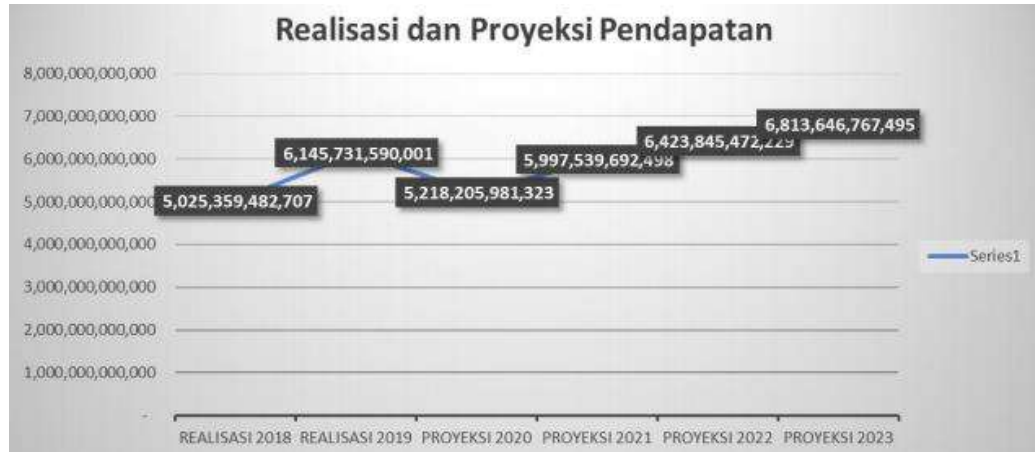
a. Pendapatan

Dalam penyusunan proyeksi pendapatan daerah ini perlu mempertimbangkan beberapa asumsi terkait dengan pertumbuhan pendapatan Kota Bekasi selama beberapa tahun ke belakang, potensi pendapatan daerah yang

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

dapat diperoleh Pemerintah Kota Bekasi selama lima tahun ke depan, dan kebijakan keuangan pemerintah pusat, serta kondisi ekonomi makro Kota Bekasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini.



Gambar 3.53
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2020-2023

Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2021-2023 ini sudah memasukkan komponen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya. Memperhatikan dampak pandemi Covid-19 dan refocusing anggaran pada tahun 2020, proyeksi pendapatan daerah Kota Bekasi pada akhir tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp 5.218.205.981.323,- atau turun sebesar 10,45 persen dari proyeksi yang ditetapkan pada APBD Murni Tahun 2020. Tahun 2021, pendapatan daerah Kota Bekasi diproyeksikan masih akan mengalami peningkatan sebesar 14,93 persen menjadi Rp 5.997.539.692.498,- dibandingkan saat proyeksi perubahan APBD tahun 2020. Selanjutnya, pendapatan Kota Bekasi diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan sebesar 7,43 persen pada tahun 2022, dan 7,50 persen pada tahun 2023.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Instruksi Walikota Bekasi Nomor 903/473/SETDA.TU tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Kota Bekasi sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020. Dalam instruksi tersebut, penyesuaian Pendapatan Daerah dilakukan dengan ketentuan:

1. Penyesuaian pendapatan Transfer ke Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
2. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Bekasi serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah,

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.

Menurunnya proyeksi pendapatan pada tahun 2020 dipicu karena penurunan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah. Penurunan pajak daerah terutama terjadi pada bulan April 2020, yaitu sebesar Rp 74.518.409.915,- turun sebesar 37,09 persen dari bulan Maret sebesar Rp 118.444.788.852,-.

Penurunan yang tajam juga terjadi pada perolehan Hasil Retribusi Daerah. Pada bulan April 2020, pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 3.005.131.237,- turun sebesar 68,88 persen dari bulan sebelumnya sebesar Rp 9.657.281.004. Untuk mencapai proyeksi pendapatan daerah Kota Bekasi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, perlu beberapa kebijakan yang dilakukan di masa mendatang, antara lain:

1. Peningkatan pendapatan daerah dari komponen PAD yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah melalui reaktivasi kegiatan usaha, penguatan contributor PDRB, dan pendayagunaan potensi ekonomi baru.
2. Penyempurnaan sistem dan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Identifikasi objek-objek wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah melalui pengelolaan sumberdaya daerah secara lebih profesional.
- 5) Intensifikasi pendapatan daerah melalui penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Belanja

Berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan capaian riil belanja tahun 2018 dan 2019, belanja daerah Kota Bekasi pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp 5.982.539.692.498,- dan akan meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp 6.399.713.169.716,-. Belanja daerah akan tumbuh menjadi Rp 6.647.775.828.202,- pada tahun 2023. Dalam memproyeksikan belanja pada tahun 2021 dan tahun berikutnya didasarkan atas kebijakan refocusing belanja menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional yang dilakukan pada Perubahan Penjabaran ke 3 (tiga) APBD Tahun 2020 sebagai acuan proyeksi pertumbuhan belanja mulai dari tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya.

Selain itu Pendapatan Transfer Antar Daerah besumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 diproyeksikan berdasarkan pengajuan yang sudah disampaikan ke tiap pemerintah provinsi terkait. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD diubah dari struktur sebelumnya sehingga jenis Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tidak digunakan. Adapun struktur APBD yang akan disusun pada revisi RPJMD Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , tersebut antara lain :

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

- a. Belanja Operasi, diharapkan mampu meningkatkan kinerja aparaturnya dan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan memprioritaskan untuk:
 1. Membiayai belanja pegawai
 2. Membiayai belanja barang;
 3. Membiayai Subsidi;
 4. Membiayai Hibah;
 5. Membiayai Bantuan Sosial.
- b. Belanja Modal diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yaitu dengan memprioritaskan untuk :
 1. Belanja Modal Tanah;
 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- c. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, kejadian luar biasa (KLB) dan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- d. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, dan dirinci atas jenis :
 1. Belanja Bagi Hasil;
 2. Belanja Bantuan Keuangan

c. Pembiayaan

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat melakukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah. Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian melalui pembentukan dan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD adalah :

- a. Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan bagian dari investasi langsung. Untuk itu perlu dilakukan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko atas penyertaan modal tersebut
- b. Dana untuk penyertaan modal harus berasal dari surplus APBD;
- c. Penyertaan modal harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
- d. Penyertaan modal dapat berupa uang atau barang milik daerah,
- e. Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD;
- f. Penyertaan modal pemerintah harus memperhatikan aspek keamanan, sehingga keputusan penyertaan modal harus didasarkan pada analisis investasi agar dana publik terbebas dari risiko kerugian.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi dimungkinkan memanfaatkan surplus APBD untuk melakukan penyertaan modal kepada BUMD yang ada. Tujuan melakukan penyertaan modal pada BUMD adalah untuk memanfaatkan adanya surplus APBD, mengembangkan

jangkauan pelayanan BUMD, dan menambah sumber pendapatan daerah. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dilakukan berdasarkan pertumbuhan realisasi besaran SILPA periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Direncanakan proyeksi nilai dan tingkat pertumbuhan SILPA tahun 2018-2023 sebesar minus 25,25%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table berikut.

d. Perhitungan Kerangka Pendanaan

- **Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**
Bagian ini menguraikan penghitungan kerangka pendanaan yang bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Berdasarkan hasil penghitungan, total penerimaan diproyeksikan menurun dari Rp6.640.107.516.491,- pada Proyeksi APBD Tahun 2019 menjadi Rp 5.949.086.670.448,- pada Tahun 2023. Proyeksi total penerimaan setelah dikurangi dengan proyeksi belanja operasi akan diperoleh angka proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Bekasi. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Bekasi pada Tahun 2023 sebesar Rp452.467.455.686,-. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table di bawah ini.
- **Kebijakan Alokasi Anggaran**
Kebijakan alokasi anggaran diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia bagi kepentingan masyarakat dan untuk pencapaian efektifitas program. Dalam menentukan alokasi anggaran perlu skala prioritas dan kebutuhan karena adanya keterbatasan anggaran. Prioritas alokasi anggaran dalam penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 2 (dua). Prioritas I dialokasikan untuk belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Sedangkan Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Walikota dan Wakil Walikota Bekasi. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table di bawah ini.

3.7.6 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan seluruhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pembiayaan lain-lain. Total Pembiayaan APBN selama periode 2013-2017 adalah sebesar 970.393.336.735. Pembiayaan tersebut merupakan Dana BOS Pusat dan Bantuan Sosial, dengan nilai terbesar sejumlah 241.338.293.710 pada tahun 2015. Kota Bekasi tidak memperoleh pendanaan dari Provinsi, sedangkan untuk Pembiayaan lain-lain senilai total 1.747.132.830.001 selama periode 2013-2017. Nilai total untuk seluruh Pembiayaan Non APBD di kota Bekasi selama 5 tahun adalah sebesar 2.717.526.166.736. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Tabel 3.100
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi, Tahun 2019-2023 (Rupiah)

URAIAN	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
PENDAPATAN DAERAH	6,972,559,854,874.91	5,316,853,938,770.00	5,909,045,828,498.00	6,064,434,203,353.25	6,238,762,229,453.41
PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,346,023,558,778.91	2,162,390,479,591.00	2,535,157,435,813.00	2,788,644,102,710.00	3,067,650,329,500.00
Pajak Daerah	2,295,657,756,755.00	1,585,937,678,852.00	1,941,249,180,504.00	2,114,682,500,000.00	2,318,366,688,500.00
- Hotel		25,219,110,065.00	38,195,997,077.00	45,900,000,000.00	53,703,000,000.00
- Restoran		259,205,292,034.00	380,813,862,216.00	457,000,000,000.00	555,100,000,000.00
- Hiburan		42,292,461,045.00	60,420,220,900.00	70,000,000,000.00	77,000,000,000.00
- Reklame		46,700,000,000.00	56,040,075,032.00	66,850,000,000.00	78,548,950,000.00
- Penerangan Jalan		350,000,000,000.00	396,900,000,000.00	420,750,000,000.00	445,995,000,000.00
- Parkir		45,000,000,000.00	51,204,370,818.00	65,000,000,000.00	76,700,000,000.00
- Air Tanah		4,544,103,402.00	8,646,823,952.00	9,080,000,000.0	9,170,800,000.00
- PBB		420,000,000,000.00	481,452,704,376.00	498,500,000,000.00	526,098,363,500.00
- BPHTB		392,976,712,306.00	467,575,126,133.00	481,602,500,000.00	496,050,575,000.00
Hasil Retribusi Daerah	243,413,534,727.34	73,471,025,751.00	103,960,002,409.00	134,350,000,000.00	158,167,500,000.00
- Jasa Umum		30,644,896,694.00	38,480,077,571.00	48,950,000,000.00	63,635,000,000.00
- Jasa Usaha		5,987,431,987.00	8,800,432,087.00	11,850,000,000.00	13,627,500,000.00
- Perizinan Tertentu		36,838,697,070.00	56,679,492,751.00	73,550,000,000.00	80,905,000,000.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	21,614,515,182.00	13,702,186,247.00	11,579,005,526.00	12,171,200,000.00	12,779,760,000.00
- Bagian Laba dari PT Bank Jabar		6,744,937,300.00	4,400,000,000.00	4,633,200,000.00	4,864,860,000.00
- Bagian Laba dari BPR Syariah		2,200,000,000.00	1,500,000,000.00	1,575,000,000.00	1,653,750,000.00
- Bagian Laba dari PT Sinergi Patriot Bekasi		-	-	-	-
- Bagian Laba dari PDAM Tirta Patriot		1,400,072,612.00	1,289,560,371.00	1,354,050,000.00	1,421,752,500.00
- Bagian Laba dari PDAM Tirta Bagasasi		3,357,176,335.00	4,389,445,155.00	4,608,950,000.00	4,839,397,500.00
Lain-lain PAD Yang Sah	785,337,752,114.57	489,279,588,741.00	478,369,247,374.00	527,440,402,710.00	578,336,381,000.00
- Denda Pajak		2,500,000,000	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
- Denda Pajak		2,941,996,750	2,500,000,000.00	2,650,000,000.00	3,500,000,000.00
- Bunga Deposito		28,676,017,179	30,000,000,000.00	40,000,000,000.00	50,000,000,000.00
-BLUD/RSUD		376,000,000,000	376,000,000,000.00	410,000,000,000.00	442,750,000,000.00
-JKN-FKTP Puskesmas		69,505,166,416	61,824,791,974.00	65,534,279,000.00	68,155,655,000.00
-KONTRIBUSI Pasar		7,244,455,400	7,244,455,400.00	8,331,123,710.00	9,830,726,000.00
-Kontribusi TPU		582,540,366	100,000,000.00	125,000,000.00	150,000,000.00
-Kontribusi Parkir		1,829,412,630	200,000,000.00	300,000,000.00	3,450,000,000.00
PENDAPATAN TRANSFER	3,433,937,896,096.00	2,954,093,859,179.00	3,173,518,792,685.00	3,073,484,808,776.25	2,958,691,343,493.06
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,807,011,595,000.00	1,632,705,171,470.00	1,560,971,194,000.00	1,639,019,753,700.00	1,720,970,741,385.00

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

URAIAN	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Pendapatan Transfer Antar Daerah	1,626,926,301,096.00	1,321,388,687,709.00	1,612,547,598,685.00	1,434,465,055,076.25	1,237,720,602,108.06
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	192,598,400,000.00	200,369,600,000.00	200,369,600,000.00	202,305,291,867.00	212,420,556,460.35
BELANJA	7,048,455,372,259.79	5,704,238,982,081.60	6,113,945,828,497.82	6,041,934,203,352.75	6,216,262,229,453.34
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,733,837,213,302.00	2,365,661,832,956.00			
Belanja Pegawai	2,106,439,446,064.00	1,892,591,250,912.00	2,096,566,061,790.00	2,159,463,043,643.70	2,224,246,934,953.01
Belanja Barang dan Jasa			2,445,539,426,782.82	2,518,905,609,586.30	2,594,472,777,873.89
Belanja Bunga					
Belanja Subsidi	6,500,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	
Belanja Hibah	160,995,136,800.00	67,775,115,800.00	167,621,445,800.00	72,650,089,174.00	74,829,591,849.22
Belanja Bantuan Sosial	100,327,460,000.00	102,713,280,000.00	120,322,240,000.00	123,931,907,200.00	127,649,864,416.00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	65,313,729,000.00	1,900,000,000.00	1,668,321,000.00	1,718,370,630.00	1,769,921,748.90
Belanja Tidak Terduga	294,261,441,438.00	294,682,186,244.00	175,000,000,000.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00
BELANJA LANGSUNG	4,314,618,158,957.79	3,338,577,149,125.60			
Belanja Langsung Penunjang Urusan	839,772,761,257.79	852,303,802,020.00			
Belanja Langsung Urusan	3,474,845,397,700.00	2,486,273,347,105.60			
Belanja Tanah			79,383,496,857.00	81,765,001,762.71	84,217,951,815.59
Belanja Peralatan dan Mesin			107,178,501,670.00	110,393,856,720.10	113,705,672,421.70
Belanja Bangunan dan Gedung			162,404,799,573.00	167,276,943,560.19	172,295,251,867.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			743,933,642,025.00	766,251,651,285.75	789,239,200,824.32
Belanja Aset Tetap lainnya			8,327,893,000.00	8,577,729,790.00	8,835,061,683.70
SURPLUS/ (DEFISIT)	(75,895,517,384.88)	(387,385,043,311.60)	(204,899,999,999.82)	22,500,000,000.50	22,500,000,000.08
PEMBIAYAAN NETTO	75,895,517,385.00	387,385,043,312.00	204,900,000,000.00	(22,500,000,000.00)	(22,500,000,000.00)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	99,395,517,385.00	419,885,043,312.00	215,000,000,000.00		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	99,395,517,385.00	419,885,043,312.00	215,000,000,000.00		
Penerimaan Piutang Pendapatan					
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	23,500,000,000.00	32,500,000,000.00	10,100,000,000	22,500,000,000	22,500,000,000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	23,500,000,000.00	22,500,000,000.00	10,100,000,000	22,500,000,000.0	22,500,000,000.00
Dana Bergulir		10,000,000,000.00			
Pembayaran Pokok Utang					
Selisih Lebih / (Kurang) Pembiayaan Daerah Tahun Berkenaan	0				

Sumber : Rancangan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Tabel 3.101
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Bekasi, 2019-2023

No	Uraian	Proyeksi				
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan	6,145,737,590,001.04	5,595,555,894,356.00	5,208,642,871,791.00	5,595,803,810,477.00	5,949,086,670,448.00
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	494,369,926,489.86				
	Total Penerimaan	6,640,107,516,490.90	5,595,555,894,356.00	5,208,642,871,791.00	5,595,803,810,477.00	5,949,086,670,448.00
	Dikurangi :					
4	Belanja Operasi	2,921,662,663,766.0	2,496,755,927,360.00	4,886,079,003,043.00	5,233,896,525,861.00	5,439,291,352,154.00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	10,320,000,000.00	25,000,000,000.00	15,000,000,000.00	24,392,745,025.00	57,327,862,608.00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	3,708,124,852,724.90	3,073,799,966,996.00	307,563,868,748.00	337,514,539,591.0	452,467,455,686.00

Sumber : Rancangan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Tabel 3.102
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bekasi 2019-2023

No	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	2.376.686.943.073	2.877.358.650.937	3.001.410.047.496	3.128.789.460.342	3.298.751.395.158
	Prioritas I	827.780.589.000	869.169.618.450	873.515.466.542	877.883.043.875	882.272.459.094
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	770.808.569.000	809.348.997.450	813.395.742.437	817.462.721.149	821.550.034.755
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	49.106.750.000	51.562.087.500	51.819.897.938	52.078.997.427	52.339.392.414
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	4.445.270.000	4.667.533.500	4.690.871.16	4.714.325.523	4.737.897.151
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.570.000.000	1.648.500.000	1.656.742.500	1.665.026.213	1.673.351.344
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.850.000.000	1.942.500.000	1.952.212.500	1.961.973.563	1.971.783.430
	Prioritas II	1.548.906.354.073	2.008.189.032.487	2.127.894.580.953	2.250.906.416.467	2.416.478.936.064

Sumber : Rancangan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023



BAB 4

ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Bab 4 menjelaskan mengenai
Bab ini berisikan uraian tentang kondisi tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), analisis capaian tujuan pembangunan (alternative proyeksi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan, analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup) dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis



4.1 KONDISI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu : (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Implementasi TPB di Indonesia untuk pencapaian 17 goals dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jumlah Indikator TPB berdasarkan Urusan dan Kewenangannya 319 indikator dan pembagian Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 4 (empat) kewenangan, meliputi :

1. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat: 308
2. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi: 235
3. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten: 220
4. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota: 222

Selain wewenang, beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah

1. Kekhususan indikator;
2. Kondisi geografis; dan
3. Ketentuan indikator RPJMD

Dengan di dasarkan pada hal tersebut jumlah indikator TPB yang terdapat di Kota Bekasi tidak mencapai 222 melainkan hanya 195 indikator, hal ini di karenakan di Kota Bekasi terdapat TPB yang tidak sesuai dengan kewenangan dan kondisi Kota Bekasi adalah :

1. TPB 7 (energi bersih dan terjangkau), dan
2. TPB 14 (ekosistem laut).

Analisis pencapaian TPB di Kota Bekasi dilakukan dengan menyandingkan antara target/indikator TPB yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/2017 dengan data TPB Kota Bekasi, sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori :

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB
3. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA

Berdasarkan hasil analisis capaian TPB yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Kota Bekasi adalah sebanyak 15 TPB yang meliputi TPB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, dan 17) sedangkan TPB 7 (energi bersih dan terjangkau), dan

TPB 14 (ekosistem laut) tidak sesuai dengan kondisi Kota Bekasi, sehingga dari 15 tujuan pembangunan berkelanjutan sebanyak 195 indikator yang sesuai dengan kondisi Kota Bekasi, meliputi :

- a. Berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Bekasi terdapat beberapa capaian indikator yang mengalami perubahan baik terdapat kenaikan maupun penurunan capaian yaitu sebanyak 75 indikator capaian.
- b. Dengan data yang telah di peroleh maka capaian TPB mengalami perubahan yaitu Indikator Sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS) yang semula sebanyak 55 indikator menjadi 59 indikator, Indikator Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (SB) yang semula 37 indikator menjadi 55 indikator dan indikator yang tidak memiliki data (NA) yang semula 103 indikator menjadi 81 indikator.

Lebih jelasnya mengenai jumlah perubahan dan Capaian TPB Di Kota Bekasi dapat di lihat pada tabel capaian jumlah indikator TPB Kota Bekasi Terhadap Target Nasional di bawah ini.

Tabel 4.1
Capaian Indikator Yang Mengalami Perubahan

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator
1	Tanpa Kemiskinan	8
2	Tanpa Kelaparan	2
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	10
4	Pendidikan Berkualitas	9
5	Kesetaraan Gender	6
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	4
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	6
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	2
10	Berkurangnya Kesenjangan	4
11	Menjadi Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	6
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	3
13	Penanganan Perubahan Iklim	2
15	Ekosistem Daratan	0
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	9
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	4
Total		75

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2020

Tabel 4.2
Capaian Indikator TPB Kota Bekasi Terhadap Target Nasional

No.	Kriteria	Lama		Baru	
		Jumlah Indikator	(%)	Jumlah Indikator	(%)
1	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	55	28,21	59	30,26
2	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	37	18,97	55	28,21
3	indikator yang tidak memiliki data (NA)	103	52,82	81	41,54
Total indikator yang menjadi kewenangan Kota Bekasi		195	100	195	100

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2020

Tabel 4.3
Matriks Target Pencapaian Indikator Tujuan SDGs

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			Satuan	Tahun Dasar	Target Kota	Target SDGs	Sumber Data	Analisis Capaian Indikator TPB
TUJUAN 1 MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN									
	TARGET	1.2.	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional						
1	INDIKATOR	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	4,11 %	5,52% (2017)	7-8% (2019)	LKIP Kota Bekasi Tahun 2017	SS
	TARGET	1.3.	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.						
2	INDIKATOR	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persen	100% (2017)	100% (2017)	95% (2019)	Dinas Kesehatan	SS
3	INDIKATOR	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persen			62,4 juta pekerja formal & 3,5 juta pekerja informal (2019)	BPJS	NA
4	INDIKATOR	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Persen	38% (2015)	40% (2015)	17,12% (2019)	Dinas Sosial	SS)
5	INDIKATOR	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Keluarga			2,8 juta (2019)	Dinas Sosial	NA
	TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.						
6	INDIKATOR	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	88,30% (2016)	90% (2016)	70% (2019)	Dinas Kesehatan	SS
7	INDIKATOR	1.4.1.(b)	Persentase umur anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persen	87,5% (2017)	100% (2017)	63% (2019)	LPPD	SS
8	INDIKATOR	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	78,47% (2015)	74,97% (2015)	65% (2019)	Dinas PPKB	SS
9	INDIKATOR	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Persen	100% (2019)	100% (2019)	100% (2019)	PUPR	SS
10	INDIKATOR	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	96,14% (2013)	88% (2013)	100% (2019)	PUPR	SB
11	INDIKATOR	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Persen	10% (2013)	12% (2013)	0		SS
12	INDIKATOR	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat	Persen	105,69% (2017)	100,00% (2017)	94,78% (2019)	DINAS PENDIDIKAN & LPPD	SS
13	INDIKATOR	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	Persen	82,35% (2017)	93,18% (2017)	82,2% (2019)	DINAS PENDIDIKAN & LPPD	SS
14	INDIKATOR	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat	Persen	90,17% (2016)	73,63% (2016)	91,63% (2019)	DINAS PENDIDIKAN & LPPD	SB

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			Satuan	Tahun Dasar	Target Kota	Target SDGs	Sumber Data	Analisis Capaian Indikator TPB
15	INDIKATOR	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akte kelahiran	Persen			77,4% (2019)	DISDUKCAPIL	NA
16	INDIKATOR	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN maupun non PLN.	Persen			100% (2019)	PLN dan BPS	NA
	TARGET	1.5.	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana						
17	INDIKATOR	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	orang				BPBD	NA
18	INDIKATOR	1.5.1 (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	daerah			39 daerah (2019)	BPBD	NA
19	INDIKATOR	1.5.1 (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	orang			150 ribu (2019)	BPBD	NA
20	INDIKATOR	1.5.1 (c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	orang	750 (2017)	750 (2017)	81 ribu (2019)	BPBD	SS
21	INDIKATOR	1.5.1 (d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	daerah	10 kec		450 (2019)	BPBD	SS
22	INDIKATOR	1.5.1 (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	indeks risiko			118,6 (2019)	BPBD	NA
23	INDIKATOR	1.5.2	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP Global.					BPBD	NA
24	INDIKATOR	1.5.2 (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.					BPBD	NA
25	INDIKATOR	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	persen	100%	100%		BPBD	SS
	TARGET	2.1.	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.						
1	INDIKATOR	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).	Persen				DINKES	NA
2	INDIKATOR	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Persen	2,72% (2013)	2,17% (2017)	17% (2019)	RPJMD & BPS	NA
3	INDIKATOR	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Persen				DINKES	NA
4	INDIKATOR	2.1.2 (a)	Prevalensi penduduk dengan asupan kalori minimum dibawah 1400 Kkal/kapita/hari.	Persen			8,5% (2019)	DINKES	NA
	TARGET	2.2.	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.						
5	INDIKATOR	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Persen				DINKES	NA
6	INDIKATOR	2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Persen			28% (2019)	DIINKES	NA
7	INDIKATOR	2.2.2 *	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe.	Persen				DINKES	NA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			Satuan	Tahun Dasar	Target Kota	Target SDGs	Sumber Data	Analisis Capaian Indikator TPB
8	INDIKATOR	2.2.2 (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Persen			28% (2019)	DINKES	NA
9	INDIKATOR	2.2.2 (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persen			50% (2019)	DINKES	NA
10	INDIKATOR	2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.		89,2 (2016)		Skor PHH 92,5 dan tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/ tahun (2019)	DISTANIKAN	SS)
	TARGET	2.3.	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.						
11	INDIKATOR	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Persen				DISTANIKAN	NA
TUJUAN 3 MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA									
	TARGET	3.1.	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.						
1	INDIKATOR	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	orang	23,4 (2017)	46 (2017)	306 (2019)	DINKES	SS
2	INDIKATOR	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Persen	83,8% (2013)	88,0% (2017)	95% (2019)	DINKES	SB
3	INDIKATOR	3.1.2 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen			85% (2019)	DINKES	NA
	TARGET	3.2.	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.						
4	INDIKATOR	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran anak.	Orang	1,12 (2017)		24 (2019)	DINKES/LPPD	SB
5	INDIKATOR	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	orang	1,08 (2017)		0	DINKES	SB
6	INDIKATOR	3.2.2 (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran anak.	orang	1,10 (2017)	25 (2017)	0	DINKES	SB
	TARGET	3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.						
7	INDIKATOR	3.3.1 (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Persen	0,0002% (2013)	0,0002% (2017)	<0,5% (2019)	Dinkes	SS
8	INDIKATOR	3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Kasus	1432 (2013)	Tidak ada	245 (2019)	Dinkes	SB
9	INDIKATOR	3.3.3*	Kejadian malaria per 1000 orang.	orang	0,005		0	Dinkes	SS
	TARGET	3.4.	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.						
10	INDIKATOR	3.4.1 (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Persen			5,4% (2019)	RSUD	NA
11	INDIKATOR	3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Persen	100% (2017)	25,71% (2017)	24,3% (2019)	RSUD	SB
12	INDIKATOR	3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Persen			15,4% (2019)	RSUD	NA
13	INDIKATOR	3.4.2*	Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.	Orang			0	kepolisian	NA
	TARGET	3.5.	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.						
14	INDIKATOR	3.5.1 (a)	Jumlah penyalahgunaan narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	Orang			0	DINSOS	NA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			Satuan	Tahun Dasar	Target Kota	Target SDGs	Sumber Data	Analisis Capaian Indikator TPB
15	INDIKATOR	3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Orang			0	DINSOS	NA
16	INDIKATOR	3.5.1 (c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Orang			210 (2019)	DINSOS	NA
17	INDIKATOR	3.5.1 (d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.		8 (2018)		85 (2019)	DINKES/DINSOS	NA
18	INDIKATOR	3.5.1 (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Persen			0,02% (2019)	DINKES	NA
19	INDIKATOR	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Persen			0	DINKES	NA
	TARGET	3.7.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi kedalam strategi dan program nasional.						
20	INDIKATOR	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Persen	73,72% (2013)	76,89% (2017)	66% (2019)	Dinas PPKB	SS
21	INDIKATOR	3.7.1 (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	73,72 (2013)	76,89 (2017)	0	Dinas PPKB	SB
22	INDIKATOR	3.7.1 (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Persen	30,11% (2013)	31,04% (2017)	23,5% (2019)	Dinas PPKB	SS
23	INDIKATOR	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Persen			38 (2019)	Dinas PPKB	NA
24	INDIKATOR	3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR)	Persen			2,28 (2019)	Dinas PPKB	NA
	TARGET	3.8.	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan resiko keuangan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.						
25	INDIKATOR	3.8.1 (a)	Unmet need pelayanan kesehatan	Persen	16,37% (2013)	10,24% (2017)	9,91% (2019)	Dinas PPKB	SS
26	INDIKATOR	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Orang			0	BPJS	NA
27	INDIKATOR	3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	100% (2017)	100% (2017)	95% (2019)	DINKES	SS
	TARGET	3.9.	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.						
28	INDIKATOR	3.9.3 (a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Persen			0	DINKES	NA
	TARGET	3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.						
29	INDIKATOR	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≤15 tahun.	Persen			0	DINKES	NA
	TARGET	3.b	Mendukung penelitian pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keeluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya menyediakan akses obat bagi semua.						
30	INDIKATOR	3.b.1 (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persen	100% (2017)	100% (2017)	0	DINKES	SS
	TARGET	3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.						
31	INDIKATOR	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.				0	DINKES	NA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT		Satuan	Tahun Dasar	Target Kota	Target SDGs	Sumber Data	Analisis Capaian Indikator TPB	
TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA.									
	TARGET	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.						
1	INDIKATOR	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Persen			DISDIK	NA	
2	INDIKATOR	4.1.1 (a)	Presentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persen	89,62% (2017)	69 (2017)	84,2% (2019)	RPJMD	SS
3	INDIKATOR	4.1.1 (b)	Presentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persen	76,75% (2017)	74 (2017)	81% (2019)	RPJMD	SB
4	INDIKATOR	4.1.1 (c)	Presentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Persen	74,15% (2016)	68 (2016)	84,6% (2019)	RPJMD	SB
5	INDIKATOR	4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat.	Persen	120,76% (2016)	99,99% (2016)	114,09% (2019)	RPJMD	SS
6	INDIKATOR	4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat.	Persen	98,33% (2016)	95,32% (2016)	106,94% (2019)	RPJMD	SB
7	INDIKATOR	4.1.1 (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat.	Persen	98,61% (2016)	75,89% (2016)	91,63% (2019)	RPJMD	SS
	TARGET	4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.						
8	INDIKATOR	4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Persen	91,91% (2017)	48% (2017)	77,2% (2019)	DISDIK	SS
	TARGET	4.3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.						
9	INDIKATOR	4.3.1 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat.	Persen	98,61% (2016)	75,89% (2016)	91,63% (2019)	RPJMD	SS
10	INDIKATOR	4.3.1 (b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Persen	35,84% (2015)	0	36,73% (2019)	RPJMD	SB
	TARGET	4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.						
11	INDIKATOR	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Persen			DISDIK	NA	
	TARGET	4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.						
12	INDIKATOR	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Persen			DISDIK	NA	
	TARGET	4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.						
13	INDIKATOR	4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Persen	99,91% (2017)		0	RPJMD	SB
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN									
	TARGET	5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.						
1	INDIKATOR	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.		0	0	16 (2019)		NA
	TARGET	5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.						
2	INDIKATOR	5.2.1 (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Persen	0,04% (2013)	0,04% (2015)	≤20,48% (2019)	RPJMD	SS
3	INDIKATOR	5.2.2 (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang	Persen	100% (2013)	100% (2013)	70% (2019)	RPJMD	SS

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			Satuan	Tahun Dasar	Target Kota	Target SDGs	Sumber Data	Analisis Capaian Indikator TPB
			mendapat layanan komprehensif.						
	TARGET	5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.						
4	INDIKATOR	5.3.1 (a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Tahun			21 tahun (2019)		NA
5	INDIKATOR	5.3.1 (b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Tahun			38 tahun		NA
6	INDIKATOR	5.3.1 (c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Persen	90,17% (2016)	73,63% (2016)	91,63% (2019)		SB
	TARGET	5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.						
7	INDIKATOR	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Persen	71,88% (2017)		≥ 16,6% (2019)	BKKPD & RPJMD	SS
8	INDIKATOR	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Persen			Eselon I ≥ 20, 66% dan Eselon II ≥ 16,39% (2019)	BPS	NA
	TARGET	5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.						
9	INDIKATOR	5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Persen	16,37% (2013)	10,24% (2017)	9,9% (2019)	Dinas PPKB	SS
10	INDIKATOR	5.6.1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Persen	73,72% (2013)	76,89% (2017)	85% (2019)	Dinas PPKB	SB
11	INDIKATOR	5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Perwal			Tersedia (2019)	Dinas PPKB	NA
TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK YANG BERKELANJUTAN									
	TARGET	6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua						
1	INDIKATOR	6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persen	96,80% (2013)	99% (2013)	100% (2019)	Disperkimtan	SB
2	INDIKATOR	6.1.1 (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga perkotaan dan industri.	m3/detik	1598,18 m3/detik (2017)	85,2 m3/detik (2017)	118,6 m3/detik (2019)	Disperkimtan	SS
3	INDIKATOR	6.1.1 (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persen	50% (2017)	50% (2017)	100% (2019)	Disperkimtan	SB
	TARGET	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.						
4	INDIKATOR	6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persen	96,14% (2013)	87,2% (2017)	100% (2019)	Disperkimtan	SB
5	INDIKATOR	6.2.1 (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Desa			45000 (2019)		NA
			Persentase RW yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)		73,73% (2017)	50% (2018)		Dinkes	SS
6	INDIKATOR	6.2.1 (d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Desa					NA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			Satuan	Tahun Dasar	Target Kota	Target SDGs	Sumber Data	Analisis Capaian Indikator TPB	
			Persentase RW yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).		73,73% (2017)	50% (2018)		Dinkes	SS	
7	INDIKATOR	6.2.1 (f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Persen	47% (2017)		100%	Disperkimtan	SB	
	TARGET	6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.							
8	INDIKATOR	6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Persen	0	0		Disperkimtan	NA	
	TARGET	6.4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.							
9	INDIKATOR	6.4.1 (a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Persen	60% (2016)	40% (2016)	ada (2019)		SS	
10	INDIKATOR	6.4.1 (b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.		Ada		ada (2019)		SS	
	TARGET	6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.							
11	INDIKATOR	6.5.1 (f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Sungai	21 (2017)		10 WS (2019)	PUPR	SS	
12	INDIKATOR	6.5.1 (g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.		Ada		ada (2019)	Balai Pendayagunaan SDA WS Ciliwung-Cisadane	SS	
	TUJUAN 8 MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELAJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA									
	TARGET	8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi perkapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang							
1	INDIKATOR	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB perkapita	%	2017 (6.08%)	5.50-6.50%	Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019	BPS Kota Bekasi Tahun 2017	SS	
2	INDIKATOR	8.1.1.(a)	PDB Perkapita	Rp	2017 (Rp. 29.140.000) angka sangat sementara	Rp. 28.972.101	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	BPS Kota Bekasi Tahun 2017	SS	
	TARGET	8.3	Menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro kecil, dan menengah termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan							
3	INDIKATOR	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informas sektor non pertanian, berdasarkan jenis kelamin					Disnaker	NA	

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			Satuan	Tahun Dasar	Target Kota	Target SDGs	Sumber Data	Analisis Capaian Indikator TPB
4	INDIKATOR	8.3.1 (a)	Presentase tenaga kerja formal				Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015:42,2%).	disnaker	NA
5	INDIKATOR	8.3.1 (b)	Presentase tenaga kerja informal sektor pertanian					UMKM	NA
6	INDIKATOR	8.3.1 (c)	Presentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke layanan Keuangan					Disnaker	NA
	TARGET	8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas dan upah yang sama untuk pekerja yang sama nilainya						
7	INDIKATOR	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (angka pengangguran terbuka)	%	2017 (9.32 %)	8,30%	tingkat pengangguran terbuka 5,66% pada 2019	LKIP Kota Bekasi Tahun 2017 (Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018)	SB
	TARGET	8,8	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan menjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya						
8	INDIKATOR	8.8.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	perusahaan	1.119			Laporan RPJMD Kota Bekasi (Bappeda Tahun 2018)	SB
	TARGET	8,9	Pada tahun 2030 menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal						
9	INDIKATOR	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	%	2017 (17.46 %)	15,97%	Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).	LKIP Kota Bekasi Tahun 2017 (Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018)	SS
10	INDIKATOR	8.9.1 (a)	Jumlah wisatawan manca negara (Jumlah kunjungan wisata)	Orang	2017 (852.353)		Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).	Laporan RPJMD Kota Bekasi (Bappeda Tahun 2018)	SB
11	INDIKATOR	8.9.1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara						NA
12	INDIKATOR	8.9.1 ©	Jumlah devisa sektor pariwisata (PAD Sektor Pariwisata)	RP	2017 (308.437.146)			Laporan RPJMD Kota Bekasi (Bappeda Tahun 2018)	SB
13	INDIKATOR	8.9.2 *	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja						NA
	TARGET	8,1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua						
14	INDIKATOR	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk						NA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			Satuan	Tahun Dasar	Target Kota	Target SDGs	Sumber Data	Analisis Capaian Indikator TPB
			dewasa						
TUJUAN 9 MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN									
	TARGET	9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan pada tahun 2030 secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto sejalan dengan kondisi nasional dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang						
1	INDIKATOR	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	(%)	26,58 (tahun 2017)		Meningkatnya kontribusi industri manufaktur menjadi 21,6% terhadap PDB pada tahun 2019 (2015: 20,8%).		SS
2	INDIKATOR	9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (Laju Pertumbuhan Ekonomi industri pengolahan)	%	LPP tahun 2013-2016 (4,7%)		Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%).	Laporan RPJMD Kota Bekasi (Bappeda Tahun 2018)	SS
3	INDIKATOR	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Orang	69.959			Indag/Disnaker	SB
	TARGET	9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang terhadap jasa keuangan termasuk kredit terjangkau dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar						
4	INDIKATOR	9.3.1 (a)	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri					UMKM/Indag	NA
5	INDIKATOR	9.3.2 *	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit					UMKM/Indag	NA
	TARGET	9.4	Pada tahun 2030 meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan yang dilaksanakan						
6	INDIKATOR	9.4.1*	Rasio emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur					Dinas Lingkungan Hidup	NA
7	INDIKATOR	9.4.1 (a)	Persentase perubahan emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca					Dinas Lingkungan Hidup	NA
TUJUAN 10 BERKURANNYANYA KESENJANGAN									
	TARGET	10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional						
1	INDIKATOR	10.1.1*	Koefisien Gini.		2017 (0.39)	0,3 ≤ G ≤ 0,5	Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	LKIP Kota Bekasi Tahun 2017 (Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018)	SS
2	INDIKATOR	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.						NA
			Tingkat kemiskinan	%	2017 (5.06 %)	5,52%	Menurunnya	LKIP Kota Bekasi	SS

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			Satuan	Tahun Dasar	Target Kota	Target SDGs	Sumber Data	Analisis Capaian Indikator TPB
							tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	Tahun 2017 (Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018)	
	TARGET	10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.						
3	INDIKATOR	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	orang/kasus	231	165		HAM Pusat/Pemberdayaan Perempuan	SB
4	INDIKATOR	10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	orang/kasus	126	65		HAM Pusat/Pemberdayaan Perempuan	SB
			presentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	2017 (100%)	100%		LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2017	SS
	TARGET	10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.						
5	INDIKATOR	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.					BPJS / Disnaker	NA
TUJUAN 11 MENJADI KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN									
	TARGET	11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.						
1	INDIKATOR	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	%	2017 (10,53%)	40%	0	LKIP Kota Bekasi Tahun 2017 (Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018)	SB
2	INDIKATOR	11.1.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%	2017 (98.43%)	99,25%	Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019.	LKIP Kota Bekasi Tahun 2017 (Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018)	SB
	TARGET	11.2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi renta, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.						
3	INDIKATOR	11.2.1(a)	persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	%	2017 (28%)			Dishub	SB
			Presentase pelayanan angkutan umum yang baik, aman dan nyaman	%	2017 (45 %)	100%	Meningkatnya pangsa pengguna moda	LKIP DISHUB Tahun 2017	SB

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			Satuan	Tahun Dasar	Target Kota	Target SDGs	Sumber Data	Analisis Capaian Indikator TPB
							transportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga tahun 2019 (2014: 23%).		
	TARGET	11.4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia						
4	INDIKATOR	11.4.1	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor)		Kota Bekasi memiliki beberapa benda, situs dan kawasan cagar budaya sebanyak 69 buah di tahun 2017 dan hanya 8 buah yang dilestarikan (12%)		Terwujudnya kota dan kawasan perkotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (heritage city) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil, hingga tahun 2019.	Laporan RPJMD Kota Bekasi (Bappeda Tahun 2018)	SS
	TARGET	11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan perkapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota						
5	INDIKATOR	11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota	%	2017	46%		Laporan akhir Perencanaan Infrastruktur Sektor Persampahan Kota Bekasi Tahun 2017 (Bappeda)	SB
6	INDIKATOR	11.6.1(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	%	2017 (63.79 %)	66%	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	LKIP Kota Bekasi Tahun 2017 (Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018)	SB
	TARGET	11.7	Pada tahun 2020, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas						
7	INDIKATOR	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)	orang/kasus	462				SB
8	INDIKATOR	11.7.2(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang						NA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT		Satuan	Tahun Dasar	Target Kota	Target SDGs	Sumber Data	Analisis Capaian Indikator TPB
			melaporkan pada polisi					
	TARGET	11.a	Mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan antara urban, pinggiran kota dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah					
9	INDIKATOR	11.a.1	Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya					NA
	TARGET	11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakandan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan peanganan holistik resiko bencana di semua lini, sesuai denggan the sendai framework for disaster risk reduction 2015-2030					
10	INDIKATOR	11.b.1	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan resiko bencana					NA
11	INDIKATOR	11.b.2	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat daerah					NA
			Cakupan dokumen penanggulangan bencana	%	2017 (100 %)	100%	LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2017	SS
TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB								
	TARGET	12.4.	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.					
1	INDIKATOR	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).					NA
			Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah pada dan B3	(%)	75(%)	45 (%)	Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019	LKPJ SS
	TARGET	12.5.	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.					
2	INDIKATOR	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang					NA
			Prosentase Pelayanan / Pengangkutan Sampah	(%)	37.26% tahun 2016 dan pada tahun 2017 63,79%	66%	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton	LKPJ SB

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT		Satuan	Tahun Dasar	Target Kota	Target SDGs	Sumber Data	Analisis Capaian Indikator TPB
						per hari		
	TARGET	12.6.	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.					
3		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.				Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan/SML) hingga tahun 2019.	NA
	TARGET	12.8.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.					
4	INDIKATOR	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.					NA
TUJUAN 13 PENANGGULANGAN PERUBAHAN IKLIM								
	TARGET	13.1.	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.					
1	INDIKATOR	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.					NA
			Penanganan bencana alam	(%)	Tahun 2016 = 100%	100%	Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019.	SS
2	INDIKATOR	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.					NA
			Jumlah Korban Bencana Alam per 100.000 orang	jiwa	110		RPJMD	NA
	TARGET	13.2.	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan daerah.					
3	INDIKATOR	13.2.1 (a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)					NA
TUJUAN 15 Ekosistem Daratan								
	TARGET	15.3	Pada tahun 2020, memulihkan lahan dan tanah kritis termasuk lahan yang terkena kekeringan dan banjir dan berusaha mencapai kota yang bebas dari lahan terdegradasi					
1	INDIKATOR	15.3 (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan					NA
	TARGET	15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran					

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			Satuan	Tahun Dasar	Target Kota	Target SDGs	Sumber Data	Analisis Capaian Indikator TPB
			pengurangan kemiskinan.						
2	INDIKATOR	15.9.1 (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati						NA
TUJUAN 16 PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH									
	TARGET	16.1.	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.						
1	INDIKATOR	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.			jumlah kasus kejahatan pada tahun 2017 sebanyak 31 kasus dengan jumlah korban sebanyak 2580	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019	LPPD	SS
2	INDIKATOR	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.			0,27		LPPD	SS
3	INDIKATOR	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	(%)		sebanyak 4121 kejadian atau sekitar 0,14% sedangkan menurun tahun 2017 sebanyak 2580 kejadian atau sekitar 0,09%		LPPD	SS
	TARGET	16.2.	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.						
4	INDIKATOR	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.						NA
5	INDIKATOR	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.			Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).			NA
	TARGET	16.3.	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.						
6	INDIKATOR	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.			Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019			NA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			Satuan	Tahun Dasar	Target Kota	Target SDGs	Sumber Data	Analisis Capaian Indikator TPB
						(2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).			
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	(%)	100%			RPJMD Teknokratik	NA
			Angka Kriminalitas yang tertangani/jumlah penduduk	(%)	angka kriminalitas yang terselesaikan setiap tahun terus meningkat pada tahun 2014 berjumlah 511 (indek 1,92) kasus dan pada tahun 2017 menjadi 1.833 (indek 6,38)			RPJMD Teknokratik	NA
7	INDIKATOR	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.			Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sebanyak 3.021 orang dan non litigasi sebanyak 3.645 orang pada tahun 2019.			NA
	TARGET	16.5.	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.						
8	INDIKATOR	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).		3,65				NA
	TARGET	16.6.	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.						
9	INDIKATOR	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).		WTP				NA
10	INDIKATOR	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).						NA
11	INDIKATOR	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap						NA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			Satuan	Tahun Dasar	Target Kota	Target SDGs	Sumber Data	Analisis Capaian Indikator TPB
			belanja pengadaan.						
12	INDIKATOR	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).						NA
13	INDIKATOR	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).						NA
TARGET 16.7. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.									
14	INDIKATOR	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).		16%	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).			SB
15	INDIKATOR	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).			Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).			NA
16	INDIKATOR	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.						NA
17	INDIKATOR	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.						NA
18	INDIKATOR	16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.						NA
TARGET 16.9. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.									
19	INDIKATOR	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.						NA
20	INDIKATOR	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.				Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019		NA
21	INDIKATOR	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	(jiwa)/jiwa	569.63 (56,63%)		Meningkatnya		NA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			Satuan	Tahun Dasar	Target Kota	Target SDGs	Sumber Data	Analisis Capaian Indikator TPB
							persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).		
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN									
	TARGET	17.1.	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.						
1	INDIKATOR	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.		39,30%		Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun	LPPD Lampiran II.1	SS
	TARGET	17.1.	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.						
2	INDIKATOR	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.		76,23%		Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun	LPPD Lampiran II.1	ISS
	TARGET	17.6.	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.						
3	INDIKATOR	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.						NA
	TARGET	17.6.	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.						NA
4	INDIKATOR	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.						NA
	TARGET	17.8.	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.						
5	INDIKATOR	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.						NA
	TARGET	17.17.	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.						
6	INDIKATOR	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan						NA

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			Satuan	Tahun Dasar	Target Kota	Target SDGs	Sumber Data	Analisis Capaian Indikator TPB
			dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).						
	TARGET	17.17.	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.						
7	INDIKATOR	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).						NA
	TARGET	17.18.	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.						
8	INDIKATOR	17.18.1 (a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik						NA
9	INDIKATOR	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.						NA
	TARGET	17.19.	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.						
10	INDIKATOR	17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.						NA
	TARGET	17.19.	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.						
11	INDIKATOR	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).						NA
	TARGET	17.19.	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.						
12	INDIKATOR	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website						NA
13	INDIKATOR	17.19.2 (d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)						NA

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi Tahun 2015-2023

Tabel 4.4
Matriks Perubahan Target Pencapaian Indikator Tujuan SDGs

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT	Satuan	Tahun Dasar 2013-2017	Tahun Dasar (2018)	Tahun Dasar (2019)	Target Kota	Target SDGs	Sumber Data	Analisis Capaian Indikator TPB		
TUJUAN 1 MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN											
	TARGET	1.2.	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional								
1	INDIKATOR	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	5,06% (2017)	4,68	4,11	4%	7-8% (2019)	LKIP Kota Bekasi Tahun 2017, LKIP Kota Bekasi Tahun 2019	SS
	TARGET	1.3.	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
2	INDIKATOR	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persen	100% (2017)		100	100% (2019)	95% (2019)	Dinas Kesehatan	SS
3	INDIKATOR	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persen		91,86	94,23		62,4 juta pekerja formal & 3,5 juta pekerja informal (2019)	BPJS	NA
	TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								
8	INDIKATOR	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	78,47% (2015)		82,36%	74,97% (2015)	65% (2019)	Dinas PPKB dan LPPD Tahun 2019	SS
12	INDIKATOR	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat	Persen	105,69% (2017)	97,27	101,98%	100,00% (2017), 98,5 % (2019)	94,78% (2019)	DINAS PENDIDIKAN & LPPD dan LAKIP DISDIK 2019	SS
13	INDIKATOR	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	Persen	82,35% (2017)	83,82	93,91%	93,18% (2017), 83,93 % (2019)	82,2% (2019)	DINAS PENDIDIKAN & LPPD dan LAKIP DISDIK 2019	SS
14	INDIKATOR	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat	Persen	90,17% (2016)	67,90%	68,30%		91,63% (2019)	DINAS PENDIDIKAN & LPPD	SB
	TARGET	1.5.	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana								
22	INDIKATOR	1.5.1 (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	indeks risiko		132	132	113	118,6 (2019)	BPBD	SS
TUJUAN 2 MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN											
	TARGET	2.1.	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.								
2	INDIKATOR	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Persen	2,72% (2013)		6,02	7% (2019)	17% (2019)	RPJMD & BPS	SS
	TARGET	2.2.	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								
10	INDIKATOR	2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.		89,2 (2016)		42,50%	43,35%	Skor PPH 92,5 dan tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun (2019)	DISTANIKAN	SB

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT	Satuan	Tahun Dasar 2013-2017)	Tahun Dasar (2018)	Tahun Dasar (2019)	Target Kota	Target SDGs	Sumber Data	Analisis Capaian Indikator TPB		
TUJUAN 3 MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA											
	TARGET	3.1.	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								
1	INDIKATOR	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	orang	23,4 (2017)	38	32	46 (2017)	306 (2019)	DINKES	SS
2	INDIKATOR	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Persen	83,8% (2013)		110,68 % (2019)	88,0% (2017)	95% (2019)	DINKES	SS
3	INDIKATOR	3.1.2 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen		100%			85% (2019)	DINKES	SS
	TARGET	3.2.	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.								
4	INDIKATOR	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran anak.	Orang	1,12 (2017)		0,0605		24 (2019)	DINKES/LPPD/RPJMD 2020	SS
5	INDIKATOR	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	orang	1,08 (2017)		0,989		0	DINKES/RPJMD 2020	SB
6	INDIKATOR	3.2.2 (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran anak.	orang	1,10 (2017)		1,17	25 (2017)	0	DINKES/RPJMD 2020	SB
	TARGET	3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
7	INDIKATOR	3.3.1 (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Persen	0,0002% (2013)	0,001%	0,001%	0,0002% (2017)	<0,5% (2019)	Dinkes/RPJMD 2018	SS
8	INDIKATOR	3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Kasus	1432 (2013),	0,61%	0,54%	Tidak ada	245 (2019)	Dinkes/RPJMD 2018	SB
9	INDIKATOR	3.3.3*	Kejadian malaria per 1000 orang.	orang	0,005	0,002	0,002		0	Dinkes/RPJM 2018	SS
	TARGET	3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan dan refensi tenaga kesehatan di negara berkembang khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.								
31	INDIKATOR	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.			70%			0	DINKES	SB
TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA.											
	TARGET	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.								
2	INDIKATOR	4.1.1 (a)	Presentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persen	89,62% (2017)	81,2%	80, 8%	69 (2017)	84,2% (2019)	RPJMD/neraca pendidikan daerah tahun 2018 dan 2019	SB
3	INDIKATOR	4.1.1 (b)	Presentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persen	76,75% (2017)	73,4%	74,5%	74 (2017)	81% (2019)	RPJMD/neraca pendidikan daerah tahun 2018 dan 2019	SB
4	INDIKATOR	4.1.1 (c)	Presentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Persen	74,15% (2016)	64,9%	75,7%	68 (2016)	84,6% (2019)	RPJMD/neraca pendidikan daerah tahun 2018 dan 2019	SB
5	INDIKATOR	4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat.	Persen	120,76% (2016)	114,44	110,54%	99,99% (2016), 114 % (2019)	114,09% 2019)	RPJMD dan LAKIP DISDIK	SB
6	INDIKATOR	4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat.	Persen	98,33% (2016)	96,35	94,81 %	95,32% (2016), 96,7 % (2019)	106,94% 2019)	RPJMD dan LAKIP DISDIK	SB
7	INDIKATOR	4.1.1 (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat.	Persen	98,61% (2016)		107,42	75,89% (2016)	91,63% (2019)	RPJMD	SS

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT		Satuan	Tahun Dasar 2013-2017)	Tahun Dasar (2018)	Tahun Dasar (2019)	Target Kota	Target SDGs	Sumber Data	Analisis Capaian Indikator TPB	
	TARGET	4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.								
8	INDIKATOR	4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Persen	91,91% (2017)		92,74%	48% (2017), 56 % (2019)	77,2% (2019)	RPJMD dan LAKIP DISDIK	SS
	TARGET	4,3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.								
9	INDIKATOR	4.3.1 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat.	Persen	98,61% (2016)		107,42	75,89% (2016)	91,63% (2019)	RPJMD	SS
10	INDIKATOR	4.3.1 (b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Persen	35,84% (2015)		35,84	0	36,73% (2019)	RPJMD	SB
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN											
	TARGET	5,1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.								
1	INDIKATOR	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.		27	17	10	0	16 (2019)		SS
	TARGET	5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
2	INDIKATOR	5.2.1 (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Persen	31,68	21,75	27,37	0,04% (2015)	≤20,48% (2019)	RPJMD	SB
3	INDIKATOR	5.2.2 (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Persen	100% (2013)		100%	100% (2013)	70% (2019)	RPJMD dan Perubahan RPJMD	SS
	TARGET	5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								
6	INDIKATOR	5.3.1 (c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Persen	90,17% (2016)	92,60	107,42	73,63% (2016)	91,63% (2019)		SS
	TARGET	5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.								
7	INDIKATOR	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Persen	71,88% (2017)		49,90%		≥ 16,6% (2019)	BKKPD & RPJMD dan Perubahan RPJMD	SS
	TARGET	5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.								
9	INDIKATOR	5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Persen	16,37% (2013)	8,72%		10,24% (2017)	9,9% (2019)	Dinas PPKB dan Perubahan RPJMD	SB
TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK YANG BERKELANJUTAN											
	TARGET	6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua								
1	INDIKATOR	6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persen	96,80% (2013)		98,94 % (2019)	104%	100% (2019)	Disperkimtan dan LAKIP	SB
3	INDIKATOR	6.1.1 (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persen	50% (2017)		39%	50% (2017)	100% (2019)	Disperkimtan dan Perubahan RPJMD	SB)
	TARGET	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
4	INDIKATOR	6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persen	96,14% (2013)		90,94 % (2019)	87,2% (2017)	100% (2019)	Disperkimtan	SB

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			Satuan	Tahun Dasar 2013-2017)	Tahun Dasar (2018)	Tahun Dasar (2019)	Target Kota	Target SDGs	Sumber Data	Analisis Capaian Indikator TPB
	TARGET	6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								
8	INDIKATOR	6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Persen	0		99,04%	0		LPPD Tahun 2019	SB
	TARGET	8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi perkapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang								
2	INDIKATOR	8.1.1.(a)	PDB Perkapita	Rp	2017 (Rp. 29.140.000) angka sangat sementara		2019 (Rp. 32.756.201)	Rp. 28.972.101	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	BPS Kota Bekasi Tahun 2015-2019	SB
	TARGET	8,3	Menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro kecil, dan menengah termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan								
4	INDIKATOR	8.3.1 (a)	Presentase tenaga kerja formal	(%)			0,34%		Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015:42,2%).	LPPD Tahun 2019	SB
	TARGET	8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas dan upah yang sama untuk pekerja yang sama nilainya								
7	INDIKATOR	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (angka pengangguran terbuka)	%	2017 (9.32 %)	9,10%	8,20%	8,30%	tingkat pengangguran terbuka 5,66% pada 2019	LKIP Kota Bekasi Tahun 2017 dan LKIP 2018	SB
	TARGET	8,9	Pada tahun 2030 menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal								
9	INDIKATOR	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	%	2017 (17.46 %)	21,64%		15,97%	Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).	LKIP Kota Bekasi Tahun 2017 (Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018) dan LKIP 2018	SS
11	INDIKATOR	8.9.1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara			907729 jiwa (RPJMD 2018)	18,05%	2%		LAKIP DISPARBUD	SS
12	INDIKATOR	8.9.1 ©	Jumlah devisa sektor pariwisata (PAD	RP	2017		Rp.			Laporan RPJMD Kota	SB

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT		Satuan	Tahun Dasar 2013-2017	Tahun Dasar (2018)	Tahun Dasar (2019)	Target Kota	Target SDGs	Sumber Data	Analisis Capaian Indikator TPB	
			Sektor Pariwisata)	(308.437.146)		415.419.921			Bekasi (Bappeda Tahun 2018) dan LPPD Tahun 2019		
TUJUAN 9 MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN											
	TARGET	9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan pada tahun 2030 secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto sejalan dengan kondisi nasional dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang								
2	INDIKATOR	9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (Laju Pertumbuhan Ekonomi industri pengolahan)	%	LPP tahun 2013-2016 (4,7%)		3,71%		Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%).	Laporan RPJMD Kota Bekasi (Bappeda Tahun 2018) dan BPS Kota Bekasi PDRB Tahun 2015-2019	SB
3	INDIKATOR	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Orang	IAHH (industri argo hasil hutan) 120, IKTA (industri kimia, tekstil, aneka) 123, ILME (Industri Logam, Mesin dan Elektronik) 99	IAHH (industri argo hasil hutan) 7, IKTA (industri kimia, tekstil, aneka) 133, ILME (Industri Logam, Mesin dan Elektronik) 61	IAHH (industri argo hasil hutan) 27, IKTA (industri kimia, tekstil, aneka) 523, ILME (Industri Logam, Mesin dan Elektronik) 310			Indag/Disnaker	SB
TUJUAN 10 BERKURANNYANYA KESENJANGAN											
	TARGET	10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional								
1	INDIKATOR	10.1.1*	Koefisien Gini.		2017 (0.39)		0,35	0,3 ≤ G ≤ 0,5 untuk tahun 2017, G < 0,3 untuk tahun 2019	Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	LKIP Kota Bekasi Tahun 2017 (Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018)	SB
			Tingkat kemiskinan	%	2017 (5.06 %)		4,68%	5,52% tahun 2017 (untuk Tahun 2019 target mencapai 5,37 %)	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	LKIP Kota Bekasi Tahun 2017 (Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018)	SS
	TARGET	10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.								
			presentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	2017 (100%)		100%	100%		LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota	SS

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			Satuan	Tahun Dasar 2013-2017)	Tahun Dasar (2018)	Tahun Dasar (2019)	Target Kota	Target SDGs	Sumber Data	Analisis Capaian Indikator TPB	
										Bekasi Tahun 2017 dan LPPD Kota Bekasi Tahun 2019		
	TARGET	10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.									
5	INDIKATOR	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.			91.86	94.23			BPJS / Disnaker	NA	
	TUJUAN 11 MENJADI KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN											
	TARGET	11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.									
2	INDIKATOR	11.1.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%	2017 (98.43%)		99,75 % (2019)	99,25%	Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019.	LKIP Kota Bekasi Tahun 2017 (Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018)	SS	
	TARGET	11.2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi renta, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.									
			Presentase pelayanan angkutan umum yang baik, aman dan nyaman	%	43	47		100%	Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga tahun 2019 (2014: 23%).	LKIP DISHUB Tahun 2017	SS	
	TARGET	11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan perkapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota									
5	INDIKATOR	11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota	%		24,94 % (RPJMD 2018)		46%		Laporan akhir Perencanaan Infrastruktur Sektor Persampahan Kota Bekasi Tahun 2017 (Bappeda)	SB	
6	INDIKATOR	11.6.1(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	%	2017 (63.79 %)		64,40%	66%	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	LKIP Kota Bekasi Tahun 2017 (Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018) dan LKIP Kota Bekasi Tahun 2019	SB	

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			Satuan	Tahun Dasar 2013-2017)	Tahun Dasar (2018)	Tahun Dasar (2019)	Target Kota	Target SDGs	Sumber Data	Analisis Capaian Indikator TPB
	TARGET	11.7	Pada tahun 2020, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas								
7	INDIKATOR	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)	orang/kasus	464	357	464				SB
8	INDIKATOR	11.7.2(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan pada polisi	kasus	233	247	325			LKIP Kota Bekasi Tahun 2019	SB
TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB											
	TARGET	12.4.	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.								
			Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah pada dan B3	(%)	75(%)		34 perusahaan	45 (%)	Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019	LKPJ dan LKIP Kota Bekasi tahun 2019	SS
	TARGET	12.5.	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.								
2	INDIKATOR	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	kg			123595 (30%)	20%		LKIP Kota Bekasi Tahun 2019	SS
			Prosentase Pelayanan / Pengangkutan Sampah	(%)	37.26% tahun 2016 dan pada tahun 2017 63,79%	67,15 % (RPJMD tahun 2018)	93,40%	94 % (2019)	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari	LKPJ dan LAKIP DLH 2019	SB
TUJUAN 13 PENANGGULANGAN PERUBAHAN IKLIM											
	TARGET	13.1.	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.								
			Penanganan bencana alam	(%)	Tahun 2016 = 100%		100%	100%	Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun		SS

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

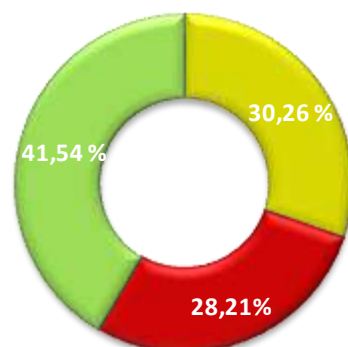
No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			Satuan	Tahun Dasar 2013-2017)	Tahun Dasar (2018)	Tahun Dasar (2019)	Target Kota	Target SDGs	Sumber Data	Analisis Capaian Indikator TPB
			Jumlah Korban Bencana Alam per 100.000 orang	jiwa	110		19.656 (Korban terdampak banjir)		2019.	RPJMD dan LPPD Tahun 2019	SB
TUJUAN 16 PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH											
TARGET		16.1.	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.								
1	INDIKATOR	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.		jumlah kasus kejahatan pada tahun 2017 sebanyak 31 kasus dengan jumlah korban sebanyak 2580	2 orang	0		Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019	LKIP (2019)	SS
3	INDIKATOR	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	(%)	sebanyak 4121 kejadian atau sekitar 0,14% sedangkan menurun tahun 2017 sebanyak 2580 kejadian atau sekitar 0,09%	sebanyak 247 kejadian atau sekitar 14,25%	sebanyak 325 kejadian atau sekitar 11,2%			LKIP (2019)	SS
TARGET		16.2.	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penysiksaan terhadap anak.								
4	INDIKATOR	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.		37	24	37				SB
5	INDIKATOR	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.		prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2017 (20,69% untuk anak laki-laki dan 31,68% untuk anak perempuan).	prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2018 (7,91% untuk anak laki-laki dan 21,75% untuk anak perempuan).	prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (17,24% untuk anak laki-laki dan 27,37% untuk anak perempuan).	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).			SS
TARGET		16.3.	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.								
6	INDIKATOR	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	(%)	233	247	325				SB
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	(%)	100%	100%	100%			RPJMD Teknokratik	SS
			Angka Kriminalitas yang	(%)	233/2.409.083	247/2.932.000	325/3.013.851			RPJMD Teknokratik	SB

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT		Satuan	Tahun Dasar 2013-2017	Tahun Dasar (2018)	Tahun Dasar (2019)	Target Kota	Target SDGs	Sumber Data	Analisis Capaian Indikator TPB	
			tertangani/jumlah penduduk								
	TARGET	16.7.	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.								
14	INDIKATOR	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).		16%	16%		Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).		SB	
	TARGET	16.9.	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.								
21	INDIKATOR	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	(jiwa)/jiwa	569.63 (56,63%)	65,80%	57,77%	92,12 % (2019)	Meningkatnya persentase anak yang memiliki akta kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).	Lakip DISDUKCAPIL	SB
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN											
	TARGET	17.1.	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.								
1	INDIKATOR	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.		39,30%	41,38%	41,34%		Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun	LPPD Lampiran II.1 dan Perubahan RPJMD	SS
	TARGET	17.6.	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.								
3	INDIKATOR	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.		98	99	99				SB
	TARGET	17.6.	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.								
4	INDIKATOR	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.		99	99	99				SB
	TARGET	17.19.	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.								
12	INDIKATOR	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website		81000	79000	80000				SB

Sumber: LAKIP Sektor 2017-2019, SAKIP 2017, LKPJ 2013-2018, LPPD Kota Bekasi Tahun 2018-2019, data OPD Kota Bekasi dan Hasil Analisis Tahun 2020

Gambar 4.1
Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB Terhadap Target Nasional



■ Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)

Secara rinci analisis pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Kota Bekasi akan di uraikan sebagai berikut:

1. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional (SS)

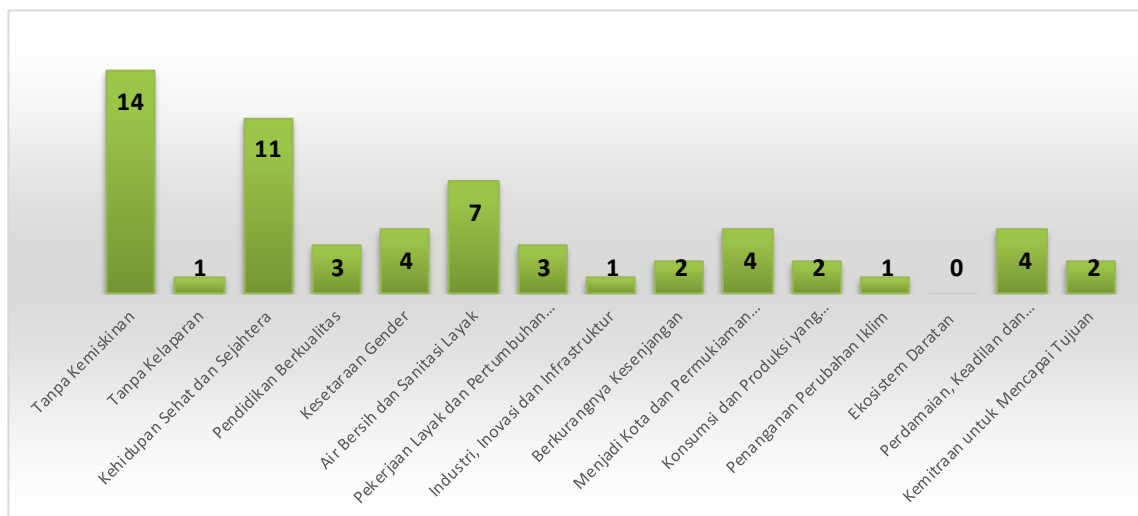
Berdasarkan hasil penilaian dan analisis mengenai capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) di Kota Bekasi sebanyak 59 indikator, dimana jumlah indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS) yang paling banyak yaitu TPB 1 sebanyak 14 indikator. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 4.5
Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional (SS) di Kota Bekasi

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator Sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	%
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	14	23,73
TPB 2	Tanpa Kelaparan	1	1,69
TPB 3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	11	18,64
TPB 4	Pendidikan Berkualitas	3	5,08
TPB 5	Kesetaraan Gender	4	6,78
TPB 6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	7	11,86
TPB 8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	3	5,08
TPB 9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	1	1,69
TPB 10	Berkurangnya Kesenjangan	2	3,39
TPB 11	Menjadi Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	4	6,78
TPB 12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	2	3,39
TPB 13	Penanganan Perubahan Iklim	1	1,69
TPB 15	Ekosistem Daratan	0	0,00
TPB 16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	4	6,78
TPB 17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	2	3,39
		59	100

Sumber: LAKIP Sektor 2017-2019, SAKIP 2017, LKPJ 2013-2018, LPPD Kota Bekasi Tahun 2018-2019, data OPD Kota Bekasi dan Hasil Analisis Tahun 2020

Gambar 4.2
Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kota Bekasi



2. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target Nasional (SB)

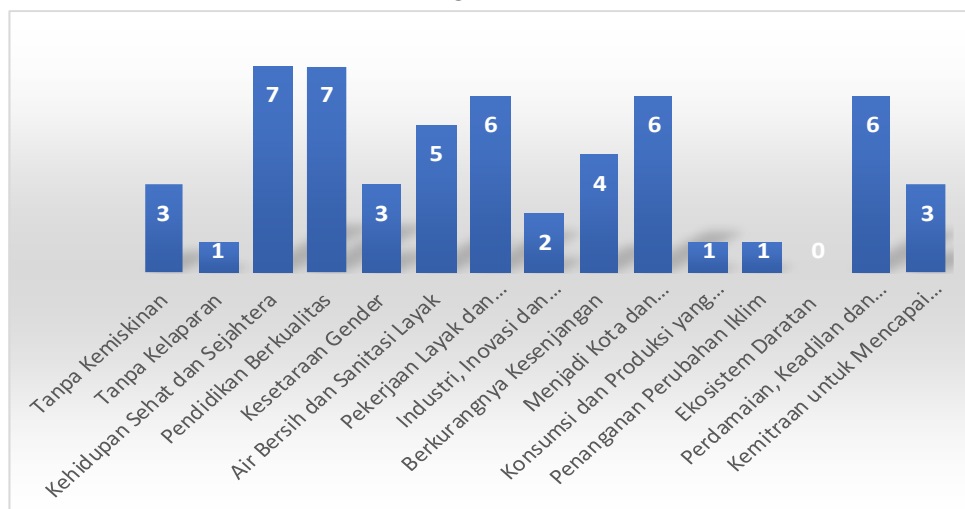
Berdasarkan hasil penilaian dan analisis mengenai capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional (SB) di Kota Bekasi sebanyak 37 indikator. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 4.6
Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan tapi Belum Mencapai Target Nasional di Kota Bekasi

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (SB)	%
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	3	5,45
TPB 2	Tanpa Kelaparan	1	1,82
TPB 3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	7	12,73
TPB 4	Pendidikan Berkualitas	7	12,73
TPB 5	Kesetaraan Gender	3	5,45
TPB 6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	5	9,09
TPB 8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	6	10,91
TPB 9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	2	3,64
TPB 10	Berkurangnya Kesenjangan	4	7,27
TPB 11	Menjadi Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	6	10,91
TPB 12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	1	1,82
TPB 13	Penanganan Perubahan Iklim	1	1,82
TPB 15	Ekosistem Daratan	0	0,00
TPB 16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	6	10,91
TPB 17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	3	5,45
		55	100

Sumber: LAKIP Sektor 2017-2019, SAKIP 2017, LKPJ 2013-2018, LPPD Kota Bekasi Tahun 2018-2019, data OPD Kota Bekasi dan Hasil Analisis Tahun 2020

Gambar 4.3
Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan tapi Belum Mencapai Target Nasional di Kota Bekasi



3. Indikator yang Tidak Memiliki Data (NA);

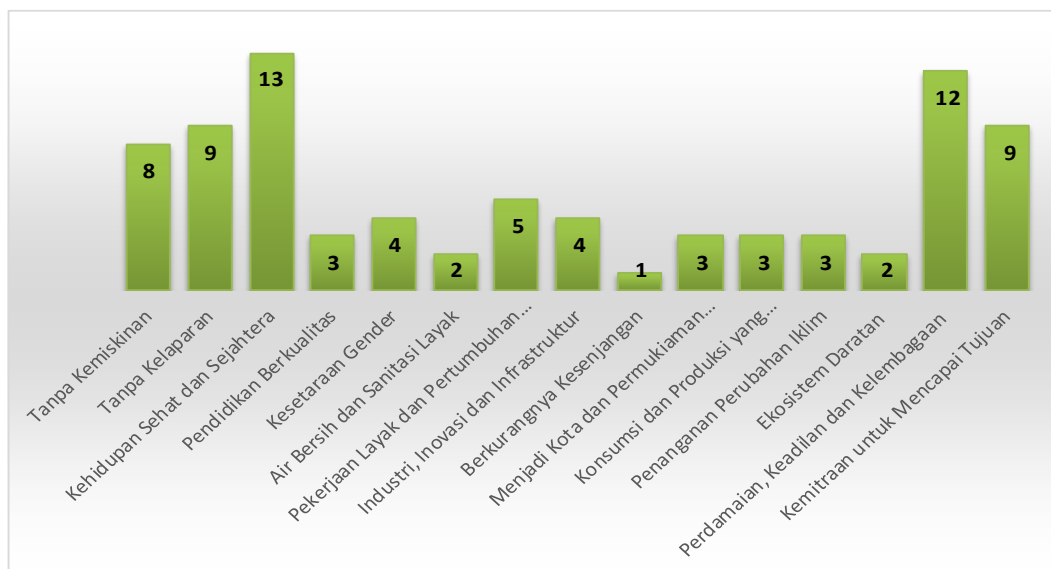
Berdasarkan hasil penilaian dan analisis mengenai capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang tidak memiliki data (NA) di Kota Bekasi sebanyak 103 indikator. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.5 dan gambar di bawah ini.

Tabel 4.7
Jumlah Indikator TPB yang Tidak Memiliki Data di Kota Bekasi

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	indikator yang tidak memiliki data (NA)	%
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	8	9,88
TPB 2	Tanpa Kelaparan	9	11,11
TPB 3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	13	16,05
TPB 4	Pendidikan Berkualitas	3	3,70
TPB 5	Kesetaraan Gender	4	4,94
TPB 6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	2	2,47
TPB 8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	5	6,17
TPB 9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	4	4,94
TPB 10	Berkurangnya Kesenjangan	1	1,23
TPB 11	Menjadi Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	3	3,70
TPB 12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	3	3,70
TPB 13	Penanganan Perubahan Iklim	3	3,70
TPB 15	Ekosistem Daratan	2	2,47
TPB 16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	12	14,81
TPB 17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	9	11,11
		81	100

Sumber: LAKIP Sektor 2017-2019, SAKIP 2017, LKPJ 2013-2018, LPPD Kota Bekasi Tahun 2018-2019, data OPD Kota Bekasi dan Hasil Analisis Tahun 2020

Gambar 4.4
Jumlah Indikator yang Tidak Memiliki Data (NA) di Kota Bekasi



Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan gambaran pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kota Bekasi terdiri dari:

1. Indikator TPB yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Kota Bekasi adalah 15 tujuan (tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, dan 17).
2. Indikator TPB yang tidak sesuai dengan kewenangan dan kondisi Kota Bekasi adalah tujuan 7 (energi bersih dan terjangkau), dan tujuan 14 (ekosistem laut).
3. Jumlah indikator yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Kota Bekasi sebanyak 195 indikator. Indikator yang tersedia datanya adalah sebanyak 114 indikator, dengan kategori sebagai berikut:
 - Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) sebanyak 59 indikator.
 - Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (SB) sebanyak 55 indikator.
 - Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB) dan indikator yang belum memiliki data (NA) sebanyak 81 indikator.

Dari indikator di atas maka di dapat maka:

1. Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) perlu di pertahankan
2. Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (SB) perlu di tingkatkan, dan
3. Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB) dan indikator yang belum memiliki data (NA) perlu pendataan

Lebih jelasnya mengenai Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Di Kota Bekasi dapat di lihat pada tabel capaian jumlah indikator TPB Kota Bekasi Terhadap Target Nasional.

Tabel 4.8
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No	Program/Kegiatan/Indikator Output			Analisis Capaian Indikator TPB	
TUJUAN 1 MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN					
	TARGET	1.2.	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional		
1	INDIKATOR	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
	TARGET	1.3.	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.		
2	INDIKATOR	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
3	INDIKATOR	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
4	INDIKATOR	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
5	INDIKATOR	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
	TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.		
6	INDIKATOR	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
7	INDIKATOR	1.4.1.(b)	Persentase umur anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
8	INDIKATOR	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
9	INDIKATOR	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
10	INDIKATOR	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
11	INDIKATOR	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
12	INDIKATOR	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
13	INDIKATOR	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
14	INDIKATOR	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
15	INDIKATOR	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akte kelahiran	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
16	INDIKATOR	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN maupun non PLN.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
	TARGET	1.5.	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana		
17	INDIKATOR	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan	Perlu Pendataan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Indikator Output			Analisis Capaian Indikator TPB	
			per 100.000 orang.	indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	
18	INDIKATOR	1.5.1 (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
19	INDIKATOR	1.5.1 (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
20	INDIKATOR	1.5.1 (c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
21	INDIKATOR	1.5.1 (d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
22	INDIKATOR	1.5.1 (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	di pertahankan
23	INDIKATOR	1.5.2	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP Global.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
24	INDIKATOR	1.5.2 (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
25	INDIKATOR	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
TUJUAN 2 MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN					
	TARGET	2.1.	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.		
1	INDIKATOR	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
2	INDIKATOR	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
3	INDIKATOR	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
4	INDIKATOR	2.1.2 (a)	Prevalensi penduduk dengan asupan kalori minimum dibawah 1400 Kkal/kapita/hari.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
	TARGET	2.2.	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.		
5	INDIKATOR	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
6	INDIKATOR	2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
7	INDIKATOR	2.2.2 *	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
8	INDIKATOR	2.2.2 (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
9	INDIKATOR	2.2.2 (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
10	INDIKATOR	2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
	TARGET	2.3.	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan,		

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Indikator Output			Analisis Capaian Indikator TPB	
			pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.		
11	INDIKATOR	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
TUJUAN 3 MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA					
	TARGET	3.1.	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.		
1	INDIKATOR	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
2	INDIKATOR	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
3	INDIKATOR	3.1.2 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
	TARGET	3.2.	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.		
4	INDIKATOR	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran anak.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
5	INDIKATOR	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
6	INDIKATOR	3.2.2 (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran anak.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
	TARGET	3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.		
7	INDIKATOR	3.3.1 (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
8	INDIKATOR	3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
9	INDIKATOR	3.3.3*	Kejadian malaria per 1000 orang.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
	TARGET	3.4.	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.		
10	INDIKATOR	3.4.1 (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
11	INDIKATOR	3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
12	INDIKATOR	3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
13	INDIKATOR	3.4.2*	Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
	TARGET	3.5.	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.		
14	INDIKATOR	3.5.1 (a)	Jumlah penyalahgunaan narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
15	INDIKATOR	3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
16	INDIKATOR	3.5.1 (c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
17	INDIKATOR	3.5.1 (d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
18	INDIKATOR	3.5.1 (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
19	INDIKATOR	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Indikator Output		Analisis Capaian Indikator TPB	
	TARGET	3.7.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi kedalam strategi dan program nasional.	
20	INDIKATOR	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS) dipertahankan
21	INDIKATOR	3.7.1 (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) Di tingkatkan
22	INDIKATOR	3.7.1 (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS) dipertahankan
23	INDIKATOR	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>)	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA) Perlu Pendataan
24	INDIKATOR	3.7.2 (a)	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA) Perlu Pendataan
	TARGET	3.8.	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan resiko keuangan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	
25	INDIKATOR	3.8.1 (a)	Unmet need pelayanan kesehatan	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS) dipertahankan
26	INDIKATOR	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA) Perlu Pendataan
27	INDIKATOR	3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS) dipertahankan
	TARGET	3.9.	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	
28	INDIKATOR	3.9.3 (a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA) Perlu Pendataan
	TARGET	3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	
29	INDIKATOR	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≤15 tahun.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA) Perlu Pendataan
	TARGET	3.b	Mendukung penelitian pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keeluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya menyediakan akses obat bagi semua.	
30	INDIKATOR	3.b.1 (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS) dipertahankan
	TARGET	3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	
31	INDIKATOR	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) ditingkatkan
TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA.				
	TARGET	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	
1	INDIKATOR	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA) Perlu Pendataan
2	INDIKATOR	4.1.1 (a)	Presentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) Di tingkatkan
3	INDIKATOR	4.1.1 (b)	Presentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) Di tingkatkan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Indikator Output			Analisis Capaian Indikator TPB	
4	INDIKATOR	4.1.1 (c)	Presentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
5	INDIKATOR	4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
6	INDIKATOR	4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
7	INDIKATOR	4.1.1 (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
	TARGET	4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.		
8	INDIKATOR	4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
	TARGET	4,3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.		
9	INDIKATOR	4.3.1 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
10	INDIKATOR	4.3.1 (b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
	TARGET	4,4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.		
11	INDIKATOR	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
	TARGET	4,5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.		
12	INDIKATOR	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
	TARGET	4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.		
13	INDIKATOR	4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN					
	TARGET	5,1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.		
1	INDIKATOR	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	di pertahankan
	TARGET	5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.		
2	INDIKATOR	5.2.1 (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
3	INDIKATOR	5.2.2 (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
	TARGET	5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.		
4	INDIKATOR	5.3.1 (a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
5	INDIKATOR	5.3.1 (b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>).	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
6	INDIKATOR	5.3.1 (c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	di pertahankan
	TARGET	5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.		
7	INDIKATOR	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen daerah dan	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Indikator Output			Analisis Capaian Indikator TPB	
			pemerintah daerah.		
8	INDIKATOR	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
	TARGET	5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.		
9	INDIKATOR	5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
10	INDIKATOR	5.6.1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
11	INDIKATOR	5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK YANG BERKELANJUTAN					
	TARGET	6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua		
1	INDIKATOR	6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
2	INDIKATOR	6.1.1 (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga perkotaan dan industri.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
3	INDIKATOR	6.1.1 (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
	TARGET	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.		
4	INDIKATOR	6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
5	INDIKATOR	6.2.1 (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
			Persentase RW yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis masyarakat)	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
6	INDIKATOR	6.2.1 (d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
			Persentase RW yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
7	INDIKATOR	6.2.1 (f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
	TARGET	6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.		
8	INDIKATOR	6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Perlu Pendataan
	TARGET	6,4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.		
9	INDIKATOR	6.4.1 (a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Indikator Output			Analisis Capaian Indikator TPB	
10	INDIKATOR	6.4.1 (b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
	TARGET	6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.		
11	INDIKATOR	6.5.1 (f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
12	INDIKATOR	6.5.1 (g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
TUJUAN 8 MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA					
	TARGET	8,1	Memperhatikan pertumbuhan ekonomi perkapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang		
1	INDIKATOR	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB perkapita	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
2	INDIKATOR	8.1.1.(a)	PDB Perkapita	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	di tingkatkan
	TARGET	8,3	Menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro kecil, dan menengah termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan		
3	INDIKATOR	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informas sektor non pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
4	INDIKATOR	8.3.1 (a)	Presentase tenaga kerja formal	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
5	INDIKATOR	8.3.1 (b)	Presentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
6	INDIKATOR	8.3.1 (c)	Presentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke layanan Keuangan	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
	TARGET	8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas dan upah yang sama untuk pekerja yang sama nilainya		
7	INDIKATOR	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (angka pengangguran terbuka)	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
	TARGET	8,8	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan menjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya		
8	INDIKATOR	8.8.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
	TARGET	8,9	Pada tahun 2030 menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal		
9	INDIKATOR	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
10	INDIKATOR	8.9.1 (a)	Jumlah wisatawan manca negara (Jumlah kunjungan wisata)	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
11	INDIKATOR	8.9.1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
12	INDIKATOR	8.9.1 ©	Jumlah devisa sektor pariwisata (PAD Sektor Pariwisata)	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
13	INDIKATOR	8.9.2 *	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
	TARGET	8,1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua		
14	INDIKATOR	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
TUJUAN 9 MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN					
	TARGET	9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan pada tahun 2030 secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto sejalan dengan kondisi nasional dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang		
1	INDIKATOR	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Indikator Output			Analisis Capaian Indikator TPB	
2	INDIKATOR	9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (Laju Pertumbuhan Ekonomi industri pengolahan)	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
3	INDIKATOR	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
	TARGET	9,3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang terhadap jasa keuangan termasuk kredit terjangkau dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar		
4	INDIKATOR	9.3.1 (a)	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
5	INDIKATOR	9.3.2 *	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
	TARGET	9,4	Pada tahun 2030 meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan yang dilaksanakan		
6	INDIKATOR	9.4.1*	Rasio emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
7	INDIKATOR	9.4.1 (a)	Persentase perubahan emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
TUJUAN 10 BERKURANNGNYA KESENJANGAN					
	TARGET	10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional		
1	INDIKATOR	10.1.1*	Koefisien Gini.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
2	INDIKATOR	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
			Tingkat kemiskinan	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
	TARGET	10,3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.		
3	INDIKATOR	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
4	INDIKATOR	10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
			presentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
	TARGET	10,4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.		
5	INDIKATOR	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
TUJUAN 11 MENJADI KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN					
	TARGET	11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.		
1	INDIKATOR	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
2	INDIKATOR	11.1.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
	TARGET	11.2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi renta, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.		

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Indikator Output			Analisis Capaian Indikator TPB	
3	INDIKATOR	11.2.1(a)	persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
			Presentase pelayanan angkutan umum yang baik, aman dan nyaman	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	di pertahankan
	TARGET	11.4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia		
4	INDIKATOR	11.4.1	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor)	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
	TARGET	11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan perkapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota		
5	INDIKATOR	11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
6	INDIKATOR	11.6.1(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
	TARGET	11.7	Pada tahun 2020, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas		
7	INDIKATOR	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
8	INDIKATOR	11.7.2(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan pada polisi	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
	TARGET	11.a	Mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan antara urban, pinggiran kota dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah		
9	INDIKATOR	11.a.1	Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
	TARGET	11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakandan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan peanganan holistik resiko bencana di semua lini, sesuai dengggan the sendai framework for disaster risk reduction 2015-2030		
10	INDIKATOR	11.b.1	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan resiko bencana	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
11	INDIKATOR	11.b.2	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat daerah	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
			Cakupan dokumen penanggulangan bencana	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB					
	TARGET	12.4.	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.		
1	INDIKATOR	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan	Perlu Pendataan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Indikator Output		Analisis Capaian Indikator TPB		
			diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	
			Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah pada dan B3	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
	TARGET	12.5.	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.		
2	INDIKATOR	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	di pertahankan
			Prosentase Pelayanan / Pengangkutan Sampah	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	dipertahankan
	TARGET	12.6.	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.		
3		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
	TARGET	12.8.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.		
4	INDIKATOR	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
TUJUAN 13 PENANGGULANGAN PERUBAHAN IKLIM					
	TARGET	13.1.	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.		
1	INDIKATOR	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
			Penanganan bencana alam	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
2	INDIKATOR	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
			Jumlah Korban Bencana Alam per 100.000 orang	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	ditingkatkan
	TARGET	13.2.	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan daerah.		
3	INDIKATOR	13.2.1 (a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
TUJUAN 15 Ekosistem Daratan					
	TARGET	15,3	Pada tahun 2020, memulihkan lahan dan tanah kritis termasuk lahan yang terkena kekeringan dan banjir dan berusaha mencapai kota yang bebas dari lahan terdegradasi		
1	INDIKATOR	15.3 (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
	TARGET	15,9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.		
2	INDIKATOR	15.9.1 (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
TUJUAN 16 PERDAMAIAN Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh					
	TARGET	16.1.	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.		
1	INDIKATOR	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
2	INDIKATOR	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.		
3	INDIKATOR	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
	TARGET	16.2.	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.		
4	INDIKATOR	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Indikator Output			Analisis Capaian Indikator TPB	
			mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.		
5	INDIKATOR	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
	TARGET	16.3.	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.		
6	INDIKATOR	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	dipertahankan
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
			Angka Kriminalitas yang tertangani/jumlah penduduk	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	ditingkatkan
7	INDIKATOR	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
	TARGET	16.5.	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyyuapan dalam segala bentuknya.		
8	INDIKATOR	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	ditingkatkan
	TARGET	16.6.	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.		
9	INDIKATOR	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
10	INDIKATOR	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
11	INDIKATOR	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
12	INDIKATOR	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
13	INDIKATOR	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
	TARGET	16.7.	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.		
14	INDIKATOR	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	Di tingkatkan
15	INDIKATOR	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
16	INDIKATOR	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
17	INDIKATOR	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
18	INDIKATOR	16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
	TARGET	16.9.	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.		
19	INDIKATOR	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Indikator Output			Analisis Capaian Indikator TPB	
20	INDIKATOR	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
21	INDIKATOR	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	ditingkatkan
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN					
	TARGET	17.1.	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.		
1	INDIKATOR	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
	TARGET	17.1.	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.		
2	INDIKATOR	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	dipertahankan
	TARGET	17.6.	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Persekitaran Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.		
3	INDIKATOR	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	ditingkatkan
	TARGET	17.6.	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Persekitaran Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.		
4	INDIKATOR	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	ditingkatkan
	TARGET	17.8.	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.		
5	INDIKATOR	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
	TARGET	17.17.	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.		
6	INDIKATOR	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
	TARGET	17.17.	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.		
7	INDIKATOR	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
	TARGET	17.18.	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.		
8	INDIKATOR	17.18.1 (a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
9	INDIKATOR	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
	TARGET	17.19.	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.		
10	INDIKATOR	17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan	Perlu Pendataan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Indikator Output			Analisis Capaian Indikator TPB	
	TARGET	17.19.		indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	
	TARGET	17.19.	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.		
11	INDIKATOR	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan
	TARGET	17.19.	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.		
12	INDIKATOR	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	ditingkatkan
13	INDIKATOR	17.19.2 (d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, dan indikator yang tidak memiliki data (BB & NA)	Perlu Pendataan

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020

Tabel 4.9
Capaian Jumlah Indikator TPB Kota Bekasi Terhadap Target Nasional

No	Tujuan Pembangunan Yang Berkelanjutan	Jumlah Target	Jumlah Indikator	Capaian Indikator		
				SS	SB	BB & NA
1	Tanpa Kemiskinan	4	25	14	3	8
2	Tanpa Kelaparan	3	11	1	1	9
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	11	31	11	7	13
4	Pendidikan berkualitas	6	13	3	7	3
5	Kesetaraan Gender	5	11	4	3	4
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	5	14	7	5	2
7	Energi Bersih dan Terjangkau					
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	5	14	3	6	5
9	Industri, inovasi dan infrastruktur	3	7	1	2	4
10	Berkurangnya kesenjangan	3	7	2	4	1
11	Kota dan permukiman yang berkelanjutan	7	13	4	6	3
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	3	6	2	1	3
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	5	1	1	3
14	Ekosistem Lautan					
15	Ekosistem Daratan	2	2	0	0	2
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	7	22	4	6	12
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	10	14	2	3	9
	JUMLAH	76	195	59	55	81

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2020

4.2 ANALISIS CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

4.2.1 Alternatif Proyeksi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Perumusan Analisis merupakan alternatif proyeksi terhadap kondisi lingkungan hidup dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis secara *Business As Usual (BAU)* terhadap tren perubahan kondisi lingkungan dan pencapaian target TPB pada tahun 2030 berdasarkan kinerja Kota Bekasi yang telah dilakukan selama ini. Kondisi lingkungan hidup terutama terkait dengan status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta jasa ekosistem Kota Bekasi.

Proyeksi secara umum dilakukan dengan pendekatan linier berdasarkan tren yang terjadi saat ini serta GAP terhadap indikator dalam TPB nasional dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 yang merupakan target sampai dengan tahun 2030.

Proyeksi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan sampai dengan tahun 2023 dilakukan pada indikator TPB pada masing-masing pilar yang ada dalam indikator RPJMD tetapi belum mencapai target nasional dan indikator yang belum ada dalam target RPJMD tetapi relevan di Kota Bekasi yang diusulkan untuk dapat dimasukkan.

Proyeksi dilakukan dengan membandingkan rate tahunan secara *Business As Usual (BAU)* dan rate tahunan terhadap GAP target nasional. Proyeksi BAU dilakukan dengan melihat tren perkembangan dari baseline dalam RPJMD pada tahun 2013 terhadap capaian sampai dengan tahun 2017. Sedangkan rate tahunan terhadap gap target nasional dalam TPB membandingkan GAP antara capaian tahun 2017 dengan target nasional sampai dengan tahun 2030. Berikut tabel proyeksi dan rekomendasi target untuk dimasukkan dalam RPJMD Kota Bekasi sampai tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10
Analisis Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Belum Mencapai Target Nasional

NO TUJUAN, TARGET, DAN INDIKATOR	TUJUAN, TARGET, DAN INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TPB							TARGET TPB		RATE		TARGET 2023	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TARGET	2030	BAU	TPB		
TUJUAN	1	MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN													
TARGET	1.2.	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional													
INDIKATOR	1.2.1*	Persen						5,06	4,68	4,11	turun	8	0,27	0,7	5,2
TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.													
	1.4.1.(d)		96,8		82,5	92,68	0	98,94			Naik	100	0,2	0,06	99,76
	1.4.1.(e)		95	96,14	95,64	97,07	0	90,94			Naik	100	0,19	2,07	91,71
	1.4.1.(f)		10					29,07			Turun	0			
	1.4.1.(j)	Persen				90,17		67,9	68,3	Naik	91,63	0,5	5,33	70,31	
TUJUAN	2	MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKENJUTAN													
TARGET	2.2.	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.													
INDIKATOR	2.2.2 (c)	Persen	75,8	84,7	85	89,2				42,5	Naik	92,5	0,4	12,1	44,09
TUJUAN	3	MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA													
TARGET	3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.													
INDIKATOR	3.1.2*	Persen	83,8	84,9	90,1	88,3	88				Naik	95	0,84	0,28	93,04

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

NO TUJUAN, TARGET, DAN INDIKATOR	TUJUAN, TARGET, DAN INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TPB							TARGET TPB		RATE		TARGET 2023		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TARGET	2030	BAU	TPB			
			kesehatan terlatih.													
TARGET	3.2.	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.														
INDIKATOR	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran anak.	orang	1	1	1,64	1,06	1,12				Turun	0	0,02	-0,09	0,6
INDIKATOR	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	orang		0,87	1,3	0,76	1,08			0,989	turun	0	0,05	-0,08	0,58
INDIKATOR	3.2.2 (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran anak.	orang	1,04	1,01	1,54	1,02	1,1			1,17	turun	0	0,01	-0,08	0,59
TARGET	3.3.	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.														
INDIKATOR	3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Kasus							0,61	0,54	turun	0,245	-0,04	0,06	0,25
INDIKATOR	3.3.3*	Kejadian malaria per 1000 orang.	orang	0,001	0,003	0,002	0,005	0,005				Turun	0	0,0008	-0,0004	0,0027
TARGET	3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.														
INDIKATOR	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.								70		naik				
TUJUAN	4	MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA.														
TARGET	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.														
INDIKATOR	4.1.1 (a)	Presentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persen					89,62	81,2	80,8		Naik	84,2	0,3	0,55	82
INDIKATOR	4.1.1 (b)	Presentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persen					76,75	73,4	74,5		Naik	81	0,32	1,3	75,79
INDIKATOR	4.1.1 (c)	Presentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Persen				74,15		64,9	75,7		Naik	84,6	0,2	2,02	76,52
INDIKATOR	4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat.	Persen				120,76				110,54	Naik	114,09	0,18	0,7	111,27
INDIKATOR	4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat.	Persen				98,33				94,81	Naik	106,94	0,19	2,84	95,58
TARGET	4.3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.														
INDIKATOR	4.3.1 (b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Persen			35,84					35,84	Naik	36,73	0,15	0	36,73
TUJUAN	5	MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN														
TARGET	5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.														
INDIKATOR	5.2.1 (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak						31,68	21,75	27,37		turun	20,48	-1,44	-1,72	20,48

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

NO TUJUAN, TARGET, DAN INDIKATOR	TUJUAN, TARGET, DAN INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TPB							TARGET TPB		RATE		TARGET 2023		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TARGET	2030	BAU	TPB			
TARGET	5.3	perempuan.	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.													
INDIKATOR	5.3.1 (c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Persen	68,77	74,7	107,34	90,17	0				Naik	91,63	7,13	0	97,3
TARGET	5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta -dokumen hasil reuiu dari kenferensi-kenferensi tersebut.														
INDIKATOR	5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Persen						16,37	8,7	turun	9,9	-3,84	-1,62	15,17	
TUJUAN	6	MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK YANG BERKELANJUTAN														
TARGET	6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua														
INDIKATOR	6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persen	96,8	0	82,5	92,68	0			98,94	Naik	100	0,27	0	100,01
INDIKATOR	6.1.1 (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persen					50		39	Naik	100	0,26	14,99	40,04	
TARGET	6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.														
INDIKATOR	6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persen	95	96,14	95,64	97,07				90,94	Naik	100	0,23	2,03	91,88
INDIKATOR	6.2.1 (f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Persen	0	22,93	18,79	17,6	47				Naik	75	6,02	2,15	59,92
TARGET	6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.														
INDIKATOR	6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Persen								99,04	Naik				
TUJUAN	8	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA														
TARGET	8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi perkapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang														
INDIKATOR	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB perkapita	Persen	3,08	2,73	2,75	3,33	3,05				naik	pertumbuhan PDB	0,11	(-)	3,69

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

NO TUJUAN, TARGET, DAN INDIKATOR	TUJUAN, TARGET, DAN INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TPB							TARGET TPB		RATE		TARGET 2023		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TARGET	2030	BAU	TPB			
INDIKATOR	8.1.1. (a)	PDB Perkapita	Rp	19.400,00	19.900.000	20.400.000	21.100.000	21.800,00			32.756.201,00	naik	50.000.000,00	2471240	4310950	42.641.162
TARGET	8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas dan upah yang sama untuk pekerja yang sama nilainya														
INDIKATOR	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (angka pengangguran terbuka)	Persen					9,32	9,1	8,2	turun	5,66	0,29	-0,93	9,37	
TARGET	8,9	Pada tahun 2030 menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal														
INDIKATOR	8.9.1 (a)	Jumlah wisatawan manca negara (Jumlah kunjungan wisata)	Orang	141.229	150.976	160.489	609.187	852.353				naik		177.781	(-)	1.919.039
INDIKATOR	8.9.1 ©	Jumlah devisa sektor pariwisata (PAD Sektor Pariwisata)	RP				263.899.672	308.437.146			415.419.921	naik		22.268.737	(-)	442.049.568
TUJUAN	9	MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN														
TARGET	9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan pada tahun 2030 secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto sejalan dengan kondisi nasional dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang														
INDIKATOR	9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (Laju Pertumbuhan Ekonomi industri pengolahan)	%	2,2	2,02	1,96	2,1	1,78			3,71	naik	4,3	0,38	0,63	5
INDIKATOR	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	orang	42.950	41.751	41.694	69.959	-				Naik	-	9.003	0	123977
TUJUAN	10	BERKURANNY KESENJANGAN														
TARGET	10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional														
INDIKATOR	10.1.1*	Koefisien Gini.	orang/kasus					0,39	0,351	0,35	turun	0,36	-0,01	-0,01	0,4	
TUJUAN	11	MENJADI KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN														
TARGET	11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.														
INDIKATOR	11.1.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%			99	99,16	98,43			99,75	naik		0,23	(-)	100
TARGET	11.2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi renta, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.														
INDIKATOR	11.2.1(a)	Persentase pengguna moda transportasi	Persen					28				Naik		4,67	(-)	56

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

NO TUJUAN, TARGET, DAN INDIKATOR	TUJUAN, TARGET, DAN INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TPB							TARGET TPB		RATE		TARGET 2023	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TARGET	2030	BAU	TPB		
TARGET	11.6	umum di perkotaan													
TARGET	11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan perkapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota													
INDIKATOR	11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota	%				46		24,94		naik	100	0,18	18,58	25,66
INDIKATOR	11.6.1(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	%					63,79		64,44	naik	80	0,34	3,55	65,79
TARGET	11.7	Pada tahun 2020, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas													
INDIKATOR	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)						464	357	464	turun				
INDIKATOR	11.7.2(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan pada polisi	orang/kasus					233	247	325	turun				
12		KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB													
TARGET	12.4.	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.													
		Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah padat dan B3	Persen	-	-	54	100	75			Naik	45	7	0	100
TARGET	12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.													
	12.5.1.(a)	Prosentase Pelayanan / Pengangkutan Sampah	Persen	-	58,22	60,29	37,26	63,79	67,15	93,4	Naik	100	1,39	3,98	72,15
TUJUAN	13	PENANGGULANGAN PERUBAHAN IKLIM													
TARGET	13.1.	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.													
INDIKATOR	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000	jiwa	-	-	-	-	110		19.656	Turun	0			

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

NO TUJUAN, TARGET, DAN INDIKATOR	TUJUAN, TARGET, DAN INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TPB							TARGET TPB		RATE		TARGET 2023		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TARGET	2030	BAU	TPB			
	orang.															
TUJUAN	16	PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH														
TARGET	16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.														
INDIKATOR	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kasus	-	-	-	-	31				Turun	0	6,2	-2,38	17
INDIKATOR	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Jiwa	-	-	-	-	0,27				turun	0	0,05	-0,02	0,15
TARGET	16.2.	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.														
INDIKATOR	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.						37	24	37	turun	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).				
TARGET	16.3.	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.														
INDIKATOR	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.						233	247	325	naik					
		Angka Kriminalitas yang tertangani/jumlah penduduk						233/2.409.083	247/2.932.	325/3.013.851	naik					
TARGET	16.7.	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.														
INDIKATOR	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).						16%	16%		naik	16,6	0,5	3,65	16	
TARGET	16.9.	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.														
INDIKATOR	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.						56,63	65,8	57,77	naik	85	0,34	6,47	59,13	
TUJUAN	17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN															
TARGET	17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.														
INDIKATOR	17.1.1*	Total pendapatan	Persen	-	-	-	-	11,36			Naik	12	2,272	0,05	11,66	

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

NO TUJUAN, TARGET, DAN INDIKATOR	TUJUAN, TARGET, DAN INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TPB							TARGET TPB		RATE		TARGET 2023	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TARGET	2030	BAU	TPB		
TARGET	17.6.	pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.													
		Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.													
INDIKATOR	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.						98	99	99	naik	71	0,34	-7,34	100,35
TARGET	17.6.	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.													
INDIKATOR	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.						99	99	99	naik	100	0,33	-0,08	100,33
TARGET	17.19.	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.													
INDIKATOR	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website						81000	79000	80000	naik				

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2020

Dengan didasarkan pada kondisi capaian indikator TPB dan juga kecenderungan perkembangan capaian TPB selama kurun waktu 5 tahun selanjutnya di lakukan perumusan alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kota Bekasi Terdapat 55 Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB). Berdasarkan data tersebut maka hasil analisis Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan di rumuskan 2 alternatif yaitu:

- **Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan** diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional. Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan di Kota Bekasi sebanyak 13 indikator
- **Alternatif proyeksi dengan upaya tambahan** disusun untuk percepatan pencapaian target tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Alternative proyeksi dengan upaya tambahan di Kota Bekasi sebanyak 42 indikator.

Untuk lebih jelasnya mengenai alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.11
Alternatif Proyeksi Kondisi Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Bekasi

No Tujuan, Target, Dan Indikator		Tujuan, Target, Dan Indikator	Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TUJUAN	1	MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN	
TARGET	1.2.	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	
INDIKATOR	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	dengan upaya tambahan
TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	dengan upaya tambahan
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	dengan upaya tambahan
	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	dengan upaya tambahan
	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat	dengan upaya tambahan
TUJUAN	2	MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKENJUTAN	
TARGET	2.2.	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	
INDIKATOR	2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	dengan upaya tambahan

No Tujuan, Target, Dan Indikator		Tujuan, Target, Dan Indikator	Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TUJUAN	3	MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA	
TARGET	3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	
INDIKATOR	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	dengan upaya tambahan
TARGET	3.2.	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	
INDIKATOR	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran anak.	dengan upaya tambahan
INDIKATOR	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	dengan upaya tambahan
INDIKATOR	3.2.2 (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran anak.	dengan upaya tambahan
TARGET	3.3.	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	
INDIKATOR	3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	tanpa upaya tambahan
INDIKATOR	3.3.3*	Kejadian malaria per 1000 orang.	tanpa upaya tambahan
TARGET	3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	
INDIKATOR	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	dengan upaya tambahan
TUJUAN	4	MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA.	
TARGET	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	
INDIKATOR	4.1.1 (a)	Presentase SD/MI berakreditasi minimal B.	dengan upaya tambahan
INDIKATOR	4.1.1 (b)	Presentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	dengan upaya tambahan
INDIKATOR	4.1.1 (c)	Presentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	dengan upaya tambahan
INDIKATOR	4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat.	dengan upaya tambahan
INDIKATOR	4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat.	dengan upaya tambahan
TARGET	4.3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	
INDIKATOR	4.3.1 (b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	tanpa upaya tambahan
TUJUAN	5	MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN	
TARGET	5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	
INDIKATOR	5.2.1 (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	tanpa upaya tambahan
TARGET	5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	
INDIKATOR	5.3.1 (c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	tanpa upaya

No Tujuan, Target, Dan Indikator		Tujuan, Target, Dan Indikator	Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan
			tambahan
TARGET	5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta -dokumen hasil reviu dari kenferensi-konferensi tersebut.	
INDIKATOR	5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	dengan upaya tambahan
TUJUAN	6	MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK YANG BERKELNAJUTAN	
TARGET	6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	
INDIKATOR	6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	tanpa upaya tambahan
INDIKATOR	6.1.1 (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	dengan upaya tambahan
TARGET	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	
INDIKATOR	6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	dengan upaya tambahan
INDIKATOR	6.2.1 (f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	dengan upaya tambahan
TARGET	6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	
INDIKATOR	6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	dengan upaya tambahan
TUJUAN	8	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELNUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA	
TARGET	8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi perkapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	
INDIKATOR	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB perkapita	dengan upaya tambahan
INDIKATOR	8.1.1.(a)	PDB Perkapita	dengan upaya tambahan
TARGET	8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas dan upah yang sama untuk pekerja yang sama nilainya	
INDIKATOR	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (angka pengangguran terbuka)	dengan upaya tambahan
TARGET	8,9	Pada tahun 2030 menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	
INDIKATOR	8.9.1 (a)	Jumlah wisatawan manca negara (Jumlah kunjungan wisata)	dengan upaya tambahan
INDIKATOR	8.9.1 ©	Jumlah devisa sektor pariwisata (PAD Sektor Pariwisata)	dengan upaya tambahan
TUJUAN	9	MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELNAJUTAN	
TARGET	9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan pada tahun 2030 secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto sejalan dengan kondisi nasional dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di	

No Tujuan, Target, Dan Indikator		Tujuan, Target, Dan Indikator	Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan
		negara kurang berkembang	
INDIKATOR	9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (Laju Pertumbuhan Ekonomi industri pengolahan)	tanpa upaya tambahan
INDIKATOR	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	dengan upaya tambahan
TUJUAN	10	BERKURANNYANYA KESENJANGAN	
TARGET	10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	
INDIKATOR	10.1.1*	Koefisien Gini.	dengan upaya tambahan
TUJUAN	11	MENJADI KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELAJUTAN	
TARGET	11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	
INDIKATOR	11.1.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	tanpa upaya tambahan
TARGET	11.2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi renta, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	
INDIKATOR	11.2.1(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	dengan upaya tambahan
TARGET	11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan perkapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	
INDIKATOR	11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota	dengan upaya tambahan
INDIKATOR	11.6.1(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	dengan upaya tambahan
TARGET	11.7	Pada tahun 2020, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas	
INDIKATOR	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)	dengan upaya tambahan
INDIKATOR	11.7.2(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan pada polisi	dengan upaya tambahan
12		KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB	
TARGET	12.4.	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	
		Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah padat dan B3	tanpa upaya tambahan
TARGET	12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	
	12.5.1.(a)	Prosentase Pelayanan / Pengangkutan Sampah	dengan upaya tambahan
TUJUAN	13	PENANGGULANGAN PERUBAHAN IKLIM	
TARGET	13.1.	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	
INDIKATOR	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	dengan upaya tambahan
TUJUAN	16	PERDAMAIAN Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	

No Tujuan, Target, Dan Indikator		Tujuan, Target, Dan Indikator	Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TARGET	16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	
INDIKATOR	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	dengan upaya tambahan
INDIKATOR	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	tanpa upaya tambahan
TARGET	16.2.	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak.	
INDIKATOR	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	dengan upaya tambahan
TARGET	16.3.	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	
INDIKATOR	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	dengan upaya tambahan
		Angka Kriminalitas yang tertangani/jumlah penduduk	dengan upaya tambahan
TARGET	16.7.	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	
INDIKATOR	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	tanpa upaya tambahan
TARGET	16.9.	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	
INDIKATOR	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	dengan upaya tambahan
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN			
TARGET	17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	
INDIKATOR	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	dengan upaya tambahan
TARGET	17.6.	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	
INDIKATOR	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	tanpa upaya tambahan
TARGET	17.6.	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	
INDIKATOR	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.	tanpa upaya tambahan
TARGET	17.19.	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	
INDIKATOR	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	dengan upaya tambahan

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2020

4.2.2 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pada bab sebelumnya telah di bahas mengenai kondisi daya dukung lingkungan yang didalamnya menghitung proyeksi kondisi lingkungan hidup sampai dengan akhir tahun rencana. Proyeksi kondisi lingkungan hidup tersebut didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi yang dibuat baik dalam rencana struktur ruang maupun rencana pola ruang. Proyeksi lingkungan hidup pada penyusunan KLHS sebagai pendukung RPJMD ini menggunakan pendekatan spasial yang sama dengan KLHS Revisi RTRW. Berikut adalah proyeksi kondisi lingkungan hidup Kota Bekasi.

1. Daya Dukung

Hasil perhitungan kebutuhan air layak bagi penduduk Kota Bekasi menyebutkan bahwa potensi sumber air permukaan di Kota Bekasi cukup besar dan apabila dikelola dengan baik maka mampu memenuhi kebutuhan air bagi penduduk Kota Bekasi. beberapa pertimbangan dalam analisis daya dukung air adalah:

- Peningkatan curah hujan sebesar 5 mm/tahun pada tahun 2030 (sesuai Analisis nasional dalam dokumen ICCSR, Bappenas).
- Perubahan tutupan lahan sesuai dengan rencana pola ruang RTRW Kota Bekasi tahun, yang mana terjadi peningkatan luas kawasan terbangun yang memberikan konsekuensi pada peningkatan kebutuhan air untuk mendukung kegiatan yang berkembang di Kota Bekasi.
- Pertambahan penduduk dengan mengikuti tren pertumbuhan saat ini yang akan meningkatkan kebutuhan air untuk kebutuhan rumah tangga.
- Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan RTRW Kota Bekasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai proyeksi jumlah penduduk Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.12
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Bekasi

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	2026	3.500.141
2	2030	4.126.798

Sumber: RTRW Kota Bekasi tahun

Proyeksi kebutuhan air Kota Bekasi mengalami kenaikan pada tahun 2030 sebesar 11.064,2 lit/det, untuk lebih jelasnya mengenai kebutuhan air di Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.13
Proyeksi Kebutuhan Air di Kota Bekasi Tahun 2017, 2026 dan 2030

Kebutuhan Air	2017	Sat / Ket	2026	Sat / Ket	2030	Sat / Ket
Kebutuhan air Domestik	3.448,9	lt/det	5.079,21	lt/det	6.808,7	lt/det
Kebutuhan air Non Domestik	1.034,7	lt/det	1.523,76	lt/det	2.042,6	lt/det
Kebocoran	1.120,9	lt/det	1.650,74	lt/det	2.212,8	lt/det
Jumlah	5.604,4	lt/det	8.253,7	lt/det	11.064,2	lt/det

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

Potensi air tanah yang bisa di dimanfaatkan di Kota Bekasi mengalami penurunan tahun 2026 sebesar 3.786,86 lit/det dan pada tahun 2030 sebesar 2.954,97 lit/det, untuk lebih jelasnya mengenai potensi ketersediaan air di Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.14
Potensi Ketersediaan Air di Kota Bekasi Tahun 2017, 2026 dan 2030

Ketersediaan Air	2017	Sat / Ket	2026	Sat / Ket	2030	Sat / Ket
Air Permukaan	16.504,16	lt/det	18.952,79	lt/det	18.952,79	lt/det
Air Tanah	18.143,13	lt/det	15.574,89	lt/det	15.574,89	lt/det
Air Permukaan yang bisa dimanfaatkan (2,8 %)	462,12	lt/det	530,68	lt/det	530,68	lt/det
Kemampuan PDAM 26 %	1.457,1	lt/det	2.146,0	lt/det	2.876,7	lt/det
Pengambilan Air tanah	4.147,2	lt/det	6.107,7	lt/det	8.187,5	lt/det
Potensi Air tanah yang bisa dimanfaatkan (40 %)	5.598,36	lt/det	3.786,86	lt/det	2.954,97	lt/det

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan asumsi ketersediaan air permukaan yang meningkat dan terjadi peningkatan kebutuhan karena jumlah penduduk, penambahan lahan terbangun, maka kondisi daya dukung air permukaan di Kota Bekasi di perkirakan mengalami defisit tahun 2026 sebesar 0,52 dan pada tahun 2030 yaitu sebesar 0,32.

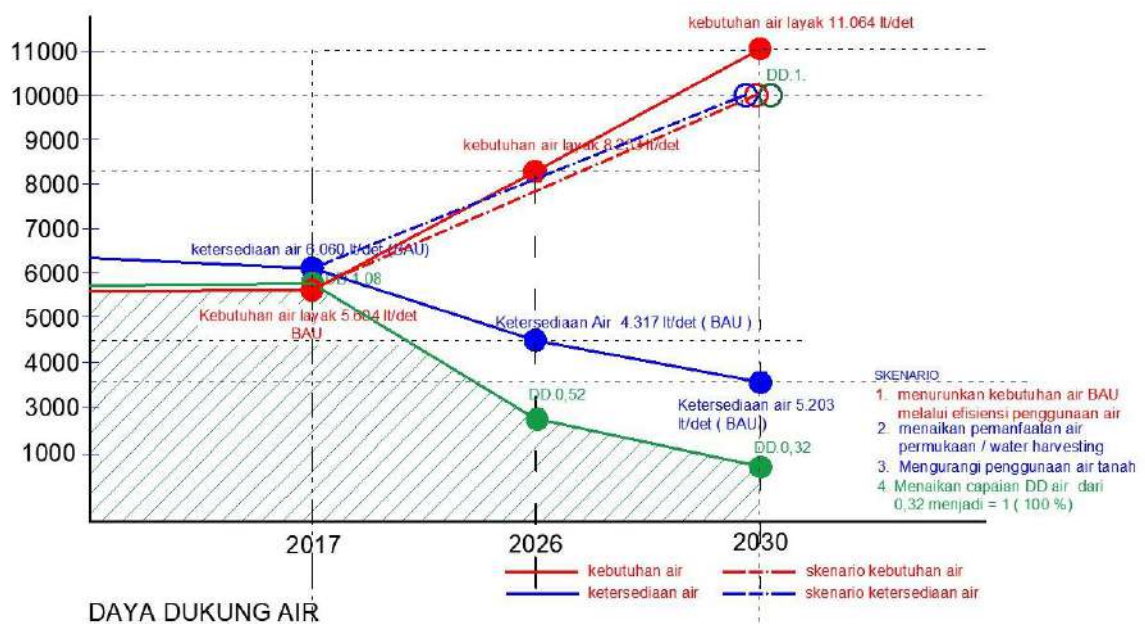
Lebih jelasnya mengenai daya dukung air Kota Bekasi dapat di lihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.15
Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Bekasi Tahun 2017, 2026 dan 2030

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2026		Tahun 2030	
	Jumlah	Sat / Ket	Jumlah	Sat / Ket	Jumlah	Sat / Ket
Ketersediaan Air Permukaan dan Mata Air	462,12	lt/det	530,68	lt/det	530,68	lt/det
Kebutuhan air per Kegiatan	5.604,37	lt/det	8.253,71	lt/det	11.064,15	lt/det
Surplus/Defisit pemenuhan air layak	-		-		-	
	5.142,25	lt/det	7.723,03	defisit	10.533,47	lt/det
Daya Dukung air Permukaan	0,08	defisit	0,06	defisit	0,05	defisit
Potensi air Tanah	5.598,36	lt/det	3.786,86	lt/det	2.954,97	lt/det
Potensi Air tanah dan air Permukaan	6.060,47	lt/det	4.317,54	lt/det	3.485,65	lt/det
DD Potensi air tanah & Air Permukaan	1,08	Surplus	0,52	defisit	0,32	Defisit

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

Gambar 4.5
Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air
di Kota Bekasi Tahun 2017, 2026 dan 2030



Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

Berdasarkan perhitungan, nilai daya dukung air di Kota Bekasi pada tahun 2017 DD Ketersediaan Air masih terpenuhi (surplus) nilai DD yaitu 1,08, dan pada tahun 2030 nilai DD menurun lagi menjadi sebesar 0,32. Perhitungan daya dukung ketersediaan air di dasarkan pada :

- a. Ketersediaan air di hitung dari limpasan air permukaan sesuai tutupan lahan, curah hujan dan potensi air tanah
- b. Kebutuhan air berdasarkan kebutuhan air untuk orang, kegiatan industri dan pertanian;
- c. Pada tahun 2017 Potensi ketersediaan air permukaan dan air tanah di perkirakan sebesar 6.060,47 l/det, sedangkan kebutuhan air bagi penduduk dan berbagai kegiatan perkotaan diperkirakan mencapai 5.604,37 l/det sehingga ketersediaan air pada tahun 2017 masih surplus/masih dapat memenuhi kebutuhan air, Namun pada tahun 2030 semakin menurun menjadi 3.485,65 lt/det dan kebutuhan air semakin meningkat menjadi 11.064,15 lt/det dengan demikian kondisi ketersediaan air sudah tidak memenuhi kebutuhan/deficit.

Untuk mempertahankan daya dukung air agar tetap ideal/ tidak terus menurun beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan penangkapan air melalui revitalisasi dan pembangunan embung/polder, Pemanenan air hujan (rain water harvesting), Sumur resapan dan biopori
- b. Memenuhi kebutuhan air melalui kerjasama dengan daerah lain yang memiliki ketersediaan air
- c. Peningkatan kualitas air sungai agar layak dimanfaatkan sebagai sumber air baku dengan mengurangi beban cemar pada air dari kegiatan industri dan rumah tangga;

- d. Penerapan sistem produksi bersih pada kegiatan industri agar dapat menghemat penggunaan air, daur ulang pemakaian air, peningkatan kualitas pengolahan limbah cair;
- e. Peningkatan pendidikan lingkungan untuk masyarakat seperti cinta lingkungan, hemat energi dan air, dan pemanfaatan materi dan energi terbarukan
- f. Mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai sempadan sungai dan situ;
- g. Penerapan insentif bagi kegiatan industri yang dapat menekan atau menghemat penggunaan air;

2. Daya Dukung Pangan

Analisis daya dukung pangan dilakukan berdasarkan pada produksi hasil pertanian pangan di Kota Bekasi. Berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan pangan di Kota Bekasi pada saat ini, diketahui bahwa ketersediaan pangan sudah tidak mencukupi kebutuhan pangan penduduk di Kota Bekasi pada saat ini. Hal ini terlihat dari produksi beras di Kota Bekasi pada tahun 2018 diperkirakan sebesar 19.097,24 ton/ha/tahun, sedangkan kebutuhan pangan (konsumsi beras) mencapai 358.783,21 ton/ha/tahun, akibatnya defisit beras mencapai 339,685,97 ton/ha/tahun, sehingga nilai daya dukung pangan pada tahun 2018 < 1 yaitu sebesar 0,053. Analisis daya dukung pangan Kota Bekasi tahun 2023 juga dilakukan berdasarkan hasil perhitungan perkiraan ketersediaan pangan.

Hal ini terlihat dari produksi beras pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 1.701,54 ton/ha/tahun, sedangkan kebutuhan pangan (konsumsi beras) mencapai 437.027,62 ton/ha/tahun, akibatnya defisit beras meningkat menjadi 435.960,08 ton/ha/tahun, sehingga nilai daya dukung pangan pada tahun 2023 menurun menjadi 0,0024.

Analisis daya dukung pangan sampai tahun 2030 semakin menurun menjadi 0,0021, hal ini karena semakin berkurangnya lahan pertanian dan meningkatnya kebutuhan penduduk terhadap pangan. Lebih jelasnya mengenai kondisi daya dukung pangan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.16
Analisis Daya Dukung Pangan di Kota Bekasi Tahun 2018, 2023 dan 2030

Daya Dukung Pangan		
Uraian	Jumlah	Keterangan
Tahun 2018		
Luas Lahan Pertanian Lahan Basah	483,00	ha
Produktivitas Lahan (ton/ha/tahun)	63,02	ton/ha/th
Produksi padi	30.438,70	ton/th
Konversi GKG ke Beras	19.097,24	ton/ha/th
Jumlah Penduduk	2.873.484,00	orang
Angka konsumsi beras (kg/orang/tahun)	124,86	kg/ha/th
Jumlah beras dikonsumsi (ton)	358.783,21	ton/ha/th
DDL (Daya Dukung Lahan) untuk pangan	0,053	
Surplus/defisit Beras (ton)	(339.685,97)	Defisit
Tahun 2023		
Luas Lahan Pertanian Lahan Basah	27,00	ha
Produktivitas Lahan (ton/ha/tahun)	63,02	ton/ha/th
Produksi padi	1.701,54	ton/th

Daya Dukung Pangan		
Konversi GKG ke Beras	1.067,55	ton/ha/th
Jumlah Penduduk	3.500.141,14	orang
Angka konsumsi beras (kg/orang/tahun)	124,86	kg/ha/th
Jumlah beras dikonsumsi (ton)	437.027,62	ton/ha/th
DDL (Daya Dukung Lahan) untuk pangan	0,0024	
Surplus/defisit Beras (ton)	(435.960,08)	Defisit
Tahun 2030		
Luas Lahan Pertanian Lahan Basah	27,00	ha
Produktivitas Lahan (ton/ha/tahun)	63,02	ton/ha/th
Produksi padi	1.701,54	ton/th
Konversi GKG ke Beras	1.067,55	ton/ha/th
Jumlah Penduduk	4.126.798,29	orang
Angka konsumsi beras (kg/orang/tahun)	124,86	kg/ha/th
Jumlah beras dikonsumsi (ton)	515.272,03	ton/ha/th
DDL (Daya Dukung Lahan) untuk pangan	0,0021	
Surplus/defisit Beras (ton)	(514.204,49)	Defisit

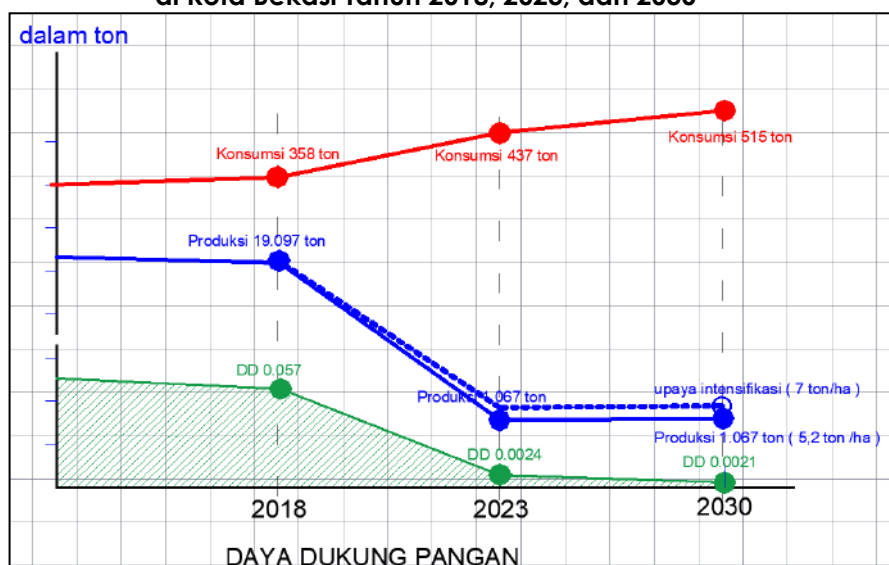
Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

Beberapa Analisis agar ketersediaan pangan Kota Bekasi tetap ada meskipun tidak surplus maka beberapa Analisis daya dukung pangan agar tetap ada, diantaranya:

- Menjalani pola kerjasama dengan kabupaten yang memiliki daya dukung pangan surplus untuk pemenuhan kebutuhan pangan Kota Bekasi;
- Pengembangan dan penerapan Urban Farming dengan pengembangan kampung hidroponik.
- Mengoptimalkan fungsi RTH privat sebagai penghasil pangan;
- Mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
- Meningkatkan produktivitas padi/ha pada lahan LP2B.
- Membudayakan diversifikasi pangan;

Lebih jelasnya analisis daya dukung dan daya tampung pangan di Kota Bekasi pada tahun 2018, 2023, dan 2030 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.6
Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan
di Kota Bekasi Tahun 2018, 2023, dan 2030



3. Daya Dukung Fungsi Lindung

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan data guna lahan eksisting pada tahun 2017 maka koefisien lindung Kota Bekasi termasuk dalam kategori rendah yaitu sebesar 0,23. Rencana pola ruang dalam RTRW Kota Bekasi menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kawasan yang memiliki fungsi lindung.

Upaya-upaya untuk meningkatkan tutupan lahan dan fungsi lindung tetap dilakukan, tetapi belum mampu meningkatkan daya dukung lahan pada posisi baik. Berdasarkan rencana pola ruang yang sudah ditetapkan dalam RTRW Kota Bekasi, koefisien lindungnya masih bernilai tetap yaitu 0,23 meskipun ada peningkatan dari luas lahan yang memiliki fungsi lindung dari 4.768,39 hektar pada tahun 2017 menjadi 5.160,62 hektar pada akhir tahun perencanaan.

Dengan demikian sampai dengan tahun 2023 yang merupakan tahun akhir RPJMD, perubahan koefisien lindung juga diharapkan sudah meningkat dibandingkan koefisien lindung pada tahun 2017. Berikut adalah perhitungan koefisien lindung berdasarkan peta rencana pola ruang Revisi RTRW Kota Bekasi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.17
Luas Koefisien Lindung Berdasarkan Tutupan Lahan Tahun 2017

No	Penggunaan Lahan	Luas/Km ²	Luas /Ha	Koef. Lind	Luas Lld./Ha
1	Danau/Situ	0,15	15,00	1,00	15,00
2	Gedung/Bangunan	1,00	100,00	0,18	18,00
3	Perkebunan/Kebun	20,88	2.088,00	0,21	438,00
4	Permukiman dan Tempat Kegiatan	121,05	12.105,00	0,18	2.179,00
5	Sawah	26,47	2.647,00	0,46	1.218,00
6	Sawah Tadah hujan	0,10	10,00	0,46	5,00
7	Semak Belukar	1,72	172,00	0,21	36,00
8	Tanah Kosong	26,40	2.640,00	0,21	554,00
9	Tegalan/Ladang	14,31	1.431,00	0,21	301,00
10	Vegetasi Non Budidaya Lainnya	0,07	7,00	0,68	5,00
Jumlah		212,15	21.215,00		4.768,39

Sumber: KLHS RPJM Kota Bekasi 2018-2023

Tabel 4.18
Luas Koefisien Lindung Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW Kota Bekasi

No	Rencana Pola Ruang	Luasan (Km ²)	Luas /Ha	Koef. Lind	Luas Lld./Ha
1	Campuran	15,90	1.590	0,18	286,20
2	Danau	0,21	21	1,00	21,00
3	Gardu Induk	0,15	15	0,18	2,70
4	Industri Besar	9,27	927	0,18	166,86
5	Industri Kecil	0,09	9	0,18	1,62
6	Industri Menengah	4,20	420	0,18	75,60
7	IPAL	0,12	12	0,18	2,16
8	IPLB3	0,03	3	0,18	0,54
9	Jalan Arteri Primer	1,02	102	0,18	18,36
10	Jalan Arteri Sekunder	0,25	25	0,18	4,50
11	Jalan Baru	0,37	37	0,18	6,66
12	Jalan Kereta	0,08	8	0,18	1,44
13	Jalan Kolektor Primer	0,45	45	0,18	8,10
14	Jalan Kolektor Sekunder	0,21	21	0,18	3,78
15	Jalan Lokal	14,64	1.464	0,18	263,52

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Rencana Pola Ruang	Luasan (Km ²)	Luas /Ha	Koef. Lind	Luas Lld./Ha
16	Jalan Tol	1,70	170	0,18	30,60
17	Kawasan Lindung Cagar Budaya	0,01	1	0,18	0,18
18	Komersial Skala Kawasan	9,63	963	0,18	173,34
19	Komersial Skala Kecamatan	0,72	72	0,18	12,96
20	Komersial Skala Regional/Kota	8,10	810	0,18	145,80
21	Pelebaran Jalan	1,46	146	0,18	26,28
22	Perkantoran Pemerintah	0,73	73	0,18	13,14
23	Pertahanan dan Keamanan	0,77	77	0,18	13,86
24	Pertambangan	0,04	4	0,18	0,72
25	Perumahan Kepadatan Rendah	13,63	1.363	0,18	245,34
26	Perumahan Kepadatan Sedang	34,75	3.475	0,18	625,50
27	Perumahan Kepadatan Tinggi	68,63	6.863	0,18	1235,34
30	RTH Jalur Hijau	1,13	113	1,00	113,00
31	RTH Pulau Jalan	0,00	-	1,00	0,00
32	RTH Kota	2,80	280	1,00	280,00
33	RTH Rekreasi	0,00	-	1,00	0,00
34	RTH Sabuk Hijau (Buffer)	0,33	33	1,00	33,00
35	RTH Taman Kecamatan	1,18	118	1,00	118,00
36	RTH Taman Kelurahan	0,69	69	1,00	69,00
37	Sarana Kesehatan	0,06	6	0,18	1,08
38	Sarana Pendidikan	2,08	208	0,18	37,44
39	Sarana Peribadatan	0,48	48	0,18	8,64
40	Sarana Rekreasi dan Olahraga	0,41	41	0,18	7,38
41	Sarana Sosial dan Budaya	0,02	2	0,18	0,36
42	Sarana Transportasi	0,14	14	0,18	2,52
43	Sempadan Jalan Kereta	0,32	32	1,00	32,00
44	Sempadan Situ/Danau	0,11	11	1,00	11,00
45	Sempadan Sungai	4,96	496	1,00	496,00
46	Sempadan SUTET	1,87	187	1,00	187,00
47	Situ	0,24	24	1,00	24,00
48	Sungai dan Saluran	2,334	233	1,00	233,40
49	Tampungan Air	0,43	43	1,00	43,00
50	TPA	2,09	209	0,21	43,89
51	TPU	1,61	161	0,21	33,81
Jumlah		210,44	21.044		5.160,62

Sumber: KLHS RPJM Kota Bekasi 2018-2023

Berdasarkan tabel koefisien lindung diatas maka daya dukung fungsi lindung di Kota Bekasi dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.19
Daya Dukung Fungsi Lindung Kota Bekasi Tahun 2017

Uraian	Tahun 2017	
	Jumlah	Keterangan
Luas Lahan Lindung	4.768,39	Ha
Luas Lahan	21.049,00	Ha
Daya Dukung Fungsi Lindung	0,23	

Sumber: KLHS RPJM Kota Bekasi 2018-2023

Tabel 4.20
Analisis Daya Dukung Fungsi Lindung Kota Bekasi Tahun 2030

Uraian	Tahun 2030	
	Jumlah	Keterangan
Luas Lahan Lindung	5.160,62	Ha
Luas Lahan	21.049,00	Ha
Daya Dukung Fungsi Lindung	0,25	

Sumber: KLHS RPJM Kota Bekasi 2018-2023

Gambar 4.7
Analisis Daya Dukung Fungsi Lindung Kota Bekasi Tahun 2017 dan 2030



Analisis BAU daya dukung fungsi lindung pada masa yang akan datang didasarkan pada perwujudan pola ruang kawasan lindung sesuai dengan rencana pola ruang dalam RTRW.

Meskipun ada peningkatan peruntukan kawasan industri dan kawasan peruntukan permukiman serta infrastruktur, tetapi adanya strategi tata ruang untuk mewujudkan sempadan sungai dan sempadan situ/danau yang lebih luas dari kondisi saat ini maka perwujudan daya dukung fungsi lindung dapat tercapai pada masa yang akan datang.

Oleh sebab itu, agar Analisis daya dukung fungsi lindung dapat dijaga pada masa yang akan datang maka beberapa strategi yang perlu dikembangkan adalah:

- Mewujudkan peruntukkan kawasan lindung sesuai dengan RTRW Kota Bekasi untuk mempertahankan daya dukung fungsi lindung pada masa yang akan datang;
- Meningkatkan jumlah dan luas RTH;
- Meningkatkan luas dan penyebaran hutan kota;
- Mempertahankan lahan pertanian;
- Menjadikan pemakaman tanpa perkerasan; dan
- Perlunya mendorong kota dalam mengalokasikan dan mewujudkan kawasan lindung pada sempadan sungai, sempadan danau/situ, sempadan SUTET/SUTT, sempadan jalan tol dan sempadan jalan KA.

4. Daya Dukung Lahan Terbangun

Perhitungan daya dukung lahan terbangun pada tahun 2017 menggunakan asumsi perubahan linier terhadap rencana pola ruang RTRW sampai dengan tahun 2030. Penggunaan lahan yang direncanakan dalam pola ruang di atas menunjukkan luas terbangun mencapai 18.969 hektar (peruntukkan industri, permukiman, pemerintahan, perdagangan dan jasa) atau sebesar 90.11% dari luas Kota Bekasi. Dengan demikian Analisis daya dukung lahan terbangun tahun 2030 mengalami penurunan menjadi 0,67 dari nilai daya dukung lahan terbangun tahun 2017 sebesar 1,03.

Untuk mencegah terjadinya penurunan daya dukung lahan terbangun yang semakin rendah maka perlu meningkatkan luas lahan tidak terbangun (misalnya revitalisasi perumahan horizontal menjadi perumahan vertikal), setidaknya laju penurunan daya dukung lahan terbangun tidak bertambah buruk.

Besarnya penurunan lahan terbangun pada tahun 2030 bisa mencapai 30% dari total luas lahan terbangun saat ini. Dengan cara ini daya dukung lahan terbangun akan dapat dipertahankan sebesar 0,86. Analisis ini perlu terus ditingkatkan hingga daya dukung lahan terbangun dapat melebihi angka 1.

Penurunan daya dukung lahan terbangun ini akibat meningkatnya kebutuhan untuk lahan industri, permukiman dan infrastruktur. Agar penurunan daya dukung lahan terbangun tidak terus meningkat maka perlu adanya beberapa strategi pengendalian pemanfaatan lahan untuk kawasan terbangun. Berikut adalah tabel dan gambar Analisis perubahan daya dukung lahan terbangun Kota Bekasi.

Tabel 4.21
Kondisi Daya Dukung Lahan Terbangun Kota Bekasi Tahun 2017

Uraian	Tahun 2017	
	Jumlah	Keterangan
Luas Lahan Terbangun	12.205,00	Ha
Total Luas Penggunaan Lahan	21.049,00	Ha
Daya Dukung Lahan Terbangun	1,03	

Sumber: KLHS RPJM Kota Bekasi 2018-2023

Tabel 4.22
Analisis Daya Dukung Lahan Terbangun Kota Bekasi Tahun 2030

Uraian	Tahun 2030	
	Jumlah	Keterangan
Luas Lahan Terbangun	18.969,00	Ha
Total Luas Penggunaan Lahan	21.049,00	Ha
Daya Dukung Lahan Terbangun	0,67	

Sumber: KLHS RPJM Kota Bekasi 2018-2023

Gambar 4.8
Analisis Daya Dukung Lahan Terbangun Kota Bekasi



Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2018

Kondisi daya dukung lahan terbangun dikatakan baik jika nilai daya dukung lahan terbangun minimal adalah 3. Oleh karena itu, maka perlu beberapa strategi yang harus dikembangkan oleh Kota Bekasi untuk mempertahankan daya dukung lahan terbangun pada kondisi baik, melalui:

- Pembangunan kawasan perkotaan yang kompak dengan mendorong penggunaan bangunan vertikal sesuai kemampuan lahan untuk efisiensi penggunaan lahan terutama untuk kawasan peruntukkan permukiman perkotaan;
- Penerapan 30% RTH pada kawasan permukiman dan industri agar tidak seluruh kawasan peruntukkan permukiman maupun industri tetap menyediakan ruang terbuka; dan
- Pengendalian pembangunan secara horizontal.

5. Analisis Perubahan Daya Dukung Lingkungan Hidup Kota Bekasi Sampai Dengan Tahun 2030

Secara garis besar berdasarkan pada perhitungan daya dukung lingkungan hidup yang meliputi air, pangan, lindung dan lahan terbangun di atas maka Analisis perubahan pada masing-masing daya dukung lingkungan dapat dibandingkan pada tabel berikut:

Tabel 4.23
Analisis Perubahan Daya Dukung Lingkungan Hidup Kota Bekasi Sampai Dengan Tahun 2030

No	Daya Dukung LH	BAU		TPB	Keterangan
		2017	2023		
1	Daya Dukung Air Permukaan	1,62	1,52	1	Kondisi daya dukung air masih memenuhi daya dukung meskipun sampai tahun 2030 menurun tetapi tetap masih surplus.

No	Daya Dukung LH	BAU		TPB	Keterangan
2	Daya Dukung Pangan	0,053	0,0024	Surplus	Kondisi daya dukung pangan di Kota Bekasi defisit, dan sampai tahun 2030 daya dukung pangan semakin menurun.
3	Daya Dukung Fungsi Lahan Lindung	0,23	0,25	0,3	Fungsi lahan lindung meskipun adanya peningkatan bangunan tetapi Juga telah diimbangi dengan peningkatan kawasan berfungsi lindung terutama sempadan sungai, sempadan situ/danau, RTH jalur hijau, dan TPU.
4	Daya Dukung Lahan Terbangun	1,03	0,67	3	Kondisi daya dukung lahan terbangun menurun karena adanya peningkatan peruntukkan permukiman, perdagangan dan jasa. Perlu upaya untuk mempertahankan pada tingkat 3,00 (baik) melalui efisiensi penggunaan lahan untuk terbangun.

Sumber: KLHS RPJM Kota Bekasi 2018-2023

6. Daya Tampung Lahan

Daya tampung lahan merupakan kombinasi antara faktor alam dari kondisi ekoregion Kota Bekasi dengan kondisi tutupan lahan yang ada saat ini. Jika melihat hasil analisis kondisi daya tampung lahan di Kota Bekasi menunjukkan sebesar 70,12% atau 147,60 ha berada pada kemampuan lahan kelas II dan sebagai lahannya berada pada kelas kemampuan lahan I dan kelas III. Uraian dari kelas kemampuan lahan di Kota Bekasi dapat dilihat pada uraian berikut ini:

a. Kelas Kemampuan Lahan I

Lahan kelas I memiliki kriteria sebagai lahan yang tidak mempunyai atau hanya sedikit hambatan yang membatasi penggunaannya. Lahan kelas I sesuai untuk berbagai penggunaannya, terutama pertanian. Karakteristik lahannya antara lain: topografi hampir datar-datar, ancaman erosi kecil, kedalaman efektif dalam, drainase baik, mudah diolah, kapasitas menahan air baik, subur, dan tidak terancam banjir. Saat ini penggunaan lahan eksisting di Kelas I berupa sawah, semak belukar, lahan terbuka, dan permukiman.

Luasan total lahan kelas I sebanyak 32,47 km² atau 15,43% dari luas total wilayah Kota Bekasi. Sebaran dari kelas kemampuan lahan kelas I di Kota Bekasi berada di Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medan Satria.

b. Kelas Kemampuan Lahan II

Untuk kelas II, berupa lahan dengan hambatan yang relatif sama dengan kelas I dimana memiliki karakteristik topografi datar dan ancaman erosi kecil.

Saat ini jenis penggunaan lahan di Kelas II berupa semak belukar, lahan terbuka, permukiman dan tegalan. Penggunaan lahan tersebut sudah cocok dimana pada dasarnya untuk kelas II dapat dimanfaatkan sebagai lahan untuk budidaya baik berupa permukiman dan fasilitas pendukungnya ataupun pertanian, perkebunan dan lain-lain.

Luasan total kelas lahan II sebanyak 147,60 km² atau 70,12% dari luas total wilayah Kota Bekasi. Sebaran dari kelas kemampuan lahan II mencakup semua kecamatan di Kota Bekasi, dimana paling besar kelas lahan II di Kec. Jatiasih. Adapun kecamatan yang termasuk pada kelas lahan II yaitu Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Mustikajaya, Kecamatan Pondokgede, Kecamatan Pondok Melati dan Kecamatan Rawalumbu.

c. Kelas Kemampuan Lahan III

Kelas kemampuan lahan III merupakan lahan yang memiliki beberapa hambatan berupa erosi dan banjir/genangan yang mengurangi pilihan penggunaan lahan dan memerlukan tindakan konservasi khusus dan keduanya. Lahan ini mempunyai pembatas lebih berat dari kelas II dan jika dipergunakan untuk tanaman perlu pengolahan tanah dan tindakan konservasi lebih sulit diterapkan. Hambatan ini membatasi lama penggunaan bagi tanaman semusim, waktu pengolahan, pilihan tanaman atau kombinasi dari pembatas-pembatas tersebut.

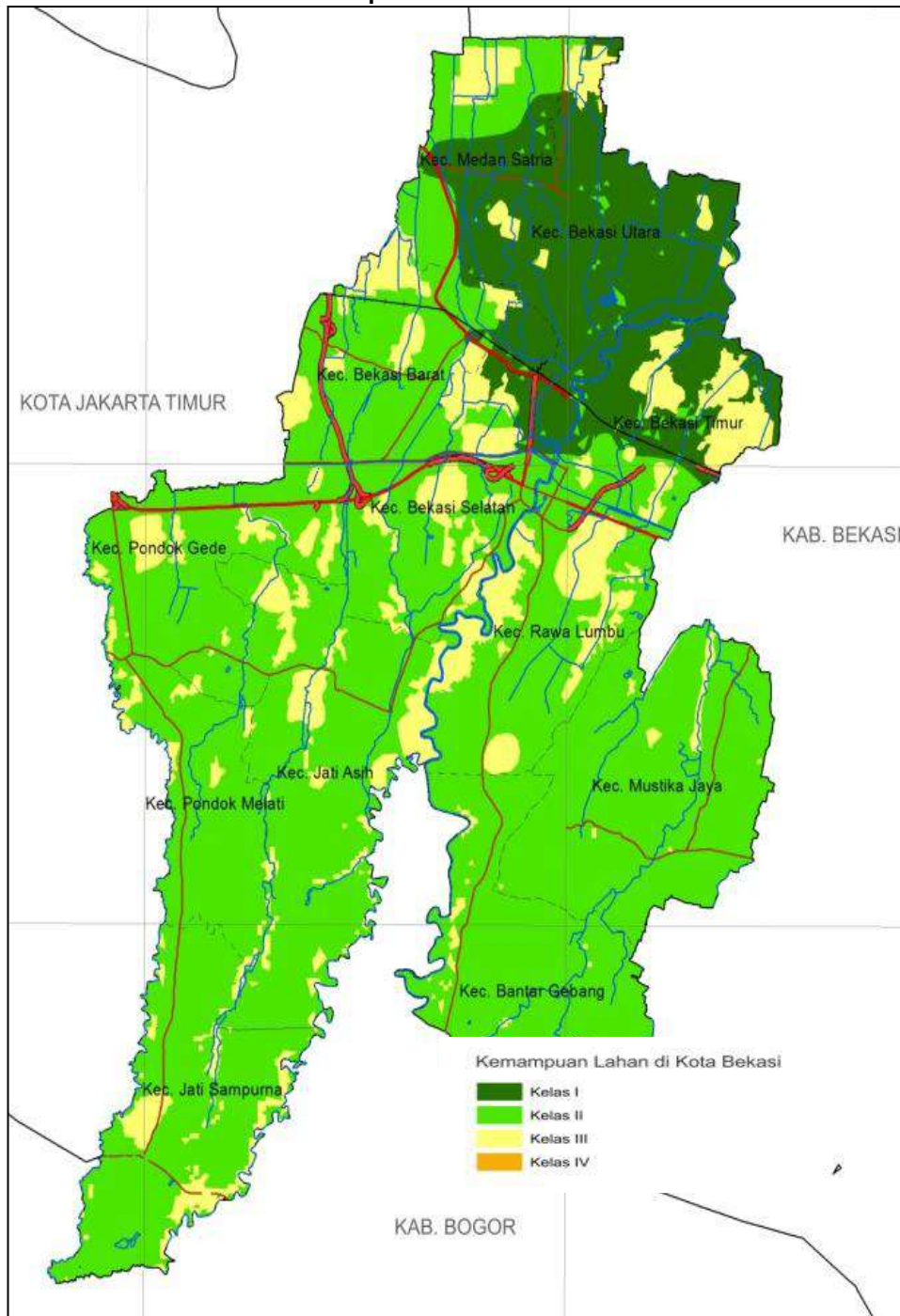
Penggunaan lahan wilayah khususnya kelas lahan III yaitu lahan terbuka, perkebunan, sawah, semak, dan permukiman. Luasan total kelas III sebanyak 30,42 km² atau 14,45% dari luas total wilayah Kota Bekasi. Sebaran dari kelas kemampuan lahan III berada di semua kecamatan di Kota Bekasi, dengan kelas lahan III paling besar di Kecamatan Jatiasih, Kecamatan yang termasuk pada kelas lahan III selain Kecamatan Jatiasih yaitu Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Mustikajaya, Kecamatan Pondokgede, Kecamatan Pondok Melati dan Kecamatan Rawalumbu. Lebih jelasnya mengenai kondisi daya dukung Kota Bekasi lihat Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 4.24
Kelas Kemampuan Lahan di Kota Bekasi

Kelas Kemampuan Lahan	Luas (km ²)	%
I	32,47	15,43
II	147,60	70,12
III	30,42	14,45
IV	0,00	0,00
Total	210,49	100,00

Sumber: KLHS RPJM Kota Bekasi 2018-2023

Gambar 4.9
Kelas Kemampuan Lahan Kota Bekasi



Sumber: KLHS RPJM Kota Bekasi 2018-2023

7. Daya Tampung Udara

Hasil pemantauan terhadap kualitas udara tersebar di 12 kecamatan di Kota Bekasi menunjukkan bahwa 74% memiliki status tercemar sedang dan 26% tidak sehat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

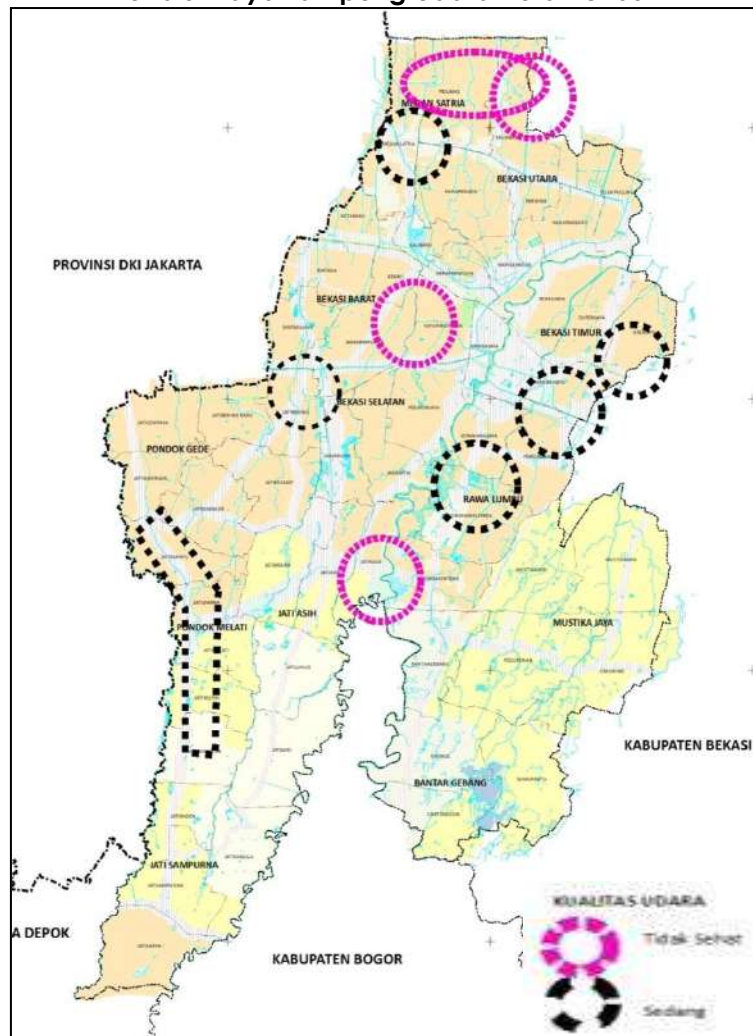
Tabel 4.25
Indeks Kualitas Udara Kota Bekasi

No	Lokasi	2018	
		SO ₂	NO ₂
		µg/Nm ³	µg/Nm ³
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Taman Makam Pahlawan	47,9	69,21
2	Bundaran Harapan Indah	47,9	105,74
3	Depan Gor Bekasi	47,9	158,15
Konsentrasi Rata-rata		47,90	111,03
Indeks Masing-Masing Pencemar		94,01	86,12
Indeks Pencemaran Udara		90,07	
		90,07	

Sumber : Buku IKPLHD Kota Bekasi

Berdasarkan hasil pemantauan udara ambien, diketahui bahwa konsentrasi parameter SO₂, CO, NO₂, O₃ dan TSP masih memenuhi baku mutu udara ambien. Hasil pemantauan dibandingkan dengan baku mutu udara ambien nasional yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Selengkapny kondisi masing-masing pencemar dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 4.10
Kondisi Daya Tampung Udara Kota Bekasi



Pengaruh kualitas udara yang kurang baik dapat memberikan gangguan kesehatan masyarakat terutama pada paru-paru serta gangguan terhadap ekosistem dan lingkungan berupa gangguan pada sel hewan dan tumbuhan. Untuk itu diperlukan strategi, sebagai berikut:

- a. Pemantauan secara rutin;
- b. Melakukan sampling uji emisi kendaraan;
- c. Pengembangan RTH (hutan kota, RTH sempadan, RTH jalur hijau dan RTH yang berfungsi sebagai buffer zone untuk kawasan yang diperkirakan akan menimbulkan polusi udara seperti kawasan industri dan kawasan TPA); dan
- d. Mewajibkan setiap kegiatan yang akan menimbulkan polusi udara untuk menyediakan instalasi pengolahan agar polusi udara yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan.

8. Daya Tampung Air

Berdasarkan buku IKPLHD Kota Bekasi di dapat bahwa status mutu air sungai/saluran kota Bekasi mempunyai status cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat.

Pada periode pertama terdapat 1 lokasi yang mempunyai status cemar berat yaitu saluran induk tarum barat. Sedangkan periode kedua terdapat beberapa titik yang mengalami cemar berat yang berada di anak kali saluran. Untuk lebih jelasnya mengenai status mutu air sungai/saluran di Kota Bekasi dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 4.26
Status Mutu Air Sungai/ Saluran (Periode I)

Nama (1)	Nama Lokasi (2)	IP (3)	STATUS (4)
Kali Cikeas- Cileungsi	Jembatan Perum. Kota Wisata, Kab. Bogor (Sungai Cileungsi)	4,92	Cemar Ringan
	Samping PT. Pratama Prima Bajatama (Sungai Cileungsi)	7,94	Cemar Sedang
	Jembatan Belakang PT. Rahayu Indah Kulit (Sungai Cileungsi)	3,18	Cemar Ringan
	Pangkalan 1, Belakang PT. Asmar Nakama Partogi (Sungai Cileungsi)	5,99	Cemar Sedang
	Curug Ciparigi (Sungai Cileungsi)	4,97	Cemar Ringan
	Jembatan Jl. Transyogi (Kali Cikeas)	5,99	Cemar Sedang
	Jati Asih dekat Jembatan Perum. Sanipala (Kali Cikeas)	6,02	Cemar Sedang
Kali Bekasi	Pertemuan Sungai Cikeas - Cileungsi Perum Villa Nusa Indah	6,10	Cemar Sedang
	Jalan Baru Cipendawa	7,01	Cemar Sedang
	Depan PT. Howsanindo	3,86	Cemar Ringan
	Belakang PD. Sari Sedap (Jalan Kp. Bojong Menteng)	7,01	Cemar Sedang
	Jembatan Perum. Kemang Pratama	7,02	Cemar Sedang
	Jembatan Lotte Mall Rawa Panjang	3,47	Cemar Ringan
	Jembatan M. Hasibuan PDAM Poncol	6,01	Cemar Sedang
	Jembatan Pasar Proyek (Jl. Ir. H. Juanda)	6,57	Cemar Sedang
Jembatan Teluk Pucung (dekat GIANT Wisma Asri)	7,05	Cemar Sedang	

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Nama	Nama Lokasi	IP	STATUS	
Kalibaru	Jl. Wahab Affan (Jembatan Perum Harapan Baru)	1,73	Cemar Ringan	
	Jl. Wahab Affan Pondok Ungu (Jembatan Belakang PT Arnott's)	6,51	Cemar Sedang	
Kali Kayuringin	Jl. Tawes Raya (Jembatan dekat Terminal Kayuringin)	3,20	Cemar Ringan	
	Jembatan dekat Kelurahan Kayuringin Jaya	2,94	Cemar Ringan	
Saluran Induk Tarum Barat	Jembatan RS. Mitra Bekasi Timur	14,68	Cemar Berat	
	Pos Polisi Jl. Chairul Anwar	7,07	Cemar Sedang	
	Depan Bebek Slamet (Jalan Chairil Anwar)	7,66	Cemar Sedang	
	Shippon	7,42	Cemar Sedang	
	Pos Polisi Belakang Giant	7,04	Cemar Sedang	
	Depan RS Awal Bross	6,60	Cemar Sedang	
	Jembatan Santung	7,04	Cemar Sedang	
	Depan Universitas Gunadarma	6,60	Cemar Sedang	
	Tol Bekasi Barat Depan Metropolitan Mall	7,05	Cemar Sedang	
	Jembatan Pasar Sumber Arta, Jl. K. H. Nur Ali	6,60	Cemar Sedang	
	Anak Kali dan Saluran	Jalan Raya Kemakmuran (Jembatan depan RS. Hermina) - Saluran Kemakmuran/Saluran Sekunder Bekasi Pangkal	8,43	Cemar Sedang
		Jembatan Jalan RA. Kartini - Saluran Kali Margahayu	3,06	Cemar Ringan
Jl. M. Hasibuan (200m sebelum intake PDAM Kota Bekasi) - Saluran SITB		7,03	Cemar Sedang	
Jl. M. Hasibuan - Saluran Sekunder		7,66	Cemar Sedang	
Jl. Raya Seroja Bekasi (Jembatan Depan PT General Motor) - Kali Sasak Gane		7,38	Cemar Sedang	
Jl. Raya Perjuangan (Belakang PT Prakasa Alam Segar) - Kali Bancong		7,54	Cemar Sedang	
Jl. Ir. H. Djuanda (Samping RS Graha Juanda, Bekasi Timur) - Kali Sasak Jarang		4,10	Cemar Ringan	
Pangkalan V, Narogong Raya - Saluran Sebelum TPA Bantar Gebang		4,88	Cemar Ringan	
Setelah TPST Bantar Gebang dan Sumur Batu - Kali Ciasem		6,38	Cemar Sedang	
Jl. Lumbu Utara Jembatan VI (Jembatan depan RS Rawa Lumbu) - Kali Rawa Lumbu		5,56	Cemar Sedang	
Jl. Raya Bekasi KM 28 depan PT Sunrise Bumi Textile - Saluran Sekunder Bekasi Tengah		7,66	Cemar Sedang	
Jl. Asam Raya - Kali Mustika Jaya		5,99	Cemar Sedang	
Jl. Pondok Gede Raya (Perbatasan Bekasi dan Jakarta) - Kali Sunter		1,56	Cemar Ringan	
Jl. KH. Noer Ali (Pura Wihara Hindu) - Saluran Kayuringin Kali Empat		1,79	Cemar Ringan	
Perum Bukit Satria Kencana - Saluran Kayuringin Kali Empat		3,11	Cemar Ringan	
Jl. Pejuang - samping PT Bakrie Pipe - Kali Pejuang		4,82	Cemar Ringan	
Jl. Haji Djoleo (Belakang pasar Bantar Gebang) - Saluran Rawalumbu		8,50	Cemar Sedang	
Jl. Raya Narogong No. 16 Rawalumbu (Belakang PT Mikie Oleo Nabati) - Saluran Rawalumbu		6,01	Cemar Sedang	
Jl. M. Hasibuan (Samping Islamic Canter) - Saluran Rawa Tembaga		7,04	Cemar Sedang	
Jl. Bintara Raya (Sebelah Kecamatan Bekasi Barat) - Kali Bintara		8,10	Cemar Sedang	

Sumber : Buku IKPLHD Tahun 2018 (DLH)

Tabel 4.27
Status Mutu Air Sungai/ Saluran (Periode II)

Nama (1)	Nama Lokasi (2)	IP (3)	STATUS (4)
Kali Cikeas- Cileungsi	Jembatan Perum. Kota Wisata, Kab. Bogor (Sungai Cileungsi)	4,29	Cemar Ringan
	Samping PT. Pratama Prima Bajatama (Sungai Cileungsi)	3,80	Cemar Ringan
	Jembatan Belakang PT. Rahayu Indah Kulit (Sungai Cileungsi)	3,65	Cemar Ringan
	Pangkalan 1, Belakang PT. Asmar Nakama Partogi (Sungai Cileungsi)	4,17	Cemar Ringan
	Curug Ciparigi (Sungai Cileungsi)	2,72	Cemar Ringan
	Jembatan Jl. Transyogi (Kali Cikeas)	2,51	Cemar Ringan
	Jati Asih dekat Jembatan Perum. Sanipala (Kali Cikeas)	3,57	Cemar Ringan
Kali Bekasi	Pertemuan Sungai Cikeas - Cileungsi Perum Villa Nusa Indah	2,29	Cemar Ringan
	Jalan Cipendawa	2,04	Cemar Ringan
	Depan PT. Howsanindo	6,22	Cemar Sedang
	Belakang PD. Sari Sedap (Jalan Kp. Bojong Menteng)	2,25	Cemar Ringan
	Jembatan Perum. Kemang Pratama	3,93	Cemar Ringan
	Jembatan Lotte Mall Rawa Panjang	2,77	Cemar Ringan
	Jembatan M. Hasibuan (Jembatan Irigasi)	2,02	Cemar Ringan
	Jembatan Proyek (Jl. Ir. H. Juanda)	3,31	Cemar Ringan
Kalibaru	Jl. Karang Satria Raya, Teluk Pucung, Jembatan Sasak	3,92	Cemar Ringan
	Jembatan Perum Harapan Baru	5,38	Cemar Sedang
Kali Kayuringin	Jembatan Belakang PT Arnott	3,20	Cemar Ringan
	Jl. Burangrang (Jembatan Dekat Terminal Damri, Kayuringin)	4,93	Cemar Ringan
Saluran Induk Tarum Barat	Jembatan Dekat Kantor Kelurahan Kayuringin Jaya (Jl. Letnan Arsyad)	6,24	Cemar Sedang
	Jembatan Belakang UNISMA (Komplek Pengairan Rawa Semut)	2,85	Cemar Ringan
	Pos Polisi Jl. Chairul Anwar	2,72	Cemar Ringan
	Depan Bebek Slamet (Jalan Chairil Anwar)	2,04	Cemar Ringan
	Chiffon Aliran Laju Kalimalang (Jl. R.A Kartini)	1,80	Cemar Ringan
	Pos Polisi Belakang Giant (Jl. Mayor Madmuin Hasibuan)	1,81	Cemar Ringan
	Depan RS Awal Bross (Jl. K.H. Noer Ali)	1,88	Cemar Ringan
	Jembatan Santung	2,11	Cemar Ringan
	Depan Universitas Gunadarma	2,94	Cemar Ringan
	Tol Bekasi Barat (Jl. K. H. Noer Ali)	1,81	Cemar Ringan
Anak Kali dan Saluran	Sumber Arta	1,99	Cemar Ringan
	Jembatan RS. Hermina Jalan Kemakmuran - Saluran Kemakmuran	2,20	Cemar Ringan
	Jembatan Jalan RA. Kartini - Saluran Kali Margahayu	11,37	Cemar Berat
	Jl. M. Hasibuan (200m sebelum intake PDAM Kota Bekasi) - Saluran SITB	2,53	Cemar Ringan
	Underpass Pasar Baru, Bekasi - Saluran Sekunder	1,82	Cemar Ringan
	Jl. Saluran Irigasi Gempol - Kali Sasak Gane	2,25	Cemar Ringan
	Jl. Pisang Batu, Bungur, Bekasi Utara - Kali Bancong	13,15	Cemar Berat
	Jl. Ir. H. Djuanda - Kali Sasak Jarang	10,31	Cemar Berat
	Jl. Pangkalan V, Bantar Gebang - Saluran Sebelum TPA Bantar Gebang	4,49	Cemar Ringan
	Setelah TPST Bantar Gebang dan Sumur Batu - Kali Asem	11,47	Cemar Berat
	Jl. Lumbu Barat Raya, Perum Rawa Lumbu - Kali Rawa Lumbu	3,90	Cemar Ringan
	Jl. Alexindo - Saluran Sekunder Bekasi Tengah	2,05	Cemar Ringan

Nama	Nama Lokasi	IP	STATUS
	Jl. Raya Mutiara Gading Timur, Asem - Kali Mustika Jaya	11,45	Cemar Berat
	Jl. Pondok Gede - Kali Sunter	6,76	Cemar Sedang
	Jl. KH. Noer Ali (Pura Wihara Hindu) - Saluran Kayuringin Kali Empat	3,68	Cemar Ringan
	Perum Bumi Satria Kencana - Saluran Kayuringin Kali Empat	7,85	Cemar Sedang
	Jl. Raya Kaliabang (Samping PT Bakrie Pipe Industries) - Kali Pejuang	4,94	Cemar Ringan
	Jl. Haji Djoleo (Belakang pasar Bantar Gebang) - Saluran Rawalumbu	10,33	Cemar Berat
	Jl. Kemuning Raya, Mustika Sari - Saluran Rawalumbu	11,37	Cemar Berat
	Jl. Jendral A.Yani - Saluran Rawa Tembaga	6,77	Cemar Sedang
	Jl. Bintara Raya - Kali Bintara	3,88	Cemar Ringan

Sumber : Buku IKPLHD Tahun 2018 (DLH)

Kondisi pencemaran air sungai di Kota Bekasi sesuai dengan batu mutu air kelas 2 untuk parameter BOD sebagai indikator pencemar air limbah penduduk menunjukkan untuk beberapa sungai mempunyai daya dukung relative lebih besar dari daya tampung beban pencemar airnya yaitu Sungai Sunter, Sungai Cikeas, Sungai Cilengsi, Sungai Cakung, Sungai Bekasi kecuali untuk Kali Malang.

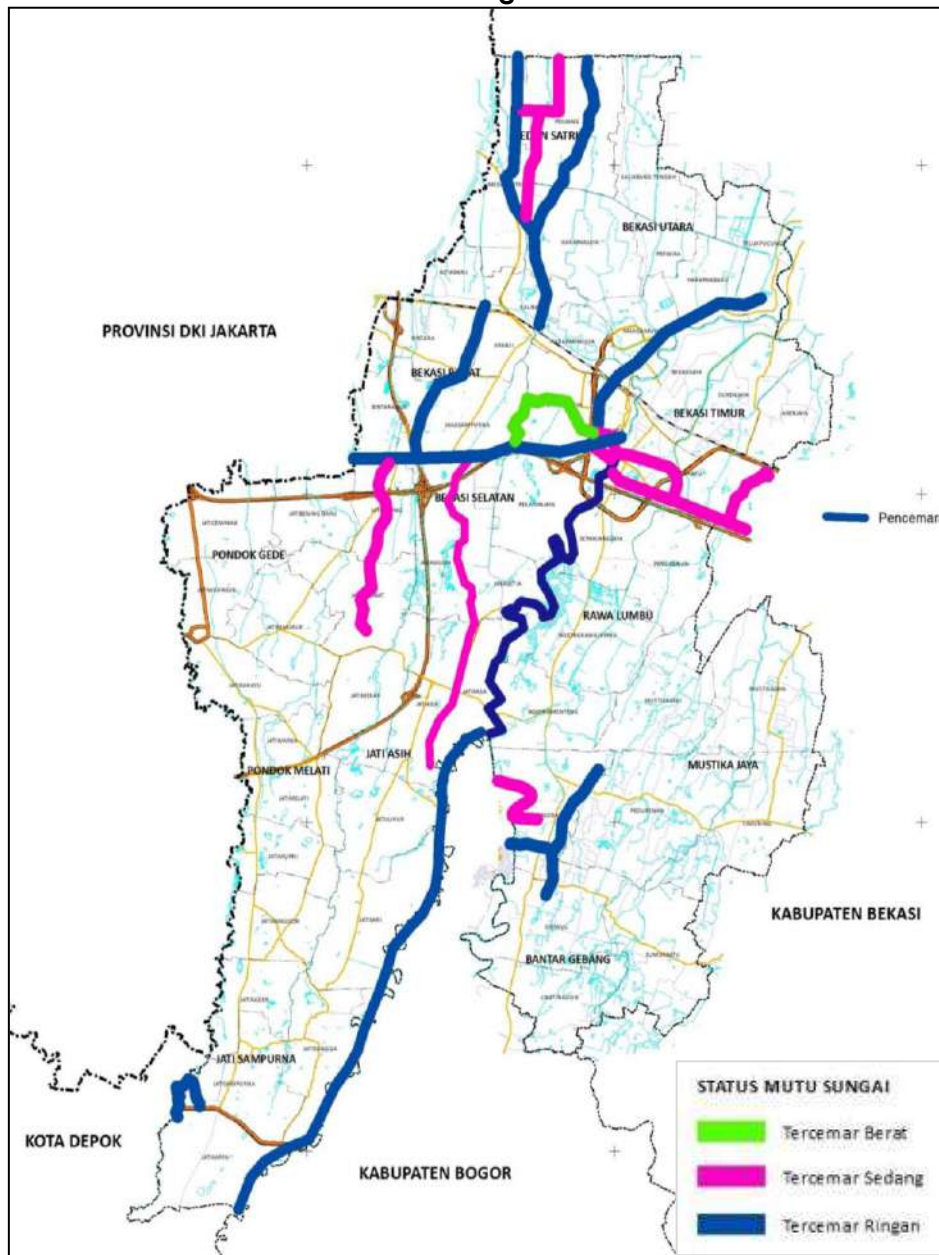
Kondisi daya tampung beban pencemar air Sungai Ciketing hilir setelah menerima air limbah sampah dari TPST Bantargebang dan TPST Sumur Batu sesuai dengan baku mutu air kelas 3 menunjukkan daya tampung melebihi daya dukung beban pencemar BOD.

Potensi beban pencemar air terhadap daya tampung beban pencemar BOD dan COD terutama sebagian besar berasal dari potensi air limbah penduduk yaitu di Sungai Bekasi, Sungai Cikeas dan Sungai Cilengsi dan sebagian lagi berasal dari potensi limbah non domestik (limbah industri, limbah B3, Limbah fasilitas kesehatan, dan limbah perdagangan dan jasa).

Berdasarkan hasil identifikasi kualitas air sungai di Kota Bekasi, beberapa sungai yang sudah menunjukkan daya tampung melebihi daya dukung beban pencemar atau sungai yang memiliki status mutu air sungai tercemar sedang perlu mendapatkan perhatian sehingga status mutu air sungai tersebut tidak meningkat menjadi status mutu air tercemar berat, beberapa Analisis untuk meningkatkan dan mempertahankan daya tampung sungai agar tidak menjadi status mutu sungai tercemar sedang diantaranya:

- a. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan individual dan komunal dengan konsep 3R;
- b. Pengembangan pengelolaan limbah dan sampah;
- c. Pengembangan jaringan Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu (IPAL);
- d. Pengembangan jaringan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT);
- e. Melakukan pemantauan kualitas air sunga secara berkala; dan
- f. Pengembangan IPAL komunal skala lingkungan.

Gambar 4.11
Status Mutu Air Sungai Kota Bekasi



9. Analisis Persampahan

Perkiraan timbulan sampah di Kota Bekasi sampai dengan tahun 2023 diperkirakan mencapai 311.540,09 ton/tahun. Asumsi peningkatan timbulan sampah tersebut berdasarkan perkiraan pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,23% per tahun. Peningkatan persentase layanan sampah harus ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut. Tingkat pelayanan pengangkutan sampah perkotaan di Kota Bekasi tahun 2017 telah mencapai 63,79% dengan pertumbuhan peningkatan layanan mencapai 1,23% per tahun. Untuk lebih jelasnya Analisis persampahan di Kota Bekasi tahun 2017, 2023 dan 2030 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.28
Analisis Persampahan di Kota Bekasi Tahun 2017, 2023, dan 2030

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2023		Tahun 2030	
	Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan
Tingkat Pelayanan Sampah (BAU)	63,79	%	72,15	%	80,76	%
Rata-rata Peningkatan Pelayanan/tahun	1,23	%	1,23	%	1,23	%
TPB Sampah	66	%	80	%	100	%
Potensi Tumpukan Sampah	391.645,00	Ton/tahun	431.795,00	Ton/tahun	484.720,00	Ton/tahun
Volume Pelayanan Sampah (BAU)	249.830,35	Ton/tahun	311.540,09	Ton/tahun	391.459,87	Ton/tahun
Target Pelayanan Sampah (TPB)	258.485,70	Ton/tahun	345.436,00	Ton/tahun	484.720,00	Ton/tahun

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

Gambar 4.12
Analisis Persampahan di Kota Bekasi Tahun 2017, 2023, dan 2030



Dengan kondisi tersebut maka diperkirakan pada tahun 2023 tingkat pelayanan sampah perkotaan dapat mencapai 80% dan pada tahun 2030 dapat mencapai 100%. Target TPB sendiri untuk pelayanan sampah perkotaan hanya 80%, dengan demikian dengan perkembangan BAU target peningkatan pelayanan sampah perkotaan di Kota Bekasi telah melampaui target nasional. Untuk pelayanan sampah secara keseluruhan di Kota Bekasi tahun 2017 capaiannya adalah sebesar 63,79%.

Berdasarkan tren peningkatan layanan sampah di Kota Bekasi pada 5 tahun terakhir, maka diperkirakan pada tahun 2023 dapat meningkat sampai dengan 72,15% atau sekitar 249.830,35 ton sampah setiap tahun yang dapat terlayani.

Permasalahannya sampai saat ini, kapasitas TPA sangat tidak memungkinkan untuk menampung total sampah yang akan dilayani. Sedangkan target pelayanan sampah berdasarkan TPB pada tahun 2023 menargetkan 80% sampah dapat tertangani atau sekitar 345.436,00 ton per tahun. Oleh karena itu, untuk mewujudkan peningkatan layanan sampah di atas maka perlu dikembangkan beberapa strategi sebagai berikut:

- Peningkatan layanan sampah Kota Bekasi menjadi 72,15% sampai dengan tahun 2023;
- Penambahan luasan TPA Sumur Batu yang saat ini daya tampungnya sudah optimal;
- Penambahan kapasitas TPA dengan *sanitary/controlled landfill*;
- Mereduksi sampah di tingkat sumber dengan menerapkan bank sampah, TPS 3R, dan TPST; dan
- Mereduksi sampah di TPA dengan menerapkan teknologi *Waste to Energy* seperti PLTSA dan insenerator.

10. Analisis Perubahan Iklim

Berdasarkan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan kebutuhan energi dan kegiatan industri, perubahan lahan pertanian, peternakan, serta kegiatan manusia lainnya, maka pada masa yang akan datang emisi GRK diperkirakan akan terus mengalami kenaikan.

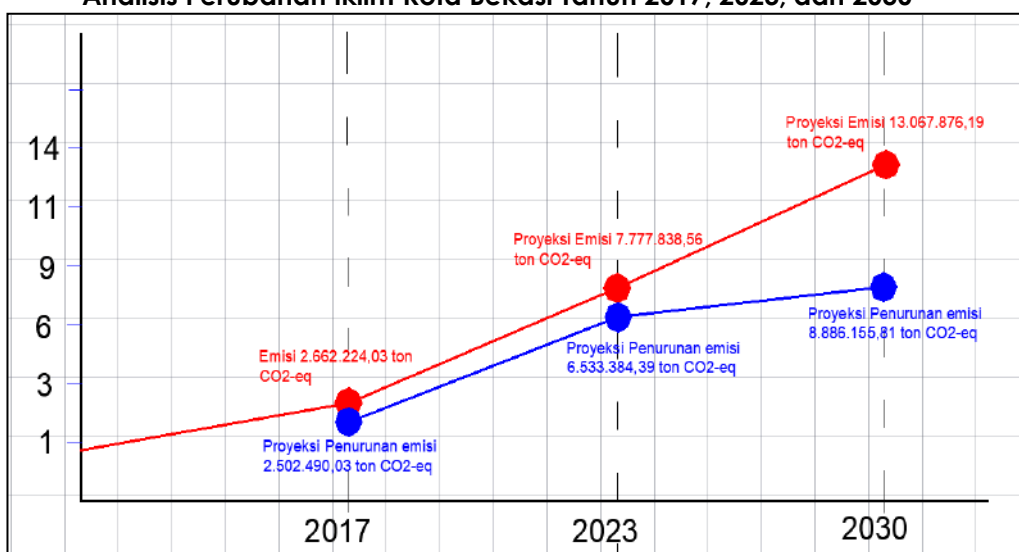
Emisi GRK pada tahun 2017 sebesar 2.662.222,03 GgCO₂ dan pada tahun 2023 jumlah emisi diperkirakan hasil proyeksi mencapai 7.777.838,56 ton GgCO₂ atau meningkat sekitar 11,41% dari emisi GRK tahun 2017. Lebih jelasnya mengenai kondisi emisi GRK dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 4.29
Analisis Perubahan Iklim Kota Bekasi Tahun 2017, 2023, dan 2030

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2023		Tahun 2030	
	Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan
Emisi GRK (BAU)	2.662.224,03	(Ton CO ₂ EQ) [*]	7.777.838,56	(Ton CO ₂ EQ) [*]	13.067.876,19	(Ton CO ₂ EQ) [*]
Persentase kenaikan emisi/tahun (BAU)	11,41	%	11,41	%	11,41	%
Target persentase penurunan emisi/tahun	6	%	16	%	32	%
Proyeksi penurunan GRK	2.502.490,59	(Ton CO ₂ EQ) [*]	6.533.384,39	(Ton CO ₂ EQ) [*]	8.886.155,81	(Ton CO ₂ EQ) [*]

Sumber: KLHS RPJM Kota Bekasi 2018-2023

Gambar 4.13
Analisis Perubahan Iklim Kota Bekasi Tahun 2017, 2023, dan 2030



Analisis kenaikan yang mencapai 7.777.838,56 ton CO₂eq pada tahun 2023 atau naik 11,41% pertahun perlu dikendalikan melalui upaya mitigasi sehingga dapat menurunkan 16%. Sehingga sampai dengan 2023 ditargetkan dapat diturunkan sebanyak 6.533.384,39 ton CO₂eq.

Sedangkan pada tahun 2030 Kota Bekasi telah menargetkan penurunan sebanyak 32% dari BAU pada tahun 2030. Hal ini sesuai dengan RAD-GRK Kota Bekasi beberapa strategi penurunan dapat dilakukan melalui:

- a. Mitigasi sektor ENERGI, melalui:
 - Pengembangan transportasi publik massal (BRT);
 - Peningkatan bauran energi terbarukan; dan
 - Manajemen transportasi untuk mengurangi kemacetan (ATCS dan manajemen parkir).
- b. Mitigasi sektor INDUSTRI melalui penerapan produksi bersih pada kegiatan industri.
- c. Mitigasi sektor LAHAN, melalui:
 - Peningkatan tutupan lahan;
 - Penghijauan kota;
 - Penerapan sistem pertanian rendah emisi (intermittent, organik, dan mina padi);
 - Pengelolaan limbah ternak (biogas dan pupuk organik); dan
 - Uji emisi secara berkala.
- d. Mitigasi sektor LIMBAH, melalui:
 - Pengelolaan sampah *sanitary landfill*;
 - Pengembangan bank sampah;
 - Rumah kompos;
 - Perbaikan sistem pengelolaan limbah rumah tangga dan industri pengelolaan sampah 3R baik pada tingkat sumber maupun tingkat TPA;
 - Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

4.2.3 Keterkaitan TPB dan DDDT-LH

Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDT-LH) dilakukan untuk mendapatkan gambaran indikatif potensi sumberdaya alam beserta jasa ekosistem yang terdapat dalam suatu wilayah, termasuk pembatas atas potensi sumberdaya alam dimaksud.

Selanjutnya, untuk melengkapi kajian tersebut, perlu tambahan data dan informasi yang terkait dengan kebutuhan konsumsi penduduk diwilayah tersebut yang mampu disediakan oleh potensi sumberdaya alamnya. Untuk dapat melakukan kajian DDDT-LH, maka dapat dilakukan dengan menyandingkan dalam satu tabel antara tabel Target dan Indikator TPB yang terkait dengan DDDT-LH dengan potensi, kebutuhan, dan pembatas DDDT-LH. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.30
Prioritas Target dan Indikator TPB Berdasarkan DDDT-LH

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT		DDDT-LH dan Jasa Ekosistem									
			DDT Air		DDT Pangan		Jasa Ekosistem Penyedia Pangan	Jasa Ekosistem Penyedia Air	Jasa Ekosistem Pengatur Air dan Banjir	Jasa Ekosistem Pengolahan dan Penguraian Limbah	Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana	
			Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting		Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting		Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	
			Luas + %	Setara Unit	Luas + %	Setara Unit	Luas + %	Luas + %	Luas + %	Luas + %	Luas + %	
TUJUAN 1 MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN												
	TARGET	1.2.	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional									
1	INDIKATOR	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Potensi Air tanah dan air Permukaan sebesar 3.485,65 lit/det	DD Potensi air tanah & Air Permukaan 0,32 (Defisit)	Luas Lahan Pertanian Lahan Basah sebesar 27 ha	DDL (Daya Dukung Lahan) untuk pangan) sebesar 0,0021 (defisit)	termasuk pada penyediaan pangan yang sangat rendah yaitu sebesar 121,09 km2 (57,5%)	termasuk Jasa Penyediaan air sangat rendah yaitu sebesar 147,29 km2 (70%)	Termasuk pada jasa ekosistem pengatur air dan banjir sangat rendah yaitu sebesar 121,09 km2 (57,5%)		
	TARGET	1.3.	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.									
2	INDIKATOR	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Target tidak terkait DDDT-LH								
3	INDIKATOR	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.									
4	INDIKATOR	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas									
5	INDIKATOR	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan									
	TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.									
6	INDIKATOR	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Potensi Air tanah dan air Permukaan sebesar 3.485,65 lit/det								
7	INDIKATOR	1.4.1.(b)	Persentase umur anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.									
8	INDIKATOR	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.									
9	INDIKATOR	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.									
10	INDIKATOR	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.									
11	INDIKATOR	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.									
12	INDIKATOR	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat									
13	INDIKATOR	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat									
14	INDIKATOR	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat									
15	INDIKATOR	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akte kelahiran									
16	INDIKATOR	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN maupun non PLN.							Termasuk pada jasa ekosistem pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana sangat rendah yaitu sebesar 115,28 km2 (54,8%)		
	TARGET	1.5.	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana									
17	INDIKATOR	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Potensi Air tanah dan air Permukaan sebesar 3.485,65 lit/det								
18	INDIKATOR	1.5.1 (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah									
19	INDIKATOR	1.5.1 (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial									
20	INDIKATOR	1.5.1 (c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial									
21	INDIKATOR	1.5.1 (d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus									
22	INDIKATOR	1.5.1 (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.									

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			DDDT-LH dan Jasa Ekosistem								
				DDT Air		DDT Pangan		Jasa Ekosistem Penyedia Pangan	Jasa Ekosistem Penyedia Air	Jasa Ekosistem Pengatur Air dan Banjir	Jasa Ekosistem Pengolahan dan Penguraian Limbah	Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana
				Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting		Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting		Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting
				Luas + %	Setara Unit	Luas + %	Setara Unit	Luas + %	Luas + %	Luas + %	Luas + %	Luas + %
23	INDIKATOR	1.5.2	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP Global.									
24	INDIKATOR	1.5.2 (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.									
25	INDIKATOR	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.									
TUJUAN 2 MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN												
	TARGET	2.1.	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.									
1	INDIKATOR	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).									
2	INDIKATOR	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.									
3	INDIKATOR	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.									
4	INDIKATOR	2.1.2 (a)	Prevalensi penduduk dengan asupan kalori minimum dibawah 1400 Kkal/kapita/hari.									
	TARGET	2.2.	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.									
5	INDIKATOR	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.									
6	INDIKATOR	2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.									
7	INDIKATOR	2.2.2 *	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe.									
8	INDIKATOR	2.2.2 (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.									
9	INDIKATOR	2.2.2 (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.									
10	INDIKATOR	2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.									
	TARGET	2.3.	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.									
11	INDIKATOR	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).			Luas Lahan Pertanian Lahan Basah sebesar 27 ha	DDL (Daya Dukung Lahan) untuk pangan sebesar 0,0021 (defisit)	termasuk pada penyediaan pangan yang sangat rendah yaitu sebesar 121,09 km2 (57,5%)				
TUJUAN 3 MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA												
	TARGET	3.1.	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.									
1	INDIKATOR	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)									
2	INDIKATOR	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.									
3	INDIKATOR	3.1.2 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.									
	TARGET	3.2.	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.									
4	INDIKATOR	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran anak.									
5	INDIKATOR	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.									
6	INDIKATOR	3.2.2 (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran anak.									
	TARGET	3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			DDDT-LH dan Jasa Ekosistem								
				DDT Air		DDT Pangan		Jasa Ekosistem Penyedia Pangan	Jasa Ekosistem Penyedia Air	Jasa Ekosistem Pengatur Air dan Banjir	Jasa Ekosistem Pengolahan dan Penguraian Limbah	Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana
				Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting		Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting		Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting
				Luas + %	Setara Unit	Luas + %	Setara Unit	Luas + %	Luas + %	Luas + %	Luas + %	Luas + %
7	INDIKATOR	3.3.1 (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.									
8	INDIKATOR	3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.									
9	INDIKATOR	3.3.3*	Kejadian malaria per 1000 orang.	Potensi Air tanah dan air Permukaan sebesar 3.485,65 lit/det	DD Potensi air tanah & Air Permukaan 0,32 (Defisit)				termasuk Jasa Penyediaan air sangat rendah yaitu sebesar 147,29 km2 (70%)		Termasuk pada jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah sangat rendah yaitu sebesar 121,09 km2 (57,5%)	Termasuk pada jasa ekosistem pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana sangat rendah yaitu sebesar 115,28 km2 (54,8%)
	TARGET	3.4.	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.									
10	INDIKATOR	3.4.1 (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Target tidak terkait DDDT-LH								
11	INDIKATOR	3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.									
12	INDIKATOR	3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.									
13	INDIKATOR	3.4.2*	Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.									
	TARGET	3.5.	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.									
14	INDIKATOR	3.5.1 (a)	Jumlah penyalahgunaan narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	Target tidak terkait DDDT-LH								
15	INDIKATOR	3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.									
16	INDIKATOR	3.5.1 (c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.									
17	INDIKATOR	3.5.1 (d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.									
18	INDIKATOR	3.5.1 (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.									
19	INDIKATOR	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.									
	TARGET	3.7.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi kedalam strategi dan program nasional.									
20	INDIKATOR	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Target tidak terkait DDDT-LH								
21	INDIKATOR	3.7.1 (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.									
22	INDIKATOR	3.7.1 (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.									
23	INDIKATOR	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>)									
24	INDIKATOR	3.7.2 (a)	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>									
	TARGET	3.8.	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan resiko keuangan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.									
25	INDIKATOR	3.8.1 (a)	Unmet need pelayanan kesehatan	Target tidak terkait DDDT-LH								
26	INDIKATOR	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.									
27	INDIKATOR	3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)									
	TARGET	3.9.	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.									
28	INDIKATOR	3.9.3 (a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Potensi Air tanah dan air Permukaan sebesar 3.485,65 lit/det	DD Potensi air tanah & Air Permukaan 0,32 (Defisit)				termasuk Jasa Penyediaan air sangat rendah yaitu sebesar 147,29 km2 (70%)	Termasuk pada jasa ekosistem pengatur air dan banjir sangat rendah yaitu sebesar 121,09 km2 (57,5%)	Termasuk pada jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah sangat rendah yaitu sebesar 121,09 km2 (57,5%)	Termasuk pada jasa ekosistem pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana sangat rendah yaitu

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			DDDT-LH dan Jasa Ekosistem								
				DDT Air		DDT Pangan		Jasa Ekosistem Penyedia Pangan	Jasa Ekosistem Penyedia Air	Jasa Ekosistem Pengatur Air dan Banjir	Jasa Ekosistem Pengolahan dan Penguraian Limbah	Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana
				Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting		Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting		Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting
				Luas + %	Setara Unit	Luas + %	Setara Unit	Luas + %	Luas + %	Luas + %	Luas + %	Luas + %
												sebesar 115,28 km ² (54,8%)
	TARGET	3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.									
29	INDIKATOR	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≤15 tahun.	Target tidak terkait DDDT-LH								
	TARGET	3.b	Mendukung penelitian pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya menyediakan akses obat bagi semua.									
30	INDIKATOR	3.b.1 (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Target tidak terkait DDDT-LH								
	TARGET	3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.									
31	INDIKATOR	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Target tidak terkait DDDT-LH								
TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA.												
	TARGET	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.									
1	INDIKATOR	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Target tidak terkait DDDT-LH								
2	INDIKATOR	4.1.1 (a)	Presentase SD/MI berakreditasi minimal B.									
3	INDIKATOR	4.1.1 (b)	Presentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.									
4	INDIKATOR	4.1.1 (c)	Presentase SMA/MA berakreditasi minimal B.									
5	INDIKATOR	4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat.									
6	INDIKATOR	4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat.									
7	INDIKATOR	4.1.1 (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat.									
	TARGET	4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.									
8	INDIKATOR	4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Target tidak terkait DDDT-LH								
	TARGET	4.3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.									
9	INDIKATOR	4.3.1 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat.	Target tidak terkait DDDT-LH								
10	INDIKATOR	4.3.1 (b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).									
	TARGET	4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.									
11	INDIKATOR	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Target tidak terkait DDDT-LH								
	TARGET	4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.									
12	INDIKATOR	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Target tidak terkait DDDT-LH								
	TARGET	4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.									
13	INDIKATOR	4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Target tidak terkait DDDT-LH								
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN												
	TARGET	5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.									
1	INDIKATOR	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Target tidak terkait DDDT-LH								
	TARGET	5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.									
2	INDIKATOR	5.2.1 (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Target tidak terkait DDDT-LH								
3	INDIKATOR	5.2.2 (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.									
	TARGET	5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.									

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			DDDT-LH dan Jasa Ekosistem								
				DDT Air		DDT Pangan		Jasa Ekosistem Penyedia Pangan	Jasa Ekosistem Penyedia Air	Jasa Ekosistem Pengatur Air dan Banjir	Jasa Ekosistem Pengolahan dan Penguraian Limbah	Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana
				Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting		Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting		Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting
				Luas + %	Setara Unit	Luas + %	Setara Unit	Luas + %	Luas + %	Luas + %	Luas + %	Luas + %
4	INDIKATOR	5.3.1 (a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Target tidak terkait DDDT-LH								
5	INDIKATOR	5.3.1 (b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>).									
6	INDIKATOR	5.3.1 (c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.									
	TARGET	5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.									
7	INDIKATOR	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Target tidak terkait DDDT-LH								
8	INDIKATOR	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.									
	TARGET	5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.									
9	INDIKATOR	5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Target tidak terkait DDDT-LH								
10	INDIKATOR	5.6.1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.									
11	INDIKATOR	5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.									
TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK YANG BERKELANJUTAN												
	TARGET	6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua									
1	INDIKATOR	6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Target tidak terkait DDDT-LH								
2	INDIKATOR	6.1.1 (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga perkotaan dan industri.									
3	INDIKATOR	6.1.1 (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.									
	TARGET	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.									
4	INDIKATOR	6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Potensi Air tanah dan air Permukaan sebesar 3.485,65 lit/det	DD Potensi air tanah & Air Permukaan 0,32 (Defisit)				termasuk Jasa Penyediaan air sangat rendah yaitu sebesar 147,29 km2 (70%)	Termasuk pada jasa ekosistem pengatur air dan banjir sangat rendah yaitu sebesar 121,09 km2 (57,5%)	Termasuk pada jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah sangat rendah yaitu sebesar 121,09 km2 (57,5%)	
5	INDIKATOR	6.2.1 (c)	Jumlah desa/kecamatan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).									
6	INDIKATOR	6.2.1 (d)	Jumlah desa/kecamatan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)									
			Persentase RW yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)									
6	INDIKATOR	6.2.1 (d)	Jumlah desa/kecamatan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).									
			Persentase RW yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).									
7	INDIKATOR	6.2.1 (f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.									
	TARGET	6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.									
8	INDIKATOR	6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Potensi Air tanah dan air Permukaan sebesar 3.485,65 lit/det	DD Potensi air tanah & Air Permukaan 0,32 (Defisit)				termasuk Jasa Penyediaan air sangat rendah yaitu sebesar 147,29 km2 (70%)	Termasuk pada jasa ekosistem pengatur air dan banjir sangat rendah yaitu sebesar 121,09 km2 (57,5%)	Termasuk pada jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah sangat rendah yaitu sebesar 121,09 km2 (57,5%)	
	TARGET	6,4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.									
9	INDIKATOR	6.4.1 (a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Potensi Air tanah dan air	DD Potensi air tanah & Air				termasuk Jasa Penyediaan air sangat rendah	Termasuk pada jasa ekosistem pengatur air dan		
10	INDIKATOR	6.4.1 (b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan									

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			DDDT-LH dan Jasa Ekosistem								
				DDT Air		DDT Pangan		Jasa Ekosistem Penyedia Pangan	Jasa Ekosistem Penyedia Air	Jasa Ekosistem Pengatur Air dan Banjir	Jasa Ekosistem Pengolahan dan Penguraian Limbah	Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana
				Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting		Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting		Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting
				Luas + %	Setara Unit	Luas + %	Setara Unit	Luas + %	Luas + %	Luas + %	Luas + %	Luas + %
			dan industri.	Permukaan sebesar 3.485,65 lit/det	Permukaan 0,32 (Defisit)				yaitu sebesar 147,29 km2 (70%)	banjir sangat rendah yaitu sebesar 121,09 km2 (57,5%)		
	TARGET	6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.									
11	INDIKATOR	6.5.1 (f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Potensi Air tanah dan air	DD Potensi air tanah & Air Permukaan sebesar 0,32 (Defisit)	Luas Lahan Pertanian Lahan Basah sebesar 27 ha	DDL (Daya Dukung Lahan) untuk pangan) sebesar 0,0021 (defisit)	termasuk pada penyediaan pangan yang sangat rendah yaitu sebesar 121,09 km2 (57,5%)	termasuk Jasa Penyediaan air sangat rendah yaitu sebesar 147,29 km2 (70%)	Termasuk pada jasa ekosistem pengatur air dan banjir sangat rendah yaitu sebesar 121,09 km2 (57,5%)		Termasuk pada jasa ekosistem pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana sangat rendah yaitu sebesar 115,28 km2 (54,8%)
12	INDIKATOR	6.5.1 (g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Potensi Air tanah dan air Permukaan sebesar 3.485,65 lit/det	DD Potensi air tanah & Air Permukaan sebesar 0,32 (Defisit)	Luas Lahan Pertanian Lahan Basah sebesar 27 ha	DDL (Daya Dukung Lahan) untuk pangan) sebesar 0,0021 (defisit)	termasuk pada penyediaan pangan yang sangat rendah yaitu sebesar 121,09 km2 (57,5%)	termasuk Jasa Penyediaan air sangat rendah yaitu sebesar 147,29 km2 (70%)	Termasuk pada jasa ekosistem pengatur air dan banjir sangat rendah yaitu sebesar 121,09 km2 (57,5%)		Termasuk pada jasa ekosistem pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana sangat rendah yaitu sebesar 115,28 km2 (54,8%)
TUJUAN 8 MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA												
	TARGET	8,1	Memperhatikan pertumbuhan ekonomi perkapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang									
1	INDIKATOR	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB perkapita	Target tidak terkait DDDT-LH								
2	INDIKATOR	8.1.1.(a)	PDB Perkapita	Target tidak terkait DDDT-LH								
	TARGET	8,3	Menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro kecil, dan menengah termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan									
3	INDIKATOR	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Target tidak terkait DDDT-LH								
4	INDIKATOR	8.3.1 (a)	Presentase tenaga kerja formal	Target tidak terkait DDDT-LH								
5	INDIKATOR	8.3.1 (b)	Presentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Target tidak terkait DDDT-LH								
6	INDIKATOR	8.3.1 (c)	Presentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke layanan Keuangan	Target tidak terkait DDDT-LH								
	TARGET	8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas dan upah yang sama untuk pekerja yang sama nilainya									
7	INDIKATOR	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (angka pengangguran terbuka)	Target tidak terkait DDDT-LH								
	TARGET	8,8	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan menjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya									
8	INDIKATOR	8.8.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Target tidak terkait DDDT-LH								
	TARGET	8,9	Pada tahun 2030 menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal									
9	INDIKATOR	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Target tidak terkait DDDT-LH								
10	INDIKATOR	8.9.1 (a)	Jumlah wisatawan manca negara (Jumlah kunjungan wisata)	Target tidak terkait DDDT-LH								
11	INDIKATOR	8.9.1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Target tidak terkait DDDT-LH								
12	INDIKATOR	8.9.1 ©	Jumlah devisa sektor pariwisata (PAD Sektor Pariwisata)	Target tidak terkait DDDT-LH								
13	INDIKATOR	8.9.2 *	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Target tidak terkait DDDT-LH								
	TARGET	8,1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua									
14	INDIKATOR	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Target tidak terkait DDDT-LH								
TUJUAN 9 MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELAJUTAN												
	TARGET	9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan pada tahun 2030 secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto sejalan dengan kondisi nasional dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang									
1	INDIKATOR	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Target tidak terkait DDDT-LH								
2	INDIKATOR	9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (Laju Pertumbuhan Ekonomi industri pengolahan)	Target tidak terkait DDDT-LH								
3	INDIKATOR	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Target tidak terkait DDDT-LH								
	TARGET	9,3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang terhadap jasa keuangan termasuk kredit terjangkau dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar									
4	INDIKATOR	9.3.1 (a)	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai	Target tidak terkait DDDT-LH								

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			DDDT-LH dan Jasa Ekosistem															
				DDT Air		DDT Pangan		Jasa Ekosistem Penyedia Pangan	Jasa Ekosistem Penyedia Air	Jasa Ekosistem Pengatur Air dan Banjir	Jasa Ekosistem Pengolahan dan Penguraian Limbah	Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana							
				Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting		Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting		Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting							
				Luas + %	Setara Unit	Luas + %	Setara Unit	Luas + %	Luas + %	Luas + %	Luas + %	Luas + %							
			tambah industri																
5	INDIKATOR	9.3.2 *	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit																
	TARGET	9,4	Pada tahun 2030 meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan yang dilaksanakan																
6	INDIKATOR	9.4.1*	Rasio emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Potensi Air tanah dan air Permukaan sebesar 3.485,65 lit/det	DD Potensi air tanah & Air Permukaan 0,32 (Defisit)	Luas Lahan Pertanian Lahan Basah sebesar 27 ha	DDL (Daya Dukung Lahan) untuk pangan) sebesar 0,0021 (defisit)	termasuk pada penyediaan pangan yang sangat rendah yaitu sebesar 121,09 km2 (57,5%)	termasuk Jasa Penyediaan air sangat rendah yaitu sebesar 147,29 km2 (70%)										
7	INDIKATOR	9.4.1 (a)	Persentase perubahan emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca																
TUJUAN 10 BERKURANNGNYA KESENJANGAN																			
	TARGET	10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional																
1	INDIKATOR	10.1.1*	Koefisien Gini.																
2	INDIKATOR	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.																
			Tingkat kemiskinan																
	TARGET	10,3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.																
3	INDIKATOR	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).																
4	INDIKATOR	10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.																
			presentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan																
	TARGET	10,4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.																
5	INDIKATOR	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.																
TUJUAN 11 MENJADI KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN																			
	TARGET	11,1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.																
1	INDIKATOR	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	Potensi Air tanah dan air Permukaan sebesar 3.485,65 lit/det	DD Potensi air tanah & Air Permukaan 0,32 (Defisit)														
2	INDIKATOR	11.1.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau																
	TARGET	11,2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi renta, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.																
3	INDIKATOR	11.2.1(a)	persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan																
			Presentase pelayanan angkutan umum yang baik, aman dan nyaman																
	TARGET	11,4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia																
4	INDIKATOR	11.4.1	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu,																

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			DDDT-LH dan Jasa Ekosistem								
				DDT Air		DDT Pangan		Jasa Ekosistem Penyedia Pangan	Jasa Ekosistem Penyedia Air	Jasa Ekosistem Pengatur Air dan Banjir	Jasa Ekosistem Pengolahan dan Penguraian Limbah	Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana
				Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting		Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting		Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting
				Luas + %	Setara Unit	Luas + %	Setara Unit	Luas + %	Luas + %	Luas + %	Luas + %	Luas + %
			destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor)									
TARGET	11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan perkapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota										
5	INDIKATOR	11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota									Termasuk pada jasa ekosistem pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana sangat rendah yaitu sebesar 115,28 km2 (54,8%)
6	INDIKATOR	11.6.1(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani									Termasuk pada jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah sangat rendah yaitu sebesar 121,09 km2 (57,5%)
TARGET	11.7	Pada tahun 2020, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas										
7	INDIKATOR	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)									Termasuk pada jasa ekosistem pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana sangat rendah yaitu sebesar 115,28 km2 (54,8%)
8	INDIKATOR	11.7.2(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan pada polisi									Termasuk pada jasa ekosistem pengaturan air dan banjir sangat rendah yaitu sebesar 121,09 km2 (57,5%)
TARGET	11.a	Mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan antara urban, pinggiran kota dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah										
9	INDIKATOR	11.a.1	Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya	Target tidak terkait DDDT-LH								
TARGET	11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasikan kebijaksanaan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan peanganan holistik resiko bencana di semua lini, sesuai dengan the sendai framework for disaster risk reduction 2015-2030										
10	INDIKATOR	11.b.1	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan resiko bencana	Potensi Air tanah dan air	DD Potensi air tanah & Air Permukaan	Luas Lahan Pertanian Lahan Basah sebesar 27 ha	DDL (Daya Dukung Lahan) untuk pangan) sebesar 0,0021 (defisit)	termasuk pada penyediaan pangan yang sangat rendah yaitu sebesar 121,09 km2 (57,5%)	termasuk Jasa Penyediaan air sangat rendah yaitu sebesar 147,29 km2 (70%)	Termasuk pada jasa ekosistem pengatur air dan banjir sangat rendah yaitu sebesar 121,09 km2 (57,5%)		Termasuk pada jasa ekosistem pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana sangat rendah yaitu sebesar 115,28 km2 (54,8%)
11	INDIKATOR	11.b.2	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat daerah	Permukaan sebesar 3.485,65 lit/det	0,32 (Defisit)							
			Cakupan dokumen penanggulangan bencana									
TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB												
TARGET	12.4.	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.										
1	INDIKATOR	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).									Termasuk pada jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah sangat rendah yaitu sebesar 121,09 km2 (57,5%)
			Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah pada dan B3									
TARGET	12.5.	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.										
2	INDIKATOR	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang									Termasuk pada jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah sangat rendah yaitu sebesar 121,09 km2
			Prosentase Pelayanan / Pengangkutan Sampah									

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT		DDDT-LH dan Jasa Ekosistem									
			DDT Air		DDT Pangan		Jasa Ekosistem Penyedia Pangan	Jasa Ekosistem Penyedia Air	Jasa Ekosistem Pengatur Air dan Banjir	Jasa Ekosistem Pengolahan dan Penguraian Limbah	Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana	
			Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting		Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting		Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	
			Luas + %	Setara Unit	Luas + %	Setara Unit	Luas + %	Luas + %	Luas + %	Luas + %	Luas + %	
	TARGET	12.6.	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.									
3	INDIKATOR	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Target tidak terkait DDDT-LH								
	TARGET	12.8.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.									
4	INDIKATOR	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Target tidak terkait DDDT-LH								
TUJUAN 13 PENANGGULANGAN PERUBAHAN IKLIM												
	TARGET	13.1.	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.									
1	INDIKATOR	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.							Termasuk pada jasa ekosistem pengatur air dan banjir sangat rendah yaitu sebesar 121,09 km ² (57,5%)	Termasuk pada jasa ekosistem pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana sangat rendah yaitu sebesar 115,28 km ² (54,8%)	
2	INDIKATOR	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.									
			Jumlah Korban Bencana Alam per 100.000 orang									
	TARGET	13.2.	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan daerah.									
3	INDIKATOR	13.2.1 (a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)							Termasuk pada jasa ekosistem pengatur air dan banjir sangat rendah yaitu sebesar 121,09 km ² (57,5%)	Termasuk pada jasa ekosistem pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana sangat rendah yaitu sebesar 115,28 km ² (54,8%)	
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN												
	TARGET	15.3	Pada tahun 2020, memulihkan lahan dan tanah kritis termasuk lahan yang terkena kekeringan dan banjir dan berusaha mencapai kota yang bebas dari lahan terdegradasi									
1	INDIKATOR	15.3 (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Potensi Air tanah dan air Permukaan sebesar 3.485,65 lit/det	DD Potensi air tanah & Air Permukaan 0,32 (Defisit)	Luas Lahan Pertanian Lahan Basah sebesar 27 ha	DDL (Daya Dukung Lahan) untuk pangan) sebesar 0,0021 (defisit)	termasuk pada penyediaan pangan yang sangat rendah yaitu sebesar 121,09 km ² (57,5%)	termasuk Jasa Penyediaan air sangat rendah yaitu sebesar 147,29 km ² (70%)	Termasuk pada jasa ekosistem pengatur air dan banjir sangat rendah yaitu sebesar 121,09 km ² (57,5%)	Termasuk pada jasa ekosistem pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana sangat rendah yaitu sebesar 115,28 km ² (54,8%)	
	TARGET	15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.									
2	INDIKATOR	15.9.1 (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati									
TUJUAN 16 PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH												
	TARGET	16.1.	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.									
1	INDIKATOR	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Target tidak terkait DDDT-LH								
2	INDIKATOR	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Target tidak terkait DDDT-LH								
3	INDIKATOR	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Target tidak terkait DDDT-LH								
	TARGET	16.2.	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.									
4	INDIKATOR	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Target tidak terkait DDDT-LH								
5	INDIKATOR	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Target tidak terkait DDDT-LH								
	TARGET	16.3.	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.									

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			DDDT-LH dan Jasa Ekosistem								
				DDT Air		DDT Pangan		Jasa Ekosistem Penyedia Pangan	Jasa Ekosistem Penyedia Air	Jasa Ekosistem Pengatur Air dan Banjir	Jasa Ekosistem Pengolahan dan Penguraian Limbah	Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana
				Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting		Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting		Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting
				Luas + %	Setara Unit	Luas + %	Setara Unit	Luas + %	Luas + %	Luas + %	Luas + %	Luas + %
6	INDIKATOR	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Target tidak terkait DDDT-LH								
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum									
			Angka Kriminalitas yang tertangani/jumlah penduduk									
7	INDIKATOR	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.									
	TARGET	16.5.	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.									
8	INDIKATOR	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Target tidak terkait DDDT-LH								
	TARGET	16.6.	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.									
9	INDIKATOR	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	Target tidak terkait DDDT-LH								
10	INDIKATOR	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).									
11	INDIKATOR	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.									
12	INDIKATOR	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).									
13	INDIKATOR	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).									
	TARGET	16.7.	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.									
14	INDIKATOR	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Target tidak terkait DDDT-LH								
15	INDIKATOR	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).									
16	INDIKATOR	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.									
17	INDIKATOR	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.									
18	INDIKATOR	16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.									
	TARGET	16.9.	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.									
19	INDIKATOR	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Target tidak terkait DDDT-LH								
20	INDIKATOR	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.									
			Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk									
21	INDIKATOR	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.									
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN												
	TARGET	17.1.	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.									
1	INDIKATOR	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Target tidak terkait DDDT-LH								
	TARGET	17.1.	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.									
2	INDIKATOR	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Target tidak terkait DDDT-LH								
	TARGET	17.6.	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.									
3	INDIKATOR	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Target tidak terkait DDDT-LH								

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			DDDT-LH dan Jasa Ekosistem								
				DDT Air		DDT Pangan		Jasa Ekosistem Penyedia Pangan	Jasa Ekosistem Penyedia Air	Jasa Ekosistem Pengatur Air dan Banjir	Jasa Ekosistem Pengolahan dan Penguraian Limbah	Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana
				Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting		Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting		Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting
				Luas + %	Setara Unit	Luas + %	Setara Unit	Luas + %	Luas + %	Luas + %	Luas + %	Luas + %
	TARGET	17.6.	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.									
4	INDIKATOR	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.									
	TARGET	17.8.	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.									
5	INDIKATOR	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Target tidak terkait DDDT-LH								
	TARGET	17.17.	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.									
6	INDIKATOR	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Target tidak terkait DDDT-LH								
	TARGET	17.17.	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.									
7	INDIKATOR	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Target tidak terkait DDDT-LH								
	TARGET	17.18.	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.									
8	INDIKATOR	17.18.1 (a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Target tidak terkait DDDT-LH								
9	INDIKATOR	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Target tidak terkait DDDT-LH								
	TARGET	17.19.	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.									
10	INDIKATOR	17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	Target tidak terkait DDDT-LH								
	TARGET	17.19.	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.									
11	INDIKATOR	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	Target tidak terkait DDDT-LH								
	TARGET	17.19.	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.									
12	INDIKATOR	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	Target tidak terkait DDDT-LH								
13	INDIKATOR	17.19.2 (d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)	Target tidak terkait DDDT-LH								

Lanjutan.....

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			DDDT-LH dan Jasa Ekosistem					Rekapitulasi dan Arahan (Dominasi, Prioritas/Penting, Lokasi)
				Jasa Ekosistem Pengatur Pemurnian Air	Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	Kemampuan Penyedia Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas)	
				Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	
TUJUAN 1 MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN									
	TARGET	1.2.	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional						
1	INDIKATOR	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		Termasuk pada Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara rendah 104,2 km ² (49,5 %)		Termasuk pada Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup sangat tinggi 120 km ² (57,1%)	1. Untuk mempertahankan dayadukung air agar tetap ideal/ tidak terus menurun beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penangkapan air melalui revitalisasi dan pembangunan embung/polder, Pemanenan air hujan (rain water harvesting), Sumur resapan dan biopori • Memenuhi kebutuhan air melalui kerjasama dengan daerah lain yang memiliki ketersediaan air • optimalisasi pemanfaatan air permukaan di seluruh Kota Bekasi. 2. Untuk menjaga ketersediaan pangan Kota Bekasi tetap ada meskipun tidak surplus maka beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> • Menjalin pola kerjasama dengan kabupaten yang memiliki daya dukung pangan surplus untuk pemenuhan kebutuhan pangan Kota Bekasi; • Pengembangan dan penerapan Urban Farming dengan pengembangan kampung hidroponik. • Mengoptimalkan fungsi RTH privat sebagai penghasil pangan; • Mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 	
	TARGET	1.3.	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.						
2	INDIKATOR	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Target tidak terkait DDDT-LH					
3	INDIKATOR	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.						
4	INDIKATOR	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas						
5	INDIKATOR	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan						
	TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.						
6	INDIKATOR	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirnya di fasilitas kesehatan.	Termasuk pada Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara rendah 104,2 km ² (49,5 %) Termasuk pada Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup sangat tinggi 120 km ² (57,1%)					
7	INDIKATOR	1.4.1.(b)	Persentase umur anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.						
8	INDIKATOR	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.						
9	INDIKATOR	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.						
10	INDIKATOR	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.						
11	INDIKATOR	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.						
12	INDIKATOR	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat						
13	INDIKATOR	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat						
14	INDIKATOR	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat						
15	INDIKATOR	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akte kelahiran						
16	INDIKATOR	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN maupun non PLN.						
	TARGET	1.5.	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana						
17	INDIKATOR	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Termasuk pada Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara rendah 104,2 km ² Termasuk pada Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim sangat rendah sebesar 121,09 km ² Termasuk pada Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup sangat tinggi 120 km ²					
18	INDIKATOR	1.5.1 (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah						
19	INDIKATOR	1.5.1 (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial						
20	INDIKATOR	1.5.1 (c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial						
21	INDIKATOR	1.5.1 (d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat						

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			DDDT-LH dan Jasa Ekosistem					Rekapitulasi dan Arahan (Dominasi, Prioritas/Penting, Lokasi)
				Jasa Ekosistem Pengatur Pemurnian Air	Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	Kemampuan Penyedia Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas)	
				Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	
				Luas + %	Luas + %	Luas + %	Luas + %	Luas + %	
			pendidikan layanan khusus						
22	INDIKATOR	1.5.1 (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.		km2 (49,5%)	(57,5%)	km2 (57,1%)		
23	INDIKATOR	1.5.2	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP Global.						
24	INDIKATOR	1.5.2 (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.						
25	INDIKATOR	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.						
TUJUAN 2 MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN									
	TARGET	2.1.	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.						
1	INDIKATOR	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).					termasuk kedalam kemampuan penyedia keanekaragaman hayati sangat rendah sebesar 147,29 ha (70%)	Untuk menjaga ketersediaan pangan Kota Bekasi tetap ada meskipun tidak surplus maka beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya: 1. Menjalin pola kerjasama dengan kabupaten yang memiliki daya dukung pangan surplus untuk pemenuhan kebutuhan pangan Kota Bekasi; 2. Pengembangan dan penerapan Urban Farming dengan pengembangan kampung hidroponik. 3. Mengoptimalkan fungsi RTH privat sebagai penghasil pangan; 4. Mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
2	INDIKATOR	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.						
3	INDIKATOR	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.						
4	INDIKATOR	2.1.2 (a)	Prevalensi penduduk dengan asupan kalori minimum dibawah 1400 Kkal/kapita/hari.						
	TARGET	2.2.	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.						
5	INDIKATOR	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.						Target tidak terkait DDDT-LH
6	INDIKATOR	2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.						
7	INDIKATOR	2.2.2 *	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe.						
8	INDIKATOR	2.2.2 (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.						
9	INDIKATOR	2.2.2 (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.						
10	INDIKATOR	2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.						
	TARGET	2.3.	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.						
11	INDIKATOR	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).					termasuk kedalam kemampuan penyedia keanekaragaman hayati sangat rendah sebesar 147,29 ha (70%)	Untuk menjaga ketersediaan pangan Kota Bekasi tetap ada meskipun tidak surplus maka beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya: 1. Menjalin pola kerjasama dengan kabupaten yang memiliki daya dukung pangan surplus untuk pemenuhan kebutuhan pangan Kota Bekasi; 2. Pengembangan dan penerapan Urban Farming dengan pengembangan kampung hidroponik. 3. Mengoptimalkan fungsi RTH privat sebagai penghasil pangan; 4. Mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
TUJUAN 3 MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA									
	TARGET	3.1.	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.						
1	INDIKATOR	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)						Target tidak terkait DDDT-LH
2	INDIKATOR	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.						
3	INDIKATOR	3.1.2 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.						
	TARGET	3.2.	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.						
4	INDIKATOR	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran anak.						Target tidak terkait DDDT-LH
5	INDIKATOR	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.						
6	INDIKATOR	3.2.2 (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran anak.						
	TARGET	3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.						
7	INDIKATOR	3.3.1 (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.						Untuk mempertahankan dayadukung air agar tetap ideal/ tidak terus menurun beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah: 1. Meningkatkan penangkapan air melalui revitalisasi dan pembangunan
8	INDIKATOR	3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Termasuk pada jasa ekosistem pengatur	Termasuk pada Jasa Ekosistem Pengaturan		Termasuk pada Jasa Ekosistem Budaya Tempat		
9	INDIKATOR	3.3.3*	Kejadian malaria per 1000 orang.						

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			DDDT-LH dan Jasa Ekosistem					Rekapitulasi dan Arahan (Dominasi, Prioritas/Penting, Lokasi)
				Jasa Ekosistem Pengatur Pemurnian Air	Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	Kemampuan Penyedia Kanekaragaman Hayati (Biodiversitas)	
				Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	
				Pemurnian Air rendah yaitu sebesar 114,95 km ² (54,6%)	Pemeliharaan Kualitas Udara rendah 104,2 km ² (49,5%)		Tinggal dan Ruang Hidup sangat tinggi 120 km ² (57,1%)		embung/polder, Pemanenan air hujan (rain water harvesting), Sumur resapan dan biopori 2. Memenuhi kebutuhan air melalui kerjasama dengan daerah lain yang memiliki ketersediaan air
	TARGET	3.4.	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.						
10	INDIKATOR	3.4.1 (a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Target tidak terkait DDDT-LH					
11	INDIKATOR	3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.						
12	INDIKATOR	3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.						
13	INDIKATOR	3.4.2*	Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.						
	TARGET	3.5.	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.						
14	INDIKATOR	3.5.1 (a)	Jumlah penyalahgunaan narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	Target tidak terkait DDDT-LH					
15	INDIKATOR	3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.						
16	INDIKATOR	3.5.1 (c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.						
17	INDIKATOR	3.5.1 (d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.						
18	INDIKATOR	3.5.1 (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.						
19	INDIKATOR	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.						
	TARGET	3.7.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi kedalam strategi dan program nasional.						
20	INDIKATOR	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Target tidak terkait DDDT-LH					
21	INDIKATOR	3.7.1 (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.						
22	INDIKATOR	3.7.1 (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.						
23	INDIKATOR	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>)						
24	INDIKATOR	3.7.2 (a)	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>						
	TARGET	3.8.	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan resiko keuangan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.						
25	INDIKATOR	3.8.1 (a)	Unmet need pelayanan kesehatan	Target tidak terkait DDDT-LH					
26	INDIKATOR	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.						
27	INDIKATOR	3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)						
	TARGET	3.9.	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.						
28	INDIKATOR	3.9.3 (a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Terdapat pada jasa ekosistem pengatur pemurnian air rendah yaitu sebesar 114,95 km ² (54,6%)	Terdapat pada Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara rendah 104,2 km ² (49,5%)	Terdapat pada Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim sangat rendah sebesar 121,09 km ² (57,5%)	Terdapat pada Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup sangat tinggi 120 km ² (57,1%)		Untuk mempertahankan dayadukung air agar tetap ideal/ tidak terus menurun beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah: 1. Meningkatkan penangkapan air melalui revitalisasi dan pembangunan embung/polder, Pemanenan air hujan (rain water harvesting), Sumur resapan dan biopori 2. Memenuhi kebutuhan air melalui kerjasama dengan daerah lain yang memiliki ketersediaan air Peningkatan kualitas air sungai agar layak dimanfaatkan sebagai sumber air baku
	TARGET	3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.						
29	INDIKATOR	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≤15 tahun.	Target tidak terkait DDDT-LH					
	TARGET	3.b	Mendukung penelitian pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya menyediakan akses obat bagi semua.						
30	INDIKATOR	3.b.1 (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.						
	TARGET	3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.						
31	INDIKATOR	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Target tidak terkait DDDT-LH					

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT	DDDT-LH dan Jasa Ekosistem					Rekapitulasi dan Arahan (Dominasi, Prioritas/Penting, Lokasi)
		Jasa Ekosistem Pengatur Pemurnian Air	Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	Kemampuan Penyedia Kanekaragaman Hayati (Biodiversitas)	
		Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	
TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA.							
	TARGET	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.				
1	INDIKATOR	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.				Target tidak terkait DDDT-LH
2	INDIKATOR	4.1.1 (a)	Presentase SD/MI berakreditasi minimal B.				
3	INDIKATOR	4.1.1 (b)	Presentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.				
4	INDIKATOR	4.1.1 (c)	Presentase SMA/MA berakreditasi minimal B.				
5	INDIKATOR	4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat.				
6	INDIKATOR	4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat.				
7	INDIKATOR	4.1.1 (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat.				
	TARGET	4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.				
8	INDIKATOR	4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).				Target tidak terkait DDDT-LH
	TARGET	4.3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.				
9	INDIKATOR	4.3.1 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat.				Target tidak terkait DDDT-LH
10	INDIKATOR	4.3.1 (b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).				
	TARGET	4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.				
11	INDIKATOR	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).				Target tidak terkait DDDT-LH
	TARGET	4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.				
12	INDIKATOR	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.				Target tidak terkait DDDT-LH
	TARGET	4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.				
13	INDIKATOR	4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.				Target tidak terkait DDDT-LH
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN							
	TARGET	5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.				
1	INDIKATOR	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.				Target tidak terkait DDDT-LH
	TARGET	5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.				
2	INDIKATOR	5.2.1 (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.				Target tidak terkait DDDT-LH
3	INDIKATOR	5.2.2 (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.				
	TARGET	5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.				
4	INDIKATOR	5.3.1 (a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.				Target tidak terkait DDDT-LH
5	INDIKATOR	5.3.1 (b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).				
6	INDIKATOR	5.3.1 (c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.				
	TARGET	5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.				
7	INDIKATOR	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen daerah dan pemerintah daerah.				Target tidak terkait DDDT-LH
8	INDIKATOR	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.				
	TARGET	5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.				
9	INDIKATOR	5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).				Target tidak terkait DDDT-LH
10	INDIKATOR	5.6.1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.				
11	INDIKATOR	5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan				

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			DDDT-LH dan Jasa Ekosistem					Rekapitulasi dan Arahan (Dominasi, Prioritas/Penting, Lokasi)
				Jasa Ekosistem Pengatur Pemurnian Air	Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	Kemampuan Penyedia Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas)	
				Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	
			reproduksi.						
TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK YANG BERKELAJUTAN									
	TARGET	6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua						
1	INDIKATOR	6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Target tidak terkait DDDT-LH					
2	INDIKATOR	6.1.1 (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga perkotaan dan industri.						
3	INDIKATOR	6.1.1 (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.						
	TARGET	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.						
4	INDIKATOR	6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.						Untuk mempertahankan dayadukung air agar tetap ideal/ tidak terus menurun beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah: 1. Meningkatkan penangkapan air melalui revitalisasi dan pembangunan embung/polder, Pemanenan air hujan (rain water harvesting), Sumur resapan dan biopori 2. Memenuhi kebutuhan air melalui kerjasama dengan daerah lain yang memiliki ketersediaan air 3. Peningkatan kualitas air sungai agar layak dimanfaatkan sebagai sumber air baku
5	INDIKATOR	6.2.1 (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).						
			Persentase RW yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)						
6	INDIKATOR	6.2.1 (d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).						
			Persentase RW yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).						
7	INDIKATOR	6.2.1 (f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.						
	TARGET	6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.						
8	INDIKATOR	6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.				Termasuk pada Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup sangat tinggi 120 km2 (57,1%)		Untuk mempertahankan dayadukung air agar tetap ideal/ tidak terus menurun beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah: 1. Meningkatkan penangkapan air melalui revitalisasi dan pembangunan embung/polder, Pemanenan air hujan (rain water harvesting), Sumur resapan dan biopori 2. Memenuhi kebutuhan air melalui kerjasama dengan daerah lain yang memiliki ketersediaan air 3. Peningkatan kualitas air sungai agar layak dimanfaatkan sebagai sumber air baku
	TARGET	6,4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.						
9	INDIKATOR	6.4.1 (a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.				Termasuk pada Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup sangat tinggi 120 km2 (57,1%)		Untuk mempertahankan dayadukung air agar tetap ideal/ tidak terus menurun beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah: 1. Meningkatkan penangkapan air melalui revitalisasi dan pembangunan embung/polder, Pemanenan air hujan (rain water harvesting), Sumur resapan dan biopori 2. Memenuhi kebutuhan air melalui kerjasama dengan daerah lain yang memiliki ketersediaan air 3. Peningkatan kualitas air sungai agar layak dimanfaatkan sebagai sumber air baku
10	INDIKATOR	6.4.1 (b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.						
	TARGET	6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.						
11	INDIKATOR	6.5.1 (f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Termasuk pada jasa ekosistem pengatur Pemurnian Air rendah yaitu sebesar 114,95 km2 (54,6%)	Termasuk pada Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim sangat rendah sebesar 121,09 km2 (57,5%)	Termasuk pada Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup sangat tinggi 120 km2 (57,1%)	termasuk kedalam kemampuan penyedia keanekaragaman hayati sangat rendah sebesar 147,29 ha (70%)		Untuk mempertahankan dayadukung air agar tetap ideal/ tidak terus menurun beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah: 1. Meningkatkan penangkapan air melalui revitalisasi dan pembangunan embung/polder, Pemanenan air hujan (rain water harvesting), Sumur resapan dan biopori 2. Memenuhi kebutuhan air melalui kerjasama dengan daerah lain yang memiliki ketersediaan air 3. Peningkatan kualitas air sungai agar layak dimanfaatkan sebagai sumber air bakudimanfaatkan sebagai sumber air baku
12	INDIKATOR	6.5.1 (g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.						
TUJUAN 8 MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELAJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA									
	TARGET	8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi perkapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang						

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			DDDT-LH dan Jasa Ekosistem					Rekapitulasi dan Arahan (Dominasi, Prioritas/Penting, Lokasi)
				Jasa Ekosistem Pengatur Pemurnian Air	Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	Kemampuan Penyedia Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas)	
				Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	
1	INDIKATOR	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB perkapita	Target tidak terkait DDDT-LH					
2	INDIKATOR	8.1.1.(a)	PDB Perkapita						
	TARGET	8,3	Menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro kecil, dan menengah termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan						
3	INDIKATOR	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informas sektor non pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Target tidak terkait DDDT-LH					
4	INDIKATOR	8.3.1 (a)	Presentase tenaga kerja formal						
5	INDIKATOR	8.3.1 (b)	Presentase tenaga kerja informal sektor pertanian						
6	INDIKATOR	8.3.1 (c)	Presentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke layanan Keuangan						
	TARGET	8,5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas dan upah yang sama untuk pekerja yang sama nilainya						
7	INDIKATOR	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (angka pengangguran terbuka)	Target tidak terkait DDDT-LH					
	TARGET	8,8	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan menjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya						
8	INDIKATOR	8.8.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Target tidak terkait DDDT-LH					
	TARGET	8,9	Pada tahun 2030 menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal						
9	INDIKATOR	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Target tidak terkait DDDT-LH					pengembangan hunian dan bangunan diarahkan secara vertikal
10	INDIKATOR	8.9.1 (a)	Jumlah wisatawan manca negara (Jumlah kunjungan wisata)						
11	INDIKATOR	8.9.1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara						
12	INDIKATOR	8.9.1 ©	Jumlah devisa sektor pariwisata (PAD Sektor Pariwisata)						
13	INDIKATOR	8.9.2 *	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Termasuk pada Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup sangat tinggi 120 km2 (57,1%)					
	TARGET	8,1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua						
14	INDIKATOR	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Target tidak terkait DDDT-LH					
TUJUAN 9 MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELAJUTAN									
	TARGET	9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan pada tahun 2030 secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto sejalan dengan kondisi nasional dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang						
1	INDIKATOR	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Target tidak terkait DDDT-LH					
2	INDIKATOR	9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (Laju Pertumbuhan Ekonomi indstri pengolahan)						
3	INDIKATOR	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur						
	TARGET	9,3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang terhadap jasa keuangan termasuk kredit terjangkau dan mngintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar						
4	INDIKATOR	9.3.1 (a)	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Target tidak terkait DDDT-LH					
5	INDIKATOR	9.3.2 *	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit						
	TARGET	9,4	Pada tahun 2030 meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan yang dilaksanakan						
6	INDIKATOR	9.4.1*	Rasio emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Target tidak terkait DDDT-LH					1. Untuk mempertahankan dayadukung air agar tetap ideal/ tidak terus menurun beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah: <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penangkapan air melalui revitalisasi dan pembangunan embung/polder, Pemanenan air hujan (rain water harvesting), Sumur resapan dan biopori Memenuhi kebutuhan air melalui kerjasama dengan daerah lain yang memiliki ketersediaan air optimalisasi pemanfaatan air permukaan. 2. Untuk menjaga ketersediaan pangan Kota Bekasi tetap ada meskipun tidak surplus maka beberapa upaya yang dapat di lakukan diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> Menjalin pola kerjasama dengan kabupaten yang memiliki daya dukung pangan surplus untuk pemenuhan kebutuhan pangan Kota Bekasi; Pengembangan dan penerapan Urban Farming dengan pengembangan kampung hidroponik. Mengoptimalkan fungsi RTH privat sebagai penghasil pangan; Mempertahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan pengembangan kampung hidroponik
7	INDIKATOR	9.4.1 (a)	Persentase perubahan emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca						
TUJUAN 10 BERKURANNGNYA KESENJANGAN									

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			DDDT-LH dan Jasa Ekosistem					Rekapitulasi dan Arahan (Dominasi, Prioritas/Penting, Lokasi)
				Jasa Ekosistem Pengatur Pemurnian Air	Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	Kemampuan Penyedia Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas)	
				Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	
TARGET	10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional							
1	INDIKATOR	10.1.1*	Koefisien Gini.		Target tidak terkait DDDT-LH				
2	INDIKATOR	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.						
			Tingkat kemiskinan						
TARGET	10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.							
3	INDIKATOR	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).		Target tidak terkait DDDT-LH				
4	INDIKATOR	10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.						
			presentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan						
TARGET	10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.							
5	INDIKATOR	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.		Target tidak terkait DDDT-LH				
TUJUAN 11 MENJADI KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN									
TARGET	11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.							
1	INDIKATOR	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.		Termasuk pada Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara rendah 104,2 km ² (49,5%)		Termasuk pada Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup sangat tinggi 120 km ² (57,1%)		Untuk mempertahankan daya dukung air agar tetap ideal/ tidak terus menurun beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah: 1. Meningkatkan penangkapan air melalui revitalisasi dan pembangunan embung/polder, Pemanenan air hujan (rain water harvesting), Sumur resapan dan biopori 2. Memenuhi kebutuhan air melalui kerjasama dengan daerah lain yang memiliki ketersediaan air 3. Peningkatan kualitas air sungai agar layak dimanfaatkan sebagai sumber air baku
2	INDIKATOR	11.1.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau						
TARGET	11.2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi renta, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.							
3	INDIKATOR	11.2.1(a)	persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan		Termasuk pada Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim sangat rendah sebesar 121,09 km ² (57,5%)		Termasuk pada Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup sangat tinggi 120 km ² (57,1%)		Perlu upaya-upaya untuk agar kondisi jasa ekosistem pengatur iklim dan kualitas udara tidak terus menurun diantaranya yaitu: 1. Pengembangan RTH Publik dan RTH Privat; 2. Mempertahankan keberadaan RTH yang berfungsi lindung 3. Mengembangkan Rooftop Garden pada bangunan 4. mengerahkan pengembangan hunian/bangunan secara vertikal 5. pembangunan embung/folder 6. penataan dan pembangunan drainase yang terintegrasi dengan penanggulangan banjir
			Presentase pelayanan angkutan umum yang baik, aman dan nyaman						
TARGET	11.4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia							
4	INDIKATOR	11.4.1	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor)		Termasuk pada Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup sangat tinggi 120 km ² (57,1%)		termasuk kedalam kemampuan penyedia keanekaragaman hayati sangat rendah sebesar 147,29 ha (70%)		pengembangan hunian dan bangunan diarahkan secara vertikal dan keberadaan hutan Kota Dan RTH sebaiknya tetap di pertahankan
TARGET	11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan perkapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota							
5	INDIKATOR	11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota		Termasuk pada jasa ekosistem pengatur Pemurnian Air rendah yaitu sebesar 114,95 km ² (54,6%)		Termasuk pada Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup sangat tinggi 120 km ² (57,1%)		Perlu upaya-upaya untuk agar kondisi jasa ekosistem pengatur iklim dan kualitas udara tidak terus menurun diantaranya yaitu: 1. Pengembangan RTH Publik dan RTH Privat; 2. Mempertahankan keberadaan RTH yang berfungsi lindung 3. Mengembangkan Rooftop Garden pada bangunan 4. mengerahkan pengembangan hunian/bangunan secara vertikal 5. pembangunan embung/folder 6. penataan dan pembangunan drainase yang terintegrasi dengan penanggulangan banjir
6	INDIKATOR	11.6.1(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani						

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT		DDDT-LH dan Jasa Ekosistem					Rekapitulasi dan Arahan (Dominasi, Prioritas/Penting, Lokasi)		
			Jasa Ekosistem Pengatur Pemurnian Air	Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	Kemampuan Penyedia Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas)			
			Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting			
			Luas + %	Luas + %	Luas + %	Luas + %	Luas + %			
	TARGET	11.7	Pada tahun 2020, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas							
7	INDIKATOR	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)				Termasuk pada Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim sangat rendah sebesar 121,09 km2 (57,5%)	Termasuk pada Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup sangat tinggi 120 km2 (57,1%)	termasuk kedalam kemampuan penyedia keanekaragaman hayati sangat rendah sebesar 147,29 ha (70%)	Perlu upaya-upaya untuk agar kondisi jasa ekosistem pengatur iklim dan kualitas udara tidak terus menurun diantaranya yaitu: 1. Pengembangan RTH Publik dan RTH Privat; 2. Mempertahankan keberadaan RTH yang berfungsi lindung 3. Mengembangkan Rooop Garden pada bangunan 4. mengerahkan pengembangan hunian/bangunan secara vertikal 5. pembangunan embung/folder 6. penataan dan pembangunan drainase yang terintegrasi dengan penanggulangan banjir
8	INDIKATOR	11.7.2(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan pada polisi							
	TARGET	11.a	Mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan antara urban, pinggiran kota dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah							
9	INDIKATOR	11.a.1	Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya		Target tidak terkait DDDT-LH					
	TARGET	11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasikan kebijaksanaan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan peanganan holistik resiko bencana di semua lini, sesuai dengan the sendai framework for disaster risk reduction 2015-2030							
10	INDIKATOR	11.b.1	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan resiko bencana						1. Untuk mempertahankan dayadukung air agar tetap ideal/ tidak terus menurun beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah: • Meningkatkan penangkapan air melalui revitalisasi dan pembangunan embung/polder, Pemanenan air hujan (rain water harvesting), Sumur resapan dan biopori • Memenuhi kebutuhan air melalui kerjasama dengan daerah lain yang memiliki ketersediaan air • optimalisasi pemanfaatan air permukaan. 2. Untuk menjaga ketersediaan pangan Kota Bekasi tetap ada meskipun tidak surplus maka beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya: • Menjalin pola kerjasama dengan kabupaten yang memiliki daya dukung pangan surplus untuk pemenuhan kebutuhan pangan Kota Bekasi; • Pengembangan dan penerapan Urban Farming dengan pengembangan kampung hidroponik. • Mengoptimalkan fungsi RTH privat sebagai penghasil pangan; • Mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan pengembangan kampung hidroponik	
11	INDIKATOR	11.b.2	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat daerah							
			Cakupan dokumen penanggulangan bencana				Termasuk pada Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim sangat rendah sebesar 121,09 km2 (57,5%)	Termasuk pada Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup sangat tinggi 120 km2 (57,1%)	termasuk kedalam kemampuan penyedia keanekaragaman hayati sangat rendah sebesar 147,29 ha (70%)	
TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB										
	TARGET	12.4.	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.							
1	INDIKATOR	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).		Termasuk pada jasa ekosistem pengatur Pemurnian Air rendah yaitu sebesar 114,95 km2 (54,6%)	Termasuk pada Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara rendah 104,2 km2 (49,5%)				
			Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah pada dan B3							
	TARGET	12.5.	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.							
2	INDIKATOR	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang		Termasuk pada jasa ekosistem pengatur Pemurnian Air rendah yaitu sebesar 114,95 km2 (54,6%)	Termasuk pada Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara rendah 104,2 km2 (49,5%)				
			Prosentase Pelayanan / Pengangkutan Sampah							
	TARGET	12.6.	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.							
3		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.		Target tidak terkait DDDT-LH					
	TARGET	12.8.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.							
4	INDIKATOR	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.		Target tidak terkait DDDT-LH					
TUJUAN 13 PENANGGULANGAN PERUBAHAN IKLIM										

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			DDDT-LH dan Jasa Ekosistem					Rekapitulasi dan Arahan (Dominasi, Prioritas/Penting, Lokasi)
				Jasa Ekosistem Pengatur Pemurnian Air	Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	Kemampuan Penyedia Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas)	
				Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	
	TARGET	13.1.	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.						
1	INDIKATOR	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.						Perlu upaya-upaya untuk agar kondisi jasa ekosistem pengatur iklim dan kualitas udara tidak terus menurun diantaranya yaitu: 1. Pengembangan RTH Publik dan RTH Privat; 2. Mempertahankan keberadaan RTH yang berfungsi lindung 3. Mengembangkan Rooop Garden pada bangunan 4. mengerahkan pengembangan hunian/bangunan secara vertikal 5. pembangunan embung/folder 6. penataan dan pembangunan drainase yang terintegrasi dengan penanggulangan banjir
			Penanganan bencana alam						
2	INDIKATOR	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.						
			Jumlah Korban Bencana Alam per 100.000 orang			Termasuk pada Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim sangat rendah sebesar 121,09 km2 (57,5%)			
	TARGET	13.2.	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan daerah.						
3	INDIKATOR	13.2.1 (a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)						
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN									
	TARGET	15.3	Pada tahun 2020, memulihkan lahan dan tanah kritis termasuk lahan yang terkena kekeringan dan banjir dan berusaha mencapai kota yang bebas dari lahan terdegradasi						
1	INDIKATOR	15.3 (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan			Termasuk pada Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim sangat rendah sebesar 121,09 km2 (57,5%)		termasuk kedalam kemampuan penyedia keanekaragaman hayati sangat rendah sebesar 147,29 ha (70%)	Perlu upaya-upaya untuk agar kondisi jasa ekosistem pengatur iklim dan kualitas udara tidak terus menurun diantaranya yaitu: 1. Pengembangan RTH Publik dan RTH Privat; 2. Mempertahankan keberadaan RTH yang berfungsi lindung 3. Mengembangkan Rooop Garden pada bangunan 4. mengerahkan pengembangan hunian/bangunan secara vertikal 5. pembangunan embung/folder 6. penataan dan pembangunan drainase yang terintegrasi dengan penanggulangan banjir
	TARGET	15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.						
2	INDIKATOR	15.9.1 (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati			Termasuk pada Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim sangat rendah sebesar 121,09 km2 (57,5%)		termasuk kedalam kemampuan penyedia keanekaragaman hayati sangat rendah sebesar 147,29 ha (70%)	Perlu upaya-upaya untuk agar kondisi jasa ekosistem pengatur iklim dan kualitas udara tidak terus menurun diantaranya yaitu: 1. Pengembangan RTH Publik dan RTH Privat; 2. Mempertahankan keberadaan RTH yang berfungsi lindung 3. Mengembangkan Rooop Garden pada bangunan 4. mengerahkan pengembangan hunian/bangunan secara vertikal 5. pembangunan embung/folder 6. penataan dan pembangunan drainase yang terintegrasi dengan penanggulangan banjir
TUJUAN 16 PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH									
	TARGET	16.1.	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.						
1	INDIKATOR	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.						Target tidak terkait DDDT-LH
2	INDIKATOR	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.						
3	INDIKATOR	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.						
	TARGET	16.2.	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.						
4	INDIKATOR	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.						Target tidak terkait DDDT-LH
5	INDIKATOR	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.						
	TARGET	16.3.	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.						
6	INDIKATOR	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.						Target tidak terkait DDDT-LH
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum						
7	INDIKATOR	16.3.1.(b)	Angka Kriminalitas yang tertangani/jumlah penduduk Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.						
	TARGET	16.5.	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.						
8	INDIKATOR	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).						Target tidak terkait DDDT-LH
	TARGET	16.6.	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.						
9	INDIKATOR	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)						Target tidak terkait DDDT-LH

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			DDDT-LH dan Jasa Ekosistem					Rekapitulasi dan Arahan (Dominasi, Prioritas/Penting, Lokasi)
				Jasa Ekosistem Pengatur Pemurnian Air	Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	Kemampuan Penyedia Kanekaragaman Hayati (Biodiversitas)	
				Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting Luas + %	
			atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).						
10	INDIKATOR	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).						
11	INDIKATOR	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.						
12	INDIKATOR	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).						
13	INDIKATOR	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).						
	TARGET	16.7.	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.						
14	INDIKATOR	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).						
15	INDIKATOR	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).						
16	INDIKATOR	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.						
17	INDIKATOR	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.						
18	INDIKATOR	16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.						
	TARGET	16.9.	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.						
19	INDIKATOR	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.						
20	INDIKATOR	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.						
			Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk						
21	INDIKATOR	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.						
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN									
	TARGET	17.1.	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.						
1	INDIKATOR	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.						
	TARGET	17.1.	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.						
2	INDIKATOR	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.						
	TARGET	17.6.	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.						
3	INDIKATOR	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.						
	TARGET	17.6.	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.						
4	INDIKATOR	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.						
	TARGET	17.8.	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.						
5	INDIKATOR	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.						
	TARGET	17.17.	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.						
6	INDIKATOR	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).						
	TARGET	17.17.	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.						
7	INDIKATOR	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).						

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT		DDDT-LH dan Jasa Ekosistem					Rekapitulasi dan Arahan (Dominasi, Prioritas/Penting, Lokasi)
			Jasa Ekosistem Pengatur Pemurnian Air	Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	Kemampuan Penyedia Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas)	
			Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	Potensi Pembatasan/ Ketersediaan Penting	
TARGET	17.18.	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.						
8	INDIKATOR	17.18.1 (a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Target tidak terkait DDDT-LH				
9	INDIKATOR	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.					
	TARGET	17.19.	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.					
10	INDIKATOR	17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.	Target tidak terkait DDDT-LH				
	TARGET	17.19.	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.					
11	INDIKATOR	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	Target tidak terkait DDDT-LH				
	TARGET	17.19.	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.					
12	INDIKATOR	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	Target tidak terkait DDDT-LH				
13	INDIKATOR	17.19.2 (d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)					

Sumber: Hasil Analisis, dan Uji Publik tahun 2020

4.3 PERUMUSAN ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN STRATEGIS

Perumusan isu strategis yaitu identifikasi isu pembangunan berkelanjutan, dalam penyusunan KLHS perubahan RPJMD kota Bekasi perumusan isu strategis mengacu pada pasal 11, pasal 16, pasal 18 Permendagri No 7 tahun 2018 dan pasal 7 s/d pasal 9 PP 46 tahun 2016. Secara garis besar Identifikasi dan Analisis Isu Strategis TPB dilakukan dalam dua tahap, yaitu (1) Identifikasi isu strategis TPB, dan (2) analisis prioritas isu TPB.

a. Melaksanakan Identifikasi Dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan

- Mengumpulkan isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan analisis capaian indikator TPB, data sekunder atas isu yang terdapat dalam KLHS RTRW Kota Bekasi, KLHS RPJM yang disusun tahun 2018, isu strategis perubahan RPJMD, dan curah pendapat tim POKJA KLHS.
- Melakukan pemusatan isu dengan melihat kesamaan substansi dan/atau menelaah sebab-akibat dengan memperhatikan: (1) isu lintas sektor; (2) isu lintas wilayah; (3) isu lintas pemangku kepentingan. Selain itu juga dilakukan konsultasi dengan tim pokja KLHS dan pemangku kepentingan untuk pengayaan dan penajaman isu pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan pada saat Uji Publik I. Selanjutnya melakukan konfirmasi dari data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan metode pengisian Checklist.

b. Analisis Perumusan Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

Hasil identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan sebagai mana dilakukan pada tahap sebelumnya, selanjutnya dianalisis untuk menentukan isu prioritas berdasarkan pertimbangan (sebagian dari) PP No. 46 Tahun 2016 pasal 9 ayat 2, yaitu :

- kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
- perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
- kinerja layanan atau jasa ekosistem;
- intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;
- status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
- ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
- kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
- risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau

untuk menentukan isu-isu yang paling strategis (prioritas) maka di buatlah matrik sanding antara isu strategis PB Kota Bekasi dengan kondisi D3TLH Yang termuat pada pasal 9 untuk dilakukan penilaian/pembobotan, dari hasil penilaian/pembobotan diperoleh daftar urutan nilai Isu PB Prioritas dari yang tertinggi sampai yang terendah, dan terumuskannya Isu PB Prioritas, setelah Isu PB Prioritas di setuju oleh tim pokja maka maka di lakukan Uji Publik untuk mensosialisasikan Isu PB Prioritas agar mendapat masukan dan kesepakatan dari berbagai pemengku kepentingan.

4.3.1 Identifikasi Dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan

Pendekatan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan KLHS perubahan RPJMD Kota Bekasi akan di dasarkan pada:

- a. Identifikasi Isu strategis berdasarkan hasil analisis capaian Indikator Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dan
- b. Identifikasi Isu-isu strategis Kota Bekasi yang di dapat dari hasil kajian literatur (KLHS RTRW Kota Bekasi, KLHS RPJMD Tahun 2018, Dokumen Rancangan Perubahan RPJMD), hasil FGD dan hasil uji public.

4.3.1.1 Identifikasi Isu Strategis Berdasarkan Hasil Analisis Capaian Indikator TPB

Rumusan isu strategis merupakan capaian TPB dalam kelompok yang belum mencapai target (SB), memiliki data tetapi belum menjadi target dalam RPJMD (TT) dan yang belum memiliki data (NA). Selain ketiga kelompok hasil capaian TPB, isu strategis juga dikaitkan dengan kondisi dan perubahan 6 muatan lingkungan hidup dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang meliputi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, risiko lingkungan hidup, sumber daya alam, kerentanan dan adaptasi perubahan iklim, emisi gas rumah kaca dan kemampuan penyediaan lingkungan hidup.

Secara umum strategi terhadap capaian TPB untuk masing-masing kelompok adalah sebagai berikut:

- a. Indikator yang telah ada dalam RPJMD tetapi belum mencapai target adalah mendorong pencapaian indikator tersebut agar dapat mencapai target nasional;
- b. Indikator yang memiliki data tetapi belum ada dalam target RPJMD dan belum mencapai target nasional;
- c. Indikator yang belum memiliki data dan ada target yang ditetapkan secara nasional.

Sedangkan untuk indikator TPB yang telah ada dalam RPJMD dan telah mencapai target maka perlu untuk tetap dipertahankan kinerja agar tidak turun. Berdasarkan analisis terhadap masing-masing capaian TPB dan kondisi lingkungan hidup Kota Bekasi, berikut adalah rumusan isu strategis berdasarkan capaian TPB yang dibagi dalam empat pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola kelembagaan.

a. Identifikasi Isu Berkelanjutan Pilar Pembangunan Sosial

Pilar pembangunan sosial mencakup lima tujuan berkelanjutan, yaitu tujuan 1 mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun; Tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; Tujuan 4 menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat; dan Tujuan 5 mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Dikaitkan dengan kondisi lingkungan hidup, maka yang termasuk dalam pilar sosial ini antara lain kondisi daya dukung pangan yang terkait dengan lahan

kawasan pertanian sertatingkat kerentanan dan adaptasi perubahan iklim. Berikut adalah rumusan isu strategis indikator TPB pilar sosial Kota Bekasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.31
Isu Berkelanjutan Pilar Pembangunan Sosial

TPB Pilar Pembangunan Sosial	Isu Strategis Dari Target TPB Belum Tercapai , Belum di laksanakan dan belum ada data
Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. • Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan • Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. • Penanganan kawasan kumuh • Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat belum mencapai target nasional • penguatan dan pengurangan resiko bencana
Tujuan 2: menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. • Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan; • Kualitas konsumsi pangan (skor pola panganharapan) dan tingkat konsumsi ikan yang masih rendah
Tujuan 3 Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	<ul style="list-style-type: none"> • proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih baru mencapai 88%.
	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kematian balita dan kematian balita per1000 kelahiran anak masih di atas target nasioal (1,1 tahun 2017)
	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. • Prevalensi penyalahgunaan narkoba. • Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan • Proporsi kematian akibat keracunan.
Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua.	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase SD/M, SMP/MTS, SMA/SMK atau sedereajat yang berakreditasi minimal B. belum mencapai target nasional • Pemerataan akses dan partisipasi pendidikan masih belum optimal, tergambar dari nilai APK SMA/SMK/MA/ sederajat yang belum mencapai target nasional • Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). • Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. • Pengetahuan dan pemahaman Pasangan UsiaSubur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. • Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. • Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun

Sumber: Hasil Analisis, dan Uji Publik tahun 2020

b. Identifikasi Isu Berkelanjutan Pilar Pembangunan Ekonomi

Pilar pembangunan ekonomi mencakup lima tujuan berkelanjutan, yaitu Tujuan 8 meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif danb erkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjayang layak untuk semua; Tujuan 9 membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan

industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi; dan Tujuan 10 mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Untuk lebih jelasnya mengenai isu pembangunan berkelanjutan Pilar Ekonomi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.32
Isu Berkelanjutan Pilar Pembangunan Ekonomi

TPB Pilar Pembangunan Ekonomi	Isu Strategis Dari Target TPB Belum Tercapai , Belum di laksanakan dan belum ada data
Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	• Kenaikan laju pertumbuhan PDRB dan total PDRB per kapita belum sesuai dengan target nasional
	• Proporsi lapangan kerja informal
	• Presentase tenaga kerja formal
	• Pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (angka pengangguran terbuka)
	• Perusahaan yang menerapkan norma K3
	• Wisatawan manca negara (Jumlah kunjungan wisata)
	• Devisa sektor pariwisata (PAD Sektor Pariwisata)
Tujuan 9 Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan	• Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (Laju Pertumbuhan Ekonomi industri pengolahan)
	• Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri
	• Tenaga kerja pada sektor industri manufaktur
	• Persentase perubahan emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	• Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional,
	• Penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
	• Penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.
	• Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

Sumber: Hasil Analisis, dan Uji Publik tahun 2020

c. Identifikasi Isu Berkelanjutan Pilar Pembangunan Lingkungan

Pilar pembangunan lingkungan mencakup enam tujuan berkelanjutan yaitu Tujuan 6 menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; Tujuan 11 menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan; Tujuan 12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; Tujuan 13 mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; dan Tujuan 15 pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Berikut rumusan isu strategis TPB pilar lingkungan di Kota Bekasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.33
Isu Berkelanjutan Pilar Pembangunan Lingkungan

TPB Pilar Pembangunan Lingkungan	Isu Strategis Dari Target TPB Belum Tercapai , Belum di laksanakan dan belum ada data
Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan	• Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
	• Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
	• Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
	• Rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.

TPB Pilar Pembangunan Lingkungan	Isu Strategis Dari Target TPB Belum Tercapai , Belum di laksanakan dan belum ada data
Tujuan 11 Menjadi Kota Dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh Dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.
	<ul style="list-style-type: none"> • Populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.
	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna moda transportasi umum di perkotaan
	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia)
	<ul style="list-style-type: none"> • Limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota
	<ul style="list-style-type: none"> • Sampah perkotaan yang tertangani
	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)
	<ul style="list-style-type: none"> • proporsi ruang terbuka hijau perkotaan untuk semua menurut kelompok usia jenis kelamin dan penyandang disabilitas. • Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.
	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat daerah • Dokumen penanggulangan bencana
Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> • Limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah padat dan B3
	<ul style="list-style-type: none"> • Timbulan sampah yang didaur ulang
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan / Pengangkutan Sampah
Tujuan 13 Penanggulangan	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam melalui Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah akibat dampak perubahan iklim
	<ul style="list-style-type: none"> • Korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

Sumber: Hasil Analisis, dan Uji Publik tahun 2020

d. Identifikasi Isu Berkelanjutan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

Pilar pembangunan hukum dan tata kelola kelembagaan ini hanya mencakup satu tujuan yaitu tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh. Rumusan isu strategis TPB pilar hukum dan tata kelola di Kota Bekasi adalah sebagai berikut.

Tabel 4.34
Isu Berkelanjutan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

TPB Pilar Pembangunan Hukum Dan Tata Kelola Kelembagaan	Isu Strategis Dari Target TPB Belum Tercapai
Tujuan 16 Perdamaian Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh	<ul style="list-style-type: none"> • masih adanya korban kekerasan yang belum tertangani meskipun setiap tahun korban kekerasan di Kota Bekasi Mengalami penurunan
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelayanan publik yang berkualitas; • Belum optimalnya pelaksanaan e-government; • Belum optimalnya akuntabilitas kinerja.

Sumber: Hasil Analisis, dan Uji Publik tahun 2020

4.3.1.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis Kota Bekasi

Pendekatan yang dilakukan dalam perumusan isu strategis daerah/ Kota Bekasi diantaranya yaitu:

- a. Menggali isu melalui studi literatur/data-data sekunder dalam hal ini melalui hasil identifikasi isu berdasarkan capaian indikator TPB, dokumen KLHS RPJMD yang sudah disusun tahun 2018, dokumen KLHS RTRW, Rancangan Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dan dokumen IKLHD Kota Bekasi tahun 2018 dan didasarkan juga pada kondisi dayadukung, dan dayatampung lingkungan;
- b. Menggali informasi data primer yang dilakukan melalui kegiatan wawancara, diskusi, FGD, Uji Publik 1 dan uji publik 2 dengan (*stakeholders*) pihak-pihak yang memiliki kompetensi terhadap kondisi Kota Bekasi, baik atas nama individu maupun lembaga.

Dengan di dasarkan pada beberapa pendekatan tersebut di atas maka melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan pada minggu ke 2 bulan oktober tahun 2020 dengan melibatkan multi pihak yang terdiri atas instansi terkait di Kota Bekasi dan narasumber dirumuskan beberapa daftar isu panjang yang terbagi menjadi isu pilar sosial sebanyak 25 (duapuluh lima) isu, pilar ekonomi sebanyak 15 (lima belas) isu, pilar lingkungan sebanyak 24 (duapuluh empat) isu, dan isu kelembagaan sebanyak 6 (enam) isu). Lebih jelasnya mengenai daftar isu panjang di kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.35
Daftar Isu Pembangunan Berkelanjutan Kota Bekasi

Pilar Pembangunan	Isu Pembangunan Berkelanjutan Kota Bekasi
Pilar Pembangunan Ekonomi	1. Sebagai implikasi dari adanya pandemik Covid 2019 angka kemiskinan di Kota Bekasi akan meningkat
	2. Ketimpangan kesejahteraan masyarakat
	3. Pelayanan Sanitasi layak yang belum merata;
	4. Masih adanya kawasan kumuh
	5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat belum mencapai target nasional
	6. Kualitas pendidikan yang belum merata
	7. Masih rendahnya ketersediaan pangan lokal;
	8. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan pokok/ beras
	9. belum tercapainya prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.
	10. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
	11. Prevalensi penduduk dengan asupan kalori minimum dibawah 1400 Kkal/kapita/hari.
	12. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.
	13. Tata Kelola Pelayanan Kesehatan yang Belum Optimal
	14. belum terintegrasinya sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat, rendahnya;
	15. kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal
	16. Adanya pandemi covid 19 berdampak pada sistem pelayanan kesehatan
	17. pemerataan akses dan partisipasi pendidikan masih belum optimal;
	18. pendidikan belum berfokus kepada mutu dan daya saing;
	19. belum optimalnya tata kelola satuan pendidikan
	20. belum terpenuhinya beberapa aspek dalam standar nasional pendidikan;
	21. Adanya pandemi covid 19 berdampak pada sistem pelayanan pendidikan
	22. masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum terpenuhinya hak-hak anak;
	23. tingkat kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap program perlindungan anak masih kurang;
	24. Terbatasnya kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan

Pilar Pembangunan	Isu Pembangunan Berkelanjutan Kota Bekasi
	perempuan
	25. Masih Terbatasnya Layanan Umum bagi Gender dan Anak
Pilar Pembangunan Ekonomi	1. Penurunan kontribusi dan laju pertumbuhan beberapa sektor ekonomi utama Kota;
	2. Meningkatnya angka pengangguran;
	3. Meningkatnya angka kemiskinan
	4. Rendahnya daya beli
	5. Penurunan laju dan Kontribusi sektor ekonomi utama kota;
	6. struktur tenaga kerja dan jumlah pencari kerja yang terus bertambah
	7. Keterbatasan Kesempatan kerja
	8. Sebagai dampak adanya pandemi Covid 19 akan berdampak pada menurunnya laju pertumbuhan PDB industri
	9. Kesempatan kerja pada sektor industri manufaktur akan berkurang
	10. Angka kemiskinan dan angka pengangguran akan terus meningkat sebagai dampak adanya covid 19
	11. Ketimpangan kesejahteraan masyarakat akan terus meningkat
	12. Masih Terbatasnya Layanan Umum bagi Gender dan Anak
	13. Perlu meningkatkan layanan akses data dan informasi
	14. Perlu meningkatkan pendataan indikator SDGs
	15. Perlu meningkatkan akses layanan internet untuk masyarakat kota bekasi
Pilar Pembangunan Lingkungan	1. Kondisi daya dukung penyediaa air setiap tahun menurun
	2. Kondisi kondisi daya dukung penyedia jasa ekosistem air rendah dan sangat rendah
	3. Pelayanan Sanitasi layak /aman yang belum merata
	4. kondisi jasa ekosistem pengurai limbah rendah dan sangat rendah
	5. Prosentase penyediaan air bersih belum mencapai target nasional
	6. perlu penguatan dan pengurangan resiko bencana
	7. Daya dukung ketersediaan Pangan defisit
	8. Jasa ekosistem penyediaan pangan rendah dan sangat rendah;
	9. Pelayanan Sanitasi layak yang belum merata
	10. belum optimalnya pelayanan sampah dan pengolahan limbah cair
	11. Belum optimalnya pelayanan air bersih
	12. Masih adanya kawasan kumuh
	13. Masih adanya kawasan yang rawan banjir/genang
	14. Kemacetan
	15. Alih fungsi lahan
	16. Kurangnya RTH
	17. Kondisi daya dukung penyediaan air setiap tahun menurun
	18. Kondisi kondisi daya dukung penyedia jasa ekosistem air rendah dan sangat rendah
	19. Kondisi dayadukung jasa ekosistem penagtur udara dan iklim rendah;
	20. Kondisi daya dukung pengatur tata air dan banjir rendah
	21. Peningkatan ruang terbuka hijau
	22. Berkurangnya daerah resapan
	23. Rawan bencana banjir
	24. Rawan kebakaran
Pilar Pembangunan Kelembagaan	1. Belum optimalnya pelayanan publik yang berkualitas;
	2. Belum optimalnya pelaksanaan e-government;
	3. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja.
	4. Rendahnya Kinerja Reformasi Birokrasi
	5. peningkatan kapasitas SDM / Lembaga
	6. pengembangan sistem Kelembagaan

Sumber: Hasil Analisis, dan Uji Publik tahun 2020

Kemudian dari daftar panjang isu pembangunan Kota Bekasi dilakukan pemusatan isu dengan melihat kesamaan substansi dan/atau menelaah sebab-akibat dengan memperhatikan: (1) isu lintas sektor; (2) isu lintas wilayah; (3) isu lintas pemangku kepentingan. Selain itu juga dilakukan konsultasi dengan tim pokja KLHS dan pemangku kepentingan untuk pengayaan dan penajaman isu

pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pemusatan dan pengelompokan isu-isu tersebut maka teridentifikasi bahwa Isu PB strategis Kota Bekasi meliputi:

1. Daya Dukung Dan DayaTampung Lingkungan;
2. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Peningkatan PelayananSosial
4. Penguatan kelembagaan dan Kerjasama
5. Peningkatan Perekonomian Kota
6. Peningkatanlayanan Sanitasi yang aman dan berkelanjutan
7. Kebencanaan
8. PeningkatanInfrastruktur

Lebih jelasnya mengenai pengelompokan Isu PB Kota Bekasi dapat di lihat pada Tabel 4.35 di bawah ini

4.3.2 Analisis Perumusan Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas

Hasil identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan strategis sebagai mana dilakukan pada tahap sebelumnya, selanjutnya dianalisis untuk menentukan isu TPB prioritas berdasarkan pertimbangan (sebagian dari) PP No. 46 Tahun 2016 pasal 9 ayat 2, yaitu :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
4. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;
5. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
6. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
7. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
8. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
9. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat;

untuk menentukan isu-isu yang paling strategis (prioritas) maka di buatlah matrik sanding antara isu PB strategis Kota Bekasi dengan kondisi D3TLH Yang termuat pada pasal 9 untuk dilakukan penilaian/pembobotan, dari hasil pembobotan diperoleh daftar urutan nilai Isu PB Prioritas dari yang tertinggi sampai terendah. lebih jelasnya mengenai matrik uji silang antara Isu PB strategis Kota Bekasi dan kondisi D3TLH yang termuat Pasal 9 ayat (2) dapat di lihat pada Tabel 4.36 di bawah ini

Berdasarkan hasil penilaian / pembobotan teridentifikasi urutan Isu PB Prioritas dari nilai tertinggi sampai nilai terendah yang meliputi:

1. Kebencanaan
2. Dayadukung dan Daya Tampung
3. Peningkatan layanan Air Bersih Dan Sanitasi yang aman dan berkelanjutan
4. Penguatan perekonomian
5. Peningkatan Infrastrutur
6. Peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan social dan peningkatan tata kelola dan kelembagaan.

Tabel 4.36
Pemusatan Dan Pengelompokan Isu –Isu Pembangunan Kota Bekasi

Pilar	Daftar Isu PB	Isu PB Strategis							
		Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan	Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan pelayanan sosial	Penguatan Kelembagaan dan Kerjasama	Peningkatan layanan Sanitasi yang aman dan berkelanjutan	Penguatan Perekonomian Kota	Keben-canaan	Peningkatan Infrastruk tur
Pilar Sosial	1. Sebagai implikasi dari adanya pandemik Covid 2019 angka kemiskinan di Kota Bekasi akan meningkat								
	2. Ketimpangan kesejahteraan masyarakat								
	3. Pelayanan Sanitasi layak yang belum merata;								
	4. Masih adanya kawasan kumuh								
	5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat belum mencapai target nasional								
	6. Kualitas pendidikan yang belum merata								
	7. Masih rendahnya ketersediaan pangan lokal;								
	8. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan pokok/ beras								
	9. belum tercapainya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.								
	10. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.								
	11. Prevalensi penduduk dengan asupan kalori minimum dibawah 1400 Kkal/kapita/hari.								
	12. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.								
	13. Tata Kelola Pelayanan Kesehatan yang Belum Optimal								
	14. belum terintegrasinya sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat, rendahnya;								
	15. kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal								
	16. Adanya pandemi covid 19 berdampak pada sistem pelayanan kesehatan								
	17. pemerataan akses dan partisipasi pendidikan masih belum optimal;								
	18. pendidikan belum berfokus kepada mutu dan daya saing;								

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Pilar	Daftar Isu PB	Isu PB Strategis							
		Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan	Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan pelayanan sosial	Penguatan Kelembagaan dan Kerjasama	Peningkatan layanan Sanitasi yang aman dan berkelanjutan	Penguatan Perekonomian Kota	Kebencanaan	Peningkatan Infrastruktur
	19. belum optimalnya tata kelola satuan pendidikan								
	20. belum terpenuhinya beberapa aspek dalam standar nasional pendidikan;								
	21. Adanya pandemi covid 19 berdampak pada sistem pelayanan pendidikan								
	22. masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum terpenuhinya hak-hak anak;								
	23. tingkat kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap program perlindungan anak masih kurang;								
	24. Terbatasnya kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan								
	25. Masih Terbatasnya Layanan Umum bagi Gender dan Anak								
Pilar Ekonomi	1. Penurunan kontribusi dan laju pertumbuhan beberapa sektor ekonomi utama Kota;								
	2. Meningkatnya angka pengangguran;								
	3. Meningkatnya angka kemiskinan								
	4. Rendahnya daya beli								
	5. Penurunan laju dan Kontribusi sektor ekonomi utama kota;								
	6. struktur tenaga kerja dan jumlah pencari kerja yang terus bertambah								
	7. Keterbatasan Kesempatan kerja								
	8. Sebagai dampak adanya pandemi Covid 19 akan berdampak pada menurunnya laju pertumbuhan PDB industri								
	9. Kesempatan kerja pada sektor industri manufaktur akan berkurang								
	10. Angka kemiskinan dan angka pengangguran akan terus meningkat sebagai dampak adanya covid 19								
	11. Ketimpangan kesejahteraan masyarakat akan terus meningkat								
	12. Perlu meningkatkan layanan akses data dan informasi								

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Pilar	Daftar Isu PB	Isu PB Strategis							
		Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan	Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan pelayanan sosial	Penguatan Kelembagaan dan Kerjasama	Peningkatan layanan Sanitasi yang aman dan berkelanjutan	Penguatan Perekonomian Kota	Kebencanaan	Peningkatan Infrastruktur
	13. Perlu meningkatkan pendataan indikator SDGs								
	14. Perlu meningkatkan akses layanan internet untuk masyarakat kota bekasi								
Pilar Lingkungan	1. Kondisi daya dukung penyediaa air setiap tahun menurun								
	2. Kondisi kondisi daya dukung penyedia jasa ekosistem air rendah dan sangat rendah								
	3. Pelayanan Sanitasi layak /aman yang belum merata								
	4. kondisi jasa ekosistem pengurai limbah rendah dan sangat rendah								
	5. Prosentase penyediaan air bersih belum mencapai target nasional								
	6. perlu penguatan dan pengurangan resiko bencana								
	7. Daya dukung ketersediaan Pangan defisit								
	8. Jasa ekosistem penyediaan pangan rendah dan sangat rendah;								
	9. Pelayanan Sanitasi layak yang belum merata								
	10. belum optimalnya pelayanan sampah dan pengolahan limbah cair								
	11. Belum optimalnya pelayanan air bersih								
	12. Masih adanya kawasan kumuh								
	13. Masih adanya kawasan yang rawan banjir/genang								
	14. Kemacetan								
	15. Pembangunan Proyek Strategis Nasional (LRT, MRT, HSR, Jalan Tol, TOD)								
	16. Alih fungsi lahan								
	17. Kurangnya RTH								
	18. Kondisi daya dukung penyediaan air setiap tahun menurun								
	19. Kondisi kondisi daya dukung penyedia jasa ekosistem air rendah dan sangat rendah								
	20. Kondisi dayadukung jasa ekosistem penagtur udara dan iklim rendah;								

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Pilar	Daftar Isu PB	Isu PB Strategis							
		Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan	Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan	Peningkatan pelayanan sosial	Penguatan Kelembagaan dan Kerjasama	Peningkatan layanan Sanitasi yang aman dan berkelanjutan	Penguatan Perekonomian Kota	Kebencanaan	Peningkatan Infrastruktur
	21. Kondisi daya dukung pengatur tata air dan banjir rendah								
	22. Peningkatan ruang terbuka hijau								
	23. Berkurangnya daerah resapan								
	24. Rawan bencana banjir								
	25. Rawan kebakaran								
Pilar Kelembagaan	1. Belum optimalnya pelayanan publik yang berkualitas;								
	2. Belum optimalnya pelaksanaan e-government;								
	3. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja.								
	4. Rendahnya Kinerja Reformasi Birokrasi								
	5. peningkatan kapasitas SDM / Lembaga								
	6. pengembangan sistem Kelembagaan								

Sumber: Hasil Analisis dan hasil Uji Pulik 1

Tabel 4.37
Matrik Uji Silang Isu PB Strategi Prioritas Dengan Muatan Pasal 9 ayat (2) PP 46 Tahun 2016

No	ISU PB Staregis	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Kinerja layanan/ jasa ekosistem	Itensitas dan cakupan wilayah bencana	Status Mutu dan Keter-sediaan sumber dayaalam	Ketahanan dan potensi keaneka-ragaman hayati	Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Tingkat dan status jumlah penduduk miskin	Resiko terhadap Kesehatan & kesela-matan	Ancaman terhadap Perlindungan dan hak adat	JUMLAH	URUTAN ISU PB PRIORITAS
1	Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	3	2	2	2	2	1	2	3	5	2	24	6
2	Peningkatan layanan Sanitasi yang aman dan berkelanjutan	4	4	3	4	3	2	3	3	5	2	33	3
3	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	5	5	5	4	4	4	4	4	4	2	41	2
4	Kebencanaan	5	5	5	5	4	3	3	5	5	2	42	1
5	Pelayanan Sosial	3	2	2	2	2	1	2	4	4	2	24	6
6	Penguatan Perekonomian Kota	4	3	3	3	3	2	3	5	4	2	32	4
7	Peningkatan Infrastruktur	4	4	3	4	3	3	3	2	3	2	31	5
8	Peningkatan Tata Kelola dan Kelembagaan	3	2	2	3	2	1	3	3	3	2	24	6

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020

Keterangan :

1. = sangat tidak berpengaruh
2. = tidak berpengaruh
3. = cukup berpengaruh
4. = berpengaruh
5. = sangat berpengaruh

4.3.3 Analisis Keterkaitan Isu PB Prioritas Dengan Isu Capaian Indikator TPB dan Permasalahannya

Analisis ini bertujuan untuk melihat keterkaitan isu PB prioritas dengan indikator TPB yang sudah dilaksanakan akan tetapi belum mencapai target nasional dan juga indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum ada datanya, selain itu juga pada sub ini diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan isu dan pelaksanaan capaian indikator TPB. Hasil analisis ini akan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam perumusan rekomendasi KLHS Perubahan RPJMD. lebih jelasnya mengenai keterkaitan isu PB Prioritas dengan Indikator TPB dapat di lihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.38
Keterkaitan Isu PB Prioritas/Isu Utama Dan Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional (SB), Indikator Belum Dilaksanakan (BB) Dan Indikator Belum Ada data (NA)

ISU PB Prioritas	INDIKATOR TPB	PERMASALAHAN	Keterangan
Kebencanaan, Daya dukung dan Daya tamoung	13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	<ul style="list-style-type: none"> Kota Bekasi merupakan wilayah yang rawan terjadinya bencana banjir, terdapat 85 titik banjir dengan luas kurang lebih 2873,38 ha; rawan terjadinya kebakaran masih adanya korban yang terkena dampak banjir dan kebakaran Kondisi daya dukung Jasa ekosistem pengatur tata air dan banjir di Kota Bekasi umumnya memiliki katagori sangat rendah sebesar 57,5%; belum ada dokumen terkait dengan strategi pengurangan resiko bencana 	belum ada data-data terkait indikator- indikator ini, sehingga perlu adanya pendataan agar teridentifikasi indikator- indkator mana saja yang telah di laksanakan dan mencapai target nasional
	1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang;		
	1.5.1 (a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah		
	1.5.1 (e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.		
	1.5.2 (a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana		
	2.1.2 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	<ul style="list-style-type: none"> kondisi dayadukung pangan deficit (tidak mencukupi) Jasa ekosistem penyedia pangan di Kota Bekasi sekitar 57,50% katagorikan sangat rendah Masih rendahnya ketersediaan pangan lokal; Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan pokok/ beras; Masih rendahnya ketersediaan pangan utama; Skor Pola Pangan Harapan masih di bawah target nasional yaitu baru mencapai 89,2 dari target nasional 92,5 Persentase penanganan kerawanan pangan baru mencapai 69,58% 	<ul style="list-style-type: none"> Sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SS) Alternatif proyeksi perlu upaya tambahan
	2.2.2 (c) :Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.		
	9.4.1* Rasio emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur;	Emisi GRK pada tahun 2017 sebesar 2.662.222.03 GgCO ₂ dan pada tahun 2023 jumlah emisii perkirakan hasil proyeksi mencapai 7.777.838,56 ton GgCO ₂ atau meningkat sekitar 11.41% dari emisi GRK tahun 2017	belum ada data-data terkait indikator- indikator ini, sehingga perlu adanya pendataan
	9.4.1 (a) Persentase perubahan emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca		
	11.b.1 Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan resiko bencana	Kota Bekasi merupakan wilayah yang rawan terjadinya bencana banjir dan kebakaran namun belum adanya data dan hasil kajian terkait dengan indikator ini	belum ada data-data terkait indikator- ini, sehingga perlu adanya pendataan dan kajian terkait dengan strategi pengurangan resiko dampak bencana
	11.b.2 Dokumen strategi pengurangan resiko bencana		

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

ISU PB Prioritas	INDIKATOR TPB	PERMASALAHAN	Keterangan
	11.7.1 proporsi ruang terbuka hijau perkotaan untuk semua menurut kelompok usia jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhinya proporsi 30% RTH • masih kurangnya ruang terbuka public terutama untuk penyandang disabilitas • DD Fungsi Lindung Kota Bekasi termasuk dalam kategori rendah yaitu sebesar 0,23 • Penurunan daya dukung lahan terbangun ini akibat meningkatnya kebutuhan untuk lahan industri, permukiman dan infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SS) • Alternatif scenario perlu upaya tambahan
	11.7.1.(a) Jumlahkotahijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.		
	13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Kota bekasi merupakan wilayah yang rawan terjadinya bencana banjir dan kebakaran namun belum adanya data dan hasil kajian terkait dengan indikator ini	belum ada data-data terkait indikator- ini, sehingga perlu adanya pendataan dan kajian terkait dengan strategi pengurangan resiko dampak bencana
	13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkenadampakbencana per 100.000 orang.	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Bekasi merupakan wilayah yang rawan terjadinya bencana banjir, terdapat 85 titik banjir dengan luas kurang lebih 2873,38 ha; • rawan terjadinya kebakaran • masih adanya korban yang terkena dampak banjir dan kebakaran • Kondisi daya dukung Jasa ekosistem pengatur tata air dan banjir di Kota Bekasi umumnya memiliki katagori sangat rendah sebesar 57,5%; belum ada dokumen terkait dengan strategi pengurangan resiko bencana	Sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)
	1.5.3 (a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	belum adanya data terkait indikator ini	Perlu adanya pendataan dan kajian terkait luas lahan kritis di kota Bekasi
Peningkatan layanan Air Bersih Dan Sanitasi yang aman dan berkelanjutan	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Penduduk Berakses Air Minum 26,7% tahun 2018 • keterbatasan sumber air baku • Dayadukung air akan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan yang membutuhkan ketersediaan air hal ini terlihat dari nilai DD 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) • Alternatif skenario perlu upaya
	1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.		

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

ISU PB Prioritas	INDIKATOR TPB	PERMASALAHAN	Keterangan
	1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	<p>pada tahun 2017 sebesar 1,08 dan pada tahun 2022 menurun menjadi 0,92 (defisist)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi Jasa ekosistem penyedia air di Kota Bekasi pada umumnya dikategorikan sangat rendah sebesar 70% katagori sedang sebesar 17,40%; • Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani sebesar 29,07% • Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni 23,88% (Tahun 2018) • Sistem pengelolaan limbah dan persampahan yang belum optimal, • Dayadukung jasa ekosistem pemurnian air pada umumnya rendah sekitar 54,6 % dan sedang 34,55 %. 	tambahan
	<p>6.1.1 (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak;</p> <p>6.1.1 (b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga perkotaan dan industri;</p> <p>6.1.1 (c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minuman dan berkelanjutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Penduduk Berakses Air Minum 26,7% tahun 2018 • Dayadukung air akan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan yang membutuhkan ketersediaan air hal ini terlihat dari nilai DD pada tahun 2017 sebesar 1,08 dan pada tahun 2022 menurun menjadi 0,92 (defisist) • air permukaan/sungai sebagian sudah tercemar dengan katagori tercemar ringan, sedang dan berat • keterbatasan sumberdaya ariuntuk sumber air baku • KondisiJasaekosistempenyedia air di Kota Bekasi pada umumnya dikategorikan sangat rendah sebesar 70% katagori sedang sebesar 17,40%; • Daya dukung jasa ekosistem pemurnian air pada umumnya rendah sekitar 54,6 % dan sedang 34,55 %. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) • Alternatif skenario perlu upaya tambahan
	<p>6.2.1 (b) Persentase rumahtangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.</p> <p>6.3.1 (b) Proporsi rumahtangga (RT) yang terlayani system pengelolaan air limbahterpusat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani sebesar 29,07% tahun 2018 • Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestic baru mencapai 3,39% (tahnun 2018) • Sistem pengelolaan persampahan yang belum optimal dimana cakupan Area Pelayanan baru mencapai 70,00% • kondisi daya dukung jasa ekosistem pengelola dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) • Alternatif skenario perlu upaya tambahan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

ISU PB Prioritas	INDIKATOR TPB	PERMASALAHAN	Keterangan
	6.2.1 (c) Jumlahdesa/kelurahan yang melaksanakanSanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	penguraian limbah sangat rendah 57,5 % dan 26,19 % • Kondisi Jasa ekosistem penyedia air di Kota Bekasi pada umumnya dikatagorikan sangat rendah sebesar 70% katagori sedang sebesar 17,40%;	belum ada data sehingga perlu adanya pendataan
	6.2.1 (d) Jumlahdesa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air BesarSembarangan (SBS).		belum ada data sehingga perlu adanya pendataan
	11.1.1 (a) Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal didaerah kumuh, permukiman liar ataurumah yang tidak layak. 11.1.1.(b) Proporsi rumah tangga yang memiliki akse terhadap hunian yang layak dan terjangkau	• Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani sebesar 29,07% tahun 2018 • Dari data kotaku tahun 2020 luas kawasan kumuh sebesar 430 ha • Masih terbatasnya rumah MBR • Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni 23,88% (Tahun 2018) • Kondisi daya dukung jasa ekosistem pengelola dan penguraian limbah sangat rendah 57,5 % dan 26,19 % • kemampuan lahan di Kota Bekasi sebagian besar termasuk kelas II (70,12%) dengan demikian kemampuan lahan Kota Bekasi merupakan lahan potensial untuk pengembangan kawasan budidaya perkotaan; • Daya dukung jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup sangat tinggi 57,16 % dan sedang 40,56% .	• Sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) • Alternatif skenario perlu upaya tambahan
	11.6.1Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatukota 11.6.1(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani	• Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R baru mencapai 24,94%' • Persentase sampah yang terangkut ke TPA baru mencapai 67,15% • Persentase cakupan area pelayanan baru mencapai 70,00% • Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA baru mencapai 71,72%; • Kondisi daya dukung jasa ekosistem pengelola dan penguraian limbah sangat rendah 57,5 % dan 26,19 % • kondisi daya dukung jasa ekosistem pengelola dan penguraian limbah sangat rendah	• Sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) • Alternatif skenario perlu upaya tambahan
	12.4.2.(a)Jumlahlimbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektorindustri).		belum ada data sehingga perlu adanya pendataan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

ISU PB Prioritas	INDIKATOR TPB	PERMASALAHAN	Keterangan
Penguatan perekonomian	1.2.1*Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat kemiskinan di Kota Bekasi hinggatahun 2018 mencapai 4.11 %, Namundenganadanya bencana banjir dan juga bencana pandemic covid 19 angka kemiskinan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 8,56%	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) • Alternatif skenario perlu upaya tambahan
	8.1.1 Lajupertumbuhan PDB perkapita 8.1.1 (a) PDB perkapita/tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Laju pertumbuhan PDB perkapita pada tahun 2017 baru mencapai 3,05 % • Menurunnya kemandirian ekonomi daerah. • Dampak adanya pandemic covid: <ul style="list-style-type: none"> - Laju pertumbuhan ekonomi menurun; - prosentase peningkatan PDA di prediksiakan menurun; 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) • Alternatif skenario perlu upaya tambahan
	8.5.2 Tingkat pengangguranterbukaberdasarkanjeniskelamin dan kelompokumur (angkapengangguranterbuka)	Masih tingginya tingkat pengangguran yaitu sebesar 8,20 % dengan adanya pandemic Covid tingkat pengangguranakancenderung naik/meningkat.	Sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)
	8.3.1 (b) Presentase tenaga kerja informal sektor pertanian		
	8.3.1 (c) Presentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke layanan Keuangan		belum ada data sehingga perlu adanya pendataan
	8.9.2 * Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja		belum ada data sehingga perlu adanya pendataan
	8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa		belum ada data sehingga perlu adanya pendataan
	9.2.1 (a) Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	<ul style="list-style-type: none"> • Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (di Kota Bekasi selama kurun waktu 5 tahun (2013-2017) yang terus menurun, dari data LPP industri manupaktur tahun 2018 sebesar 3,71% • kontribusi sector industri terhadap PDRB dalam beberapa tahunterakhirterus menurun. Pada tahun 2013 	Sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)
	9.2.1 (b) Laju pertumbuhan PDB industrimanufaktur (LajuPertumbuhan		Sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)
	9.3.1 (a) Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap		Belum ada data terkait

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

ISU PB Prioritas	INDIKATOR TPB	PERMASALAHAN	Keterangan
	total nilai tambah industri	sektor ini mampu menyumbang sebesar 36,34 persen (Rp20,97 triliun), namun merosot hingga 35,19 persentahun 2015 dan kemudian 26,58 (tahun 2017)	indikator ini sehingga perlu adanya pendataan
	9.3.2 * Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit		
	17.17.1.(b) Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).		
Peningkatan Infrastruktur	11.2.1 persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • pengguna moda transportasi umum Kota Bekasi baru mencapai 28 %. • Persentase layanan angkutan umum massal 50% • Rendahnya sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi kriteria pengguna dengan kategori kebutuhan khusus 	Sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)
	11.a.1 Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya		belum ada data sehingga perlu adanya pendataan
Peningkatan pelayanan pendidikan kesehatan, pelayan sosial dan Peningkatan Tata kelola dan kelembagaan	1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas		belum ada data sehingga perlu adanya pendataan
	1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan		belum ada data sehingga perlu adanya pendataan
	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	<ul style="list-style-type: none"> • proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih baru mencapai 88% 	Sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)
	Angka Kematian Balita (AKBa) dan kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran anak.	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kematian balita dan kematian balita per 1000 kelahiran anak masih di atas target nasional (1,1 tahun 2017) 	Sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)
	4.1.1 (a) Presentase SD/MI berakreditasi minimal B. 4.1.1 (b) Presentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. 4.1.1 (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat 4.1.1 (e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat.	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana pendidikan yang berakreditasi minimal B belum mencapai target nasional; • Nilai APK SMP/MTs/ sederajat dari 95,32 pada tahun 2017 menurun menjadi 94,81% namun demikian Nilai APK selama kurun waktu 1 tahun meningkat, hal ini tergambar dari: 	Sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)
	4.2.2 (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	<ul style="list-style-type: none"> - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat dari 95,32% pada tahun 2017 meningkat menjadi 110% pada 	

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

ISU PB Prioritas	INDIKATOR TPB	PERMASALAHAN	Keterangan
		tahun 2019, - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat dari 75,89% pada tahun 2017 meningkat menjadi 107% pada tahun 2019 ; - Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meningkat menjadi 92,75% tahun 2019	
	1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akte kelahiran		belum ada data-data terkait indikator-indikator ini, sehingga perlu adanya pendataan agar teridentifikasi indikator-indikator mana saja yang telah di laksanakan dan mencapai target nasional.
	1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN maupun non PLN		
	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.		
	2.2.1 (a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.		
	2.2.2 * Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe.		
	2.2.2 (a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.		
	2.2.2 (b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.		
	3.4.1 (a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.		
	3.4.1 (c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.		
	3.4.2* Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.		
	3.5.1 (a) Jumlah penyalahgunaan narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.		
	3.5.1 (b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.		
	3.5.1 (c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.		
	3.5.1 (e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba.		
	3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir		
	3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>)		
	3.7.2 (a) <i>Total Fertility Rate (TFR)</i>		
	3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.		
	3.9.3 (a) Proporsi kematian akibat keracunan.		
	3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≤15 tahun.		
	4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.		
	4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).		
	4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.		
	5.3.1 (a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.		
	5.3.1 (b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>).		
	5.5.2* Proporsi perempuan yang berada Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin		

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

ISU PB Prioritas	INDIKATOR TPB	PERMASALAHAN	Keterangan
	perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi di posisi managerial.		mencapai target nasional.
	10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.		
	12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.		
	12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.		
	16.3.1.(b) Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi		
	16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya tata kelola lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan ▪ Belum optimalnya akuntabilitas kinerja. ▪ Belum optimalnya pelayanan publik yang berkualitas; 	
	16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).		
	16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		
	16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).		
	16.7.2.(a) Indeks Lembaga Demokrasi.		
	16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil		
	16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik.		
	16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.		belum ada data-data terkait indikator-indikator ini, sehingga perlu adanya pendataan agar teridentifikasi indikator-indikator mana saja yang telah di laksanakan dan mencapai target nasional
	16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah		
	17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet.		
	17.17.1.(a) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)		
	17.18.1 (a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik		
	17.18.1.(d) Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.		
	17.19.2.(a) Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.		
	17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).		
	17.19.2 (d) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)		

Sumber; Hasil Analisis Tahun 2020



BAB 5

ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TBP PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Bab 5 menjelaskan mengenai capaian indikator TPB pada organisasi perangkat daerah, peran para pihak dalam capaian TPB di Kota Bekasi dan Kerangka Pendanaan.



5.1 CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasar pada hasil analisis tiap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kota Bekasi dengan total sebesar 195 indikator yang terdiri dari 3 pencapaian yakni tercapainya target nasional (SS), indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (SB), serta belum terdapat data terkait (NA). Capaian indikator Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada setiap pilar pembangunan yaitu sebagai berikut.

5.1.1 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Pembangunan Sosial

Pilar pembangunan sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan (TPB), yaitu Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, dan Tujuan 5. Total untuk pilar sosial adalah sebanyak 91 indikator. Capaian indikator TPB pilar sosial berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

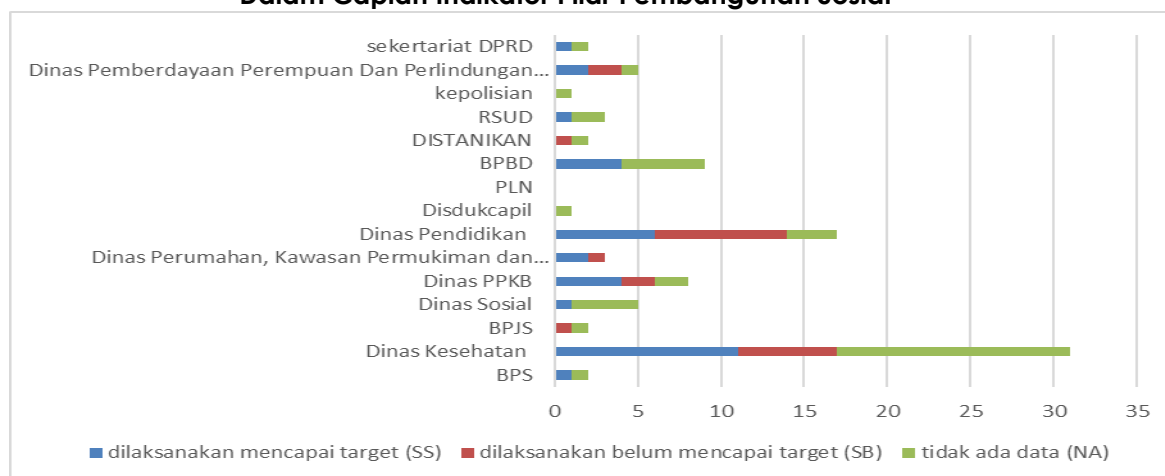
Tabel 5.1
Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah Pada Pilar Pembangunan Sosial

Dinas	dilaksanakan mencapai target (SS)	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	tidak ada data (NA)	Jumlah
BPS	1	0	1	2
Dinas Kesehatan	11	6	14	31
BPJS	0	1	1	2
Dinas Sosial	1	0	4	5
Dinas PPKB	4	2	2	8
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2	1	0	3
Dinas Pendidikan	6	8	3	17
Disdukcapil	0	0	1	1
PLN	0	0	0	0
BPBD	4	0	5	9
DISTANIKAN	0	1	1	2
RSUD	1	0	2	3
kepolisian	0	0	1	1
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2	2	1	5
sekertariat DPRD	1	0	1	2
	33	21	37	91

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, ada 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam pilar sosial. Dari total 91 indikator di pilar pembangunan sosial, terdapat 33 indikator atau 36,26 % yang mencapai target nasional dalam RPJMD Kota Bekasi. Sebanyak 21 indikator atau 23,08% belum mencapai target nasional. Sementara itu, sebanyak 37 indikator atau 40,66 % indikator yang tidak memiliki data. Dari 15 OPD tersebut, Dinas Kesehatan merupakan OPD yang memiliki target indikator yang sudah dilaksanakan mencapai target (SS) terbanyak yaitu sebanyak 11 indikator. Grafik capaian indikator dalam sosial disajikan pada diagram berikut ini.

Gambar 5.1
Kontribusi Organisasi Perangkat Daerah
Dalam Capaian Indikator Pilar Pembangunan Sosial



5.1.2 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Pembangunan Ekonomi

Pilar pembangunan ekonomi mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan (TPB), yaitu Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10, dan Tujuan 17. Total untuk pilar pembangunan ekonomi adalah sebanyak 42 indikator. Capaian indikator TPB pilar pembangunan ekonomi berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

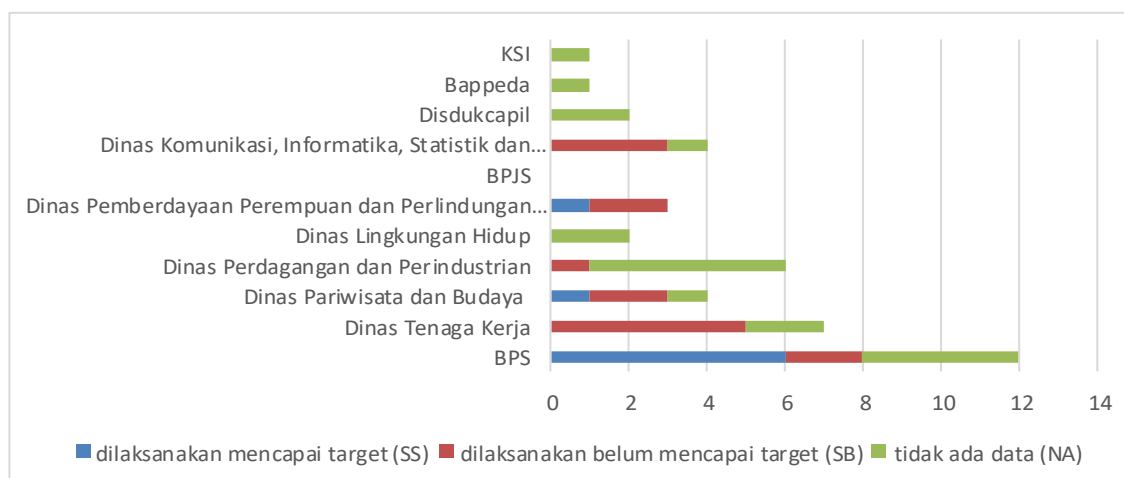
Tabel 5.2
Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah pada Pilar
Pembangunan Ekonomi

Dinas	dilaksanakan mencapai target (SS)	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	tidak ada data (NA)	Jumlah
BPS	6	2	4	12
Dinas Tenaga Kerja	0	5	2	7
Dinas Pariwisata dan Budaya	1	2	1	4
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0	1	5	6
Dinas Lingkungan Hidup	0	0	2	2
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	2	0	3
BPJS	0	0	0	0
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0	3	1	4
Disdukcapil	0	0	2	2
Bappeda	0	0	1	1
KSI	0	0	1	1
Total	8	15	19	42

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, ada 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam pilar pembangunan ekonomi. Dari total 42 indikator di pilar ekonomi, terdapat 8 indikator atau 19,05 % yang mencapai target nasional. Sebanyak 15 indikator atau 35,71 % belum mencapai target nasional. Sementara itu, sebanyak 19 indikator atau 45,24 % indikator belum memiliki data. Grafik capaian indikator dalam pilar pembangunan ekonomi disajikan pada diagram berikut ini.

Gambar 3.55
Kontribusi Organisasi Perangkat Daerah Dalam Capaian Indikator Pilar Pembangunan Ekonomi



5.1.3 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Pembangunan Lingkungan

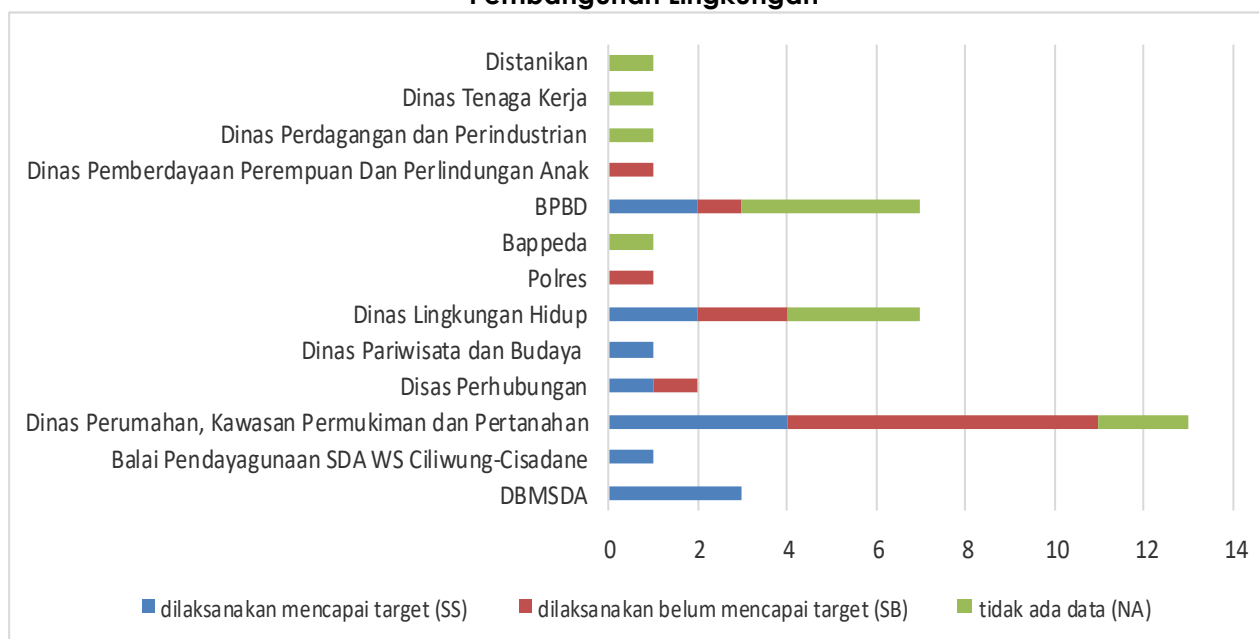
Pilar pembangunan lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan berkelanjutan (TPB), yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14 dan Tujuan 15. Total untuk pilar lingkungan adalah sebanyak 40 indikator. Capaian indikator TPB pilar pembangunan lingkungan berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan capaian per OPD pilar pembangunan lingkungan, ada 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam pilar lingkungan. Dari total 40 indikator di pilar lingkungan, terdapat 14 indikator yang mencapai target (35%), 13 indikator (32,50%) dilaksanakan belum mencapai target (SB), 13 indikator (32,50%) tidak ada target (NA). Persentase capaian indikator dalam pilar pembangunan lingkungan disajikan pada diagram berikut ini.

Tabel 5.3
Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah Pada Pilar Pembangunan Lingkungan

Dinas	dilaksanakan mencapai target (SS)	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	tidak ada data (NA)	Jumlah
DBMSDA	3	0	0	3
Balai Pendayagunaan SDA WS Ciliwung-Cisadane	1	0	0	1
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4	7	2	13
Disas Perhubungan	1	1	0	2
Dinas Pariwisata dan Budaya	1	0	0	1
Dinas Lingkungan Hidup	2	2	3	7
Polres	0	1	0	1
Bappeda	0	0	1	1
BPBD	2	1	4	7
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0	1	0	1
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0	0	1	1
Dinas Tenaga Kerja	0	0	1	1
Distanikan	0	0	1	1
Total	14	13	13	40

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020

Gambar 5.3
Kontribusi Organisasi Perangkat Daerah Dalam Capaian Indikator Pilar Pembangunan Lingkungan



5.1.4 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

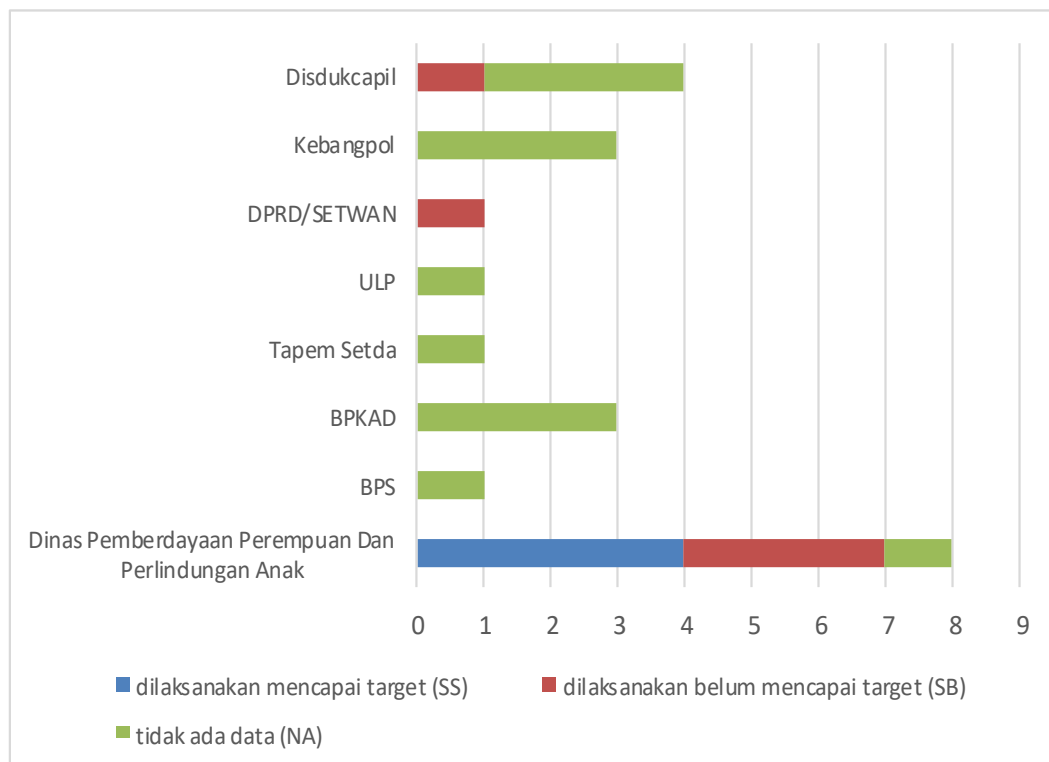
Pilar pembangunan hukum dan tata kelola mencakup satu tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh. Total untuk pilar pembangunan hukum dan tata kelola adalah sebanyak 22 indikator. Dari total 22 indikator di pilar hukum dan tata kelola, terdapat 4 indikator yang mencapai target (18,18%), 5 indikator (22,73 %) dilaksanakan belum mencapai target (SB), 13 indikator (59,09 %) tidak ada data (NA). Capaian indikator TPB pilar pembangunan hukum dan tata kelola berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4
Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Dinas	dilaksanakan mencapai target (SS)	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	tidak ada data (NA)	Jumlah
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4	3	1	8
BPS			1	1
BPKAD			3	3
Tapem Setda			1	1
ULP			1	1
DPRD/SETWAN		1		1
Kebangpol			3	3
Disdukcapil		1	3	4
	4	5	13	22

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2018

Gambar 5.4
Kontribusi Organisasi Perangkat Daerah Dalam
Capaian Indikator Pilar Pembangunan Hukum Dan Tata Kelola



5.2 PERAN PARA PIHAK DALAM CAPAIAN TPB DI KOTA BEKASI

Kategori para pihak masih aktif dalam upaya pencapaian TPB adalah masih melakukan aktifitas program dan kegiatan secara rutin sesuai bidangnya. Secara normatif bentuk program dan anggaran yang dijalankan oleh para pihak belum sepenuhnya dapat terukur akuntabilitasnya. Hal ini disebabkan belum adanya kebijakan pemerintah Kota Bekasi yang mengatur lebih lanjut peran para pihak yang terlibat dalam aktifitas tersebut.

Para pihak terdiri dari berbagai macam bidang dan latar belakang seperti Kepolisian, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, perusahaan, ormas/LSM, perbankan, dan lain-lain. Kontribusi dari masing-masing para pihak tersebut juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian indikator TPB di Kota Bekasi. Tabel para pihak aktif yang ada di Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.5
Peran Para Pihak Dalam Capaian TPB di Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Indikator Output			Nama Mitra
TUJUAN 1 MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN				
	TARGET	1.3.	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	
2	INDIKATOR	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	2017 • Camat– Kepala BPJS Cabang Utama Bekasi (Pendaftaran Peserta Bukan Pekerja Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Jaminan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kota Bekasi) 2018 • PT. Karsindo Utama (Pengadaan Kartu Sehat di Kota Bekasi melalui Program Corporate Social Responsibility) 2019 • PT. Asuransi Jiwa Taspen (Penyelenggaraan Produk Asuransi kumpulan Taspen SAVE untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi)
3	INDIKATOR	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	2017 • Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota (Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi TTK di Pemerintah Kota Bekasi)
	TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	
6	INDIKATOR	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	2017 • Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Bekasi (Pelayanan Persalinan Normal Bagi Masyarakat Kota Bekasi yang menggunakan layanan kesehatan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Pembangunan gedung Sekretariat Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Bekasi yang beralamat di RT. 003 RW. 009 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi) 2019 • Klinik Nadya Medical (Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi) • Klinik Dr. Rahman Medical Center (Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi) • Klinik Tiara Bunda (Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi) • Klinik Cahaya Amalia (Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Indikator Output			Nama Mitra
				<p>Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klinik Sayang Bunda (Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi) • Klinik Almuzammil (Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi) • Klinik Kesuma Medika (Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi) • Klinik Teratai Dua (Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi) • Klinik Trimedika (Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi) • Klinik Rumah Sehat Keluarga (Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi) • Klinik Umi Rahma (Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi) • Klinik Yosri Medika (Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi) • Klinik Warna Ayu Jaya Medika (Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi) • Klinik Selasih Medika (Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi) • Klinik Yasyfa Medika (Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi) • Klinik Ratna Komala (Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi) • Klinik Alita (Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi) • Klinik Guci Medika (Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi) • Klinik Nani Medika (Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi) • Klinik Balqis (Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi) • Klinik Fazia Medika (Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi) • Klinik Cicilian (Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi)

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Indikator Output			Nama Mitra
				<ul style="list-style-type: none"> • Klinik Bhakti Medika (Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi) • Klinik Alifia (Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi) • Klinik Mitra Medika (Pelaksanaan Jaminan Pelayanan Persalinan Normal Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Di Kota Bekasi)
9	INDIKATOR	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	2017 <ul style="list-style-type: none"> • Usaid Indonesia Urban Water, Sanitation And Hygiene Penyehatan Lingkungan Untuk Semua (Iuwash Plus) (Implementasi Program USAID IUWASH PLUS di Kota Bekasi)
10	INDIKATOR	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	
11	INDIKATOR	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Swasta
12	INDIKATOR	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat	Pemerintah Daerah dan Swasta
13	INDIKATOR	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	Pemerintah Daerah dan Swasta
14	INDIKATOR	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat	2018 <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Bekasi)
TARGET	1.5.	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana		
17	INDIKATOR	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	2017 <ul style="list-style-type: none"> • Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Bekasi Dengan Tim Penanganan Banjir (Penanganan Banjir di Kawasan Perumahan Taman Cikas, Perum Pulo Permata Sari, Pondok Timur Mas dan Villa Jakasetia yang terletak di Kecamatan Bekasi Selatan) • Tim Penanganan Banjir (Penanganan banjir area DAS Kali Buaran di Wilayah Kecamatan Pondokgede) • Fkrw Kec. Bekasi Selatan (Penanganan Banjir di Area Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Baru dan percepatan Prioritas Pembangunan di Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan) • Tim Penanganan Banjir (Penanganan banjir area DAS Bojong Rangkong di Wilayah Kecamatan Bekasi Barat) • Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan Mustikajaya (Pembangunan Fasilitas
18	INDIKATOR	1.5.1 (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	
19	INDIKATOR	1.5.1 (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	
20	INDIKATOR	1.5.1 (c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	
21	INDIKATOR	1.5.1 (d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	
22	INDIKATOR	1.5.1 (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat	

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Indikator Output			Nama Mitra
			pertumbuhan yang berisiko tinggi.	
23	INDIKATOR	1.5.2	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP Global.	<p>Umum dan Penanganan Banjir di Wilayah Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan Mustikasari (Pembangunan Fasilitas Umum dan Penanganan Banjir di Wilayah Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi)
24	INDIKATOR	1.5.2 (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	<ul style="list-style-type: none"> • Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan Mustikasari (Pembangunan Fasilitas Umum dan Penanganan Banjir di Wilayah Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi) • Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan Padurenan (Pembangunan Fasilitas Umum dan Penanganan Banjir di Wilayah Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi) • Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan Cimuning (Pembangunan Fasilitas Umum dan Penanganan Banjir di Wilayah Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi)
25	INDIKATOR	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	<p>2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forum Komunikasi Rukun Warga Kecamatan Jatiasih (Penanggulangan Banjir, Penyelesaian Kemacetan dan Percepatan Prioritas Pembangunan di Kecamatan Jatiasih) • Forum Komunikasi Rukun Warga Kecamatan Bekasi Timur (Penanganan Banjir dan Percepatan Prioritas Pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur) • Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan Jatimelati (Pembangunan Fasilitas Umum dan Penanganan Banjir di Wilayah Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati) • Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan Jatiwarna (Pembangunan Fasilitas Umum dan Penanganan Banjir di Wilayah Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondokmelati) • Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan Jatimurni (Pembangunan Fasilitas Umum dan Penanganan Banjir di Wilayah Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati) • Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan Jatirahayu (Pembangunan Fasilitas Umum dan Penanganan Banjir di Wilayah Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati) • Forum Komunikasi Rukun Warga Kecamatan Rawalumbu (Penanggulangan Banjir dan Kemacetan Lalu Lintas Serta Percepatan Pembangunan Puskesmas di Wilayah Kecamatan Rawalumbu) • Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan Medan Satria (Penanggulangan Banjir dan Penataan Sarana/Prasarana Lingkungan di Kelurahan Medan Satria) • Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan Kalibaru (Penanggulangan Banjir dan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Indikator Output			Nama Mitra
				<p style="text-align: center;">Nama Mitra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan Sarana/Prasarana Lingkungan di Kelurahan Kalibaru) • Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan Pejuang (Penanggulangan Banjir dan Penataan Sarana/Prasarana Lingkungan di Kelurahan Pejuang) • Forum Komunikasi Rukun Warga Kelurahan Harapan Mulya (Penanggulangan Banjir dan Penataan Sarana/Prasarana Lingkungan di Kelurahan Harapan Mulya) • Forum Komunikasi Rukun Warga Kecamatan Jatisampurna (Penanggulangan Banjir dan Penataan Sarana/Prasarana Lingkungan di Kecamatan Jatisampurna) • Forum Komunikasi Rukun Warga Kecamatan Bekasi Utara (Penanggulangan Banjir, Penataan Sarana/Prasarana Lingkungan dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi di Kecamatan Bekasi Utara) • Forum Komunikasi Rukun Warga Kecamatan Bantargebang (Penanggulangan Banjir dan Penataan Sarana/Prasarana Lingkungan di Kecamatan Bantargebang) • Forum Lintas Rukun Warga Perumahan Pondokgede Permai Kelurahan Jatirasa Kelurahan Jatiasih (Penanggulangan banjir dan penyediaan infrastruktur di lingkungan perumahan pondokgede permai kelurahan jatirasa kecamatan jatiasih kota beksi) <p>2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Kerja Sama di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana) <p>2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi (Penyambungan Saluran air di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi) • Gerakan Relawan Bekasi, BNPB, BPBD Provinsi Jawa Barat, TNI Polri, Pramuka Cabang Kota Bekasi, BBWSCC, PJT2, PDAM Tirta Patriot, ACT dan Tagana (Penanggulangan Bencana Banjir)
TUJUAN 3 MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA				
	TARGET	3.8.	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan resiko keuangan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	
25	INDIKATOR	3.8.1 (a)	Unmet need pelayanan kesehatan	<p>2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi (Pembangunan Tempat Parkir melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) • PT. Adhi Persada Properti Dan Rumah Sakit Awal Bros Bekasi Timur (Pembukaan dan Pembuatan Akses Jalan Kegawardaruratan (Emergency) Rumah sakit Awal Bros Bekasi Timur Kota Bekasi) • Rumah Sakit Swasta Di Kota Bekasi (Penanganan Pasien Pandemi Corona Virus 2019 (Covid19) pada Rumah Sakit Swasta di Kota Bekasi)
27	INDIKATOR	3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	2017

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Indikator Output			Nama Mitra
			(JKN)	<ul style="list-style-type: none"> • Camat– Kepala BPJS Cabang Utama Bekasi (Pendaftaran Peserta Bukan Pekerja Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Jaminan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kota Bekasi) 2018 • PT. Asuransi Jiwa Taspen (Penyelenggaraan Produk Asuransi Kumpulan Taspen Save Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi) 2019 • BPJS Kesehatan (kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi) • PT. Asuransi Jiwa Taspen (Penyelenggaraan Produk Asuransi kumpulan Taspen SAVE untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi) • BPJS Kesehatan Kota Bekasi (Addendum) (Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang di daftarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi) 2020 • BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota dan PT. Bank Bangunan daerah Jawa Barat dan Banten, TBK Cabang Bekasi (Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, TBK Cabang Bekasi nomor 27 TAHUN 2019, PER/58/012019 dan 002/PKS-BKS/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penyelenggaraan Kepesertaan Program Jaminan Sosial bagi Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan, Kelurahan, Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) DAN Pedamping Kader Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Se-Kota Bekasi) • BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota dan PT. Bank Bangunan daerah Jawa Barat dan Banten, TBK Cabang Bekasi (Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, TBK Cabang Bekasi nomor 1250 TAHUN 2018, PER/98/122018 dan 016/PKSBKS/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pengurus Rukun Tetangga dan SeKota Bekasi) • BPJS Kesehatan (Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi)
TARGET	3.b	Mendukung penelitian pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan sesuai <i>the Doha Declaration</i> tentang <i>the TRIPS Agreement and Publik Health</i>, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya menyediakan akses obat bagi semua.		

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Indikator Output			Nama Mitra
30	INDIKATOR	3.b.1 (a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	2017 • Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Bekasi Dengan Ikatan Apoteker Indonesia (Peningkatan Kompetensi Apoteker dan Implementasi Pelayanan Kefarmasian yang Baik pada Rumah Sakit seKota Bekasi)
	TARGET	3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	
31	INDIKATOR	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	2017 • Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Bekasi Dengan Ikatan Apoteker Indonesia (Peningkatan Kompetensi Apoteker dan Implementasi Pelayanan Kefarmasian yang Baik pada Rumah Sakit seKota Bekasi)
TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA.				
	TARGET	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	
1	INDIKATOR	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Pemerintah daerah dan swasta
2	INDIKATOR	4.1.1 (a)	Presentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Pemerintah daerah dan swasta
3	INDIKATOR	4.1.1 (b)	Presentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Pemerintah daerah dan swasta
4	INDIKATOR	4.1.1 (c)	Presentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Pemerintah daerah dan swasta
5	INDIKATOR	4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat.	Pemerintah daerah dan swasta
6	INDIKATOR	4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat.	Pemerintah daerah dan swasta
7	INDIKATOR	4.1.1 (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat.	2018 • Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Bekasi) • swasta
	TARGET	4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	
8	INDIKATOR	4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Pemerintah daerah dan swasta

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Indikator Output			Nama Mitra
	TARGET	4,3	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	
9	INDIKATOR	4.3.1 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat.	2018 <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pengelolaan Pendidikan Sekolah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Bekasi)
10	INDIKATOR	4.3.1 (b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	2019 <ul style="list-style-type: none"> • STMIK Bina Insani (Pengembangan dan penerapan Tridharma Perguruan Tinggi di Kota Bekasi) • Fakultas Ekonomi Universitas (Penerapan dan Peningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi pada Bidang Ekonomi di Kota Bekasi) • Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Penerapan dan Peningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi pada Bidang Hukum di Kota Bekasi) • Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Penerapan dan Peningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi pada Bidang Psikologi di Kota Bekasi) • Fakultas Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Penerapan dan Peningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi pada Bidang Komunikasi di Kota Bekasi) • Fakultas Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Penerapan dan Peningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi pada Bidang Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP) di Kota Bekasi) • Fakultas Pendidikan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Penerapan dan Peningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi pada Bidang Pendidikan di Kota Bekasi) • Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Penerapan dan Peningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi pada Bidang Teknik di Kota Bekasi) 2020 <ul style="list-style-type: none"> • Universitas Padjadajaran (Penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Bekasi) • Universitas Krisnadwipayana (Pengembangan Fasilitas dan Penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Bekasi) • Universitas Pelita Bangsa (Penerapan dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Bekasi)
	TARGET	4,4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	
11	INDIKATOR	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	2017 <ul style="list-style-type: none"> • PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Penyediaan dan Pemasangan 1000 titik Wifi dan 1000 titik CCTV di Ruang Publik dan Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka Mewujudkan Bekasi Smart City) • PT. Akses Prima Indonesia (Jaringan Sistem Komunikasi Serat Optik (SKSO) dan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Indikator Output			Nama Mitra
				<p>Nirkabel yang ada di Kota Bekasi berupa Ducting Utilitas Bersama (Single Ducting), jaringan serat optik (FO Network), (Microcell Pole/MCP), Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dan Penerapan IoT, Big Data dan Cloud)</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT. Triview Geospatial Mandiri (Mandiri Pemanfaatan Prasana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Sarana Perumahan) Milik Pemerintah Kota Bekasi untuk Bangunan Menara Telekomunikasi) • PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Penyediaan dan Pemasangan 1000 (Seribu) Titik Wifi di Ruang Publik dan Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam Rangka Mewujudkan Bekasi Smart City) • PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk (Pemanfaatan Tanah Dan /Atau Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Milik Pemerintah Kota Bekasi untuk Pemasangan Base Transceiver Station (BTS) Microcell dan Jaringan Fiber Optik Dengan Metode Kamufase di Kota Bekasi) • Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi (Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Smart City Kota Bandung di Kota Bekasi) <p>2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT. Indosat, Tbk (penyediaan teknologi, informasi dan komunikasi penunjang smart city di lingkungan pemerintah Kota Bekasi)
TARGET	4,5		Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	
12	INDIKATOR	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Pemerintah daerah dan swasta
TARGET	4,6		Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	
13	INDIKATOR	4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Pemerintah daerah dan swasta
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN				
TARGET	5,2		Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	
2	INDIKATOR	5.2.1 (a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	<p>2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Perlindungan Anak Pusat (Pemenuhan hak dan perlindungan anak

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Indikator Output			Nama Mitra
				dalam rangka mewujudkan Kota Bekasi sebagai Kota Layak Anak)
3	INDIKATOR	5.2.2 (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	2018 • Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bekasi (Penyelenggaraan kegiatan kewaspadaan dini masyarakat dini masyarakat kota Bekasi)
TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK YANG BERKELANJUTAN				
	TARGET	6,1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	
1	INDIKATOR	6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	2017 • PT. Moya Indonesia (Penyusunan Feasibility Study (FS) Pengembangan SPAM) • Usaid Indonesia Urban Water, Sanitation And Hygiene Penyehatan Lingkungan Untuk Semua (Iuwash Plus) (Implementasi Program USAID IUWASH PLUS di Kota Bekasi)
2	INDIKATOR	6.1.1 (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga perkotaan dan industri.	
3	INDIKATOR	6.1.1 (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	
	TARGET	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	
4	INDIKATOR	6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	2017 • Usaid Indonesia Urban Water, Sanitation And Hygiene Penyehatan Lingkungan Untuk Semua (Iuwash Plus) (Implementasi Program USAID IUWASH PLUS di Kota Bekasi)
5	INDIKATOR	6.2.1 (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	
			Persentase RW yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis masyarakat)	
6	INDIKATOR	6.2.1 (d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	
			Persentase RW yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	
7	INDIKATOR	6.2.1 (f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	
	TARGET	6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Indikator Output			Nama Mitra
8	INDIKATOR	6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	2017 • Usaid Indonesia Urban Water, Sanitation And Hygiene Penyehatan Lingkungan Untuk Semua (Iuwash Plus) (Implementasi Program USAID IUWASH PLUS di Kota Bekasi)
	TARGET	6,5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	
11	INDIKATOR	6.5.1 (f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	2019 • PT. Wasteforchange Alam Indonesia (Kerja sama pembersihan sampah Sungai Bekasi berbasis teknologi perahu pembersih sampah sungai)
12	INDIKATOR	6.5.1 (g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	
TUJUAN 8 MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA				
	TARGET	8,3	Menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro kecil, dan menengah termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	
6	INDIKATOR	8.3.1 (c)	Presentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke layanan Keuangan	2017 • Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Bekasi Dan Koperasi Pemilik Kios Dan Ruko (Pkr) Bekasi (Pengelolaan Pusat Promosi KUMKM yang terletak di Jalan Narogong Km. 5 RT. 001 RW 001 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi) 2019 • PT. Wira Inkubator Indonesia (Pengembangan pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bekasi melalui Program Bekasi Mart)
TUJUAN 9 MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN				
	TARGET	9,4	Pada tahun 2030 meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan yang dilaksanakan	
6	INDIKATOR	9.4.1*	Rasio emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	2018 • Yayasan Iclei-Local Governmens For Sustainability Indonesia (Penyusunan komitmen dan strategi Kota Bekasi untuk penurunan emisi gas rumah kaca)
7	INDIKATOR	9.4.1 (a)	Persentase perubahan emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca	
TUJUAN 10 BERKURANNYANYA KESENJANGAN				
	TARGET	10,4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	
5	INDIKATOR	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	2017 • Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota (Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi TKK di Pemerintah

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Indikator Output			Nama Mitra
				Kota Bekasi) 2019 <ul style="list-style-type: none"> BPJS Ketenagakerjaan cabang Kota Bekasi dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi)
TUJUAN 11 MENJADI KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN				
	TARGET	11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	
2	INDIKATOR	11.1.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	2017 <ul style="list-style-type: none"> PT. Trio Propertindo Jaya (Fasilitas Penyediaan Hunian Vertikal Bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi) PT. Trio Propertindo Jaya (Addendum tentang Fasilitas Penyediaan Hunian Vertikal Bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi) 2018 <ul style="list-style-type: none"> PT. Trio Propertindo Jaya (Addendum tentang Fasilitas Penyediaan Hunian Vertikal Bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi) 2019 <ul style="list-style-type: none"> PT. Trio Propertindo Jaya (Fasilitas Penyediaan Hunian Vertikal bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi)
	TARGET	11.2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi renta, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	
3	INDIKATOR	11.2.1(a)	persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	2019 <ul style="list-style-type: none"> PT. Teknologi Rancang Olah Nusantara (Uji Coba Sistem Angkutan Umum sesuai Permintaan (Bus On Demand) di Kota Bekasi)
			Presentase pelayanan angkutan umum yang baik, aman dan nyaman	
	TARGET	11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan perkapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	
5	INDIKATOR	11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota	2017 <ul style="list-style-type: none"> Usaid Indonesia Urban Water, Sanitation And Hygiene Penyehatan Lingkungan Untuk Semua (Iuwash Plus) (Implementasi Program USAID IUWASH PLUS di Kota Bekasi) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Perjanjian Perubahan (Addendum) tentang Peningkatan Pemanfaatan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi) PT. Trie Kencana Persada (Penyediaan Tong Sampah untuk Sekolah Negeri, Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan di Kota Bekasi)
6	INDIKATOR	11.6.1(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Indikator Output			Nama Mitra
	TARGET	11.7	Pada tahun 2020, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas	
7	INDIKATOR	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)	2018 • Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bekasi (Penyelenggaraan kegiatan kewaspadaan dini masyarakat dini masyarakat kota Bekasi)
8	INDIKATOR	11.7.2(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan pada polisi	• Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota (Pembentukan Polisi RW Patriot Polres Metro Bekasi Kota)
	TARGET	11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakandan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan peanganan holistik resiko bencana di semua lini, sesuai denggan the sendai framework for disaster risk reduction 2015-2030	
10	INDIKATOR	11.b.1	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan resiko bencana	2019 • Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Kerja Sama di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana)
TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB				
	TARGET	12.5.	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	
2	INDIKATOR	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	2019 • PT. Bioelektra Power Indonesia (Rencana Pembangunan Instalansi Pengelohan Sampah menjadi Energi Listrik Teknologi Ramah Lingkungan di kota Bekasi) • PT. Matahari Hijau Energy (Pembuatan studi kelayakan atas rencana pembangunan instalasi pengelohan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan di kota Bekasi) • PT. Mamminasata Dalle Konstruksi (Pembuatan Studi Kelayakan atas Rencana Pembangunan Instalansi Pengelohan Sampah menjadi Energi Listrik Benasis Teknologi Ramah Lingkungan di kota Bekasi)
	TARGET	12.8.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	
4	INDIKATOR	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	2019 • Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antar (Media Layanan Informasi Publik)
TUJUAN 13 PENANGGULANGAN PERUBAHAN IKLIM				
	TARGET	13.2.	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan daerah.	
3	INDIKATOR	13.2.1 (a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	2018 • Yayasan Iclei-Local Governmens For Sustainability Indonesia (Penyusunan komitmen

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Indikator Output			Nama Mitra
				dan strategi Kota Bekasi untuk penurunan emisi gas rumah kaca
TUJUAN 16 PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH				
	TARGET	16.1.	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	
1	INDIKATOR	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	2018 • Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bekasi (Penyelenggaraan kegiatan kewaspadaan dini masyarakat dini masyarakat kota Bekasi) • Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota (Pembentukan Polisi RW Patriot Polres Metro Bekasi Kota)
2	INDIKATOR	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	
3	INDIKATOR	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	
	TARGET	16.2.	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	
4	INDIKATOR	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	2017 • Lembaga Perlindungan Anak Pusat (Pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan Kota Bekasi sebagai Kota Layak Anak)
5	INDIKATOR	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	2018 • Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bekasi (Penyelenggaraan kegiatan kewaspadaan dini masyarakat dini masyarakat kota Bekasi) • Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota (Pembentukan Polisi RW Patriot Polres Metro Bekasi Kota)
	TARGET	16.3.	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	
6	INDIKATOR	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	2018 • Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bekasi (Penyelenggaraan kegiatan kewaspadaan dini masyarakat dini masyarakat kota Bekasi) • Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota (Pembentukan Polisi RW Patriot Polres Metro Bekasi Kota)
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	
			Angka Kriminalitas yang tertangani/jumlah penduduk	
7	INDIKATOR	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN				
	TARGET	17.1.	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	
1	INDIKATOR	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	2017 • Kepala Bappenda Kota Bekasi – Perangkat Daerah dan Camat (Pencapaian Target

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Program/Kegiatan/Indikator Output			Nama Mitra
				Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017) 2020 • Wali Kota Bekasi (Optimalisasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Lainnya di Kota Bekasi)
TARGET	17.1.	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.		
2	INDIKATOR	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	2020 • PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Bekasi (Penerapan Alat Transaksi Monitoring Pajak Daerah dalam rangka Optimalisasi asli Daerah) • PT. Bank Pembangunan daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Bekasi (Penerapan Alat Transaksi Monitoring Pajak dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah)

Sumber : Rancangan Perubahan RPJMD Kota Bekasi dan Hasil Analisis Tahun 2020

5.3 KERANGKA PENDANAAN

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih;
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah;
3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM);
4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses, dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup; dan
5. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi.

Rencana program perangkat daerah Kota Bekasi untuk periode Tahun 2019 sampai dengan 2023 berjumlah 112 program sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 dan dalam Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2018-2023 setelah diselaraskan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku menjadi 114 Program, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Kota Bekasi, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah.

Program perangkat daerah Kota Bekasi disajikan berdasarkan urusan/fungsi penunjang Untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah, maka dialokasikan anggaran belanja langsung. Terdapat 2 (dua) kategori belanja langsung yang dijabarkan dalam rencana belanja Kota Bekasi 2019-2023 yakni prioritas 1 dan prioritas 2. Prioritas 1 adalah belanja langsung yang berkaitan dengan kegiatan penunjang urusan di tiap perangkat daerah. Sementara prioritas 2 adalah belanja langsung yang mendukung pelaksanaan program sesuai visi, misi pembangunan dan urusan penyelenggaraan pemerintahan. Adapun jabaran program dengan alokasi anggaran prioritas 2 dimaksud disajikan pada Tabel di bawah ini.

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Tabel 5.6
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN		TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN					PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN							
2	Program Pengelolaan Pendidikan	148,706	180,436	151,138	159,406	167,530	Dinas Pendidikan /Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
3	Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	32.425	39,345	42	45	48	Dinas Pendidikan
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan			4.252	5,90	6,40	Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN							
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	23,3	28,271	30,46	32.288	34.207	Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	99,312	120,502	129,81	137,63	145.803	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah
7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	69,9	84,814	91,37	96.865	102.622	Dinas Kesehatan
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	76,277	92,552	99,70	105,7	111.985	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	22,171	26,901	28,979	30,724	32,549	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
10	Program Pengembangan Permukiman	0	0	70,562	74,364	77,102	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air/Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	107,799	130,798	106.239	111.96	117.667	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
12	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)			46.745	49.264	51.774	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	375,29	314,31	325,45	336,99	348,97	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
14	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional			15.432	16.263	17.230	Dinas Lingkungan Hidup
15	Program Penataan Bangunan Gedung	19,003	23,058	18.729	19.737	20.743	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
16	Program Penyelenggaraan Jalan	239,552	290,663	312.344	331,13	350.792	Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
17	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	25.688	31.169	25,317	26,681	27,663	Dinas Tata Ruang/Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN		TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN					PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
18	Program Pengembangan Perumahan	28.505	34.587	28.093	29.607	31.115	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
19	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	22.171	26.901	21.850	23.028	24.200	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
20	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	38,007	46,116	6.555	6.908	7.260	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
21	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	8.071	9.792	10.548	8.382	8.809	SATPOL PP
22	Program Penanggulangan Bencana	0,000	0,000	1.883	1.982	2.051	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23	Program Penanggulangan Kebakaran	0,897	1,089	1	1	1	Dinas Pemadam Kebakaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
24	Program Pemberdayaan Sosial	0,687	0,833	0,898	0,952	1,008	DINAS SOSIAL
25	Program Rehabilitasi Sosial	1,03	1,25	1,347	1,428	1,513	DINAS SOSIAL
26	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1,03	1,25	1,9	1,9	1,9	DINAS SOSIAL
27	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	0,137	0,167	0,18	0,19	0,202	Dinas Sosial
LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
28	Program Perencanaan Tenaga Kerja	0,198	0,24	0,250	0,600	0,600	Dinas Tenaga Kerja
29	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	0,198	0,24	0,195	0,205	0,216	Dinas Tenaga Kerja
30	Program Penempatan Tenaga Kerja	0,264	0,32	0,195	0,205	0,216	Dinas Tenaga Kerja
31	Program Hubungan Industrial	0,264	0,32	0,260	0,274	0,288	Dinas Tenaga Kerja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
32	Program Perlindungan Perempuan	0,825	0,5	0,406	0,428	0,605	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
33	Program Perlindungan Khusus Anak		0,5	0,406	0,428	0,450	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
34	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	0,495	0,6	0,647	0,686	0,726	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
35	Program Pemenuhan Hak Anak		0,9	0,731	0,770	0,810	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
36	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat			0,171	0,181	0,190	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
37	Program Penanganan Kerawanan Pangan	0,174	0,212	0,172	0,181	0,19	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN		TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN					PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	
38	Program Pengawasan Keamanan Pangan	0,349	0,423	0,344	0,362	0,381	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							
39	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
40	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	305,74	230,69	198,19	209,68	232,58	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
41	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	15.836	19.215	20,699	21,945	23,25	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
42	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	41,045	49,802	20.225	21.315	22.401	Dinas Lingkungan Hidup
43	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)			9.708	10.231	10.752	Dinas Lingkungan Hidup
44	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)			10.517	11.084	11.648	Dinas Lingkungan Hidup
45	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	15,392	18,676	15.169	15.987	16.801	Dinas Lingkungan Hidup
46	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	10,261	12,451	10.113	10.658	11.201	Dinas Lingkungan Hidup
47	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	25.653	31.127	25.146	26.644	28.001	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air
48	Program Pengelolaan Persampahan			25,179	27,105	28,486	Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
49	Program Pendaftaran Penduduk	9,401	11,407	0,276	0,291	0,305	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
50	Program Pencatatan Sipil	0,276		0,344	0,362	0,381	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
51	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			0,161	0,169	0,178	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
52	Program Pengelolaan Profil Kependudukan			0,138	0,145	0,108	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
53	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	0,978	1.187	0,964	1.010	1.068	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
54	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		0,593	0,482	0,508	0,534	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN		TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN					PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	
55	Program Pengendalian Penduduk		2,37,	1.928	2.031	2.135	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
56	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)			15.757	16,607	17.452	Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
57	Program Aplikasi Informatika	1.009	1.225	0,995	1.048	1.101	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
58	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	0,757	0,918	0,746	0,786	0,826	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
59	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam			0,075	0,074	0,081	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
60	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	0,479	0,581	0,226	0,239	0,252	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
61	Program Pengembangan Umkm			0,245	0,257	0,69	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
62	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	0,192	0,233	0,038	0,038	0,096	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
63	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi			0,037	0,042	0,094	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
64	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	0,288	0,349	0,284	0,298	0,314	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
65	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian			0,037	0,042	0,094	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
66	Program Pelayanan Penanaman Modal	0	0	0,251	0,265	0,278	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
67	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	0,128	0,155	0,126	0,133	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
68	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0,191	0,232	0,189	0,199	0,209	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
69	Program Promosi Penanaman Modal	0,319	0,387	0,314	0,331	0,348	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
70	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	0,191	0,232	0,189	0,199	0,209	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
71	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	0,509	0,617	0.500	0.528	0.555	Dinas Pemuda dan Olahraga
72	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	1,272	1,543	2,005	2,113	2,221	Dinas Pemuda dan Olahraga

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN		TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN					PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	
	Keolahragaan						
73	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan			0,150	0,500	0,500	Dinas Pemuda dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
74	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2.523	3.062	2.487	2.621	2.754	Dinas Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
75	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	0,757	0,918	0,746	0,786	0,826	Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
76	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	1,254	1,522	1,235	1,310	1,388	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
77	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	0,251	0,304	0,247	0,261	0,274	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
78	Program Pembinaan Perpustakaan	0	0	0,480	0,504	-	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							
79	Program Pengelolaan Arsip	0,603	0,732	0,594	0,627	0,658	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
80	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			0,289	0,304	0,319	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
81	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan			0,722	0,761	0,800	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
82	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	0,502	0,609	0,495	0,521	0,547	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
83	Program Pemasaran Pariwisata	0,502	0,609	0,339	0,359	0,382	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
84	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif			0,155	0,161	0,164	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
85	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	0,733	0,89	0,432	0,456	0,479	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
86	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0,367	0,445	0,361	0,380	0,400	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
87	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	0,622	0,754	0,613	0,645	0,679	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
88	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	0,622	0,754	0,613	0,645	0,679	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
89	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	0,622	0,754	0,613	0,645	0,679	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN		TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN					PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	
90	Program Pengembangan Ekspor	0,311	0,377	0,306	0,323	0,339	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
91	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	0,622	0,754	0,813	0,861	0,913	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
UNSUR SEKRETARIAT DAERAH							
92	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	10,57	11,207	11,873	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)
93	Program Perekonomian Dan Pembangunan	0,578	0,701	0,755	0,8	0,848	Sekretariat Daerah (Bag. Pembangunan)
94	Program Administrasi Umum						Sekretariat Daerah
UNSUR SEKRETARIAT DPRD							
95	Program Administrasi Umum Pada Sekretariat DPRD						Sekretariat Dewan
96	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	32.467	39.394	42.437	44.992	47.665	Sekretariat Dewan
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
UNSUR PERENCANAAN							
97	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5,56	5,02	4,97	3,67	4,67	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
98	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	N/A	N/A	1,15	1,35	1,65	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
UNSUR KEUANGAN							
99	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2,765	3,355	1,635	1,724	1,811	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
100	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	0,553	0,671	1,090	1,148	1,207	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
101	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	0	0,678	3,673	3,871	4,068	Badan Pendapatan Daerah
UNSUR KEPEGAWAIAN DAERAH							
102	Program Kepegawaian Daerah			2,351	2,480	2,606	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
103	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	0,65	0,60	1,50	2,65	2,99	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
UNSUR PENGAWASAN							
INSPEKTORAT DAERAH							
104	Program Penyelenggaraan Pengawasan	0,948	1,15	1,239	1,314	1,392	Inspektorat Kota
105	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan	0,948	1,15	1,239	1,314	1,392	Inspektorat Kota

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN		TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN					PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB
		2019	2020	2021	2022	2023	
		Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	Rp (Milyar)	
	Asistensi						
UNSUR KEWILAYAHAN							
KECAMATAN							
106	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	40,057	48,603	52,3357	55,51	58,808	Kecamatan
107	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	20,028	170,111	183,251	194,284	205,83	Kecamatan
108	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						Kecamatan
109	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	20,028	24,302	26,179	27,755	29,404	Kecamatan
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
110	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	4,0	8,0	8,0	1,0	1,0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
111	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
112	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	0,35	0,35	0,4	0,4	0,4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
113	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
114	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	0,7	0,75	0,8	0,8	0,9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: RPJMD Perubahan Kota Bekasi 2018-2023

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Kontributor alokasi anggaran terbesar selama 3 tahun pencapaian TPB dilaksanakan oleh DBMSDA Kota Bekasi yang mencapai Rp 520.233 miliar dari total alokasi anggaran TPB. Untuk lebih jelasnya mengenai anggaran pencapaian TPB oleh OPD di Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.7
Anggaran Pencapaian TPB oleh OPD di Kota Bekasi

No	Perangkat Daerah	Target	dilaksanakan mencapai target (SS)	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	tidak ada data (NA)	Kondisi Kinerja RPJMD (Rp milyar)
1	Dinas Pendidikan	17	6	8	3	221,93
2	Dinas Kesehatan	31	11	6	14	394,62
3	RSUD	3	1	0	2	
4	DBMSDA	3	3	0	0	520,23
5	Dishub	2	1	1	0	17,45
6	Perkimtan	16	6	8	2	825,58
7	DISDAGPERIN	7	0	1	6	3,28
8	Dinas Sosial	5	1	0	4	4,62
9	DISNAKER	8	0	5	3	1,32
10	DPPPA	18	7	10	1	2,59
11	Dinas Lingkungan Hidup	9	2	2	5	146,52
12	Disdukcapil	7	0	1	6	0,97
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3			3	3,1
14	DPPKB	8	4	2	2	3,74
15	Diskominfo	4	0	3	1	4,68
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5	2	2	1	3,84
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	3	0	1	2	1,99
18	Balitbangda	2	0	0	2	9,31
19	BPKAD	3	0	0	3	7,09
20	SETWAN	1	0	1	0	47,66
21	SETDA	1	0	0	1	12,72
22	BPBD	16	6	1	9	2,05
23	BPS	15	7	2	6	
24	BPJS	2	0	1	1	
26	kepolisian/Polres	1	0	0	1	
27	sekertariat DPRD	2	1	0	1	
28	KSI	1	0	0	1	
29	Balai Pendayagunaan SDA WS Ciliwung-Cisadane	1	1	0	0	
30	ULP	1			1	
31	BAPENDA					4,06
32	Dinas UMKM					1,62
	Jumlah	195	59	55	81	2240,98

sumber : perubahan RPJMD Kota Bekasi dan hasil analisis 2020



BAB 6 **ALTERNATIF SKENARIO** **DAN REKOMENDASI**

Bab 6 menjelaskan mengenai alternatif skenario dan rekomendasi daya dukung dan daya tampung, alternatif skenario dan rekomendasi untuk indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, alternatif skenario dan rekomendasi untuk indikator yang belum ada data/belum di laksanakan dan hasil pengintegrasian



Perumusan skenario dan rekomendasi pada penyusunan KLHS perubahan RPJMD Kota Bekasi didasarkan pada :

- a. Kondisi Umum Daerah Kota Bekasi
- b. Analisis Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- c. Kondisi daya dukung dan daya Tampung
- d. isu pembangunan berkelanjutan prioritas yang di peroleh dari isu capaian indikator TPB dan isu-isu strategis Kota Bekasi serta permasalahan
- e. rencana dan program dinas/rentra dan masukan dari setiap OPD/SKPD terkait dan
- f. hasil kesepakatan pemangku kepentingan pada saat uji publik

Perumusan skenario dan rekomendasi pada penyusunan KLHS perubahan RPJMD Kota Bekasi meliputi:

- a. Alternatif skenario dan rekomendasi daya dukung dan daya tampung;
- b. Alternatif skenario dan rekomendasi untuk indikator yang belum mencapai target RPJMN 2019 serta indikator yang belum memiliki data;
- c. Alternatif skenario tanpa upaya tambahan yaitu untuk indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target RPJMN 2019.

6.1 ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG

Perumusan alternative skenario dan rekomdasi untuk dayadukung dan daya tampung pada penyusunan KLHS perubahan RPJMD Kota Bekasi meliputi:

- A. Alternatif skenario dan rekomedasi daya dukung dan daya tampung air
Untuk mempertahankan dayadukung air agar tetap ideal/ tidak terus menurun beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah:
 1. Meningkatkan penangkapan air melalui revitalisasi dan pembangunan embung/polder, Pemanenan air hujan (rain water harvesting), Sumur resapan dan biopori
 2. Memenuhi kebutuhan air melalui kerjasama dengan daerah lain yang memiliki ketersediaan air
 3. Peningkatan kualitas air sungai agar layak dimanfaatkan sebagai sumber air baku dengan mengurangi beban cemar pada air dari kegiatan industri dan rumah tangga;
 4. Penerapan sistem produksi bersih pada kegiatan industri agar dapat menghemat penggunaan air, daur ulang pemakaian air, peningkatan kualitas pengolahan limbah cair;
 5. Peningkatan pendidikan lingkungan untuk masyarakat seperti cinta lingkungan, hemat energi dan air, dan pemanfaatan materi dan energi terbarukan
 6. Mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau yang berfungsi isebagai sempadan sungai dan situ;
 7. Penerapan insentif bagi kegiatan industri yang dapat menekan atau menghemat penggunaan air;
- B. Alternatif skenario dan rekomedasi daya dukung dan daya tampung pangan
Untuk menjaga ketersediaan pangan Kota Bekasi tetap ada meskipun tidak surplus maka beberapa upaya yang dapat di lakukan diantaranya:

1. Menjalinkan pola kerjasama dengan kabupaten yang memiliki daya dukung pangan surplus untuk pemenuhan kebutuhan pangan Kota Bekasi;
2. Pengembangan dan penerapan Urban Farming dengan pengembangan kampung hidroponik.
3. Mengoptimalkan fungsi RTH privat sebagai penghasil pangan;
4. Mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
5. Meningkatkan produktivitas padi/ha pada lahan LP2B.
6. Membudayakan diversifikasi pangan;

6.2 ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI UNTUK INDIKATOR YANG SUDAH DILAKSANAKAN DAN BELUM MENCAPI TARGET NASIONAL

Berdasarkan hasil analisis capaian indikator TPB yang didasarkan pada kondisi capaian indikator TPB dan juga kecenderungan perkembangan capaian TPB selama kurun waktu 5 tahun selanjutnya dilakukan perumusan alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Proyeksi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan sampai dengan 2023 dilakukan pada indikator TPB pada masing-masing yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar pembangunan kelembagaan dan hukum yang ada dalam indikator RPJMD tetapi belum mencapai target nasional dan indikator yang belum ada dalam target RPJMD tetapi relevan di Kota Bekasi yang diusulkan untuk dapat dimasukkan.

Proyeksi dilakukan dengan membandingkan rate tahunan secara Business As Usual (BAU) dan rate tahunan terhadap gap target nasional. Proyeksi BAU dilakukan dengan melihat tren perkembangan dari baseline dalam RPJMD pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Sedangkan rate tahunan terhadap gap target nasional dalam TPB membandingkan gap antara capaian dengan target nasional.

Hasil alternative proyeksi dari 55 Indikator capaian TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) maka dirumuskan alternatif proyeksi untuk indikator capaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu:

- **Alternatif Proyeksi tanpa upaya tambahan** diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional. Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan di Kota Bekasi sebanyak 13 indikator
- **Alternatif proyeksi dengan upaya tambahan** disusun untuk percepatan pencapaian target tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Alternative proyeksi dengan upaya tambahan di Kota Bekasi sebanyak 42 indikator.

Dari hasil analisis proyeksi indikator capaian TPB dan juga dengan mempertimbangkan dayadukung dan dayatampung lingkungan serta isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan pencapaian TPB maka dirumuskan alternative scenario dan rekomendasi upaya tambahan untuk indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target RPJMN yang terbagi ke dalam pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar pembangunan hukum. Untuk lebih jelasnya mengenai alternative scenario dan rekomendasi untuk indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target RPJMN dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Tabel 6.1
Perumusan Alternatif Skenario dan Rekomendasi Untuk Indikator TPB Yang Belum Mencapai Target Nasional

1. Alternatif Skenario Dan Rekomendasi Pilar Pembangunan Sosial

Isu Strategis			Skenario	Rekomendasi				Penanggung Jawab/Pelaksana	
Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Isu Dan Permasalahan		Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcome	Program / Kegiatan		
TUJUAN 1 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN									
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	<p><u>Isu PB Prioritas:</u> (Penguatan Perekonomian Kota)</p> <p><u>Permasalahan:</u> Tingkat kemiskinan di Kota Bekasi hingga tahun 2018 mencapai 4.11 %, Namun dengan adanya bencana banjir dan juga bencana pandemic covid 19 angka kemiskinan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 8,56%</p>	Tingkat kemiskinan Kota Bekasi sebelum terjadinya pandemic covid 19 lebih rendah di bandingkan dengan tingkat kemiskinan yang di tetapkan SDGs sebesar 7%, Namun setelah terjadinya bencana banjir dan pandemic Covid, tingkat kemiskinan melebihi target SDGs sehingga perlu upaya-upaya tambahan untuk menurunkan angka kemiskinan sesuai target nasional dan target RPJM kota Bekasi sebesar 4,01% pada tahun 2023	Penurunan angka kemiskinan di bawah target nasional	1.Meningkatan lapangan pekerjaan 2.Mengembangkan ekonomi kreatif untuk membuka peluang usaha/pekerjaan	menurunnya persentase angka kemiskinan	<p>1. Program penanganan dampak Covid 19 meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendataan dan validasi Penduduk Miskin dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem layanan rujukan terpadu ▪ pemberdayaan masyarakat miskin melalui bantuan modal dan keterampilan usaha kreatif ▪ program bantuan pangan warga miskin serta penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin <p>2. Program pengembangan dan peningkatan UMKM melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro; ▪ Peningkatan dan pengembangan kewirausahaan; ▪ Pelatihan peningkatan usaha dan pemasaran 	<p>Pemerintah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial • Dinas UMKM • Dinas Tenaga Kerja <p>Non Pemerintah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pihak swasta

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Isu Strategis			Skenario	Rekomendasi				Penanggung Jawab/Pelaksana	
Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Isu Dan Permasalahan		Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcome	Program / Kegiatan		
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1 (e) : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	<p><u>Isu PB Prioritas:</u> (peningkatan layanan air bersih dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan)</p> <p><u>Permasalahan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani sebesar 29,07% tahun 2018 Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestic baru mencapai 3,39% (tahun 2018) Sistem pengelolaan persampahan yang belum optimal dimana cakupan Area Pelayanan baru mencapai 70,00% kondisi daya dukung jasa ekosistem pengelola dan 	1. Meningkatkan presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan sebesar 100%.; 2. Target kawasan kumuh 0%	Meningkatkan akses pada pelayanan sanitasi layak hingga 100%.	Pembangunan dan pengembangan penyediaan layanan sanitasi layak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (air minum, persampahan, limbah dan jaringan drainase)	Terpenuhinya akses terhadap layanan sanitasi layak bagi seluruh masyarakat	<p>Program peningkatan penyediaan sanitasi layak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (air minum, persampahan, limbah dan jaringan drainase) melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan penangan kawasan kumuh pada lokasi-lokasi yang belum tertangani Penataan kawasan kumuh secara simultan Sosialisasi dan pendampingan program sanimas; Peningkatan jaringan air minum sistem perpipaan Pembangunan dan peningkatan sistem pengelolaan limbah padat dan cair secara terpadu; Membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan jaringan prasarana dan sarana dasar perkotaan; pembangunan prasarana dan utilitas kota secara terpadu. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang 	<p>secara online</p> <p>Pemerintah :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perkimtan DBMSDA DLH <p>Non Pemerintah :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pihak swasta

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Isu Strategis			Skenario	Rekomendasi				Penanggung Jawab/Pelaksana	
Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Isu Dan Permasalahan		Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcome	Program / Kegiatan		
		penguraian limbah sangat rendah 57,5% dan 26,19%					terintegrasi dan terhubung langsung dengan sungai dan saluran		
TUJUAN 2 MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN									
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	<p><u>Isu PB Prioritas:</u> Dayadukung dan daya tampung</p> <p><u>Permasalahan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> kondisi daya dukung ketersediaan pangan defisit Jasa ekosistem penyedia pangan di katagorakan sangat rendah Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan pokok/ beras; Masih rendahnya ketersediaan pangan utama; Skor Pola Pangan Harapan masih di bawah target nasional yaitu baru mencapai 87,4% (tahun 2019) Persentase Penanganan kerawanan 	Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan sampai dengan 92,5% sesuai dengan skor pola pangan harapan nasional;	Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan harapan nasional;	Menjalin pola kerjasama dengan kabupaten yang memiliki dayadukung pangan surplus untuk pemenuhan kebutuhan pangan Kota Bekasi	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Menjalin pola kerjasama dengan kabupaten yang memiliki daya dukung pangan surplus untuk pemenuhan kebutuhan pangan Kota Bekasi; Pengembangan dan penerapan Urban Farming dengan pengembangan kampung hidroponik. Mengoptimalkan fungsi RTH privat sebagai penghasil pangan; Mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Meningkatkan produktivitas padi/ha pada lahan LP2B. Membudayakan diversifikasi dan ketahanan Pemberian insentif bagi pemilik lahan pertanian berupa keringanan PBB, bantuan saprotan (sarana Prorduksi pertanian), dan pelatihan pemasaran Program Penanganan Kerawanan Pangan 	Pemerintah : <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Dinas Ketahanan Pangan Non Pemerintah : <ul style="list-style-type: none"> Pihak swasta
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara Internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah	2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai dan tingkat konsumsi ikan.							

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Isu Strategis			Skenario	Rekomendasi				Penanggung Jawab/Pelaksana	
Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Isu Dan Permasalahan		Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcome	Program / Kegiatan		
usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.		pangan baru mencapai 69,58%							
TUJUAN 3 MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA									
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	<u>Isu PB strategis:</u> Peningkatan Pelayanan Sosial <u>Permasalahan:</u> proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih baru mencapai 88%	Meningkatkan proporsi pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih sesuai target nasional 95%	Meningkatkan proses melahirkan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan SDM, dan pengembangan sistem layanan kesehatan.	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi ibu melahirkan	Program peningkatan akses terhadap kualitas layanan kesehatan melalui kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kinerja layanan kesehatan kepada ibu hamil dan melahirkan ; ▪ meningkatkan kinerja layanan kesehatan untuk balita; ▪ penyuluhan kesehatan ibu hamil dan balita secara simultan. ▪ Penguatan dan peningkatan layanan posyandu untuk pemeriksaan ibu hamil dan balita ▪ meningkatkan kualitas SDM/Tenaga medis 	Pemerintah : <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan Non Pemerintah : <ul style="list-style-type: none"> • Pihak swasta
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan	Angka Kematian Balita (AKBa) dan kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran anak.	<u>Isu PB Strategis:</u> (peningkatan pelayanan Kesehatan) <u>Permasalahan:</u> Angka kematian balita dan kematian balita per1000 kelahiran anak masih di atas target nasional (Menurunkan proporsi angka kematian balita sesuai dengan target nasional sebesar 0%	Mengakhiri kematian bayi dan balita per1000 kelahiran anak sesuai target nasional		Tercapainya target nasional 0% untuk angka kematian balita		

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Isu Strategis			Skenario	Rekomendasi				Penanggung Jawab/Pelaksana	
Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Isu Dan Permasalahan		Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcome	Program / Kegiatan		
Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.		1,1 tahun 2017)							
TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA									
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1 (a) Presentase SD/MI berakreditasi minimal B. 4.1.1 (b) Presentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. 4.1.1 (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat 4.1.1 (e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat.	<p><u>Isu PB Strategis:</u> [peningkatan Pelayanan pendidikan)</p> <p><u>Permasalahan:</u> 1. Sarana pendidikan yang berakreditasi minimal B belum mencapai target nasional; 2. Nilai APK SMP/MTs/ sederajat dari 95,32 pada tahun 2017 menurun menjadi 94,81% namun demikian Nilai APK selama kurun waktu 1 tahun meningkat, hal ini tergambar dari:</p>	Perlu upaya tambahan untuk 1. Meningkatkan capaian APK tingkat pendidikan Paud, SD/SMP sederajat sesuai target nasional; 2. Peningkatan kualitas pendidikan lebih merata.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang merata	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan layanan pendidikan non formal Meningkatkan layanan pendidikan dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital 	Tercapainya Nilai APK sesuai target nasional	<ol style="list-style-type: none"> Program pendidikan dan tenaga pendidik meliputi kegiatan <ul style="list-style-type: none"> Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (formal dan non formal) peningkatan pelayanan pendidikan berbasis IT; Peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan yang menghasilkan lulusan yang bersertifikasi; Program Pengelolaan pendidikan melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> pemberiaan bantuan biaya pendidikan kepada sekolah/mahasiswa berprestasi yang kurang mampu; 	Pemerintah : • Dinas Pendidikan Non Pemerintah : • Pihak swasta
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses	4.2.2 (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).							

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Isu Strategis			Skenario	Rekomendasi				Penanggung Jawab/Pelaksana
Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Isu Dan Permasalahan		Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcome	Program / Kegiatan	
terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.		<ul style="list-style-type: none"> • Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat dari 95,32% pada tahun 2017 meningkat menjadi 110% pada tahun 2019, • Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat dari 75,89% pada tahun 2017 meningkat menjadi 107% pada tahun 2019 ; • Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meningkat menjadi 92,75% tahun 2019 				<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan sarana dan prasana pendidikan formal dan non formal. • Peningkatan kemampuan akses terhadap internet (hardware dan software) bagi pelajar dan mahasiswa. 		

Sumber: Hasil Analisis Dan Uji Publik II, Tahun 2020

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

2. Alternatif Skenario Dan Rekomendasi Pilar Pembangunan Ekonomi

Isu Strategis			Rekomendasi						
Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Isu Dan Permasalahan	Skenario	Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcame	Program/Kegiatan	Pelaksana Dan Penanggungjawab	
Tujuan 8 : meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua									
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi perkapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	8.1.1 Laju pertumbuhan PDB perkapita 8.1.1 (a) PDB perkapita/ tahun	<p><u>Isu PB Prioritas:</u> (penguaran Perekonomian)</p> <p><u>Permasalahan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Laju pertumbuhan PDB perkapita pada tahun 2017 baru mencapai 3,05 % Menurunnya kemandirian ekonomi daerah. Dampak adanya pandemic covid: <ul style="list-style-type: none"> Laju pertumbuhan ekonomi menurun; prosentase peningkatan PDA di prediksi akan menurun; 	Berdasarkan hasil perhitungan rate BAU dengan laju pertumbuhan PDB 0,51%/tahun maka pada tahun 2023 target yang akan dicapai baru mencapai 6,13% maka untuk mencapi laju pertumbuhan 7% perlu adanya upaya tambahan.	Meningkatkan laju pertumbuhan PDB perkapita lebih tinggi dari target nasional	Membuat kebijakan investasi dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan kesempatan kerja	Tercipta Iklim Usaha Yang Berdaya Saing	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan PDRB per kapita sesuai target nasional; Melakukan efisiensi belanja daerah; Mencari sumber pertumbuhan baru dari perekonomian berbasis kreatif; Pemberiaan stimulus PBB (pajak Bumi Dan Bangunan) kepada masyarakat berpenghasilan rendah; peningkatan dan peluasan basis data pajak dan redistribusi daerah Digitasi platpom pelayanan pajak dan redistribusi daerah peningkatan dan pengutan kompetisi dan skill integritas SDM operator pajak dan redistribusi daerah peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah melalui pengelolaan sumberdaya daerah secara lebih profesional Penyempurnaan sistem dan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah Program peningkatan 	<p>Pihak Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> BAPENDA, Disdagperin <p>Pihak Non Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> swasta

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Isu Strategis			Rekomendasi					
Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Isu Dan Permasalahan	Skenario	Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcame	Program/Kegiatan	Pelaksana Dan Penanggungjawab
							kerjasama perdagangan internasional. 11. Peningkatan kemampuan pemasaran dan usaha secara online	
8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas dan upah yang sama untuk pekerja yang sama nilainya	8.5.2 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (angka pengangguran terbuka)	<u>Isu PB Prioritas:</u> (penguaran Perekonomian) <u>Permasalahan;</u> 1. Masih tingginya tingkat pengangguran yaitu sebesar 8,20 % (tahun 2020) 2. Dampak dari adanya pandemi Covid angka pengangguran akan cenderung naik/meningkat.	Perlu upaya tambahan untuk menurunkan angka pengangguran lebih rendah dari target nasional (5,5 %)	Menurunkan angka pengangguran lebih rendah dari tingkat pengangguran nasional	Membuat kebijakan investasi dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan kesempatan kerja	Tercipta Iklim Usaha Yang Berdaya Saing 1. peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru UMKM, UMKM Online, Startup; 2. penyelenggaraan bursa tenaga kerja; 3. pengembangan industri kreatif untuk membuka peluang kerja; 4. Memasukan indikator program pembangunan untuk membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas ; 5. Memberikan upah yang sama bagi pekerjaan penyandang disabilitas sesuai dengan UMR yang telah di tetapkan; 6. membuka peluang pekerjaan dari berbagai sektor yang potensial 7. Peningkatan kompetensi dan kapasitas wirausaha dalam bentuk pelatihan 8. Membuat aplikasi berbasis mobile yang berisi data dan informasi UMKM yang ada di Kota Bekasi sekaligus tersedia	Pihak Pemerintah • Diskukm • Dlsnaker Pihak Non Pemerintahan • swasta

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Isu Strategis			Rekomendasi						
Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Isu Dan Permasalahan	Skenario	Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcame	Program/Kegiatan	Pelaksana Dan Penanggungjawab	
							menu untuk membeli produk UMKM tersebut 9. Penyelenggaraan Job fair yg sesuai dengan kebutuhan pasar dan backgroun		
TUJUAN 9: MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN									
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1 (a) Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita. 9.2.1 (b) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (Laju Pertumbuhan Ekonomi industri pengolahan).	<p><u>Isu PB Prioritas:</u> (penguatan Perekonomian)</p> <p><u>Permasalahan:</u> 1. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (di Kota Bekasi selama kurun waktu 5 tahun (2013-2017) yang terus menurun, dari data LPP ndustri manupaktur tahun 2018 sebesar 3,71% kontribusi sektor industri terhadap PDRB dalam beberapa tahun terakhir terus menurun. 2. Pada tahun 2013 sektor ini mampu menyumbang sebesar 36,34 persen (Rp20,97 triliun), namun merosot hingga 35,19 persen tahun 2015 dan kemudian 26,58 (tahun 2017)</p>	1. Meningkatkan laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB nasional (4,3%); 2. Mempertahankan kontribusi sector industri terhadap PDRB jangan sampai di bawah standar nasional	Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur dan mempertahankan kontribusi sector industri terhadap PDRB	Pengembangan dan pembangunan industri manufaktur berdaya saing	Tercapainya laju pertumbuhan PDB industri lebih tinggi dari pertumbuhan PDB industri nasional	1. Meningkatkan jumlah industri manufaktur; 2. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri kreatif dan inovatif ; 3. Pengembangan industri yang mampu menjaga ekosistem, memelihara sumber daya yang berkelanjutan; 4. peningkatan infrastruktur industri; 5. Program peningkatan kualitas SDM dalam sektor industri; 6. Program peningkatan daya saing industri. 7. Pengembangan saint dan kreatif centre	Pihak Pemerintah • Disdagperin Pihak Non Pemerintahan • swasta

Sumber: Hasil Analisis Dan Uji Publik , Tahun 2020

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

3. Alternatif Skenario Dan Rekomendasi Pilar Pembangunan Lingkungan

Isu Strategis				Skenario	Rekomendasi				Penanggung Jawab/ Pelaksana
Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Isu Dan Permasalahan	Sasaran		Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcome	Program / Kegiatan		
Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Layak Yang Berkelanjutan									
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1 (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak;	<p>Isu PB Prioritas : Peningkatan layanan air bersih dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan</p> <p>Permasalahan: 1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum 26,7% tahun 2018 2. Daya dukung dan daya tampung ketersediaan air akan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan yang membutuhkan ketersediaan air; 3. Kondisi Jasa ekosistem penyedia air di Kota Bekasi pada umumnya di katagorikan sangat rendah sebesar 70%, katagori sedang sebesar 17,40%;</p> <p>4. Daya dukung jasa ekosistem pemurnian air pada umumnya rendah sekitar 54,6 % dan sedang 34,55 %.</p>	<p>Pelu adanya upaya tambahan agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan presentase penduduk berakses air minum yang baru mencapai 31,32% sampai akhir tahun 2023 sehingga untuk mencapai target nasional yaitu berakses air minum 100% perlu upaya tambahan; Mempertahankan daya dukung air sehingga tidak terus menurun; menurunkan Tingkat pencemaran air permukaan sebagai salah satu sumber air baku 	<p>pemerataan dan pemenuhan kebutuhan air minum layak sesuai target nasional</p>	<p>Mengembangkan dan meningkatkan akses terhadap layanan sumber air minum yang layak</p>	<p>Terpenuhinya kebutuhan sumber air minum layak dan aman bagi masyarakat</p>	<p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem pengelolaan Air Minum melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan/ Peningkatan/Perluasan /Perbaikan SPAM Pemerintah (PDAM Kota Bekasi) Pembangunan /Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM Swasta Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM Operasi dan Pemeliharaan SPAM Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk pembangunan dan peningkatan jaringan SPAM pengembangan SPAM non PDAM/Swasta di prioritaskan untuk wilayah-wilayah yang belum terlayani sistem penyediaan air minum sistem perpipaan 	<p>Pihak Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> DISPERKIMTAN PDAM DBMSDA SDA Provinsi BBWS CC PJT II <p>Pihak Non Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> swasta IUWASH
		6.1.1 (b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga perkotaan		<p>Pemenuhan kebutuhan air dari sumber air berkelanjutan</p>	<p>Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan air permukaan sebagai sumber air baku</p>	<p>Penurunan tingkat pencemaran air sungai</p>	<p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Air Baku melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembangunan pola kerjasama dengan kabupaten lain untuk penyediaan air Pembangunan Instalasi 		

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Isu Strategis		Skenario	Rekomendasi				Penanggung Jawab/ Pelaksana
		Indikator	Isu Dan Permasalahan		Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcome	Program / Kegiatan	
		dan industri; 6.1.1 (c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan						penyediaan dan pengolahan air baku; c.pencegahan beban pencemar pada air dari kegiatan industri dan rumah tangga; d.Penerapan sistem produksi bersih pada kegiatan industri agar dapat menghemat penggunaan air baku e.peningkatan penangkapan air melalui revitalisasi dan pembangunan embung/polder;	
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1 (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. 6.2.1.(d) Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	<u>Isu PB Prioritas :</u> Peningkatan layanan air bersih dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan <u>Permasalahan:</u> 1. Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestic baru mencapai 3,39% (tahun 2018) 2. Sistem pengelolaan persampahan yang belum optimal dimana cakupan Area Pelayanan baru mencapai 70,00% 3. kondisi daya dukung jasa ekosistem pengelola dan	- Berdasarkan hasil perhitungan rate BAU, laju pertumbuhan tingkat layanan sanitasi 0,23 %/tahun maka pada tahun 2023 target yang akan di capai sebesar 91,88 %sehingga untuk mencapai target nasional 100% - Berdasarkan hasil perhitungan rate BAU, laju Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem	Meningkatkan akses pada pelayanan sanitasi layak hingga 100%.	Pembangunan dan pengembangan penyediaan layanan sanitasi layak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (air minum, persampahan, limbah dan jaringan drainase)	Terpenuhinya akses terhadap layanan sanitasi layak bagi seluruh masyarakat	Program peningkatan penyediaan sanitasi layak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (air minum, persampahan, limbah dan jaringan drainase) melalui: a.Peningkatan penanganan kawasan kumuh pada lokasi-lokasi yang belum tertangani b.Penataan kawasan kumuh secara simultan c.Sosialisasi dan pendampingan program animas; d.Peningkatan jaringan air minum sistem perpipaan e.Pembangunan dan peningkatan sistem pengelolaan limbah padat dan cair secara terpadu; f. Membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan jaringan prasarana dan sarana dasar perkotaan; g.pembangunan prasarana dan utilitas kota secara terpadu. h.Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terintegrasi dan terhubung langsung dengan sungai dan slauran	Pihak Pemerintah • DISPERKIMTAN • PDAM • DBMSDA • DLH Pihak Non Pemerintahan • swasta

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Isu Strategis			Skenario	Rekomendasi				Penanggung Jawab/ Pelaksana	
Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Isu Dan Permasalahan		Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcome	Program / Kegiatan		
		penguraian limbah sangat rendah 57,5 % dan 26,19 %	pengelolaan air limbah terpusat pada tahun 2023 baru mencapai 59,92% sehingga untuk mencapai target nasional sebesar 75% perlu adanya upaya tambahan						
TUJUAN 11 : MENJADI KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN									
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1 (a) Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	<p><u>Isu PB Prioritas :</u> (peningkatan layanan air bersih dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan)</p> <p><u>Permasalahan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani sebesar 29,07% tahun 2018 Luas Kawasan Kumuh Tahun 2020 sekitar 430 Ha Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni 23,88% (Tahun 2018) kemampuan lahan di Kota Bekasi sebagian besar termasuk kelas II (70,12%) dengan demikian kemampuan 	<ol style="list-style-type: none"> Perlu upaya tambahan untuk menurunkan kawasan kumuh sesuai dengan target nasional (0%) Meningkatkan Proporsi rumah tangga yang 	<ol style="list-style-type: none"> Mengurangi kawasan kumuh hingga 0% Peningkatan cakupan 	<p>Meningkatkan pencegahan dan penanganan kawasan kumuh secara simultan di seluruh Kota Bekasi</p> <p>Meningkatkan Menyediakan rumah layak huni</p>	<p>Tercapainya Wilayah Kota Bekasi yang bebas kumuh</p> <p>Terpenuhinya rumah layak huni dan</p>	<p>a. Program peningkatan penanganan kawasan kumuh melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh melalui peremajaan, pemugaran dan revitalisasi kawasan Peningkatan penanganan kawasan kumuh pada lokasi-lokasi yang belum tertangani, Penataan kawasan kumuh secara simultan Penyusunan Rencana Tapak (<i>Site Plan</i>) dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni serta PSU Peningkatan dan pembangunan PSU secara terpadu <p>b. Program pembangunan hunian/rumah yang layak dan terjangkau melalui:</p>	<p>Pihak Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> DISPERKIMTAN PDAM <p>Pihak Non Pemerintahan swasta</p>

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Isu Strategis		Skenario	Rekomendasi				Penanggung Jawab/ Pelaksana
		Indikator	Isu Dan Permasalahan		Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcome	Program / Kegiatan	
		11.1.1.(b) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	lahan Kota Bekasi merupakan lahan potensial untuk pengembangan kawasan budaya perkotaan; 5. Daya dukung jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup sangat tinggi 57,16 % dan sedang 40,56% .	memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau sesuai target nasional	layanan rumah layak huni dan terjangkau	dan terjangkau	terjangkau untuk MBR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pengembangan dan pembangunan hunian vertikal (rusunawa dan rusunami) ▪ Penyediaan rumah bagi MBR ▪ Pemberiaan subsidi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah <p>c. Program Pengembangan jaringan masyarakat dalam pengelolaan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan pemukiman</p>	
11.2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan orang tua.	11.2.1 persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	<p><u>Isu Strategis:</u> Belum optimalnya pengguna moda angkutan umum (Peningkatan infrastruktur)</p> <p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengguna moda transportasi umum Kota Bekasi baru mencapai 28 %. 2. Persentase layanan angkutan umum massal 50% 3. Rendahnya sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi kriteria pengguna dengan katagori kebutuhan khusus 	Meningkatkan pengguna moda transportasi massal di Kota Bekasi sesuai target nasional baru mencapai 28 % maka perlu upaya tambahan pada target 11.2	Meningkatkan pengguna moda transportasi massal di Kota Bekasi	Mengembangkan moda angkutan massal dan sarana prasarana pendukungnya yang ramah lingkungan	Tersedianya angkutan massal yg aman dan nyaman bagi pengguna	<p>a. pengembangan angkutan massal kota berbasis jalan dan rel I yang terintegrasi dengan moda angkutan yang ada;</p> <p>b. Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</p> <p>c. pengembangan sistem jaringan transportasi dan angkutan massal yang ramah lingkungan dan masyarakat berkebutuhan khusus lainnya</p>	Pihak Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> • DISHUB • DBMSDA Pihak Non Pemerintahan swasta
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak	11.6.1 Proporsi limbah padat perkotaan yang	<u>Isu PB Prioritas</u> (peningkatan layanan air bersih dan sanitasi yang aman	Berdasarkan hasil perhitungan rate BAU laju pertumbuhan	Terwujudnya pola penanganan sampah/	Meningkatkan kinerja sistem pelayanan dan pengelolaan	Terhindarnya pencemaran lingkungan akibat	Program pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang meliputi: a. Penyusunan Rencana,	Pihak Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> • DLH Pihak Non

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Isu Strategis			Skenario	Rekomendasi				Penanggung Jawab/ Pelaksana
Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Isu Dan Permasalahan		Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcome	Program / Kegiatan	
lingkungan perkotaan perkapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota 11.6.1(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani	dan berkelanjutan) <u>Permasalahan:</u> 1. Persentase Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R baru mencapai 24,94% 2. Persentase sampah yang terangkut ke TPA baru mencapai 67,15% 3. Persentase Cakupan Area Pelayanan baru mencapai 70,00% 4. Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA baru mencapai 71,72%; 5. kondisi daya dukung jasa ekosistem pengelola dan penguraian limbah sangat rendah 57,5 % dan 26,19 %	sampah yang tertangani setiap tahun rata-rata sekitar 1,39 % maka pada tahun 2023 target yang akan di capai sebesar 72,15 % maka untuk mencapai target nasional sebesar 100% perlu upaya tambahan	limbah padat hingga 100%	persampahan	limbah padat	Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA /TPS-3R /TPS b. Penggunaan teknologi dalam pengolahan sampah baik di TPA maupun di TPST antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemvrop DKI yang dituangkan dalam PKS. c. Peningkatan mekanisme pengelolaan sampah dari sistem sanitari landfill menjadi pemusnahan sampah melalui penggunaan teknologi d. Edukasi dan sosialisasi pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini bagi anak sekolah. e. pengelolaan sampah berbasis masyarakat/swakelola persampahan di 12 Kecamatan. f. Penerapan sanksi atau Perda terhadap perorangan atau institusi yang melakukan pembuangan sampah secara ilegal g. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan minimalisasi sampah kepada skala rumah tangga (Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Repair) h. Pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dari dimulai dari sumbernya: i. pengurangan produksi dan pengurangan penggunaan kantong plastic j. pembangunan sarana daur	Pemerintahan swasta

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Isu Strategis		Skenario	Rekomendasi				Penanggung Jawab/ Pelaksana
		Indikator	Isu Dan Permasalahan		Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcome	Program / Kegiatan	
								<ul style="list-style-type: none"> ulang sampah di 12 kecamatan k. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan l. Penambahan armada angkut sampah sehingga sampah di pasar rakyat dapat diangkut ke TPA setiap hari m. Peningkatan koordinasi penanganan limbah industry n. Kerjasama untuk pengolahan sampah organik dan non organik di pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan pasar modern o. Program pengurangan sampah "PESAN MAMA" (Peduli Sampah Bersama-Sama) 	
11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas .	<p>11.7.1 proporsi ruang terbuka hijau perkotaan untuk semua menurut kelompok usia jenis kelamin dan penyandang disabilitas.</p> <p>11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan</p>	<p><u>Isu PB Prioritas:</u> Daya dukung jasa ekosistem penyedia, pengatur pada umumnya dikategorikan rendah-sangat rendah</p> <p><u>Permasalahan:</u> 1. Belum terpenuhinya proporsi 30% RTH di Kota Bekasi 2. adanya alih fungsi lahan; 3. masih kurangnya ruang terbuka publik</p>	<p>1. Meningkatkan proporsi luas RTH sehingga mencapai target nasional; 2. Mewujudkan peruntukan ruang kawasan lindung sesuai dengan RTRW dan RDTR Kota Bekasi</p>	<p>1. Terwujudnya proporsi luas RTH sebesar 30% 2. Terwujudnya peruntukan ruang kawasan lindung sesuai dengan RTRW dan RDTR Kota Bekasi</p>	Pengembangan dan peningkatan ruang terbuka hijau publik dan privat	Tercapainya pemenuhan RTH sesuai target nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Program pengembangan dan peningkatan ruang terbuka hijau melalui kegiatan: b. Penyediaan/pembebasan lahan untuk pengembangan RTH Publik c. Pengembangan ruang terbuka hijau sesuai RTRW dan RDTR Kota Bekasi; d. Pemanfaatan RTH instansi/swasta sebagai RTH Publik dengan pola kerjasama. e. Pemberiaan insentif bagi pengembang /fihak swasta yang menyediakan RTH Publik melebihi kewajiban yang disyaratkan; f. Penyediaan RTH dengan pola kerjasama /CSR; g. Peningkatan aksesibilitas terhadap sarana dan ruang 	<p>Pihak Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Tata Ruang • Dinas Perkimtan • DBMSDA <p>Pihak Non Pemerintahan swasta</p>

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Isu Strategis			Skenario	Rekomendasi				Penanggung Jawab/ Pelaksana	
Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Isu Dan Permasalahan		Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcome	Program / Kegiatan		
	dan kota sedang.						public bagi penyandang disabilitas; h. Pengenaan disantif bagi pihak swasta /pengembang yang tidak menyediakan RTH sesuai ketentuan i. Pengembangan situs ekologi sebagai salah satu RTH publik dengan fungsi wisata edukasi ekologi		
TUJUAN 12 : KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB									
12.4	Pada tahun 2030 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional	12.4.1 Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). (Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah pada dan B3).	<u>Isu PB Prioritas:</u> (peningkatan layanan air bersih dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan) <u>Permasalahan:</u> 1. Pengelolaan limbah B3 belum optimal hal ini terlihat Persentase Usaha Kegiatan yang Memiliki TPS Limbah B3 baru mencapai 40% 2. kondisi daya dukung jasa ekosistem pengelola dan penguraian limbah sangat rendah 57,5 % dan 26,19 %	Meningkatkan penanganan/pengeolaan limbah sehingga mencapai target nasional.	Mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah B3 sehingga dapat meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	Meningkatkan sistem pengelolaan dan penanganan limbah B3	Terhindarnya pencemaran lingkungan akibat limbah B3	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) : a. Meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah B3; b. Menerapkan prinsip industri bersih (<i>Clean production</i>); c. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan dan penegakan hukum lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan; d. Menerapkan konsep 5 R (<i>Re-think, Re-use, Reduction, Recovery, dan Recycle</i>) pada industri .	Pihak Pemerintah • Dinas Lingkungan Hidup • DISPERKIMTAN Pihak Non Pemerintahan swasta
12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan,	12.5.1 Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (Prosentase Pelayanan /	<u>Isu PB Prioritas:</u> (peningkatan layanan air bersih dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan) <u>Permasalahan:</u> 1. Persentase Jumlah	Berdasarkan hasil perhitungan rate BAU laju pertumbuhan sampah yang tertangani setiap tahun rata-rata sekitar 1,39 %	Terwujudnya pola penanganan sampah hingga 100%	Meningkatkan kinerja sistem pelayanan dan pengelolaan persampahan	Terhindarnya pencemaran lingkungan akibat sampah	Program pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang meliputi: a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS	Pihak Pemerintah • Dinas Lingkungan Hidup Pihak Non Pemerintahan swasta

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Isu Strategis		Skenario	Rekomendasi				Penanggung Jawab/ Pelaksana
		Indikator	Isu Dan Permasalahan		Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcome	Program / Kegiatan	
	pengurangan , daur ulang, dan penggunaan kembali.	Pengangkutan Sampah).	<p>sampah yang terkurangi melalui 3R baru mencapai 24,94%</p> <p>2. Persentase sampah yang terangkut ke TPA baru mencapai 67,15%</p> <p>3. Persentase Cakupan Area Pelayanan baru mencapai 70,00%</p> <p>4. Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA baru mencapai 71,72%;</p> <p>5. kondisi daya dukung jasa ekosistem pengelola dan penguraian limbah sangat rendah 57,5 % dan 26,19 %</p>	maka pada tahun 2023 target yang akan di capai sebesar 72,15 % maka untuk mencapai target nasional sebesar 100% perlu upaya tambahan				<p>b. Penggunaan teknologi dalam pengolahan sampah baik di TPA maupun di TPST antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemprov DKI yang dituangkan dalam PKS.</p> <p>c. Peningkatan mekanisme pengelolaan sampah dari sistem sanitari landfill menjadi pemusnahan sampah melalui penggunaan teknologi</p> <p>d. Edukasi dan sosialisasi pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini bagi anak sekolah.</p> <p>e. pengelolaan sampah berbasis masyarakat/swakelola persampahan di 12 Kecamatan.</p> <p>f. Penerapan sanksi atau Perda terhadap perorangan atau institusi yang melakukan pembuangan sampah secara illegal</p> <p>g. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan minimalisasi sampah kepada skala rumah tangga (Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Repair)</p> <p>h. Pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dari dimulai dari sumbernya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pengurangan produksi dan pengurangan penggunaan kantong plastik • pembangunan sarana daur ulang sampah di 12 kecamatan <p>i. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem</p>	

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Isu Strategis		Skenario	Rekomendasi				Penanggung Jawab/ Pelaksana
		Indikator	Isu Dan Permasalahan		Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcome	Program / Kegiatan	
								pengelolaan i. Penambahan armada angkut sampah sehingga sampah di pasar rakyat dapat diangkut ke TPA setiap hari j. Peningkatan koordinasi penanganan limbah industri k. Kerjasama untuk pengolahan sampah organik dan non organik di pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan pasar modern l. Program pengurangan sampah " PESAN MAMA" (Peduli Sampah Bersama-Sama)	
Tujuan 13 : Penanggulangan Perubahan Iklim									
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	<u>Isu PB Prioritas:</u> Kebencanaan <u>Permasalahan:</u> Belum adanya dokumen strategi pengurangan risiko bencana	Menyediakan/menyusun dokumen strategi pengurangan risiko bencana	Tersusunnya dokumen strategi pengurangan risiko bencana	Rencana penyusunan dokumen strategi pengurangan risiko bencana	Tersedianya strategi pengurangan risiko bencana	a. Program penyusunan dokumen strategi pengurangan risiko bencana b. Program pendataan terkait dengan indikator strategi pengurangan risiko bencana	Pihak Pemerintah • BPDB Pihak Non Pemerintahan swasta
		13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	<u>Isu PB Prioritas:</u> Kebencanaan <u>Permasalahan:</u> 1. Kondisi daya dukung Jasa ekosistem pengatur tata air dan banjir di Kota Bekasi umumnya memiliki katagori sangat rendah	1. Meniminalkan jumlah korban yang terkena bencana alam; 2. Setiap tahun perlu adanya upaya penanganan bencana banjir sehingga pada tahun	1. Meniminalkan jumlah korban yang terkena bencana alam; 2. Berkurangnya kawasan banjir	Meningkatkan program penanggulangan bencana	tertanganinya kawasan banjir	a. Program peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana melalui: • Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana • Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; • Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan	Pihak Pemerintah - BNPB - BPBD Jabar - BPBD Kota Bekasi - Dinas Sosial - TNI Polri Pihak Non Pemerintah - Pramuka Jabang Kota Bekasi - BWWS CC, PJT

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Isu Strategis		Skenario	Rekomendasi				Penanggung Jawab/ Pelaksana
		Indikator	Isu Dan Permasalahan		Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcome	Program / Kegiatan	
			sebesar 57,5%; 2.Kota Bekasi merupakan wilayah yang rawan terjadinya bencana banjir, terdapat 85 titik banjir dengan luas kurang lebih 2873,38 ha; 3.rawan terjadinya kebakaran	2023 di harapkan Kota Bekasi bebas banjir; 3. skenario peningkatan jasa ekosistem pengatur tata air dan banjir.				menghadapi bencana • Kecepatan Respon dalam menangani bencana baik alam maupun non alam. b. Program penanganan kawasan banjir secara berkala dan berkesinambungan. c. Penguatan falsafah gotong royong sebagai upaya tanggap darurat dalam penanggulangan banjir d. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada penanggulangan banjir dan pasca bencana e. Membangun kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana f. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana g. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi KorbanBencan	II - PDAM Tirta Patriot - ACT - Tagana
13.2	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan daerah	13.2.1 (a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	<u>Isu PB Prioritas:</u> Dayadukung jasa ekosistem pengatur iklim di katagorikan rendah	Belum adanya dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Tersusunnya dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Rencana penyusunan dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Tersedianya data indikator penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	a.Program penyusunan dokumen dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) b.Program pendataan terkait dengan indikator penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Pihak Pemerintah • DLH Pihak Non Pemerintahan swasta

Sumber : Hasil analisis Tahun 2020

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

4 Alternatif Skenario Dan Pilar Pembangunan Hukum Tata Kelola Kelembagaan

No	Isu Strategis			Skenario	Rekomendasi				Penanggung Jawab/Pelaksana
	Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Isu Dan Permasalahan		Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcome	Program/Kegiatan	
Tujuan 16 : Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh									
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1 (b) prosentase peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (sakup kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota)	<p><u>Isu PB Strategis:</u> Penguatan Kelembagaan dan kerjasama antar lembaga</p> <p><u>Permasalahan:</u> 1. Belum optimalnya pelayanan publik yang berkualitas; 2. Belum optimalnya pelaksanaan e-government; 3. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja.</p>	Meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan publik dan meningkatnya akuntabilitas kinerja.	Pengembangan dan Penguatan kelembagaan	Terwujudnya kelembagaan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerjasama antar lembaga yang efektif (<i>executing agency</i>); 2. Peningkatan kapasitas pembuatan sistem pelayanan publik berbasis IT/digital 3. Penyamaan Standar kompetensi aparatur secara nasional 4. Peningkatan jenjang pendidikan Formal, melalui beasiswa, pendidikan lanjutan. 5. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan modal sosial, dan sinergitas antar masyarakat dan aparatur pemda dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan 6. Peningkatan kompetensi aparatur sesuai dengan standar nasional 7. Peningkatan Kompetensi aparatur melalui pendidikan formal, diklat teknis dan fungsional 8. Penerapan IT dalam pengendalian dan penilaian kinerja aparatur 	Pihak Pemerintah • Inspektorat • BKPPD • Bappalitbangda • Dinas/OPD Pihak Non Pemerintahan • swasta

Sumber: Hasil Analisis Dan Uji Publik II, Tahun 2020

6.3 ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI UNTUK INDIKATOR YANG BELUM ADA DATA/BELUM DILAKSANAKAN

Berdasarkan data kondisi indikator capaian tujuan pembangunan di Kota Bekasi sebanyak 81 indikator TPB dari 195 indikator TPB di Kota Bekasi belum ada data/belum dilaksanakan, sehingga beberapa alternatif skenario dan rekomendasi untuk indikator yang belum ada datanya diantaranya:

- a. Untuk melihat capaian indikator yang belum ada datanya/belum dilaksanakan maka perlu pelaksanaan dan pendataan indikator-indikator TPB tersebut;
- b. Prioritas pertama dilakukan pendataan untuk indikator-indikator yang belum ada datanya yang terkait kedalam isu PB prioritas yaitu indikator-indikator TPB yang terkait dengan isu kebencanaan, isu dayadukung dan dayatampung, isu Peningkatan layanan air bersih dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan dan indikator –indikator yang terkait dengan isu peningkatan layanan air bersih dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan;
- c. Prioritas kedua dilakukan pendataan untuk indikator-indikator yang belum ada datanya yang terkait kedalam isu PB strategis yaitu indikator-indikator TPB yang terkait dengan isu peningkatan layanan pendidikan, isu peningkatan layanan kesehatan, isu peningkatan layanan sosial dan isu penguatan tata kelola kelembagaan;

Lebih jelasnya mengenai indikator-indikator TPB yang belum ada datanya/belum dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel 6.2 di bawah ini.

6.4 HASIL PENGINTEGRASIAN

Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan Permendagri no 7 tahun 2018 telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023, serta meningkatkan kualitas penyusunan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip Tujuan pembangunan Berkelanjutan yang meliputi pengintegrasian sekurang- kurangnya tiga prinsip yaitu pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan, serta kelembagaan, dengan demikian hasil dari penyusunan KLHS perubahan RPJMD perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perubahan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023.

Adapun secara rinci rekomendasi KLHS untuk dokumen RPJMD sebagai berikut :

Bab I : Menambahkan dasar dan uraian korelasi KLHS dan SDGs.

Bab II : Menambahkan pengertian dan metodologi pelaksanaan KLHS Perubahan RPJMD

Bab III : Melengkapi data kondisi Daerah

Bab IV : Menambahkan Kondisi Capaian TPB dan melengkapi isu strategis dari hasil KLHS

Bab V : Menambahkan analisis capaian indikator TPB pada organisasi OPD

Bab VI : memasukan alternative skenario dan rekomendasi dari KLHS sebagai usulan penambahan program dan kegiatan pembangunan

Bab VII : menambahkan kesimpulan

Lebih jelasnya mengenai hasil pengintegrasian rekomendasi perubahan KLHS RPJM ke dalam dokumen perubahan RPJMD Kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel 6.3 di bawah ini.

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Tabel 6.2

Perumusan Alternatif Skenario dan Rekomendasi Untuk Indikator TPB Yang Belum Ada Datanya/Belum Dilaksanakan

No	Tujuan, Target Dan Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan Dan Tidak Ada Data	Isu Dan Permasalahan	Alternatif Skenario Dan Rekomendasi	Penanggung Jawab/Pelaksana
TUJUAN 1 MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN				
	TARGET	1.3.	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	
	INDIKATOR	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	<u>Isu Strategis:</u> Peningkatan layanan sosial <u>Permasalahan:</u> Belum ada terkait indikator ini sehingga belum diketahui tingkat capainnya
	INDIKATOR	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	
	TARGET	1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	
	INDIKATOR	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akte kelahiran	<u>Isu Strategis:</u> Peningkatan layanan sosial <u>Permasalahan:</u> Belum ada terkait indikator ini sehingga belum diketahui tingkat capainnya
	INDIKATOR	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN maupun non PLN.	
	TARGET	1.5.	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	
	INDIKATOR	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	<u>Isu PB Prioritas:</u> Kebencanaan <u>Permasalahan:</u> 1.Kondisi daya dukung Jasa ekosistem pengatur tata air dan banjir di Kota Bekasi umumnya memiliki katagori sangat rendah sebesar 57,5%; 2.Kota Bekasi merupakan wilayah yang rawan terjadinya bencana banjir, terdapat 85 titik banjir dengan luas kurang lebih 2873,38 ha;
	INDIKATOR	1.5.1 (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	
	INDIKATOR	1.5.1 (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	
	INDIKATOR	1.5.2	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP Global.	
	INDIKATOR	1.5.2 (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	1. Perlu di diprioritaskan untuk dilakukan pendataan karena indikator-indikator ini terkait dengan Isu PB Prioritas; 2. Perlu upaya-upaya untuk mengurangi resiko bencana banjir dinataranya: a. pembangunan embung/folder b. penataan dan pembangunan sistem drainase yang terintegrasi dengan sistem
				Pihak Pemerintah: - Dinas Sosial - BPJS - Dinas Ketenagakerjaan
				Pihak Pemerintah: - Dinas Sosial - Disukcapil - PLN
				Pihak Pemerintah: - BNPB - BPBD Jabar - BPBD Kota Bekasi - Dinas Sosial - TNI Polri
				Pihan Non Pemerintah - Pramuka Jabang Kota Bekasi - BWWS CC, PJT II - PDAM Tirta Patriot - ACT - Tagana

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Tujuan, Target Dan Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan Dan Tidak Ada Data			Isu Dan Permasalahan	Alternatif Skenario Dan Rekomendasi	Penanggung Jawab/Pelaksana
				3.rawan terjadinya kebakaran	penanggulangan banjir;	
TUJUAN 2 MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN						
	TARGET	2.1.	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.			
	INDIKATOR	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Isu PB Prioritas: Dayadukung dan daya tampung Permasalahan: 1. kondisi daya dukung ketersediaan pangan defisit 2. Jasa ekosistem penyedia pangan di katagorokan sangat rendah 3. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan pokok/ beras; 4. Masih rendahnya ketersediaan pangan utama; 5. Persentase Penanganan kerawanan pangan baru mencapai 69,58%	Perlu di diprioritaskan untuk dilakukan pendataan karena indikator-indikator ini terkait dengan Isu PB Prioritas	Pihak Pemerintah; Dinas Pertanian
	INDIKATOR	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.			
	INDIKATOR	2.1.2 (a)	Prevalensi penduduk dengan asupan kalori minimum dibawah 1400 Kkal/kapita/hari.			
	TARGET	2.2.	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.			
	INDIKATOR	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Isu Strategis: Peningkatan layanan Kesehatan Permasalahan: Belum ada terkait indikator ini sehingga belum diketahui tingkat capainnya	Perlu Pendataan dan pelaksanaan	Pihak Pemerintah - Dinas Kesehatan - Puskesmas - Posyandu - Rumah Sakit Pihak Non Pemerintah: Filatropi, lembaga swdaya, media,
	INDIKATOR	2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.			
	INDIKATOR	2.2.2 *	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe.			
	INDIKATOR	2.2.2 (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.			
	INDIKATOR	2.2.2 (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.			

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Tujuan, Target Dan Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan Dan Tidak Ada Data		Isu Dan Permasalahan	Alternatif Skenario Dan Rekomendasi	Penanggung Jawab/Pelaksana	
	TARGET	2.3.	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.			
	INDIKATOR	2.3.1*	<p>Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).</p>	<p><u>Isu PB Prioritas:</u> Dayadukung dan daya tampung</p> <p><u>Permasalahan:</u> 1. kondisi daya dukung ketersediaan pangan defisit 2. Jasa ekosistem penyedia pangan di katagorokan sangat rendah 3. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan pokok/ beras;</p>	Perlu di diprioritaskan untuk dilakukan pendataan karena indikator-indikator ini terkait dengan Isu PB Prioritas	Pihak Pemerintah; Dinas Pertanian
	TARGET	3.4.	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.			
	INDIKATOR	3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	<u>Isu Strategis:</u> Peningkatan layanan sosia	Perlu dilakukan Pendataan pada indikator-indikator ini	Pihak Pemerintah: - Dinas Sosial - Satpo PP
	INDIKATOR	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	<u>Permasalah:</u> Belum ada terkait indikator ini sehingga belum diketahui tingkat capainnya		
	TARGET	3.5.	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.			
	INDIKATOR	3.5.1 (a)	Jumlah penyalahgunaan narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	<u>Isu Strategis:</u> Peningkatan layanan sosial dan kesehatan	Perlu dilakukan Pendataan pada indikator-indikator ini	- Dinas Sosial - Dinas Kesehatan - BNN
	INDIKATOR	3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.			
	INDIKATOR	3.5.1 (c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	<u>Permasalah:</u> Belum ada terkait indikator ini sehingga		

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Tujuan, Target Dan Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan Dan Tidak Ada Data			Isu Dan Permasalahan	Alternatif Skenario Dan Rekomendasi	Penanggung Jawab/Pelaksana
	INDIKATOR	3.5.1 (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	belum diketahui tingkat capainnya		
	INDIKATOR	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.			
	TARGET	3.7.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi kedalam strategi dan program nasional.			
	INDIKATOR	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) Perlu Pendataan	<u>Isu Strategis:</u> Peningkatan layanan kesehatan <u>Permasalahan:</u> Belum ada terkait indikator ini sehingga belum diketahui tingkat capainnya	Perlu dilakukan Pendataan pada indikator-indikator ini	- Dinas Kesehatan
	INDIKATOR	3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR)			
	TARGET	3.8.	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan resiko keuangan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.			
	INDIKATOR	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	<u>Isu Strategis:</u> Peningkatan layanan kesehatan <u>Permasalahan:</u> Belum ada terkait indikator ini sehingga belum diketahui tingkat capainnya	Perlu dilakukan Pendataan pada indikator-indikator ini	- Dinas Kesehatan
	TARGET	3.9.	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.			
	INDIKATOR	3.9.3 (a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	<u>Isu Strategis:</u> Peningkatan layanan kesehatan <u>Permasalahan:</u> Belum ada terkait indikator ini sehingga belum diketahui tingkat capainnya	Perlu dilakukan Pendataan pada indikator-indikator ini	- Dinas Kesehatan - Dinas Sosial
	TARGET	3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.			
	INDIKATOR	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≤15 tahun.	<u>Isu Strategis:</u> Peningkatan layanan kesehatan <u>Permasalahan:</u> Belum ada terkait indikator ini sehingga belum diketahui tingkat	Perlu dilakukan Pendataan pada indikator-indikator ini	- Dinas Kesehatan - Dinas Sosial

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Tujuan, Target Dan Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan Dan Tidak Ada Data			Isu Dan Permasalahan	Alternatif Skenario Dan Rekomendasi	Penanggung Jawab/Pelaksana	
				capainnya			
TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA.							
	TARGET	4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.				
	INDIKATOR	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	<u>Isu Strategis:</u> Peningkatan layanan pendidikan	Perlu dilakukan Pendataan pada indikator-indikator ini	- Dinas Pendidikan - swasta	
	TARGET	4,4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	<u>Permasalahan:</u> Belum ada terkait indikator ini sehingga belum diketahui tingkat capainnya			
	INDIKATOR	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).				
	TARGET	4,5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.				
	INDIKATOR	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.				
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN							
	TARGET	5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	<u>Isu Strategis:</u> Peningkatan layanan sosial dan kesehatan	Perlu dilakukan Pendataan pada indikator-indikator ini	- Dinas Sosial - Dinas Kesehatan - BNN	
	INDIKATOR	5.3.1 (a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.				<u>Permasalahan:</u> Belum ada terkait indikator ini sehingga belum diketahui tingkat capainnya
	INDIKATOR	5.3.1 (b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).				
	TARGET	5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.				
	INDIKATOR	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.				

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Tujuan, Target Dan Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan Dan Tidak Ada Data			Isu Dan Permasalahan	Alternatif Skenario Dan Rekomendasi	Penanggung Jawab/Pelaksana
	TARGET	5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.			
	INDIKATOR	5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.			
TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK YANG BERKELANJUTAN						
	TARGET	6,2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	<u>Isu PB Prioritas:</u> (peningkatan layanan air bersih dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan)	Perlu dilakukan Pendataan pada indikator-indikator ini	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Disperkimtan - DLH - Swadaya masyarakat
	INDIKATOR	6.2.1 (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).			
	INDIKATOR	6.2.1 (d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	<u>Permasalahan:</u> Belum ada terkait indikator ini sehingga belum diketahui tingkat capainnya		
	TARGET	6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.			
TUJUAN 8 MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA						
	TARGET	8,3	Menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro kecil, dan menengah termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	<u>Isu PB Prioritas:</u> Penguatan Perekonomian	Perlu dilakukan Pendataan pada indikator-indikator ini	<ul style="list-style-type: none"> - Disperindag; - Pihak swasta - dinasnaker - UMKM - perbankan
	INDIKATOR	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian, berdasarkan jenis kelamin			
	INDIKATOR	8.3.1 (b)	Presentase tenaga kerja informal sektor pertanian	<u>Permasalahan:</u> Belum ada terkait indikator ini sehingga belum diketahui tingkat capainnya		
	INDIKATOR	8.3.1 (c)	Presentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke layanan Keuangan			
	TARGET	8,9	Pada tahun 2030 menyusun dan melaksanakan kebijakan			

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Tujuan, Target Dan Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan Dan Tidak Ada Data			Isu Dan Permasalahan	Alternatif Skenario Dan Rekomendasi	Penanggung Jawab/Pelaksana
			untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal			
	INDIKATOR	8.9.2 *	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja			
	TARGET	8,1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua			
	INDIKATOR	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa			
TUJUAN 9 MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN						
	TARGET	9,3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang terhadap jasa keuangan termasuk kredit terjangkau dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar	<u>Isu PB Prioritas:</u> Penguatan Perekonomian	Perlu dilakukan Pendataan pada indikator-indikator ini	- Disperindag; - Pihak swasta - dinasaker - UMKM - perbankan
	INDIKATOR	9.3.1 (a)	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	<u>Permasalahan:</u> Belum ada data terkait indikator-indikator ini sehingga belum diketahui tingkat capainnya;		
	INDIKATOR	9.3.2 *	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit			
	TARGET	9,4	Pada tahun 2030 meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan yang dilaksanakan	<u>Isu PB Prioritas:</u> Daya dukung dan daya tampung	Perlu dilakukan Pendataan pada indikator-indikator ini ;	- DLH - Bappelitbangda - PUPR - Disperkimtan
	INDIKATOR	9.4.1*	Rasio emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	<u>Permasalahan:</u> - Belum ada data terkait indikator – indikator ini sehingga belum diketahui tingkat capainnya; - Kondisi jasa ekosistem pengatur iklim dan pengatur kualitas udara di Kota Bekasi pada umumnya dikategorikan rendah kerentanan perubahan iklim di kota Bekasi	Perlu upaya-upaya untuk agar kondisi jasa ekosistem pengatur iklim dan kualitas udara tidak terus menurun diantaranya yaitu: 1. Pengembangan RTH Publik dan RTH Privat; 2. mempertahankan keberadaan RTH yang berfungsi lindung; 3. mengembangkan Rooftop Garden pada bangunan 4. mengerahkan pengembangan hunian/bangunan secara vertical	
	INDIKATOR	9.4.1 (a)	Persentase perubahan emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca			

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Tujuan, Target Dan Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan Dan Tidak Ada Data			Isu Dan Permasalahan	Alternatif Skenario Dan Rekomendasi	Penanggung Jawab/Pelaksana
				dikategorikan tinggi hal ini terlihat dari rawan bencana banjir	5. penyusunan dokumen kajian rasio emisi gas rumah kaca (GRK)	
TUJUAN 10 BERKURANNYANYA KESEJAJARAN						
	TARGET	10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional	<u>Isu PB Prioritas:</u> Penguatan Perekonomian <u>Permasalahan:</u> Belum ada data terkait indikator-indikator ini sehingga belum diketahui tingkat capainnya;	Perlu dilakukan Pendataan pada indikator-indikator ini	- Disperindag; - Pihak swasta - Dinasaker - UMKM - perbankan
	INDIKATOR	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.			
	TARGET	10,4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.			
	INDIKATOR	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.			
TUJUAN 11 MENJADI KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN LANJUTAN						
	TARGET	11.a	Mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan antara urban, pinggiran kota dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah			
	INDIKATOR	11.a.1	Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya			
	TARGET	11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakandan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan peanganan holistik resiko bencana di semua lini, sesuai dengan the sendai framework for disaster risk reduction 2015-2030	<u>Isu PB Prioritas:</u> Daadukung dan daya tampung <u>Permasalahan:</u> - Belum ada data terkait indikator – indikator ini sehingga belum diketahui tingkat capainnya; - Kondisi jasa ekosistem pengatur iklim dan pengatur kualitas udara di Kota Bekasi pada umumnya	1. Perlu dilakukan Pendataan pada indikator-indikator ini ; 2. Perlu upaya-upaya untuk agar kondisi jasa ekosistem pengatur iklim dan kualitas udara tidak terus menurun diantaranya yaitu: a. Pengembangan RTH Publik dan RTH Privat; b. Mempertahankan keberadaan RTH yang berfungsi lindung; b. Mengembangkan Roop Garden pada	- DLH - Bappelitbangda - PUPR - Disperkimtan - BPBD
	INDIKATOR	11.b.1	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan resiko bencana			
	INDIKATOR	11.b.2	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat daerah			

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Tujuan, Target Dan Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan Dan Tidak Ada Data			Isu Dan Permasalahan	Alternatif Skenario Dan Rekomendasi	Penanggung Jawab/Pelaksana
				dikategorikan rendah - kerentanan perubahan iklim di kota Bekasi dikategorikan tinggi hal ini terlihat dari rawan bencana banjir	bangunan c. mengerahkan pengembangan hunian/bangunan secara vertikal d. pembangunan embung/folder e. penataan dan pembanguan drainase yang terintegrasi dengan penanggulangan banjir	
TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB						
	TARGET	12.4.	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	<u>Isu PB Prioritas:</u> - Dayadukung dan daya tampung - peningkatan layanan air bersih dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan <u>Permasalahan:</u> - Belum ada terkait indikator ini sehingga belum diketahui tingkat capainya;	Perlu dilakukan Pendataan pada indikator-indikator ini	- DLH - Bappelitbangda - PUPR
	INDIKATOR	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). Perlu Pendataan			
	TARGET	12.6.	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.			
		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.			
	TARGET	12.8.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.			
	INDIKATOR	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.			
TUJUAN 13 PENANGGULANGAN PERUBAHAN IKLIM						

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Tujuan, Target Dan Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan Dan Tidak Ada Data			Isu Dan Permasalahan	Alternatif Skenario Dan Rekomendasi	Penanggung Jawab/Pelaksana
	TARGET	13.1.	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	<p><u>Isu PB Prioritas:</u> Daadukung dan daya tampung</p> <p><u>Permasalahan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada data terkait indikator – indikator ini sehingga belum diketahui tingkat capainnya; - Kondisi jasa ekosistem pengatur iklim dan pengatur kualitas udara di Kota Bekasi pada umumnya dikategorikan rendah kerentanan perubahan iklim di kota Bekasi dikategorikan tinggi hal ini terlihat dari rawan bencana banjir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dilakukan Pendataan pada indikator-indikator ini ; 2. Perlu upaya-upaya untuk agar kondisi jasa ekosistem pengatur iklim dan kualitas udara tidak terus menurun diantaranya yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan RTH Publik dan RTH Privat; b. Mempertahankan keberadaan RTH yang berfungsi lindung; b. Mengembangkan Roop Garden pada bangunan c. mengerahkan pengembangan hunian/bangunan secara vertikal d. pembangunan embung/folder e. penataan dan pembangunan drainase yang terintegrasi dengan penanggulangan banjir 	<ul style="list-style-type: none"> - DLH - Bappelitbangda - PUPR - Disperkimtan - BPBD
	INDIKATOR	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.			
	INDIKATOR	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.			
	TARGET	13.2.	Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan daerah.			
	INDIKATOR	13.2.1 (a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)			
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARATAN						
	TARGET	15.3	Pada tahun 2020, memulihkan lahan dan tanah kritis termasuk lahan yang terkena kekeringan dan banjir dan berusaha mencapai kota yang bebas dari lahan terdegradasi	<p><u>Isu PB Prioritas:</u> Daadukung dan daya tampung</p> <p><u>Permasalahan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada data terkait indikator – indikator ini sehingga belum diketahui tingkat capainnya; - Kondisi jasa ekosistem pengatur iklim dan pengatur kualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu dilakukan Pendataan pada indikator-indikator ini ; 2. Perlu upaya-upaya untuk agar kondisi jasa ekosistem pengatur iklim dan kualitas udara tidak terus menurun diantaranya yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan RTH Publik dan RTH Privat; b. Mempertahankan keberadaan RTH yang 	<ul style="list-style-type: none"> - DLH - Bappelitbangda - PUPR - Disperkimtan - BPBD
	INDIKATOR	15.3 (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan			
	TARGET	15,9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.			
	INDIKATOR	15.9.1 (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati			

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Tujuan, Target Dan Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan Dan Tidak Ada Data			Isu Dan Permasalahan	Alternatif Skenario Dan Rekomendasi	Penanggung Jawab/Pelaksana
				udara, sera JE Bideversitas di Kota Bekasi pada umumnya dikategorikan rendah sampai sangat rendah - kerentanan perubahan iklim di kota Bekasi dikategorikan tinggi hal ini terlihat dari rawan bencana banjir	berfungsi lindung; f. Mengembangkan Roop Garden pada bangunan g. mengerahkan pengembangan hunian/bangunan secara vertikal h. pembangunan embung/folder i. penataan dan pembangunan drainase yang terintegrasi dengan penanggulangan banjir	
TUJUAN 16 PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH						
	TARGET	16.1.	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	<u>Isu Strategis</u> Penguatan Tata Kelola Dan Kelembagaan; <u>Permasalahan:</u> - Belum ada data terkait indikator – indikator ini sehingga belum diketahui tingkat capainya;	Perlu dilakukan Pendataan pada indikator-indikator ini ;	Dinas/OPD Terkait
	TARGET	16.3.	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.			
	INDIKATOR	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.			
	TARGET	16.6.	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.			
	INDIKATOR	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).			
	INDIKATOR	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).			
	INDIKATOR	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.			
	INDIKATOR	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).			
	INDIKATOR	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).			
	TARGET	16.7.	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.			

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Tujuan, Target Dan Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan Dan Tidak Ada Data			Isu Dan Permasalahan	Alternatif Skenario Dan Rekomendasi	Penanggung Jawab/Pelaksana
	INDIKATOR	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).			
	INDIKATOR	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.			
	INDIKATOR	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.			
	INDIKATOR	16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.			
	TARGET	16.9.	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.			
	INDIKATOR	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.			
	INDIKATOR	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.			
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN						
	TARGET	17.8.	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	<p><u>Isu Strategis</u> Penguatan Tata Kelola Dan Kelembagaan;</p> <p><u>Permasalahan:</u> Belum ada data terkait indikator –indikator ini sehingga belum diketahui tingkat capainnya;</p>	Perlu dilakukan Pendataan pada indikator-indikator ini ;	Dinas/OPD Terkait
	INDIKATOR	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.			
	TARGET	17.17.	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.			
	INDIKATOR	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUs).			
	TARGET	17.17.	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.			
	INDIKATOR	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUs).			
	TARGET	17.18.	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi,			

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Tujuan, Target Dan Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan Dan Tidak Ada Data			Isu Dan Permasalahan	Alternatif Skenario Dan Rekomendasi	Penanggung Jawab/Pelaksana
			difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.			
	INDIKATOR	17.18.1 (a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik			
	INDIKATOR	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.			
	TARGET	17.19.	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.			
	INDIKATOR	17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.			
	TARGET	17.19.	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.			
	INDIKATOR	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).			
	TARGET	17.19.	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.			
	INDIKATOR	17.19.2 (d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)			

Sumber: Hasil Analisis Dan Uji Publik II, Tahun 2020

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Tabel 6.3
Matriks Penelaahan Integrasi KLHS Dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 Kota Bekasi

KLHS RPJMD						INTEGRASI DALAM RPJMD
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
1	2	3	4	6	7	8
MISI 1 : Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik						
Keuangan	16.6.1(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	<p>ISU: PENINGKATAN TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN.</p> <p>Beberapa permasalahan terkait isu pb strategis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan publik yang berkualitas; 2. Belum optimalnya pelaksanaan e-government; 3. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerjasama antar lembaga yang efektif (<i>executing agency</i>); 2. Peningkatan kapasitas pembuatan sistem pelayanan publik berbasis IT/digital 3. Penyamaan Standar kompetensi aparatur secara nasional 4. Peningkatan jenjang pendidikan Formal, melalui beasiswa, pendidikan lanjutan. 5. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan modal sosial, dan sinergitas antar masyarakat dan aparatur pemda dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan 6. Peningkatan kompetensi aparatur sesuai dengan standar nasional 7. Peningkatan Kompetensi aparatur melalui pendidikan formal, diklat teknis dan fungsional 8. Penerapan IT dalam pengendalian dan penilaian kinerja aparatur 	BPKAD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan Waktu Penetapan APBD - Persentase Kesesuaian DPA dengan Penjabaran APBD - Persentase Kesesuaian Pelaporan Keuangan Dengan SAP dan tepat waktu - Persentase Kesesuaian Pelaporan Penerimaan SP2D dengan SPM yang Diterima - Presentase OPD yang melaksanakan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah dengan Tertib
Sekretariat Daerah	16.6.1(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah(Provinsi/ Kabupaten/Kota).			Setda (Bagian Tapem)	Program Administrasi Umum	Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas
Sekretariat Daerah	16.6.1(c) Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.			Setda (Bagian KLPBJ)	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Sekretariat Daerah	16.6.1(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi			Setda (Bagian Organisasi)	Program Administrasi Umum	Persentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada pemerintah Kota Bekasi

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

KLHS RPJMD						INTEGRASI DALAM RPJMD
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
1	2	3	4	6	7	8
	Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).					
Penanaman Modal	16.6.2(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).			Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat
Misi 2: Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai						
Perumahan	1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	ISU : PENINGKATAN LAYANAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG AMAN DAN BERKELANJUTAN Beberapa Permasalahan terkait Isu: 1. Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani sebesar 29,07%; 2. Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni 23,88% (Tahun 2018); 3. Sistem pengelolaan persampahan yang belum optimal; 4. masih terdapatnya rumah tangga yang membuang limbah domestik ke saluran; 5. Persentase Penduduk Berakses Air Minum baru mencapai 26,7%.	1. Peningkatan penanganan kawasan kumuh pada lokasi-lokasi yang belum tertangani 2. Penataan kawasan kumuh secara simultan 3. Sosialisasi dan pendampingan program sanitasi; 4. Peningkatan jaringan air minum sistem perpipaan 5. Pembangunan dan peningkatan sistem pengelolaan limbah padat dan cair secara terpadu; 6. Membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan jaringan prasarana dan sarana dasar perkotaan; 7. pembangunan prasarana dan utilitas kota secara terpadu. 8. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terintegrasi dan terhubung langsung dengan sungai dan saluran	Disperkimtan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestik
				DBMSDA	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Presentase Pembangunan Polder Presentase Pemeliharaan Polder
				DLH	Program Pengelolaan Persampahan	- Persentase Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R - Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA - Persentase sampah yang terangkut ke TPA - Persentase Cakupan Area Pelayanan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

KLHS RPJMD						INTEGRASI DALAM RPJMD
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
1	2	3	4	6	7	8
Perumahan	6.1.1 (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	<p style="text-align: center;">ISU</p> <p style="text-align: center;">PENINGKATAN LAYANAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG AMAN DAN BERKELANJUTAN</p> <p style="text-align: center;">ISU</p> <p style="text-align: center;">DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN</p> <p>Beberapa Permasalahan terkait Isu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum 26,7% tahun 2018; 2. Daya dukung dan daya tampung ketersediaan air akan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan yang membutuhkan ketersediaan air; 3. Kondisi Jasa ekosistem penyedia air di Kota Bekasi pada umumnya di katagorikan sangat rendah sebesar 70%, katagori sedang sebesar 17,40%; 4. Daya dukung jasa ekosistem pemurnian air pada umumnya rendah sekitar 54,6 % dan sedang 34,55 %. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM Pemerintah (PDAM Kota Bekasi) 2. Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM Swasta 3. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM 4. Fasilitas Penyiapan Kerja Sama SPAM 5. Operasi dan Pemeliharaan SPAM 6. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM 7. membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk pembangunan dan peningkatan jaringan SPAM 8. pengembangan SPAM non PDAM/Swasta di prioritaskan untuk wilayah-wilayah yang belum terlayani sistem penyediaan air minum sistem perpipaan; 	Disperkimtan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Perumahan	6.1.1(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	<p style="text-align: center;">ISU</p> <p style="text-align: center;">PENINGKATAN LAYANAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG AMAN DAN</p>			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan	Persentase Penduduk Berakses Air Minum

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

KLHS RPJMD						INTEGRASI DALAM RPJMD
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
1	2	3	4	6	7	8
		<p>BERKELANJUTAN;</p> <p style="text-align: center;">ISU</p> <p>DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN.</p> <p>Beberapa Permasalahan terkait Isu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum 26,7% tahun 2018; 2. Daya dukung dan daya tampung ketersediaan air akan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan yang membutuhkan ketersediaan air; 3. Kondisi Jasa ekosistem penyedia air di Kota Bekasi pada umumnya di katagorikan sangat rendah sebesar 70%, katagori sedang sebesar 17,40%; 4. Daya dukung jasa ekosistem pemurnian air pada umumnya rendah sekitar 54,6 % dan sedang 34,55 %. 		Disperkimtan	Air Minum	
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
Perumahan	<p>6.2.1 (b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.</p> <p>6.2.1 (d) Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani</p>	<p style="text-align: center;">ISU</p> <p>PENINGKATAN LAYANAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG AMAN DAN BERKELANJUTAN</p> <p>Beberapa Permasalahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan penangan kawasan kumuh pada lokasi-lokasi yang belum tertangani b. Penataan kawasan kumuh secara simultan c. Sosialisasi dan pendampingan 	Disperkimtan	<p style="text-align: center;">Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p> <p style="text-align: center;">Program Pengelolaan Dan</p>	<p style="text-align: center;">Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestik</p> <p style="text-align: center;">Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ pembuangan</p>

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

KLHS RPJMD						INTEGRASI DALAM RPJMD
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
1	2	3	4	6	7	8
	sistem pengelolaan air limbah terpusat.	terkait Isu: 1. Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani sebesar 29,07% tahun 2018; 2. Cakupan luasan wilayah perumahan dan permukiman yang terlayani pengolahan air limbah domestik baru mencapai 3,39% (tahun 2018); 3. Sistem pengelolaan persampahan yang belum optimal dimana cakupan Area Pelayanan baru mencapai 70,00%; 4. kondisi daya dukung jasa ekosistem pengelola dan penguraian limbah sangat rendah 57,5 % dan 26,19 %.	program sanimas; d. Peningkatan jaringan air minum sistem perpipaan e. Pembangunan dan peningkatan sistem pengelolaan limbah padat dan cair secara terpadu; f. Membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan jaringan prasarana dan sarana dasar perkotaan; g. pembangunan prasarana dan utilitas kota secara terpadu. h. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terintegrasi dan terhubung langsung dengan sungai dan saluran		Pengembangan Sistem Drainase Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	aliran air tidak tersumbat Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
				DBMSDA		- Persentase Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R - Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA
				DLH	Program Pengelolaan Persampahan	- Persentase Cakupan Area Pelayanan
Perumahan dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.1.1(a) Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	ISU PENINGKATAN LAYANAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG AMAN DAN BERKELANJUTAN ISU DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN	a. Program peningkatan penangan kawasan kumuh melalui: ▪ peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh melalui peremajaan, pemugaran dan revitalisasi kawasan ▪ Peningkatan penangan kawasan kumuh pada lokasi-lokasi yang belum tertangani, ▪ Penataan kawasan kumuh secara simultan ▪ Penyusunan Rencana Tapak (<i>Site Plan</i>) dan <i>Detail</i>		Program Pengembangan Perumahan	- Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni - Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau
	11.1.1.(b) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Beberapa Permasalahan terkait Isu: 1. Masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani sebesar 29,07% tahun		DISPERKIMTAN	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan hunian yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

KLHS RPJMD						INTEGRASI DALAM RPJMD
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
1	2	3	4	6	7	8
		<p>2018;</p> <p>2. Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni 23,88% (Tahun 2018);</p> <p>3. kondisi daya dukung jasa ekosistem pengelola dan penguraian limbah sangat rendah 57,5 % dan 26,19 %;</p> <p>4. kemampuan lahan di Kota Bekasi sebagian besar termasuk kelas II (70,12%) dengan demikian kemampuan lahan Kota Bekasi merupakan lahan potensial untuk pengembangan kawasan budidaya perkotaan;</p> <p>5. Daya dukung jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup sangat tinggi 57,16 % dan sedang 40,56% .</p>	<p><i>Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni serta PSU ▪ Peningkatan dan pembangunan PSU secara terpadu <p>b. Program pembangunan hunian/rumah yang layak dan terjangkau melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pengembangan dan pembangunan hunian vertikal (rusunawa dan rusunami) ▪ Penyediaan rumah bagi MBR ▪ Pemberiaan subsidi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah <p>c. Program Pengembangan jaringan masyarakat dalam pengelolaan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan pemukiman</p>			
Perhubungan	11.2.1 (a) Persentase pengguna moda transportasi umum diperkotaan.	<p style="text-align: center;">ISU : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR</p> <p>Beberapa Permasalahan terkait Isu</p> <p>1. Belum optimalnya pengguna moda angkutan umum, pengguna moda transportasi umum Kota Bekasi baru</p>	<p>a. pengembangan angkutan massal kota berbasis jalan dan rel I yang terintegrasi dengan moda angkutan yang ada;</p> <p>b. Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</p> <p>c. pengembangan sistem jaringan transportasi dan angkutan massal yang ramah lingkungan dan masyarakat</p>	DISHUB	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan - Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi - Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas - Persentase peningkatan layanan angkutan umum

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

KLHS RPJMD						INTEGRASI DALAM RPJMD
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
1	2	3	4	6	7	8
		mencapai 28 %; 2. Persentase layanan angkutan umum massal 50%; 3. Rendahnya sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi kriteria pengguna dengan katagori kebutuhan khusus.	berkebutuhan khusus lainnya			massal - Persentase kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor
Perhubungan	11.4.1 Presentase pelayanan angkutan umum yang baik, aman dan nyaman			DISHUB	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	- Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan - Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi - Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas - Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal - Persentase kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor
				DBMSDA	Program Penyelenggaraan Jalan	- Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi baik - Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (> 40km/jam) - Presentase Pembangunan Jembatan Baru - Persentase Pemeliharaan Jembatan - Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

KLHS RPJMD						INTEGRASI DALAM RPJMD
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
1	2	3	4	6	7	8
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>11.6.1 Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota</p> <p>11.6.1 Persentase sampah perkotaan yang tertangani</p>	<p style="text-align: center;">ISU</p> <p style="text-align: center;">PENINGKATAN LAYANAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG AMAN DAN BERKELANJUTAN</p> <p style="text-align: center;">ISU</p> <p style="text-align: center;">DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN</p> <p>Beberapa Permasalahan terkait Isu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R baru mencapai 24,94% 2. Persentase sampah yang terangkut ke TPA baru mencapai 67,15% 3. Persentase Cakupan Area Pelayanan baru mencapai 70,00% 4. Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA baru mencapai 71,72%; 5. Semakin berkurangnya daya tampung TPA Sumur Batu dalam menerima timbulan sampah, sedangkan produksi sampah diperkirakan akan terus meningkat; 6. kondisi daya dukung jasa ekosistem pengelola dan penguraian limbah sangat rendah 57,5 % dan 26,19 % 	<p>a. Program pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS • Penggunaan teknologi dalam pengolahan sampah baik di TPA maupun di TPST antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemprov DKI yang dituangkan dalam PKS. • Peningkatan mekanisme pengelolaan sampah dari sistem sanitari landfill menjadi pemusnahan sampah melalui penggunaan teknologi • Edukasi dan sosialisasi pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini bagi anak sekolah. • pengelolaan sampah berbasis masyarakat/swakelola persampahan di 12 Kecamatan. • Penerapan sanksi atau Perda terhadap perorangan atau institusi yang melakukan pembuangan sampah secara ilegal • Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan minimalisasi sampah kepada skala rumah tangga (Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Repair) • Pengurangan timbulan 	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R - Operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA - Persentase sampah yang terangkut ke TPA - Persentase Cakupan Area Pelayanan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

KLHS RPJMD						INTEGRASI DALAM RPJMD
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
1	2	3	4	6	7	8
			<p>sampah semaksimal mungkin dari dimulai dari sumbernya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengurangan produksi dan pengurangan penggunaan kantong plastik - pembangunan sarana daur ulang sampah di 12 kecamatan • Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan • Penambahan armada angkut sampah sehingga sampah di pasar rakyat dapat diangkut ke TPA setiap hari • Peningkatan koordinasi penanganan limbah industri • Kerjasama untuk pengolahan sampah organik dan non organik di pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan pasar modern <p>b. Program pengurangan sampah "PESAN MAMA" (Peduli Sampah Bersama-Sama)</p>			
Misi 3: Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing						
Pariwisata dan Kebudayaan	8.1.1 Laju pertumbuhan PDB perkapita	ISU Penguatan Perekonomian	a. Meningkatkan PDRB per kapita sesuai target nasional; b. Melakukan efisiensi belanja daerah;	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kawasan wisata yang ditata
Perdagangan dan Perindustrian	8.1.1 (a) PDB perkapita/tahun	Beberapa Permasalahan terkait Isu 1. Kenaikan laju pertumbuhan PDRB dan total PDRB per kapita belum sesuai dengan target nasional;	c. Mencari sumber pertumbuhan baru dari perekonomian berbasis kreatif; d. Pemberiaan stimulus PBB (pajak Bumi Dan Bangunan) kepada masyarakat berpenghasilan rendah; e. peningkatan dan peluasan		Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan dan Tren Kepariwisata

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

KLHS RPJMD						INTEGRASI DALAM RPJMD
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
1	2	3	4	6	7	8
		2. Menurunnya kemandirian ekonomi daerah. 3. Dampak adanya pandemik covid: <ul style="list-style-type: none"> • Laju pertumbuhan ekonomi menurun; • prosentase peningkatan PDA di prediksi akan menurun; 	basis data pajak dan redistribusi daerah f. Digitasi platpom pelayanan pajak dan redistribusi daerah g. peningkatan dan penguatan kompetensi dan skill integritas SDM operator pajak dan redistribusi daerah h. peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah melalui pengelolaan sumberdaya daerah secara lebih profesional i. Penyempurnaan sistem dan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah j. Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional. k. Peningkatan kemampuan pemasaran dan usaha secara online	Disdagperin	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Jumlah pasar rakyat yang aman, bersih, dan nyaman Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah yang memiliki legalitas
Ketenagakerjaan	8.5.2 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (angka pengangguran terbuka)	<p style="text-align: center;">ISU : PENGUATAN PEREKONOMIAN</p> Beberapa Permasalahan terkait Isu 1. Masih tingginya tingkat pengangguran yaitu sebesar 8,20 % dengan adanya pandemi Covid tingkat pengangguran akan cenderung naik/meningkat;	a. peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru UMKM, UMKM Online, Startup; b. penyelenggaraan bursa tenaga kerja; c. pengembangan industri kreatif untuk membuka peluang kerja; d. Memasukan indikator program pembangunan untuk membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas ; e. Memberikan upah yang sama bagi pekerjaan penyandang disabilitas sesuai dengan UMR yang telah ditetapkan; f. membuka peluang pekerjaan dari berbagai sektor yang potensial g. Peningkatan kompetensi dan	Diskukm	Program Pengembangan UMKM Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi PROGRAM	Persentase peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi usaha Kecil Persentase jumlah pelaku UMKM kreatif Persentase Koperasi yang telah Tersertifikasi Kesehatannya Peningkatan Skala Usaha Koperasi Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja Persentase peningkatan keterampilan bagi pencari kerja

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

KLHS RPJMD						INTEGRASI DALAM RPJMD
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
1	2	3	4	6	7	8
		2. Jumlah angkatan kerja yang besar.	<p>kapasitas wirausaha dalam bentuk pelatihan</p> <p>h. Membuat aplikasi berbasis mobile yang berisi data dan informasi UMKM yang ada di Kota Bekasi sekaligus tersedia menu untuk membeli produk UMKM tersebut</p> <p>i. Penyelenggaraan Job fair yg sesuai dengan kebutuhan pasar dan backgroun</p>	Disnaker	<p>PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</p> <p>Program Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>Program Hubungan Industrial</p>	<p>Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan</p> <p>Persentase Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) berizin</p> <p>Persentase penanganan sengketa pengusaha dengan pekerja</p>
Perindustrian	<p>9.2.1 (a) Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.</p> <p>9.2.1 (b) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (Laju Pertumbuhan Ekonomi industri pengolahan).</p>	<p style="text-align: center;">ISU : PENGUATAN PEREKONOMIAN</p> <p>Beberapa Permasalahan terkait Isu</p> <p>1. Masih tingginya tingkat pengangguran yaitu sebesar 8,20 % dengan adanya pandemi Covid tingkat pengangguran akan cenderung naik/meningkat.</p> <p>2. Jumlah angkatan kerja yang besar;</p> <p>3. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (di Kota Bekasi selama kurun waktu 5 tahun (2013-2017) yang terus menurun, dari data LPP ndustri manupaktur tahun 2018 sebesar 3,71%;</p> <p>4. kontribusi sektor industri terhadap PDRB dalam beberapa tahun terakhir terus menurun.</p>	<p>a. Meningkatkan jumlah industri manufaktur;</p> <p>b. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri kreatif dan inovatif ;</p> <p>c. Pengembangan industri yang mampu menjaga ekosistem, memelihara sumber daya yang berkelanjutan;</p> <p>d. peningkatan infrastruktur industri;</p> <p>e. Program peningkatan kualitas SDM dalam sektor industri;</p> <p>f. Program peningkatan daya saing industri.</p> <p>g. Pengembangan saint dan kreatif centre</p>	Disdagperin	<p>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</p> <p>Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota</p> <p>Program Pengembangan Ekspor</p>	<p>Jumlah pasar rakyat yang aman, bersih, dan nyaman</p> <p>Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah yang memiliki legalitas</p> <p>Nilai ekspor Kota Bekasi</p>

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

KLHS RPJMD						INTEGRASI DALAM RPJMD
Bidang Urusan 1	Indikator TPB Belum Tercapai 2	Isu Strategis KLHS 3	Rekomendasi 4	OPD 6	Program 7	Indikator Program 8
		<p>Pada tahun 2013 sektor ini mampu menyumbang sebesar 36,34 persen (Rp20,97 triliun), namun merosot hingga 35,19 persen tahun 2015 dan kemudian 26,58 (tahun 2017).</p> <p style="text-align: center;">ISU : ENGUATAN PEREKONOMIAN</p> <p>Beberapa Permasalahan terkait Isu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laju pertumbuhan ekonomi menurun; 2. prosentase peningkatan PDA di prediksi akan menurun; 				
Misi 4: Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif						
Pangan	<p>Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.</p> <p>2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai dan tingkat konsumsi ikan.</p>	<p style="text-align: center;">ISU : DAYADUKUNG DAN DAYA TAMPUNG (DAYA DUKUNG PENYEDIA PANGAN DAN JASA EKOSISTEM PENYEDIA PANGAN)</p> <p>Beberapa Permasalahan terkait Isu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya ketersediaan pangan lokal; 2. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan pokok/beras; 3. Masih rendahnya 	<p>a. Program peningkatan Diversifikasi Pangan dan ketahanan pangan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau 2. Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan; 3. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 4. Penetapan kawasan pangan berkelanjutan (KP2B); 5. pengembangan lahan pertanian pada kawasan yang berfungsi lindung; 6. Pengembangan dan penerapan Urban Farming 	<p>Dinas Kesehatan/ (Dinas Ketahanan Pangan)</p>	<p>Program Penanganan Kerawanan Pangan</p>	<p>Persentase Penanganan kerawanan pangan</p>

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

KLHS RPJMD						INTEGRASI DALAM RPJMD
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
1	2	3	4	6	7	8
Pangan		ketersediaan pangan utama; 4. Skor Pola Pangan Harapan masih di bawah target nasional yaitu baru mencapai 87,4% (tahun 2019); 5. Persentase Penanganan kerawanan pangan baru mencapai 69,58%; 6. kondisi daya dukung lahan pertanian di Kota Bekasi sudah defisit; 7. kondisi jasa ekosistem penyediaan pangan di Kota Bekasi pada umumnya di katagorikan sangat rendah.	dengan pengembangan kampung hidroponik; 7. Pemberian insentif bagi pemilik lahan pertanian berupa keringanan PBB, bantuan saprotan (sarana Prroduksi pertanian), dan pelatihan pemasaran secara online; 8. Melakukan pola kerja sama di bidang pangan b. Program Penanganan Kerawanan Pangan			
Kesehatan	3.1.2 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	ISU : PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN Beberapa Permasalahan terkait Isu	a. Meningkatkan kinerja layanan kesehatan kepada ibu hamil dan melahirkan ; b. meningkatkan kinerja layanan kesehatan untuk balita; c. penyuluhan kesehatan ibu hamil dan balita secara simultan. d. Penguatan dan peningkatan layanan posyandu untuk pemeriksaan ibu hamil dan balita e. meningkatkan kualitas SDM/Tenaga medis	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned) - Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi - persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas - persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type B - persentase ketersediaan alat kesehatan dan non kesehatan di Rumah Sakit Type D
Kesehatan	3.1.2 (a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih baru mencapai 88%				
Kesehatan	3.2.1 Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran anak.	Angka kematian balita dan kematian balita per1000 kelahiran anak masih di atas target nasioanal (1,1 tahun 2017)				
Kesehatan	3.2.2 Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.					

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

KLHS RPJMD						INTEGRASI DALAM RPJMD
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
1	2	3	4	6	7	8
						<ul style="list-style-type: none"> - Persentase PKM Terakreditasi - persentase RS Terakreditasi - Terpenuhinya pemeliharaan 10 jenis sarana dan prasarana rumah sakit - Capaian IKM Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Type B - persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan puskesmas dan RS - Cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas - Persentase cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan - Prevalensi Balita Status Gizi Stunting - persentase Institusi dan fasilitas umum memenuhi syarat kesehatan - Ketersediaan Puskesmas di Kelurahan - Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan - Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan - Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan - Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan - Persentase Warga Negara

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

KLHS RPJMD						INTEGRASI DALAM RPJMD
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
1	2	3	4	6	7	8
						usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan - Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan - Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan - Persentase Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan - Persentase Warga Negara penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan - Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan - Persentase Warga Negara penderita terduga Tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan - Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan
Pendidikan	4.1.1 (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat	ISU: PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN Beberapa Permasalahan	a. Program pendidikan dan tenaga pendidik meliputi kegiatan <ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (formal dan 	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	- Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik - Persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

KLHS RPJMD						INTEGRASI DALAM RPJMD
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
1	2	3	4	6	7	8
		terkait Isu: 1. Sarana pendidikan yang berakreditasi minimal B belum mencapai target nasional; 2. nilai APK yang belum mencapai target nasional; 3. Nilai APK SMP/MTs/ sederajat dari 95,32 pada tahun 2017 menurun menjadi 94,81% namun demikian Nilai APK selama kurun waktu 1 tahun meningkat, hal ini tergambar dari: • Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat dari 95,32% pada tahun 2017 meningkat menjadi 110% pada tahun 2019; • Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat dari 75,89% pada tahun 2017 meningkat menjadi 107% pada tahun 2019 ; • Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meningkat menjadi 92,75% tahun 2019	non formal) • peningkatan pelayanan pendidikan berbasis IT; • Peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan yang menghasilkan lulusan yang bersertifikasi; b. Program Pengelolaan pendidikan melalui kegiatan: • pemberian bantuan biaya pendidikan kepada sekolah/mahasiswa berprestasi yang kurang mampu; • pengembangan sarana dan prasana pendidikan formal dan non formal. • Peningkatan kemampuan akses terhadap internet (hardware dan soft ware) bagi pelajar dan mahasiswa			dalam Kondisi Baik - Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik - APM SD - APM SMP - APM PAUD - Angka kelulusan pendidikan kesetaraan - SD Negeri Terakreditasi A - SMP Negeri Terakreditasi A
	4.1.1.e Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Sederajat.				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Bersertifikat
	4.1.1 (f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Sederajat.					
	4.2.2 (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	- Presentase pendidikan Dasar terakreditas B - PAUD Terakreditasi - Lembaga Pendidikan Non Formal Terakreditasi
Tenaga Kerja	8.3.1 Proporsi lapangan kerja informal sektor non	ISU: PENGUATAN	a. peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru	DISNAKER	Program Perencanaan	Cakupan Ketersediaan dokumen ketenakerjaan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

KLHS RPJMD						INTEGRASI DALAM RPJMD	
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program	
1	2	3	4	6	7	8	
Tenaga Kerja	pertanian, berdasarkan jenis kelamin	PEREKONOMIAN Beberapa Permasalahan terkait Isu 1. Masih tingginya tingkat pengangguran yaitu sebesar 8,20 % dengan adanya pandemi Covid tingkat pengangguran akan cenderung naik/meningkat. 2. Jumlah angkatan kerja yang besar;	UMKM, UMKM Online, Startup; b. penyelenggaraan bursa tenaga kerja; c. pengembangan industri kreatif untuk membuka peluang kerja; d. Memasukan indikator program pembangunan untuk membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas ; e. Memberikan upah yang sama bagi pekerjaan penyandang disabilitas sesuai dengan UMR yang telah di ditetapkan; f. membuka peluang pekerjaan dari berbagai sektor yang potensial g. Peningkatan kompetensi dan kapasitas wirausaha dalam bentuk pelatihan h. Membuat aplikasi berbasis mobile yang berisi data dan informasi UMKM yang ada di Kota Bekasi sekaligus tersedia menu untuk membeli produk UMKM tersebut i. Penyelenggaraan Job fair yg sesuai dengan kebutuhan pasar dan backgroun		Tenaga Kerja		
	8.3.1 (a) Presentase tenaga kerja formal					Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja - Persentase peningkatan keterampilan bagi pencari kerja
	8.5.2 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dankelompok umur (angka pengangguran terbuka)					Program Penempatan Tenaga Kerja	- Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan - Persentase Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) berizin
Tenaga Kerja	8.8.1 (a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3				Program Hubungan Industrial	Persentase penanganan sengketa pengusaha dengan pekerja	
Misi 5: Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman							
Lingkungan Hidup	11.7.1 proporsi ruang terbuka hijau perkotaan untuk semua menurut kelompok usia jenis kelamin dan penyandang disabilitas. 11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	ISU : DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG Beberapa permasalahan terkait isu: 1. Belum terpenuhinya proporsi 30% RTH di Kota Bekasi; 2. adanya alih fungsi lahan;	a. Pengembangan ruang terbuka hijau sesuai RTRW dan RDTR Kota Bekasi; b. Pemanfaatan RTH instansi/swasta sebagai RTH Publik dengan pola kerjasama. c. Pemberiaan insentif bagi pengembang /fihak swasta yang menyediakan RTH Publik melebihi kewajiban yang disyaratkan;	Dinas Tata Ruang/Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan/ Dinas Bina Marga & Sumber Daya Air	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	- Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW - Jumlah Rencana Pembangunan Infrastruktur Kota yang Sesuai dengan Tata Ruang Kota - Jumlah Rencana Penataan Kawasan Strategis Kota yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota	

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

KLHS RPJMD						INTEGRASI DALAM RPJMD
Bidang Urusan	Indikator TPB Belum Tercapai	Isu Strategis KLHS	Rekomendasi	OPD	Program	Indikator Program
1	2	3	4	6	7	8
		3. masih kurangnya ruang terbuka publik; 4. Daya dukung fungsi lindung belum optimal.	d. Penyediaan RTH dengan pola kerjasama /CSR; e. Peningkatan aksesibilitas terhadap sarana dan ruang public bagi penyandang disabilitas; f. Pengenaan disantif bagi pihak swasta /pengembang yang tidak menyediakan RTH sesuai ketentuan g. Pengembangan situs ekologi sebagai salah satu RTH publik dengan fungsi wisata edukasi ekologi			- Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan - Persentase Penyerahan 150 PSU pada tahun 2023 - Persentase penataan dan pemeliharaan reklame
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	13.1.1 Jumlah Korban Bencana Alam per 100.000 orang	ISU : DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG	a. Program penyusunan dokumen strategi pengurangan risiko bencana b. Program pendataan terkait dengan indikator strategi pengurangan risiko bencana	BPBD	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kemampuan aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana
		ISU : BENCANAAN				Persentase warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
		Beberapa permasalahan terkait isu				Persentase program penanggulangan bencana dalam dokumen perencanaan
		1. Kondisi daya dukung Jasa ekosistem pengatur tata air dan banjir di Kota Bekasi umumnya memiliki katagori sangat rendah sebesar 57,5%; 2. Kota Bekasi merupakan wilayah yang rawan terjadinya bencana banjir, terdapat 85 titik banjir dengan luas kurang lebih 2873,38 ha; 3. rawan terjadinya kebakaran				persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
						persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2020



BAB 7 KESIMPULAN

*Bab 7 menjelaskan
mengenai kesimpulan KLHS
Perubahan RPJMD 2018-2023
Kota Bekasi*



Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di definisikan sebagai berbagai "pendekatan analitis dan partisipatif yang bertujuan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana dan program dan mengevaluasi keterkaitan pertimbangan lingkungan dengan pertimbangan ekonomi dan sosial" (OECD, 2006).

Latar belakang di susunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perubahan RPJMD Kota Bekasi yaitu adanya perubahan RPJMD yang telah di susun pada tahun 2018 sehingga perlu memastikan kembali bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam perubahan kebijakan, strategi dan atau program pembangunan yang tertuang dalam perubahan RPJMD.

Tabel 7.1
Matrik SANDING Sistematika Pelaporan KLHS RPJMD Yang Disusun Tahun 2018 Dengan Sistematika Pelaporan KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

Muatan KLHS RPJMD Lama	Dasar Petimbangan Perubahan	Muatan KLHS Perubahan RPJMD
Sistematika Laporan KLHS RPJM Tahun 2018-2023 meliputi: 1. Bab I : Pendahuluan 2. Bab II : Kondisi Umum 3. Bab III : Profil Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 4. Bab IV : Perumusan Isu Strategis Berkenajutan 5. Bab V : Skenario kondisi Lingkungan Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 6. Bab VI : Perumusan Rekomendasi	Sistematika laporan di sesuaikan dengan juknis permendagri no 7 tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan KLHS RPJMD	Sistematika Laporan KLHS Perubahan RPJM Tahun 2018-2023 meliputi: Bab I : Pendahuluan Bab II : Landasan Teori Bab III : Kondisi Umum Dearah Bab IV : Analisis Tinjauan Pembangunan Berkelanjutan Bab V : Analisis Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bab VI : Alternatif Skenario Dan Rekomendasi; Bab VII Kesimpulan

Pada bab kesimpulan ini akan di uraikan mengenai analisis daya dukung dan daya tampung daerah, analisis capaian daerah terhadap indikator TPB, analisis capaian OPD terhadap indikator TPB serta simpulan rekomendasi bagi daerah.

7.1 ANALISIS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG

Berdasarkan hasil analisis dayadukung dan daya tampung teridentifikasi:

1. Kondisi Daya Dukung Air

Potensi air permukaan dan air tanah di Kota Bekasi di perkirakan sebesar 6.060,48 liter /det dengan potensi air tanah sebesar 5.598,36 lit/det dan potensi air permukaan dan mata air sebesar 462,12 lit/det, dengan kebutuhan air domestik dan air non domestik sebesar 5.604,37 lit/det maka daya dukung air masih mencukupi, Namun seiring dengan jumlah penduduk dan kegiatan perkotaan yang semakin meningkat maka kebutuhan air pada tahun 2026 meningkat menjadi 8.253,71 liter /det dan ketersediaan air menurun menjadi 4.317,54 lit/det sehingga daya dukung air sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduk (defisit). Demikian juga dengan kondisi daya dukung air di Kota Bekasi pada tahun 2030 akan semakin menurun dan di prediksi defisit air sebesar (-7578,50) l/det.

2. Kondisi Daya Dukung Pangan

Kondisi daya dukung pangan Kota Bekasi menunjukkan bahwa kebutuhan lahan lebih tinggi dibandingkan ketersediaan lahan yang ada di Kota Bekasi untuk lahan pertanian dan komoditas pangan lainnya hal ini di tunjukan dengan nilai $SL < DL$ ($479 \text{ Ha} < 51.623,31 \text{ Ha}$) atau dinyatakan defisit atau tidak memenuhi daya dukung. Artinya bahwa dalam lingkup wilayah, maka Kota Bekasi ini tidak memiliki daya dukung lahan yang baik, sehingga dalam keadaan produktifitas pangan yang ada tidak dapat memenuhi ketersediaan pangan untuk kebutuhan daerahnya sendiri.

Berdasarkan perhitungan produksi beras diperkirakan sebesar 19.097,24 ton/ha/tahun dan kebutuhan pangan (komsumsi beras) mencapai 358.783,21 ton/ha/tahun sehingga defisit beras mencapai 339.658,97 ton/ha/tahun.

3. Kondisi Jasa Ekosistem

Kondisi jasa ekosistem di Kota Bekasi dalam KLHS perubahan RPJMD meliputi jasa ekosistem penyedia pangan, jasa ekosistem penyedia air, jasa ekosistem pengatur Pengaturan Tata Air dan Banjir, Pengaturan Pemurnian Air, Pengaturan Kualitas Udara, Pengaturan Iklim, Pengaturan Kualitas Udara, Pengaturan pengolahan dan penguraian limbah dan jasa Pendukung Biodiversitas.

Berdasarkan hasil analisis bahwa semua kondisi jasa ekosistem pada umumnya dikategorikan rendah sampai dengan sangat rendah. Lebih jelasnya mengenai kondisi Jasa Ekosistem dapat di lihat pada Tabel 7.1 di bawah ini.

Tabel 7.2
Kondisi Daya Dukung Jasa Ekosistem

Fungsi	Jenis Jasa	Rendah dan Sangat Rendah	%	Sedang	%	Sangat Tinggi dan Tinggi	%
Penyedia	Penyedia Pangan	147,29	69,97	22,36	10,62	40,84	19,40
	Penyedia Air	147,29	70,0	36,69	17,4	26,51	12,6
Pengaturan	Pengaturan Tata Air dan Banjir	147,29	69,97	2,98	1,42	60,22	28,61
	Pengaturan Pemurnian Air	147,42	70,04	34,55	16,41	28,51	13,55
	Pengaturan Kualitas Udara	128,6	61,09	18,6	8,84	63,3	30,07
	Pengaturan Iklim	147,28	69,97	14,19	6,74	49,01	23,28
	Pengaturan Kualitas Udara	128,6	61,09	18,6	8,84	63,3	30,07
	Pengaturan pengolahan dan penguraian limbah	147,28	69,97	36,69	17,43	26,51	12,60
	Pendukung Biodiversitas	147,29	69,97	34,91	16,59	28,29	13,44

Sumber: Hasil Analisis

4. Perkiraan Dampak Dan Resiko Lingkungan Hidup

Perkiraan dampak dan resiko lingkungan hidup dalam penyusunan KLHS RPJMD meliputi:

a. Pencemaran Udara

Hasil pemantauan terhadap kualitas udara di 34 lokasi yang tersebar di 12 kecamatan di Kota Bekasi menunjukkan bahwa 74% memiliki status tercemar sedang dan 26% tidak sehat. Berdasarkan hasil pemantauan

udara ambien periode tanggal 19 September s/d 20 September 2018, diketahui bahwa konsentrasi parameter SO₂, CO, NO₂, O₃ dan TSP masih memenuhi baku mutu udara ambien. Hasil pemantauan dibandingkan dengan baku mutu udara ambien nasional yang merujuk pada Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

b. Pencemaran Air Sungai (Status Air Sungai)

- Berdasarkan hasil pemantauan air sungai tahun 2019 dengan menggunakan Metode Indeks Pencemaran Air dapat disimpulkan bahwa presentase lokasi pantau yang memiliki status tercemar ringan adalah 76%, tercemar sedang 16% dan tercemar berat 8%.
- Berdasarkan hasil identifikasi kualitas air sungai di Kota Bekasi, beberapa sungai yang sudah menunjukkan daya tampung melebihi daya dukung beban pencemar atau sungai yang memiliki status mutu air sungai tercemar sedang perlu mendapatkan perhatian sehingga status mutu air sungai tersebut tidak meningkat menjadi status mutu air tercemar berat;
- Begitu juga dengan kondisi kualitas air sungai yang sudah tercemar ringan perlu di perhatikan sehingga kualitas air tidak menjadi tercemar sedang atau berat

c. Timbulan Sampah

Fenomena yang umum terlihat di Kota Bekasi masih menunjukkan bahwa persoalan sampah masih sangat berat. Hal ini terlihat jelas dari banyaknya sampah yang bertebaran baik di fasilitas umum, permukiman, drainase dan sungai; kondisi TPS yang sering tidak mampu menampung sampah yang dihasilkan serta tidak terawat; serta TPA eksisting yang sangat polutif dan penuh dengan cepat. Permasalahan persampahan disebabkan oleh tingginya timbulan sampah yang dihasilkan oleh aktivitas di Kota Bekasi dan belum ada kecenderungan penurunan. Perkiraan data potensi timbulan sampah Kota Bekasi berdasarkan perhitungan Jakstrada yaitu 0,70 kg/jiwa/per-hari akan mencapai 625.650.515 kg/tahun, jumlah sampah yang terangkut ke TPA Sumur Batu oleh Dinas Kebersihan berdasarkan kecamatan yang ada di Kota Bekasi yaitu sebesar 396.862.320/baru sekitar 63,43%, persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R baru mencapai 58% dan operasionalisasi TPA/TPS 3R/SPA baru mencapai 98%.

d. Kawasan Rawan Banjir

Berdasarkan data BPBD Kota Bekasi luas kawasan rawan banjir di Kota Bekasi sekitar 2.873,38 ha yang tersebar pada 85 titik lokasi genangan. Luas genangan yang paling besar yaitu Kecamatan Rawalumbu dengan luas 533,35 Ha, Kecamatan bekasi Selatan dengan luas genangan sebesar 406,96 Ha dan Bekasi Timur dengan luas genangan 393,91 Ha.

5. Kerentanan Dan Adaptasi Perubahan Iklim

- a. Berdasarkan indeks kerawanan bencana yang dibuat oleh BNPB (2011), Kota Bekasi memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, dimana bencana utama yang terjadi di Kota Bekasi adalah banjir. Dari data-data kejadian banjir di Kota Bekasi, hampir setiap tahun terjadi bencana banjir yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Selain Banjir terdapat

bencana lain yang terjadi seiring dengan munculnya beberapa kejadian iklim ekstrim yang terjadi.

- b. Tingkat kerentanan di Kota Bekasi semakin tinggi yang disebabkan semakin meningkatnya jumlah penduduk, berkurangnya luasan ruang terbuka hijau/kawasan resapan, belum memadainya saluran pengendali banjir dan pengelolaan sampah dan serta penataan tata ruang wilayah yang belum memperhatikan risiko iklim
- c. Tingginya tingkat kerentanan kota akan berisiko pada semakin tinggi potensi dampak yang akan ditimbulkan oleh perubahan iklim. Tanpa adanya upaya adaptasi dan mitigasi, dampak perubahan iklim akan sulit untuk dikendalikan.

6. Keanekaragaman hayati

Keanekaragaman hayati penting bagi keberlanjutan kehidupan alam, sehingga baik langsung maupun tidak langsung memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Ekosistem menyediakan habitat untuk lokasi kehidupan flora dan fauna. Kondisi lingkungan dapat mencerminkan kesesuaian untuk menjadi habitat. Hal ini untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan flora dan fauna. Kota Bekasi termasuk pada pendukung *biodiversitas* yang sangat rendah 70,0% atau 147,29 km².

7.2 KONDISI DAN ANALISIS TINJAUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

a) Kondisi Capaian Indikator TPB

Berdasarkan hasil analisis pencapaian TPB di Kota Bekasi dilakukan dengan menyandingkan antara target/indikator TPB yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/2017 dengan data TPB Kota Bekasi, sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori :

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB
3. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA

Capaian TPB yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Kota Bekasi adalah sebanyak 15 TPB yang meliputi TPB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, dan 17) sedangkan TPB 7 (energi bersih dan terjangkau), dan TPB 14 (ekosistem laut) tidak sesuai dengan kondisi Kota Bekasi, sehingga dari 15 tujuan pembangunan berkelanjutan sebanyak 195 indikator yang sesuai dengan kondisi Kota Bekasi, meliputi :

1. Berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Bekasi terdapat beberapa capaian indikator yang mengalami perubahan baik terdapat kenaikan maupun penurunan capaian yaitu sebanyak 75 indikator capaian.
2. Dengan data yang telah di peroleh maka capaian TPB mengalami perubahan yaitu Indikator Sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

(SS) yang semula sebanyak 55 indikator menjadi 59 indikator, Indikator Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (SB) yang semula 37 indikator menjadi 55 indikator dan indikator yang tidak memiliki data (NA) yang semula 103 indikator menjadi 81 indikator.

Lebih jelasnya mengenai jumlah perubahan dan Capaian TPB Di Kota Bekasi dapat di lihat pada tabel capaian jumlah indikator TPB Kota Bekasi Terhadap Target Nasional di bawah ini.

Tabel 7.3
Capaian Indikator Yang Mengalami Perubahan

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator
1	Tanpa Kemiskinan	8
2	Tanpa Kelaparan	2
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	10
4	Pendidikan Berkualitas	9
5	Kesetaraan Gender	6
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	4
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	6
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	2
10	Berkurangnya Kesenjangan	4
11	Menjadi Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	6
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	3
13	Penanganan Perubahan Iklim	2
15	Ekosistem Daratan	0
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	9
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	4
Total		75

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2020

Tabel 7.4
Capaian Indikator TPB Kota Bekasi Terhadap Target Nasional

No.	Kriteria	Lama		Baru	
		Jumlah Indikator	(%)	Jumlah Indikator	(%)
1	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	55	28,21	59	30,26
2	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)	37	18,97	55	28,21
3	indikator yang tidak memiliki data (NA)	103	52,82	81	41,54
Total indikator yang menjadi kewenangan Kota Bekasi		195	100	195	100

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2020

Dari tabel tersebut untuk indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS) meningkat dari 28,21% menjadi 30,26%, untuk Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) meningkat juga dari 18,97% menjadi 28,21% namun demikian untuk indikator yang tidak memiliki data (NA) mengalami penurunan dari 52,82% menjadi 41,54%.

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Tabel 7.5
Capaian Jumlah Indikator TPB Kota Bekasi Terhadap Target Nasional

No	Tujuan Pembangunan Yang Berkelanjutan	Jumlah Target	Jumlah Indikator	Capaian Indikator		
				SS	SB	BB & NA
1	Tanpa Kemiskinan	4	25	14	3	8
2	Tanpa Kelaparan	3	11	1	1	9
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	11	31	11	7	13
4	Pendidikan berkualitas	6	13	3	7	3
5	Kesetaraan Gender	5	11	4	3	4
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	5	14	7	5	2
7	Energi Bersih dan Terjangkau					
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	5	14	3	6	5
9	Industri, inovasi dan infrastruktur	3	7	1	2	4
10	Berkurangnya kesenjangan	3	7	2	4	1
11	Kota dan permukiman yang berkelanjutan	7	13	4	6	3
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	3	6	2	1	3
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	5	1	1	3
14	Ekosistem Lautan					
15	Ekosistem Daratan	2	2	0	0	2
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan	7	22	4	6	12
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	10	14	2	3	9
	JUMLAH	76	195	59	55	81

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2020

Dari kondisi capaian indikator tersebut teridentifikasi bahwa sebanyak 59 indikator TPB yang sudah di laksanakan dan mencapai target nasional maka perlu di pertahankan, sedangkan sebanyak 55 Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) maka perlu di lakukan upaya peningkatan sedangkan sebanyak 81 indikator yang tidak memiliki data (NA) perlu dilakukan pendataan.

b) Analisis Alternatif Proyeksi TPB

Berdasarkan hasil analisis capaian indikator TPB yang didasarkan pada kondisi capaian indikator TPB dan juga kecenderungan perkembangan capaian TPB selama kurun waktu 5 tahun selanjutnya di lakukan perumusan alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Proyeksi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan sampai dengan 2023 dilakukan pada indikator TPB pada masing-masing yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pila pembangunan kelembagan dan humum yang ada dalam indikator RPJMD tetapi belum mencapai target nasional dan indikator yang belum ada dalam target RPJMD tetapi relevan di Kota Bekasi yang diusulkan untuk dapat dimasukkan.

Proyeksi dilakukan dengan membandingkan rate tahunan secara Bussiness As Usual (BAU) dan rate tahunan terhadap gap target nasional. Proyeksi BAU dilakukan dengan melihat tren perkembangan dari baseline dalam RPJMD pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Sedangkan rate tahunan terhadap gap target nasional dalam TPB membandingkan gap antara capaian dengan target nasional.

Hasil alternative proyeksi dari 55 Indikator capaian TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) maka dirumuskan alternatif proyeksi untuk indikator capaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu:

- **Alternatif Proyeksi tanpa upaya tambahan** diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional. Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan di Kota Bekasi sebanyak 13 indikator
- **Alternatif proyeksi dengan upaya tambahan** disusun untuk percepatan pencapaian target tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Alternative proyeksi dengan upaya tambahan di Kota Bekasi sebanyak 42 indikator.

c) Perumusan Isu PB Strategis

Perumusan isu pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan KLHS perubahan RPJMD kota Bekasi mengacu pada pasal 11, 16 dan 18 Permendagri No 7 tahun 2018 dan pasal 7 s/d pasal 9 PP 46 tahun 2016. dimana perumusan isu strategis selain didasarkan pada isu strategis hasil analisis capaian Indikator TPB dan juga didasarkan pada Isu-isu strategis Kota Bekasi yang di dapat dari hasil kajian literatur (KLHS RTRW Kota Bekasi, KLHS RPJMD Tahun 2018, Dokumen Rancangan Perubahan RPJMD), hasil FGD dan hasil uji public, dengan di dasarkan pada beberapa pertimbangan tersebut diatas maka di rumuskan sebanyak 70 daftar panjang isu Pembangunan berkelanjutan dan selanjutnya dilakukan pengelompokan/pemusatan daftar panjang isu PB untuk disepakati dalam uji publik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan dari hasil kesepakatan terumuskan sebanyak 8 isu PB strategis yang meliputi:

1. Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan;
2. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Peningkatan Pelayanan Sosial
4. Penguatan kelembagaan dan Kerjasama
5. Peningkatan Perekonomian Kota
6. Peningkatan layanan Sanitasi yang aman dan berkelanjutan
7. Kebencanaan
8. Peningkatan Daya Infrastruktur

Selanjutnya dari 8 Isu PB strategis tersebut dilakukan uji silang antara isu PB strategis Kota Bekasi dengan kondisi D3TLH Yang termuat pada pasal 9 untuk dilakukan penilaian/pembobotan, dari hasil pembobotan diperoleh daftar urutan nilai Isu PB Prioritas dari yang tertinggi sampai terendah.

Berdasarkan hasil penilaian / pembobotan teridentifikasi urutan Isu PB Prioritas dari nilai tertinggi sampai nilai terendah yang meliputi:

1. Kebencanaan
2. Dayadukung dan Daya Tampung
3. Peningkatan layanan Air Bersih Dan Sanitasi yang aman dan berkelanjutan
4. Penguatan perekonomian

untuk melihat isu tujuan pembanguna berkelanjutan prioritas maka ke 4 isu pb prioritas tersebut dikaitkan dengan indikator-indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional dan dikaitkan dengan indikator TPB yang belum dilaksanakan/tidak ada data, sehingga semua indikator-indikator tersebut merupakan isu tujuan pembangunan berkelanjutan Strategis.

Dari hasil analisis proyeksi indikator capain TPB dan juga dengan mempertimbangkan dayadukung dan dayatampung lingkungan serta isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan pencapaian TPB maka dirumuskan alternative scenario dan rekomendasi upaya tambahan untuk indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target RPJMN yang terbagi ke dalam pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar pembangunan hukum

7.3 ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI

Perumusan skenario dan rekomendasi pada penyusunan KLHS perubahan RPJMD Kota Bekasi didasarkan pada :

1. Kondisi Umum Daerah Kota Bekasi
2. Analisis Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
3. Kondisi daya dukung dan daya Tampung
4. Isu pembangunan berkelanjutan prioritas yang di peroleh dari isu capaian indikator TPB dan isu-isu strategis Kota Bekasi serta permasalahan
5. Rencana dan program dinas/rentra dan masukan dari setiap OPD/SKPD terkait dan
6. Hasil kesepakatan pemangku kepentingan pada saat uji publik

Perumusan skenario dan rekomendasi pada penyusunan KLHS perubahan RPJMD Kota Bekasi meliputi:

1. Alternatif skenario dan rekomendasi daya dukung dan daya tampung;

Perumusan alternative skenario dan rekomdasi untuk dayadukung dan daya tampung pada penyusunan KLHS perubahan RPJMD Kota Bekasi meliputi:

- a. Alternatif skenario dan rekomedasi daya dukung dan daya tampung air untuk mempertahankan dayadukung air agar tetap ideal/ tidak terus menurun beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah:
 - Meningkatkan penangkapan air melalui revitalisasi dan pembangunan embung/polder, Pemanenan air hujan (*rain water harvesting*), Sumur resapan dan biopori

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

- Memenuhi kebutuhan air melalui kerjasama dengan daerah lain yang memiliki ketersediaan air
 - Peningkatan kualitas air sungai agar layak dimanfaatkan sebagai sumber air baku dengan mengurangi beban cemar pada air dari kegiatan industri dan rumah tangga;
 - Penerapan sistem produksi bersih pada kegiatan industri agar dapat menghemat penggunaan air, daur ulang pemakaian air, peningkatan kualitas pengolahan limbah cair;
 - Peningkatan pendidikan lingkungan untuk masyarakat seperti cinta lingkungan, hemat energi dan air, dan pemanfaatan materi dan energi terbarukan
 - Mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai sempadan sungai dan situ;
 - Penerapan insentif bagi kegiatan industri yang dapat menekan atau menghemat penggunaan air;
- b. Alternatif skenario dan rekomendasi daya dukung dan daya tampung pangan
- Untuk menjaga ketersediaan pangan Kota Bekasi tetap ada meskipun tidak surplus maka beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya:
- Menjalin pola kerjasama dengan kabupaten yang memiliki daya dukung pangan surplus untuk pemenuhan kebutuhan pangan Kota Bekasi;
 - Pengembangan dan penerapan Urban Farming dengan pengembangan kampung hidroponik.
 - Mengoptimalkan fungsi RTH privat sebagai penghasil pangan;
 - Mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
 - Meningkatkan produktivitas padi/ha pada lahan LP2B.
 - Membudayakan diversifikasi pangan;
2. Alternatif skenario dan rekomendasi untuk indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional dan indikator ini terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan strategis sehingga **perlu upaya tambahan** agar dapat mencapai target nasional, usulan rekomendasi dapat dilihat pada matrik rekomendasi.
3. Alternatif rekomendasi untuk indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum ada data maka perlu dilakukan **pendataan dan dilaksanakan** sebanyak 81 indikator TPB.
4. Alternatif rekomendasi untuk indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional perlu di **pertahankan** sebanyak 59 indikator TPB
- Berdasarkan hasil perumusan isu pembangunan berkelanjutan prioritas maka alternative skenario dan rekomendasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.6
Alternatif Skenario Dan Rekomendasi Terhadap Indikator TPB Yang Merupakan Isu PB Prioritas
(Indikator TPB Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional Dan Indikator Yang Belum Ada Data)

Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis			Alternatif Skenario Dan Rekomendasi			
Isu Prioritas	Indikator TPB	Skenario	Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcame	Program Dan Kegiatan
Kebencanaan, Dayadukung dan Dayatampung	1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang;	1. Meninimalkan jumlah korban yang terkena bencana alam; 2. Setiap tahun perlu adanya upaya penanganan bencana banjir sehingga pada tahun 2023 di harapkan Kota Bekasi bebas banjir; 3. skenario peningkatan jasa ekosistem pengatur tata air dan banjir.	Berkurangnya kawasan banjir dan tertanganinya jumlah korban yang terkena dampak bencana	Meningkatkan program penanggulangan bencana	Tertanganinya Korban bencana dan berkurang-nya kawasan banjir	1. Program peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana melalui: a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana b. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; c. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana d. Kecepatan Respon dalam menangani bencana baik alam maupun non alam. 2. Program penanganan kawasan banjir secara berkala dan berkesinambungan. 3. Membangun kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 4. program mengurangi resiko bencana banjir dinataranya: a. pembangunan embung/folder b. penataan dan pembangunan sistem drainase yang terintegrasi dengan sistem penangulanagn banjir;
	1.5.1 (a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah					
	1.5.1 (e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.					
	1.5.2 (a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana					
	2.1.2 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala PengalamanKerawanan Pangan.	Meningkatan Skor Pola Harapan sampai dengan 92,5% sesuai dengan skor pola pangan harapan nasional;	Meningkatan Skor Pola Pangan sesuai dengan skor pola pangan harapan nasional;	Menjalini pola kerjasama dengan kabupaten yang memiliki daya dukung pangan surplus untuk pemenuhan kebutuhan pangan Kota Bekasi	Terpenuhi-nya kebutuhan pangan masyarakat	1. Program peningkatan Diversifikasi Pangan dan ketahanan pangan melalui: a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan; c. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 2. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B); 3. pengembangan lahan pertanian pada kawasan yang berfungsi lindung; 4. Pengembangan dan penerapan Urban Farming dengan pengembangan kampung hidroponik; Pemberian insentif bagi pemilik lahan pertanian berupa keringanan PBB, bantuan saprotan (sarana Prroduksi pertanian), dan pelatihan pemasarans ecara online; 5. Melakukan pola kerjasama di bidang pangan
	2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai dan tingkat konsumsi ikan.					
		Perlu adanya	Tersusunnya	Rencana	Tersedianya	1. Program penyusunan dokumen pelaporan penurunan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis			Alternatif Skenario Dan Rekomendasi			
Isu Prioritas	Indikator TPB	Skenario	Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcame	Program Dan Kegiatan
Kebencanaan, Dayadukung dan Dayatampung	9.4.1* Rasio emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur;	pendataan terkait dengan indikator 9.4.1 dan 9.4.1 (a)	dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	penyusunan dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	data indicator penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	emisi gas rumah kaca (GRK) 2. Program pendataan terkait dengan indikator penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)
	9.4.1 (a) Persentase perubahan emisi Co2/Emisi Gas Rumah Kaca					
	11.b.1 Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana	Tersusunnya dokumen strategi pengurangan risiko bencana	Tersedianya dokumen strategi pengurangan risiko bencana	Rencana penyusunan dokumen strategi pengurangan risiko bencana	Tersedianya strategi pengurangan risiko bencana	1. Program penyusunan dokumen strategy pengurangan risiko bencana 2. Program pendataan terkait dengan indikator strategi pengurangan risiko bencana
	11.b.2 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana					
	11.7.1 proporsi ruang terbuka hijau perkotaan untuk semua menurut kelompok usia jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Peningkatan ruang terbuka hijau sesuai dengan target nasional dan pengembangan ruang terbuka hijau bagi penyandang disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya proporsi luas RTH sebesar 30% • Terwujudnya peruntukan ruang kawasan lindung sesuai dengan RTRW dan RDTR Kota Bekasi 	Pengembangan dan peningkatan ruang terbuka hijau publik dan privat	Tercapainya pemenuhan RTH sesuai target nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan dan peningkatan ruang terbuka hijau melalui kegiatan; 2. Penyediaan/pembebasan lahan untuk pengembangan RTH Publik 3. Pengembangan ruang terbuka hijau sesuai RTRW dan RDTR Kota Bekasi; 4. Pemanfaatan RTH instansi/swasta sebagai RTH Publik dengan pola kerjasama. 5. Pemberiaan insentif bagi pengembang /pihak swasta yang menyediakan RTH Publik melebihi kewajiban yang disyaratkan; 6. Penyediaan RTH dengan pola kerjasama /CSR; 7. Peningkatan aksesibilitas terhadap sarana dan ruang public bagi penyandang disabilitas; 8. Pengenaan disantif bagi pihak swasta /pengembang yang tidak menyediakan RTH sesuai ketentuan 9. Pengembangan situs ekologi sebagai salah satu RTH public dengan fungsi wisata edukasi ekologi
11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.						
13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meniminalkan jumlah korban yang terkena bencana alam; 2. Setiap tahun perlu adanya upaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Meninimal-kan jumlah korban yang terkena bencana alam; • Berkurangnya 	Meningkatkan program penanggulangan bencana	Tertanganinya kawasan banjir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana b. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi 	

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis			Alternatif Skenario Dan Rekomendasi			
Isu Prioritas	Indikator TPB	Skenario	Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcame	Program Dan Kegiatan
Kebencanaan, Dayadukung dan Dayatampung	13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	penangan bencana banjir sehingga pada tahun 2023 di harapkan Kota Bekasi bebas banjir; 3. skenario peningkatan jasa ekosistem pengatur tata air dan banjir.	kawasan banjir			bencana; c. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana d. Kecepatan Respon dalam menangani bencana baik alam maupun non alam. 2. Program penanganan kawasan banjir secara berkala dan berkesinambungan. 3. Penguatan falsafah gotong royong sebagai upaya tanggap darurat dalam penanggulangan banjir 4. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada penanggulangan banjir dan pasca bencana 5. Membangun kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 6. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 7. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi KorbanBencana
	13.2.1 (a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	tersusunnya dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Tersedianya dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Rencana penyusunan dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Tersedia-nya data indikator penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	1. Program penyusunan dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 2. Program pendataan terkait dengan indikator penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)
	1.4.1 (e) : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	1. Meningkatkan presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan sebesar 100%.; 2. Target kawasan kumuh 0%	Meningkatkan akses pada pelayanan sanitasi layak hingga 100%.	Pembangunan dan pengembangan penyediaan layanan sanitasi layak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (air minum, persampahan, limbah dan jaringan drainase)	Terpenuhi-nya akses terhadap layanan sanitasi layak bagi seluruh masyarakat	Program peningkatan penyediaan sanitasi layak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (air minum, persampahan, limbah dan jaringan drainase) melalui: 1. Peningkatan penangan kawasan kumuh pada lokasi-lokasi yang belum tertangani 2. Penataan kawasan kumuh secara simultan 3. Sosialisasi dan pendampingan program animas; 4. Peningkatan jaringan air minum sistem perpipaan 5. Pembangunan dan peningkatan sistem pengelolaan limbah padat dan cair secara terpadu; 6. Membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan jaringan prasarana dan sarana dasar perkotaan; 7. pembangunan prasarana dan utilitas kota secara terpadu. 8. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terintegrasi dan terhubung langsung dengan sungai dan

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis			Alternatif Skenario Dan Rekomendasi			
Isu Prioritas	Indikator TPB	Skenario	Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcame	Program Dan Kegiatan
Peningkatan layanan air bersih dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan	1.1.1 (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak; 6.1.1 (b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga perkotaan dan industri; 6.1.1 (c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Pelu adanya upaya tambahan agar: 1. Meningkatkan presentase penduduk berakses air minum yang baru mencapai 31,32% sampai akhir tahun 2023 sehingga untuk mencapai target nasional yaitu berakses air minum 100% perlu upaya tambahan; 2. Mempertahan-kan daya dukung air sehingga tidak terus menurun; 3. menurunkan Tingkat pencemaran air permukaan sebagai salah satu sumber air baku	pemerataan dan pemenuhan kebutuhan air minum layak sesuai target nasional	Mengembang-kan dan meningkatkan akses terhadap layanan sumber air minum yang layak	Terpenuhi-nya kebutuhan sumber air minum layak dan aman bagi masyarakat	saluran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem pengelolaan Air Minum melalui kegiatan: 1.Pembangunan/ Peningkatan/Perluasan /Perbaikan SPAM Pemerintah (PDAM Kota Bekasi) 2.Pembangunan /Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM Swasta 3.Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM 4.Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM 5.Operasi dan Pemeliharaan SPAM 6.Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM 7.membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk pembangunan dan peningkatan jaringan SPAM 8.pengembangan SPAM non PDAM/Swasta di prioritaskan untuk wilayah-wilayah yang belum terlayani sistem penyediaan air minum sistem perpipaan
	6.2.1 (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	1. Berdasarkan hasil perhitungan rate BAU, laju pertumbuhan tingkat layanan sanitasi 0,23 %/tahun maka pada tahun 2023 target yang akan di capai sebesar 91,88 %sehingga untuk mencapai target nasional 100% 2. Berdasarkan hasil	Meningkatkan akses pada pelayanan sanitasi layak hingga 100%.	Pembangunan dan pengembangan penyediaan layanan sanitasi layak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (air minum, persampahan, limbah dan jaringan	Terpenuhi-nya akses terhadap layanan sanitasi layak bagi seluruh masyarakat	Program peningkatan penyediaan sanitasi layak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (air minum, persampahan, limbah dan jaringan drainase) melalui: 1. Peningkatan penanganan kawasan kumuh pada lokasi-lokasi yang belum tertangani 2. Penataan kawasan kumuh secara simultan 3. Sosialisasi dan pendampingan program sanimas; 4. Peningkatan jaringan air minum sistem perpipaan 5. Pembangunan dan peningkatan sistem pengelolaan limbah padat dan cair secara terpadu; 6. Membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan jaringan prasarana dan sarana dasar perkotaan; 7. pembangunan prasarana dan utilitas kota secara terpadu.

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis			Alternatif Skenario Dan Rekomendasi			
Isu Prioritas	Indikator TPB	Skenario	Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcame	Program Dan Kegiatan
	6.2.1.(d) Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	perhitungan rate BAU, laju Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat pada tahun 2023 baru mencapai 59,92% sehingga untuk mencapai target nasional sebesar 75% perlu adanya upaya tambahan		drainase)		8. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terintegrasi dan terhubung langsung dengan sungai dan saluran
	11.2.1 persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Meningkatkan pengguna moda transportasi massal di Kota Bekasi sesuai target nasional baru mencapai 28 % maka perlu upaya tambahan pada target 11.2	Meningkatkan pengguna moda transportasi massal di Kota Bekasi	Mengembangkan moda angkutan massal dan sarana prasarana pendukungnya yang ramah lingkungan	Tersedianya angkutan masal yg aman dan nyaman bagi pengguna	1.pengembangan angkutan massal kota berbasis jalan dan rel l yang terintegrasi dengan moda angkutan yang ada; 2.Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 3.pengembangan sistem jaringan transportasi dan angkutan massal yang ramah lingkungan dan masyarakat berkebutuhan khusus lainnya
	11.6.1 Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota 11.6.1(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Berdasarkan hasil perhitungan rate BAU laju pertumbuhan sampah yang tertangani setiap tahun rata-rata sekitar 1,39 % maka pada tahun 2023 target yang akan di capai sebesar 72,15 % maka untuk mencapai target nasional sebesar 100% perlu upaya tambahan	Terwujudnya pola penanganan sampah/ limbah padat hingga 100%	Meningkatkan kinerja sistem pelayanan dan pengelolaan persampahan	Terhindarnya pencemaran lingkungan akibat limbah padat	Program pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang meliputi: 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA /TPS-3R /TPS 2. Penggunaan teknologi dalam pengolahan sampah baik di TPA maupun di TPST antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemprov DKI yang dituangkan dalam PKS. 3. Peningkatan mekanisme pengelolaan sampah dari sistem sanitari landfill menjadi pemusnahan sampah melalui penggunaan teknologi 4. Edukasi dan sosialisasi pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini bagi anak sekolah. 5. pengelolaan sampah berbasis masyarakat/swakelola persampahan di 12 Kecamatan. 6. Penerapan sanksi atau Perda terhadap perorangan atau institusi yang melakukan pembuangan sampah secara ilegal 7. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan minimalisasi sampah kepada skala rumah tangga (Reduce,

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis			Alternatif Skenario Dan Rekomendasi			
Isu Prioritas	Indikator TPB	Skenario	Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcame	Program Dan Kegiatan
						Reuse, Recycle, Replace, dan Repair) 8. Pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dari dimulai dari sumbernya; 9. pengurangan produksi dan pengurangan penggunaan kantong plastic 10. pembangunan sarana daur ulang sampah di 12 kecamatan 11. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan 12. Penambahan armada angkut sampah sehingga sampah di pasar rakyat dapat diangkut ke TPA setiap hari 13. Peningkatan koordinasi penanganan limbah industry 14. Kerjasama untuk pengolahan sampah organik dan non organik di pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan pasar modern 15. Program pengurangan sampah "PESAN MAMA" (Peduli Sampah Bersama-Sama)
	11.7.1 proporsi ruang terbuka hijau perkotaan untuk semua menurut kelompok usia jenis kelamin dan penyandang disabilitas. 11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	1. Meningkatkan proporsi luas RTH sehingga mencapai target nasional; 2. Mewujudkan peruntukan ruang kawasan lindung sesuai dengan RTRW dan RDTR Kota Bekasi	1. Terwujudnya proporsi luas RTH sebesar 30% 2. Terwujudnya peruntukan ruang kawasan lindung sesuai dengan RTRW dan RDTR Kota Bekasi	Pengembangan dan peningkatan ruang terbuka hijau publik dan privat	Tercapainya pemenuhan RTH sesuai target nasional	1. Program pengembangan dan peningkatan ruang terbuka hijau melalui kegiatan: 2. Penyediaan/pembebasan lahan untuk pengembangan RTH Publik 3. Pengembangan ruang terbuka hijau sesuai RTRW dan RDTR Kota Bekasi; 4. Pemanfaatan RTH instansi/swasta sebagai RTH Publik dengan pola kerjasama. 5. Pemberiaan insentif bagi pengembang /fihak swasta yang menyediakan RTH Publik melebihi kewajiban yang disyaratkan; 6. Penyediaan RTH dengan pola kerjasama /CSR; 7. Peningkatan aksesibilitas terhadap sarana dan ruang public bagi penyandang disabilitas; 8. Pengenaan disantif bagi pihak swasta /pengembang yang tidak menyediakan RTH sesuai ketentuan 9. Pengembangan situs ekologi sebagai salah satu RTH publik dengan fungsi wisata edukasi ekologi
	12.4.1 Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). (Jumlah Usaha dan atau	Meningkatkan penanganan/pengelolaan limbah sehingga mencapai target	Mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah B3	Meningkatkan sistem pengelolaan dan penanganan limbah B3	Terhindarnya pencemaran lingkungan akibat limbah B3	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) : 1. Meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah B3; 2. Menerapkan prinsip industri bersih (<i>Clean production</i>); 3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan dan penegakan hukum

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis			Alternatif Skenario Dan Rekomendasi			
Isu Prioritas	Indikator TPB	Skenario	Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcame	Program Dan Kegiatan
	kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah pada dan B3).	nasional.	sehingga dapat meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan			lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan; 4. Menerapkan konsep 5 R (<i>Re-think, Re-use, Reduction, Recovery, dan Recycle</i>) pada industri .
	12.5.1 Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (Prosentase Pelayanan / Pengangkutan Sampah).	Berdasarkan hasil perhitungan rate BAU laju pertumbuhan sampah yang tertangani setiap tahun rata-rata sekitar 1,39 % maka pada tahun 2023 target yang akan di capai sebesar 72,15 % maka untuk mencapai target nasional sebesar 100% perlu upaya tambahan	Terwujudnya pola penanganan sampah hingga 100%	Meningkatkan kinerja sistem pelayanan dan pengelolaan persampahan	Terhindarnya pencemaran lingkungan akibat sampah	Program pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang meliputi: 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS 2. Penggunaan teknologi dalam pengolahan sampah baik di TPA maupun di TPST antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemvrop DKI yang dituangkan dalam PKS. 3. Peningkatan mekanisme pengelolaan sampah dari sistem sanitari landfill menjadi pemusnahan sampah melalui penggunaan teknologi 4. Edukasi dan sosialisasi pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini bagi anak sekolah. 5. pengelolaan sampah berbasis masyarakat/swakelola persampahan di 12 Kecamatan. 6. Penerapan sanksi atau Perda terhadap perorangan atau institusi yang melakukan pembuangan sampah secara illegal 7. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan minimalisasi sampah kepada skala rumah tangga (Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Repair) 8. Pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dari dimulai dari sumbernya: a. pengurangan produksi dan pengurangan penggunaan kantong plastik b. pembangunan sarana daur ulang sampah di 12 kecamatan 9. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan 10. Penambahan armada angkut sampah sehingga sampah di pasar rakyat dapat diangkut ke TPA setiap hari 11. Peningkatan koordinasi penanganan limbah industri 12. Kerjasama untuk pengolahan sampah organik dan non organik di pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan pasar

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis			Alternatif Skenario Dan Rekomendasi			
Isu Prioritas	Indikator TPB	Skenario	Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcame	Program Dan Kegiatan
						modern 13. Program pengurangan sampah " PESAN MAMA" (Peduli Sampah Bersama-Sama)
Penguatan Perekonomian	.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat kemiskinan Kota Bekasi sebelum terjadinya pandemic covid 19 lebih rendah di bandingkan dengan tingkat kemiskinan yang di tetapkan SDGs sebesar 7%, Namun setelah terjadinya bencana banjir dan pandemic Covid, tingkat kemiskinan melebihi target SDGs sehingga perlu upaya-upaya tambahan untuk menurunkan angka kemiskinan sesuai target nasional dan target RPJM kota Bekasi sebesar 4,01% pada tahun 2023	Penurunan angka kemiskinan di bawah target nasional	1. Meningkatkan lapangan pekerjaan 2. Mengembangkan ekonomi kreatif untuk membuka peluang usaha/ pekerjaan	menurunnya persentase angka kemiskinan	1. Program penanganan dampak Covid 19 meliputi: a. Pendataan dan validasi Penduduk Miskin dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem layanan rujukan terpadu b. pemberdayaan masyarakat miskin melalui bantuan modal dan keterampilan usaha kreatif c. program bantuan pangan warga miskin serta penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin 2. Program pengembangan dan peningkatan UMKM melalui: a. Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro; b. Peningkatan dan pengembangan kewirausahaan; c. Pelatihan peningkatan usaha dan pemasaran secara online
	8.1.1 Laju pertumbuhan PDB perkapita 8.1.1 (a) PDB perkapita/ tahun	Berdasarkan hasil perhitungan rate BAU dengan laju pertumbuhan PDB 0,51%/tahun maka pada tahun 2023 target yang akan dicapai baru mencapai 6,13% maka untuk mencapai laju pertumbuhan 7% perlu adanya upaya tambahan.	Meningkatkan laju pertumbuhan PDB perkapita lebih tinggi dari target nasional	Membuat kebijakan investasi dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan kesempatan kerja	Tercipta Iklim Usaha Yang Berdaya Saing	1. Meningkatkan PDRB per kapita sesuai target nasional; 2. Melakukan efisiensi belanja daerah; 3. Mencari sumber pertumbuhan baru dari perekonomian berbasis kreatif; 4. Pemberiaan stimulus PBB (pajak Bumi Dan Bangunan) kepada masyarakat berpenghasilan rendah; 5. peningkatan dan perluasan basis data pajak dan redistribusi daerah 6. Digitasi platpom pelayanan pajak dan redistribusi daerah 7. peningkatan dan penguatan kompetisi dan skill integritas SDM operator pajak dan redistribusi daerah 8. peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah melalui pengelolaan sumberdaya daerah secara lebih profesional 9. Penyempurnaan sistem dan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis			Alternatif Skenario Dan Rekomendasi			
Isu Prioritas	Indikator TPB	Skenario	Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan	Outcame	Program Dan Kegiatan
						10. Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional. 11. Peningkatan kemampuan pemasaran dan usaha secara online
	8.5.2 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (angka pengangguran terbuka)	Perlu upaya tambahan untuk menurunkan angka pengangguran lebih rendah dari target nasional (5,5 %)	Menurunkan angka pengangguran lebih rendah dari tingkat pengangguran nasional	Membuat kebijakan investasi dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan kesempatan kerja	Tercipta Iklim Usaha Yang Berdaya Saing	1. peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru UMKM, UMKM Online, Startup; 2. penyelenggaraan bursa tenaga kerja; 3. pengembangan industri kreatif untuk membuka peluang kerja; 4. Memasukan indikator program pembangunan untuk membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas ; 5. Memberikan upah yang sama bagi pekerjaan penyandang disabilitas sesuai dengan UMR yang telah ditetapkan; 6. membuka peluang pekerjaan dari berbagai sektor yang potensial 7. Peningkatan kompetensi dan kapasitas wirausaha dalam bentuk pelatihan 8. Membuat aplikasi berbasis mobile yang berisi data dan informasi UMKM yang ada di Kota Bekasi sekaligus tersedia menu untuk membeli produk UMKM tersebut 9. Penyelenggaraan Job fair yg sesuai dengan kebutuhan pasar dan background
	9.2.1 (a) Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita. 9.2.1 (b) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur (Laju Pertumbuhan Ekonomi industri pengolahan).	1. Meningkatkan laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB nasional (4,3%); 2. Mempertahankan kontribusi sector industri terhadap PDRB jangan sampai di bawah standar nasional	Meningkatkannya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur dan mempertahankan kontribusi sector industri terhadap PDRB	Pengembangan dan pembangunan industri manufaktur berdaya saing	Tercapainya laju pertumbuhan PDB industri lebih tinggi dari pertumbuhan PDB industri nasional	1. Meningkatkan jumlah industri manufaktur; 2. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri kreatif dan inovatif ; 3. Pengembangan industri yang mampu menjaga ekosistem, memelihara sumber daya yang berkelanjutan; 4. peningkatan infrastruktur industri; 5. Program peningkatan kualitas SDM dalam sector industri; 6. Program peningkatan daya saing industri. 7. Pengembangan saint dan kreatif centre

Sumber : sumber analisis, tahun 2020

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kota Bekasi. 2020. *Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031*.
- Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. 2020. *Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2020*.
- Bappeda Kota Bekasi. 2020. *Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi 2018-2023*.
- Bappeda Kota Bekasi. 2018. *Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam Kota Bekasi Tahun 2018-2023*.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. 2018. *Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Sungai di Kota Bekasi*.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. 2017. *Penyusunan Eco Region 2 BWP dan Pemetaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan*.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. 2017. *Penyusunan KLHS RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031*.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. 2017. *Perencanaan Infrastruktur Sektor Persampahan Kota Bekasi Tahun 2017*.
- Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3EJ). 2015. *Peta Ekoregion Provinsi Jawa Barat*.
- Pemerintah Kota Bekasi. 2019. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bekasi*.
- Pemerintah Kota Bekasi. 2019. *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bekasi*



LAMPIRAN 1 KONDISI DAERAH



1.1 BATAS WILAYAH KOTA BEKASI

Secara astronomi, Kota Bekasi terletak antara 106°48'28'' – 107°27'29'' Bujur Timur dan 6°10'6'' – 6°30'6'' Lintang Selatan. Kota Bekasi merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0 – 2% dan ketinggian antara 11 m – 81 m di atas permukaan air laut. Ketinggian kurang dari 25 m berada pada Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, dan Pondokgede. Sedangkan ketinggian antara 25 – 100 m di atas permukaan air laut berada di Kecamatan Bantargebang, Pondokmelati, dan Jatiasih. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan, wilayah administrasi Pemerintahan Kota Bekasi terbagi menjadi 12 kecamatan dengan 56 kelurahan.

Sebagai salah satu Kota Metropolitan di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 21.311,74 Ha atau 213,1174 km², luasan Kota Bekasi ini berbeda dengan hasil rilis dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 210,49 km², karena pada tahun 2020 Pemerintah Kota Bekasi bersama Badan Informasi Geospasial telah menyelesaikan Penegasan Batas Kelurahan pada 56 kelurahan dengan menggunakan Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi Akuisisi Tahun 203-2015 dan diperoleh rekapitulasi hasil luas wilayah Kota Bekasi seluas 213,1174 km². Batas-batas wilayah administrasi yang mengelilingi wilayah Kota Bekasi adalah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok
- Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta
- Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi

Batas-batas Daerah Kota Bekasi dengan Kabupaten/Kota lainnya telah diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayah Kementerian Dalam Negeri bersama Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penegasan Batas Daerah dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2017 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bekasi dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat.

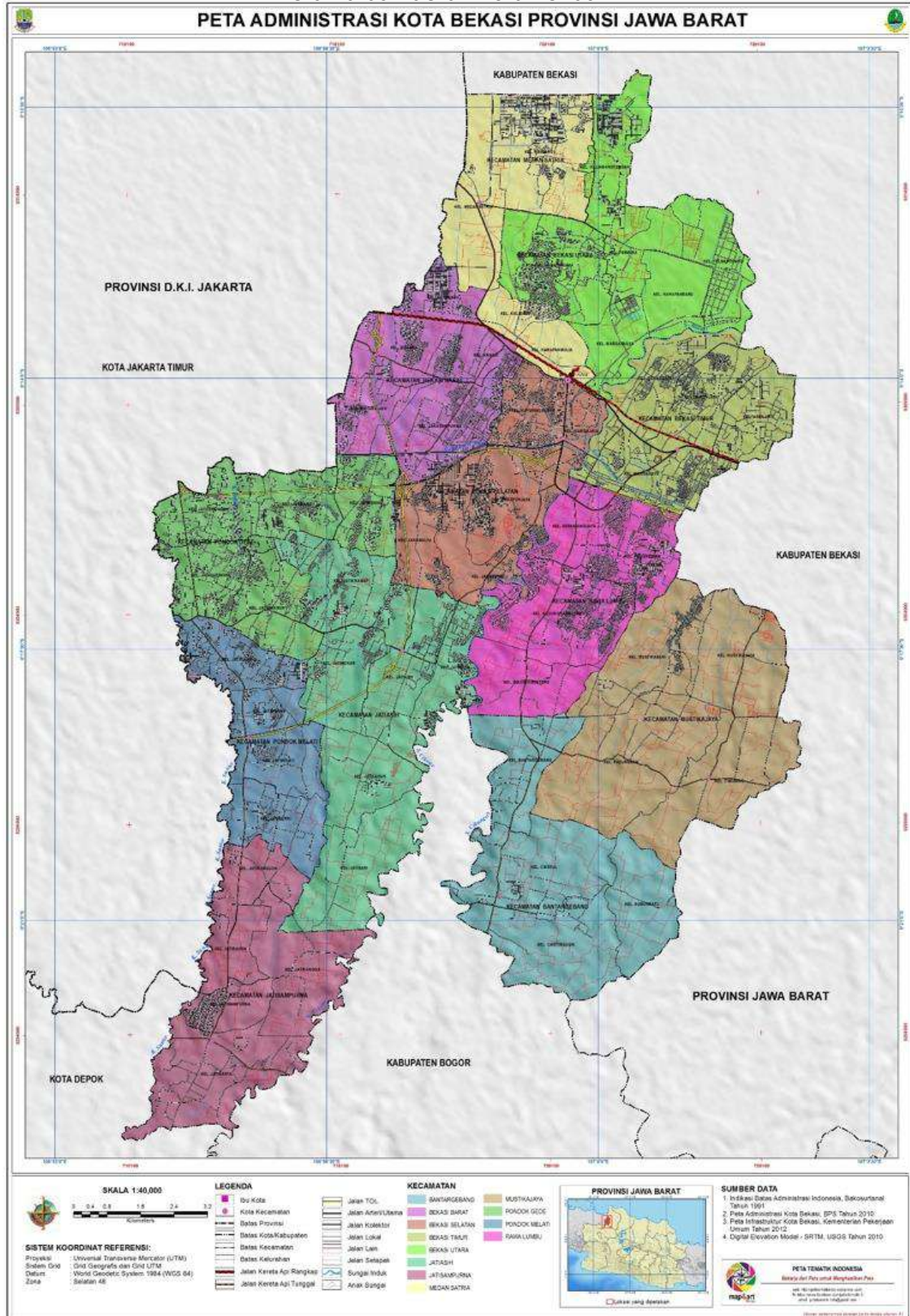
Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah tersebut dijadikan acuan Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan penegasan batas Kelurahan, maka pada tahun 2017 Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan penegasan batas Kelurahan dengan diterbitkannya 10 Peraturan Wali Kota

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

tentang Batas Kelurahan dan dilanjutkan pada tahun 2020 sebanyak 46 Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan dan 4 Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Batas Kelurahan.

Gambar 1.1
Peta Batas Daerah Kota Bekasi



Rendahnya ketinggian dan kemiringan wilayah di Kota Bekasi membuat beberapa kawasan sulit membuang air limpasan hujan dengan cepat. Hal ini memicu tingginya potensi genangan di beberapa Kecamatan khususnya ketika terjadi hujan lebat di Kota Bekasi. Wilayah yang berpotensi terjadi genangan air diantaranya meliputi, Kecamatan Jatiasih (Kelurahan Jatirasa, Jatimekar dan Jatikramat), Kecamatan Bekasi Timur (Kelurahan Duren Jaya, Aren Jaya), Kecamatan Rawalumbu (Kelurahan Bojong Menteng, Pengasinan), Kecamatan Bekasi Selatan (Kelurahan Jakasetia, Pekayon Jaya, Marga Jaya), Kecamatan Bekasi Barat (Kelurahan Bintara Jaya, Kota Baru), dan Kecamatan Pondok Melati (Kelurahan Jatirahayu).

Kondisi fisik dasar Kota Bekasi secara umum tergolong ideal untuk pengembangan berbagai kegiatan perkotaan. Parameter yang dijadikan acuan adalah:

1. Kondisi topografi kawasan yang relatif datar sehingga memungkinkan pemanfaatan lahan kawasan secara optimal.
2. Kondisi geologi, memungkinkan optimalisasi daya dukung lahan, sehingga memberikan peluang untuk pengembangan berbagai kegiatan pembangunan fisik.
3. Kondisi hidrologi, ditunjang oleh keberadaan sungai/kali dan beberapa saluran irigasi sehingga memungkinkan aliran air permukaan (*run off*) diintegrasikan dengan jaringan drainase.
4. Kondisi iklim relatif tidak berpengaruh negatif terhadap pengembangan berbagai kegiatan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi, wilayah administrasi Pemerintahan Kota Bekasi terbagi menjadi 12 kecamatan dengan 56 kelurahan, 1.013 RW dan 7.086 RT. Dengan telah ditetapkannya (4) empat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas, maka pada tahun 2017 Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan penegasan batas Kelurahan dengan diterbitkannya 10 Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan sesuai ketentuan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penegasan Batas Daerah dan dilanjutkan pada tahun 2020 sebanyak 46 Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan dan 4 Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Batas Kelurahan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

Adapun Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Wilayah Kelurahan yang ditetapkan terlebih dahulu pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
2. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 88 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 89 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 90 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor. 91 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 93 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kelurahan Bojongrawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 95 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kelurahan Sepanjangjaya Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.

Adapun hasil lanjutan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan se-Kota Bekasi yang dilaksanakan tahun 2020 telah selesai dan ditetapkan melalui 50 Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Wilayah Kelurahan, yang terdiri dari 46 Peraturan Wali Kota baru dan 4 Peraturan Wali Kota perubahan, sebagai berikut:

1. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
2. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 98 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 99 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 102 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 104 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 105 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatiranggon Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 106 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 107 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi;
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 108 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi;
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi;
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 110 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi;

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 111 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 112 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 113 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 114 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 115 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 116 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 117 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 118 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 119 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Pekayonjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 120 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 121 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 122 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Harapanbaru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
29. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 124 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
30. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 125 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
31. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 126 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
32. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 127 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
33. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 128 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi;
34. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi;
35. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 130 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria Kota Bekasi;
36. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 131 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Kalibaru Kecamatan Medansatria Kota Bekasi;
37. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 132 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

38. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 133 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
39. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 134 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Kotabaru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
40. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 135 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
41. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 136 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
42. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 137 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi;
43. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 138 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi;
44. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 139 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi;
45. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 140 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi;
46. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 141 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi;
47. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 142 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu di Kota Bekasi;
48. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya di Kota Bekasi;
49. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 144 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 88 Tahun 2017 Batas Wilayah Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur di Kota Bekasi;
50. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 145 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 90 Tahun 2017 Batas Wilayah Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur di Kota Bekasi;

Dengan demikian, pada tahun 2020 ini untuk Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Wilayah Kelurahan sudah diselesaikan dan dengan demikian mendukung program strategis nasional kebijakan satu peta. Adapun rekapitulasi data luas wilayah, jumlah Rukun Warga (RW), jumlah Rukun Tetangga (RT) sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Luas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan,
Jumlah RW dan Jumlah RT se-Kota Bekasi

No	Kecamatan dan Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah RW	Jumlah RT
I	Bekasi Timur	1,463.53	83	708
1	Kelurahan Margahayu	465.72	26	166
2	Kelurahan Arenjaya	285.71	22	180
3	Kelurahan Durenjaya	363.88	19	200
4	Kelurahan Bekasijaya	348.22	16	162
II	Bekasi Utara	2,080.52	144	1,098
1	Kelurahan Harapanbaru	253.51	18	114
2	Kelurahan Harapanjaya	489.31	30	267
3	Kelurahan Teluk Pucung	353.95	37	264
4	Kelurahan Perwira	229.03	18	112

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Kecamatan dan Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah RW	Jumlah RT
5	Kelurahan Margamulya	288.73	11	63
6	Kelurahan Kaliabang Tengah	465.99	30	278
III	Bekasi Barat	1,489.95	91	742
1	Kelurahan Jakasampurna	500.63	23	192
2	Kelurahan Bintarajaya	268.66	14	119
3	Kelurahan Kranji	179.60	16	99
4	Kelurahan Bintara	339.82	16	153
5	Kelurahan Kotabaru	201.24	22	179
IV	Bekasi Selatan	1,580.65	94	624
1	Kelurahan Jakasetia	385.70	20	118
2	Kelurahan Pekayonjaya	434.06	26	169
3	Kelurahan Margajaya	167.07	6	31
4	Kelurahan Kayuringinjaya	285.99	26	194
5	Kelurahan Jakamulya	307.83	16	112
V	Jatiasih	2,426.19	100	667
1	Kelurahan Jatiasih	362.90	17	85
2	Kelurahan Jatisari	545.61	20	156
3	Kelurahan Jatimekar	453.25	17	105
4	Kelurahan Jatirasa	297.27	15	125
5	Kelurahan Jatikramat	354.25	19	123
6	Kelurahan Jatiluhur	412.91	12	73
VI	Bantargebang	1,924.34	37	182
1	Kelurahan Bantargebang	438.83	10	31
2	Kelurahan Cikefingudik	435.92	9	46
3	Kelurahan Sumurbatu	503.16	11	73
4	Kelurahan Cikiwul	546.43	7	32
VII	Pondokgede	1,743.25	78	575
1	Kelurahan Jatimakmur	432.02	25	157
2	Kelurahan Jatiwaringin	290.40	15	115
3	Kelurahan Jatibeningbaru	340.69	11	76
4	Kelurahan Jaticempaka	362.08	13	113
5	Kelurahan Jatibening	318.06	14	114
VIII	Rawalumbu	1,685.31	97	642
1	Kelurahan Bojongrawalumbu	638.56	41	295
2	Kelurahan Pengasinan	349.34	30	187
3	Kelurahan Sepanjangjaya	302.14	13	81
4	Kelurahan Bojongmenteng	395.27	13	79
IX	Medansatria	1,321.45	72	487
1	Kelurahan Harapanmulya	205.63	16	84
2	Kelurahan Kalibaru	140.95	12	69
3	Kelurahan Medansatria	385.37	11	63
4	Kelurahan Pejuang	589.50	33	271
X	Jatisampurna	2,019.32	68	343
1	Kelurahan Jatikarya	515.26	14	61
2	Kelurahan Jatisampurna	419.36	19	113
3	Kelurahan Jatirangga	454.46	16	47
4	Kelurahan Jatiraden	307.74	11	50
5	Kelurahan Jatiranggon	322.50	8	72
XI	Pondokmelati	1,101.57	57	388
1	Kelurahan Jatimurni	283.17	8	59
2	Kelurahan Jatimelati	276.17	15	91
3	Kelurahan Jatiwarna	182.20	11	67
4	Kelurahan Jatirahayu	360.03	23	171
XII	Mustikajaya	2,475.67	92	630
1	Kelurahan Mustikajaya	680.18	33	208
2	Kelurahan Cimuning	548.22	26	180
3	Kelurahan Mustikasari	484.26	10	75
4	Kelurahan Padurenan	763.01	23	167
JUMLAH		21,311.74	1,013	7,086

Sumber: Bag. Tata Pemerintahan, 2020

1.2 KONDISI INFRASTRUKTUR WILAYAH

Kondisi infrastruktur adalah kelengkapan yang harus disediakan di kawasan permukiman guna menjamin kenyamanan masyarakat setempat, dengan semakin meningkatnya urbanisasi dan jumlah penduduk di perkotaan mengakibatkan jumlah perumahan yang ada terus bertambah, tingkat pencemaran telah meningkat di badan air dan terutama air limbah di perkotaan. Hal ini berarti peningkatan pencemaran diakibatkan oleh peningkatan produksi sampah dan air limbah, tanpa didukung prasarana dan sarana sanitasi atau air limbah yang memadai. Semua ini menyebabkan dampak yang menjadi masalah utama di daerah perkotaan.

1.2.1 Sumber Daya Air

a. Sistem Perpipaan

Sistem Penyediaan Air Minum perpipaan perkotaan di Kota Bekasi berada dibawah tanggungjawab PDAM Tirta Patriot dan PDAM Tirta Bhagasasi (berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2000 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Bekasi yang di undangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2000 Nomor 13 Seri d sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 02 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah) PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi berdiri Tahun 2006. Sebelum Tahun 2006, penduduk Kota Bekasi dilayani oleh PDAM Tirta Bhagasasi. Sejak pemisahan wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, pelayanan air minum untuk masyarakat (pelanggan) di Kota Bekasi dilayani oleh 2 (dua) operator BUMD penyelenggara air minum. PDAM Tirta Bhagasasi dengan 2 (dua) kepemilikan yaitu Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Sedangkan PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi dengan 1 (satu) kepemilikan Pemerintah Kota Bekasi. Selain itu juga sebagian dilayani oleh 2 pengelola swasta yaitu Bamus Pondok Hijau dan Developer Kemang Pratama. Jumlah pelanggan PAM di Kota Bekasi sebanyak 121.387 unit (per Juni 2020) yang terbagi dalam 2 (dua) PDAM yaitu PDAM Tirta Bhagasasi sebanyak 86.454 SL dan PDAM Tirta Patriot sebanyak 34.933 SL. Dengan cakupan pelayanan sebesar 32,06%. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pelanggan PDAM Tirta Patriot dan PDAM Tirta Bhagasasi dapat di lihat pada table di bawah ini.

Tabel 1.2
Jumlah Pelanggan Se-Kota Bekasi

No	Nama IPA	Pelanggan Aktif	Ket	DRD Air Terjual (M3/bln)	Dalam satuan Lit/det	Terdistribusikan (lit/det) NRW 30 %	Terproduksi (lit/det)
1	Teluk Buyung	32.627	Data Mei 2020	675.564	261	372	400
2	Jatisari	2.142	Data Mei 2020	29.862	12	16	18
3	Wisma Asri	15.144	Data Feb 2020	233.371	90	129	138
4	Harapan Baru	3.860	Data Feb 2020	68.450	26	38	41
5	Bekasi Kota	16.734	Data Feb 2020	337.203	130	186	200
6	Rawa Tembaga	13.849	Data Feb 2020	277.290	107	153	164
7	Rawa Lumbu	11.521	Data Feb 2020	184.043	71	101	109
8	Pondok Ungu	19.400	Data Feb 2020	430.447	166	237	255
9	Setia Mekar	6.110	Data Feb 2020	102.281	39	56	61
		121.387		1.338.511	902	1.289	1386

Sumber : Profil PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi Tahun 2020

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Selain itu juga sistem penyediaan air minum di Kota Bekasi selain dari PDAM juga dilayani oleh penyediaan Air Minum yang di kelola oleh pengelola swasta yaitu Bamus Pondok Hijau dan Developer Kemang Pratama, Citra Gran dan juga yang di kelola oleh pihak KKP dan Pamsimas.

Cakupan pelayanan PDAM Tirta Patriot selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan, secara administrasi cakupan pelayanan jaringan perpipaan PDAM Tirta Patrio meliputi 3 kecamatan yaitu kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Medan Satria dan Kecamatan Bekasi Barat, dimana pada tahun 2015 cakupan pelayannya baru mencapai sebesar 6,16% dan meningkat menjadi 8,02% pada tahun 2019, sedangkan cakupan pelayanan teknis sistem penyediaan air minum PDAM Tirta Patriot pada tahun 2019 baru mencapai 32,06% dengan jumlah penduduk yang terlayani sebesar 198.000 jiwa.

PDAM Tirta Patriot saat ini per Desember 2019 memiliki jumlah pelanggan sebanyak 34.159 pelanggan yang terdiri atas:

- di wilayah SPAM Teluk Buyung sebanyak 32.359 pelanggan dan
- di wilayah SPAM Jatisari sebanyak 1.800 pelanggan.

Dengan total volume air terjual sebanyak 12.857.875 m³/tahun yang terdiri atas:

- di wilayah SPAM Teluk Buyung sebanyak 12.804.933 m³/tahun dan
- di wilayah SPAM Jatisari sebanyak 52.942 m³/tahun (mulai Agustus–Desember 2019).

Lebih jelasnya mengenai cakupan pelayanan air minum PDAM tirta Patriot dapat di lihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
Cakupan Pelayanan PDAM Tirta Patriot Selama Kurun Waktu 5 tahun (2015-2019)

URAIAN		2015	2016	2017	2018	2019*
Jumlah Pelanggan	SL	26.680	28.044	29.343	30.824	34.159
Penduduk Terlayani	JIWA	160.080	168.264	176.058	153.296	198.000
Jumlah Penduduk Kota Bekasi 3 Kecamatan)	JIWA	841.488	842.592	857.221	857.221	857.221
Cakupan Pelayanan (Pelayanan Administrasi)	%	6,16	6,29	6,33	7,10	8,02
Jumlah Penduduk di wilayah Teknis	JIWA	746.845	769.259	769.259	528.218	617.621
Cakupan Pelayanan Teknis	%	21,43	21,87	22,89	29,02	32,06
Jumlah Penduduk Kota Bekasi (Seluruh Kecamatan)	JIWA	2.598.723	2.676.684	2.783.484	2.943.859	2.448.840

Sumber: PDAM Tirta Patriot

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Cakupan pelayanan PDAM Tirta Patriot meliputi 5 kecamatan yaitu Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Pondok Gede dan Kecamatan Jatiasih. Dari ke 5 (lima) kecamatan tersebut tidak semua kelurahan mendapat pelayanan PDAM Tirta Patriot, terdapat beberapa kelurahan mendapat pelayanan PDAM Tirta Bhagasasi. Sistem penyediaan air minum PDAM Tirta Patriot saat ini memanfaatkan 2 (dua) sumber air yaitu dengan memanfaatkan Irigasi Tarum Barat dan memanfaatkan Sungai Cikeas dengan debit air baku (sesuai SIPPA/data BBWS/data Internal PDAM) sebesar 870 liter/detik dan Perusahaan menggunakan sistem perpompaan dalam mengalirkan air baku untuk kebutuhan unit produksi dengan debit sebesar 850 liter perdetik (jumlah pengambilan air baku maksimal adalah sesuai kapasitas terpasang IPA) atau dengan tingkat pemanfaatan yang telah maksimal.

Unit Air Baku dengan sumber air baku Saluran Sekunder Tarum Barat yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta II dan Unit Pengolahan Teluk Buyung Kapasitas 650 liter/detik serta Bangunan Penunjang lainnya (Kantor Pusat). Dan sejak bulan Agustus 2019, mulai komersial Unit Pengolahan Jatisari Kapasitas 200 liter/detik (baru terbangun 100 liter/detik) di Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka Kota Bekasi, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih dengan Sumber Air Baku Sungai Cikeas, yang merupakan kerjasama investasi dan pengelolaan dengan Badan Usaha Pelaksana yaitu PT. Widya Tirta Selaras selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan. Sehingga total kapasitas produksi terpasang Tirta Patriot per Oktober 2019 adalah 750 liter/detik.

Fasilitas pengolahan air PDAM Tirta Patriot yang berlokasi di Teluk Buyung, dengan sumber air baku Saluran Sekunder Tarum Barat yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta II dengan kapasitas izin pemanfaatan air baku (SIPPA) Kapasitas 650 liter/detik, sehingga PDAM Tirta Patriot berkewajiban membayar biaya air baku ke Perum Jasa Tirta II setiap bulannya. Dengan sumber air baku Saluran Sekunder Tarum Barat yang merupakan campuran Kali Bekasi dengan Kalimalang (Saluran Utama Tarum Barat PJT II/Kalimalang).

Sedangkan cakupan pelayanan PDAM Tirta Bhagasasi baru melayani 7 Kecamatan yang ada di Kota Bekasi yaitu Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Pondok Melati. Cakupan pelayanan teknis PDAM Tirta Bhagasasi sebesar $\pm 42,05\%$ dan saat ini per Agustus 2020 memiliki jumlah pelanggan sebanyak 87.076 pelanggan yang terdiri atas:

- a. Cabang Rawa Tembaga sebanyak 13.720 pelanggan
- b. Cabang Rawalumbu sebanyak 11.498 pelanggan
- c. Cabang Kota sebanyak 16.634 pelanggan
- d. Cabang Wisma Asri sebanyak 15.033 pelanggan
- e. Cabang Pondok Ungu sebanyak 19.332 pelanggan

Lebih jelasnya mengenai cakupan pelayanan PDAM Tirta Bhagasasi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.4
Penduduk Kota Bekasi Yang Sudah Terlayani Air PAM (menjadi Pelanggan PDAM)
PDAM Tirta Bhagasai

No	Wilayah Pelayanan	Bulan							
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust
I	Cabang Rawa Tembaga	13849	13840	14002	14021	14009	13861	13726	13720
	1. Cabang Pembantu Pondok Gede	964	953	964	964	964	964	963	965
	2. Cabang Pembantu Harapan Baru	3860	3859	3863	3867	3870	3871	3853	3830
II	Cabang Rawalumbu	11521	11530	11508	11511	11512	11502	11484	11498
III	Cabang Kota	16734	16734	16726	16743	16696	16648	16607	16634
	Cabang Pembantu Setia Mekar	6110	6106	6096	6094	6091	6065	6067	6064
IV	Cabang Wisma Asri	15144	15127	15081	15087	15113	15106	15070	15033
V	Cabang Pondok Ungu	19399	19371	19386	19419	19443	19287	19355	19332
	Jumlah	87581	87530	87626	87706	87698	87304	87105	87076

Sumber : PDAM Tirta Bhagasai

Dengan sumber air baku yang di gunakan adalah sumber air dari permukaan (sungai yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum, dan sumber air baku yang dimanfaatkan PDAM Tirta Bhagasai yaitu diambil dari Saluran Tarum Barat Debit. Debit yang tersedia sebesar 3520 L/det dan perusahaan telah menggunakan sistem perpompaan untuk pengambilan air baku untuk kebutuhan unit produksi dengan debit sebesar 2291 liter/detik, dengan tingkat pemanfaatan yang belum maksimal.

b. Sistem Perpipaan

Sedangkan sistem perpipaan non PDAM di Kota Bekasi meliputi:

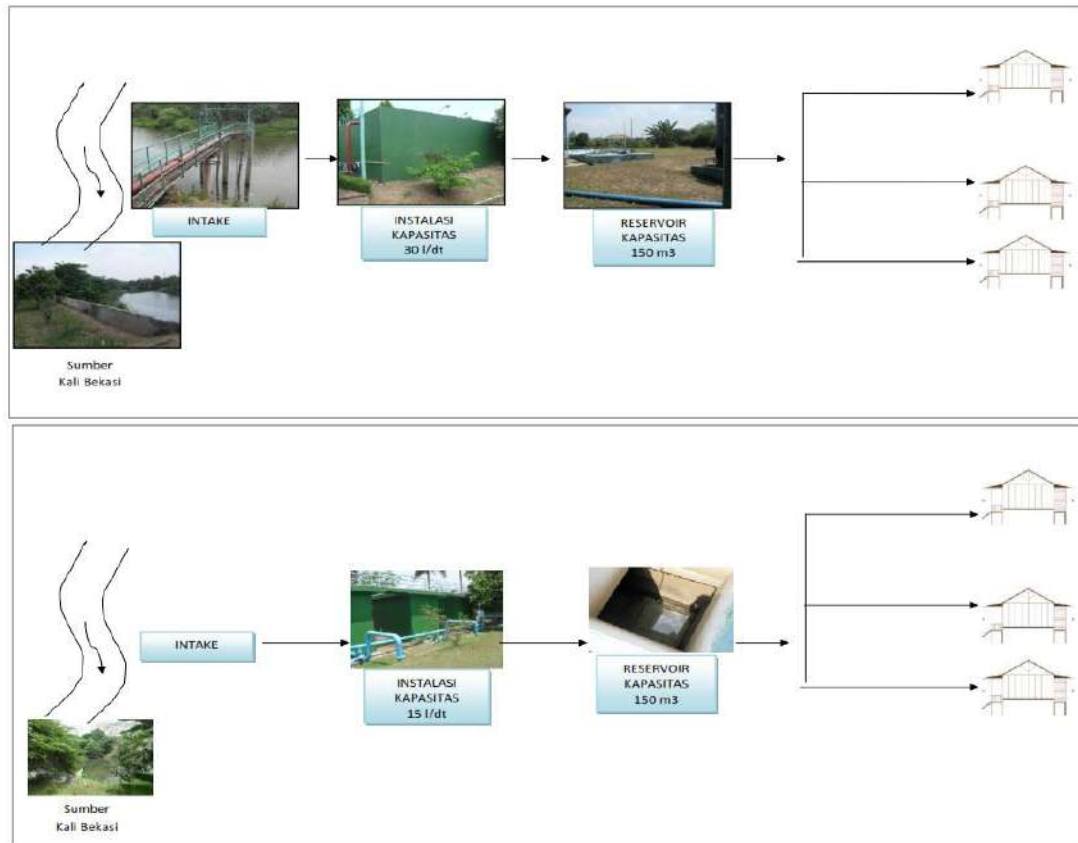
- Tirta Pondok Hijau

Tirta Pondok Hijau (BAMUS) adalah Pengelola air bersih sistem air minum non PDAM yang ada di Kota Bekasi. Tirta Pondok Hijau dikelola oleh warga setempat. Sumber air yang digunakan berasal dari sumur dalam. Saat ini kapasitas terpasang adalah sebanyak 15 l/dtk, dengan kapasitas produksi baru mencapai 5 l/dtk, jumlah sambungan langsung yang dimiliki oleh Tirta Pondok Hijau sebanyak 600 SL.

- Kemang Pratama 1 dan 2

Pengelola Perumahan Kemang Pratama 1 dan 2 saat ini sudah memiliki Instalasi Pengolahan Air tersendiri untuk didistribusikan kepada warga di perumahan tersebut. Kapasitas instalasi saat ini adalah 15 l/dtk untuk Kemang Pratama 1 dan 30 l/dtk untuk Kemang Pratama 2, jumlah pelanggan mencapai 5700 SL. Sumber air diambil dari Kali Bekasi, namun saat ini kondisi dari Kali Bekasi sudah tercemar sehingga air yang dihasilkan kadang-kadang berwarna keruh dan berbau.

Gambar 1.2
Skema SPAM Kemang Pratama 1 Dan 2

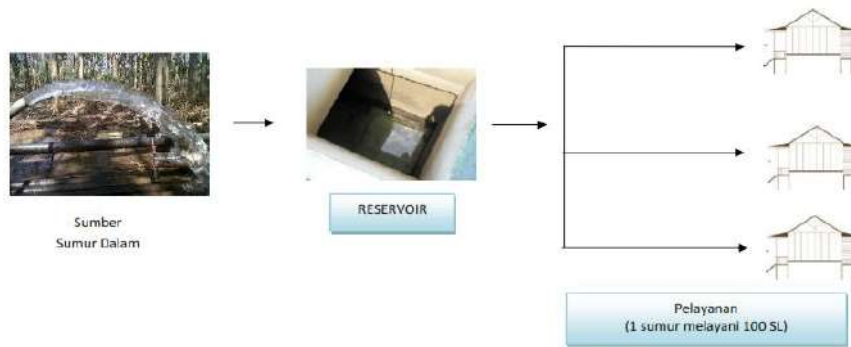


- Citra Grand

Pengelola perumahan Citra Grand saat ini sudah memiliki Instalasi Pengolahan Air tersendiri untuk didistribusikan kepada warga di perumahan tersebut. Kapasitas instalasi sebesar 30 l/dtk serta ada yang sedang dalam proses pembangunan instalasi sebesar 25 l/dtk. Sehingga total instalasi yang dimiliki oleh Citra Grand sebesar 55 l/dtk. Jumlah pelanggan sebesar 3000 SL. Instalasi Citra Gand menggunakan sumber air dari sungai Cikeas.

- SPAM Bantar Gebang

SPAM Bantar Gebang adalah sistem penyediaan air minum non PDAM yang ada di Kecamatan Bantargebang. SPAM Bantar Gebang ini dikelola oleh warga setempat dengan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Sumber air yang digunakan berasal dari sumur dalam. Saat ini telah dibangun 6 titik sumur dalam yaitu 2 titik di Kel. Cikiwul, 2 titik di Kel. Sumur Batu dan 2 titik di Kel.Ciketing Udik. 1 sumur artesis tersebut digunakan untuk melayani 100 SL. Di tahun 2012, telah dibangun 2 titik penambahan sumur artesis yaitu 1 titik di Kel. Sumur batu dan 1 titik di Kel. Ciketing Udik.



Gambar 1.3
Skema SPAM Bantar Gebang

Unit tambahan sumur tersebut direncanakan akan mulai beroperasi di tahun 2013. Dari informasi yang didapat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Dinas Kesehatan Kota Bekasi melalui program sanitasi air bersih, akan membangun 2 titik sumur dalam yang berlokasi di Kel. Margajaya dan Kel. Margahayu.

- Sarana Air Bersih

Terdapat beberapa Sarana Air Bersih (SAB) di Kota Bekasi dengan sistem kelembagaan di kelola oleh KPP dengan biaya per m³ berkisar antara Rp. 1.500 sampai dengan Rp. 3.500. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana air bersih di Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

1.2.2 Energi/Kelistrikan

Listrik sudah merupakan komoditi pokok yang dibutuhkan baik oleh rumah tangga maupun badan usaha terutama di daerah perkotaan. Sebagian pelanggan PT. PLN yang bermukim di Kota Bekasi, tercatat sebagai pelanggan PT. PLN cabang Jakarta dan cabang Kabupaten Bekasi. Jumlah pelanggan listrik cenderung mengalami peningkatan selama periode tahun 2015-2019. Jumlah pelanggan pada tahun 2016 sebanyak 421.669 pelanggan pada tahun 2017 sebanyak 447324 pelanggan, pada tahun 2018 sebesar 662.386 pelanggan dan pada tahun 2019 sebesar 881.680 pelanggan, dengan produksi listrik terjual sebesar 2.055.711.879,80 kwh. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pelanggan dan produksi listrik terjual di Kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.6
Jumlah Pelanggan Listrik dan Perkembangan Daya Terpasang Menurut Jenis Pelanggan Tahun 2019

No	Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Produksi Listrik Terjual (kwh)
1	Sosial	9128	61858784
2	Rumah Tangga	829520	1557572150,50
3	Bisnis	39355	314887366,50
4	Industri	886	75746310
5	Pemerintahan	2558	4106931,40
6	Lain-Lain	233	4540337,40
	Jumlah	881680	2055711879,80

Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2020

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)




Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Tabel 1.5
Sarana Air Bersih Kota Bekasi

No	Alamat	Titik Kordinat	Foto	Unit Sumber Air Baku	Unit Produksi, Kapasitas, Rangkaian Unit Pengolahan	Satuan Sambungan Rumah (Sr)	Area Distribusi	Harga Air/M3	Kelembagaan KPP	Permasalahan
	RT 02 RW 01 Kelurahan Marga Mulya	-6.365752; 107.00618		1 Unit		54 SR	100 meter	Rp. 2.000,-	Ketua : Nahrudin Sekretaris : Wiwit Bendahara : Neli Teknisi : Erwin	Belum tepat waktu dalam pembayaran tagihan air
	RT 01 RW 01 Kelurahan Marga Mulya	-6.366873; 107.006211		1 Unit		28 SR	60 meter	Rp. 1.500,-	Ketua : Verawaty Sekretaris : Jaya Bendahara : Nina Teknisi : Chistian	Belum tepat waktu dalam pembayaran tagihan air
	RT 04 RW 01 Kelurahan Marga Mulya	-6.23004631; 106.999179		1 Unit		45 SR	120 meter	Rp. 3.000,-	Ketua : Swanty Sekretaris : Lie Kang Nio Bendahara : Dewi Sartika Teknisi : Riyodi	Belum tepat waktu dalam pembayaran tagihan air




KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Alamat	Titik Kordinat	Foto	Unit Sumber Air Baku	Unit Produksi, Kapasitas, Rangkaian Unit Pengolahan	Satuan Sambungan Rumah (Sr)	Area Distribusi	Harga Air/M3	Kelembagaan KPP	Permasalahan
	RT 01 RW 07 Kelurahan Harapan Mulya	-6.212041; 106.993773		1 Unit		45 SR	70 meter	Rp. 1.500	Ketua Aam Hamdani Sekretaris : Arifin Bendahara : Sadam Teknisi : Hendra, Rasmani	Belum tepat waktu dalam pembayaran tagihan air
	RT 06 RW 07 Kelurahan Harapan Mulya	-6.224811; 106.993329		1 Unit		58 SR	70 meter	Rp. 1.500	Ketua Sanuri Sekretaris : Asep Sukarya Bendahara : Suaka abdilman Teknisi :Robi, Budiyanto	Belum tepat waktu dalam pembayaran tagihan air
	RT 05 RW 07 Kelurahan Harapan Mulya	-6.205114; 106.993548		1 Unit		78 SRr	100 meter	Rp. 1.500	Ketua Suhadi Sekretaris : Miftahudin Bendahara : Nana sumarna Teknisi :Solehi, Andi Suhada	Belum tepat waktu dalam pembayaran tagihan air




KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Alamat	Titik Kordinat	Foto	Unit Sumber Air Baku	Unit Produksi, Kapasitas, Rangkaian Unit Pengolahan	Satuan Sambungan Rumah (Sr)	Area Distribusi	Harga Air/M3	Kelembagaan KPP	Permasalahan
	RT 02 RW 03 Kelurahan Harapan Mulya	-6.217771; 106.987940		1 Unit		60 SR	70 meter	Rp. 3.500	Untuk SAB di RW 03 SAB 4 di kelola bersama ketua : Dadi Perwakilan SAB 1. Nazwar Abas 2. Sanuri 3. A Nasyarudin 4. Hasanudin	Belum tepat waktu dalam pembayaran tagihan air
	RT 05 RW 03 Kelurahan Harapan Mulya	-6.219563; 106.993099		Unit		60 SR	70 meter	Rp. 3.500		Belum tepat waktu dalam pembayaran tagihan air
	RT 03 RW 03 Kelurahan Harapan Mulya	-6.227 107.06		1 Unit		60 SR	70 meter	Rp. 3.500		Belum tepat waktu dalam pembayaran tagihan air




KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Alamat	Titik Kordinat	Foto	Unit Sumber Air Baku	Unit Produksi, Kapasitas, Rangkaian Unit Pengolahan	Satuan Sambungan Rumah (Sr)	Area Distribusi	Harga Air/M3	Kelembagaan KPP	Permasalahan
	RT 08 RW 03 Kelurahan Harapan Mulya	-6.22506; 106.993225		1 Unit		60 SR	70 meter	Rp. 3.500		Belum tepat waktu dalam pembayaran tagihan air
	RT 03 RW 05 Kelurahan Kalibaru	-6.217054; 106.98399		1 Unit		50 SR	70 meter	Rp.3.000	Ketua : Ferdian Sunanda Sekretaris : Siti Rosidah Bendahara : Sri Subariah	Belum tepat waktu dalam pembayaran tagihan air
	RT 04 RW 05 Kelurahan Margahayu	-6.238075; 106.981803		1 Unit		50 SR	60 meter	Rp. 3.000		Belum tepat waktu dalam pembayaran tagihan air

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Alamat	Titik Kordinat	Foto	Unit Sumber Air Baku	Unit Produksi, Kapasitas, Rangkaian Unit Pengolahan	Satuan Sambungan Rumah (Sr)	Area Distribusi	Harga Air/M3	Kelembagaan KPP	Permasalahan
	RT 06 RW 09 Kelurahan Margahayu	-6.248196; 107.017758		1 Unit		50 SR	70 meter	Rp. 3.000		Belum tepat waktu dalam pembayaran tagihan air
	RT 003 RW 14 Kelurahan Jatibening			1 Unit (pompa 2 unit)		247 SR (300 KK)	500 meter	Rp .1.000	Ketua : Siti Nuryati Sekretaris : Bendahara : Teknisi :	Belum tepat waktu dalam pembayaran tagihan/ada yang nunggak
	RT 04 RW 05 Kelurahan Bojong Menteng			Unit		50 SR			Ketua : Agus Sekretaris : Bendahara : Teknisi :	Keterangan Proses Pekerjaan

1.2.3 Pengelolaan Persampahan

Kebutuhan akan fasilitas tempat pembuangan sampah meningkat sejalan dengan adanya peningkatan perkembangan penduduk, kemudian juga adanya perkembangan aktivitas kota yang memerlukan lahan untuk pembangunan infrastruktur, ditambah lagi dengan adanya perkembangan industri. Kota Bekasi mempunyai fasilitas tempat pembuangan sampah namun kondisinya, di masa yang akan datang akan sulit menemukan lokasi tempat pembuangan sampah selain itu juga akan sangat mahal. Sampah yang dihasilkan kegiatan perkotaan di Kota Bekasi sebagian besar tergolong sampah domestik. dengan volume sampah yang masuk ke TPA Sumur Batu sebesar 275.084,05 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.7
Tonase Dan Volume Sampah yang Masuk
Ke TPA Sampah Sumur Batu Kota Bekasi Tahun 2018

No	Bulan	Kendaraan	Ritase (Kali)	Berat Sampah (Tonase)
1	Januari	241	5.937	26.245,870
2	Februari	241	5.680	26.205,470
3	Maret	241	6.357	28.153,080
4	April	241	5.748	25.611,140
5	Mei	241	5.655	25.104,060
6	Juni	241	4.968	21.474,910
7	Juli	241	5.990	23.183,930
8	Agustus	241	5.353	20.956,500
9	September	241	5.162	20.101,560
10	Oktober	241	4.903	20.316,540
11	November	241	4.183	19.732,710
12	desember	241	3.544	17.998,280
	Jumlah	2892	63.480	275.084,05

Sumber : Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2019 (BPS)

Perkiraan data potensi timbulan sampah Kota Bekasi berdasarkan perhitungan Jakstrada yaitu 0,70 kg/jiwa/per-hari akan mencapai 625.650.515 kg/tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.8
Daftar Jumlah Sampah Terangkut

No	Wilayah	Timbulan berdasarkan Jakstrada (kg)	Jumlah sampah terangkut ke TPA
1	Bekasi Selatan	54.021.898	41.289.500
2	Bekasi Utara	84.301.969	31.647.840
3	Bekasi Barat	68.945.653	43.083.580
4	Bekasi Timur	69.348.321	31.946.330
5	Mustikajaya	49.856.481	28.880.910
6	Pondok Gede	58.337.293	36.321.500
7	Pondok Melati	32.500.111	18.800.440
8	Rawalumbu	56.337.684	25.785.290
9	Bantargebang	26.922.801	10.331.120
10	Jatisampurna	27.133.844	19.245.870
11	Jatiasih	57.661.240	23.673.280
12	Medan Satria	40.286.218	34.832.750
	JUMLAH	625.650.515	396.862.320

Sumber : LKIP DLH Kota Bekasi, 2019

Pengolahan Persampahan di Kota Bekasi

- **Konsep 3 R**

Di Kota Bekasi saat ini memiliki 133 titik komposting dan setiap hari dapat memproduksi 1 m³/hari. Berarti untuk satu bulan produksi kompos dapat dihasilkan 30 x 121 m³ = 3.630 m³/bulan. Pengurangan sampah melalui komposting ± 2,05% dari total produksi sampah.

- **Bank Sampah**

Terdapat ± 81 bank sampah sesuai dengan keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor 660.2/Kep.295-Dinsih/VI/2013 tentang Penetapan Bank Sampah di Kota Bekasi. Dalam kegiatan bank sampah ini sendiri pengelola harus memilah sampah menjadi beberapa golongan yang masih memiliki nilai ekonomi, kemudian di jual kelapak-lapak. Hasil penjualan ini akan di masukan ke rekening nasabah nantinya.

Dalam penerapannya hingga saat ini Pemerintah Kota Bekasi di bantu oleh warga Kota Bekasi sendiri telah memiliki inisiatif untuk mengembangkan program 3 R dengan mendirikan gerakan peduli lingkungan (GPL) yang di dalamnya terdapat rumah kompos dan kegiatan yang menguntungkan yaitu bank sampah. Namun kegiatan ini belum banyak dilakukan walaupun sangat di perlukan untuk mereduksi sampah yang akan di buang ke TPA.

1.2.4 Drainase

Di Wilayah Kota Bekasi terdapat 4 Kali besar yang berfungsi sebagai saluran primer, yaitu Kali Cileungsi, Kali Cikeas, Kali Bekasi, dan Kali Sunter. Kali Cileungsi dan Kali Cikeas bermuara di Kali Bekasi. Disamping itu terdapat sejumlah Kali yang bersumber di Wilayah Kota Bekasi yang berfungsi sebagai saluran sekunder.

Pengelolaan Empat sungai besar yang menjadi saluran primer tersebut menjadi wewenang dan tanggungjawab Balai Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane dan Kali lainnya yang terletak di wilayah Kota Bekasi menjadi tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Kota Bekasi. Tiga (3) dari Saluran Primer tersebut diatas, terletak di daerah studi yaitu Kali Cikeas, Kali Bekasi, dan Kali Sunter. Tiga sungai penyumbang banjir terbesar di Kota Bekasi adalah: Kali Bekasi, Kali Cikeas, dan Kali Sunter rutin menyumbang banjir tahunan di wilayah berikut ini:

1. Kecamatan Pondok Gede (Perumahan Bina Lindung)
2. Kecamatan Pondok Melati (Perumahan Chandra RW 15, Perumahan Pondok Melati Indah, Perumahan Nyai Putu Bawah).
3. Kecamatan Bekasi Selatan (Perumahan Jaka Kencana)
4. Kecamatan Jati Asih (Pondok Mitra Lestari, Jati Asih Indah, Kemang IFI Graha, Pondok Gede Permai, Villa Jati Rasa, Perumahan Mandosi).
5. Kecamatan Jati Sampurna (Perumahan Citra Grand).

Perumahan padat meliputi 55% dari ruang Kota Bekasi, untuk perumahan sedang meliputi 30% dari ruang Kota Bekasi dan perumahan kepadatan rendah meliputi 15% dari ruang Kota Bekasi. Sungai utama yang mengalir di Kota Bekasi merupakan Kali Cikeas dan Kali Bekasi.

Kali Bekasi dan Kali Cikeas

- Kali Cikeas dan Kali Bekasi pengelolaan dan penanganannya di bawah kewenangan BBWS Ciliwung-Cisadane
- Kali Cikeas merupakan wilayah perbatasan antara Kota Bekasi dengan Kabupaten Bogor, memiliki panjang sungai 23,27 km. Sedangkan Kali Bekasi adalah sungai yang membelah Kota Bekasi menjadi 2 bagian, dan Kali Bekasi berasal dari aliran Kali Cikeas dengan Kali Cileungsi yang memiliki hulu sungai di wilayah Kabupaten Bogor.
- Slope saluran dasar sungai rata-rata Kali Cikeas $S = 0,00026$, Kali Bekasi $S = 0,00056$ dan rata-rata slope Kali Cikeas-Bekasi adalah $S = 0,00042$.
- Luas tangkapan air yang mengalir dari wilayah Kota Bekasi untuk Kali Cikeas = 955 Ha, Kali Bekasi = 1.796 Ha dan Kali Cikeas-Bekasi adalah 2.751 Ha.
- Wilayah pelayanan Kali Cikeas dan Kali Bekasi (Daerah Tangkapan Air di wilayah Kota Bekasi) meliputi: Kelurahan Jati Karya - Kec. Jati Sampurna, Kelurahan Jati Asih - Kec. Jati Asih, Kelurahan Jati Rasa - Kec. Jati Asih, Kelurahan Jati Setia - Kec Bekasi Selatan, Kelurahan Teluk Pucung – Kec. Bekasi Utara.
- Aliran Kali Cikeas dan Kali Bekasi di bagian hilir masuk ke sistem saluran Bekasi Cikarang Pantai ke arah laut.

Kali Galaxi/Kali Boulevard

- Kali Boulevard/ Kali Galaxi/ Kali BSK dan Kali Pekayon Kecil pengelolaan dan penanganannya di bawah Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi.
- Kali Boulevard/ Kali Galaxi/ Kali BSK dan Kali Pekayon Kecil memiliki hulu sungai di wilayah Kota Bekasi, sedangkan hilirnya merupakan wilayah perbatasan antara Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi, memiliki panjang sungai 6,95 km.
- Slope saluran dasar sungai rata-rata adalah $S = 0,00057$
- Luas tangkapan air yang mengalir dari wilayah Kota Bekasi adalah 437 Ha.
- Wilayah pelayanan Kali Boulevard/ Kali Galaxi/ Kali BSK dan Kali Pekayon Kecil (Daerah Tangkapan Air di wilayah Kota Bekasi) meliputi: Kelurahan Jati Rahayu - Kec. Pondok Melati, Kelurahan Jati Waringin - Kec. Pondok Gede, Kelurahan Jati Makmur - Kec. Pondok Gede, Kelurahan Jati Cempaka - Kec Pondok Gede, Kelurahan Jati Raden Bening - Kec Jati Sampurna.
- Aliran Kali Boulevard/ Kali Galaxi/ Kali BSK dan Kali Pekayon Kecil di bagian hilir masuk ke sistem saluran Kali Rawa Tembaga terus ke Kali Bekasi.

Kali Rawa Tembaga

- Kali Rawa Tembaga pengelolaan dan penanganannya di bawah Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi.
- Kali Rawa Tembaga memiliki hulu sungai di wilayah Kota Bekasi, sedangkan hilirnya merupakan wilayah perbatasan antara Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi, memiliki panjang sungai 4,65 km.
- Slope saluran dasar sungai rata-rata adalah $S = 0,00107$
- Luas tangkapan air yang mengalir dari wilayah Kota Bekasi adalah 413 Ha.
- Wilayah pelayanan Kali Rawa Tembaga (Daerah Tangkapan Air di wilayah Kota Bekasi) meliputi: Kelurahan Jaka Sampurna - Kec. Bekasi Barat, Kelurahan

Kayu Ringin Jaya-Kec. Bekasi Selatan, Kelurahan Marga Jaya - Kec. Bekasi Selatan.

- Aliran Kali Rawa Tembaga di bagian hulu masuk ke sistem saluran ke Kali Bekasi.

Kali Cakung

- Kali Cakung pengelolaan dan penanganannya di bawah Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi.
- Kali Cakung memiliki hulu sungai di wilayah Kota Bekasi, sedangkan hilirnya merupakan wilayah perbatasan antara Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi, memiliki panjang sungai 27,05 km.
- Slope saluran dasar sungai rata-rata adalah $S = 0,00189$
- Luas tangkapan air yang mengalir dari wilayah Kota Bekasi adalah 2.229 Ha.
- Wilayah pelayanan Kali Cakung (Daerah Tangkapan Air di wilayah Kota Bekasi) meliputi: Kelurahan Jati Rahayu - Kec. Pondok Melati, Kelurahan Jati Waringin - Kec. Pondok Gede, Kelurahan Jati Makmur - Kec. Pondok Gede, Kelurahan Jati Cempaka - Kec. Pondok Gede, Kelurahan Jati Raden Bening - Kec. Jati Sampurna.
- Aliran Kali Cakung di bagian hilir masuk ke sistem saluran Banjir Kanal Timur (BKT).

Kali Jati Kramat

- Kali Jati Keramat pengelolaan dan penanganannya di bawah Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi.
- Kali Jati Keramat memiliki hulu sungai di wilayah Kota Bekasi, sedangkan hilirnya merupakan wilayah perbatasan antara Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi, memiliki panjang sungai 9,74 km.
- Slope saluran dasar sungai rata-rata adalah $S = 0,00207$
- Luas tangkapan air yang mengalir dari wilayah Kota Bekasi adalah 1.299 Ha.
- Wilayah pelayanan Kali Jati Keramat (Daerah Tangkapan Air di wilayah Kota Bekasi) meliputi: Kelurahan Jati Rahayu - Kec. Pondok Melati, Kelurahan Jati Waringin - Kec. Pondok Gede, Kelurahan Jati Makmur - Kec. Pondok Gede, Kelurahan Jati Cempaka - Kec. Pondok Gede, Kelurahan Jati Raden Bening - Kec. Jati Sampurna.
- Aliran Kali Jati Keramat di bagian hilir masuk ke sistem saluran Banjir Kanal Timur (BKT).

Kawasan Banjir di Kawasan Permukiman Kota Bekasi

1. Permukiman di Sub DAS Kali Bekasi

- Perumahan Pondok Gede Permai
Berdasarkan data sekunder (Masterplan Drainase Kota Bekasi), banjir yang terjadi pada tahun 2007 mencapai tinggi 60 cm di atas dinding penahan banjir dan mencapai tinggi 300 cm di atas permukaan tanah. Untuk menanggulangi banjir telah diupayakan memperkuat dinding penahan dengan konstruksi beton bertulang. Disamping itu perlu diperhatikan pula penampang basah kali. Tanaman yang terdapat dibantaran kali harus dibuang agar penampang basah cukup dan hambatan terhadap aliran kali dapat dikurangi. Perumahan Pondok Gede Permai dan permukiman

disekitarnya merupakan daerah yang dikelilingi daerah yang agak tinggi sehingga air banjir agak sulit untuk keluar dari daerah ini secara gravitasi.

- **Kemang Ili Graha**
Banjir di daerah ini mencapai ketinggian 2.00 – 300 cm. Untuk mempercepat pengeringan tersedia pompa air. Perlu diperhatikan permukaan tanah tempat menerima air yang jatuh dari pipa keluaran pompa, sebab lubang akibat gerusan air jatuh bisa mengarah ke arah dinding penahan dan bisa membahayakan fondasi dinding penahan. Perlu penguat ditempat air jatuh sebagai peredam energi air jatuh. Peredam tersebut tidak perlu konstruksi yang kaku.
- **Pondok Mitra Lestari**

Letak Pondok Mitra Lestari di sebelah utara atau sebelah hilir Kemang Ili Graha. Tinggi banjir yang terjadi sekitar 250 cm.

2. Permukiman di Sub DAS Cikeas

Akibat banjir dari Kali Cikeas yang terjadi pada Tahun 2007, Perumahan Mandosih di Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih yang berada di sebelah tebing kiri Kali Cikeas mengalami genangan sedalam 1,00 – 1,50 meter. Sebanyak 200 KK mengalami banjir dari Kali Cikeas tersebut.

3. Permukiman di Sub DAS Galaxi/ Boulevard

Banjir menimpa Perumahan Taman Galaxy di Kelurahan Pekayon Jaya dari Kali Bulevar dengan tinggi 60 – 100 cm, genangan yang terjadi seluas 40 Ha dan menimpa sebanyak 1000 KK selama 5- 24 jam. Sampai sekarang belum ada rencana penanggulangannya.

4. Permukiman di Sub DAS Cakung

Pada banjir Tahun 2007, Perumahan Bumi Nasio dan Graha Indah mengalami genangan banjir sedalam 150 – 250 cm selama 2- 3 hari dengan jumlah 1156 KK. Frekwensi genangan terjadi sebanyak 4 kali dalam setahun dengan luas genangan 15 Ha. Ketika terjadi hujan lebat dengan durasi yang cukup lama, maka mengakibatkan terjadinya banjir dan genangan di Kec. Jatiasih (Perum. Nasio, dan Graha Indah), dengan tinggi antara 0.40 m sampai 1,40 m; dan di Kec. Bekasi Barat (Perum. Duta Kranji, dan Harapan Baru II). Banjir dan genangan tersebut disamping karena hujan, juga adanya beberapa bagian Kali Cakung terjadi penyempitan, sehingga tidak dapat menampung debit yang terjadi.

5. Permukiman di Sub DAS Kali Bekasi

- **Permukiman Kayu Ringin Jaya.**

Akibat banjir yang terjadi Kali Kayu Ringin Jaya, maka berdampak pada terjadinya genangan di Perumnas Bekasi I Kelurahan Kayu Ringin Jaya setinggi 60 – 160 cm selama 14 hari. DED untuk Perumnas Bekasi I sudah disiapkan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Air.

- **Permukiman Kali Jatikramat**

Perumahan Duta Indah yang berpenduduk 450 KK mengalami genangan yang berasal dari luapan Kali Jatikramat, selama 3 hari dengan kedalaman

0,50 – 1,00 meter. Akibat hujan deras dengan durasi yang lama pada tanggal 14 Oktober 2010 terjadi luapan air dari Kali Jatikramat yang mengakibatkan genangan di Kec. Pondok Melati (Perumahan Candra Lama dan Baru), Kec. Pondok Gede (Perumahan Jatibening I, Jatibening Baru II, dan Sari Gaferi), dan Kec. Jatiasih (Perumahan Cahaya Kemang Permai, dan Komplek Dosen IKIP).

Permasalahan Banjir/ Genangan di Permukiman Kota Bekasi

Banjir dan genangan yang terjadi di Kota Bekasi disebabkan oleh beberapa faktor yang teridentifikasi yaitu antara lain:

- Adanya hambatan saluran air dari arah selatan ke utara oleh: Jalan tol, Kalimantan dan Jalan kereta api.
- Beberapa jalan penghubung antara kecamatan ada sebagian besar yang belum mempunyai saluran samping, sehingga air hujan yang turun di jalan tersebut mengalir mengikuti permukaan tanah yang menurun dan tidak terkendali
- Drainase yang sudah ada kurang pemeliharaan
- Kondisi topografi yang relatif datar menyebabkan aliran sungai bolak-balik (*revisable*)
- Adanya *buffer zone* yang membatasi aliran air secara alamiah dengan sistem gravitasi tidak berjalan dengan semestinya dan terjadi penumpukan di areal sebelah selatan dari *buffer zone* tersebut. Lokasi *buffer zone* di Kota Bekasi yaitu; Jalan Tol JORR (Pondok Indah-Cakung-Cilincing), Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Nasional Jakarta-Bekasi, Jalan kereta Api dan Saluran Irigasi Kali Malang
- Adanya hambatan saluran air dari arah selatan ke utara; jalan tol, Kalimantan, jalan kereta api dan selokan/gorong-gorong yang ada saat ini kapasitasnya sudah tidak memenuhi lagi
- Faktor alamiah saluran itu sendiri karena terjadinya penggerusan dan terbawanya material saluran oleh aliran air, sehingga terjadi pendangkalan dan sedimentasi yang mengakibatkan terjadinya penyempitan dimensi saluran drainase
- Faktor pola perilaku masyarakat yang membuang sampah ke dalam saluran drainase dan pembangunan fisik yang tidak memperhatikan garis sempadan saluran menyebabkan penyumbatan dan kerusakan saluran drainase
- Adanya pengembangan wilayah kota yang merubah tata guna lahan, mengakibatkan bertambahnya debit air di saluran. Luapan/genangan terjadi karena penambahan debit tersebut tidak disertai dengan perencanaan ulang saluran drainase eksisting.

1.2.5 Air Limbah

Di Kota Bekasi, Hampir sebagian besar sepanjang bantaran sungai utama, anak sungai dan beberapa saluran sekunder lainnya di jumpai daerah permukiman. Kondisi permukiman akan terus berkembang sejalan perkembangan dinamika pertumbuhan penduduk Kota Bekasi sebagai kota metropolitan. Masyarakat yang tinggal pada daerah tersebut sebagian ada yang menggunakan sungai sebagai tempat aktivitas Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) serta tempat membuang sampah. Hal tersebut dapat di jumpai di beberapa wilayah kecamatan yang memiliki

potensi wilayah sempadan sungai diantaranya: Sungai Bekasi (Kecamatan Bantargebang, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Timur dan Bekasi Utara), Sungai Cikeas (Kecamatan Jatiasih dan Jatisampurna), Sungai Cileungsi (Kecamatan Bantargebang dan Rawalumbu).

Permasalahan Air Limbah Kota Bekasi, yaitu :

- Permasalahan utama pengelolaan IPLT adalah Tidak optimalnya Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di Sumur Batu dikarenakan jumlah anggaran yang digunakan untuk oprasional IPLT tidak mencukupi dan keterbatasan armada truk penyedot tinja
- Cakupan kepemilikan jamban sehat keluarga dengan penggunaan tangki septik dari 87,2 % (Pada Tahun 2015)
- Bersatunya aliran limbah dengan saluran drainase
- Sistem pengelolaan air bekas kakus dan tinja (*Black Water*) di Kota Bekasi saat ini masih dilakukan secara on site (setempat), yaitu: Kakus, dan Septik Tank
- Masih adanya masyarakat yang belum memiliki septik tank sehingga limbah di buang ke kolam-kolam tampungan.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat (PHBS)
- Masih banyaknya masyarakat Kota Bekasi yang menggunakan tangki septik untuk mengolah air limbah rumah tangga, namun sebagian besar fasilitas tangki septiknya masih belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan
- Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga / permukiman dan perilaku hidup bersih dan sehat
- Kurang memadainya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan air limbah rumah tinggal/ permukiman

Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pelayanan air limbah di Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.9
Tingkat Pelayanan Air Limbah di Kota Bekasi

Aspek	Saat ini
Kependudukan	2.700.000
Cakupan yang terlayani	27.000 jiwa 1% → sumber dari UPTD PALD
	1.080.000 jiwa 40% (septic tank SNI) → sumber dari EHRA
GAP	- 1.830.000 jiwa - 216.000 KK - 420.000 jiwa (target) → 84.000 KK

Sumber : *Pembangunan Sektor Air Minum dan Sanitasi Kota Bekasi Menuju Target Akses Universal 2019 dan SDGs 2030*

Sistem sanitasi lingkungan rumah tangga di Kota Bekasi sudah sangat baik jika dibandingkan dengan kota disekitarnya. Dari tahun 2013 hingga 2016 jumlah rumah tangga yang memiliki toilet sendiri mencapai kisaran 95%. Nilai ini seperti yang kondisi di kota Depok, dan lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, dan Kota Tangerang.

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

1.2.6 Telekomunikasi

penggunaan telepon seluler yang pesat maka semakin banyak pula stasiun pemancar telepon seluler yang biasa disebut Base Transceiver Station (BTS) yang bermunculan di Kawasan perkotaan, sebagian besar penduduk di Kota Bekasi menggunakan telepon seluler untuk komunikasi dan mobilitasnya meski sudah memiliki sambungan telepon.

1.2.7 Kondisi Pemadam Kebakaran

a. Jumlah Kebakaran

Kota Bekasi terletak diantara perbatasan Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta menjadikan kepadatan penduduk Kota Bekasi relatif tinggi terutama akibat migrasi. Kondisi ini memaksa Kota Bekasi menjadi salah satu penyeimbang ibukota Negara yang mampu mendukung kebutuhan penduduknya sehingga kota Bekasi diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan Kota Bekasi dari bahaya kebakaran. Jumlah kejadian kebakaran di Kota Bekasi pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 yaitu sebesar 169 kejadian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.10
Histori Kebakaran Di Kota Bekasi Berdasarkan Kelurahan

No.	Kecamatan	Kelurahan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah
1	Bantar Gebang	Bantargebang	0	3	0	0	2	2	1	8
		Ciketing Udik	0	1	0	0	1	1	1	4
		Cikiwul	1	1	3	1	0	0	0	6
		Sumur Batu	0	1	0	0	2	3	0	6
2	Bekasi Barat	Bintara	1	2	5	1	2	2	3	16
		Bintara Jaya	0	3	2	2	0	0	1	8
		Jakasampurna	4	10	6	8	3	4	2	37
		Kota Baru	0	5	1	1	0	0	2	9
		Kranji	2	3	5	0	3	5	4	22
3	Bekasi Selatan	Jakasetia	5	4	4	3	3	3	3	25
		Jakamulya	0	5	1	0	3	5	0	14
		Kayuringin Jaya	9	10	8	7	6	7	2	49
		Margajaya	3	2	0	1	1	1	1	9
		Pekayon Jaya	4	8	10	4	5	6	5	42
4	Bekasi Timur	Aren Jaya	1	4	2	2	4	3	3	19
		Bekasi Jaya	2	12	4	0	5	5	2	30
		Duren Jaya	1	4	3	5	6	7	3	29
		Margahayu	2	7	6	2	6	5	1	29
5	Bekasi Utara	Harapan Baru	0	1	1	0	2	2		6
		Harapan Jaya	3	7	2	4	2	2	1	21
		Kali Abang	2	1	3	0	5	5	1	17
		Marga Mulya	2	3	1	1	5	7	0	19
		Perwira	1	1	1	0	2	2		7
		Teluk Pucung	2	1	0	2	2	2	3	12
6	Jati Asih	JatiAsih	1	0	1	3	4	5	1	15
		Jatikramat	0	1	0	2	4	4	0	11
		Jatiluhur	1	0	1	0	3	3	4	12
		Jatimekar	0	1	0	0	0	0	0	1
		Jatirasa	0	3	2	2	1	3	0	11
		Jatisari	0	0	1	0	3	3	1	8
7	Jati Sampurna	Jatikarya	0	1	0	0	1	1	0	3
		Jatiraden	0	1	0	0	0	0	2	3

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No.	Kecamatan	Kelurahan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah
		Jatirangga	0	0	0	0	2	2	0	4
		Jatiranggon	0	1	0	0	3	4	1	9
		Jatisampurna	0	2	0	0	1	1	1	5
8	Medan Satria	Harapan Mulya	1	0	0	0	2	1	1	5
		Kali Baru	3	1	0	2	5	5	2	18
		Medan Satria	1	2	2	3	3	3	1	15
		Pejuang	2	5	4	3	3	4	3	24
9	Mustika Jaya	Cimuning	0	2	2	1	2	3	0	10
		Mustikajaya	3	2	3	2	5	5	4	24
		Mustikasari	1	0	0	1	5	5	0	12
		Pedurenan	0	0	0	0	1	1	0	2
10	Pondok Gede	Jatibening	3	2	6	7	4	6	1	29
		Jatibening Baru	0	2	6	0	1	1	0	10
		Jaticempaka	3	0	2	3	1	2	1	12
		Jatimakmur	2	2	6	3	1	2	0	16
		Jatiwaringin	4	1	1	3	2	1	1	13
11	Pondok Melati	Jatimelati	0	0	2	0	0	0	0	2
		Jatimurni	0	2	2	0	0	0	1	5
		Jatirahayu	0	2	3	2	4	4	2	17
		Jatiwarna	0	1	1	0	0	1	0	3
12	Rawa Lumbu	Bojong Menteng	2	5	4	5	1	1	3	21
		Bojong Rawa	4	0	2	4	3	3	0	16
		Pengasinan	4	3	2	2	1	1	0	13
		Sepanjang Jaya	0	5	3	0	0	0	0	8

Sumber: Masterplan Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2016

Berdasarkan data profil Kota Bekasi jumlah kebakaran sepanjang tahun 2010-2016, kelurahan yang paling sering terjadi kebakaran yaitu Kelurahan Kayuringin Jaya di Kecamatan Bekasi Selatan yaitu sebanyak 49 kejadian. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah kejadian kebakaran di Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.11
Jumlah Kejadian Kebakaran Di Kota Bekasi Tahun 2014 Dirinci Per Bulan

No.	Bulan	Jumlah kejadian	Jenis kebakaran						
			Rumah tinggal	Pabrik/gudang	Gedung/sekolah	Swalayan/toko/warung	Kendaraan/mobil	Sampah/ alang2	Lain- lain
1	Januari	12	8	0	0	1	2	0	1
2	Februari	10	7	0	0	2	0	0	1
3	Maret	7	4	1	0	1	0	0	1
4	April	9	1	3	3	0	1	0	1
5	Mei	2	1	1	0	0	0	0	0
6	Juni	12	5	1	0	1	1	0	4
7	Juli	16	7	2	1	0	0	1	5
8	Agustus	23	12	1	0	0	0	5	5
9	September	24	3	1	0	1	0	12	7
10	Oktober	37	6	2	1	1	1	0	9
11	November	8	5	0	0	0	0	17	1
12	Desember	9	3	1	0	4	1	2	0
Jumlah		169	62	13	5	11	6	37	35

Sumber: Profil Kota Bekasi, 2015

b. Penyebab Kebakaran

Penyebab kebakaran di Kota Bekasi beragam pada kawasan perkotaan. Kebakaran umumnya terjadi pada rumah tinggal, pabrik/gudang, gedung/sekolah, swalayan/toko/warung, kendaraan, sampah/alang-alang, dll. Penyebab kebakaran penting diketahui untuk merumuskan strategi pencegahan kebakaran. Adapun penyebab kebakaran yang terjadi di kota Bekasi diantaranya diakibatkan oleh listrik, kompor/lilin, sampah/limbah B3, dll. Untuk lebih jelasnya mengenai penyebab kebakaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.12
Faktor Penyebab Kebakaran Di Kota Bekasi

No.	Bulan	Jumlah Kejadian	Faktor Penyebab			
			Listrik	Kompor/Lilin	Sampah	Lain - Lain
1	Januari					
2	Februari	10	7	0	1	2
3	Maret	7	3	7	0	2
4	April	9	3	3	0	3
5	Mei	2	0	0	0	0
6	Juni	12	7	2	0	3
7	Juli	16	10	0	0	3
8	Agustus	23	12	4	1	6
9	September	24	6	0	7	11
10	Oktober	37	9	4	11	15
11	November	8	4	1	2	1
12	Desember	9	5	1	1	2
Jumlah		169	77	15	23	49

Sumber: Masterplan Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2016

Lokasi rawan kebakaran di Kota Bekasi umumnya merupakan daerah permukiman penduduk dengan kepadatan tinggi dan perkampungan kumuh. Berdasarkan data tahun 2008 daerah rawan kebakaran di Kota Bekasi mencapai 47 RW, 12 Kelurahan, 3 Kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.13
Jumlah Kawasan Rawan Kebakaran Di Kota Bekasi

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Jati Sampurna	<ul style="list-style-type: none"> • Jati Sampurna 6 RW • Jati Karya 3 RW • Jati Ranggon 3 RW • Jati Rangga 5 RW
2	Pondok Gede	<ul style="list-style-type: none"> • Jati Waringin 5 RW • Jati Bening 4 RW • Jati Makmur 4 RW • Jati Bening Baru 2 RW
3	Bantar Gebang	<ul style="list-style-type: none"> • Bantar Gebang 5 RW • Cikiwul 4 RW • Ciketing Udik 4 RW • Sumur Batu 2 RW
4	Mustika Jaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pedurenan • Cimuning • Mustika Jaya • Mustika Sari

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

No	Kecamatan	Kelurahan
5	Rawa Lumbu	<ul style="list-style-type: none">• Bojong Rawa Lumbu• Pengasinan• Sepanjang Jaya• Bojong Menteng
6	Pondok Melati	<ul style="list-style-type: none">• Jati Rahayu• Jati Warna• Jati Melati• Jati Murni

Sumber: Masterplan Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2016

c. Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

• Aksesibilitas dan Jalur Pemadam Kebakaran

Aksesibilitas artinya kemudahan pencapaian. Kelas jalan di Kota Bekasi terdiri atas jalan kelas arteri, kolektor, lokal dan lingkungan, dengan lebar ruas jalan dan kondisi perkerasan yang cukup baik. Kesulitan aksesibilitas terjadi dikarenakan padatnya lalu lintas di Kota Bekasi mengakibatkan penanganan proteksi kebakaran membutuhkan waktu lama untuk mencapai lokasi. Selain itu lokasi kantor pemadam kebakaran yang berada di lokasi perumahan dan dengan lalu lintas pada menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi lamanya waktu untuk mencapai lokasi kejadian kebakaran.

• Aksesibilitas Menuju Sumber Air Pasokan Air

Aksesibilitas menuju sumber air cukup memadai, saat ini sumber air yang digunakan ialah sumber bendungan dan kali diantaranya Kali Bekasi dan Kali Malang dengan akses jalan yang cukup baik untuk mencapai sumber air. Namun yang perlu diperhatikan ialah keberadaan hidran yang masih sangat kurang terutama untuk kawasan perdagangan perumahan padat dimana efektivitas dan efisiensi pemadaman akan sangat bergantung pada mudah tidaknya mendapatkan sumber air.

• Aksesibilitas Menuju Lokasi Kebakaran

Sesuai Keputusan Menteri PU no 11/KPTS/2000 bahwa Jalan lingkungan dalam kompleks bangunan perlu disediakan dengan konstruksi perkerasan yang dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran. Agar jalan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran, maka jalan lingkungan harus memiliki lebar jalan minimum 3,5 – 4 meter, yang pada saat terjadi kebakaran harus bebas dari segala hambatan apapun yang dapat mempersulit masuk keluarnya mobil pemadam kebakaran.

Untuk lingkungan yang tidak dapat diakses oleh mobil pemadam kebakaran, penyaluran air perlu dilakukan dengan membuat hidran kosong mulai dari jalan lingkungan yang dapat diakses kendaraan pemadam (sebagai inlet) sampai ke daerah yang bisa menjadi pusat areal operasional pemadaman kebakaran (outlet) yang dapat melayani kawasan rawan kebakaran, jika tidak bisa menyediakan hidran kosong perlu juga kiranya membuat sumur atau tandon air yang memadai.

- **Aksesibilitas di Daerah Menuju Perumahan**

Sarana aksesibilitas untuk jalur pemadam kebakaran di daerah perumahan terbagi menjadi dua macam yaitu akses di daerah perumahan teratur dan di daerah perumahan tidak teratur. Perumahan teratur pada umumnya dibangun oleh developer, memiliki lebar jalan antara 3 – 4 meter dengan kondisi jalan aspal sehingga mobil pemadam kebakaran tidak mengalami kesulitan untuk mencapai lokasi kebakaran di daerah perumahan yang teratur. Berbeda dengan perumahan yang tidak teratur pada umumnya relatif sempit (<2 meter) dengan kondisi jalan tanah, sehingga mobil pemadam kebakaran kesulitan menuju ke lokasi kebakaran. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya petugas pemadam kebakaran memanfaatkan slang-slang air yang disambung sehingga dapat menjangkau lokasinya Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Sebagian besar perumahan yang terdapat di Kota Bekasi berada pada topografi datar sehingga cukup mudah mobil pemadam kebakaran menjangkau perumahan. Umumnya jalan di kawasan perumahan di Kota Bekasi memiliki lebar minimal 3-5 meter. Terdapat beberapa permukiman yang memiliki lebar kurang dari 3 meter sehingga sulit untuk dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran.

d. Sarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran

- **Jumlah Hidrant Kebakaran di Kota Bekasi**

Sistem proteksi kebakaran di Kota Bekasi dilengkapi dengan keberadaan hidran kota. Hidran yang dimiliki Kota Bekasi sebanyak 64 buah dan tersebar di seluruh Kota, namun sebagian besar hidran tidak berfungsi dengan baik.

- **Mobil Pemadam Kebakaran**

Sarana kebakaran di Kota Bekasi dilengkapi dengan mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam di Bekasi terdiri dari:

- 10 buah mobil beban jenis light truck dilengkapi dengan pompa jenis PTO;
- 3 buah mobil operasional pemadam kebakaran;
- 1 buah mobil beban jenis truck dilengkapi dengan pompa jenis portable;
- 1 buah mobil penumpang jenis minibus

- **Personil**

Personil pemadam kebakaran merupakan personil terampil yang telah dilatih untuk menanggulangi dan memadamkan kebakaran. Personil pemadam kebakaran di Kota Bekasi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 64 orang dan Tenaga Kerja Kontrak sebanyak 31 orang.

- **Sumber Air Eksisting**

Sumber air eksisting saat ini yang digunakan Kantor Pemadam Kebakaran yaitu Kali Malang, Sungai Bekasi dan Bendungan

- **Pos Pemadam Kebakaran**

Kota Bekasi telah memiliki sebanyak 1 buah pos komando dan pos pemadam kebakaran sebanyak 3 buah terdiri dari: Pos Unit Jatisampurna, Pos Unit Mustika Jaya dan Pos Unit Walikota.

1.3 PENATAAN RUANG

Kota Bekasi telah memiliki dokumen RTRW Kota Bekasi dan RDTR Kota Bekasi yang telah berkuat hukum (Perda). Dengan kedua dokumen rencana tersebut maka pelayanan umum terkait penataan ruang sudah dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bekasi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

a. Indikator Kinerja Penataan Ruang

Stock guna lahan merupakan selisih antara luas alokasi ruang yang direncanakan dalam RTRW dan RDTR Kota dengan tingkat pemanfaatannya saat ini (lahan terpakai). Perubahan stock mencerminkan tingkat pemanfaatan atau transformasi dari alokasi kepada pemanfaatan atau transformasi dari rencana kepada penggunaan. Hasil analisis terhadap data dan informasi terkait diperoleh gambaran perkembangan stock guna lahan di Kota Bekasi seperti terlihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.14
Perubahan stock lahan di Kota Bekasi 2009- 2014

No	Kelas Lahan	Pola Ruang (ha)	Land Use		Stock		Perubahan Stock
			2009	2014	2009	2014	
1	Industri	658.16	567.43	942.64	90.73	-284.48	-193.75
2	Kawasan Lindung	1875.32	109.32	225.14	1766.00	1650.18	115.82
3	Lahan Infrastruktur	357.2547	10.6	142.27	346.65	214.98	131.67
4	Perdagangan dan Jasa	7167.16	166.17	273.69	7000.9	6893.47	107.52
5	Permukiman	11551.23	10708.76	11211.31	842.48	339.93	502.55
6	Total	21609.13	21609.13	21609.13			

Sumber : 1. RTRW Kota Bekasi, 2. Citra Ikonos 2009 dan 2014.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa perubahan stock terbesar terjadi pada lahan permukiman yang mencapai pengurangan stock hingga mencapai 502 ha pada periode 2009-2014.

Perubahan terbesar kedua adalah stock lahan industri. Alokasi lahan industri berdasarkan RTRW Kota Bekasi hingga tahun 2014 telah terpakai seluruhnya, bahkan perkembangan lahan industri di wilayah ini telah melampaui alokasi yang ditetapkan berdasarkan rencana.

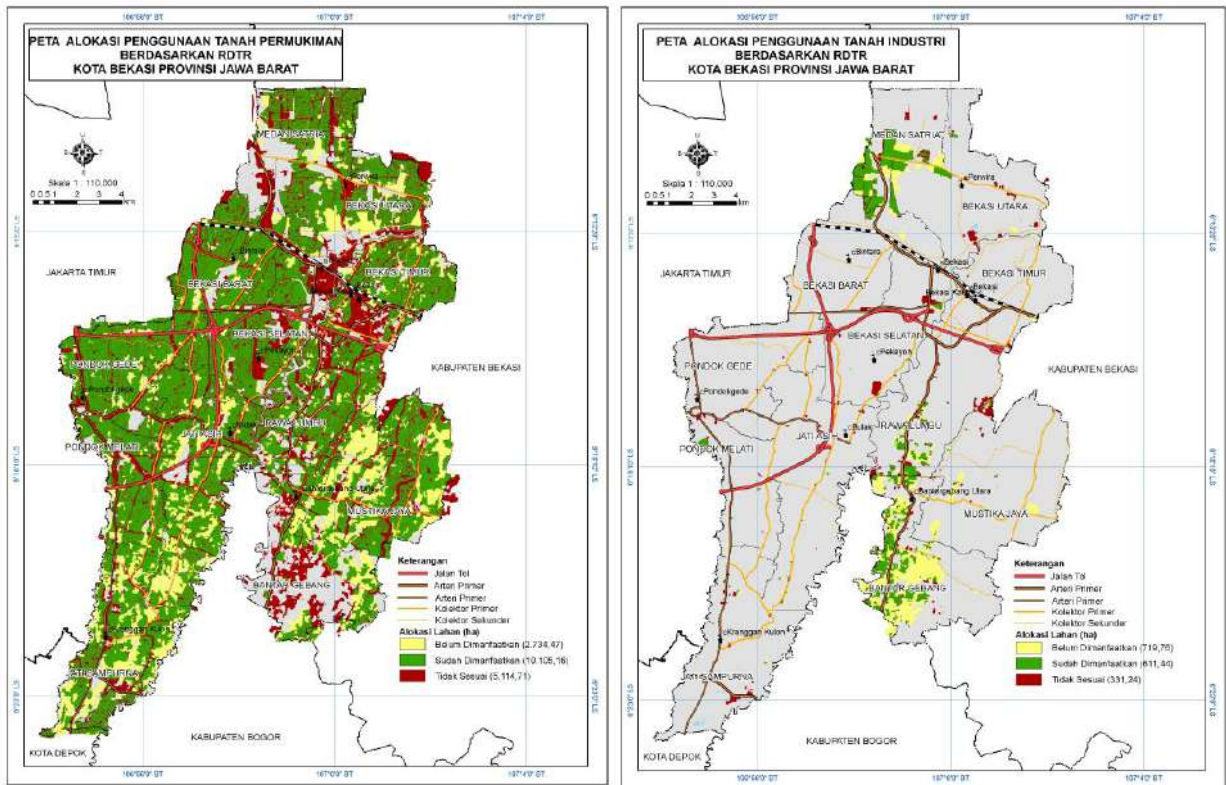
Sementara stock lahan yang relatif masih besar adalah stock lahan perdagangan dan jasa. Pemanfaatan alokasi lahan perdagangan jasa berdasarkan rencana baru mencapai 3,8% hingga tahun 2014. Sedangkan tingkat pemanfaatan lahan permukiman hingga tahun 2014 telah mencapai 97% dari alokasi yang direncanakan dalam RTRW Kota Bekasi.

b. Penyimpangan Pemanfaatan Ruang

Hasil evaluasi terkait penyimpangan pemanfaatan ruang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 11% penyimpangan pemanfaatan ruang yang ada di Kota Bekasi (LKPJ, 2017).

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi



Sumber : Diolah dari RDTR Kota dan Data Citra Ikonos. 2014

Gambar 1.4
Kesesuaian Rencana Alokasi Ruang dengan Pemanfaatannya

1.4 SOSIAL

Dinas Sosial Kota Bekasi sudah mengajukan rencana pembangunan gedung rehabilitasi terpadu milik Pemkot Bekasi, dalam APBD Kota Bekasi tahun 2018. Keberadaan gedung rehabilitasi terpadu dipandang mendesak, lantaran panti rehabilitasi yang ada sudah penuh. Selain itu, Dinsos Kota Bekasi tidak hanya melayani orang sakit semata, namun juga orang terlantar hingga orang dengan gangguan kejiwaan. "Walaupun memang secara teknis orang sakit adalah domainnya Dinas Kesehatan, namun kita terpadu antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dalam menangani orang-orang yang sakit dan terlantar. Sebelum adanya gedung rehabilitasi terpadu, Dinsos Kota Bekasi menampung orang yang terlantar di rumah singgah, orang sakit di RSUD, serta mereka yang terjaring rasia seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan PSK ditampung di PSBK Pangudiluhur atau Pasar Rebo (DKI Jakarta).

Dari delapan indikator RPJMD urusan sosial, hanya dua indikator yang belum mencapai target yaitu presentase Persentase PMKS yang ditangani oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat dan Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai urusan sosial di Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.15
Indikator Kinerja Layanan Sosial di Kota Bekasi

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Tahun 2019 (target)	Tahun 2020 (target)	Tahun 2021 (target)	Tahun 2022 (target)	Tahun 2023 (target)
Persentase PMKS yang ditangani oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat	null	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat	133	187	260	280	300	320
Persentase penyandang disabilitas telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase anak telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase lanjut usia telantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah Dokumen Data dan Informasi PMKS	1	1	2	1	2	1
Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional	1	1	1	1	1	1

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

1.5 TENAGA KERJA

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mencatat di tahun 2017 jumlah perusahaan sebanyak 1.503 meningkat dari jumlah tahun 2013 yang 1.110 perusahaan. Dari jumlah tersebut terdapat sekitar 8-10% perusahaan yang mengalami sengketa pengusaha-pekerja (tahun 2013-2017 berkisar 79-161 perusahaan), dan hanya sebagian yang mencatatkan kasus tersebut (16-96 perusahaan). Berdasarkan catatan kasus tersebut, pemerintah Kota Bekasi dapat menyelesaikan semuanya (100%) dengan Perjanjian Bersama (PB).

Pemerintah Kota Bekasi juga secara rutin memeriksa perusahaan yang terdaftar, namun dari tahun ke tahun kemampuan memeriksa makin menurun, kalau tahun 2013 mampu memeriksa 78,29% perusahaan yang terdaftar (869 dari 1.110 perusahaan) di tahun-tahun berikutnya hanya bisa diperiksa 29,91-48,03%. Demikian juga pengujian peralatan di perusahaan, prestasi tertinggi dicapai tahun 2015 yang mampu menguji 83,82% peralatan yang terdaftar (922 dari 1100 perusahaan), sedangkan di tahun yang lain capaiannya hanya di kisaran 33-36%.

Hal-hal yang cukup menggembirakan adalah hampir semua perusahaan menerapkan sistem keselamatan dan perlindungan kerja (K3), tertinggi pada tahun 2015 yang mencapai 99,1% (1100 dari 1110 perusahaan), sedikit menurun di tahun 2016 (92,3%) dan cukup di rendah di tahun 2013-2014 yang hanya 69% dan 44%. Demikian juga berkaitan dengan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), hampir semua pekerja/buruh sudah terdaftar sebagai peserta Jamsostek, tahun 2015-2017 tercatat 91% pekerja/buruh yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek (145.268 dari 159.230 pekerja/buruh), meningkat tajam dibandingkan tahun 2013-2014 yang hanya 43 dan 60%.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mencatat jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 39.966 orang tahun 2013 dan cenderung menurun sampai 25.020 orang di tahun 2017. Dari jumlah tersebut yang berhasil ditempatkan sebanyak 17.711 orang (44,32%) dan 10.697 orang (42,75%). Presentasi penempatan pencari kerja

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

tertinggi pada tahun 2015 sebesar 81,58%. Tingkat pendidikan pencari kerja tersebut, 24,11% di antaranya S1/S2/S3 (tahun 2013) dan menjadi hanya 9,33% di tahun 2017.

Untuk meningkatkan ketrampilan pencari kerja, beberapa program pelatihan diberikan agar para pencari kerja siap masuk pasar kerja, ada pelatihan kewirausahaan, pelatihan berbasis masyarakat, dan pelatihan berbasis kompetensi. Dari tahun ke tahun program ini terus ditingkatkan cakupannya. Pada pelatihan kewirausahaan cakupannya meningkat dari 44,20% tahun 2013 menjadi 100% di tahun 2017. Demikian juga untuk pelatihan berbasis masyarakat dan berbasis kompetensi yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu 68,38% dan 18,87% (tahun 2013) menjadi 80% dan 9,15% di tahun 2017.

Berdasarkan LAKIP Dinas tenaga kerja terdapat beberapa indikator yang berkaitan dengan urusan tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.16
Beberapa Indikator Urusan Tenaga Kerja

Indikator	Target Kinerja				
	2019	2020	2021	2022	2023
Presentase Penurunan angka pengangguran terbuka	9.07	8.96	8.87	8,79	8,72
Persentase lapangan kerja baru yang produktif	100	100	100	100	100
Persentase tenaga kerja yang berkompoten yang ditempatkan	60,83	61,15	61,22	61,78	62,09
Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja.	100	100	100	100	100
Indeks kepuasan masyarakat (IKM).	83,40	83,40	83.40	83.40	83.40
Nilai Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.	70.79	70.79	70.79	70.79	70.79
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2019

Dari enam indikator RPJMD urusan sosial, tiga (3) indikator yang sudah mencapai target. Untuk lebih jelasnya mengenai urusan tenaga kerja di Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1.17
Beberapa Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Tahun 2019 (target)	Tahun 2020 (target)	Tahun 2021 (target)	Tahun 2022 (target)	Tahun 2023 (target)
Cakupan Ketersediaan dokumen ketenakerjaan				10,00	15,00	20,00
Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase peningkatan keterampilan bagi pencari kerja				20,00	20,00	20,00
Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan	60.83	60.83	61,15	61.22	61,78	62,09
Persentase Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) berizin						
Persentase penanganan sengketa pengusaha dengan pekerja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Bekasi 2018-2023

1.6 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Peran perempuan dalam pemerintahan, swasta, politik terus didorong dengan memberikan peluang yang sama (laki-laki dan perempuan) dalam mengaktualisasi diri di semua lini kehidupan. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah di sekitar 49 ribu orang, sedangkan yang bekerja di lembaga swasta sekitar 160 ribu orang. Di bidang politik jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan sebesar 16% (8 orang dari 50 orang)

Tabel 1.18
Beberapa Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indicator	Target Kinerja				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
Partisipasi AngkatanN Kerja Perempuan	49 %	49 %	49 %	49 %	49 %
Nilai AKIP	BB	BB	BB	BB	BB

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, 2019

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi faktor yang penting dalam rangka membentuk keluarga harmonis, semakin kecil kejadian KDRT maka akan semakin memperkuat keluarga. Kasus KDRT di Kota Bekasi tahun 2013-2017 tercatat di sekitar 205-231 kasus KDRT dari sekitar 533 ribu rumah tangga.

Cakupan layanan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dari tahun 2013 – 2017 sebesar 100%. Pada tahun 2013 ada sebanyak 215 kasus kekerasan perempuan dan anak dan semua dapat ditangani dengan baik, demikian juga tahun 2017 terdapat 207 kasus dan semua dapat diselesaikan 100%.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas pada tahun 2013-2017 sebesar 100%, tercatat tahun 2013 sebanyak 229 kasus yang meningkat tahun 2017 menjadi 270 kasus, dan semua dapat dilayani kesehatannya.

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Baru tercatat di tahun 2016 sebesar 15 kasus dan meningkat tahun 2017 menjadi 22 kasus, dan semua dapat diselesaikan semua dengan baik (100%).

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum meningkat dari tahun ke tahun, dimana tahun 2013 tercatat 229 perempuan/anak korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum, meningkat di tahun 2017 menjadi 270 perempuan/anak yang mendapat bantuan hukum. Dan dari tahun ke tahun, cakupan layanan hukum untuk perempuan/anak korban kekerasan mencapai 100%.

Perempuan dan anak korban kekerasan selanjutnya dikembalikan kepada keluarga/keluarga lain/masyarakat atau disebut reintegrasi sosial. Kasus seperti ini tercatat di tahun 2014 sebanyak 8 kasus dan meningkat menjadi 23 kasus di tahun 2017. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan sepanjang tahun 2014-2017 mencapai angka 100%.

prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 di Kota Bekasi sebesar 17,24% untuk anak laki-laki dan 27,37% untuk anak perempuan.

Untuk proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir sebanyak 37 kasus.

1.7 PANGAN

a. Penguatan Cadangan Pangan

Pangan itu sendiri adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Khusus untuk beras, Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi menyiapkan cadangan beras seberat 11,5 ton pada tahun 2018. Artinya, Kota Bekasi melakukan penguatan cadangan pangan berupa beras sebesar 11,5% pada tahun 2018.

b. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Di Kota Bekasi, pada awal tahun 2018 ini diduga ada dua wilayah yang terancam rawan pangan bersifat sementara, yakni Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Bekasi Barat. Dugaan ini diindikasikan oleh menipisnya stok beras dan – pada gilirannya mengakibatkan – meningkatnya harga beras di pasar setempat.

Dinas Ketahanan Pangan mencatat bahwa Ketersediaan Pangan Utama tahun 2017 sebesar 82,17 Kg/jiwa, angka ini diperoleh dari rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama sebesar 236.101.634 Kg dengan jumlah penduduk 2.873.484 jiwa.

Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Tahun 2017 tercatat 26 sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di Kota Bekasi dari 48 total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di Kota Bekasi (54,17%).

Hanya satu indikator yang tidak tersedia data, yaitu Ketersediaan energy dan protein perkapita.

1.8 PERTANAHAN

Ada tiga indikator untuk urusan pertanahan, yaitu: persentase luas lahan yang bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara, dan penyelesaian ijin lokasi. Belum adanya data terkait indikator urusan pertanahan di atas, maka tidak dapat didiskripsikan di sini.

1.9 LINGKUNGAN HIDUP

Kewenangan akan urusan Lingkungan Hidup di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Lampiran K, soal Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. Ada 11 poin sub

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

bidang Urusan Lingkungan Hidup yang dapat dikelola atau diberikan kewenangan dan menjadi tanggung jawab Kabupaten/Kota adalah:

1. Perencanaan Lingkungan Hidup. Kabupaten/Kota membuat Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota;
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kabupaten/Kota membuat KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) Kabupaten/Kota;
3. Keanekaragaman Hayati (Kehati). Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan Kehati di Kabupaten/Kota;
4. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH. Kabupaten/Kota (a) menetapkan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten/kota, (b) peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten/Kota;
5. Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota;
6. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. Pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat tingkat Kabupaten/Kota;
7. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Pengaduan Lingkungan Hidup. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: (a) usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (b) usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah Kabupaten/Kota; dan
9. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). Kabupaten/Kota menyediakan (a) penyimpanan sementara LB3, dan (b) pengumpulan LB3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
10. Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Kabupaten/Kota melakukan Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kabupaten/Kota;
11. Persampahan, yang meliputi: (a) pengelolaan sampah Kabupaten/Kota, (b) penerbitan izin pen-daur-ulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, (c) pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta

Kinerja urusan Lingkungan Hidup Kota Bekasi dapat disajikan dalam tabel berikut ini. Sesuai dengan **Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No:SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 Tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota**, Kota

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Bekasi telah menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) pada tahun 2017 dan saat ini telah masuk dalam proses legislasi di DPRD untuk di Perda kan tahun 2018 ini.

Dengan demikian dokumen RPPLH belum terintegrasi secara formal ke dalam rencana pembangunan Kota Bekasi, namun informal substansi lingkungan hidup telah mewarnai rencana pembangunan Kota Bekasi. Bersamaan dengan rencana penerbitan Perda RPPLH, juga diusulkan Raperda Keanekaragaman Hayati (Kehati).

Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang lain adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yaitu rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Payung hukum pelaksanaan KLHS adalah UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Permen LHK Nomor P.69/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata Cara Penyelenggaraan KLHS. Disamping itu juga diterbitkan Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD.

Kota Bekasi telah menyusun KLHS untuk RPJMD periode 2013-2018. Tahun ini kembali disusun KLHS untuk RPJMD 2018-2023 sesuai dengan Permendagri No. 7/2018. Dan sedang melakukan KLHS Perubahan RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2013.

Persentase pengelolaan timbunan sampah di Kota Bekasi pada tahun 2019 sebesar 94 %, persentase penganolaan timbulan smapah yang di tangani sebesar 94 %, jumlah sampah yang terkurangi melalui 3 R sebesar 20%. Untuk lebih jelasnya mengenai indikaoatr urusan lingkungan hidup Kota Bekasi dapat di lihat pada tabel di bawah ini,

Tabel 1.19
Beberapa Indikator Urusan Lingkungan Hidup

Indicator	Target Kinerja				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pengelolaan Timbulan sampah	94	92	89	89	88
Persentase Pengelolaan Timbulan sampah yang ditangan	94	92	89	89	88
Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	20	27	28	29	30
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	49	52	54	56	59
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH =IKA+IKU+IKTL	49	52	54	56	59

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019

1. Persampahan

Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan peningkatan kinerja pelayanan setiap tahunnya yaitu dengan melakukan penambahan titik penyapuan jalan dan penambahan TPS untuk titik kumpul pelayanan angkutan sampah, penambahan peralatan dan perlengkapan kebersihan,

penambahan armada kendaraan operasional angkutan sampah, perawatan kendaraan operasional dan penambahan alat berat di TPA. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu :

- a. Rusaknya jembatan timbang di TPA akibat sambaran petir sehingga pada bulan Maret-Agustus 2019 (6 bulan) jembatan timbang tidak dapat beroperasi yang mengakibatkan pencatatan tonase dan ritase dilakukan dengan melalui estimasi kapasitas truk angkut dan jumlah truk yang masuk ke TPA;
- b. Dampak rusaknya jembatan timbang mengakibatkan pula, kendaraan angkutan sampah yang masuk ke TPA tidak semua melalui pintu penimbangan melainkan melalui pintu lainnya yaitu pintu samping penimbangan dan pintu alternative (pintu belakang) yang melewati TPST Bantargebang DKI Jakarta. Hal ini mengakibatkan kurangnya pencatatan yang dilakukan pengawas di TPA atas beban angkut sampah kendaraan operasional;
- c. Kondisi kendaraan operasional kendaraan sampah yang masih dalam perawatan dan tidak segera dilakukan perbaikan, ditambah dengan kendaraan operasional yang rusak, sehingga kinerja kendaraan angkutan sampah banyak tidak maksimal;
- d. Kapasitas zona buang TPA Sumur Batu sudah overload, sehingga buangan sampah yang menumpuk beresiko longsor;
- e. Akses jalan di dalam TPA menuju zona buang kondisinya rusak parah sehingga memperlambat laju kendaraan angkutan untuk menghindari kecelakaan terguling;
- f. Belum melakukan penutupan cover soil harian di zona aktif dan cover soil akhir di zona pasif di TPA Sumur Batu;
- g. Untuk cakupan area pelayanan, tidak dapat dilakukan maksimal karena ada pengurangan tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) akibat perubahan alih fungsi lahan TPSS serta keberatan dari masyarakat sekitar yang wilayahnya berdekatan dengan TPSS;
- h. Kegiatan penanganan sampah belum didukung oleh ketersediaan anggaran yang cukup, karena memang membutuhkan anggaran yang sangat besar. Keterbatasan anggaran inilah yang menjadi kendala terbesar dalam mencapai target kinerja pengelolaan sampah.

Kondisi zona pembuangan tempat pembuangan akhir (TPA) Kota Bekasi saat ini sudah overload, sehingga perlu segera mungkin dilakukan rehabilitasi dan mencari lahan baru guna perluasan lahan TPA yang ada saat ini. Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan rehabilitasi zona pembuangan, mengurangi sampah dari hulu sehingga sampah yang terangkut ke TPA bisa berkurang dan memanfaatkan teknologi untuk mengolah sampah menjadi energi (bahan bakar) di TPA.

Namun, sampai saat ini pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah di TPA belum dapat diaplikasikan. Tahun 2017-2018, DLH pernah melakukan kerjasama dengan perusahaan incenerator kapasitas besar, tetapi output yang

dihasilkan tidak maksimal sehingga proses kerjasamanya tidak dapat dilanjutkan.

Salah satu pelayanan bidang lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi adalah kegiatan penyapuan jalan dan layanan angkutan sampah yang dilaksanakan oleh UPTD Kebersihan di 12 wilayah kecamatan, 1 jalur protokol dan 1 jalur kontainer. Penyapuan jalan yang dilakukan oleh petugas kebersihan dilakukan setiap hari sesuai jadwal dan titik penyapuan yang telah ditentukan oleh masing-masing UPTD.

Untuk layanan angkut di wilayah kecamatan mayoritas titik angkut adalah area pemukiman warga dan tempat pembuangan sampah sementara sedangkan layanan titik angkut jalur protokol adalah titik angkut di area perkantoran, perniagaan, jalur raya utama dan jalur kontainer melayani pengangkutan sampah hanya yang memiliki landasan kontainer. Untuk tahun 2019, jumlah titik angkut mengalami penurunan dari 1195 titik di tahun 2018 menjadi 1133 titik.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, penduduk Kota Bekasi Tahun 2019 berjumlah 2.448.730 jiwa. Jumlah penduduk dijadikan dasar penghitungan atas jumlah potensi timbulan sampah yang dihasilkan. Berdasarkan Jakstrada, perhitungan potensi timbulan sampah adalah jumlah penduduk di kali faktor estimasi timbulan sampah sebesar 0,70 kg perkapita. Dari perhitung tersebut maka jumlah timbulan sampah Kota Bekasi adalah 2.448.730 jiwa x 0,70 kg x 365 hari yaitu 625.650.515 kg sehingga diperkirakan sampah yang dihasilkan Kota Bekasi per-hari adalah 1,714 ton/hari. Untuk mengelola sampah yang jumlahnya tiap tahun semakin bertambah, maka Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan strategi pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan strategi daerah (Jakstrada) pengelolaan sampah Kota Bekasi.

Jumlah sampah yang terangkut ke TPA sebesar 396.862.320 kg dalam setahun atau sekitar 1.596 ton/hari. Dari perhitungan tersebut capaian kinerja yang diperoleh adalah 63,4 % dari target 74% yang telah ditetapkan atau 82% capaian kinerja. Seperti yang telah dijelaskan, kendala yang dihadapi dalam pelayanan pengangkutan sampah adalah kurang maksimalnya kendaraan operasional dalam melaksanakan layanan, kurangnya jumlah armada yang beroperasi karena beberapa kendaraan butuh perbaikan dan keterbatasan anggaran sehingga mempengaruhi jumlah BBM.

Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pembinaan terhadap beberapa kelompok masyarakat peduli lingkungan seperti Bank Sampah, Gerakan Peduli Lingkungan (GPL), Sekolah Berwawasan Lingkungan, Komunitas Peduli Cileungsi dan Cikeas (KP2C), Aliansi masyarakat pecinta lingkungan hidup dan B3 Indonesia (Amphibi), Relawan Adipura Bermartabat (RAB), Centro Komunitas Kegiatan Pecinta Alam (Cekakpala), Hijau Lestari Indonesia. Bank Sampah merupakan kelompok masyarakat yang melakukan aktifitas pengurangan dan pemanfaatan sampah melalui 3R. Kegiatan pengurangan sampah dilakukan dengan mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali menjadi barang bernilai jual, misalnya kemasan bekas pewangi pakaian dijadikan handbag, tempat tisu dan lainnya. Dari jumlah Bank sampah yang terbentuk yaitu 280 Bank Sampah, tidak semua Bank Sampah berperan secara aktif bahkan 35 Bank Sampah dianggap "mati suri". Sejak terbentuknya Bank Sampah, Dinas

Lingkungan Hidup melakukan pembinaan terhadap bank-bank sampah yang dianggap pasif ataupun mari suri, pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau dan mampu secara mandiri mengelola sampah di lingkungan sekitarnya, dan pada tahun 2019, Bank Sampah telah berhasil terbina dan bertambah sebanyak 50 kelompok Bank Sampah.

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian kinerja IKLH sebesar 97%, hal ini disebabkan nilai IKU dan IKTL belum mencapai nilai diatas rata-rata di setiap indeksinya. Di karenakan Dari 50 titik lokasi pengujian kualitas air sungai, pada periode 1 terdapat 4 titik lokasi yang tercemar berat, walaupun pada pengujian periode 2 nilai uji di 4 titik tersebut telah tercemar ringan akan tetapi masih terdapat 1 titik lokasi yg tercemar berat. Walaupun secara keseluruhan nilai pengujian masih dalam kondisi baik, namun beberapa titik lokasi yang tercemar berat mengindikasikan adanya (1) aktifitas usaha/kegiatan yang telah mencemari air sungai dengan membuang limbahnya langsung ke sungai tanpa melakukan proses filter yaitu melalui instalasi pembuangan air limbah (IPAL), (2) aktifitas air limbah domestik dari kegiatan pemukiman, perkantoran, perniagaan, restoran, apartemen, atau hunian lainnya, (3) titik lokasi yang bersinggungan langsung dengan perbatasan bogor, sehingga limbah yang berasal dari hilir tidak dapat dibendung, dan (4) terdapat titik lokasi yang letaknya bersebelahan dengan tempat pembuangan akhir sampah sehingga beresiko timbunan sampah akan rawan longsor dan masuk ke sungai.

3. Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan yang susah dimengerti masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengujian kualitas udara ambien setiap tahunnya untuk mengetahui kualitas udara Kota Bekasi dan melakukan monitoring serta evaluasi sebagai upaya pencegahan atas pencemaran udara. nilai indeks kualitas udara Kota Bekasi adalah 78,47 dengan kategori "sedang.

4. Indeks Kualitas Air

Berdasarkan hasil penghitungan normalisasi nilai indeks pencemar maka diketahui nilai indeks kualitas air (IKA) Kota Bekasi adalah 50,8 dengan kriteria sedang atau kelas III.

5. Presentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Tahun 2019, DLH menetapkan target pembinaan sebanyak 200 perusahaan yang akan mengajukan ijin usaha/kegiatan, namun baru 30 usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi ijin lingkungan (DPLH).

Selain 30 dokumen DPLH, ada 157 perusahaan yang tercatat telah mengajukan dokumen untuk KA-ANDAL, AMDAL, DELH, dan UKL – UPL. Terkait

dengan ijin lingkungan, DLH berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), karena kewenangan atas pemberian ijin usaha/kegiatan merupakan tupoksi dari DPMPTSP sedangkan DLH hanya memberikan rekom ijin lingkungan sesuai peraturan perundangan terkait lingkungan hidup.

6. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang memiliki TPS limbah B3

TPS limbah B3 dibangun untuk meminimalisir munculnya resiko bahaya yang dapat menimbulkan dampak pada manusia dan lingkungan sekitar. Bangunnya juga disesuaikan dengan jenis bahan yang akan disimpan. Dari 100 titik lokasi usaha/kegiatan hanya 45% yang ditargetkan untuk dibangun lokasi TPS limbah B3, namun baru 34 titik lokasi usaha/kegiatan yang diketahui berpotensi limbah B3.

7. Persentase penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang permasalahan lingkungan

Tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup menerima pengaduan sebanyak 23 kasus terkait pencemaran air dan sampah. Pengaduan ini diterima oleh sekretariat Unit Reaksi Cepat (URC) untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Tim URC ke titik lokasi pengaduan. Tim URC Dinas Lingkungan Hidup beranggotakan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Pengawas Lapangan, Kepolisian dan Satpol PP. Tim URC akan segera mengkonfirmasi kebenaran informasi yang telah diadukan dan melakukan penyelidikan atas laporan pengaduan. Hasil penyelidikan akan disampaikan kepada Sekretariat URC dan Kepala Dinas LH untuk kemudian diproses penanganan selanjutnya. Kendala yang dihadapi kegiatan ini adalah kurangnya sumber daya manusia khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) sehingga pada proses penyelesaian penanganan pengaduan masih harus dilakukan di tingkat Provinsi..

8. Jumlah Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati / Taman KEHATI

Taman Keanekaragaman Hayati adalah suatu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati local diluar kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi in-situ dan/atau ex-situ, khususnya bagi tumbuhan yang penyerbukan dan/atau pemencaran bijinya harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan komposisi vegetasinya dapat mendukung kelestarian satwa penyerbuk dan pemencar biji. Pembangunan Taman KEHATI dijadikan salah satu indikator program sebagai upaya konservasi keanekaragaman hayati Kota Bekasi.

Target pembangunannya dilaksanakan pada tahun 2023, karena berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati, pembangunannya membutuhkan proses yang cukup lama, karena adanya kebutuhan lahan dan penetapan lahan oleh Pemerintah Daerah. Ketersediaan lahan menjadi kendala yang cukup signifikan, karena Dinas Lingkungan Hidup membutuhkan lahan yang cukup luas, bukan hanya dimanfaatkan untuk pembangunan Taman KEHATI tetapi juga kebutuhan untuk perluasan lahan tempat pembuangan akhir. Namun, Dinas Lingkungan Hidup berusaha untuk tetap melakukan tahapan perencanaan dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait.

9. Jumlah laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)

Kegiatan inventarisasi GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapannya termasuk sumpanan karbon. Pelaksanaan inventarisasi GRK merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Pelaksanaan inventarisasi GRK yang dibutuhkan melibatkan peran stakeholder lainnya. Data dan informasi yang diperlukan terkait data di sektor limbah, sektor pertanian, sektor energi, sektor IPPU dan sektor kehutanan. Tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat melaksanakan kegiatan laporan inventarisasi GRK karena masih minimnya data yang dibutuhkan, misalnya sektor pertanian, sektor kehutanan dan sektor lainnya.

1.10 ADMINISTRASI KEPEDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Ada tujuh indikator untuk urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu: Rasio penduduk ber-KTP, Rasio bayi berakte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah, Ketersediaan database kependudukan skala provinsi, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Cakupan penerbitan akta kelahiran.

Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bekasi tahun 2019 sebesar 80,50 %, dengan indeks kepuasan masyarakat sebesar 79,76 %. Untuk lebih jelasnya mengenai indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.20
Beberapa Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72.45%	80,50%	111,11%
Indeks Kepuasan Masyarakat	75	79,76	106,34%
Nilai Evaluasi AKIP	B	BB (70,58 %)	106,34 %
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

1.11 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Ada empat indikator untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, yaitu: Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, Persentase LPM aktif, dan Persentase LPM Berprestasi. Kota Bekasi menempatkan urusan ini di Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.

Belum adanya data terkait indikator urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di atas, maka tidak dapat didiskripsikan di sini.

1.12 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Untuk menjalankan urusan penduduk dan keluarga berencana, ada beberapa indikator penting yang harus dicapai. Salah satu indikator tersebut adalah infrastruktur dan suprastruktur pengendalian penduduk dan KB. Tabel berikut ini akan menguraikan capaian kinerja urusan ini berdasarkan indikatornya. Pada kurun waktu 2013-2017 belum ada Perda/Perkada yang mengatur tentang pengendalian penduduk, demikian juga karena belum tersedia data profil penduduk maka belum bisa digunakan oleh OPD lain dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Urusan pengendalian penduduk dan KB telah diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah, ada pembagian peran antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah menyusun *grand design* (rancangan induk) Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2011-2035 tingkat nasional telah selesai dan diluncurkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemendekesra) pada bulan Desember 2012. GDPK ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 27 Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Tim Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035.

Selanjutnya pemerintah provinsi dan kab/kota menyusun rancangan induk pengendalian penduduk sesuai pembagian kewenangan di atas. Sejauh ini Kota Bekasi telah menyusun dokumen tersebut dan telah disosialisasikan ke seluruh OPD, sehingga dianggap seluruh OPD telah memanfaatkan dokumen tersebut dalam perencanaan pembangunan. Kerjasama pendidikan formal dan informal tentang kependudukan belum dilaksanakan.

Tabel 1.21
Beberapa Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Presentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	25,5	30,65	120,11
Presentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	24,95	21,62	61,65
Unmet Need (wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan tetapi tidak menggunakan alat/cata kontrasepsi)	6,30	9,43	149

Sumber: Dinas PPKB, 2019

Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern adalah perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif MKJP (peserta KB yang saat ini menggunakan MKJP) dibandingkan terhadap Total seluruh peserta KB aktif pada periode yang sama yang dinyatakan dalam persentase.

Dalam menjalankan program KKBPK, salah satu indikator keberhasilannya adalah peningkatan persentase peserta KB Aktif MKJP. Tahun 2019 target ini dapat dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk Kota Bekasi. Dari target persentase untuk peserta KB aktif MKJP sebesar 25,5 persen, berdasarkan data SKAP 2019 peserta KB aktif MKJP sudah mencapai 30,65%. Jika dibandingkan dengan tahun

2018, ada penurunan realisasi persentase peserta KB aktif MKJP dibandingkan target kinerja, yaitu dari 123,42 persen di tahun 2018 menjadi 120,11 persen di tahun 2019. Di tahun 2018, dari target 24,62 persen Kota Bekasi mampu mencapai 29,62 persen sedangkan di tahun 2019 dari target 25,5 persen Jawa Barat tercapai 30,65 persen.

Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (Tingkat Putus Pakai) kontrasepsi didefinisikan sebagai proporsi pemakai alat atau cara KB yang berhenti memakai alat atau cara tersebut dalam waktu satu tahun setelah mulai menggunakan alat/cara KB. Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi diharapkan dapat serendah mungkin. Target Persentase tingkat putus pakai Kontrasepsi pada Tahun 2019 ditetapkan sebesar 34,95 persen.

Capaian indikator kinerja nasional berdasarkan SKAP 2019 adalah 29 persen. Persentase yang digunakan adalah angka capaian nasional, karena memang belum ada sumber data yang menghitung angka ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi sampai ke tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, ada penurunan persentase realisasi dibandingkan target kinerja, yaitu dari 162,55 persen di tahun 2018 menjadi 161,65, persen di tahun 2019. Di tahun 2018, dari target 34,95 persen, Kota Bekasi mampu mencapai 21,5 persen sedangkan di tahun 2019 dari target 34,95 persen mampu mencapai 21,62 persen.

Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (Tingkat Putus Pakai) kontrasepsi didefinisikan sebagai proporsi pemakai alat atau cara KB yang berhenti memakai alat atau cara tersebut dalam waktu satu tahun setelah mulai menggunakan alat/cara KB. Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi diharapkan dapat serendah mungkin. Target Persentase tingkat putus pakai Kontrasepsi pada Tahun 2019 ditetapkan sebesar 34,95 persen.

Capaian indikator kinerja nasional berdasarkan SKAP 2019 adalah 29 persen. Persentase yang digunakan adalah angka capaian nasional, karena memang belum ada sumber data yang menghitung angka ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi sampai ke tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, ada penurunan persentase realisasi dibandingkan target kinerja, yaitu dari 162,55 persen di tahun 2018 menjadi 161,65 ,persen di tahun 2019. Di tahun 2018, dari target 34,95 persen, Kota Bekasi mampu mencapai 21,5 persen sedangkan di tahun 2019 dari target 34,95 persen mampu mencapai 21,62 persen.

Tingginya angka Unmet Need KB dalam permasalahan program KB mengindikasikan rendahnya prevalensi kontrasepsi yang berakibat tingginya angka kelahiran dan memicu terjadi ledakan penduduk. Hasil 2019 menunjukkan bahwa angka unmet need di Kota Bekasi adalah 9,43 persen, sudah melampaui target Unmet Need di Jawa Barat 13,3 persen dan yang ditetapkan BKKBN sebesar 10,15 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, ada penurunan persentase realisasi dibandingkan target kinerja, yaitu dari 61,90 persen di tahun 2018 menjadi 50,32 persen di tahun 2019. Di tahun 2018, dari target 6,3 persen, Kota Bekasi baru mampu mencapai 8,7 persen sedangkan di tahun 2019 dari target 6,3 persen baru mencapai 9,43 persen

1.13 PERHUBUNGAN

Komponen utama pembentuk sistem transportasi makro di Kota Bekasi lainnya adalah sistem jaringan transportasi. Sistem jaringan transportasi di Kota Bekasi seluruhnya merupakan sistem jaringan transportasi darat, seperti: jaringan jalan dan jalan kereta api. Sampai dengan Tahun 2016, panjang jalan di Kota Bekasi mencapai 3.193,037 km dengan rincian 132,182 km merupakan jalan primer dan 1.527,355 km jalan sekunder. Sedangkan jalan lingkungan yang terdapat di Kota Bekasi tahun 2012 adalah 1.533,50 km. Tingkat pertumbuhan dari tahun 2012 ke tahun 2013 pertumbuhannya hanya mencapai 800 m dalam 1 tahun atau sebesar 0.06% per tahun.

Pola perkembangan yang relatif normal terjadi dari tahun 2008-2011 yakni rata-rata 3 % per tahun atau sekitar 21 km per tahun. Kapasitas ruas jalan didefinisikan sebagai arus lalu lintas maksimum yang dapat melintas dengan stabil pada suatu potongan melintang jalan pada keadaan (geometrik, pemisahan arah, komposisi lalu lintas, lingkungan) tertentu.

Untuk jalan dua lajur dua arah, kapasitas ditentukan untuk arus dua arah (kombinasi dua arah), tetapi untuk jalan dengan banyak lajur, arus dipisahkan per arah dan kapasitas ditentukan per lajur. Kapasitas merupakan ukuran kinerja, pada kondisi yang bervariasi dan dapat diterapkan pada suatu lokasi tertentu atau pada suatu jaringan jalan yang sangat kompleks. Berhubung beragamnya geometrik jalan, kendaraan, pengendara dan kondisi lingkungan serta sifat saling keterkaitannya, kapasitas bervariasi menurut kondisi lingkungan.

Tabel 1.22
Beberapa Indikator Urusan Dinas Perhubungan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase titik kemacetan yang teratasi	15 %		
Persentase wilayah yang tersambung/terlayani sarana transportasi	7%		
Persentase angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan	75 %		
Persentase penyediaan sarana prasarana pendukung transportasi	5%		
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%		
Persentase pengaduan yang ditinggalkan/juti	100%		
Nilai Evaluasi (AKIP)	BB		

Sumber: Dinas Perhubungan 2019

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 Dinas Perhubungan Kota Bekasi dengan Indikator sasaran sebagai berikut :

1. Indikator yang sudah tidak dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu :

Persentase wilayah yang tersambung/terlayani sarana transportasi pada tahun 2017 telah tercapai sesuai dengan target sebesar 83% dengan rasio capaian sebesar 100% dan pada tahun 2018 indikator tersebut tidak dipergunakan lagi karena tidak ada kegiatan yang mengacu kepada indikator tersebut dan sudah terdapat 2 (dua) lintasan/koridor angkutan

umum massal transpatriot yang terintegrasi/tersambung dengan angkutan umum lainnya.

2. Indikator yang telah mencapai sesuai dengan target sehingga rasio pencapaian kinerja 100% sebagai berikut :
 - a. Persentase titik kemacetan yang teratasi, target sebesar 74% (3 titik/simpang yaitu simpang bulak kapal, simpang bulan-bulan dan simpang tol timur) tercapai sesuai target yang harus dicapai yaitu sebesar 74% (3 titik/simpang), sehingga rasio capaian kinerja sebesar 100%.
 - b. Persentase prasarana dan sarana lalu lintas yang berfungsi baik target sebesar 91% tercapai sesuai target yang harus dicapai yaitu sebesar 91%, sehingga rasio capaian kinerja sebesar 100%.
 - c. Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum di jalanan sebesar 17,19% tercapai sesuai target yang harus dicapai yaitu sebesar 17,19%, sehingga rasio capaian kinerja sebesar 100%.
 - d. Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas target sebesar 16,26% tercapai sesuai target yang harus dicapai yaitu sebesar 16,26%, sehingga rasio capaian kinerja sebesar 100%
 - e. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) target 80 tercapai sesuai target yang harus dicapai yaitu sebesar 80, sehingga rasio capaian kinerja sebesar 100%. - Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar hanya tercapai sebesar B, sehingga rasio capaian kinerja sebesar 60%
 - f. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti target sebesar 100% tercapai sesuai target yang harus dicapai yaitu sebesar 100%, sehingga rasio capaian kinerja sebesar 100%.tidak dilaksanakan pada tahun 2018
3. Indikator yang realisasinya meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :
 - a. Persentase pelayanan angkutan yang baik, target pada tahun 2017 sebesar 45% hanya tercapai sebesar 40% dengan rasio capaian kinerja sebesar 89% sedangkan pada tahun 2018 target pada indikator sebesar 47% tercapai sesuai target yang harus dicapai yaitu sebesar 47%, sehingga rasio capaian kinerja sebesar 100%, hal tersebut dikarenakan sudah beroperasinya angkutan umum massal (transpatriot) untuk 2 (dua) lintasan yaitu Harapan Indah
 - b. Terminal Bekasi dan Terminal Bekasi – Harapan Indah.
 - c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), target pada tahun 2017 80 hanya tercapai 78,30 dengan rasio capaian kinerja sebesar 99% sedangkan pada tahun 2018 target 80 tercapai sesuai target yang harus dicapai yaitu sebesar 80, sehingga rasio capaian kinerja sebesar 100%, hal tersebut dikarenakan peningkatan kualitas layanan pada pengujian kendaraan bermotor tidak hanya dilakukan pada kantor pengujian saja melainkan juga dilakukan melalui pengujian kendaraan bermotor keliling.

1.14 KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Urusan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian di Kota Bekasi dijalankan oleh Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, dengan indikator di sepanjang tahun 2019 digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.23
Beberapa Indikator Urusan Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Layanan Digital government	9%	9%	100%
Jumlah layanan digital government yang di integrasikan	9%	5%	55,56%
Cakupan Unit Kerja Yang Terkoneksi Dengan Jaringan Primer	9%	100%	111%
Cakupan Layanan Informasi Pemerintahan Daerah Kepada Publik	34.5%	31.8%	92.1%
Persentase Tingkat Layanan Infrastruktur Pusat Data	94%	99%	105%

Sumber: Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian, Tahun 2019

Adapun Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Indeks Layanan Pemerintah/Publik Berbasis Digital merupakan indikator baru sesuai dengan Renstra Diskominfostandi 2018-2023 sehingga belum ada perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya.

target indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2019 sebesar 2,00 dengan realisasi 1,83 maka capaian kinerja tahun 2019 atas indeks layanan Pemerintahan Publik Berbasis Digital sebesar 91,5%, maka capaian atas indeks layanan Informasi dan Komunikasi Publik belum sepenuhnya tercapai. Faktor yang menjadi kendala keberhasilan pencapaian Kinerja Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu kurangnya sarana prasarana untuk publikasi pada platform media yang telah direncanakan dan Kurangnya SDM yang berkompetensi.

1.15 PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

1. Potensi Wisata Alam

- Curug Parigi

Curug Parigi berlokasi di Kampung Parigi, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang. Air terjun ini memiliki tinggi sekitar dua meter. Aliran sungai yang mengalir dari atas ke bawah membuatnya tampak seperti Air Terjun Niagara versi mini yang tidak kalah indah. Asal usul Curug Parigi adalah bentukan dari galian batu untuk Jalan Raya Narogong.

Daya tarik wisata yang berada di Kawasan Curug Parigi yaitu berupa air terjun yang merupakan bekas galian batu. Curug Parigi disebut-disebut sebagai niagara kecil karena landscape dari Curug Parigi menyerupai Air Terjun Niagara. Aktivitas wisata wisata yang dapat dilakukan di kawasan Curug Parigi yaitu berenang, fotografi, sight seeing, piknik dan bersepeda. Saat ini pembangunan kawasan Curug Parigi belum maksimal sehingga belum banyak aktivitas wisata yang dapat dilakukan. Secara keindahan

alam Curug Parigi masih cukup alami sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke Curug Parigi untuk berlibur.

Fasilitas yang tersedia di kawasan Curug Parigi masih sangat minim karena pengembangan kawasan masih belum optimal baik dari fasilitas kesehatan untuk keamanan pengunjung masih sangat kurang. Belum terdapatnya fasilitas toilet yang layak di kawasan Curug Parigi. Sehingga perlunya sebuah pengembangan fasilitas untuk menambah kenyamanan pengunjung yang berlibur ke kawasan Curug Parigi.

Aksesibilitas merupakan salah satu unsur produk wisata yang penting dalam pengembangan suatu daya tarik wisata, kemudahan pencapaian dapat menjadi stimulus bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu objek wisata. Kawasan Curug Parigi termasuk mudah dalam pencapaiannya, karena berlokasi dekat dengan pemukiman penduduk. Curug Parigi memiliki jarak 10 km dari pusat kota. Akses dari jalan utama ke kawasan Curug Parigi melalui gang kecil dan ground cover masih berupa tanah dan cukup terjal sehingga bila tergenang air akan sedikit licin. Alat transportasi menuju kawasan Curug Parigi dapat menggunakan transportasi umum dan juga dapat menggunakan kendaraan pribadi.

- Situ Rawa Gede Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu
- Situ Rawa Pulo Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna
- Danau Duta Harapan Kelurahan Baru Kecamatan Bekasi Utara
- Hutan Bambu Kota Bekasi Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur
- Wisata Air di Kalimalang
- Hutan Kota Bekasi

Terletak di wilayah Margahayu, Bekasi Selatan, tepatnya berada depan mesjid Agung Al-Barkah. Hutan kota di buka sejak akhir tahun 2012, hutan kota ini sangat ramai di kunjungi, terutama pada hari-hari libur dan akhir pekan. Pemerintah setempat juga menambah daya tarik hutan kota dengan menangkan burung merpati dan burung kutilang.

2. Potensi Wisata Budaya

- **Vihara Dharma Jaya**

Nggak hanya obyek wisata alam yang menjadi favorit bagi *travelers* di Bekasi, tapi juga bangunan-bangunan bersejarah dan autentik. Salah satu bangunan unik yang paling terkenal yaitu Vihara Dharma Jaya yang berada di jalan Kalong, Rawa Lumbu. Selain sebagai rumah ibadah bagi pemeluk agama Buddha, Vihara Dharma Jaya ini kerap dijadikan obyek wisata untuk berfoto. Buat yang hobi unggah foto di media sosial, kamu harus sempatkan waktu untuk *hunting* foto di vihara ini.

3. Potensi Wisata Buatan

- **Transera Waterpark**

Siapa sangka ternyata di Bekasi terdapat cukup banyak *waterpark* yang banyak diminati pengunjung. Kalau kamu sudah pernah cobain

beberapa *waterpark* di atas, jangan sampai melewatkan keceriaan bermain air di Transera Waterpark, Kota Harapan Indah.

Transera Waterpark terdiri dari 23 wahana yang sangat asyik, yang paling menjadi favorit, sih, wahana *wet park* dan *dry park*. Kamu bisa nikmati wahana kolam arus, kolam anak, hingga kolam ombak. Jika sudah puas berenang, nikmati juga keseruan bermain di rumah hantu, *lampion park*, dan wahana seluncur.

Buat kamu yang naik kendaraan umum, kamu bisa menggunakan *shuttle bus* gratis yang disediakan oleh pihak Transera Waterpark dari gerbang utama Kota Harapan Indah. Harga tiket masuk Transera Waterpark yaitu Rp 85 ribu* (hari biasa) dan Rp 125 ribu* (akhir pekan dan hari libur nasional). Untuk anak-anak dengan tinggi di bawah 80 cm.

- **Tempat Wisata Belanja dan Pusat Perbelanjaan**

Berupa Mal Metropolitan, Summarecon Mal Bekasi, Grand Metropolitan Mall, Mega Bekasi Hypermall, Bekasi Square, Bekasi Junction, Plaza Pondok Gede, Gran Mall Bekasi, Bekasi Trade Center, Citra Gran Mall, Blue Oasis City dan Grand Galaxi Park.

Kota Bekasi merupakan salah satu destinasi wisata di Provinsi Jawa Barat yang memiliki karakter sebagai destinasi wisata perkotaan yang ditopang oleh ketersediaan infrastruktur dan variasi produk wisata kota (*urban tourism*), seperti wisata: wisata keluarga, wisata belanja, wisata sejarah, wisata pendidikan dan budaya serta wisata industri. Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bekasi dalam beberapa tahun terakhir jumlah wisatawan mengalami peningkatan, jumlah kunjungan wisata di Kota Bekasi mencapai 852.353 wisatawan pada tahun 2017, meningkat cukup besar dibandingkan tahun 2013 (141.229 wisatawan).

Namun kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Bekasi tergolong sangat kecil, hanya 0,02 % dari PAD Kota atau senilai Rp.263.899.673,- pada tahun 2016 dan mengalami peningkatan ditahun 2017 dengan nilai pendapatan dari sektor pariwisata mencapai Rp.308.437.146. Tabel berikut ini juga menunjukkan bahwa dalam kurun 2013-2017 lama kunjungan wisatawan di Kota Bekasi hanya 1-2 hari. Hal ini diduga karena obyek wisata yang di sajikan terutama adalah wisata perkotaan (*urban tourism*) dan belum ditunjang dengan jenis wisata yang lain. Dengan pendeknya lama kunjungan wisatawan mempengaruhi pula pada PAD sektor pariwisata.

Tabel 1.24
Beberapa Indikator Urusan Pariwisata

Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kunjungan Wisata se-Kab/Kota	141,229	150,976	160,489	609,187	852,353
Lama kunjungan Wisata	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
PAD sektor pariwisata (%)	0	0	0	0,0156	0,0175
PAD sektor pariwisata				263,899,672	308,437,146
Total PAD				1,686,660,486,524	1,766,289,864,701

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2018

Untuk urusan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.25
Beberapa Indikator Urusan Kebudayaan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kawasan wisata yang dikembangkan	20 %	10%	50%
Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	2 %	18,05%	900%
Rata rata lama menginap : standar lama menginap	2 malam	1,004 malam	50,2 %
Persentase kesenian budaya yang menarik wisatawan	75 %	75%	100%
Nilai Evaluasi Akip	64 (B)	71,88 (BB)	112,31%
Indeks Kepuasan Masyarakat	84 (Baik)	83,975 82,875	99,3%

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2019

Indikator dengan capaian meningkat tajam adalah : Persentase peningkatan kunjungan wisatawan dari target 2 % realisasi 18,05 %, indikator dengan capaian kinerja 100% adalah Persentase kesenian budaya yang menarik wisatawan dan indikator dengan capaian kurang dari 100 % adalah Persentase kawasan wisata yang dikembangkan dan Rata-rata lama menginap. Untuk indikator Nilai evaluasi Akip ada peningkatan yaitu pada tahun 2018 nilai 61,65 (B) meningkat pada tahun 2019 dengan nilai 71,88 (BB) dan indikator Indeks kepuasan masyarakat kalau tahun 2018 2 urusan menjadi satu sedangkan tahun 2019 terpisah per urusan.

Persentase kawasan wisata yang dikembangkan dengan target kinerja 20 % dengan cara perhitungan indikator kinerja adalah : Jumlah kawasan wisata yang akan lakukan penataan dan pengembangan pada rencana strategis 2018 – 2023 adalah 5 kawasan wisata, dan target pertahunnya adalah 20% atau 1 (satu) kawasan. Penetapan indikator kawasan wisata yang dikembangkan merupakan tindak lanjut isu strategis pariwisata pada rencana strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2013-2018 yaitu belum adanya objek wisata alam, dan belum terealisasinya pembangunan kawasan wisata Situ Rawa Gede dan Situ Rawa Pulo sedangkan Fisibility Study (FS) nya sudah dibuat pada tahun 2010. Pembangunan kawasan wisata tidak dapat teralisasi dengan berbagai kendala antara lain : Kawasan wisata Situ Rawa Gede maupun Situ Rawa Pulo adalah milik dari Balai Besar Cisadane sehingga memerlukan pendekatan yang intens dan memerlukan waktu, tidak tersedianya anggaran dari APBD Kota Bekasi, akses jalan menuju lokasi kawasan wisata milik pribadi warga. Karena pembangunan kawasan wisata sulit dilaksanakan untuk memenuhi target pembangunan kawasan wisata dengan target 2 kawasan maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengambil langkah untuk membangun kawasan wisata buatan yaitu kawasan wisata kuliner tetapi walaupun target pada rencana strategis tahun 2013-2018 tercapai 2 kawasan, untuk pembangunan kawasan wisata alam harus ditindaklanjuti karena untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Indikator ini ditetapkan target sebesar 2 % dalam setahun. Cara perhitungan indikator kinerja adalah : Dihitung dari kunjungan tamu hotel yang menginap dengan target peningkatan setiap tahunnya 2 % Karena Kota Bekasi belum

mempunyai destinasi wisata alam/buatan yang siap dikunjungi wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemempnan RB) maka perhitungan indikator peningkatan kunjungan wisatawan diambil dari data tamu kunjungan hotel. Kondisi awal rencana strategis adalah 907.729 orang berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2018 (sumber data Lakip tahun 2018) dengan peningkatan 2 % maka target jumlah kunjungan wisatawan tahun 2019 adalah : 925.883 orang.

Untuk target Indikator Sasaran Rata-rata Lama Menginap, Pemerintah Kota Bekasi tahun 2019 menargetkan sebanyak 2 malam. Jumlah tamu kunjungan hotel cek in dibagi tamu hotel yang cek out per/hari diambil rata2 perbulan, kemudian ditotal pertahun sehingga didapatkan rata – rata per tahun.

1.16 PERTANIAN DAN PERIKANAN

Ada enam indikator untuk urusan pertanian, yaitu: Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB, Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB, Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB, Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, dan Cakupan bina kelompok petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.26
Beberapa Indikator Pertanian, dan Perikanan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan jumlah produksi komoditas pertanian	17,512 Ton	17,512 Ton	100%
Jumlah produksi olahan hasil pertanian	6,34 Ton/Ha	6,34 Ton/Ha	100%
Jumlah produksi perikanan	1949	1674	85,89%
Jumlah produksi ikan hias	22.056.836	20.623.141	93,49%
Peningkatan pendapatan pelaku perikanan	10%	7.69%	76,90%
Jumlah produksi olahan hasil perikanan	86.882,46 ton	87.135 ton	100,29%
Jumlah produksi peternakan	15.728 ton	8.675 ton	55,15%
Jumlah produksi olahan hasil peternakan	3.653,88	4.285 ton	117,27%
Penurunan kejadian penyakit hewan menular	0 kasus	0 kasus	100%
Unit usaha peternakan, kesehatan hewan dan produk hewan yang bersertifikat teknis	69 jenis	70 jeni	101,44%
Persentase produk PAH yang Asuh	43,35%	42,5%	98,03%

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan, 2019

1.17 PERIDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Industri adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan pengembangan, perbaikan, pengetahuan, peralatan, energi dan materi. Di Kota Bekasi, sektor industri merupakan kontributor terbesar terhadap perekonomian Kota Bekasi

Saat ini jumlah industri besar sedang di Kota Bekasi ada sebanyak 152 perusahaan yang tersebar di semua kecamatan kecuali Kecamatan Pondok Melati dan Pondok Gede (berdasarkan direktori IBS- BPS Kota Bekasi). Keberadaan industri besar sedang di Kota Bekasi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 41.694 orang.

Bila diklasifikasikan dengan KBLI 2009 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), maka industri makanan merupakan jenis industri terbanyak di Kota Bekasi. Selain itu, industri makanan juga menyerap tenaga kerja terbesar. dari 18 perusahaan yang termasuk dalam klasifikasi industri makanan mampu menyerap 7.889 tenaga kerja, sehingga rata-rata perusahaan industri makanan tersebut menyerap 438 tenaga kerja.

Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah industri yang berada di Kota Bekasi tahun 2015 mengalami penurunan dari 154 perusahaan menjadi 152 perusahaan. Berkurangnya 2 perusahaan industri besar sedang tahun 2015 menyebabkan turunnya jumlah tenaga kerja dari 41.751 orang menjadi 41.694 orang.

Ada satu indikator untuk urusan perindustrian, yaitu: Cakupan bina kelompok pengrajin. Belum adanya data terkait indikator urusan perindustrian di atas, maka tidak dapat didiskripsikan di sini. Ada dua indikator untuk urusan perdagangan, yaitu: ekspor bersih perdagangan yang merupakan selisih dari total ekspor dan total impor, serta Cakupan bina kelompok usaha/pedagang informal. Untuk lebih jelasnya dapat di liha pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.27
Beberapa Indikator Perindustrian dan Perdagangan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Industri Kreatif	6	6,01	100%
Persentase pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	6	8.84	147.33%

Sumber: Disdagperin, 2019

persentase pertumbuhan PDRB sektor industri dengan target peningkatan sebesar 6% per tahun. Target pada indikator sasaran tersebut tercapai dengan realisasi pertumbuhan sebesar 6,01% dari tahun dasar RPJMD. Hal ini berarti capaian kinerja mencapai 100%. Pertumbuhan sebesar 6,01% tersebut merupakan hasil perbandingan PDRB sektor industri pada tahun 2019 yang menyumbang sebesar Rp 32.672.530 juta, dengan PDRB sektor industri pada tahun dasar RPJMD sebesar Rp 30.819.260 juta. Apabila dibandingkan dengan capaian nasional, pertumbuhan PDRB sektor industri Kota Bekasi jauh diatas pertumbuhan PDB sektor industri nasional, dimana PDB sektor industri nasional hanya mencatatkan angka pertumbuhan sebesar 5,84% dengan angka sebesar Rp 3.119,617,3 miliar dimana pada tahun sebelumnya PDB sektor industri nasional mencatatkan angka sebesar Rp 2.947.450,8 miliar. Adapun sektor industri di Kota Bekasi menyumbang sekitar 0,971% terhadap PDB sektor industri nasional. Angka ini cukup besar jika melihat rata-rata kabupaten/kota di Indonesia menyumbang sebesar 0,195%. Penghitungan didasarkan pada nilai PDB sektor industri nasional dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia sebanyak 514 wilayah sehingga dicapai rata-rata besaran PDRB sektor industri sebesar Rp 5.734.436 juta per kabupaten/kota, jauh dibawah PDRB sektor industri di Kota Bekasi sebesar Rp 32.672.530 juta. Seluruh data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Target pada indikator sasaran tersebut tercapai dengan realisasi pertumbuhan sebesar 8,12% dari tahun dasar RPJMD. Hal ini berarti capaian kinerja mencapai 147,33%. Pertumbuhan sebesar 8,12% tersebut merupakan hasil perbandingan PDRB sektor perdagangan pada tahun 2019 yang menyumbang sebesar Rp 22.143.540 juta, dengan PDRB sektor perdagangan pada tahun dasar RPJMD

sebesar Rp 20.480.060 juta. Data tersebut seluruhnya diambil dari BPS Kota Bekasi. Adapun target dan capaian pada tahun sebelumnya tidak dicantumkan karena tahun 2019 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan RPJMD dan Renstra periode.

1.18 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Penunjang urusan Perencanaan Pembangunan mempunyai peran yang sangat strategis, karena seluruh aktivitas pembangunan direncanakan, dimonitor, dan dievaluasi melalui urusan perencanaan pembangunan ini. OPD yang menjalankan urusan ini adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi. Tabel berikut ini menjelaskan tentang indikator-indikator perencanaan pembangunan.

Tabel 1.28
Beberapa Indikator Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan

Nama	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd (%)	96	100	100	105	97
Jumlah program RKPd Tahun berkenaan	103	113	130	126	115
Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	107	113	130	120	119
Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD (%)	100	100	95	92	100
Jumlah program APBD Tahun berkenaan	103	113	123	116	115
Jumlah program RKPd yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	103	113	130	126	115
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%)	100	100	100	100	100
Kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang	22	22	22	22	22
Jumlah Program yang ada di Dokumen RTRW	22	22	22	22	22

Sumber: Bappeda Kota Bekasi, 2018

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd berkisar di antara 96-105%, artinya jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan bisa lebih banyak daripada jumlah program RKPd tahun berkenaan (tahun 2013: 107 vs 103 program, dan tahun 2017: 119 vs 115 program). Jumlah program RPJMD lebih sedikit daripada RKPd (tahun 2016: 120 vs 126 program), dan tahun 2014 dan 2015 program RPJMD dan RKPd sama banyak. Penjabaran Konsistensi Program RKPd ke dalam APBD dalam kurun waktu 2013-2017 tercapai 100%, kecuali tahun 2015 dan 2016 yang mencapai 95% dan 92%. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW tahun 2013-2017 mencapai 100%. Angka ini diperoleh dari Kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang dan Jumlah Program yang ada di Dokumen RTRW.